



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dinyatakan Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
- 29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
- 30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan;	Rp1.370.198.448.465,86	
b. belanja;	Rp1.507.041.615.158,67	
defisit		Rp(136.843.166.692,81)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp262.260.776.307,14	
2. pengeluaran	Rp18.000.000.000,00	
3. pembiayaan		Rp244.260.776.307,14
neto		

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp22.137.495.020,14 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.392.335.943.486,00
 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp1.370.198.448.465,86
Rp22.137.495.020,14
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp132.171.890.893,33 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp1.639.213.506.052,00
 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp1.507.041.615.158,67
Rp132.171.890.893,33
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(110.034.395.873,19) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran surplus/defisit Rp(246.877.562.566,00)
 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp(136.843.166.692,81)
Rp(110.034.395.873,19)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp13.469.972.572,11 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp275.730.748.879,25
 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp262.260.776.307,14
Rp13.469.972.572,11
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp18.000.000.000,00
 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp18.000.000.000,00
Rp0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp13.469.972.572,11 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan bersih Rp257.730.748.879,25
 2. realisasi selisih lebih/(kurang) Rp244.260.776.307,14
Rp13.469.972.572,11

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp168.196.735.341,25
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp168.196.735.341,25
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp107.417.609.614,33
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp107.417.609.614,33

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan Rp1.404.760.236.811,95
- b. jumlah beban Rp1.399.193.113.871,93
- c. surplus/(defisit) dari operasi Rp5.567.122.940,02
- d. surplus/(defisit) kegiatan non operasi Rp(10.479.419.877,05)
- e. pos luar biasa Rp0,00
- f. surplus/defisit – LO Rp(4.912.296.937,03)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp2.974.537.461.488,77
b. surplus/defisit LO	Rp(4.912.296.937,03)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp18.858.371.966,06
d. ekuitas akhir	Rp2.988.483.536.517,80

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah asset	Rp3.107.562.211.336,55
b. jumlah kewajiban	Rp119.078.674.818,75
c. jumlah ekuitas	Rp2.988.483.536.517,80

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp168.367.097.170,25
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp122.251.612.218,83
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp(259.094.778.911,64)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp76.064.040.965,89
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp151.420.379,51
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp107.739.391.822,84

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- x. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- y. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Wali Kota Dumai mengatur Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.27.A/2023)

KOTA DUMAI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	22.137.495.020,14	98,41
1.1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
1.1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	-
1.1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-
1.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	(23.492.480.443,14)	113,90
1.1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.125.050.000,00	6.363.880.145,17	8.761.169.854,83	42,08
1.1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
1.1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
1.1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
1.2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
1.2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
1.2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
1.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.440.000,00	18.160.000,00	7.280.000,00	71,38
1.2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
1.2.11.0.00.0.00.02.0000.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	750.000.000,00	717.640.000,00	32.360.000,00	95,69
1.2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
1.2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
1.2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
1.2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-	-	-	-
1.2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	31.000.000.000,00	25.844.794.449,00	5.155.205.551,00	83,37
1.2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
1.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000.000,00	525.197.100,00	474.802.900,00	52,52
1.2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-
1.2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
1.2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
1.2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
1.2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
1.2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-
1.2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
1.2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
1.3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	-	-
1.3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
1.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	25.000.000,00	26.009.600,00	(1.009.600,00)	104,04
1.3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
1.3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-
1.3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
1.3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-
1.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	1.009.950.000,00	681.737.000,00	328.213.000,00	67,50
1.3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
1.3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
1.4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
1.4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
1.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	50.000.000,00	28.950.000,00	21.050.000,00	57,90
1.4.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
1.5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
1.5.01.	PERENCANAAN	-	-	-	-
1.5.02.	KEUANGAN	-	-	-	-
1.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	223.189.745.107,00	228.202.063.148,36	(5.012.318.041,36)	102,25
1.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	951.174.224.428,00	915.311.002.629,19	35.863.221.798,81	96,23
1.5.03.	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-
1.5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
1.5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
1.5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	-
1.6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
1.6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
1.7.	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-
1.7.01.	KECAMATAN	-	-	-	-
1.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-
1.8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	86.009.642.683,97	93,55
2.1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
2.1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	-
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	360.450.184.856,00	326.083.984.482,00	34.366.200.374,00	90,47
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	317.295.639.330,00	290.428.138.136,00	26.867.501.194,00	91,53
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	246.739.771.135,00	229.987.353.709,00	16.752.417.426,00	93,21
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	66.496.968.195,00	59.790.784.427,00	6.706.183.768,00	89,92
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	4.058.900.000,00	650.000.000,00	3.408.900.000,00	16,01
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	43.154.545.526,00	35.655.846.346,00	7.498.699.180,00	82,62
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.01.2.22.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-
2.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	458.105.293.984,00	447.623.317.455,90	10.481.976.528,10	97,71
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	399.054.733.442,00	397.394.867.300,90	1.659.866.141,10	99,58
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	187.192.434.627,00	189.318.561.368,00	(2.126.126.741,00)	101,14
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	211.662.298.815,00	207.876.305.932,90	3.785.992.882,10	98,21
2.1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	59.050.560.542,00	50.228.450.155,00	8.822.110.387,00	85,06
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
2.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	239.807.061.077,00	205.603.703.843,68	34.203.357.233,32	85,74
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA OPERASI	88.279.669.144,00	80.156.674.389,08	8.122.994.754,92	90,80

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Pegawai	9.092.306.995,00	8.312.693.579,00	779.613.416,00	91,43
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Barang dan Jasa	68.228.532.506,00	65.014.675.837,00	3.213.856.669,00	95,29
2.1.03.0.00.2.10.01.	Belanja Hibah	10.958.829.643,00	6.829.304.973,08	4.129.524.669,92	62,32
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA MODAL	151.527.391.933,00	125.447.029.454,60	26.080.362.478,40	82,79
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.03.0.00.2.10.01.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	30.420.926.685,00	29.364.083.743,00	1.056.842.942,00	96,53
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	26.774.046.235,00	25.984.211.443,00	789.834.792,00	97,05
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.851.860.071,00	3.524.583.879,00	327.276.192,00	91,50
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	13.178.186.164,00	12.715.627.564,00	462.558.600,00	96,49
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000,00	9.744.000.000,00	-	100,00
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	3.646.880.450,00	3.379.872.300,00	267.008.150,00	92,68
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.04.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.603.365.028,00	8.795.649.835,00	807.715.193,00	91,59
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	9.564.215.428,00	8.758.432.943,00	805.782.485,00	91,58
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	6.749.746.328,00	5.969.554.432,00	780.191.896,00	88,44
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.814.469.100,00	2.788.878.511,00	25.590.589,00	99,09
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	39.149.600,00	37.216.892,00	1.932.708,00	95,06
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.05.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.370.749.743,00	12.458.100.131,00	3.912.649.612,00	76,10
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	10.116.007.943,00	6.292.407.831,00	3.823.600.112,00	62,20
2.1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	3.676.050.393,00	3.364.369.706,00	311.680.687,00	91,52
2.1.05.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.439.957.550,00	2.928.038.125,00	3.511.919.425,00	45,47
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	6.254.741.800,00	6.165.692.300,00	89.049.500,00	98,58
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.05.0.00.0.00.02.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.178.450.634,00	7.724.149.796,00	454.300.838,00	94,45
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	8.133.545.734,00	7.679.303.096,00	454.242.638,00	94,42
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	233.391.521,00	92,96
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.679.000,00	1.729.827.883,00	220.851.117,00	88,68
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	2.869.562.800,00	2.869.562.800,00	-	100,00
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	44.904.900,00	44.846.700,00	58.200,00	99,87
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.744.573.947,00	6.821.356.900,00	923.217.047,00	88,08
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA OPERASI	7.740.573.947,00	6.817.356.900,00	923.217.047,00	88,07
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Pegawai	3.575.293.867,00	3.389.596.313,00	185.697.554,00	94,81
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.080.080,00	2.968.160.587,00	151.919.493,00	95,13
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	Belanja Bantuan Sosial	1.045.200.000,00	459.600.000,00	585.600.000,00	43,97
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.1.06.0.00.2.13.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-
2.2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	6.614.357.919,00	6.368.884.673,00	245.473.246,00	96,29
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	6.451.042.839,00	6.208.005.219,00	243.037.620,00	96,23
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.831.884.564,00	3.619.827.108,00	212.057.456,00	94,47
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.619.158.275,00	2.588.178.111,00	30.980.164,00	98,82
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	163.315.080,00	160.879.454,00	2.435.626,00	98,51
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.07.3.32.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.832.285.231,00	6.501.885.491,00	330.399.740,00	95,16
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	6.832.285.231,00	6.501.885.491,00	330.399.740,00	95,16
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	4.469.016.222,00	4.274.910.701,00	194.105.521,00	95,66
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.363.269.009,00	2.226.974.790,00	136.294.219,00	94,23
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.08.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.058.528.368,00	18.327.280.462,00	731.247.906,00	96,16
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	18.192.396.364,00	17.468.054.462,00	724.341.902,00	96,02
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	8.730.733.736,00	8.261.260.341,00	469.473.395,00	94,62
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	6.765.872.428,00	6.689.668.170,00	76.204.258,00	98,87
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Subsidi	132.027.000,00	-	132.027.000,00	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	2.563.763.200,00	2.517.125.951,00	46.637.249,00	98,18
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	866.132.004,00	859.226.000,00	6.906.004,00	99,20
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.09.3.27.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-
2.2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.646.900.873,00	25.667.573.338,00	979.327.535,00	96,32
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	21.329.708.773,00	20.506.217.338,00	823.491.435,00	96,14
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.889.425.028,00	4.541.158.409,00	348.266.619,00	92,88
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	16.440.283.745,00	15.965.058.929,00	475.224.816,00	97,11
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	5.317.192.100,00	5.161.356.000,00	155.836.100,00	97,07
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.11.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.663.029.736,00	7.309.900.521,00	353.129.215,00	95,39
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	7.094.429.736,00	6.746.400.521,00	348.029.215,00	95,09
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	4.512.849.816,00	4.173.534.256,00	339.315.560,00	92,48
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.581.579.920,00	2.572.866.265,00	8.713.655,00	99,66
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	568.600.000,00	563.500.000,00	5.100.000,00	99,10
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.12.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
2.2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.380.153.015,00	7.588.010.878,00	792.142.137,00	90,55
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	7.622.353.015,00	6.843.680.878,00	778.672.137,00	89,78
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.311.968.252,00	3.041.688.521,00	270.279.731,00	91,84
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.310.384.763,00	3.801.992.357,00	508.392.406,00	88,21
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	757.800.000,00	744.330.000,00	13.470.000,00	98,22
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.14.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-	-	-	-
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	53.188.470.907,00	51.042.171.358,62	2.146.299.548,38	95,96
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	45.410.685.932,00	43.285.000.674,43	2.125.685.257,57	95,32
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	9.079.997.032,00	7.642.845.726,00	1.437.151.306,00	84,17
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	35.619.688.900,00	35.405.154.948,43	214.533.951,57	99,40
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	711.000.000,00	237.000.000,00	474.000.000,00	33,33
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	7.777.784.975,00	7.757.170.684,19	20.614.290,81	99,73
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.15.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	11.623.386.261,00	11.314.885.363,00	308.500.898,00	97,35
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA OPERASI	11.078.390.589,00	10.772.205.150,00	306.185.439,00	97,24
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Pegawai	4.210.739.381,00	4.021.175.726,00	189.563.655,00	95,50
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	6.867.651.208,00	6.751.029.424,00	116.621.784,00	98,30
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA MODAL	544.995.672,00	542.680.213,00	2.315.459,00	99,58
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.16.2.21.2.20.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	9.215.465.411,00	7.235.794.888,00	1.979.670.523,00	78,52
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	9.215.465.411,00	7.235.794.888,00	1.979.670.523,00	78,52
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.608.127.891,00	4.197.023.520,00	411.104.371,00	91,08
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	1.804.337.520,00	1.704.771.368,00	99.566.152,00	94,48
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	2.803.000.000,00	1.334.000.000,00	1.469.000.000,00	47,59
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.17.3.31.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.621.869.768,00	10.949.829.438,00	1.672.040.330,00	86,75
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA OPERASI	9.343.926.268,00	7.845.308.438,00	1.498.617.830,00	83,96
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Pegawai	6.737.596.713,00	5.590.773.077,00	1.146.823.636,00	82,98
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.606.329.555,00	2.254.535.361,00	351.794.194,00	86,50
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA MODAL	3.277.943.500,00	3.104.521.000,00	173.422.500,00	94,71
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.18.0.00.2.17.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	-	-	-	-
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAHA DAN PARIWISATA	17.218.749.159,00	14.460.147.345,79	2.758.601.813,21	83,98
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	11.997.383.764,00	11.633.338.712,62	364.045.051,38	96,97
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	3.686.828.160,00	3.409.499.984,00	277.328.176,00	92,48
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	7.083.458.422,00	6.996.741.546,62	86.716.875,38	98,78
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	1.227.097.182,00	1.227.097.182,00	-	100,00
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	5.221.365.395,00	2.826.808.633,17	2.394.556.761,83	54,14

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.19.3.26.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
2.2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
2.2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2.2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.291.532.346,00	4.901.218.316,00	390.314.030,00	92,62
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	4.956.825.946,00	4.570.296.236,00	386.529.710,00	92,20
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.564.062.142,00	3.253.331.350,00	310.730.792,00	91,28
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	1.392.763.804,00	1.316.964.886,00	75.798.918,00	94,56
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	334.706.400,00	330.922.080,00	3.784.320,00	98,87
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.2.23.2.24.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
2.3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	-	-	-
2.3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	7.877.088.245,00	7.436.540.150,00	440.548.095,00	94,41
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	7.665.224.645,00	7.245.838.150,00	419.386.495,00	94,53
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	3.335.262.255,00	3.047.806.860,00	287.455.395,00	91,38
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.972.390,00	2.513.263.190,00	97.709.200,00	96,26
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Hibah	565.380.000,00	547.560.000,00	17.820.000,00	96,85
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Bantuan Sosial	1.153.610.000,00	1.137.208.100,00	16.401.900,00	98,58
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	211.863.600,00	190.702.000,00	21.161.600,00	90,01
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.3.25.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
2.3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-
2.3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-
2.3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
2.3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	10.823.110.887,00	9.914.998.722,68	908.112.164,32	91,61
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	7.367.967.387,00	6.711.964.983,00	656.002.404,00	91,10
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	4.552.724.797,00	4.284.292.738,00	268.432.059,00	94,10
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.815.242.590,00	2.427.672.245,00	387.570.345,00	86,23
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	3.455.143.500,00	3.203.033.739,68	252.109.760,32	92,70
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.3.30.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
2.3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
2.4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
2.4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	67.124.101.596,00	63.531.192.220,00	3.592.909.376,00	94,65
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	62.617.884.937,00	59.112.853.058,00	3.505.031.879,00	94,40
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	20.857.454.228,00	18.679.576.055,00	2.177.878.173,00	89,56
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	33.247.611.309,00	31.991.011.010,00	1.256.600.299,00	96,22
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Hibah	8.512.819.400,00	8.442.265.993,00	70.553.407,00	99,17
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	4.506.216.659,00	4.418.339.162,00	87.877.497,00	98,05
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.4.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.4.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	56.293.494.721,00	42.684.718.587,00	13.608.776.134,00	75,83
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	55.867.605.383,00	42.273.921.287,00	13.593.684.096,00	75,67
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	32.843.138.152,00	20.863.062.287,00	11.980.075.865,00	63,52
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	23.024.467.231,00	21.410.859.000,00	1.613.608.231,00	92,99
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	425.889.338,00	410.797.300,00	15.092.038,00	96,46
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.4.02.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
2.5.01.	PERENCANAAN	-	-	-	-
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.176.748.354,00	9.393.400.419,00	783.347.935,00	92,30
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	9.964.007.560,00	9.189.508.225,00	774.499.335,00	92,23
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	5.409.008.104,00	5.192.968.080,00	216.040.024,00	96,01
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.554.999.456,00	3.996.540.145,00	558.459.311,00	87,74
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	212.740.794,00	203.892.194,00	8.848.600,00	95,84
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.02.	KEUANGAN	-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.00.0000.		-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.847.932.084,00	24.505.432.187,00	1.342.499.897,00	94,81
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	24.379.826.574,00	23.111.324.903,00	1.268.501.671,00	94,80
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	16.127.048.988,00	15.223.209.827,00	903.839.161,00	94,40

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	8.252.777.586,00	7.888.115.076,00	364.662.510,00	95,58
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	1.468.105.510,00	1.394.107.284,00	73.998.226,00	94,96
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50.833.413.741,00	43.120.970.189,00	7.712.443.552,00	84,83
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	49.119.241.002,00	41.517.631.312,00	7.601.609.690,00	84,52
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	32.991.789.893,00	26.993.557.043,00	5.998.232.850,00	81,82
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	14.127.451.109,00	13.463.697.199,00	663.753.910,00	95,30
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	939.622.930,00	53,02
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	1.421.687.608,00	1.343.049.860,00	78.637.748,00	94,47
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	292.485.131,00	260.289.017,00	32.196.114,00	88,99
2.5.02.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.03.	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.145.978.394,00	7.650.267.173,00	495.711.221,00	93,91
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA OPERASI	8.145.978.394,00	7.650.267.173,00	495.711.221,00	93,91
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Pegawai	4.502.560.794,00	4.162.067.688,00	340.493.106,00	92,44
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.643.417.600,00	3.488.199.485,00	155.218.115,00	95,74
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.5.03.0.00.5.04.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
2.5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
2.5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	-
2.6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	14.858.074.831,00	12.867.287.746,00	1.990.787.085,00	86,60
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	14.286.193.131,00	12.301.016.896,00	1.985.176.235,00	86,10
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	10.606.972.372,00	8.770.566.096,00	1.836.406.276,00	82,69
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.679.220.759,00	3.530.450.800,00	148.769.959,00	95,96
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	571.881.700,00	566.270.850,00	5.610.850,00	99,02
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.6.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.	UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-
2.7.01.	KECAMATAN	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	KECAMATAN DUMAI BARAT	9.243.700.309,00	8.886.542.573,00	357.157.736,00	96,14
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA OPERASI	8.635.030.709,00	8.282.041.773,00	352.988.936,00	95,91
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Pegawai	5.140.360.709,00	4.887.807.465,00	252.553.244,00	95,09
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.494.670.000,00	3.394.234.308,00	100.435.692,00	97,13
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA MODAL	608.669.600,00	604.500.800,00	4.168.800,00	99,32
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.01.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	KECAMATAN DUMAI TIMUR	10.527.519.072,00	10.228.597.526,00	298.921.546,00	97,16
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA OPERASI	10.053.294.194,00	9.757.490.050,00	295.804.144,00	97,06
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Pegawai	5.607.491.392,00	5.366.498.858,00	240.992.534,00	95,70
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.802.802,00	4.390.991.192,00	54.811.610,00	98,77
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA MODAL	474.224.878,00	471.107.476,00	3.117.402,00	99,34
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.02.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	KECAMATAN DUMAI SELATAN	10.476.259.589,00	10.178.026.757,00	298.232.832,00	97,15
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	BELANJA OPERASI	9.731.134.648,00	9.435.841.294,00	295.293.354,00	96,97
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	Belanja Pegawai	5.569.388.639,00	5.349.931.632,00	219.457.007,00	96,06
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.161.746.009,00	4.085.909.662,00	75.836.347,00	98,18
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	BELANJA MODAL	745.124.941,00	742.185.463,00	2.939.478,00	99,61
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.03.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	KECAMATAN DUMAI KOTA	11.281.034.946,00	10.944.772.000,00	336.262.946,00	97,02
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	BELANJA OPERASI	10.196.544.036,00	9.877.987.000,00	318.557.036,00	96,88
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	Belanja Pegawai	5.795.315.923,00	5.559.762.761,00	235.553.162,00	95,94
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	Belanja Barang dan Jasa	4.401.228.113,00	4.318.224.239,00	83.003.874,00	98,11
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	BELANJA MODAL	1.084.490.910,00	1.066.785.000,00	17.705.910,00	98,37
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.04.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	KECAMATAN BUKIT KAPUR	11.898.896.475,00	11.511.371.758,00	387.524.717,00	96,74
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA OPERASI	10.882.667.655,00	10.515.949.449,00	366.718.206,00	96,63
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Pegawai	7.107.944.735,00	6.792.345.050,00	315.599.685,00	95,56
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.774.722.920,00	3.723.604.399,00	51.118.521,00	98,65
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA MODAL	1.016.228.820,00	995.422.309,00	20.806.511,00	97,95
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.05.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	7.901.180.723,00	7.574.545.065,00	326.635.658,00	95,87
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	BELANJA OPERASI	7.511.447.651,00	7.184.890.065,00	326.557.586,00	95,65
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	Belanja Pegawai	5.182.176.701,00	4.885.249.307,00	296.927.394,00	94,27

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	Belanja Barang dan Jasa	2.329.270.950,00	2.299.640.758,00	29.630.192,00	98,73
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	BELANJA MODAL	389.733.072,00	389.655.000,00	78.072,00	99,98
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.06.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	10.869.637.137,00	10.471.023.827,00	398.613.310,00	96,33
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	BELANJA OPERASI	9.681.659.137,00	9.283.283.765,00	398.375.372,00	95,89
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	Belanja Pegawai	6.653.679.333,00	6.293.496.508,00	360.182.825,00	94,59
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	Belanja Barang dan Jasa	3.027.979.804,00	2.989.787.257,00	38.192.547,00	98,74
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	BELANJA MODAL	1.187.978.000,00	1.187.740.062,00	237.938,00	99,98
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
2.7.01.0.00.0.00.07.0000.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-
2.8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
3.	(SURPLUS/DEFISIT)	(246.877.562.566,00)	(136.843.166.692,81)	(110.034.395.873,19)	55,43



PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00
Pendapatan Retribusi Daerah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
Lain-lain PAD Yang Sah	180.895.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99	155.525.269.561,29
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	452.558.659.244,67	464.003.743.318,86	102,53	366.696.884.199,75
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH)	162.373.681.000,00	167.642.355.626,00	103,24	145.468.956.587,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	429.554.051.000,00	427.742.257.138,00	99,58	429.427.931.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.721.068.973,00	61.389.147.488,00	97,88	92.602.935.776,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119.754.141.780,00	101.586.344.477,00	84,83	63.922.544.318,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	774.402.942.753,00	758.360.104.729,00	97,93	731.422.367.681,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Penyesuaian	20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00
TRANSFER ANTAR DAERAH - TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39
Total Pendapatan Transfer	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43	879.612.437.425,39
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	98,41	1.287.005.084.625,14

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00
Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	559.998.434.987,95	95,57	481.698.811.775,84
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00
Belanja Subsidi	132.027.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	30.956.352.225,00	23.282.916.899,08	75,21	35.855.199.901,00
Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	83,53	0,00
Jumlah Belanja Operasi	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	93,55	1.105.414.852.748,84
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00
Jumlah Belanja Modal	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	84,94	199.818.329.751,39
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
Jumlah Belanja	1.639.213.506.052,00	1.507.041.615.158,67	91,94	1.314.289.659.257,23
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.639.213.506.052,00	1.507.041.615.158,67	91,94	1.314.289.659.257,23
SURPLUS / DEFISIT	(246.877.562.566,00)	(136.843.166.692,81)	55,43	(27.284.574.632,09)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	100,00	195.481.309.973,34

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	95,11	195.481.309.973,34
PENGELUARAAN PEMBIAYAAN				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	257.730.748.879,25	244.260.776.307,14	95,11	195.481.309.973,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	10.853.186.313,25	107.417.609.614,33	989,73	168.196.735.341,25

Dumai, 29 Agustus 2023
Wali Kota Dumai,

PAISAL

KOTA DUMAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.01.0000. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	360.450.184.856,00	326.083.984.482,00	34.366.200.374,00	90,47	
1.01.1.01.2.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	254.627.135.954,00	237.653.317.481,00	16.973.818.473,00	93,33	
1.01.1.01.2.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.141.098.554,00	2.987.764.003,00	153.334.551,00	95,12	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.350.372.787,00	1.307.745.899,00	42.626.888,00	96,84	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.289.159.787,00	1.247.273.099,00	41.886.688,00	96,75	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.289.159.787,00	1.247.273.099,00	41.886.688,00	96,75	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	61.213.000,00	60.472.800,00	740.200,00	98,79	
1.01.1.01.2.201.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.213.000,00	60.472.800,00	740.200,00	98,79	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	376.645.350,00	364.986.487,00	11.658.863,00	96,90	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	365.309.453,00	353.686.487,00	11.622.966,00	96,82	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	365.309.453,00	353.686.487,00	11.622.966,00	96,82	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	11.335.897,00	11.300.000,00	35.897,00	99,68	
1.01.1.01.2.201.2.01.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.335.897,00	11.300.000,00	35.897,00	99,68	
1.01.1.01.2.201.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.414.080.417,00	1.315.031.617,00	99.048.800,00	93,00	
1.01.1.01.2.201.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.414.080.417,00	1.315.031.617,00	99.048.800,00	93,00	
1.01.1.01.2.201.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	75.698.400,00	75.698.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.338.382.017,00	1.239.333.217,00	99.048.800,00	92,60	
1.01.1.01.2.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	246.735.936.264,00	229.982.413.486,00	16.753.522.778,00	93,21	
1.01.1.01.2.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	246.360.432.735,00	229.608.015.309,00	16.752.417.426,00	93,20	
1.01.1.01.2.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	246.360.432.735,00	229.608.015.309,00	16.752.417.426,00	93,20	
1.01.1.01.2.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	246.360.432.735,00	229.608.015.309,00	16.752.417.426,00	93,20	
1.01.1.01.2.201.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	375.503.529,00	374.398.177,00	1.105.352,00	99,71	
1.01.1.01.2.201.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	375.503.529,00	374.398.177,00	1.105.352,00	99,71	
1.01.1.01.2.201.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	29.640.000,00	29.640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	345.863.529,00	344.758.177,00	1.105.352,00	99,68	
1.01.1.01.2.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	752.142.407,00	749.548.750,00	2.593.657,00	99,66	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	752.142.407,00	749.548.750,00	2.593.657,00	99,66	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	752.142.407,00	749.548.750,00	2.593.657,00	99,66	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	274.000.000,00	274.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	478.142.407,00	475.548.750,00	2.593.657,00	99,46	
1.01.1.01.2.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.724.141.577,00	1.690.207.411,00	33.934.166,00	98,03	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.182.464.557,00	1.149.986.714,00	32.477.843,00	97,25	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	400.638.576,00	380.701.500,00	19.937.076,00	95,02	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	400.638.576,00	380.701.500,00	19.937.076,00	95,02	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	781.825.981,00	769.285.214,00	12.540.767,00	98,40	
1.01.1.01.2.201.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.825.981,00	769.285.214,00	12.540.767,00	98,40	
1.01.1.01.2.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.432.000,00	83.395.000,00	37.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	83.432.000,00	83.395.000,00	37.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.432.000,00	83.395.000,00	37.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	84.155.500,00	84.155.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	84.155.500,00	84.155.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	84.155.500,00	84.155.500,00	-	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.205.520,00	4.000.000,00	205.520,00	95,11	
1.01.1.01.2.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.205.520,00	4.000.000,00	205.520,00	95,11	
1.01.1.01.2.201.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.205.520,00	4.000.000,00	205.520,00	95,11	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	369.884.000,00	368.670.197,00	1.213.803,00	99,67	
1.01.1.01.2.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	369.884.000,00	368.670.197,00	1.213.803,00	99,67	
1.01.1.01.2.201.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	369.884.000,00	368.670.197,00	1.213.803,00	99,67	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.703.710.952,00	1.673.854.831,00	29.856.121,00	98,25	
1.01.1.01.2.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	426.879.672,00	400.222.111,00	26.657.561,00	93,76	
1.01.1.01.2.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	426.879.672,00	400.222.111,00	26.657.561,00	93,76	
1.01.1.01.2.201.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	426.879.672,00	400.222.111,00	26.657.561,00	93,76	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.218.000,00	63.218.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	63.218.000,00	63.218.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	63.218.000,00	63.218.000,00	-	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.213.613.280,00	1.210.414.720,00	3.198.560,00	99,74	
1.01.1.01.2.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.213.613.280,00	1.210.414.720,00	3.198.560,00	99,74	
1.01.1.01.2.201.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.213.613.280,00	1.210.414.720,00	3.198.560,00	99,74	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	570.106.200,00	569.529.000,00	577.200,00	99,90	
1.01.1.01.2.201.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	105.106.200,00	104.790.000,00	316.200,00	99,70	
1.01.1.01.2.201.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	105.106.200,00	104.790.000,00	316.200,00	99,70	
1.01.1.01.2.201.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	105.106.200,00	104.790.000,00	316.200,00	99,70	
2.						
1.01.1.01.2.201.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	465.000.000,00	464.739.000,00	261.000,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.201.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.09.09.5.1.0 5.	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.201.2.09.09.5.2.	BELANJA MODAL	450.000.000,00	449.739.000,00	261.000,00	99,94	
1.01.1.01.2.201.2.09.09.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.910.000,00	90.000,00	99,82	
1.01.1.01.2.201.2.09.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.829.000,00	171.000,00	99,96	
1.01.1.01.2.202.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	104.808.373.034,00	87.424.191.133,00	17.384.181.901,00	83,41	
1.01.1.01.2.202.2.01.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	63.320.903.383,00	65.905.998.933,00	(2.585.095.550,00)	104,08	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	2.786.965.000,00	2.747.832.866,00	39.132.134,00	98,60	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	528.753.900,00	512.420.000,00	16.333.900,00	96,91	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	528.753.900,00	512.420.000,00	16.333.900,00	96,91	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.258.211.100,00	2.235.412.866,00	22.798.234,00	98,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.248.211.100,00	2.225.412.866,00	22.798.234,00	98,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	4.383.381.674,00	4.212.480.421,00	170.901.253,00	96,10	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	346.586.522,00	340.431.821,00	6.154.701,00	98,22	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	346.586.522,00	340.431.821,00	6.154.701,00	98,22	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	4.036.795.152,00	3.872.048.600,00	164.746.552,00	95,92	
1.01.1.01.2.202.2.01.06.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.036.795.152,00	3.872.048.600,00	164.746.552,00	95,92	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	377.160.000,00	377.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	377.160.000,00	377.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.07.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	377.160.000,00	377.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.08.5.1.0 5.	Belanja Hibah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.01.12.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	164.000.000,00	163.972.000,00	28.000,00	99,98	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	164.000.000,00	163.972.000,00	28.000,00	99,98	
1.01.1.01.2.202.2.01.12.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	163.972.000,00	28.000,00	99,98	
2.						
1.01.1.01.2.202.2.01.14.	PENGADAAN MEUBEL SEKOLAH	159.220.000,00	159.206.000,00	14.000,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.14.5.2.	BELANJA MODAL	159.220.000,00	159.206.000,00	14.000,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.01.14.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.220.000,00	159.206.000,00	14.000,00	99,99	
2.						
1.01.1.01.2.202.2.01.16.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.16.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.16.5.1.0	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
5.						
1.01.1.01.2.202.2.01.22.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	4.655.000.000,00	4.595.763.000,00	59.237.000,00	98,73	
1.01.1.01.2.202.2.01.22.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.22.5.1.0	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
5.						
1.01.1.01.2.202.2.01.22.5.2.	BELANJA MODAL	4.625.000.000,00	4.565.763.000,00	59.237.000,00	98,72	
1.01.1.01.2.202.2.01.22.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.625.000.000,00	4.565.763.000,00	59.237.000,00	98,72	
2.						
1.01.1.01.2.202.2.01.23.	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	290.967.533,00	290.958.235,00	9.298,00	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.1.	BELANJA OPERASI	290.967.533,00	290.958.235,00	9.298,00	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.23.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	290.967.533,00	290.958.235,00	9.298,00	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.202.2.01.25.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	254.421.926,00	253.735.902,00	686.024,00	99,73	
1.01.1.01.2.202.2.01.25.5.1.	BELANJA OPERASI	247.458.726,00	246.772.702,00	686.024,00	99,72	
1.01.1.01.2.202.2.01.25.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	247.458.726,00	246.772.702,00	686.024,00	99,72	
2.						
1.01.1.01.2.202.2.01.25.5.2.	BELANJA MODAL	6.963.200,00	6.963.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.01.25.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.963.200,00	6.963.200,00	-	100,00	
2.						
1.01.1.01.2.202.2.01.26.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	14.024.800.000,00	12.114.920.900,00	1.909.879.100,00	86,38	
1.01.1.01.2.202.2.01.26.5.1.	BELANJA OPERASI	14.024.800.000,00	12.114.920.900,00	1.909.879.100,00	86,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.01.26.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.024.800.000,00	12.114.920.900,00	1.909.879.100,00	86,38	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	105.117.250,00	104.895.300,00	221.950,00	99,79	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.5.1.	BELANJA OPERASI	105.117.250,00	104.895.300,00	221.950,00	99,79	
1.01.1.01.2.202.2.01.27.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	105.117.250,00	104.895.300,00	221.950,00	99,79	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	320.000.000,00	317.150.330,00	2.849.670,00	99,11	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.5.1.	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	317.150.330,00	2.849.670,00	99,11	
1.01.1.01.2.202.2.01.28.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	317.150.330,00	2.849.670,00	99,11	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	35.744.870.000,00	40.512.923.979,00	(4.768.053.979,00)	113,34	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.1.	BELANJA OPERASI	25.191.672.700,00	31.947.871.800,00	(6.756.199.100,00)	126,82	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.191.672.700,00	31.947.871.800,00	(6.756.199.100,00)	126,82	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.2.	BELANJA MODAL	10.553.197.300,00	8.565.052.179,00	1.988.145.121,00	81,16	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.826.416.300,00	4.778.211.035,00	1.048.205.265,00	82,01	
1.01.1.01.2.202.2.01.29.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.726.781.000,00	3.786.841.144,00	939.939.856,00	80,11	
1.01.1.01.2.202.2.02.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	35.368.368.401,00	18.830.739.620,00	16.537.628.781,00	53,24	
1.01.1.01.2.202.2.02.01.	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	999.671.854,00	987.527.300,00	12.144.554,00	98,79	
1.01.1.01.2.202.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	91.453.683,00	91.255.300,00	198.383,00	99,78	
1.01.1.01.2.202.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.453.683,00	91.255.300,00	198.383,00	99,78	
1.01.1.01.2.202.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	908.218.171,00	896.272.000,00	11.946.171,00	98,68	
1.01.1.01.2.202.2.02.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	908.218.171,00	896.272.000,00	11.946.171,00	98,68	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	3.122.897.700,00	3.122.895.700,00	2.000,00	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	608.022.700,00	608.020.700,00	2.000,00	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	608.022.700,00	608.020.700,00	2.000,00	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.514.875.000,00	2.514.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.02.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.504.875.000,00	2.504.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.09.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	924.237.000,00	924.237.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.09.5.2.	BELANJA MODAL	924.237.000,00	924.237.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	924.237.000,00	924.237.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	7.478.620.020,00	7.477.800.287,00	819.733,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	17.330.695,00	17.250.000,00	80.695,00	99,53	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.330.695,00	17.250.000,00	80.695,00	99,53	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.2.	BELANJA MODAL	7.461.289.325,00	7.460.550.287,00	739.038,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.02.12.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.461.289.325,00	7.460.550.287,00	739.038,00	99,99	
1.01.1.01.2.202.2.02.17.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.17.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.17.5.1.0 5.	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	1.089.410.000,00	1.058.621.000,00	30.789.000,00	97,17	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.5.1.0 5.	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.5.2.	BELANJA MODAL	1.064.410.000,00	1.033.621.000,00	30.789.000,00	97,11	
1.01.1.01.2.202.2.02.35.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.064.410.000,00	1.033.621.000,00	30.789.000,00	97,11	
1.01.1.01.2.202.2.02.36.	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	110.544.480,00	109.974.480,00	570.000,00	99,48	
1.01.1.01.2.202.2.02.36.5.1.	BELANJA OPERASI	110.544.480,00	109.974.480,00	570.000,00	99,48	
1.01.1.01.2.202.2.02.36.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.544.480,00	109.974.480,00	570.000,00	99,48	
1.01.1.01.2.202.2.02.37.	PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	50.000.000,00	45.687.000,00	4.313.000,00	91,37	
1.01.1.01.2.202.2.02.37.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.687.000,00	4.313.000,00	91,37	
1.01.1.01.2.202.2.02.37.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.687.000,00	4.313.000,00	91,37	
1.01.1.01.2.202.2.02.39.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	5.337.600.000,00	4.971.539.766,00	366.060.234,00	93,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.02.39.5.1.	BELANJA OPERASI	5.337.600.000,00	4.971.539.766,00	366.060.234,00	93,14	
1.01.1.01.2.202.2.02.39.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.600.000,00	4.971.539.766,00	366.060.234,00	93,14	
1.01.1.01.2.202.2.02.40.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	112.227.347,00	107.457.087,00	4.770.260,00	95,75	
1.01.1.01.2.202.2.02.40.5.1.	BELANJA OPERASI	112.227.347,00	107.457.087,00	4.770.260,00	95,75	
1.01.1.01.2.202.2.02.40.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	112.227.347,00	107.457.087,00	4.770.260,00	95,75	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16.118.160.000,00	-	16.118.160.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.1.	BELANJA OPERASI	10.913.026.800,00	-	10.913.026.800,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.913.026.800,00	-	10.913.026.800,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.2.	BELANJA MODAL	5.205.133.200,00	-	5.205.133.200,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.414.210.000,00	-	3.414.210.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.02.42.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.790.923.200,00	-	1.790.923.200,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	4.750.075.100,00	2.068.268.832,00	2.681.806.268,00	43,54	
1.01.1.01.2.202.2.03.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD	248.162.200,00	248.162.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.01.5.2.	BELANJA MODAL	233.162.200,00	233.162.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.162.200,00	233.162.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	818.233.800,00	818.233.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	68.819.800,00	68.819.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	68.819.800,00	68.819.800,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.2.	BELANJA MODAL	749.414.000,00	749.414.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	749.414.000,00	749.414.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.07.	PENGADAAN MEBEL PAUD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.03.07.5.1.0 5.	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	355.000.000,00	353.427.000,00	1.573.000,00	99,56	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.1.0 5.	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.2.	BELANJA MODAL	325.000.000,00	323.427.000,00	1.573.000,00	99,52	
1.01.1.01.2.202.2.03.12.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.000.000,00	323.427.000,00	1.573.000,00	99,52	
1.01.1.01.2.202.2.03.13.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	396.000.000,00	384.000.000,00	12.000.000,00	96,97	
1.01.1.01.2.202.2.03.13.5.1.	BELANJA OPERASI	396.000.000,00	384.000.000,00	12.000.000,00	96,97	
1.01.1.01.2.202.2.03.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	384.000.000,00	12.000.000,00	96,97	
1.01.1.01.2.202.2.03.16.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	175.000.000,00	169.029.600,00	5.970.400,00	96,59	
1.01.1.01.2.202.2.03.16.5.1.	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	169.029.600,00	5.970.400,00	96,59	
1.01.1.01.2.202.2.03.16.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	169.029.600,00	5.970.400,00	96,59	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	65.979.100,00	65.416.232,00	562.868,00	99,15	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.5.1.	BELANJA OPERASI	65.979.100,00	65.416.232,00	562.868,00	99,15	
1.01.1.01.2.202.2.03.17.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.979.100,00	65.416.232,00	562.868,00	99,15	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.661.700.000,00	-	2.661.700.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.1.	BELANJA OPERASI	2.661.700.000,00	-	2.661.700.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.03.18.5.1.0 5.	Belanja Hibah	2.661.700.000,00	-	2.661.700.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.369.026.150,00	619.183.748,00	749.842.402,00	45,23	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	495.885.000,00	495.885.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.2.	BELANJA MODAL	447.885.000,00	447.885.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.885.000,00	347.885.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR NONFORMAL/KESETARAAN	125.941.150,00	123.298.748,00	2.642.402,00	97,90	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.5.1.	BELANJA OPERASI	125.941.150,00	123.298.748,00	2.642.402,00	97,90	
1.01.1.01.2.202.2.04.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.941.150,00	123.298.748,00	2.642.402,00	97,90	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	747.200.000,00	-	747.200.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.1.	BELANJA OPERASI	747.200.000,00	-	747.200.000,00	0,00	
1.01.1.01.2.202.2.04.17.5.1.0 5.	Belanja Hibah	747.200.000,00	-	747.200.000,00	0,00	
2.22.1.01.2.202.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	8.200.000,00	99,19	
2.22.1.01.2.202.2.03.	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	8.200.000,00	99,19	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	8.200.000,00	99,19	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	8.200.000,00	99,19	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	614.675.868,00	606.475.868,00	8.200.000,00	98,67	
2.22.1.01.2.202.2.03.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	360.450.184.856,00	326.083.984.482,00	34.366.200.374,00	90,47	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(360.450.184.856,00)	(326.083.984.482,00)	(34.366.200.374,00)	90,47	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(360.450.184.856,00)	(326.083.984.482,00)	(34.366.200.374,00)	90,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.	PENDAPATAN	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	(23.492.480.443,14)	113,90	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	(23.492.480.443,14)	113,90	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	(23.492.480.443,14)	113,90	
	JUMLAH PENDAPATAN	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	(23.492.480.443,14)	113,90	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.	BELANJA	458.105.293.984,00	447.623.317.455,90	10.481.976.528,10	97,71	
1.02.1.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	315.035.175.355,00	320.132.603.994,00	(5.097.428.639,00)	101,62	
1.02.1.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	172.666.244,00	144.157.800,00	28.508.444,00	83,49	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	72.754.104,00	59.450.900,00	13.303.204,00	81,71	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	72.754.104,00	59.450.900,00	13.303.204,00	81,71	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.754.104,00	59.450.900,00	13.303.204,00	81,71	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.804.928,00	7.800.000,00	1.004.928,00	88,59	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	8.804.928,00	7.800.000,00	1.004.928,00	88,59	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.804.928,00	7.800.000,00	1.004.928,00	88,59	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	904.928,00	900.000,00	4.928,00	99,46	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	904.928,00	900.000,00	4.928,00	99,46	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	904.928,00	900.000,00	4.928,00	99,46	
1.02.1.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	26.765.756,00	24.579.600,00	2.186.156,00	91,83	
1.02.1.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	26.765.756,00	24.579.600,00	2.186.156,00	91,83	
1.02.1.02.0.001.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.765.756,00	24.579.600,00	2.186.156,00	91,83	
1.02.1.02.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	26.329.856,00	22.477.300,00	3.852.556,00	85,37	
1.02.1.02.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	26.329.856,00	22.477.300,00	3.852.556,00	85,37	
1.02.1.02.0.001.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.329.856,00	22.477.300,00	3.852.556,00	85,37	
1.02.1.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.689.424,00	13.650.000,00	39.424,00	99,71	
1.02.1.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	13.689.424,00	13.650.000,00	39.424,00	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.689.424,00	13.650.000,00	39.424,00	99,71	
1.02.1.02.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.417.248,00	15.300.000,00	8.117.248,00	65,34	
1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	23.417.248,00	15.300.000,00	8.117.248,00	65,34	
1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.417.248,00	15.300.000,00	8.117.248,00	65,34	
1.02.1.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	91.861.111.905,00	81.797.086.565,00	10.064.025.340,00	89,04	
1.02.1.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	91.791.511.905,00	81.727.486.565,00	10.064.025.340,00	89,04	
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	91.791.511.905,00	81.727.486.565,00	10.064.025.340,00	89,04	
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	91.791.511.905,00	81.727.486.565,00	10.064.025.340,00	89,04	
1.02.1.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	104.000.000,00	97.700.000,00	6.300.000,00	93,94	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	89.000.000,00	83.300.000,00	5.700.000,00	93,60	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	89.000.000,00	83.300.000,00	5.700.000,00	93,60	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	75.600.000,00	70.800.000,00	4.800.000,00	93,65	
1.02.1.02.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	12.500.000,00	900.000,00	93,28	
1.02.1.02.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	96,00	
1.02.1.02.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	96,00	
1.02.1.02.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.400.000,00	600.000,00	96,00	
1.02.1.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	605.733.832,00	563.439.500,00	42.294.332,00	93,02	
1.02.1.02.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	296.637.400,00	293.170.000,00	3.467.400,00	98,83	
1.02.1.02.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	296.637.400,00	293.170.000,00	3.467.400,00	98,83	
1.02.1.02.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	296.637.400,00	293.170.000,00	3.467.400,00	98,83	
1.02.1.02.0.001.2.05.05.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	165.013.824,00	146.622.000,00	18.391.824,00	88,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.05.05.5.1.	BELANJA OPERASI	165.013.824,00	146.622.000,00	18.391.824,00	88,85	
1.02.1.02.0.001.2.05.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	165.013.824,00	146.622.000,00	18.391.824,00	88,85	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	144.082.608,00	123.647.500,00	20.435.108,00	85,82	
1.02.1.02.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	144.082.608,00	123.647.500,00	20.435.108,00	85,82	
1.02.1.02.0.001.2.05.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	144.082.608,00	123.647.500,00	20.435.108,00	85,82	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.335.465.002,00	2.272.078.668,00	63.386.334,00	97,29	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	18.789.900,00	18.592.722,00	197.178,00	98,95	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	18.789.900,00	18.592.722,00	197.178,00	98,95	
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	18.789.900,00	18.592.722,00	197.178,00	98,95	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.319.568.379,00	1.290.783.935,00	28.784.444,00	97,82	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	524.322.500,00	504.249.235,00	20.073.265,00	96,17	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	524.322.500,00	504.249.235,00	20.073.265,00	96,17	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	795.245.879,00	786.534.700,00	8.711.179,00	98,90	
1.02.1.02.0.001.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.245.879,00	786.534.700,00	8.711.179,00	98,90	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.142.000,00	17.142.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	17.142.000,00	17.142.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.001.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	17.142.000,00	17.142.000,00	-	100,00	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.395.000,00	56.928.855,00	2.466.145,00	95,85	
1.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	59.395.000,00	56.928.855,00	2.466.145,00	95,85	
1.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	59.395.000,00	56.928.855,00	2.466.145,00	95,85	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	79.995.723,00	73.879.850,00	6.115.873,00	92,35	
1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	79.995.723,00	73.879.850,00	6.115.873,00	92,35	
1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	79.995.723,00	73.879.850,00	6.115.873,00	92,35	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.452.000,00	18.201.000,00	251.000,00	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	18.452.000,00	18.201.000,00	251.000,00	98,64	
1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	18.452.000,00	18.201.000,00	251.000,00	98,64	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	764.768.000,00	753.262.952,00	11.505.048,00	98,50	
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	764.768.000,00	753.262.952,00	11.505.048,00	98,50	
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	764.768.000,00	753.262.952,00	11.505.048,00	98,50	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	57.354.000,00	43.287.354,00	14.066.646,00	75,47	
1.02.1.02.0.001.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	57.354.000,00	43.287.354,00	14.066.646,00	75,47	
1.02.1.02.0.001.2.06.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	57.354.000,00	43.287.354,00	14.066.646,00	75,47	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	434.055.448,00	418.850.000,00	15.205.448,00	96,50	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	434.055.448,00	418.850.000,00	15.205.448,00	96,50	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	434.055.448,00	418.850.000,00	15.205.448,00	96,50	
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.055.448,00	418.850.000,00	15.205.448,00	96,50	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.441.347.108,00	22.416.099.007,00	1.025.248.101,00	95,63	
1.02.1.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.999.000.000,00	4.576.144.507,00	422.855.493,00	91,54	
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.999.000.000,00	4.576.144.507,00	422.855.493,00	91,54	
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000.000,00	4.576.144.507,00	422.855.493,00	91,54	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	841.673.700,00	681.218.500,00	160.455.200,00	80,94	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	741.673.700,00	582.218.500,00	159.455.200,00	78,50	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Pegawai	460.370.000,00	448.293.500,00	12.076.500,00	97,38	
1.						
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	281.303.700,00	133.925.000,00	147.378.700,00	47,61	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.2.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
1.02.1.02.0.001.2.08.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
2.						
1.02.1.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.600.673.408,00	17.158.736.000,00	441.937.408,00	97,49	
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	17.600.673.408,00	17.158.736.000,00	441.937.408,00	97,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	64.080.000,00	56.880.000,00	7.200.000,00	88,76	
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.536.593.408,00	17.101.856.000,00	434.737.408,00	97,52	
1.02.1.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.285.506.296,00	1.155.582.501,00	129.923.795,00	89,89	
1.02.1.02.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	33.560.000,00	32.954.175,00	605.825,00	98,19	
1.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	33.560.000,00	32.954.175,00	605.825,00	98,19	
1.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	32.954.175,00	605.825,00	98,19	
1.02.1.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	902.031.000,00	773.568.326,00	128.462.674,00	85,76	
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	902.031.000,00	773.568.326,00	128.462.674,00	85,76	
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	902.031.000,00	773.568.326,00	128.462.674,00	85,76	
1.02.1.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	349.915.296,00	349.060.000,00	855.296,00	99,76	
1.02.1.02.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	349.915.296,00	349.060.000,00	855.296,00	99,76	
1.02.1.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	349.915.296,00	349.060.000,00	855.296,00	99,76	
1.02.1.02.0.001.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	194.795.289.520,00	211.267.609.953,00	(16.472.320.433,00)	108,46	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	194.795.289.520,00	211.267.609.953,00	(16.472.320.433,00)	108,46	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.	BELANJA OPERASI	178.418.405.052,00	196.856.764.657,00	(18.438.359.605,00)	110,33	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	94.653.159.469,00	106.936.085.589,00	(12.282.926.120,00)	112,98	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	83.765.245.583,00	89.920.679.068,00	(6.155.433.485,00)	107,35	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.	BELANJA MODAL	16.376.884.468,00	14.410.845.296,00	1.966.039.172,00	88,00	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.770.107.348,00	13.304.342.896,00	465.764.452,00	96,62	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.492.648.720,00	492.374.000,00	1.000.274.720,00	32,99	
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.114.128.400,00	614.128.400,00	500.000.000,00	55,12	
1.02.1.02.0.002.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.897.151.886,00	118.308.613.693,90	14.588.538.192,10	89,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.352.631.629,00	66.209.365.931,90	7.143.265.697,10	90,26	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	12.664.552.572,00	7.780.237.348,00	4.884.315.224,00	61,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	12.664.552.572,00	7.780.237.348,00	4.884.315.224,00	61,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.664.552.572,00	7.780.237.348,00	4.884.315.224,00	61,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	951.176.800,00	949.066.000,00	2.110.800,00	99,78	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	751.226.800,00	749.251.000,00	1.975.800,00	99,74	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	751.226.800,00	749.251.000,00	1.975.800,00	99,74	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.5.2.	BELANJA MODAL	199.950.000,00	199.815.000,00	135.000,00	99,93	
1.02.1.02.0.002.2.01.08.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.950.000,00	199.815.000,00	135.000,00	99,93	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	1.495.499.583,00	1.493.926.783,00	1.572.800,00	99,89	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.025.499.583,00	1.024.244.583,00	1.255.000,00	99,88	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.499.583,00	1.024.244.583,00	1.255.000,00	99,88	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.2.	BELANJA MODAL	470.000.000,00	469.682.200,00	317.800,00	99,93	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.860.000,00	140.000,00	99,93	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	270.000.000,00	269.822.200,00	177.800,00	99,93	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.818.053.250,00	1.802.308.869,90	15.744.380,10	99,13	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	1.618.053.250,00	1.602.413.869,90	15.639.380,10	99,03	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.618.053.250,00	1.602.413.869,90	15.639.380,10	99,03	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.895.000,00	105.000,00	99,95	
1.02.1.02.0.002.2.01.10.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.895.000,00	105.000,00	99,95	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	1.420.851.000,00	1.417.755.000,00	3.096.000,00	99,78	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	1.420.851.000,00	1.417.755.000,00	3.096.000,00	99,78	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.220.851.000,00	1.218.851.000,00	2.000.000,00	99,84	
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.904.000,00	1.096.000,00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.01.14.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	24.346.357.695,00	22.509.641.459,00	1.836.716.236,00	92,46	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.1.	BELANJA OPERASI	142.328.000,00	138.032.998,00	4.295.002,00	96,98	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	142.328.000,00	138.032.998,00	4.295.002,00	96,98	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.2.	BELANJA MODAL	24.204.029.695,00	22.371.608.461,00	1.832.421.234,00	92,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.204.029.695,00	22.371.608.461,00	1.832.421.234,00	92,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.15.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	120.799.480,00	87.515.000,00	33.284.480,00	72,45	
1.02.1.02.0.002.2.01.15.5.1.	BELANJA OPERASI	120.799.480,00	87.515.000,00	33.284.480,00	72,45	
1.02.1.02.0.002.2.01.15.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	120.799.480,00	87.515.000,00	33.284.480,00	72,45	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.	PENGADAAN OBAT, VAKSIN	10.879.449.343,00	10.671.801.591,00	207.647.752,00	98,09	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.	BELANJA OPERASI	10.536.379.543,00	10.334.116.241,00	202.263.302,00	98,08	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.536.379.543,00	10.334.116.241,00	202.263.302,00	98,08	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.2.	BELANJA MODAL	343.069.800,00	337.685.350,00	5.384.450,00	98,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.069.800,00	337.685.350,00	5.384.450,00	98,43	
1.02.1.02.0.002.2.01.17.	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI	19.114.988.806,00	18.957.889.632,00	157.099.174,00	99,18	
1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.	BELANJA OPERASI	19.114.988.806,00	18.957.889.632,00	157.099.174,00	99,18	
1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	19.114.988.806,00	18.957.889.632,00	157.099.174,00	99,18	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	460.420.000,00	458.999.249,00	1.420.751,00	99,69	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.5.1.	BELANJA OPERASI	460.420.000,00	458.999.249,00	1.420.751,00	99,69	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	460.420.000,00	458.999.249,00	1.420.751,00	99,69	
1.02.1.02.0.002.2.01.21.	DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, VAKSIN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP), MAKANAN DAN MINUMAN KE PUSKESMAS SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	80.483.100,00	80.225.000,00	258.100,00	99,68	
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.	BELANJA OPERASI	80.483.100,00	80.225.000,00	258.100,00	99,68	
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	80.483.100,00	80.225.000,00	258.100,00	99,68	
1.02.1.02.0.002.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.055.663.833,00	42.340.206.468,00	6.715.457.365,00	86,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.01.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	437.343.000,00	373.715.000,00	63.628.000,00	85,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	437.343.000,00	373.715.000,00	63.628.000,00	85,45	
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	437.343.000,00	373.715.000,00	63.628.000,00	85,45	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.02.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	142.484.450,00	104.100.444,00	38.384.006,00	73,06	
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	142.484.450,00	104.100.444,00	38.384.006,00	73,06	
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	142.484.450,00	104.100.444,00	38.384.006,00	73,06	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	110.117.250,00	91.525.280,00	18.591.970,00	83,12	
1.02.1.02.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	110.117.250,00	91.525.280,00	18.591.970,00	83,12	
1.02.1.02.0.002.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	110.117.250,00	91.525.280,00	18.591.970,00	83,12	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.04.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	223.317.500,00	211.304.000,00	12.013.500,00	94,62	
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	223.317.500,00	211.304.000,00	12.013.500,00	94,62	
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	223.317.500,00	211.304.000,00	12.013.500,00	94,62	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.05.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	334.325.000,00	289.710.000,00	44.615.000,00	86,66	
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	334.325.000,00	289.710.000,00	44.615.000,00	86,66	
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	334.325.000,00	289.710.000,00	44.615.000,00	86,66	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.06.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	113.927.000,00	97.572.550,00	16.354.450,00	85,64	
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	113.927.000,00	97.572.550,00	16.354.450,00	85,64	
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	113.927.000,00	97.572.550,00	16.354.450,00	85,64	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.07.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	88.265.500,00	83.465.500,00	4.800.000,00	94,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	88.265.500,00	83.465.500,00	4.800.000,00	94,56	
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	88.265.500,00	83.465.500,00	4.800.000,00	94,56	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.08.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	15.175.000,00	14.993.500,00	181.500,00	98,80	
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	15.175.000,00	14.993.500,00	181.500,00	98,80	
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	14.993.500,00	181.500,00	98,80	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.02.09.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.10.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	140.578.500,00	116.408.500,00	24.170.000,00	82,81	
1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.	BELANJA OPERASI	140.578.500,00	116.408.500,00	24.170.000,00	82,81	
1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	140.578.500,00	116.408.500,00	24.170.000,00	82,81	
1.02.1.02.0.002.2.02.11.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	158.970.000,00	118.978.200,00	39.991.800,00	74,84	
1.02.1.02.0.002.2.02.11.5.1.	BELANJA OPERASI	158.970.000,00	118.978.200,00	39.991.800,00	74,84	
1.02.1.02.0.002.2.02.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	158.970.000,00	118.978.200,00	39.991.800,00	74,84	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	156.350.000,00	131.835.000,00	24.515.000,00	84,32	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1.	BELANJA OPERASI	156.350.000,00	131.835.000,00	24.515.000,00	84,32	
1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	156.350.000,00	131.835.000,00	24.515.000,00	84,32	
1.02.1.02.0.002.2.02.13.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	7.344.738.899,00	7.032.790.708,00	311.948.191,00	95,75	
1.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1.	BELANJA OPERASI	7.344.738.899,00	7.032.790.708,00	311.948.191,00	95,75	
1.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.344.738.899,00	7.032.790.708,00	311.948.191,00	95,75	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	2.192.763.390,00	2.042.465.750,00	150.297.640,00	93,15	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.1.	BELANJA OPERASI	762.529.390,00	704.221.250,00	58.308.140,00	92,35	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	762.529.390,00	704.221.250,00	58.308.140,00	92,35	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.2.	BELANJA MODAL	1.430.234.000,00	1.338.244.500,00	91.989.500,00	93,57	
1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.430.234.000,00	1.338.244.500,00	91.989.500,00	93,57	
1.02.1.02.0.002.2.02.16.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAAHRAKA	58.894.400,00	44.467.000,00	14.427.400,00	75,50	
1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.1.	BELANJA OPERASI	58.894.400,00	44.467.000,00	14.427.400,00	75,50	
1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.894.400,00	44.467.000,00	14.427.400,00	75,50	
1.02.1.02.0.002.2.02.17.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	559.597.370,00	522.700.860,00	36.896.510,00	93,41	
1.02.1.02.0.002.2.02.17.5.1.	BELANJA OPERASI	559.597.370,00	522.700.860,00	36.896.510,00	93,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.17.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	559.597.370,00	522.700.860,00	36.896.510,00	93,41	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.	PENGLOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	320.344.600,00	300.697.976,00	19.646.624,00	93,87	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.1.	BELANJA OPERASI	318.145.720,00	298.547.976,00	19.597.744,00	93,84	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	318.145.720,00	298.547.976,00	19.597.744,00	93,84	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.2.	BELANJA MODAL	2.198.880,00	2.150.000,00	48.880,00	97,78	
1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.198.880,00	2.150.000,00	48.880,00	97,78	
1.02.1.02.0.002.2.02.20.	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	522.366.590,00	446.583.180,00	75.783.410,00	85,49	
1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.1.	BELANJA OPERASI	522.366.590,00	446.583.180,00	75.783.410,00	85,49	
1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	522.366.590,00	446.583.180,00	75.783.410,00	85,49	
1.02.1.02.0.002.2.02.25.	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	691.219.086,00	583.953.500,00	107.265.586,00	84,48	
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.	BELANJA OPERASI	691.219.086,00	583.953.500,00	107.265.586,00	84,48	
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	691.219.086,00	583.953.500,00	107.265.586,00	84,48	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	31.530.420.962,00	26.873.859.029,00	4.656.561.933,00	85,23	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.	BELANJA OPERASI	31.235.420.962,00	26.579.359.029,00	4.656.061.933,00	85,09	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.235.420.962,00	26.579.359.029,00	4.656.061.933,00	85,09	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.2.	BELANJA MODAL	295.000.000,00	294.500.000,00	500.000,00	99,83	
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.000.000,00	294.500.000,00	500.000,00	99,83	
1.02.1.02.0.002.2.02.30.	PENYEDIAAN TELEMEDICINE DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	131.000.000,00	119.849.800,00	11.150.200,00	91,49	
1.02.1.02.0.002.2.02.30.5.1.	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	33.452.500,00	5.047.500,00	86,89	
1.02.1.02.0.002.2.02.30.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	33.452.500,00	5.047.500,00	86,89	
1.02.1.02.0.002.2.02.30.5.2.	BELANJA MODAL	92.500.000,00	86.397.300,00	6.102.700,00	93,40	
1.02.1.02.0.002.2.02.30.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.500.000,00	86.397.300,00	6.102.700,00	93,40	
1.02.1.02.0.002.2.02.32.	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	2.333.484.736,00	2.308.368.886,00	25.115.850,00	98,92	
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.	BELANJA OPERASI	2.333.484.736,00	2.308.368.886,00	25.115.850,00	98,92	
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.333.484.736,00	2.308.368.886,00	25.115.850,00	98,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.02.33.	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	466.015.900,00	283.711.805,00	182.304.095,00	60,88	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.	BELANJA OPERASI	466.015.900,00	283.711.805,00	182.304.095,00	60,88	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	147.713.253,00	79.015.714,00	68.697.539,00	53,49	
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	318.302.647,00	204.696.091,00	113.606.556,00	64,31	
1.02.1.02.0.002.2.02.35.	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	743.764.700,00	-	743.764.700,00	0,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1.	BELANJA OPERASI	743.764.700,00	-	743.764.700,00	0,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	743.764.700,00	-	743.764.700,00	0,00	
1.02.1.02.0.002.2.02.39.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA	227.700.000,00	134.650.000,00	93.050.000,00	59,13	
1.02.1.02.0.002.2.02.39.5.1.	BELANJA OPERASI	227.700.000,00	134.650.000,00	93.050.000,00	59,13	
1.02.1.02.0.002.2.02.39.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	227.700.000,00	134.650.000,00	93.050.000,00	59,13	
1.02.1.02.0.002.2.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	252.940.556,00	192.989.068,00	59.951.488,00	76,30	
1.02.1.02.0.002.2.03.01.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	230.951.756,00	177.739.068,00	53.212.688,00	76,96	
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	230.951.756,00	177.739.068,00	53.212.688,00	76,96	
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	230.951.756,00	177.739.068,00	53.212.688,00	76,96	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.	PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET	21.988.800,00	15.250.000,00	6.738.800,00	69,35	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.5.2.	BELANJA MODAL	21.988.800,00	15.250.000,00	6.738.800,00	69,35	
1.02.1.02.0.002.2.03.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.988.800,00	15.250.000,00	6.738.800,00	69,35	
1.02.1.02.0.002.2.04.	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.235.915.868,00	9.566.052.226,00	669.863.642,00	93,46	
1.02.1.02.0.002.2.04.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	35.398.058,00	34.150.000,00	1.248.058,00	96,47	
1.02.1.02.0.002.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	35.398.058,00	34.150.000,00	1.248.058,00	96,47	
1.02.1.02.0.002.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.398.058,00	34.150.000,00	1.248.058,00	96,47	
1.02.1.02.0.002.2.04.02.	PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.980.000,00	78.980.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	78.980.000,00	78.980.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.002.2.04.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	78.980.000,00	78.980.000,00	-	100,00	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.04.03.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	9.866.397.810,00	9.400.932.226,00	465.465.584,00	95,28	
1.02.1.02.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.866.397.810,00	9.400.932.226,00	465.465.584,00	95,28	
1.02.1.02.0.002.2.04.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.666.397.810,00	9.200.932.226,00	465.465.584,00	95,18	
2.						
1.02.1.02.0.002.2.04.03.5.1.0	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
5.						
1.02.1.02.0.002.2.04.04.	PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	255.140.000,00	51.990.000,00	203.150.000,00	20,38	
1.02.1.02.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	255.140.000,00	51.990.000,00	203.150.000,00	20,38	
1.02.1.02.0.002.2.04.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	255.140.000,00	51.990.000,00	203.150.000,00	20,38	
2.						
1.02.1.02.0.003.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.922.476.262,00	8.014.524.786,00	907.951.476,00	89,82	
1.02.1.02.0.003.2.01.	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.	PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.						
1.02.1.02.0.003.2.02.	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	8.688.188.862,00	7.801.205.586,00	886.983.276,00	89,79	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	8.639.105.462,00	7.753.355.586,00	885.749.876,00	89,75	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	8.639.105.462,00	7.753.355.586,00	885.749.876,00	89,75	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.639.105.462,00	7.753.355.586,00	885.749.876,00	89,75	
2.						
1.02.1.02.0.003.2.02.03.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	49.083.400,00	47.850.000,00	1.233.400,00	97,49	
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	49.083.400,00	47.850.000,00	1.233.400,00	97,49	
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	49.083.400,00	47.850.000,00	1.233.400,00	97,49	
2.						
1.02.1.02.0.003.2.03.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	211.787.400,00	190.819.200,00	20.968.200,00	90,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.003.2.03.01.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	211.787.400,00	190.819.200,00	20.968.200,00	90,10	
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	211.787.400,00	190.819.200,00	20.968.200,00	90,10	
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	211.787.400,00	190.819.200,00	20.968.200,00	90,10	
1.02.1.02.0.004.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	970.681.481,00	903.894.982,00	66.786.499,00	93,12	
1.02.1.02.0.004.2.01.	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	76.977.000,00	68.365.000,00	8.612.000,00	88,81	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	76.977.000,00	68.365.000,00	8.612.000,00	88,81	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	76.977.000,00	68.365.000,00	8.612.000,00	88,81	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	76.977.000,00	68.365.000,00	8.612.000,00	88,81	
1.02.1.02.0.004.2.03.	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	152.423.309,00	146.587.750,00	5.835.559,00	96,17	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	152.423.309,00	146.587.750,00	5.835.559,00	96,17	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	152.423.309,00	146.587.750,00	5.835.559,00	96,17	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	152.423.309,00	146.587.750,00	5.835.559,00	96,17	
1.02.1.02.0.004.2.04.	PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	254.053.756,00	248.120.342,00	5.933.414,00	97,66	
1.02.1.02.0.004.2.04.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	254.053.756,00	248.120.342,00	5.933.414,00	97,66	
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	254.053.756,00	248.120.342,00	5.933.414,00	97,66	
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	254.053.756,00	248.120.342,00	5.933.414,00	97,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.004.2.05.	PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	164.112.936,00	161.070.390,00	3.042.546,00	98,15	
1.02.1.02.0.004.2.05.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	164.112.936,00	161.070.390,00	3.042.546,00	98,15	
1.02.1.02.0.004.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	164.112.936,00	161.070.390,00	3.042.546,00	98,15	
1.02.1.02.0.004.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.112.936,00	161.070.390,00	3.042.546,00	98,15	
1.02.1.02.0.004.2.06.	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	323.114.480,00	279.751.500,00	43.362.980,00	86,58	
1.02.1.02.0.004.2.06.01.	PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	323.114.480,00	279.751.500,00	43.362.980,00	86,58	
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	323.114.480,00	279.751.500,00	43.362.980,00	86,58	
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	323.114.480,00	279.751.500,00	43.362.980,00	86,58	
1.02.1.02.0.005.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	279.809.000,00	263.680.000,00	16.129.000,00	94,24	
1.02.1.02.0.005.2.01.	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.029.200,00	180.165.000,00	12.864.200,00	93,34	
1.02.1.02.0.005.2.01.01.	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	193.029.200,00	180.165.000,00	12.864.200,00	93,34	
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	193.029.200,00	180.165.000,00	12.864.200,00	93,34	
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	193.029.200,00	180.165.000,00	12.864.200,00	93,34	
1.02.1.02.0.005.2.03.	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.779.800,00	83.515.000,00	3.264.800,00	96,24	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	86.779.800,00	83.515.000,00	3.264.800,00	96,24	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	86.779.800,00	83.515.000,00	3.264.800,00	96,24	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	86.779.800,00	83.515.000,00	3.264.800,00	96,24	
	JUMLAH BELANJA	458.105.293.984,00	447.623.317.455,90	10.481.976.528,10	97,71	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(289.118.760.033,00)	(255.144.303.061,76)	(33.974.456.971,24)	88,25	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(289.118.760.033,00)	(255.144.303.061,76)	(33.974.456.971,24)	88,25	
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	-------	--

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.2.10.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.0	PENDAPATAN	15.125.050.000,00	6.363.880.145,17	8.761.169.854,83	42,08	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.125.050.000,00	6.363.880.145,17	8.761.169.854,83	42,08	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	15.125.050.000,00	6.363.880.145,17	8.761.169.854,83	42,08	
	JUMLAH PENDAPATAN	15.125.050.000,00	6.363.880.145,17	8.761.169.854,83	42,08	
1.03.1.03.0.00.2.10.01.00.0	BELANJA	239.807.061.077,00	205.603.703.843,68	34.203.357.233,32	85,74	
1.03.1.03.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.502.107.395,00	17.202.181.786,00	1.299.925.609,00	92,97	
1.03.1.03.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	122.545.725,00	102.661.561,00	19.884.164,00	83,77	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	48.158.440,00	33.857.830,00	14.300.610,00	70,31	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	48.158.440,00	33.857.830,00	14.300.610,00	70,31	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	44.118.440,00	29.817.830,00	14.300.610,00	67,59	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.948.575,00	10.144.876,00	803.699,00	92,66	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.948.575,00	10.144.876,00	803.699,00	92,66	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.928.575,00	8.124.876,00	803.699,00	91,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.948.575,00	10.223.910,00	724.665,00	93,38	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	10.948.575,00	10.223.910,00	724.665,00	93,38	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.928.575,00	8.203.910,00	724.665,00	91,88	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.948.575,00	10.159.230,00	789.345,00	92,79	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	10.948.575,00	10.159.230,00	789.345,00	92,79	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.928.575,00	8.139.230,00	789.345,00	91,16	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	10.948.575,00	10.158.240,00	790.335,00	92,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.948.575,00	10.158.240,00	790.335,00	92,78	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.928.575,00	8.138.240,00	790.335,00	91,15	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.948.575,00	10.121.610,00	826.965,00	92,45	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.948.575,00	10.121.610,00	826.965,00	92,45	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.928.575,00	8.101.610,00	826.965,00	90,74	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.644.410,00	17.995.865,00	1.648.545,00	91,61	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	19.644.410,00	17.995.865,00	1.648.545,00	91,61	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.604.410,00	13.955.865,00	1.648.545,00	89,44	
1.03.1.03.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.110.422.250,00	7.371.612.844,00	738.809.406,00	90,89	
1.03.1.03.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.095.352.995,00	7.357.579.579,00	737.773.416,00	90,89	
1.03.1.03.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.095.352.995,00	7.357.579.579,00	737.773.416,00	90,89	
1.03.1.03.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.095.352.995,00	7.357.579.579,00	737.773.416,00	90,89	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	15.069.255,00	14.033.265,00	1.035.990,00	93,13	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	15.069.255,00	14.033.265,00	1.035.990,00	93,13	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.049.255,00	12.013.265,00	1.035.990,00	92,06	
1.03.1.03.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	27.403.510,00	25.020.135,00	2.383.375,00	91,30	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.511.755,00	9.250.520,00	1.261.235,00	88,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.511.755,00	9.250.520,00	1.261.235,00	88,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.491.755,00	7.230.520,00	1.261.235,00	85,15	
1.03.1.03.0.001.2.03.03.	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	8.491.755,00	7.369.615,00	1.122.140,00	86,79	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.491.755,00	7.369.615,00	1.122.140,00	86,79	
1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.491.755,00	7.369.615,00	1.122.140,00	86,79	
1.03.1.03.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	742.887.001,00	697.710.610,00	45.176.391,00	93,92	
1.03.1.03.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.690.600,00	13.864.100,00	2.826.500,00	83,07	
1.03.1.03.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	16.690.600,00	13.864.100,00	2.826.500,00	83,07	
1.03.1.03.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.690.600,00	13.864.100,00	2.826.500,00	83,07	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	175.097.715,00	156.805.400,00	18.292.315,00	89,55	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	175.097.715,00	156.805.400,00	18.292.315,00	89,55	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	142.697.715,00	124.405.400,00	18.292.315,00	87,18	
1.03.1.03.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.126.400,00	43.452.240,00	15.674.160,00	73,49	
1.03.1.03.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	59.126.400,00	43.452.240,00	15.674.160,00	73,49	
1.03.1.03.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	59.126.400,00	43.452.240,00	15.674.160,00	73,49	
1.03.1.03.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.585.231,00	65.343.840,00	7.241.391,00	90,02	
1.03.1.03.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	72.585.231,00	65.343.840,00	7.241.391,00	90,02	
1.03.1.03.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.585.231,00	65.343.840,00	7.241.391,00	90,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.200.000,00	12.804.000,00	396.000,00	97,00	
1.03.1.03.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	12.804.000,00	396.000,00	97,00	
1.03.1.03.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	12.804.000,00	396.000,00	97,00	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	280.788.000,00	280.439.975,00	348.025,00	99,88	
1.03.1.03.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	280.788.000,00	280.439.975,00	348.025,00	99,88	
1.03.1.03.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	280.788.000,00	280.439.975,00	348.025,00	99,88	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	125.399.055,00	125.001.055,00	398.000,00	99,68	
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.1.	BELANJA OPERASI	60.399.055,00	60.399.055,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	60.399.055,00	60.399.055,00	-	100,00	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.2.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	64.602.000,00	398.000,00	99,39	
1.03.1.03.0.001.2.06.11.5.2.0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.602.000,00	398.000,00	99,39	
5.						
1.03.1.03.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.490.674.520,00	5.445.381.525,00	45.292.995,00	99,18	
1.03.1.03.0.001.2.07.03.	PENGADAAN ALAT BESAR	5.300.000.000,00	5.259.057.000,00	40.943.000,00	99,23	
1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.2.	BELANJA MODAL	5.300.000.000,00	5.259.057.000,00	40.943.000,00	99,23	
1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.300.000.000,00	5.259.057.000,00	40.943.000,00	99,23	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	190.674.520,00	186.324.525,00	4.349.995,00	97,72	
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.700.000,00	800.000,00	77,14	
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.1.0	Belanja Pegawai	3.500.000,00	2.700.000,00	800.000,00	77,14	
1.						
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	187.174.520,00	183.624.525,00	3.549.995,00	98,10	
1.03.1.03.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.174.520,00	183.624.525,00	3.549.995,00	98,10	
2.						
1.03.1.03.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.332.737.445,00	1.262.432.250,00	70.305.195,00	94,72	
1.03.1.03.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	374.957.445,00	329.211.450,00	45.745.995,00	87,80	
1.03.1.03.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	374.957.445,00	329.211.450,00	45.745.995,00	87,80	
1.03.1.03.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	374.957.445,00	329.211.450,00	45.745.995,00	87,80	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	957.780.000,00	933.220.800,00	24.559.200,00	97,44	
1.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	957.780.000,00	933.220.800,00	24.559.200,00	97,44	
1.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	20.944.000,00	20.944.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	936.836.000,00	912.276.800,00	24.559.200,00	97,38	
1.03.1.03.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.664.436.944,00	2.286.362.861,00	378.074.083,00	85,81	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	387.380.000,00	278.177.950,00	109.202.050,00	71,81	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	387.380.000,00	278.177.950,00	109.202.050,00	71,81	
1.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	387.380.000,00	278.177.950,00	109.202.050,00	71,81	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	342.212.800,00	199.890.850,00	142.321.950,00	58,41	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	342.212.800,00	199.890.850,00	142.321.950,00	58,41	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	-	12.120.000,00	0,00	
1.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	330.092.800,00	199.890.850,00	130.201.950,00	60,56	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	1.875.944.144,00	1.794.305.661,00	81.638.483,00	95,65	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.875.944.144,00	1.794.305.661,00	81.638.483,00	95,65	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.001.2.09.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.873.904.144,00	1.792.265.661,00	81.638.483,00	95,64	
1.03.1.03.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	58.900.000,00	13.988.400,00	44.911.600,00	23,75	
1.03.1.03.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	58.900.000,00	13.988.400,00	44.911.600,00	23,75	
1.03.1.03.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	13.988.400,00	44.911.600,00	23,75	
1.03.1.03.0.002.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45.802.998.661,00	40.951.375.931,73	4.851.622.729,27	89,41	
1.03.1.03.0.002.2.01.	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.735.758.661,00	39.896.435.931,73	4.839.322.729,27	89,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.002.2.01.03.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DRAINASE UTAMA PERKOTAAN DAN PENGAMAN PANTAI	791.351.754,00	740.393.116,00	50.958.638,00	93,56	
1.03.1.03.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	791.351.754,00	740.393.116,00	50.958.638,00	93,56	
1.03.1.03.0.002.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	788.631.754,00	737.673.116,00	50.958.638,00	93,54	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.	PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	1.050.886.609,00	1.003.845.726,43	47.040.882,57	95,52	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	62.320.000,00	61.010.929,00	1.309.071,00	97,90	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	59.600.000,00	58.290.929,00	1.309.071,00	97,80	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.2.	BELANJA MODAL	988.566.609,00	942.834.797,43	45.731.811,57	95,37	
1.03.1.03.0.002.2.01.10.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	988.566.609,00	942.834.797,43	45.731.811,57	95,37	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.	PEMBANGUNAN STASIUN POMPA BANJIR	11.143.000.000,00	7.092.355.752,30	4.050.644.247,70	63,65	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	506.981.203,00	506.277.000,00	704.203,00	99,86	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	506.981.203,00	506.277.000,00	704.203,00	99,86	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	10.636.018.797,00	6.586.078.752,30	4.049.940.044,70	61,92	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.389.579.950,00	3.071.359.603,30	1.318.220.346,70	69,97	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.006.188.847,00	757.342.000,00	248.846.847,00	75,27	
1.03.1.03.0.002.2.01.13.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.240.250.000,00	2.757.377.149,00	2.482.872.851,00	52,62	
1.03.1.03.0.002.2.01.24.	REHABILITASI TANGGUL SUNGAI	4.537.755.266,00	4.311.040.833,00	226.714.433,00	95,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.1.	BELANJA OPERASI	4.537.755.266,00	4.311.040.833,00	226.714.433,00	95,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.24.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.537.755.266,00	4.311.040.833,00	226.714.433,00	95,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.26.	REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR	895.974.532,00	721.695.752,00	174.278.780,00	80,55	
1.03.1.03.0.002.2.01.26.5.1.	BELANJA OPERASI	895.974.532,00	721.695.752,00	174.278.780,00	80,55	
1.03.1.03.0.002.2.01.26.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	895.974.532,00	721.695.752,00	174.278.780,00	80,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.002.2.01.46.	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	26.316.790.500,00	26.027.104.752,00	289.685.748,00	98,90	
1.03.1.03.0.002.2.01.46.5.1.	BELANJA OPERASI	26.316.790.500,00	26.027.104.752,00	289.685.748,00	98,90	
1.03.1.03.0.002.2.01.46.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	143.960.000,00	143.960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.002.2.01.46.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.172.830.500,00	25.883.144.752,00	289.685.748,00	98,89	
1.03.1.03.0.002.2.02.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.067.240.000,00	1.054.940.000,00	12.300.000,00	98,85	
1.03.1.03.0.002.2.02.14.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.067.240.000,00	1.054.940.000,00	12.300.000,00	98,85	
1.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1.	BELANJA OPERASI	1.067.240.000,00	1.054.940.000,00	12.300.000,00	98,85	
1.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.067.240.000,00	1.054.940.000,00	12.300.000,00	98,85	
1.03.1.03.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.389.382.000,00	12.189.923.272,05	199.458.727,95	98,39	
1.03.1.03.0.003.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.389.382.000,00	12.189.923.272,05	199.458.727,95	98,39	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	402.584.700,00	391.034.073,00	11.550.627,00	97,13	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	402.584.700,00	391.034.073,00	11.550.627,00	97,13	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.640.000,00	12.640.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	389.944.700,00	378.394.073,00	11.550.627,00	97,04	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	11.945.997.300,00	11.758.089.199,05	187.908.100,95	98,43	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	49.920.000,00	49.920.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	49.920.000,00	49.920.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	11.896.077.300,00	11.708.169.199,05	187.908.100,95	98,42	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.000.000,00	425.077.984,74	4.922.015,26	98,86	
1.03.1.03.0.003.2.01.07.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.466.077.300,00	11.283.091.214,31	182.986.085,69	98,40	
1.03.1.03.0.003.2.01.16.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DI KAWASAN PERDESAAN	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.16.5.1.	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.003.2.01.16.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.004.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.500.000.000,00	5.264.370.000,00	235.630.000,00	95,72	
1.03.1.03.0.004.2.01.	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.500.000.000,00	5.264.370.000,00	235.630.000,00	95,72	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	132.529.400,00	13.930.400,00	118.599.000,00	10,51	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	132.529.400,00	13.930.400,00	118.599.000,00	10,51	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.620.000,00	8.620.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	123.909.400,00	5.310.400,00	118.599.000,00	4,29	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.	PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5.367.470.600,00	5.250.439.600,00	117.031.000,00	97,82	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	32.960.000,00	16.480.000,00	16.480.000,00	50,00	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	32.960.000,00	16.480.000,00	16.480.000,00	50,00	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	5.334.510.600,00	5.233.959.600,00	100.551.000,00	98,12	
1.03.1.03.0.004.2.01.05.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.334.510.600,00	5.233.959.600,00	100.551.000,00	98,12	
1.03.1.03.0.005.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	47.538.000,00	99,01	
1.03.1.03.0.005.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	47.538.000,00	99,01	
1.03.1.03.0.005.2.01.06.	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	47.538.000,00	99,01	
1.03.1.03.0.005.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	47.538.000,00	99,01	
1.03.1.03.0.005.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	47.538.000,00	99,01	
1.03.1.03.0.006.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.223.000.387,00	11.983.417.779,11	3.239.582.607,89	78,72	
1.03.1.03.0.006.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.223.000.387,00	11.983.417.779,11	3.239.582.607,89	78,72	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	12.202.881.813,00	9.551.162.479,11	2.651.719.333,89	78,27	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	49.440.000,00	49.440.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	49.440.000,00	49.440.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	12.153.441.813,00	9.501.722.479,11	2.651.719.333,89	78,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.006.2.01.05.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.153.441.813,00	9.501.722.479,11	2.651.719.333,89	78,18	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.	REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	3.020.118.574,00	2.432.255.300,00	587.863.274,00	80,54	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.933.118.574,00	2.357.630.000,00	575.488.574,00	80,38	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.540.000,00	12.100.000,00	12.440.000,00	49,31	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.908.578.574,00	2.345.530.000,00	563.048.574,00	80,64	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	87.000.000,00	74.625.300,00	12.374.700,00	85,78	
1.03.1.03.0.006.2.01.07.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.000.000,00	74.625.300,00	12.374.700,00	85,78	
1.03.1.03.0.008.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	66.684.481.375,00	54.127.605.284,09	12.556.876.090,91	81,17	
1.03.1.03.0.008.2.01.	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	66.684.481.375,00	54.127.605.284,09	12.556.876.090,91	81,17	
1.03.1.03.0.008.2.01.01.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	179.421.100,00	179.421.100,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	179.421.100,00	179.421.100,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	18.960.000,00	18.960.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	160.461.100,00	160.461.100,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.624.878.975,00	53.084.784.584,09	12.540.094.390,91	80,89	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	11.454.825.643,00	7.230.894.401,08	4.223.931.241,92	63,13	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	78.480.000,00	78.480.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	847.256.000,00	729.361.428,00	117.894.572,00	86,09	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	10.529.089.643,00	6.423.052.973,08	4.106.036.669,92	61,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	54.170.053.332,00	45.853.890.183,01	8.316.163.148,99	84,65	
1.03.1.03.0.008.2.01.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.170.053.332,00	45.853.890.183,01	8.316.163.148,99	84,65	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.	REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	880.181.300,00	863.399.600,00	16.781.700,00	98,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	880.181.300,00	863.399.600,00	16.781.700,00	98,09	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	648.581.300,00	641.949.600,00	6.631.700,00	98,98	
1.03.1.03.0.008.2.01.12.5.1.0 5.	Belanja Hibah	200.000.000,00	189.850.000,00	10.150.000,00	94,93	
1.03.1.03.0.009.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	229.740.000,00	216.402.000,00	13.338.000,00	94,19	
1.03.1.03.0.009.2.01.	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	229.740.000,00	216.402.000,00	13.338.000,00	94,19	
1.03.1.03.0.009.2.01.03.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	229.740.000,00	216.402.000,00	13.338.000,00	94,19	
1.03.1.03.0.009.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	229.740.000,00	216.402.000,00	13.338.000,00	94,19	
1.03.1.03.0.009.2.01.03.5.1.0 5.	Belanja Hibah	229.740.000,00	216.402.000,00	13.338.000,00	94,19	
1.03.1.03.0.010.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.222.012.459,00	57.781.224.803,70	11.440.787.655,30	83,47	
1.03.1.03.0.010.2.01.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	69.222.012.459,00	57.781.224.803,70	11.440.787.655,30	83,47	
1.03.1.03.0.010.2.01.04.	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	205.315.225,00	106.040.000,00	99.275.225,00	51,65	
1.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	205.315.225,00	106.040.000,00	99.275.225,00	51,65	
1.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	11.690.000,00	11.690.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	193.625.225,00	94.350.000,00	99.275.225,00	48,73	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.	PEMBANGUNAN JALAN	52.826.342.962,00	42.014.320.891,70	10.812.022.070,30	79,53	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.671.692.000,00	3.479.655.655,00	192.036.345,00	94,77	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	199.380.000,00	199.380.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.472.312.000,00	3.280.275.655,00	192.036.345,00	94,47	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	49.154.650.962,00	38.534.665.236,70	10.619.985.725,30	78,39	
1.03.1.03.0.010.2.01.05.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.154.650.962,00	38.534.665.236,70	10.619.985.725,30	78,39	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.	REHABILITASI JALAN	10.804.075.136,00	10.587.168.820,00	216.906.316,00	97,99	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	10.804.075.136,00	10.587.168.820,00	216.906.316,00	97,99	
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	99.720.000,00	99.720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.704.355.136,00	10.487.448.820,00	216.906.316,00	97,97	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	2.144.464.000,00	2.091.858.092,00	52.605.908,00	97,55	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	589.566.000,00	588.057.710,00	1.508.290,00	99,74	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	38.820.000,00	38.820.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	550.746.000,00	549.237.710,00	1.508.290,00	99,73	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.2.	BELANJA MODAL	1.554.898.000,00	1.503.800.382,00	51.097.618,00	96,71	
1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.554.898.000,00	1.503.800.382,00	51.097.618,00	96,71	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.	REHABILITASI JEMBATAN	3.241.815.136,00	2.981.837.000,00	259.978.136,00	91,98	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.1.	BELANJA OPERASI	3.241.815.136,00	2.981.837.000,00	259.978.136,00	91,98	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	88.560.000,00	88.560.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.010.2.01.18.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.153.255.136,00	2.893.277.000,00	259.978.136,00	91,76	
1.03.1.03.0.011.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	43.357.600,00	43.284.800,00	72.800,00	99,83	
1.03.1.03.0.011.2.01.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	43.357.600,00	43.284.800,00	72.800,00	99,83	
1.03.1.03.0.011.2.01.04.	PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	3.614.000,00	3.610.000,00	4.000,00	99,89	
1.03.1.03.0.011.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.614.000,00	3.610.000,00	4.000,00	99,89	
1.03.1.03.0.011.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.614.000,00	3.610.000,00	4.000,00	99,89	
1.03.1.03.0.011.2.01.05.	IDENTIFIKASI POTENSI KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	39.743.600,00	39.674.800,00	68.800,00	99,83	
1.03.1.03.0.011.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	39.743.600,00	39.674.800,00	68.800,00	99,83	
1.03.1.03.0.011.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	39.743.600,00	39.674.800,00	68.800,00	99,83	
1.03.1.03.0.012.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.406.143.200,00	1.087.618.187,00	318.525.013,00	77,35	
1.03.1.03.0.012.2.01.	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	256.826.000,00	135.539.490,00	121.286.510,00	52,77	
1.03.1.03.0.012.2.01.02.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RRTR KABUPATEN/KOTA	128.277.300,00	57.576.790,00	70.700.510,00	44,88	
1.03.1.03.0.012.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	128.277.300,00	57.576.790,00	70.700.510,00	44,88	
1.03.1.03.0.012.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	128.277.300,00	57.576.790,00	70.700.510,00	44,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.012.2.01.04.	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG	128.548.700,00	77.962.700,00	50.586.000,00	60,65	
1.03.1.03.0.012.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	128.548.700,00	77.962.700,00	50.586.000,00	60,65	
1.03.1.03.0.012.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	128.548.700,00	77.962.700,00	50.586.000,00	60,65	
1.03.1.03.0.012.2.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.161.200,00	117.412.035,00	19.749.165,00	85,60	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.	SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG	137.161.200,00	117.412.035,00	19.749.165,00	85,60	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	137.161.200,00	117.412.035,00	19.749.165,00	85,60	
1.03.1.03.0.012.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	137.161.200,00	117.412.035,00	19.749.165,00	85,60	
1.03.1.03.0.012.2.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.012.156.000,00	834.666.662,00	177.489.338,00	82,46	
1.03.1.03.0.012.2.04.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF BIDANG PENATAAN RUANG	93.392.300,00	59.072.645,00	34.319.655,00	63,25	
1.03.1.03.0.012.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	93.392.300,00	59.072.645,00	34.319.655,00	63,25	
1.03.1.03.0.012.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	93.392.300,00	59.072.645,00	34.319.655,00	63,25	
1.03.1.03.0.012.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	164.142.900,00	127.123.100,00	37.019.800,00	77,45	
1.03.1.03.0.012.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	164.142.900,00	127.123.100,00	37.019.800,00	77,45	
1.03.1.03.0.012.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.142.900,00	127.123.100,00	37.019.800,00	77,45	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	754.620.800,00	648.470.917,00	106.149.883,00	85,93	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	754.620.800,00	648.470.917,00	106.149.883,00	85,93	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	745.620.800,00	639.470.917,00	106.149.883,00	85,76	
	JUMLAH BELANJA	239.807.061.077,00	205.603.703.843,68	34.203.357.233,32	85,74	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(224.682.011.077,00)	(199.239.823.698,51)	(25.442.187.378,49)	88,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(224.682.011.077,00)	(199.239.823.698,51)	(25.442.187.378,49)	88,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	30.420.926.685,00	29.364.083.743,00	1.056.842.942,00	96,53	
1.04.1.04.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.142.223.289,00	4.783.371.502,00	358.851.787,00	93,02	
1.04.1.04.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.920.703,00	5.793.250,00	127.453,00	97,85	
1.04.1.04.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.749.818,00	1.738.750,00	11.068,00	99,37	
1.04.1.04.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.749.818,00	1.738.750,00	11.068,00	99,37	
1.04.1.04.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.749.818,00	1.738.750,00	11.068,00	99,37	
1.04.1.04.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.170.885,00	4.054.500,00	116.385,00	97,21	
1.04.1.04.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.170.885,00	4.054.500,00	116.385,00	97,21	
1.04.1.04.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.885,00	4.054.500,00	116.385,00	97,21	
1.04.1.04.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.675.908.621,00	3.384.738.879,00	291.169.742,00	92,08	
1.04.1.04.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.673.860.071,00	3.382.753.879,00	291.106.192,00	92,08	
1.04.1.04.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.673.860.071,00	3.382.753.879,00	291.106.192,00	92,08	
1.04.1.04.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.673.860.071,00	3.382.753.879,00	291.106.192,00	92,08	
1.04.1.04.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.048.550,00	1.985.000,00	63.550,00	96,90	
1.04.1.04.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.048.550,00	1.985.000,00	63.550,00	96,90	
1.04.1.04.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.048.550,00	1.985.000,00	63.550,00	96,90	
1.04.1.04.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.536.464,00	1.469.000,00	67.464,00	95,61	
1.04.1.04.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.536.464,00	1.469.000,00	67.464,00	95,61	
1.04.1.04.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.536.464,00	1.469.000,00	67.464,00	95,61	
1.04.1.04.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.536.464,00	1.469.000,00	67.464,00	95,61	
1.04.1.04.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	434.750.783,00	430.365.059,00	4.385.724,00	98,99	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.435.850,00	5.058.000,00	377.850,00	93,05	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.782.100,00	3.409.000,00	373.100,00	90,14	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.782.100,00	3.409.000,00	373.100,00	90,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.001.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	1.653.750,00	1.649.000,00	4.750,00	99,71	
1.04.1.04.0.001.2.06.01.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.653.750,00	1.649.000,00	4.750,00	99,71	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.158.900,00	59.351.200,00	807.700,00	98,66	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	60.158.900,00	59.351.200,00	807.700,00	98,66	
1.04.1.04.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	60.158.900,00	59.351.200,00	807.700,00	98,66	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.482.100,00	13.368.000,00	2.114.100,00	86,34	
1.04.1.04.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	15.482.100,00	13.368.000,00	2.114.100,00	86,34	
1.04.1.04.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	15.482.100,00	13.368.000,00	2.114.100,00	86,34	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.726.973,00	15.901.000,00	825.973,00	95,06	
1.04.1.04.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	16.726.973,00	15.901.000,00	825.973,00	95,06	
1.04.1.04.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	16.726.973,00	15.901.000,00	825.973,00	95,06	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.522.350,00	4.380.000,00	142.350,00	96,85	
1.04.1.04.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.522.350,00	4.380.000,00	142.350,00	96,85	
1.04.1.04.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.522.350,00	4.380.000,00	142.350,00	96,85	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	332.424.610,00	332.306.859,00	117.751,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	332.424.610,00	332.306.859,00	117.751,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	332.424.610,00	332.306.859,00	117.751,00	99,96	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	223.018.000,00	202.183.000,00	20.835.000,00	90,66	
1.04.1.04.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	39.694.375,00	39.684.000,00	10.375,00	99,97	
1.04.1.04.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	39.694.375,00	39.684.000,00	10.375,00	99,97	
1.04.1.04.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.694.375,00	39.684.000,00	10.375,00	99,97	
2.						
1.04.1.04.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.283.625,00	70.259.000,00	24.625,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	70.283.625,00	70.259.000,00	24.625,00	99,96	
1.04.1.04.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.283.625,00	70.259.000,00	24.625,00	99,96	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	113.040.000,00	92.240.000,00	20.800.000,00	81,60	
1.04.1.04.0.001.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	113.040.000,00	92.240.000,00	20.800.000,00	81,60	
1.04.1.04.0.001.2.07.11.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	113.040.000,00	92.240.000,00	20.800.000,00	81,60	
1.04.1.04.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	604.468.718,00	562.498.874,00	41.969.844,00	93,06	
1.04.1.04.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.585.000,00	2.398.500,00	186.500,00	92,79	
1.04.1.04.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.585.000,00	2.398.500,00	186.500,00	92,79	
1.04.1.04.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.585.000,00	2.398.500,00	186.500,00	92,79	
1.04.1.04.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.370.000,00	9.360.000,00	21.010.000,00	30,82	
1.04.1.04.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	30.370.000,00	9.360.000,00	21.010.000,00	30,82	
1.04.1.04.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.370.000,00	9.360.000,00	21.010.000,00	30,82	
1.04.1.04.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	571.513.718,00	550.740.374,00	20.773.344,00	96,37	
1.04.1.04.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	571.513.718,00	550.740.374,00	20.773.344,00	96,37	
1.04.1.04.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	571.513.718,00	550.740.374,00	20.773.344,00	96,37	
1.04.1.04.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	196.620.000,00	196.323.440,00	296.560,00	99,85	
1.04.1.04.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	141.860.000,00	141.832.440,00	27.560,00	99,98	
1.04.1.04.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	141.860.000,00	141.832.440,00	27.560,00	99,98	
1.04.1.04.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	141.860.000,00	141.832.440,00	27.560,00	99,98	
1.04.1.04.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.570.000,00	44.431.000,00	139.000,00	99,69	
1.04.1.04.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	44.570.000,00	44.431.000,00	139.000,00	99,69	
1.04.1.04.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	44.570.000,00	44.431.000,00	139.000,00	99,69	
1.04.1.04.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.190.000,00	10.060.000,00	130.000,00	98,72	
1.04.1.04.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.190.000,00	10.060.000,00	130.000,00	98,72	
1.04.1.04.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.190.000,00	10.060.000,00	130.000,00	98,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	450.000.000,00	98.570.994,00	351.429.006,00	21,90	
1.04.1.04.0.002.2.01.	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	98.570.994,00	1.429.006,00	98,57	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	98.570.994,00	1.429.006,00	98,57	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.570.994,00	1.429.006,00	98,57	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	95.900.000,00	94.470.994,00	1.429.006,00	98,51	
1.04.1.04.0.002.2.03.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.002.2.03.01.	REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.002.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.540.000,00	-	3.540.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	346.460.000,00	-	346.460.000,00	0,00	
1.04.1.04.0.003.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.895.615.300,00	17.874.662.679,00	20.952.621,00	99,88	
1.04.1.04.0.003.2.01.	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	250.000.000,00	249.372.685,00	627.315,00	99,75	
1.04.1.04.0.003.2.01.02.	PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIEW SERTA LEGALISASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	250.000.000,00	249.372.685,00	627.315,00	99,75	
1.04.1.04.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.372.685,00	627.315,00	99,75	
1.04.1.04.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.372.685,00	627.315,00	99,75	
1.04.1.04.0.003.2.02.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	111.850.200,00	101.370.000,00	10.480.200,00	90,63	
1.04.1.04.0.003.2.02.02.	PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	100.065.100,00	92.370.000,00	7.695.100,00	92,31	
1.04.1.04.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	100.065.100,00	92.370.000,00	7.695.100,00	92,31	
1.04.1.04.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.065.100,00	92.370.000,00	7.695.100,00	92,31	
1.04.1.04.0.003.2.02.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENATAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	11.785.100,00	9.000.000,00	2.785.100,00	76,37	
1.04.1.04.0.003.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	11.785.100,00	9.000.000,00	2.785.100,00	76,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.003.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.785.100,00	9.000.000,00	2.785.100,00	76,37	
1.04.1.04.0.003.2.03.	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	17.533.765.100,00	17.523.919.994,00	9.845.106,00	99,94	
1.04.1.04.0.003.2.03.01.	PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN/PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH	100.000.000,00	98.775.830,00	1.224.170,00	98,78	
1.04.1.04.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.775.830,00	1.224.170,00	98,78	
1.04.1.04.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.775.830,00	1.224.170,00	98,78	
1.04.1.04.0.003.2.03.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	216.798.000,00	215.113.014,00	1.684.986,00	99,22	
1.04.1.04.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	216.798.000,00	215.113.014,00	1.684.986,00	99,22	
1.04.1.04.0.003.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	216.798.000,00	215.113.014,00	1.684.986,00	99,22	
1.04.1.04.0.003.2.03.07.	PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	65.100,00	-	65.100,00	0,00	
1.04.1.04.0.003.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	65.100,00	-	65.100,00	0,00	
1.04.1.04.0.003.2.03.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.100,00	-	65.100,00	0,00	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.	PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI	17.216.902.000,00	17.210.031.150,00	6.870.850,00	99,96	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	17.214.336.600,00	17.210.031.150,00	4.305.450,00	99,97	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.462.636.600,00	7.458.331.150,00	4.305.450,00	99,94	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000,00	9.744.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.5.2.	BELANJA MODAL	2.565.400,00	-	2.565.400,00	0,00	
1.04.1.04.0.003.2.03.08.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.565.400,00	-	2.565.400,00	0,00	
1.04.1.04.0.004.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.500.630.000,00	2.500.555.677,00	74.323,00	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.500.630.000,00	2.500.555.677,00	74.323,00	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	2.500.630.000,00	2.500.555.677,00	74.323,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.499.349.700,00	2.499.275.377,00	74.323,00	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.090.000,00	7.090.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.492.259.700,00	2.492.185.377,00	74.323,00	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	1.280.300,00	1.280.300,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.004.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.280.300,00	1.280.300,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.005.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.332.458.096,00	4.007.538.891,00	324.919.205,00	92,50	
1.04.1.04.0.005.2.01.	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	4.332.458.096,00	4.007.538.891,00	324.919.205,00	92,50	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	264.000.000,00	243.652.593,00	20.347.407,00	92,29	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	264.000.000,00	243.652.593,00	20.347.407,00	92,29	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	261.950.000,00	241.602.593,00	20.347.407,00	92,23	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	4.044.798.096,00	3.740.231.298,00	304.566.798,00	92,47	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	513.395.096,00	473.231.298,00	40.163.798,00	92,18	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	40.480.000,00	28.650.000,00	11.830.000,00	70,78	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	472.915.096,00	444.581.298,00	28.333.798,00	94,01	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	264.403.000,00	92,51	
1.04.1.04.0.005.2.01.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	264.403.000,00	92,51	
1.04.1.04.0.005.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	23.660.000,00	23.655.000,00	5.000,00	99,98	
1.04.1.04.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	23.660.000,00	23.655.000,00	5.000,00	99,98	
1.04.1.04.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.660.000,00	23.655.000,00	5.000,00	99,98	
2.10.1.04.0.010.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000,00	99.384.000,00	616.000,00	99,38	
2.10.1.04.0.010.2.01.	PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.384.000,00	616.000,00	99,38	
2.10.1.04.0.010.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.384.000,00	616.000,00	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1.04.0.010.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.384.000,00	616.000,00	99,38	
2.10.1.04.0.010.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.384.000,00	616.000,00	99,38	
	JUMLAH BELANJA	30.420.926.685,00	29.364.083.743,00	1.056.842.942,00	96,53	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(30.420.926.685,00)	(29.364.083.743,00)	(1.056.842.942,00)	96,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.420.926.685,00)	(29.364.083.743,00)	(1.056.842.942,00)	96,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	9.603.365.028,00	8.795.649.835,00	807.715.193,00	91,59	
1.05.1.05.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.140.921.224,00	8.333.221.931,00	807.699.293,00	91,16	
1.05.1.05.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.829.400,00	17.728.000,00	101.400,00	99,43	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.992.900,00	3.891.500,00	101.400,00	97,46	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.992.900,00	3.891.500,00	101.400,00	97,46	
1.05.1.05.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.992.900,00	3.891.500,00	101.400,00	97,46	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.943.200,00	2.943.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.943.200,00	2.943.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.943.200,00	2.943.200,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.922.500,00	1.922.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.922.500,00	1.922.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.922.500,00	1.922.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.479.500,00	2.479.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.479.500,00	2.479.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.479.500,00	2.479.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.116.300,00	4.116.300,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.116.300,00	4.116.300,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.116.300,00	4.116.300,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.632.694.028,00	5.871.897.132,00	760.796.896,00	88,53	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.628.186.328,00	5.867.389.432,00	760.796.896,00	88,52	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.628.186.328,00	5.867.389.432,00	760.796.896,00	88,52	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.628.186.328,00	5.867.389.432,00	760.796.896,00	88,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.388.800,00	3.388.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.388.800,00	3.388.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.388.800,00	3.388.800,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.118.900,00	1.118.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.118.900,00	1.118.900,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.118.900,00	1.118.900,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.714.600,00	3.714.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.834.500,00	1.834.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.834.500,00	1.834.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.834.500,00	1.834.500,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.880.100,00	1.880.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.880.100,00	1.880.100,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.880.100,00	1.880.100,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	322.235.596,00	321.811.695,00	423.901,00	99,87	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.758.800,00	6.758.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.758.800,00	6.758.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.758.800,00	6.758.800,00	-	100,00	
2.						
1.05.1.05.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.009.600,00	60.009.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	60.009.600,00	60.009.600,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	60.009.600,00	60.009.600,00	-	100,00	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.290.696,00	74.030.696,00	260.000,00	99,65	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	74.290.696,00	74.030.696,00	260.000,00	99,65	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.290.696,00	74.030.696,00	260.000,00	99,65	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.072.500,00	19.072.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	19.072.500,00	19.072.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.072.500,00	19.072.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.040.000,00	23.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	23.040.000,00	23.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	23.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	139.064.000,00	138.900.099,00	163.901,00	99,88	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	139.064.000,00	138.900.099,00	163.901,00	99,88	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	139.064.000,00	138.900.099,00	163.901,00	99,88	
1.05.1.05.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.149.600,00	37.216.892,00	1.932.708,00	95,06	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	39.149.600,00	37.216.892,00	1.932.708,00	95,06	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	39.149.600,00	37.216.892,00	1.932.708,00	95,06	
1.05.1.05.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.149.600,00	37.216.892,00	1.932.708,00	95,06	
1.05.1.05.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.579.928.000,00	1.543.285.862,00	36.642.138,00	97,68	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	110.115.000,00	92.868.062,00	17.246.938,00	84,34	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.115.000,00	92.868.062,00	17.246.938,00	84,34	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.115.000,00	92.868.062,00	17.246.938,00	84,34	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.560.000,00	102.165.000,00	19.395.000,00	84,04	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	121.560.000,00	102.165.000,00	19.395.000,00	84,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	121.560.000,00	102.165.000,00	19.395.000,00	84,04	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.342.853.000,00	1.342.852.800,00	200,00	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.342.853.000,00	1.342.852.800,00	200,00	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.342.853.000,00	1.342.852.800,00	200,00	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	501.270.000,00	493.467.750,00	7.802.250,00	98,44	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	286.980.000,00	282.084.000,00	4.896.000,00	98,29	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	286.980.000,00	282.084.000,00	4.896.000,00	98,29	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	286.980.000,00	282.084.000,00	4.896.000,00	98,29	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.290.000,00	19.290.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.290.000,00	19.290.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.290.000,00	19.290.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	195.000.000,00	192.093.750,00	2.906.250,00	98,51	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	195.000.000,00	192.093.750,00	2.906.250,00	98,51	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	192.093.750,00	2.906.250,00	98,51	
1.05.1.05.0.002.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	462.443.804,00	462.427.904,00	15.900,00	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	333.574.804,00	333.558.904,00	15.900,00	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	282.060.000,00	282.060.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	282.060.000,00	282.060.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	282.060.000,00	282.060.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.458.900,00	35.443.000,00	15.900,00	99,96	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	35.458.900,00	35.443.000,00	15.900,00	99,96	
1.05.1.05.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.458.900,00	35.443.000,00	15.900,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.002.2.01.05.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSIA	16.055.904,00	16.055.904,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	16.055.904,00	16.055.904,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.055.904,00	16.055.904,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	128.869.000,00	128.869.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.03.	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	100.869.000,00	100.869.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	100.869.000,00	100.869.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.869.000,00	100.869.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.603.365.028,00	8.795.649.835,00	807.715.193,00	91,59	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.603.365.028,00)	(8.795.649.835,00)	(807.715.193,00)	91,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.603.365.028,00)	(8.795.649.835,00)	(807.715.193,00)	91,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00.00.	BELANJA	16.370.749.743,00	12.458.100.131,00	3.912.649.612,00	76,10	
1.05.1.05.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.596.822.941,00	7.640.388.956,00	956.433.985,00	88,87	
1.05.1.05.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.631.971.193,00	3.319.891.206,00	312.079.987,00	91,41	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.605.010.393,00	3.293.329.706,00	311.680.687,00	91,35	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.605.010.393,00	3.293.329.706,00	311.680.687,00	91,35	
1.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.605.010.393,00	3.293.329.706,00	311.680.687,00	91,35	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.960.800,00	6.600.000,00	360.800,00	94,82	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	6.960.800,00	6.600.000,00	360.800,00	94,82	
1.05.1.05.0.001.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.960.800,00	6.600.000,00	360.800,00	94,82	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	20.000.000,00	19.961.500,00	38.500,00	99,81	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.961.500,00	38.500,00	99,81	
1.05.1.05.0.001.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.961.500,00	38.500,00	99,81	
1.05.1.05.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	196.716.548,00	194.817.548,00	1.899.000,00	99,03	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.505.148,00	42.336.200,00	168.948,00	99,60	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	42.505.148,00	42.336.200,00	168.948,00	99,60	
1.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.505.148,00	42.336.200,00	168.948,00	99,60	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.411.900,00	23.899.700,00	1.512.200,00	94,05	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	25.411.900,00	23.899.700,00	1.512.200,00	94,05	
1.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.411.900,00	23.899.700,00	1.512.200,00	94,05	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.898.500,00	12.898.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	12.898.500,00	12.898.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.898.500,00	12.898.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.260.000,00	4.050.000,00	210.000,00	95,07	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	4.050.000,00	210.000,00	95,07	
1.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.050.000,00	210.000,00	95,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	111.641.000,00	111.633.148,00	7.852,00	99,99	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	111.641.000,00	111.633.148,00	7.852,00	99,99	
1.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	111.641.000,00	111.633.148,00	7.852,00	99,99	
1.05.1.05.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.972.785.000,00	3.562.503.070,00	410.281.930,00	89,67	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.215.685.000,00	2.908.140.000,00	307.545.000,00	90,44	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.1.	BELANJA OPERASI	276.765.000,00	-	276.765.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	276.765.000,00	-	276.765.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.938.920.000,00	2.908.140.000,00	30.780.000,00	98,95	
1.05.1.05.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.938.920.000,00	2.908.140.000,00	30.780.000,00	98,95	
1.05.1.05.0.001.2.07.07.	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	757.100.000,00	654.363.070,00	102.736.930,00	86,43	
1.05.1.05.0.001.2.07.07.5.1.	BELANJA OPERASI	196.400.000,00	151.932.570,00	44.467.430,00	77,36	
1.05.1.05.0.001.2.07.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	196.400.000,00	151.932.570,00	44.467.430,00	77,36	
1.05.1.05.0.001.2.07.07.5.2.	BELANJA MODAL	560.700.000,00	502.430.500,00	58.269.500,00	89,61	
1.05.1.05.0.001.2.07.07.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	560.700.000,00	502.430.500,00	58.269.500,00	89,61	
1.05.1.05.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	500.238.400,00	471.449.832,00	28.788.568,00	94,25	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.220.000,00	58.436.112,00	1.783.888,00	97,04	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	60.220.000,00	58.436.112,00	1.783.888,00	97,04	
1.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.220.000,00	58.436.112,00	1.783.888,00	97,04	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.040.000,00	71.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	71.040.000,00	71.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	71.040.000,00	71.040.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	365.468.400,00	338.463.720,00	27.004.680,00	92,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	365.468.400,00	338.463.720,00	27.004.680,00	92,61	
1.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	365.468.400,00	338.463.720,00	27.004.680,00	92,61	
1.05.1.05.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	295.111.800,00	91.727.300,00	203.384.500,00	31,08	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	72.390.000,00	69.005.500,00	3.384.500,00	95,32	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	72.390.000,00	69.005.500,00	3.384.500,00	95,32	
1.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.390.000,00	69.005.500,00	3.384.500,00	95,32	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.721.800,00	22.721.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.2.	BELANJA MODAL	22.721.800,00	22.721.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.721.800,00	22.721.800,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
1.05.1.05.0.003.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.041.526.802,00	2.085.311.175,00	2.956.215.627,00	41,36	
1.05.1.05.0.003.2.02.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.840.932.396,00	645.825.105,00	1.195.107.291,00	35,08	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.840.932.396,00	645.825.105,00	1.195.107.291,00	35,08	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.840.932.396,00	645.825.105,00	1.195.107.291,00	35,08	
1.05.1.05.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.932.396,00	645.825.105,00	1.195.107.291,00	35,08	
1.05.1.05.0.003.2.03.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	3.200.594.406,00	1.439.486.070,00	1.761.108.336,00	44,98	
1.05.1.05.0.003.2.03.02.	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.192.571.882,00	1.157.422.963,00	35.148.919,00	97,05	
1.05.1.05.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.192.571.882,00	1.157.422.963,00	35.148.919,00	97,05	
1.05.1.05.0.003.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.571.882,00	1.157.422.963,00	35.148.919,00	97,05	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.	AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	2.008.022.524,00	282.063.107,00	1.725.959.417,00	14,05	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.008.022.524,00	282.063.107,00	1.725.959.417,00	14,05	
1.05.1.05.0.003.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.008.022.524,00	282.063.107,00	1.725.959.417,00	14,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.004.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.004.2.01.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.5.2.	BELANJA MODAL	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.004.2.01.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	16.370.749.743,00	12.458.100.131,00	3.912.649.612,00	76,10	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.370.749.743,00)	(12.458.100.131,00)	(3.912.649.612,00)	76,10	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.370.749.743,00)	(12.458.100.131,00)	(3.912.649.612,00)	76,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.8.01.0.00.01.0000. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	8.178.450.634,00	7.724.149.796,00	454.300.838,00	94,45	
1.05.1.05.8.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.233.631.734,00	3.975.515.107,00	258.116.627,00	93,90	
1.05.1.05.8.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	233.391.521,00	92,96	
1.05.1.05.8.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	233.391.521,00	92,96	
1.05.1.05.8.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	233.391.521,00	92,96	
1.05.1.05.8.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	233.391.521,00	92,96	
1.05.1.05.8.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	354.722.700,00	338.772.334,00	15.950.366,00	95,50	
1.05.1.05.8.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.443.300,00	6.363.000,00	80.300,00	98,75	
1.05.1.05.8.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.443.300,00	6.363.000,00	80.300,00	98,75	
1.05.1.05.8.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.443.300,00	6.363.000,00	80.300,00	98,75	
1.05.1.05.8.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.427.900,00	49.478.800,00	3.949.100,00	92,61	
1.05.1.05.8.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	53.427.900,00	49.478.800,00	3.949.100,00	92,61	
1.05.1.05.8.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	53.427.900,00	49.478.800,00	3.949.100,00	92,61	
1.05.1.05.8.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.950.000,00	22.130.000,00	6.820.000,00	76,44	
1.05.1.05.8.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	28.950.000,00	22.130.000,00	6.820.000,00	76,44	
1.05.1.05.8.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	22.130.000,00	6.820.000,00	76,44	
1.05.1.05.8.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.178.900,00	29.514.101,00	3.664.799,00	88,95	
1.05.1.05.8.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	33.178.900,00	29.514.101,00	3.664.799,00	88,95	
1.05.1.05.8.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.178.900,00	29.514.101,00	3.664.799,00	88,95	
1.05.1.05.8.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	228.822.600,00	227.386.433,00	1.436.167,00	99,37	
1.05.1.05.8.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	228.822.600,00	227.386.433,00	1.436.167,00	99,37	
1.05.1.05.8.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	228.822.600,00	227.386.433,00	1.436.167,00	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.8.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	44.904.900,00	44.846.700,00	58.200,00	99,87	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	15.647.500,00	15.647.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	15.647.500,00	15.647.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.647.500,00	15.647.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.257.400,00	29.199.200,00	58.200,00	99,80	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	29.257.400,00	29.199.200,00	58.200,00	99,80	
1.05.1.05.8.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.257.400,00	29.199.200,00	58.200,00	99,80	
1.05.1.05.8.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	403.861.500,00	402.361.500,00	1.500.000,00	99,63	
1.05.1.05.8.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.8.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	394.861.500,00	393.361.500,00	1.500.000,00	99,62	
1.05.1.05.8.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	394.861.500,00	393.361.500,00	1.500.000,00	99,62	
1.05.1.05.8.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	394.861.500,00	393.361.500,00	1.500.000,00	99,62	
1.05.1.05.8.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.838.700,00	109.622.160,00	7.216.540,00	93,82	
1.05.1.05.8.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	60.679.600,00	59.631.070,00	1.048.530,00	98,27	
1.05.1.05.8.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	60.679.600,00	59.631.070,00	1.048.530,00	98,27	
1.05.1.05.8.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.679.600,00	59.631.070,00	1.048.530,00	98,27	
1.05.1.05.8.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.049.100,00	32.616.090,00	433.010,00	98,69	
1.05.1.05.8.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	33.049.100,00	32.616.090,00	433.010,00	98,69	
1.05.1.05.8.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.049.100,00	32.616.090,00	433.010,00	98,69	
1.05.1.05.8.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.110.000,00	17.375.000,00	5.735.000,00	75,18	
1.05.1.05.8.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	23.110.000,00	17.375.000,00	5.735.000,00	75,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.8.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.110.000,00	17.375.000,00	5.735.000,00	75,18	
8.01.1.05.8.002.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	119.620.000,00	119.590.000,00	30.000,00	99,97	
8.01.1.05.8.002.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	119.620.000,00	119.590.000,00	30.000,00	99,97	
8.01.1.05.8.002.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	8.820.000,00	8.790.000,00	30.000,00	99,66	
8.01.1.05.8.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	8.820.000,00	8.790.000,00	30.000,00	99,66	
8.01.1.05.8.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	8.790.000,00	30.000,00	99,66	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	110.800.000,00	110.800.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	110.800.000,00	110.800.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.002.2.01.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.003.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.354.469.400,00	2.352.277.464,00	2.191.936,00	99,91	
8.01.1.05.8.003.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SER	2.354.469.400,00	2.352.277.464,00	2.191.936,00	99,91	
8.01.1.05.8.003.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLI	2.342.609.400,00	2.342.377.464,00	231.936,00	99,99	
8.01.1.05.8.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.342.609.400,00	2.342.377.464,00	231.936,00	99,99	
8.01.1.05.8.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.046.600,00	22.814.664,00	231.936,00	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.003.2.01.03.5.1.0 5.	Belanja Hibah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERT	11.860.000,00	9.900.000,00	1.960.000,00	83,47	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	11.860.000,00	9.900.000,00	1.960.000,00	83,47	
8.01.1.05.8.003.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	9.900.000,00	1.960.000,00	83,47	
8.01.1.05.8.004.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	45.216.000,00	41.336.000,00	3.880.000,00	91,42	
8.01.1.05.8.004.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	45.216.000,00	41.336.000,00	3.880.000,00	91,42	
8.01.1.05.8.004.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	30.880.000,00	27.880.000,00	3.000.000,00	90,28	
8.01.1.05.8.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	30.880.000,00	27.880.000,00	3.000.000,00	90,28	
8.01.1.05.8.004.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.880.000,00	27.880.000,00	3.000.000,00	90,28	
8.01.1.05.8.004.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	14.336.000,00	13.456.000,00	880.000,00	93,86	
8.01.1.05.8.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	14.336.000,00	13.456.000,00	880.000,00	93,86	
8.01.1.05.8.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.336.000,00	13.456.000,00	880.000,00	93,86	
8.01.1.05.8.005.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	445.212.000,00	444.857.000,00	355.000,00	99,92	
8.01.1.05.8.005.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	445.212.000,00	444.857.000,00	355.000,00	99,92	
8.01.1.05.8.005.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	107.530.000,00	107.530.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	107.530.000,00	107.530.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	7.530.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.005.2.01.04.5.1.0 5.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	337.682.000,00	337.327.000,00	355.000,00	99,89	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	337.682.000,00	337.327.000,00	355.000,00	99,89	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	37.682.000,00	37.327.000,00	355.000,00	99,06	
8.01.1.05.8.005.2.01.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.006.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	980.301.500,00	790.574.225,00	189.727.275,00	80,65	
8.01.1.05.8.006.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	980.301.500,00	790.574.225,00	189.727.275,00	80,65	
8.01.1.05.8.006.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK D	107.132.600,00	102.554.082,00	4.578.518,00	95,73	
8.01.1.05.8.006.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	107.132.600,00	102.554.082,00	4.578.518,00	95,73	
8.01.1.05.8.006.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.132.600,00	102.554.082,00	4.578.518,00	95,73	
8.01.1.05.8.006.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK	59.172.000,00	58.976.000,00	196.000,00	99,67	
8.01.1.05.8.006.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	59.172.000,00	58.976.000,00	196.000,00	99,67	
8.01.1.05.8.006.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.172.000,00	8.976.000,00	196.000,00	97,86	
8.01.1.05.8.006.2.01.04.5.1.0 5.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
8.01.1.05.8.006.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, S	13.996.900,00	13.747.705,00	249.195,00	98,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.1.05.8.006.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	13.996.900,00	13.747.705,00	249.195,00	98,22	
8.01.1.05.8.006.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.996.900,00	13.747.705,00	249.195,00	98,22	
8.01.1.05.8.006.2.01.06.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	800.000.000,00	615.296.438,00	184.703.562,00	76,91	
8.01.1.05.8.006.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	615.296.438,00	184.703.562,00	76,91	
8.01.1.05.8.006.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	615.296.438,00	184.703.562,00	76,91	
	JUMLAH BELANJA	8.178.450.634,00	7.724.149.796,00	454.300.838,00	94,45	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.178.450.634,00)	(7.724.149.796,00)	(454.300.838,00)	94,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.178.450.634,00)	(7.724.149.796,00)	(454.300.838,00)	94,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.2.13.01.0000. - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.00.00.	BELANJA	7.744.573.947,00	6.821.356.900,00	923.217.047,00	88,08	
1.06.1.06.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.830.889.945,00	4.584.600.968,00	246.288.977,00	94,90	
1.06.1.06.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.900.000,00	18.291.500,00	608.500,00	96,78	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.100.000,00	1.996.500,00	103.500,00	95,07	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.996.500,00	103.500,00	95,07	
1.06.1.06.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.996.500,00	103.500,00	95,07	
1.06.1.06.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.995.000,00	105.000,00	95,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.300.000,00	6.200.000,00	100.000,00	98,41	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.200.000,00	100.000,00	98,41	
1.06.1.06.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.200.000,00	100.000,00	98,41	
1.06.1.06.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.555.378.867,00	3.369.581.313,00	185.797.554,00	94,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.503.818.867,00	3.318.121.313,00	185.697.554,00	94,70	
1.06.1.06.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.503.818.867,00	3.318.121.313,00	185.697.554,00	94,70	
1.06.1.06.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.503.818.867,00	3.318.121.313,00	185.697.554,00	94,70	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	49.460.000,00	49.410.000,00	50.000,00	99,90	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	49.460.000,00	49.410.000,00	50.000,00	99,90	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	48.410.000,00	48.410.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.000.000,00	50.000,00	95,24	
1.06.1.06.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.100.000,00	2.050.000,00	50.000,00	97,62	
1.06.1.06.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.050.000,00	50.000,00	97,62	
1.06.1.06.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.050.000,00	50.000,00	97,62	
1.06.1.06.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	18.225.000,00	18.225.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	18.225.000,00	18.225.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	18.225.000,00	18.225.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	18.225.000,00	18.225.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	309.910.258,00	283.333.637,00	26.576.621,00	91,42	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.972.550,00	3.669.000,00	303.550,00	92,36	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.972.550,00	3.669.000,00	303.550,00	92,36	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.972.550,00	3.669.000,00	303.550,00	92,36	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.800.465,00	42.938.600,00	8.861.865,00	82,89	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	51.800.465,00	42.938.600,00	8.861.865,00	82,89	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	51.800.465,00	42.938.600,00	8.861.865,00	82,89	
1.06.1.06.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.908.050,00	8.842.200,00	65.850,00	99,26	
1.06.1.06.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	8.908.050,00	8.842.200,00	65.850,00	99,26	
1.06.1.06.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.908.050,00	8.842.200,00	65.850,00	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.217.500,00	21.690.000,00	4.527.500,00	82,73	
1.06.1.06.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	26.217.500,00	21.690.000,00	4.527.500,00	82,73	
1.06.1.06.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	26.217.500,00	21.690.000,00	4.527.500,00	82,73	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.008.308,00	7.702.350,00	11.305.958,00	40,52	
1.06.1.06.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	19.008.308,00	7.702.350,00	11.305.958,00	40,52	
1.06.1.06.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	19.008.308,00	7.702.350,00	11.305.958,00	40,52	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.408.385,00	7.200.000,00	1.208.385,00	85,63	
1.06.1.06.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.408.385,00	7.200.000,00	1.208.385,00	85,63	
1.06.1.06.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.408.385,00	7.200.000,00	1.208.385,00	85,63	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	191.595.000,00	191.291.487,00	303.513,00	99,84	
1.06.1.06.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	191.595.000,00	191.291.487,00	303.513,00	99,84	
1.06.1.06.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	191.595.000,00	191.291.487,00	303.513,00	99,84	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	765.490.440,00	735.238.757,00	30.251.683,00	96,05	
1.06.1.06.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	129.345.000,00	104.930.757,00	24.414.243,00	81,12	
1.06.1.06.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	129.345.000,00	104.930.757,00	24.414.243,00	81,12	
1.06.1.06.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	129.345.000,00	104.930.757,00	24.414.243,00	81,12	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	634.945.440,00	629.108.000,00	5.837.440,00	99,08	
1.06.1.06.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	634.945.440,00	629.108.000,00	5.837.440,00	99,08	
1.06.1.06.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	634.945.440,00	629.108.000,00	5.837.440,00	99,08	
2.						
1.06.1.06.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	162.985.380,00	159.930.761,00	3.054.619,00	98,13	
1.06.1.06.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.444.272,00	85.728,00	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.444.272,00	85.728,00	99,78	
1.06.1.06.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.444.272,00	85.728,00	99,78	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	101.855.380,00	98.908.089,00	2.947.291,00	97,11	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	101.855.380,00	98.908.089,00	2.947.291,00	97,11	
1.06.1.06.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	101.855.380,00	98.908.089,00	2.947.291,00	97,11	
1.06.1.06.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.600.000,00	22.578.400,00	21.600,00	99,90	
1.06.1.06.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	22.600.000,00	22.578.400,00	21.600,00	99,90	
1.06.1.06.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	22.578.400,00	21.600,00	99,90	
1.06.1.06.0.002.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	243.143.040,00	242.556.708,00	586.332,00	99,76	
1.06.1.06.0.002.2.03.	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	243.143.040,00	242.556.708,00	586.332,00	99,76	
1.06.1.06.0.002.2.03.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	221.598.720,00	221.163.588,00	435.132,00	99,80	
1.06.1.06.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	221.598.720,00	221.163.588,00	435.132,00	99,80	
1.06.1.06.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	221.598.720,00	221.163.588,00	435.132,00	99,80	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	21.544.320,00	21.393.120,00	151.200,00	99,30	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	21.544.320,00	21.393.120,00	151.200,00	99,30	
1.06.1.06.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.544.320,00	21.393.120,00	151.200,00	99,30	
1.06.1.06.0.003.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	4.699.507,00	4.486.000,00	213.507,00	95,46	
1.06.1.06.0.003.2.01.	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	4.699.507,00	4.486.000,00	213.507,00	95,46	
1.06.1.06.0.003.2.01.01.	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	4.699.507,00	4.486.000,00	213.507,00	95,46	
1.06.1.06.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.699.507,00	4.486.000,00	213.507,00	95,46	
1.06.1.06.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.699.507,00	4.486.000,00	213.507,00	95,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.004.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.442.608.095,00	790.537.687,00	652.070.408,00	54,80	
1.06.1.06.0.004.2.01.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	1.442.608.095,00	790.537.687,00	652.070.408,00	54,80	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKAMAN	19.684.000,00	19.386.300,00	297.700,00	98,49	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.684.000,00	19.386.300,00	297.700,00	98,49	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.844.000,00	14.546.300,00	297.700,00	97,99	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	3.210.210,00	3.160.000,00	50.210,00	98,44	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	3.210.210,00	3.160.000,00	50.210,00	98,44	
1.06.1.06.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.210,00	3.160.000,00	50.210,00	98,44	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	3.199.507,00	3.175.000,00	24.507,00	99,23	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.199.507,00	3.175.000,00	24.507,00	99,23	
1.06.1.06.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.199.507,00	3.175.000,00	24.507,00	99,23	
1.06.1.06.0.004.2.01.05.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	131.511.107,00	131.265.000,00	246.107,00	99,81	
1.06.1.06.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	131.511.107,00	131.265.000,00	246.107,00	99,81	
1.06.1.06.0.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	131.511.107,00	131.265.000,00	246.107,00	99,81	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	1.180.082.557,00	528.898.500,00	651.184.057,00	44,82	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	1.180.082.557,00	528.898.500,00	651.184.057,00	44,82	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	134.882.557,00	69.298.500,00	65.584.057,00	51,38	
1.06.1.06.0.004.2.01.10.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	1.045.200.000,00	459.600.000,00	585.600.000,00	43,97	
1.06.1.06.0.004.2.01.11.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	3.199.507,00	3.175.000,00	24.507,00	99,23	
1.06.1.06.0.004.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	3.199.507,00	3.175.000,00	24.507,00	99,23	
1.06.1.06.0.004.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.199.507,00	3.175.000,00	24.507,00	99,23	
1.06.1.06.0.004.2.01.12.	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	101.721.207,00	101.477.887,00	243.320,00	99,76	
1.06.1.06.0.004.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	101.721.207,00	101.477.887,00	243.320,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.004.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	101.721.207,00	101.477.887,00	243.320,00	99,76	
1.06.1.06.0.005.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	128.200.000,00	126.531.488,00	1.668.512,00	98,70	
1.06.1.06.0.005.2.01.	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	28.200.000,00	26.998.069,00	1.201.931,00	95,74	
1.06.1.06.0.005.2.01.03.	PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	28.200.000,00	26.998.069,00	1.201.931,00	95,74	
1.06.1.06.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	26.998.069,00	1.201.931,00	95,74	
1.06.1.06.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	26.998.069,00	1.201.931,00	95,74	
1.06.1.06.0.005.2.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.533.419,00	466.581,00	99,53	
1.06.1.06.0.005.2.02.01.	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.533.419,00	466.581,00	99,53	
1.06.1.06.0.005.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.533.419,00	466.581,00	99,53	
1.06.1.06.0.005.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.533.419,00	466.581,00	99,53	
1.06.1.06.0.006.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	376.081.200,00	357.401.870,00	18.679.330,00	95,03	
1.06.1.06.0.006.2.01.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	226.921.200,00	211.271.500,00	15.649.700,00	93,10	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.	PENYEDIAAN MAKANAN	95.069.700,00	94.306.500,00	763.200,00	99,20	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	91.069.700,00	90.306.500,00	763.200,00	99,16	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.069.700,00	90.306.500,00	763.200,00	99,16	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.006.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.006.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	41.851.500,00	33.865.000,00	7.986.500,00	80,92	
1.06.1.06.0.006.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	41.851.500,00	33.865.000,00	7.986.500,00	80,92	
1.06.1.06.0.006.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	41.851.500,00	33.865.000,00	7.986.500,00	80,92	
1.06.1.06.0.006.2.01.04.	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	90.000.000,00	83.100.000,00	6.900.000,00	92,33	
1.06.1.06.0.006.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	83.100.000,00	6.900.000,00	92,33	
1.06.1.06.0.006.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	83.100.000,00	6.900.000,00	92,33	
1.06.1.06.0.006.2.02.	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	149.160.000,00	146.130.370,00	3.029.630,00	97,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.006.2.02.02.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	149.160.000,00	146.130.370,00	3.029.630,00	97,97	
1.06.1.06.0.006.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	149.160.000,00	146.130.370,00	3.029.630,00	97,97	
1.06.1.06.0.006.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	149.160.000,00	146.130.370,00	3.029.630,00	97,97	
1.06.1.06.0.007.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	208.952.160,00	207.736.988,00	1.215.172,00	99,42	
1.06.1.06.0.007.2.01.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	208.952.160,00	207.736.988,00	1.215.172,00	99,42	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	11.660.400,00	10.951.100,00	709.300,00	93,92	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	11.660.400,00	10.951.100,00	709.300,00	93,92	
1.06.1.06.0.007.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.660.400,00	10.951.100,00	709.300,00	93,92	
1.06.1.06.0.007.2.01.03.	PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	197.291.760,00	196.785.888,00	505.872,00	99,74	
1.06.1.06.0.007.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	197.291.760,00	196.785.888,00	505.872,00	99,74	
1.06.1.06.0.007.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	197.291.760,00	196.785.888,00	505.872,00	99,74	
2.13.1.06.0.004.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	9.870.000,00	130.000,00	98,70	
2.13.1.06.0.004.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	9.870.000,00	130.000,00	98,70	
2.13.1.06.0.004.2.01.18.	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	9.870.000,00	130.000,00	98,70	
2.13.1.06.0.004.2.01.18.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.870.000,00	130.000,00	98,70	
2.13.1.06.0.004.2.01.18.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.870.000,00	130.000,00	98,70	
2.13.1.06.0.005.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	500.000.000,00	497.635.191,00	2.364.809,00	99,53	
2.13.1.06.0.005.2.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	497.635.191,00	2.364.809,00	99,53	
2.13.1.06.0.005.2.01.02.	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	500.000.000,00	497.635.191,00	2.364.809,00	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1.06.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	497.635.191,00	2.364.809,00	99,53	
2.13.1.06.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	497.635.191,00	2.364.809,00	99,53	
	JUMLAH BELANJA	7.744.573.947,00	6.821.356.900,00	923.217.047,00	88,08	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.744.573.947,00)	(6.821.356.900,00)	(923.217.047,00)	88,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.744.573.947,00)	(6.821.356.900,00)	(923.217.047,00)	88,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02.0000. - DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	6.614.357.919,00	6.368.884.673,00	245.473.246,00	96,29	
2.07.2.07.3.301.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.239.575.964,00	5.002.195.316,00	237.380.648,00	95,47	
2.07.2.07.3.301.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.733.735,00	6.246.917,00	1.486.818,00	80,77	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.733.735,00	6.246.917,00	1.486.818,00	80,77	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.168.335,00	4.746.917,00	421.418,00	91,85	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.168.335,00	4.746.917,00	421.418,00	91,85	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.565.400,00	1.500.000,00	1.065.400,00	58,47	
2.07.2.07.3.301.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.565.400,00	1.500.000,00	1.065.400,00	58,47	
2.07.2.07.3.301.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.758.305.564,00	3.548.691.208,00	209.614.356,00	94,42	
2.07.2.07.3.301.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.750.879.564,00	3.542.732.108,00	208.147.456,00	94,45	
2.07.2.07.3.301.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.750.879.564,00	3.542.732.108,00	208.147.456,00	94,45	
2.07.2.07.3.301.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.750.879.564,00	3.542.732.108,00	208.147.456,00	94,45	
2.07.2.07.3.301.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.426.000,00	5.959.100,00	1.466.900,00	80,25	
2.07.2.07.3.301.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	7.426.000,00	5.959.100,00	1.466.900,00	80,25	
2.07.2.07.3.301.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.426.000,00	5.959.100,00	1.466.900,00	80,25	
2.07.2.07.3.301.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	274.776.805,00	261.976.929,00	12.799.876,00	95,34	
2.07.2.07.3.301.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.975.000,00	9.939.200,00	35.800,00	99,64	
2.07.2.07.3.301.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.975.000,00	9.939.200,00	35.800,00	99,64	
2.07.2.07.3.301.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.939.200,00	35.800,00	99,64	
2.07.2.07.3.301.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.505.375,00	69.985.725,00	1.519.650,00	97,87	
2.07.2.07.3.301.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	71.505.375,00	69.985.725,00	1.519.650,00	97,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	71.505.375,00	69.985.725,00	1.519.650,00	97,87	
2.07.2.07.3.301.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	36.787.400,00	31.606.000,00	5.181.400,00	85,92	
2.07.2.07.3.301.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	36.787.400,00	31.606.000,00	5.181.400,00	85,92	
2.07.2.07.3.301.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.787.400,00	31.606.000,00	5.181.400,00	85,92	
2.07.2.07.3.301.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.837.030,00	10.308.830,00	4.528.200,00	69,48	
2.07.2.07.3.301.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	14.837.030,00	10.308.830,00	4.528.200,00	69,48	
2.07.2.07.3.301.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.837.030,00	10.308.830,00	4.528.200,00	69,48	
2.07.2.07.3.301.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.930.000,00	5.400.000,00	1.530.000,00	77,92	
2.07.2.07.3.301.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.930.000,00	5.400.000,00	1.530.000,00	77,92	
2.07.2.07.3.301.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	5.400.000,00	1.530.000,00	77,92	
2.07.2.07.3.301.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	134.742.000,00	134.737.174,00	4.826,00	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	134.742.000,00	134.737.174,00	4.826,00	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	134.742.000,00	134.737.174,00	4.826,00	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	57.328.600,00	56.557.589,00	771.011,00	98,66	
2.07.2.07.3.301.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	25.000.000,00	24.988.000,00	12.000,00	99,95	
2.07.2.07.3.301.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.988.000,00	12.000,00	99,95	
2.07.2.07.3.301.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.988.000,00	12.000,00	99,95	
2.07.2.07.3.301.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.328.600,00	31.569.589,00	759.011,00	97,65	
2.07.2.07.3.301.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	32.328.600,00	31.569.589,00	759.011,00	97,65	
2.07.2.07.3.301.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.328.600,00	31.569.589,00	759.011,00	97,65	
2.07.2.07.3.301.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	754.031.860,00	742.433.241,00	11.598.619,00	98,46	
2.07.2.07.3.301.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	112.726.400,00	108.410.001,00	4.316.399,00	96,17	
2.07.2.07.3.301.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	112.726.400,00	108.410.001,00	4.316.399,00	96,17	
2.07.2.07.3.301.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	112.726.400,00	108.410.001,00	4.316.399,00	96,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.301.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	641.305.460,00	634.023.240,00	7.282.220,00	98,86	
2.07.2.07.3.301.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	641.305.460,00	634.023.240,00	7.282.220,00	98,86	
2.07.2.07.3.301.2.08.04.5.1.0	Belanja Pegawai	66.505.000,00	63.805.000,00	2.700.000,00	95,94	
1.						
2.07.2.07.3.301.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	574.800.460,00	570.218.240,00	4.582.220,00	99,20	
2.						
2.07.2.07.3.301.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	357.399.400,00	356.289.432,00	1.109.968,00	99,69	
2.07.2.07.3.301.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	172.770.000,00	172.654.889,00	115.111,00	99,93	
2.07.2.07.3.301.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	172.770.000,00	172.654.889,00	115.111,00	99,93	
2.07.2.07.3.301.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	172.770.000,00	172.654.889,00	115.111,00	99,93	
2.						
2.07.2.07.3.301.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	48.340.000,00	47.614.878,00	725.122,00	98,50	
2.07.2.07.3.301.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	48.340.000,00	47.614.878,00	725.122,00	98,50	
2.07.2.07.3.301.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	48.340.000,00	47.614.878,00	725.122,00	98,50	
2.						
2.07.2.07.3.301.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	136.289.400,00	136.019.665,00	269.735,00	99,80	
2.07.2.07.3.301.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	86.299.000,00	86.029.400,00	269.600,00	99,69	
2.07.2.07.3.301.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	86.299.000,00	86.029.400,00	269.600,00	99,69	
2.						
2.07.2.07.3.301.2.09.09.5.2.	BELANJA MODAL	49.990.400,00	49.990.265,00	135,00	100,00	
2.07.2.07.3.301.2.09.09.5.2.0	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.990.400,00	49.990.265,00	135,00	100,00	
3.						
2.07.2.07.3.303.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	535.158.558,00	531.437.398,00	3.721.160,00	99,30	
2.07.2.07.3.303.2.01.	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	515.158.558,00	511.787.398,00	3.371.160,00	99,35	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	515.158.558,00	511.787.398,00	3.371.160,00	99,35	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	465.209.478,00	462.437.398,00	2.772.080,00	99,40	
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	-	100,00	
1.						
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	460.379.478,00	457.607.398,00	2.772.080,00	99,40	
2.						
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	49.949.080,00	49.350.000,00	599.080,00	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.303.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.949.080,00	49.350.000,00	599.080,00	98,80	
2.07.2.07.3.303.2.02.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	20.000.000,00	19.650.000,00	350.000,00	98,25	
2.07.2.07.3.303.2.02.01.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	20.000.000,00	19.650.000,00	350.000,00	98,25	
2.07.2.07.3.303.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.650.000,00	350.000,00	98,25	
2.07.2.07.3.303.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.650.000,00	350.000,00	98,25	
2.07.2.07.3.304.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	719.623.397,00	715.266.459,00	4.356.938,00	99,39	
2.07.2.07.3.304.2.01.	PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	669.623.397,00	665.516.459,00	4.106.938,00	99,39	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	669.623.397,00	665.516.459,00	4.106.938,00	99,39	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	666.141.797,00	662.034.859,00	4.106.938,00	99,38	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.670.000,00	8.460.000,00	1.210.000,00	87,49	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	656.471.797,00	653.574.859,00	2.896.938,00	99,56	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	3.481.600,00	3.481.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.01.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.481.600,00	3.481.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.3.304.2.03.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	50.000.000,00	49.750.000,00	250.000,00	99,50	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	50.000.000,00	49.750.000,00	250.000,00	99,50	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.750.000,00	250.000,00	99,50	
2.07.2.07.3.304.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.750.000,00	250.000,00	99,50	
2.07.2.07.3.305.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	120.000.000,00	119.985.500,00	14.500,00	99,99	
2.07.2.07.3.305.2.01.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000,00	119.985.500,00	14.500,00	99,99	
2.07.2.07.3.305.2.01.03.	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	120.000.000,00	119.985.500,00	14.500,00	99,99	
2.07.2.07.3.305.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.985.500,00	14.500,00	99,99	
2.07.2.07.3.305.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.985.500,00	14.500,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	6.614.357.919,00	6.368.884.673,00	245.473.246,00	96,29	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(6.614.357.919,00)	(6.368.884.673,00)	(245.473.246,00)	96,29	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.614.357.919,00)	(6.368.884.673,00)	(245.473.246,00)	96,29	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.08.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	6.832.285.231,00	6.501.885.491,00	330.399.740,00	95,16	
2.08.2.08.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.857.789.681,00	5.611.923.851,00	245.865.830,00	95,80	
2.08.2.08.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	52.721.851,00	51.209.846,00	1.512.005,00	97,13	
2.08.2.08.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.509.124,00	18.398.200,00	1.110.924,00	94,31	
2.08.2.08.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.509.124,00	18.398.200,00	1.110.924,00	94,31	
2.08.2.08.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	19.509.124,00	18.398.200,00	1.110.924,00	94,31	
2.08.2.08.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.639.739,00	4.384.000,00	255.739,00	94,49	
2.08.2.08.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.639.739,00	4.384.000,00	255.739,00	94,49	
2.08.2.08.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.639.739,00	4.384.000,00	255.739,00	94,49	
2.08.2.08.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.801.539,00	2.800.000,00	1.539,00	99,95	
2.08.2.08.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.801.539,00	2.800.000,00	1.539,00	99,95	
2.08.2.08.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.801.539,00	2.800.000,00	1.539,00	99,95	
2.08.2.08.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.029.608,00	2.018.000,00	11.608,00	99,43	
2.08.2.08.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.029.608,00	2.018.000,00	11.608,00	99,43	
2.08.2.08.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.029.608,00	2.018.000,00	11.608,00	99,43	
2.08.2.08.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	1.202.394,00	1.181.646,00	20.748,00	98,27	
2.08.2.08.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.202.394,00	1.181.646,00	20.748,00	98,27	
2.08.2.08.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.202.394,00	1.181.646,00	20.748,00	98,27	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.213.947,00	15.141.000,00	72.947,00	99,52	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.213.947,00	15.141.000,00	72.947,00	99,52	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	12.183.947,00	12.111.000,00	72.947,00	99,40	
2.08.2.08.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.325.500,00	7.287.000,00	38.500,00	99,47	
2.08.2.08.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	7.325.500,00	7.287.000,00	38.500,00	99,47	
2.08.2.08.0.001.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	7.325.500,00	7.287.000,00	38.500,00	99,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.455.770.222,00	4.261.651.701,00	194.118.521,00	95,64	
2.08.2.08.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.445.616.222,00	4.251.510.701,00	194.105.521,00	95,63	
2.08.2.08.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.445.616.222,00	4.251.510.701,00	194.105.521,00	95,63	
2.08.2.08.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.445.616.222,00	4.251.510.701,00	194.105.521,00	95,63	
2.08.2.08.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.154.000,00	10.141.000,00	13.000,00	99,87	
2.08.2.08.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.154.000,00	10.141.000,00	13.000,00	99,87	
2.08.2.08.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.240.000,00	9.240.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	914.000,00	901.000,00	13.000,00	98,58	
2.08.2.08.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.444.000,00	8.444.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	8.444.000,00	8.444.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.444.000,00	8.444.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	344.000,00	344.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	414.215.608,00	407.248.131,00	6.967.477,00	98,32	
2.08.2.08.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.591.200,00	6.591.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.591.200,00	6.591.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.591.200,00	6.591.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	90.985.550,00	90.971.500,00	14.050,00	99,98	
2.08.2.08.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	90.985.550,00	90.971.500,00	14.050,00	99,98	
2.08.2.08.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	87.955.550,00	87.941.500,00	14.050,00	99,98	
2.08.2.08.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.076.200,00	11.076.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	11.076.200,00	11.076.200,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.076.200,00	11.076.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.441.900,00	20.327.300,00	114.600,00	99,44	
2.08.2.08.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	20.441.900,00	20.327.300,00	114.600,00	99,44	
2.08.2.08.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	20.441.900,00	20.327.300,00	114.600,00	99,44	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.747.388,00	47.005.500,00	6.741.888,00	87,46	
2.08.2.08.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	53.747.388,00	47.005.500,00	6.741.888,00	87,46	
2.08.2.08.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	53.747.388,00	47.005.500,00	6.741.888,00	87,46	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.728.000,00	7.728.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.728.000,00	7.728.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	7.728.000,00	7.728.000,00	-	100,00	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	223.645.370,00	223.548.431,00	96.939,00	99,96	
2.08.2.08.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	223.645.370,00	223.548.431,00	96.939,00	99,96	
2.08.2.08.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	223.645.370,00	223.548.431,00	96.939,00	99,96	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	819.468.000,00	776.257.173,00	43.210.827,00	94,73	
2.08.2.08.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	198.900,00	170.000,00	28.900,00	85,47	
2.08.2.08.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	198.900,00	170.000,00	28.900,00	85,47	
2.08.2.08.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	198.900,00	170.000,00	28.900,00	85,47	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	122.669.100,00	79.487.173,00	43.181.927,00	64,80	
2.08.2.08.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	122.669.100,00	79.487.173,00	43.181.927,00	64,80	
2.08.2.08.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	122.669.100,00	79.487.173,00	43.181.927,00	64,80	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	696.600.000,00	696.600.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	696.600.000,00	696.600.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	696.600.000,00	696.600.000,00	-	100,00	
2.						
2.08.2.08.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.170.000,00	107.113.000,00	57.000,00	99,95	
2.08.2.08.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	82.090.000,00	82.085.625,00	4.375,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	82.090.000,00	82.085.625,00	4.375,00	99,99	
2.08.2.08.0.001.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	82.090.000,00	82.085.625,00	4.375,00	99,99	
2.08.2.08.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	13.340.000,00	13.287.375,00	52.625,00	99,61	
2.08.2.08.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	13.340.000,00	13.287.375,00	52.625,00	99,61	
2.08.2.08.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	13.340.000,00	13.287.375,00	52.625,00	99,61	
2.08.2.08.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.030.000,00	5.030.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.030.000,00	5.030.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	5.030.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.710.000,00	6.710.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	6.710.000,00	6.710.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.001.2.09.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	6.710.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.002.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	277.799.900,00	271.037.500,00	6.762.400,00	97,57	
2.08.2.08.0.002.2.01.	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	67.267.400,00	66.661.600,00	605.800,00	99,10	
2.08.2.08.0.002.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	64.223.000,00	64.039.400,00	183.600,00	99,71	
2.08.2.08.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	64.223.000,00	64.039.400,00	183.600,00	99,71	
2.08.2.08.0.002.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	64.223.000,00	64.039.400,00	183.600,00	99,71	
2.08.2.08.0.002.2.01.03.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	3.044.400,00	2.622.200,00	422.200,00	86,13	
2.08.2.08.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3.044.400,00	2.622.200,00	422.200,00	86,13	
2.08.2.08.0.002.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.044.400,00	2.622.200,00	422.200,00	86,13	
2.08.2.08.0.002.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	122.426.200,00	118.023.600,00	4.402.600,00	96,40	
2.08.2.08.0.002.2.02.01.	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	122.426.200,00	118.023.600,00	4.402.600,00	96,40	
2.08.2.08.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	122.426.200,00	118.023.600,00	4.402.600,00	96,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	122.426.200,00	118.023.600,00	4.402.600,00	96,40	
2.08.2.08.0.002.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	88.106.300,00	86.352.300,00	1.754.000,00	98,01	
2.08.2.08.0.002.2.03.03.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	88.106.300,00	86.352.300,00	1.754.000,00	98,01	
2.08.2.08.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	88.106.300,00	86.352.300,00	1.754.000,00	98,01	
2.08.2.08.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	88.106.300,00	86.352.300,00	1.754.000,00	98,01	
2.08.2.08.0.003.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	438.133.950,00	368.537.950,00	69.596.000,00	84,12	
2.08.2.08.0.003.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.100.000,00	71.140.000,00	960.000,00	98,67	
2.08.2.08.0.003.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.100.000,00	71.140.000,00	960.000,00	98,67	
2.08.2.08.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	72.100.000,00	71.140.000,00	960.000,00	98,67	
2.08.2.08.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	71.140.000,00	960.000,00	98,67	
2.08.2.08.0.003.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	349.044.000,00	280.408.000,00	68.636.000,00	80,34	
2.08.2.08.0.003.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	349.044.000,00	280.408.000,00	68.636.000,00	80,34	
2.08.2.08.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	349.044.000,00	280.408.000,00	68.636.000,00	80,34	
2.08.2.08.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	349.044.000,00	280.408.000,00	68.636.000,00	80,34	
2.08.2.08.0.003.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.989.950,00	16.989.950,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.003.2.03.04.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	16.989.950,00	16.989.950,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	16.989.950,00	16.989.950,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.003.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.989.950,00	16.989.950,00	-	100,00	
2.08.2.08.0.005.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16.898.800,00	16.570.900,00	327.900,00	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.005.2.01.	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.898.800,00	16.570.900,00	327.900,00	98,06	
2.08.2.08.0.005.2.01.01.	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	8.822.400,00	8.793.500,00	28.900,00	99,67	
2.08.2.08.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.822.400,00	8.793.500,00	28.900,00	99,67	
2.08.2.08.0.005.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.822.400,00	8.793.500,00	28.900,00	99,67	
2.08.2.08.0.005.2.01.02.	PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	8.076.400,00	7.777.400,00	299.000,00	96,30	
2.08.2.08.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	8.076.400,00	7.777.400,00	299.000,00	96,30	
2.08.2.08.0.005.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	8.076.400,00	7.777.400,00	299.000,00	96,30	
2.08.2.08.0.006.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.999.400,00	49.630.000,00	1.369.400,00	97,31	
2.08.2.08.0.006.2.01.	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.389.000,00	10.385.800,00	3.200,00	99,97	
2.08.2.08.0.006.2.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.389.000,00	10.385.800,00	3.200,00	99,97	
2.08.2.08.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.389.000,00	10.385.800,00	3.200,00	99,97	
2.08.2.08.0.006.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.389.000,00	10.385.800,00	3.200,00	99,97	
2.08.2.08.0.006.2.02.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.610.400,00	39.244.200,00	1.366.200,00	96,64	
2.08.2.08.0.006.2.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	14.235.400,00	13.334.000,00	901.400,00	93,67	
2.08.2.08.0.006.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	14.235.400,00	13.334.000,00	901.400,00	93,67	
2.08.2.08.0.006.2.02.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	14.235.400,00	13.334.000,00	901.400,00	93,67	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.267.400,00	8.917.000,00	350.400,00	96,22	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.267.400,00	8.917.000,00	350.400,00	96,22	
2.08.2.08.0.006.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.267.400,00	8.917.000,00	350.400,00	96,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.0.006.2.02.04.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.107.600,00	16.993.200,00	114.400,00	99,33	
2.08.2.08.0.006.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	17.107.600,00	16.993.200,00	114.400,00	99,33	
2.08.2.08.0.006.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.107.600,00	16.993.200,00	114.400,00	99,33	
2.08.2.08.0.007.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	190.663.500,00	184.185.290,00	6.478.210,00	96,60	
2.08.2.08.0.007.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.350.000,00	76.775.200,00	1.574.800,00	97,99	
2.08.2.08.0.007.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	78.350.000,00	76.775.200,00	1.574.800,00	97,99	
2.08.2.08.0.007.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	78.350.000,00	76.775.200,00	1.574.800,00	97,99	
2.08.2.08.0.007.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	78.350.000,00	76.775.200,00	1.574.800,00	97,99	
2.08.2.08.0.007.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.007.500,00	8.207.500,00	1.800.000,00	82,01	
2.08.2.08.0.007.2.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.007.500,00	8.207.500,00	1.800.000,00	82,01	
2.08.2.08.0.007.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.007.500,00	8.207.500,00	1.800.000,00	82,01	
2.08.2.08.0.007.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.007.500,00	8.207.500,00	1.800.000,00	82,01	
2.08.2.08.0.007.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.306.000,00	99.202.590,00	3.103.410,00	96,97	
2.08.2.08.0.007.2.03.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.306.000,00	99.202.590,00	3.103.410,00	96,97	
2.08.2.08.0.007.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	102.306.000,00	99.202.590,00	3.103.410,00	96,97	
2.08.2.08.0.007.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	102.306.000,00	99.202.590,00	3.103.410,00	96,97	
	JUMLAH BELANJA	6.832.285.231,00	6.501.885.491,00	330.399.740,00	95,16	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(6.832.285.231,00)	(6.501.885.491,00)	(330.399.740,00)	95,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.832.285.231,00)	(6.501.885.491,00)	(330.399.740,00)	95,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
ORGANISASI : 2.09.3.27.0.00.02.0000. - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	25.440.000,00	18.160.000,00	7.280.000,00	71,38	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.440.000,00	18.160.000,00	7.280.000,00	71,38	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.440.000,00	18.160.000,00	7.280.000,00	71,38	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.440.000,00	18.160.000,00	7.280.000,00	71,38	
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	19.058.528.368,00	18.327.280.462,00	731.247.906,00	96,16	
2.09.2.09.3.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.542.801.151,00	11.055.801.602,00	486.999.549,00	95,78	
2.09.2.09.3.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	91.690.400,00	91.690.400,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	81.690.400,00	81.690.400,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	81.690.400,00	81.690.400,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	78.600.000,00	78.600.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.400,00	3.090.400,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.596.233.596,00	8.126.710.341,00	469.523.255,00	94,54	
2.09.2.09.3.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.570.023.736,00	8.100.550.341,00	469.473.395,00	94,52	
2.09.2.09.3.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.570.023.736,00	8.100.550.341,00	469.473.395,00	94,52	
2.09.2.09.3.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.570.023.736,00	8.100.550.341,00	469.473.395,00	94,52	
2.09.2.09.3.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	26.209.860,00	26.160.000,00	49.860,00	99,81	
2.09.2.09.3.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	26.209.860,00	26.160.000,00	49.860,00	99,81	
2.09.2.09.3.201.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	20.760.000,00	20.760.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.449.860,00	5.400.000,00	49.860,00	99,09	
2.09.2.09.3.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	14.900.000,00	14.380.000,00	520.000,00	96,51	
2.09.2.09.3.201.2.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	14.900.000,00	14.380.000,00	520.000,00	96,51	
2.09.2.09.3.201.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	14.900.000,00	14.380.000,00	520.000,00	96,51	
2.09.2.09.3.201.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.380.000,00	520.000,00	96,51	
2.09.2.09.3.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	783.656.641,00	780.683.618,00	2.973.023,00	99,62	
2.09.2.09.3.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.988.300,00	20.877.000,00	111.300,00	99,47	
2.09.2.09.3.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	20.988.300,00	20.877.000,00	111.300,00	99,47	
2.09.2.09.3.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.988.300,00	20.877.000,00	111.300,00	99,47	
2.09.2.09.3.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	78.651.641,00	78.612.000,00	39.641,00	99,95	
2.09.2.09.3.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	78.651.641,00	78.612.000,00	39.641,00	99,95	
2.09.2.09.3.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	78.651.641,00	78.612.000,00	39.641,00	99,95	
2.09.2.09.3.201.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.000.000,00	19.866.000,00	134.000,00	99,33	
2.09.2.09.3.201.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.866.000,00	134.000,00	99,33	
2.09.2.09.3.201.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.866.000,00	134.000,00	99,33	
2.09.2.09.3.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.786.200,00	19.742.000,00	44.200,00	99,78	
2.09.2.09.3.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	19.786.200,00	19.742.000,00	44.200,00	99,78	
2.09.2.09.3.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.786.200,00	19.742.000,00	44.200,00	99,78	
2.09.2.09.3.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74.554.500,00	74.504.000,00	50.500,00	99,93	
2.09.2.09.3.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	74.554.500,00	74.504.000,00	50.500,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.554.500,00	74.504.000,00	50.500,00	99,93	
2.09.2.09.3.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.694.000,00	17.105.000,00	2.589.000,00	86,85	
2.09.2.09.3.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.694.000,00	17.105.000,00	2.589.000,00	86,85	
2.09.2.09.3.201.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.694.000,00	17.105.000,00	2.589.000,00	86,85	
2.09.2.09.3.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	549.982.000,00	549.977.618,00	4.382,00	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	549.982.000,00	549.977.618,00	4.382,00	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	549.982.000,00	549.977.618,00	4.382,00	100,00	
2.09.2.09.3.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	630.460.964,00	623.586.000,00	6.874.964,00	98,91	
2.09.2.09.3.201.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	61.000.000,00	55.543.000,00	5.457.000,00	91,05	
2.09.2.09.3.201.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	61.000.000,00	55.543.000,00	5.457.000,00	91,05	
2.09.2.09.3.201.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.000.000,00	55.543.000,00	5.457.000,00	91,05	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	184.454.700,00	183.464.000,00	990.700,00	99,46	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	67.432.600,00	67.164.000,00	268.600,00	99,60	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.432.600,00	67.164.000,00	268.600,00	99,60	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	117.022.100,00	116.300.000,00	722.100,00	99,38	
2.09.2.09.3.201.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.022.100,00	116.300.000,00	722.100,00	99,38	
2.09.2.09.3.201.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	385.006.264,00	384.579.000,00	427.264,00	99,89	
2.09.2.09.3.201.2.07.09.5.2.	BELANJA MODAL	385.006.264,00	384.579.000,00	427.264,00	99,89	
2.09.2.09.3.201.2.07.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.690.000,00	310.000,00	99,85	
2.09.2.09.3.201.2.07.09.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.006.264,00	184.889.000,00	117.264,00	99,94	
2.09.2.09.3.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	844.999.550,00	838.399.045,00	6.600.505,00	99,22	
2.09.2.09.3.201.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	4.187.500,00	812.500,00	83,75	
2.09.2.09.3.201.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.187.500,00	812.500,00	83,75	
2.09.2.09.3.201.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.187.500,00	812.500,00	83,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	226.639.550,00	225.491.545,00	1.148.005,00	99,49	
2.09.2.09.3.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	226.639.550,00	225.491.545,00	1.148.005,00	99,49	
2.09.2.09.3.201.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	226.639.550,00	225.491.545,00	1.148.005,00	99,49	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	613.360.000,00	608.720.000,00	4.640.000,00	99,24	
2.09.2.09.3.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	613.360.000,00	608.720.000,00	4.640.000,00	99,24	
2.09.2.09.3.201.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	613.360.000,00	608.720.000,00	4.640.000,00	99,24	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	541.260.000,00	540.752.198,00	507.802,00	99,91	
2.09.2.09.3.201.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.000.000,00	34.975.000,00	25.000,00	99,93	
2.09.2.09.3.201.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.975.000,00	25.000,00	99,93	
2.09.2.09.3.201.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.975.000,00	25.000,00	99,93	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	315.400.000,00	315.336.198,00	63.802,00	99,98	
2.09.2.09.3.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	315.400.000,00	315.336.198,00	63.802,00	99,98	
2.09.2.09.3.201.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	315.400.000,00	315.336.198,00	63.802,00	99,98	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	55.860.000,00	55.800.000,00	60.000,00	99,89	
2.09.2.09.3.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	55.860.000,00	55.800.000,00	60.000,00	99,89	
2.09.2.09.3.201.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	55.860.000,00	55.800.000,00	60.000,00	99,89	
2.						
2.09.2.09.3.201.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	135.000.000,00	134.641.000,00	359.000,00	99,73	
2.09.2.09.3.201.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.641.000,00	359.000,00	99,73	
2.09.2.09.3.201.2.09.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	134.641.000,00	359.000,00	99,73	
2.						
2.09.2.09.3.203.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.789.158.918,00	2.591.820.369,00	197.338.549,00	92,92	
2.09.2.09.3.203.2.01.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	1.482.013.918,00	1.318.585.669,00	163.428.249,00	88,97	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	1.202.075.000,00	1.170.673.751,00	31.401.249,00	97,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.202.075.000,00	1.170.673.751,00	31.401.249,00	97,39	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	206.830.000,00	206.441.000,00	389.000,00	99,81	
2.09.2.09.3.203.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	991.425.000,00	960.412.751,00	31.012.249,00	96,87	
2.09.2.09.3.203.2.01.04.	PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	279.938.918,00	147.911.918,00	132.027.000,00	52,84	
2.09.2.09.3.203.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	279.938.918,00	147.911.918,00	132.027.000,00	52,84	
2.09.2.09.3.203.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	147.911.918,00	147.911.918,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.01.04.5.1.0 4.	Belanja Subsidi	132.027.000,00	-	132.027.000,00	0,00	
2.09.2.09.3.203.2.02.	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	43.398.000,00	6.602.000,00	86,80	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	43.398.000,00	6.602.000,00	86,80	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.398.000,00	6.602.000,00	86,80	
2.09.2.09.3.203.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.398.000,00	6.602.000,00	86,80	
2.09.2.09.3.203.2.04.	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	1.257.145.000,00	1.229.836.700,00	27.308.300,00	97,83	
2.09.2.09.3.203.2.04.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	260.575.000,00	247.590.000,00	12.985.000,00	95,02	
2.09.2.09.3.203.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	260.575.000,00	247.590.000,00	12.985.000,00	95,02	
2.09.2.09.3.203.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.203.2.04.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	253.075.000,00	240.090.000,00	12.985.000,00	94,87	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	996.570.000,00	982.246.700,00	14.323.300,00	98,56	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	996.570.000,00	982.246.700,00	14.323.300,00	98,56	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	230.120.000,00	218.076.700,00	12.043.300,00	94,77	
2.09.2.09.3.203.2.04.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	766.450.000,00	764.170.000,00	2.280.000,00	99,70	
2.09.2.09.3.204.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	103.431.200,00	103.431.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.204.2.01.	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	103.431.200,00	103.431.200,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.01.	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	103.431.200,00	103.431.200,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	103.431.200,00	103.431.200,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.204.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.431.200,00	103.431.200,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.205.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	99.999.800,00	200,00	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.999.800,00	200,00	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.01.	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.999.800,00	200,00	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.999.800,00	200,00	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	19.100.000,00	19.100.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.205.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.900.000,00	80.899.800,00	200,00	100,00	
3.27.2.09.3.202.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.298.464.259,00	1.283.190.499,00	15.273.760,00	98,82	
3.27.2.09.3.202.2.01.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	309.905.200,00	299.405.199,00	10.500.001,00	96,61	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	309.905.200,00	299.405.199,00	10.500.001,00	96,61	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	309.905.200,00	299.405.199,00	10.500.001,00	96,61	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	209.905.200,00	199.405.199,00	10.500.001,00	95,00	
3.27.2.09.3.202.2.01.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.202.2.02.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.966.200,00	33.800,00	99,97	
3.27.2.09.3.202.2.02.02.	PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	100.000.000,00	99.966.200,00	33.800,00	99,97	
3.27.2.09.3.202.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.966.200,00	33.800,00	99,97	
3.27.2.09.3.202.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.966.200,00	33.800,00	99,97	
3.27.2.09.3.202.2.05.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	888.559.059,00	883.819.100,00	4.739.959,00	99,47	
3.27.2.09.3.202.2.05.01.	PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	548.259.059,00	543.903.700,00	4.355.359,00	99,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.202.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	548.259.059,00	543.903.700,00	4.355.359,00	99,21	
3.27.2.09.3.202.2.05.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	548.259.059,00	543.903.700,00	4.355.359,00	99,21	
2.						
3.27.2.09.3.202.2.05.05.	PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	340.300.000,00	339.915.400,00	384.600,00	99,89	
3.27.2.09.3.202.2.05.05.5.1.	BELANJA OPERASI	340.300.000,00	339.915.400,00	384.600,00	99,89	
3.27.2.09.3.202.2.05.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	340.300.000,00	339.915.400,00	384.600,00	99,89	
2.						
3.27.2.09.3.203.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.405.916.840,00	1.403.331.600,00	2.585.240,00	99,82	
3.27.2.09.3.203.2.01.	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
3.27.2.09.3.203.2.01.02.	PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
3.27.2.09.3.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
3.27.2.09.3.203.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
2.						
3.27.2.09.3.203.2.02.	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	1.305.916.840,00	1.303.431.600,00	2.485.240,00	99,81	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	1.305.916.840,00	1.303.431.600,00	2.485.240,00	99,81	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.002.813.200,00	1.000.627.600,00	2.185.600,00	99,78	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	548.174.400,00	1.825.600,00	99,67	
2.						
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.1.0	Belanja Hibah	452.813.200,00	452.453.200,00	360.000,00	99,92	
5.						
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.2.	BELANJA MODAL	303.103.640,00	302.804.000,00	299.640,00	99,90	
3.27.2.09.3.203.2.02.09.5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	303.103.640,00	302.804.000,00	299.640,00	99,90	
4.						
3.27.2.09.3.204.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	750.497.200,00	721.873.666,00	28.623.534,00	96,19	
3.27.2.09.3.204.2.01.	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	248.417.300,00	230.166.016,00	18.251.284,00	92,65	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS	248.417.300,00	230.166.016,00	18.251.284,00	92,65	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	248.417.300,00	230.166.016,00	18.251.284,00	92,65	
3.27.2.09.3.204.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	248.417.300,00	230.166.016,00	18.251.284,00	92,65	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.204.2.02.	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.106.000,00	126.105.000,00	1.000,00	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	126.106.000,00	126.105.000,00	1.000,00	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	126.106.000,00	126.105.000,00	1.000,00	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	122.476.000,00	122.475.000,00	1.000,00	100,00	
3.27.2.09.3.204.2.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	189.956.750,00	10.043.250,00	94,98	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	200.000.000,00	189.956.750,00	10.043.250,00	94,98	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	189.956.750,00	10.043.250,00	94,98	
3.27.2.09.3.204.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	189.956.750,00	10.043.250,00	94,98	
3.27.2.09.3.204.2.04.	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	175.973.900,00	175.645.900,00	328.000,00	99,81	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.	PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	175.973.900,00	175.645.900,00	328.000,00	99,81	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	175.973.900,00	175.645.900,00	328.000,00	99,81	
3.27.2.09.3.204.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	175.973.900,00	175.645.900,00	328.000,00	99,81	
3.27.2.09.3.205.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	640.608.800,00	640.522.900,00	85.900,00	99,99	
3.27.2.09.3.205.2.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	640.608.800,00	640.522.900,00	85.900,00	99,99	
3.27.2.09.3.205.2.01.03.	PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	640.608.800,00	640.522.900,00	85.900,00	99,99	
3.27.2.09.3.205.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	640.608.800,00	640.522.900,00	85.900,00	99,99	
3.27.2.09.3.205.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	640.608.800,00	640.522.900,00	85.900,00	99,99	
3.27.2.09.3.207.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	427.650.000,00	427.308.826,00	341.174,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	427.650.000,00	427.308.826,00	341.174,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	427.650.000,00	427.308.826,00	341.174,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	427.650.000,00	427.308.826,00	341.174,00	99,92	
3.27.2.09.3.207.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	427.650.000,00	427.308.826,00	341.174,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	19.058.528.368,00	18.327.280.462,00	731.247.906,00	96,16	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(19.033.088.368,00)	(18.309.120.462,00)	(723.967.906,00)	96,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.033.088.368,00)	(18.309.120.462,00)	(723.967.906,00)	96,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.02.0000. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	750.000.000,00	717.640.000,00	32.360.000,00	95,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00	717.640.000,00	32.360.000,00	95,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	750.000.000,00	717.640.000,00	32.360.000,00	95,69	
	JUMLAH PENDAPATAN	750.000.000,00	717.640.000,00	32.360.000,00	95,69	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	26.646.900.873,00	25.667.573.338,00	979.327.535,00	96,32	
2.11.2.11.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.980.566.573,00	9.621.989.314,00	358.577.259,00	96,41	
2.11.2.11.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.847.755,00	65.615.950,00	231.805,00	99,65	
2.11.2.11.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.051.105,00	22.017.700,00	33.405,00	99,85	
2.11.2.11.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	22.051.105,00	22.017.700,00	33.405,00	99,85	
2.11.2.11.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.051.105,00	22.017.700,00	33.405,00	99,85	
2.11.2.11.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	14.998.500,00	14.986.400,00	12.100,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	14.998.500,00	14.986.400,00	12.100,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.998.500,00	14.986.400,00	12.100,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	11.996.650,00	11.916.000,00	80.650,00	99,33	
2.11.2.11.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	11.996.650,00	11.916.000,00	80.650,00	99,33	
2.11.2.11.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.996.650,00	11.916.000,00	80.650,00	99,33	
2.11.2.11.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.811.600,00	11.746.600,00	65.000,00	99,45	
2.11.2.11.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	11.811.600,00	11.746.600,00	65.000,00	99,45	
2.11.2.11.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.811.600,00	11.746.600,00	65.000,00	99,45	
2.11.2.11.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.989.900,00	4.949.250,00	40.650,00	99,19	
2.11.2.11.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	4.989.900,00	4.949.250,00	40.650,00	99,19	
2.11.2.11.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.989.900,00	4.949.250,00	40.650,00	99,19	
2.11.2.11.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.768.066.528,00	4.419.643.909,00	348.422.619,00	92,69	
2.11.2.11.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.730.825.028,00	4.383.238.409,00	347.586.619,00	92,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.730.825.028,00	4.383.238.409,00	347.586.619,00	92,65	
2.11.2.11.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.730.825.028,00	4.383.238.409,00	347.586.619,00	92,65	
2.11.2.11.0.001.2.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	27.240.000,00	26.560.000,00	680.000,00	97,50	
2.11.2.11.0.001.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	27.240.000,00	26.560.000,00	680.000,00	97,50	
2.11.2.11.0.001.2.02.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.240.000,00	26.560.000,00	680.000,00	97,50	
2.11.2.11.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.001.500,00	9.845.500,00	156.000,00	98,44	
2.11.2.11.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.001.500,00	9.845.500,00	156.000,00	98,44	
2.11.2.11.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.001.500,00	9.845.500,00	156.000,00	98,44	
2.11.2.11.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	11.550.022,00	3.449.978,00	77,00	
2.11.2.11.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	11.550.022,00	3.449.978,00	77,00	
2.11.2.11.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.550.022,00	3.449.978,00	77,00	
2.11.2.11.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.550.022,00	3.449.978,00	77,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	399.664.000,00	399.055.238,00	608.762,00	99,85	
2.11.2.11.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.954.500,00	45.500,00	99,70	
2.11.2.11.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.954.500,00	45.500,00	99,70	
2.11.2.11.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.954.500,00	45.500,00	99,70	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	125.000.000,00	124.897.295,00	102.705,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.897.295,00	102.705,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.897.295,00	102.705,00	99,92	
2.11.2.11.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.000.000,00	24.935.600,00	64.400,00	99,74	
2.11.2.11.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.935.600,00	64.400,00	99,74	
2.11.2.11.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.935.600,00	64.400,00	99,74	
2.11.2.11.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	44.955.400,00	44.600,00	99,90	
2.11.2.11.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.955.400,00	44.600,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.955.400,00	44.600,00	99,90	
2.11.2.11.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.664.000,00	14.664.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	14.664.000,00	14.664.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.664.000,00	14.664.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	175.000.000,00	174.648.443,00	351.557,00	99,80	
2.11.2.11.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	174.648.443,00	351.557,00	99,80	
2.11.2.11.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	174.648.443,00	351.557,00	99,80	
2.11.2.11.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	670.039.750,00	666.209.291,00	3.830.459,00	99,43	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	143.520.000,00	139.937.671,00	3.582.329,00	97,50	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	143.520.000,00	139.937.671,00	3.582.329,00	97,50	
2.11.2.11.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.520.000,00	139.937.671,00	3.582.329,00	97,50	
2.11.2.11.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	498.319.750,00	498.071.620,00	248.130,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	498.319.750,00	498.071.620,00	248.130,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	62.640.000,00	62.640.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	435.679.750,00	435.431.620,00	248.130,00	99,94	
2.11.2.11.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.061.948.540,00	4.059.914.904,00	2.033.636,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.026.948.540,00	4.025.104.904,00	1.843.636,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.026.948.540,00	4.025.104.904,00	1.843.636,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.026.948.540,00	4.025.104.904,00	1.843.636,00	99,95	
2.11.2.11.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	35.000.000,00	34.810.000,00	190.000,00	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.810.000,00	190.000,00	99,46	
2.11.2.11.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.810.000,00	190.000,00	99,46	
2.11.2.11.0.003.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	242.692.820,00	238.209.640,00	4.483.180,00	98,15	
2.11.2.11.0.003.2.01.	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	242.692.820,00	238.209.640,00	4.483.180,00	98,15	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	192.420.000,00	192.032.759,00	387.241,00	99,80	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	192.420.000,00	192.032.759,00	387.241,00	99,80	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	185.160.000,00	184.772.759,00	387.241,00	99,79	
2.11.2.11.0.003.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	40.272.820,00	36.176.881,00	4.095.939,00	89,83	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	28.751.820,00	25.676.881,00	3.074.939,00	89,31	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.751.820,00	25.676.881,00	3.074.939,00	89,31	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	11.521.000,00	10.500.000,00	1.021.000,00	91,14	
2.11.2.11.0.003.2.01.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.521.000,00	10.500.000,00	1.021.000,00	91,14	
2.11.2.11.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	8.447.828.450,00	7.934.973.613,00	512.854.837,00	93,93	
2.11.2.11.0.004.2.01.	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	8.447.828.450,00	7.934.973.613,00	512.854.837,00	93,93	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	8.447.828.450,00	7.934.973.613,00	512.854.837,00	93,93	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	5.343.872.350,00	4.964.967.613,00	378.904.737,00	92,91	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	17.160.000,00	17.160.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.326.712.350,00	4.947.807.613,00	378.904.737,00	92,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	3.103.956.100,00	2.970.006.000,00	133.950.100,00	95,68	
2.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.103.956.100,00	2.970.006.000,00	133.950.100,00	95,68	
2.11.2.11.0.008.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.575.012,00	424.988,00	98,94	
2.11.2.11.0.008.2.01.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	39.575.012,00	424.988,00	98,94	
2.11.2.11.0.008.2.01.02.	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000,00	39.575.012,00	424.988,00	98,94	
2.11.2.11.0.008.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.575.012,00	424.988,00	98,94	
2.11.2.11.0.008.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.575.012,00	424.988,00	98,94	
2.11.2.11.0.009.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.933.500,00	66.500,00	99,83	
2.11.2.11.0.009.2.01.	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	39.933.500,00	66.500,00	99,83	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000,00	39.933.500,00	66.500,00	99,83	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.933.500,00	66.500,00	99,83	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1.0	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	32.740.000,00	32.673.500,00	66.500,00	99,80	
2.11.2.11.0.010.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000,00	29.405.405,00	594.595,00	98,02	
2.11.2.11.0.010.2.01.	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	29.405.405,00	594.595,00	98,02	
2.11.2.11.0.010.2.01.01.	PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	29.405.405,00	594.595,00	98,02	
2.11.2.11.0.010.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.405.405,00	594.595,00	98,02	
2.11.2.11.0.010.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.405.405,00	594.595,00	98,02	
2.11.2.11.0.011.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.865.813.030,00	7.763.486.854,00	102.326.176,00	98,70	
2.11.2.11.0.011.2.01.	PENGELOLAAN SAMPAH	7.865.813.030,00	7.763.486.854,00	102.326.176,00	98,70	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.	PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	5.665.813.030,00	5.584.186.854,00	81.626.176,00	98,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.664.098.030,00	5.582.636.854,00	81.461.176,00	98,56	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.840.000,00	8.840.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.655.258.030,00	5.573.796.854,00	81.461.176,00	98,56	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.2.	BELANJA MODAL	1.715.000,00	1.550.000,00	165.000,00	90,38	
2.11.2.11.0.011.2.01.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.715.000,00	1.550.000,00	165.000,00	90,38	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	2.200.000.000,00	2.179.300.000,00	20.700.000,00	99,06	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	2.200.000.000,00	2.179.300.000,00	20.700.000,00	99,06	
2.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000,00	2.179.300.000,00	20.700.000,00	99,06	
	JUMLAH BELANJA	26.646.900.873,00	25.667.573.338,00	979.327.535,00	96,32	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(25.896.900.873,00)	(24.949.933.338,00)	(946.967.535,00)	96,34	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.896.900.873,00)	(24.949.933.338,00)	(946.967.535,00)	96,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	7.663.029.736,00	7.309.900.521,00	353.129.215,00	95,39	
2.12.2.12.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.663.029.736,00	7.309.900.521,00	353.129.215,00	95,39	
2.12.2.12.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.952.050,00	15.878.000,00	74.050,00	99,54	
2.12.2.12.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.084.150,00	9.025.000,00	59.150,00	99,35	
2.12.2.12.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.084.150,00	9.025.000,00	59.150,00	99,35	
2.12.2.12.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.084.150,00	9.025.000,00	59.150,00	99,35	
2.12.2.12.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.790.150,00	2.783.000,00	7.150,00	99,74	
2.12.2.12.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.790.150,00	2.783.000,00	7.150,00	99,74	
2.12.2.12.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.790.150,00	2.783.000,00	7.150,00	99,74	
2.12.2.12.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.459.800,00	1.457.000,00	2.800,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.459.800,00	1.457.000,00	2.800,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.459.800,00	1.457.000,00	2.800,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.617.950,00	2.613.000,00	4.950,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.617.950,00	2.613.000,00	4.950,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.617.950,00	2.613.000,00	4.950,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.490.986.566,00	4.151.648.256,00	339.338.310,00	92,44	
2.12.2.12.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.480.149.816,00	4.140.834.256,00	339.315.560,00	92,43	
2.12.2.12.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.480.149.816,00	4.140.834.256,00	339.315.560,00	92,43	
2.12.2.12.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.480.149.816,00	4.140.834.256,00	339.315.560,00	92,43	
2.12.2.12.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.742.650,00	3.736.000,00	6.650,00	99,82	
2.12.2.12.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.742.650,00	3.736.000,00	6.650,00	99,82	
2.12.2.12.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.742.650,00	3.736.000,00	6.650,00	99,82	
2.12.2.12.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	7.094.100,00	7.078.000,00	16.100,00	99,77	
2.12.2.12.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	7.094.100,00	7.078.000,00	16.100,00	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.094.100,00	7.078.000,00	16.100,00	99,77	
2.12.2.12.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	21.555.900,00	21.490.000,00	65.900,00	99,69	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	21.555.900,00	21.490.000,00	65.900,00	99,69	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	21.555.900,00	21.490.000,00	65.900,00	99,69	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.255.900,00	6.190.000,00	65.900,00	98,95	
2.12.2.12.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.162.445.970,00	2.150.916.014,00	11.529.956,00	99,47	
2.12.2.12.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.313.800,00	31.162.000,00	151.800,00	99,52	
2.12.2.12.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	31.313.800,00	31.162.000,00	151.800,00	99,52	
2.12.2.12.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.313.800,00	31.162.000,00	151.800,00	99,52	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.685.268.460,00	1.678.062.200,00	7.206.260,00	99,57	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.116.668.460,00	1.114.562.200,00	2.106.260,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.108.508.460,00	1.106.402.200,00	2.106.260,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	568.600.000,00	563.500.000,00	5.100.000,00	99,10	
2.12.2.12.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	568.600.000,00	563.500.000,00	5.100.000,00	99,10	
2.12.2.12.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	62.360.900,00	61.916.500,00	444.400,00	99,29	
2.12.2.12.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	62.360.900,00	61.916.500,00	444.400,00	99,29	
2.12.2.12.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	62.360.900,00	61.916.500,00	444.400,00	99,29	
2.12.2.12.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.117.000,00	25.865.000,00	252.000,00	99,04	
2.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	26.117.000,00	25.865.000,00	252.000,00	99,04	
2.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.117.000,00	25.865.000,00	252.000,00	99,04	
2.12.2.12.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.849.810,00	59.773.810,00	76.000,00	99,87	
2.12.2.12.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	59.849.810,00	59.773.810,00	76.000,00	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	59.849.810,00	59.773.810,00	76.000,00	99,87	
2.12.2.12.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.600.000,00	14.210.000,00	1.390.000,00	91,09	
2.12.2.12.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	14.210.000,00	1.390.000,00	91,09	
2.12.2.12.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	14.210.000,00	1.390.000,00	91,09	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	281.936.000,00	279.926.504,00	2.009.496,00	99,29	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	281.936.000,00	279.926.504,00	2.009.496,00	99,29	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	9.240.000,00	9.240.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	272.696.000,00	270.686.504,00	2.009.496,00	99,26	
2.12.2.12.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	792.909.250,00	791.127.251,00	1.781.999,00	99,78	
2.12.2.12.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	122.409.250,00	120.627.251,00	1.781.999,00	98,54	
2.12.2.12.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	122.409.250,00	120.627.251,00	1.781.999,00	98,54	
2.12.2.12.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	122.409.250,00	120.627.251,00	1.781.999,00	98,54	
2.12.2.12.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	666.000.000,00	666.000.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	666.000.000,00	666.000.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	666.000.000,00	666.000.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.180.000,00	178.841.000,00	339.000,00	99,81	
2.12.2.12.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	111.690.000,00	111.503.000,00	187.000,00	99,83	
2.12.2.12.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	111.690.000,00	111.503.000,00	187.000,00	99,83	
2.12.2.12.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	111.690.000,00	111.503.000,00	187.000,00	99,83	
2.12.2.12.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	67.490.000,00	67.338.000,00	152.000,00	99,77	
2.12.2.12.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	67.490.000,00	67.338.000,00	152.000,00	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.490.000,00	67.338.000,00	152.000,00	99,77	
	JUMLAH BELANJA	7.663.029.736,00	7.309.900.521,00	353.129.215,00	95,39	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.663.029.736,00)	(7.309.900.521,00)	(353.129.215,00)	95,39	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.663.029.736,00)	(7.309.900.521,00)	(353.129.215,00)	95,39	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 2.14.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	8.380.153.015,00	7.588.010.878,00	792.142.137,00	90,55	
2.14.2.14.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.029.661.565,00	3.723.806.646,00	305.854.919,00	92,41	
2.14.2.14.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.799.500,00	12.799.500,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.799.500,00	12.799.500,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	12.799.500,00	12.799.500,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.799.500,00	12.799.500,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.247.518.152,00	2.977.238.421,00	270.279.731,00	91,68	
2.14.2.14.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.166.678.252,00	2.896.398.521,00	270.279.731,00	91,46	
2.14.2.14.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.166.678.252,00	2.896.398.521,00	270.279.731,00	91,46	
2.14.2.14.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.166.678.252,00	2.896.398.521,00	270.279.731,00	91,46	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.960.000,00	27.960.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	50.839.900,00	50.839.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	50.839.900,00	50.839.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	46.680.000,00	46.680.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.159.900,00	4.159.900,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	19.590.000,00	19.590.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.590.000,00	19.590.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	19.590.000,00	19.590.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.490.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	257.692.050,00	249.184.953,00	8.507.097,00	96,70	
2.14.2.14.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.907.000,00	4.907.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.907.000,00	4.907.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.907.000,00	4.907.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.270.904,00	38.187.295,00	2.083.609,00	94,83	
2.14.2.14.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	40.270.904,00	38.187.295,00	2.083.609,00	94,83	
2.14.2.14.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.270.904,00	38.187.295,00	2.083.609,00	94,83	
2.14.2.14.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.292.300,00	6.723.300,00	569.000,00	92,20	
2.14.2.14.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	7.292.300,00	6.723.300,00	569.000,00	92,20	
2.14.2.14.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.292.300,00	6.723.300,00	569.000,00	92,20	
2.14.2.14.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.112.100,00	45.832.100,00	1.280.000,00	97,28	
2.14.2.14.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	47.112.100,00	45.832.100,00	1.280.000,00	97,28	
2.14.2.14.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	47.112.100,00	45.832.100,00	1.280.000,00	97,28	
2.14.2.14.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	4.428.000,00	4.572.000,00	49,20	
2.14.2.14.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	4.428.000,00	4.572.000,00	49,20	
2.14.2.14.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.428.000,00	4.572.000,00	49,20	
2.14.2.14.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	137.109.746,00	137.107.258,00	2.488,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	137.109.746,00	137.107.258,00	2.488,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	137.109.746,00	137.107.258,00	2.488,00	100,00	
2.14.2.14.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	321.033.300,00	298.151.973,00	22.881.327,00	92,87	
2.14.2.14.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.170.000,00	1.000.000,00	170.000,00	85,47	
2.14.2.14.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.000.000,00	170.000,00	85,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.000.000,00	170.000,00	85,47	
2.14.2.14.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	107.463.300,00	88.151.973,00	19.311.327,00	82,03	
2.14.2.14.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	107.463.300,00	88.151.973,00	19.311.327,00	82,03	
2.14.2.14.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.463.300,00	88.151.973,00	19.311.327,00	82,03	
2.14.2.14.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	212.400.000,00	209.000.000,00	3.400.000,00	98,40	
2.14.2.14.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	212.400.000,00	209.000.000,00	3.400.000,00	98,40	
2.14.2.14.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	212.400.000,00	209.000.000,00	3.400.000,00	98,40	
2.14.2.14.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.028.563,00	166.841.799,00	4.186.764,00	97,55	
2.14.2.14.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	143.628.563,00	139.471.799,00	4.156.764,00	97,11	
2.14.2.14.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	143.628.563,00	139.471.799,00	4.156.764,00	97,11	
2.14.2.14.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.628.563,00	139.471.799,00	4.156.764,00	97,11	
2.14.2.14.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.400.000,00	27.370.000,00	30.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	27.370.000,00	30.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	27.370.000,00	30.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.002.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	300.439.950,00	296.468.022,00	3.971.928,00	98,68	
2.14.2.14.0.002.2.01.	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	204.119.950,00	202.419.649,00	1.700.301,00	99,17	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.	PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (PROGRAM KKBPK)	32.119.150,00	31.954.849,00	164.301,00	99,49	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	32.119.150,00	31.954.849,00	164.301,00	99,49	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.999.150,00	19.834.849,00	164.301,00	99,18	
2.14.2.14.0.002.2.01.09.	ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	172.000.800,00	170.464.800,00	1.536.000,00	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.002.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	172.000.800,00	170.464.800,00	1.536.000,00	99,11	
2.14.2.14.0.002.2.01.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	172.000.800,00	170.464.800,00	1.536.000,00	99,11	
2.						
2.14.2.14.0.002.2.02.	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.320.000,00	94.048.373,00	2.271.627,00	97,64	
2.14.2.14.0.002.2.02.11.	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.11.5.1.	BELANJA OPERASI	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.002.2.02.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
2.						
2.14.2.14.0.002.2.02.13.	PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	93.600.000,00	91.328.373,00	2.271.627,00	97,57	
2.14.2.14.0.002.2.02.13.5.1.	BELANJA OPERASI	93.600.000,00	91.328.373,00	2.271.627,00	97,57	
2.14.2.14.0.002.2.02.13.5.1.0	Belanja Pegawai	17.190.000,00	17.190.000,00	-	100,00	
1.						
2.14.2.14.0.002.2.02.13.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	76.410.000,00	74.138.373,00	2.271.627,00	97,03	
2.						
2.14.2.14.0.003.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.873.371.500,00	2.737.936.298,00	135.435.202,00	95,29	
2.14.2.14.0.003.2.01.	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	713.995.000,00	713.678.400,00	316.600,00	99,96	
2.14.2.14.0.003.2.01.01.	ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
2.						
2.14.2.14.0.003.2.01.02.	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KKBPK SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	28.170.000,00	28.170.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	28.170.000,00	28.170.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	28.170.000,00	28.170.000,00	-	100,00	
2.						
2.14.2.14.0.003.2.01.04.	PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	67.470.000,00	67.470.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	67.470.000,00	67.470.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	67.470.000,00	67.470.000,00	-	100,00	
2.						
2.14.2.14.0.003.2.01.06.	PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	294.840.000,00	294.840.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.003.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	294.840.000,00	294.840.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	294.840.000,00	294.840.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.07.	PENGLOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK	283.500.000,00	283.183.400,00	316.600,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	283.500.000,00	283.183.400,00	316.600,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	283.500.000,00	283.183.400,00	316.600,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.01.08.	PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	35.640.000,00	35.640.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	35.640.000,00	35.640.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.640.000,00	35.640.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.02.	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	425.100.000,00	424.800.000,00	300.000,00	99,93	
2.14.2.14.0.003.2.02.03.	PENGUATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	266.700.000,00	266.400.000,00	300.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	266.700.000,00	266.400.000,00	300.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	266.700.000,00	266.400.000,00	300.000,00	99,89	
2.14.2.14.0.003.2.02.04.	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	158.400.000,00	158.400.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	158.400.000,00	158.400.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	158.400.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.03.	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.613.526.500,00	1.478.707.898,00	134.818.602,00	91,64	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	25.197.800,00	25.133.000,00	64.800,00	99,74	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	25.197.800,00	25.133.000,00	64.800,00	99,74	
2.14.2.14.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.197.800,00	25.133.000,00	64.800,00	99,74	
2.14.2.14.0.003.2.03.03.	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	446.849.300,00	329.174.698,00	117.674.602,00	73,67	
2.14.2.14.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	446.849.300,00	329.174.698,00	117.674.602,00	73,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.003.2.03.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	434.729.300,00	317.054.698,00	117.674.602,00	72,93	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	1.124.477.000,00	1.107.933.000,00	16.544.000,00	98,53	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	366.677.000,00	363.603.000,00	3.074.000,00	99,16	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	366.677.000,00	363.603.000,00	3.074.000,00	99,16	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.2.	BELANJA MODAL	757.800.000,00	744.330.000,00	13.470.000,00	98,22	
2.14.2.14.0.003.2.03.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.800.000,00	744.330.000,00	13.470.000,00	98,22	
2.14.2.14.0.003.2.03.08.	PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	17.002.400,00	16.467.200,00	535.200,00	96,85	
2.14.2.14.0.003.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	17.002.400,00	16.467.200,00	535.200,00	96,85	
2.14.2.14.0.003.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.002.400,00	16.467.200,00	535.200,00	96,85	
2.14.2.14.0.003.2.04.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	120.750.000,00	120.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.03.	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB	120.750.000,00	120.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	120.750.000,00	120.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.003.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	120.750.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.176.680.000,00	829.799.912,00	346.880.088,00	70,52	
2.14.2.14.0.004.2.01.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.176.680.000,00	829.799.912,00	346.880.088,00	70,52	
2.14.2.14.0.004.2.01.04.	ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	9.000.000,00	8.980.000,00	20.000,00	99,78	
2.14.2.14.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.980.000,00	20.000,00	99,78	
2.14.2.14.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.980.000,00	20.000,00	99,78	
2.14.2.14.0.004.2.01.05.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	1.116.560.000,00	770.039.912,00	346.520.088,00	68,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.116.560.000,00	770.039.912,00	346.520.088,00	68,97	
2.14.2.14.0.004.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.116.560.000,00	770.039.912,00	346.520.088,00	68,97	
2.14.2.14.0.004.2.01.07.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	10.500.000,00	10.160.000,00	340.000,00	96,76	
2.14.2.14.0.004.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.160.000,00	340.000,00	96,76	
2.14.2.14.0.004.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.160.000,00	340.000,00	96,76	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	40.620.000,00	40.620.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	40.620.000,00	40.620.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.5.1.0	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.004.2.01.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	8.380.153.015,00	7.588.010.878,00	792.142.137,00	90,55	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.380.153.015,00)	(7.588.010.878,00)	(792.142.137,00)	90,55	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.380.153.015,00)	(7.588.010.878,00)	(792.142.137,00)	90,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	31.000.000.000,00	25.844.794.449,00	5.155.205.551,00	83,37	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.000.000.000,00	25.844.794.449,00	5.155.205.551,00	83,37	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	30.000.000.000,00	23.844.794.450,00	6.155.205.550,00	79,48	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	1.999.999.999,00	(999.999.999,00)	200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	31.000.000.000,00	25.844.794.449,00	5.155.205.551,00	83,37	
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	53.188.470.907,00	51.042.171.358,62	2.146.299.548,38	95,96	
2.15.2.15.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.723.464.844,00	23.168.990.123,81	1.554.474.720,19	93,71	
2.15.2.15.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.340.000,00	30.220.000,00	120.000,00	99,60	
2.15.2.15.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.350.000,00	24.230.000,00	120.000,00	99,51	
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	24.350.000,00	24.230.000,00	120.000,00	99,51	
2.15.2.15.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	24.230.000,00	120.000,00	99,51	
2.15.2.15.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.625.000,00	4.625.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.625.000,00	4.625.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.625.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	1.365.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.914.977.032,00	7.481.769.326,00	1.433.207.706,00	83,92	
2.15.2.15.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.884.477.032,00	7.452.835.726,00	1.431.641.306,00	83,89	
2.15.2.15.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	8.884.477.032,00	7.452.835.726,00	1.431.641.306,00	83,89	
2.15.2.15.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	8.884.477.032,00	7.452.835.726,00	1.431.641.306,00	83,89	
2.15.2.15.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	18.000.000,00	16.718.600,00	1.281.400,00	92,88	
2.15.2.15.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	16.718.600,00	1.281.400,00	92,88	
2.15.2.15.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.718.600,00	1.281.400,00	92,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	12.500.000,00	12.215.000,00	285.000,00	97,72	
2.15.2.15.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.215.000,00	285.000,00	97,72	
2.15.2.15.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.215.000,00	285.000,00	97,72	
2.15.2.15.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	74.400.000,00	73.638.600,00	761.400,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	74.400.000,00	73.638.600,00	761.400,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	74.400.000,00	73.638.600,00	761.400,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	73.638.600,00	761.400,00	98,98	
2.15.2.15.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	106.397.750,00	99.724.669,00	6.673.081,00	93,73	
2.15.2.15.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	27.000.000,00	26.973.000,00	27.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.973.000,00	27.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.973.000,00	27.000,00	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	79.397.750,00	72.751.669,00	6.646.081,00	91,63	
2.15.2.15.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	79.397.750,00	72.751.669,00	6.646.081,00	91,63	
2.15.2.15.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	79.397.750,00	72.751.669,00	6.646.081,00	91,63	
2.15.2.15.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.670.122.608,00	1.664.171.522,00	5.951.086,00	99,64	
2.15.2.15.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	69.862.800,00	69.781.780,00	81.020,00	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	69.862.800,00	69.781.780,00	81.020,00	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.862.800,00	69.781.780,00	81.020,00	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	184.994.026,00	184.849.669,00	144.357,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	184.994.026,00	184.849.669,00	144.357,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	184.994.026,00	184.849.669,00	144.357,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.788.000,00	94.738.000,00	50.000,00	99,95	
2.15.2.15.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	94.788.000,00	94.738.000,00	50.000,00	99,95	
2.15.2.15.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	94.788.000,00	94.738.000,00	50.000,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	250.039.782,00	249.934.561,00	105.221,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	250.039.782,00	249.934.561,00	105.221,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	250.039.782,00	249.934.561,00	105.221,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	160.000.000,00	156.425.572,00	3.574.428,00	97,77	
2.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	156.425.572,00	3.574.428,00	97,77	
2.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	156.425.572,00	3.574.428,00	97,77	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	910.438.000,00	908.441.940,00	1.996.060,00	99,78	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	910.438.000,00	908.441.940,00	1.996.060,00	99,78	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	142.180.000,00	141.320.000,00	860.000,00	99,40	
2.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	768.258.000,00	767.121.940,00	1.136.060,00	99,85	
2.15.2.15.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.098.752.520,00	1.097.659.981,60	1.092.538,40	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	150.000.000,00	149.898.783,75	101.216,25	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.898.783,75	101.216,25	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.07.05.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.898.783,75	101.216,25	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	452.292.520,00	451.819.000,00	473.520,00	99,90	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	35.949.600,00	35.802.500,00	147.100,00	99,59	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.949.600,00	35.802.500,00	147.100,00	99,59	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	416.342.920,00	416.016.500,00	326.420,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.342.920,00	231.186.000,00	156.920,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	185.000.000,00	184.830.500,00	169.500,00	99,91	
2.15.2.15.0.001.2.07.07.	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	30.000.000,00	29.992.000,00	8.000,00	99,97	
2.15.2.15.0.001.2.07.07.5.2.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.992.000,00	8.000,00	99,97	
2.15.2.15.0.001.2.07.07.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.992.000,00	8.000,00	99,97	
2.15.2.15.0.001.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	200.000.000,00	199.855.500,00	144.500,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.07.08.5.2.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.855.500,00	144.500,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.07.08.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.855.500,00	144.500,00	99,93	
2.15.2.15.0.001.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	266.460.000,00	266.094.697,85	365.302,15	99,86	
2.15.2.15.0.001.2.07.09.5.1.	BELANJA OPERASI	28.760.000,00	28.671.900,00	88.100,00	99,69	
2.15.2.15.0.001.2.07.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.001.2.07.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.411.900,00	88.100,00	99,59	
2.15.2.15.0.001.2.07.09.5.2.	BELANJA MODAL	237.700.000,00	237.422.797,85	277.202,15	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.07.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.700.000,00	237.422.797,85	277.202,15	99,88	
2.15.2.15.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.676.167.058,00	9.573.969.654,00	102.197.404,00	98,94	
2.15.2.15.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.168.000,00	6.000.000,00	1.168.000,00	83,71	
2.15.2.15.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.168.000,00	6.000.000,00	1.168.000,00	83,71	
2.15.2.15.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.168.000,00	6.000.000,00	1.168.000,00	83,71	
2.15.2.15.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	769.642.280,00	762.620.100,00	7.022.180,00	99,09	
2.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	769.642.280,00	762.620.100,00	7.022.180,00	99,09	
2.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	769.642.280,00	762.620.100,00	7.022.180,00	99,09	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.899.356.778,00	8.805.349.554,00	94.007.224,00	98,94	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	8.899.356.778,00	8.805.349.554,00	94.007.224,00	98,94	
2.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.899.356.778,00	8.805.349.554,00	94.007.224,00	98,94	
2.15.2.15.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.152.307.876,00	3.147.836.371,21	4.471.504,79	99,86	
2.15.2.15.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.009.999.054,00	1.009.641.189,00	357.865,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.009.999.054,00	1.009.641.189,00	357.865,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.009.999.054,00	1.009.641.189,00	357.865,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	984.572.822,00	984.083.920,00	488.902,00	99,95	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	692.717.137,00	692.470.320,00	246.817,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	692.717.137,00	692.470.320,00	246.817,00	99,96	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.2.	BELANJA MODAL	291.855.685,00	291.613.600,00	242.085,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.09.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.855.685,00	291.613.600,00	242.085,00	99,92	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.157.736.000,00	1.154.111.262,21	3.624.737,79	99,69	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.157.736.000,00	1.154.111.262,21	3.624.737,79	99,69	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	5.640.000,00	1.360.000,00	80,57	
2.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.736.000,00	1.148.471.262,21	2.264.737,79	99,80	
2.15.2.15.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.465.006.063,00	27.873.181.234,81	591.824.828,19	97,92	
2.15.2.15.0.002.2.01.	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	499.533.300,00	466.700,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.01.01.	PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	499.533.300,00	466.700,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.533.300,00	466.700,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.533.300,00	466.700,00	99,91	
2.15.2.15.0.002.2.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	23.791.715.837,00	23.748.795.535,30	42.920.301,70	99,82	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.244.071.000,00	1.228.863.506,01	15.207.493,99	98,78	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	344.071.000,00	343.862.920,01	208.079,99	99,94	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	344.071.000,00	343.862.920,01	208.079,99	99,94	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.2.	BELANJA MODAL	900.000.000,00	885.000.586,00	14.999.414,00	98,33	
2.15.2.15.0.002.2.02.01.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.000.000,00	885.000.586,00	14.999.414,00	98,33	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	4.698.544.453,00	4.691.616.878,35	6.927.574,65	99,85	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	3.264.691.453,00	3.259.392.461,76	5.298.991,24	99,84	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	19.100.000,00	18.630.000,00	470.000,00	97,54	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.245.591.453,00	3.240.762.461,76	4.828.991,24	99,85	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.433.853.000,00	1.432.224.416,59	1.628.583,41	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.243.853.000,00	1.242.518.756,59	1.334.243,41	99,89	
2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000,00	189.705.660,00	294.340,00	99,85	
2.15.2.15.0.002.2.02.03.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	303.000.000,00	302.500.130,24	499.869,76	99,84	
2.15.2.15.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	303.000.000,00	302.500.130,24	499.869,76	99,84	
2.15.2.15.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	303.000.000,00	302.500.130,24	499.869,76	99,84	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	17.546.100.384,00	17.525.815.020,70	20.285.363,30	99,88	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	14.033.104.034,00	14.012.879.020,70	20.225.013,30	99,86	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	19.980.000,00	17.160.000,00	2.820.000,00	85,89	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.013.124.034,00	13.995.719.020,70	17.405.013,30	99,88	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.2.	BELANJA MODAL	3.512.996.350,00	3.512.936.000,00	60.350,00	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.2.0 1.	Belanja Modal Tanah	3.505.260.000,00	3.505.260.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.02.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.736.350,00	7.676.000,00	60.350,00	99,22	
2.15.2.15.0.002.2.04.	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	1.156.612.200,00	1.153.924.122,36	2.688.077,64	99,77	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.	FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	912.612.200,00	911.015.622,36	1.596.577,64	99,83	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	771.000.000,00	769.738.622,36	1.261.377,64	99,84	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	771.000.000,00	769.738.622,36	1.261.377,64	99,84	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.2.	BELANJA MODAL	141.612.200,00	141.277.000,00	335.200,00	99,76	
2.15.2.15.0.002.2.04.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.612.200,00	141.277.000,00	335.200,00	99,76	
2.15.2.15.0.002.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	244.000.000,00	242.908.500,00	1.091.500,00	99,55	
2.15.2.15.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	244.000.000,00	242.908.500,00	1.091.500,00	99,55	
2.15.2.15.0.002.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00	242.908.500,00	1.091.500,00	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.002.2.05.	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	1.022.963.762,00	1.011.670.381,15	11.293.380,85	98,90	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	463.424.820,00	460.933.500,00	2.491.320,00	99,46	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.	BELANJA MODAL	463.424.820,00	460.933.500,00	2.491.320,00	99,46	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.424.820,00	371.338.500,00	2.086.320,00	99,44	
2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	89.595.000,00	405.000,00	99,55	
2.15.2.15.0.002.2.05.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	70.134.834,00	62.721.883,00	7.412.951,00	89,43	
2.15.2.15.0.002.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	70.134.834,00	62.721.883,00	7.412.951,00	89,43	
2.15.2.15.0.002.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	70.134.834,00	62.721.883,00	7.412.951,00	89,43	
2.15.2.15.0.002.2.05.04.	PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	55.004.108,00	54.637.000,00	367.108,00	99,33	
2.15.2.15.0.002.2.05.04.5.1.	BELANJA OPERASI	55.004.108,00	54.637.000,00	367.108,00	99,33	
2.15.2.15.0.002.2.05.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.004.108,00	54.637.000,00	367.108,00	99,33	
2.15.2.15.0.002.2.05.07.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	434.400.000,00	433.377.998,15	1.022.001,85	99,76	
2.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1.	BELANJA OPERASI	434.400.000,00	433.377.998,15	1.022.001,85	99,76	
2.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	434.400.000,00	433.377.998,15	1.022.001,85	99,76	
2.15.2.15.0.002.2.06.	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	551.400.000,00	550.056.374,00	1.343.626,00	99,76	
2.15.2.15.0.002.2.06.04.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	531.400.000,00	530.309.874,00	1.090.126,00	99,79	
2.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	531.400.000,00	530.309.874,00	1.090.126,00	99,79	
2.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	531.400.000,00	530.309.874,00	1.090.126,00	99,79	
2.15.2.15.0.002.2.06.05.	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	19.746.500,00	253.500,00	98,73	
2.15.2.15.0.002.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.746.500,00	253.500,00	98,73	
2.15.2.15.0.002.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.746.500,00	253.500,00	98,73	
2.15.2.15.0.002.2.07.	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.855.600,00	144.400,00	99,86	
2.15.2.15.0.002.2.07.01.	PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA ANDALALIN	100.000.000,00	99.855.600,00	144.400,00	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.002.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.855.600,00	144.400,00	99,86	
2.15.2.15.0.002.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.855.600,00	144.400,00	99,86	
2.15.2.15.0.002.2.09.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.292.314.264,00	759.345.922,00	532.968.342,00	58,76	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	1.292.314.264,00	759.345.922,00	532.968.342,00	58,76	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.292.314.264,00	759.345.922,00	532.968.342,00	58,76	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	581.314.264,00	522.345.922,00	58.968.342,00	89,86	
2.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	711.000.000,00	237.000.000,00	474.000.000,00	33,33	
2.15.2.15.0.002.2.10.	PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.10.02.	SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.10.02.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.002.2.10.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	53.188.470.907,00	51.042.171.358,62	2.146.299.548,38	95,96	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(22.188.470.907,00)	(25.197.376.909,62)	3.008.906.002,62	113,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.188.470.907,00)	(25.197.376.909,62)	3.008.906.002,62	113,56	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.16.2.21.2.20.02.0000. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	1.000.000.000,00	525.197.100,00	474.802.900,00	52,52	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	525.197.100,00	474.802.900,00	52,52	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	525.197.100,00	474.802.900,00	52,52	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	525.197.100,00	474.802.900,00	52,52	
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.00.00.	BELANJA	11.623.386.261,00	11.314.885.363,00	308.500.898,00	97,35	
2.16.2.16.2.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.406.312.480,00	5.187.204.051,00	219.108.429,00	95,95	
2.16.2.16.2.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	53.416.000,00	53.415.699,00	301,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.979.500,00	5.979.500,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.979.500,00	5.979.500,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.979.500,00	5.979.500,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.129.500,00	4.129.300,00	200,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	4.129.500,00	4.129.300,00	200,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.129.500,00	4.129.300,00	200,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.555.500,00	4.555.500,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	4.555.500,00	4.555.500,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.555.500,00	4.555.500,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	4.207.400,00	4.207.400,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4.207.400,00	4.207.400,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.207.400,00	4.207.400,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	26.869.300,00	26.869.199,00	101,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	26.869.300,00	26.869.199,00	101,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.869.300,00	26.869.199,00	101,00	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.674.800,00	7.674.800,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	7.674.800,00	7.674.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.674.800,00	7.674.800,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.073.339.681,00	3.884.659.526,00	188.680.155,00	95,37	
2.16.2.16.2.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.974.459.381,00	3.786.405.726,00	188.053.655,00	95,27	
2.16.2.16.2.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.974.459.381,00	3.786.405.726,00	188.053.655,00	95,27	
2.16.2.16.2.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.974.459.381,00	3.786.405.726,00	188.053.655,00	95,27	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	54.388.300,00	54.027.600,00	360.700,00	99,34	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	54.388.300,00	54.027.600,00	360.700,00	99,34	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	49.660.000,00	49.440.000,00	220.000,00	99,56	
2.16.2.16.2.201.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.728.300,00	4.587.600,00	140.700,00	97,02	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	44.492.000,00	44.226.200,00	265.800,00	99,40	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	44.492.000,00	44.226.200,00	265.800,00	99,40	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	36.120.000,00	36.120.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.372.000,00	8.106.200,00	265.800,00	96,83	
2.16.2.16.2.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	26.768.100,00	26.720.900,00	47.200,00	99,82	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	26.768.100,00	26.720.900,00	47.200,00	99,82	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	26.768.100,00	26.720.900,00	47.200,00	99,82	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.150.000,00	24.150.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.618.100,00	2.570.900,00	47.200,00	98,20	
2.16.2.16.2.201.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	151.578.000,00	151.532.000,00	46.000,00	99,97	
2.16.2.16.2.201.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	98.578.000,00	98.558.000,00	20.000,00	99,98	
2.16.2.16.2.201.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	98.578.000,00	98.558.000,00	20.000,00	99,98	
2.16.2.16.2.201.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	98.578.000,00	98.558.000,00	20.000,00	99,98	
2.16.2.16.2.201.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53.000.000,00	52.974.000,00	26.000,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	53.000.000,00	52.974.000,00	26.000,00	99,95	
2.16.2.16.2.201.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	52.974.000,00	26.000,00	99,95	
2.16.2.16.2.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	351.975.399,00	334.970.926,00	17.004.473,00	95,17	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.250.400,00	9.250.400,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.884.000,00	7.884.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.884.000,00	7.884.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	1.366.400,00	1.366.400,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.366.400,00	1.366.400,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66.729.400,00	49.927.096,00	16.802.304,00	74,82	
2.16.2.16.2.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	66.729.400,00	49.927.096,00	16.802.304,00	74,82	
2.16.2.16.2.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.729.400,00	49.927.096,00	16.802.304,00	74,82	
2.16.2.16.2.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	51.548.900,00	51.471.100,00	77.800,00	99,85	
2.16.2.16.2.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	51.548.900,00	51.471.100,00	77.800,00	99,85	
2.16.2.16.2.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	51.548.900,00	51.471.100,00	77.800,00	99,85	
2.16.2.16.2.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.437.200,00	22.437.200,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	22.437.200,00	22.437.200,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.437.200,00	22.437.200,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	202.009.499,00	201.885.130,00	124.369,00	99,94	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	202.009.499,00	201.885.130,00	124.369,00	99,94	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.809.499,00	164.685.130,00	124.369,00	99,92	
2.16.2.16.2.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	97.110.300,00	96.900.000,00	210.300,00	99,78	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	97.110.300,00	96.900.000,00	210.300,00	99,78	
2.16.2.16.2.201.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	97.110.300,00	96.900.000,00	210.300,00	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.201.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.110.300,00	96.900.000,00	210.300,00	99,78	
2.16.2.16.2.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	520.175.000,00	507.055.000,00	13.120.000,00	97,48	
2.16.2.16.2.201.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	204.450.000,00	204.330.000,00	120.000,00	99,94	
2.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	204.450.000,00	204.330.000,00	120.000,00	99,94	
2.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	204.450.000,00	204.330.000,00	120.000,00	99,94	
2.16.2.16.2.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	312.800.000,00	299.800.000,00	13.000.000,00	95,84	
2.16.2.16.2.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	312.800.000,00	299.800.000,00	13.000.000,00	95,84	
2.16.2.16.2.201.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	312.800.000,00	299.800.000,00	13.000.000,00	95,84	
2.16.2.16.2.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.950.000,00	131.950.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	94.520.000,00	94.520.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	94.520.000,00	94.520.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	94.520.000,00	94.520.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.430.000,00	27.430.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	27.430.000,00	27.430.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.430.000,00	27.430.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.201.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.202.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.434.944.752,00	2.430.160.983,00	4.783.769,00	99,80	
2.16.2.16.2.202.2.01.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.434.944.752,00	2.430.160.983,00	4.783.769,00	99,80	
2.16.2.16.2.202.2.01.04.	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	308.613.045,00	307.036.000,00	1.577.045,00	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.202.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	308.613.045,00	307.036.000,00	1.577.045,00	99,49	
2.16.2.16.2.202.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	308.613.045,00	307.036.000,00	1.577.045,00	99,49	
2.16.2.16.2.202.2.01.05.	PENGLOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	414.982.380,00	414.338.710,00	643.670,00	99,84	
2.16.2.16.2.202.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	414.982.380,00	414.338.710,00	643.670,00	99,84	
2.16.2.16.2.202.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	414.982.380,00	414.338.710,00	643.670,00	99,84	
2.16.2.16.2.202.2.01.06.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	51.339.300,00	50.944.700,00	394.600,00	99,23	
2.16.2.16.2.202.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	51.339.300,00	50.944.700,00	394.600,00	99,23	
2.16.2.16.2.202.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	51.339.300,00	50.944.700,00	394.600,00	99,23	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	1.416.780.000,00	1.415.729.428,00	1.050.572,00	99,93	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.415.380.000,00	1.414.329.428,00	1.050.572,00	99,93	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.0	Belanja Pegawai	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.384.300.000,00	1.383.249.428,00	1.050.572,00	99,92	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.202.2.01.07.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.202.2.01.08.	KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	47.400.000,00	46.859.900,00	540.100,00	98,86	
2.16.2.16.2.202.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	47.400.000,00	46.859.900,00	540.100,00	98,86	
2.16.2.16.2.202.2.01.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	46.859.900,00	540.100,00	98,86	
2.16.2.16.2.202.2.01.12.	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	120.632.423,00	120.401.433,00	230.990,00	99,81	
2.16.2.16.2.202.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	120.632.423,00	120.401.433,00	230.990,00	99,81	
2.16.2.16.2.202.2.01.12.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	120.632.423,00	120.401.433,00	230.990,00	99,81	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.	PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.197.604,00	74.850.812,00	346.792,00	99,54	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	4.251.600,00	4.199.999,00	51.601,00	98,79	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.251.600,00	4.199.999,00	51.601,00	98,79	
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.2.	BELANJA MODAL	70.946.004,00	70.650.813,00	295.191,00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.202.2.01.13.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.946.004,00	70.650.813,00	295.191,00	99,58	
2.16.2.16.2.203.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.510.551.661,00	3.430.660.119,00	79.891.542,00	97,72	
2.16.2.16.2.203.2.01.	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.370.260.946,00	2.366.125.800,00	4.135.146,00	99,83	
2.16.2.16.2.203.2.01.02.	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.523.250,00	9.002.000,00	521.250,00	94,53	
2.16.2.16.2.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.523.250,00	9.002.000,00	521.250,00	94,53	
2.16.2.16.2.203.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.523.250,00	9.002.000,00	521.250,00	94,53	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	2.360.737.696,00	2.357.123.800,00	3.613.896,00	99,85	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.360.737.696,00	2.357.123.800,00	3.613.896,00	99,85	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	34.440.000,00	34.160.000,00	280.000,00	99,19	
2.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.326.297.696,00	2.322.963.800,00	3.333.896,00	99,86	
2.16.2.16.2.203.2.02.	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.140.290.715,00	1.064.534.319,00	75.756.396,00	93,36	
2.16.2.16.2.203.2.02.01.	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.010.000,00	216.630.000,00	380.000,00	99,82	
2.16.2.16.2.203.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	217.010.000,00	216.630.000,00	380.000,00	99,82	
2.16.2.16.2.203.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	11.510.000,00	11.510.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	205.500.000,00	205.120.000,00	380.000,00	99,82	
2.16.2.16.2.203.2.02.02.	SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	224.000.000,00	223.660.800,00	339.200,00	99,85	
2.16.2.16.2.203.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	224.000.000,00	223.660.800,00	339.200,00	99,85	
2.16.2.16.2.203.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	223.660.800,00	339.200,00	99,85	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	380.705.404,00	379.797.000,00	908.404,00	99,76	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	72.674.804,00	71.814.000,00	860.804,00	98,82	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	72.674.804,00	71.814.000,00	860.804,00	98,82	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	308.030.600,00	307.983.000,00	47.600,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.747.600,00	257.700.000,00	47.600,00	99,98	
2.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.283.000,00	50.283.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.203.2.02.04.	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	91,67	
2.16.2.16.2.203.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	91,67	
2.16.2.16.2.203.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	91,67	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	16.624.910,00	16.374.600,00	250.310,00	98,49	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.624.910,00	16.374.600,00	250.310,00	98,49	
2.16.2.16.2.203.2.02.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.624.910,00	16.374.600,00	250.310,00	98,49	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	16.011.000,00	14.961.000,00	1.050.000,00	93,44	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	16.011.000,00	14.961.000,00	1.050.000,00	93,44	
2.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.011.000,00	14.961.000,00	1.050.000,00	93,44	
2.16.2.16.2.203.2.02.09.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	239.159.401,00	169.630.919,00	69.528.482,00	70,93	
2.16.2.16.2.203.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	239.159.401,00	169.630.919,00	69.528.482,00	70,93	
2.16.2.16.2.203.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	239.159.401,00	169.630.919,00	69.528.482,00	70,93	
2.16.2.16.2.203.2.02.10.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	10.780.000,00	10.480.000,00	300.000,00	97,22	
2.16.2.16.2.203.2.02.10.5.1.	BELANJA OPERASI	10.780.000,00	10.480.000,00	300.000,00	97,22	
2.16.2.16.2.203.2.02.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	10.480.000,00	300.000,00	97,22	
2.20.2.16.2.202.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	132.478.000,00	130.483.500,00	1.994.500,00	98,49	
2.20.2.16.2.202.2.01.	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.478.000,00	130.483.500,00	1.994.500,00	98,49	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	77.230.000,00	75.415.000,00	1.815.000,00	97,65	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	77.230.000,00	75.415.000,00	1.815.000,00	97,65	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	11.110.000,00	1.010.000,00	91,67	
2.20.2.16.2.202.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.110.000,00	64.305.000,00	805.000,00	98,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.20.2.16.2.202.2.01.03.	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	55.248.000,00	55.068.500,00	179.500,00	99,68	
2.20.2.16.2.202.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	55.248.000,00	55.068.500,00	179.500,00	99,68	
2.20.2.16.2.202.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.248.000,00	55.068.500,00	179.500,00	99,68	
2.21.2.16.2.202.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	139.099.368,00	136.376.710,00	2.722.658,00	98,04	
2.21.2.16.2.202.2.01.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.099.368,00	136.376.710,00	2.722.658,00	98,04	
2.21.2.16.2.202.2.01.03.	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	31.215.000,00	30.509.710,00	705.290,00	97,74	
2.21.2.16.2.202.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	31.215.000,00	30.509.710,00	705.290,00	97,74	
2.21.2.16.2.202.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.215.000,00	30.509.710,00	705.290,00	97,74	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.884.368,00	105.867.000,00	2.017.368,00	98,13	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	41.742.000,00	41.487.000,00	255.000,00	99,39	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	41.742.000,00	41.487.000,00	255.000,00	99,39	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	66.142.368,00	64.380.000,00	1.762.368,00	97,34	
2.21.2.16.2.202.2.01.04.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.142.368,00	64.380.000,00	1.762.368,00	97,34	
	JUMLAH BELANJA	11.623.386.261,00	11.314.885.363,00	308.500.898,00	97,35	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.623.386.261,00)	(10.789.688.263,00)	166.302.002,00	101,57	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.623.386.261,00)	(10.789.688.263,00)	166.302.002,00	101,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.3.31.0.00.02.0000. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	9.215.465.411,00	7.235.794.888,00	1.979.670.523,00	78,52	
2.17.2.17.3.301.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.058.793.491,00	5.597.632.508,00	461.160.983,00	92,39	
2.17.2.17.3.301.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.384.320,00	14.645.800,00	2.738.520,00	84,25	
2.17.2.17.3.301.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.608.900,00	2.093.000,00	515.900,00	80,23	
2.17.2.17.3.301.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.608.900,00	2.093.000,00	515.900,00	80,23	
2.17.2.17.3.301.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.608.900,00	2.093.000,00	515.900,00	80,23	
2.17.2.17.3.301.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.619.200,00	2.227.000,00	392.200,00	85,03	
2.17.2.17.3.301.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.619.200,00	2.227.000,00	392.200,00	85,03	
2.17.2.17.3.301.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.619.200,00	2.227.000,00	392.200,00	85,03	
2.17.2.17.3.301.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.485.700,00	2.160.800,00	324.900,00	86,93	
2.17.2.17.3.301.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.485.700,00	2.160.800,00	324.900,00	86,93	
2.17.2.17.3.301.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.485.700,00	2.160.800,00	324.900,00	86,93	
2.17.2.17.3.301.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.484.200,00	2.022.500,00	461.700,00	81,41	
2.17.2.17.3.301.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.484.200,00	2.022.500,00	461.700,00	81,41	
2.17.2.17.3.301.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.484.200,00	2.022.500,00	461.700,00	81,41	
2.17.2.17.3.301.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.186.320,00	6.142.500,00	1.043.820,00	85,47	
2.17.2.17.3.301.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.186.320,00	6.142.500,00	1.043.820,00	85,47	
2.17.2.17.3.301.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.186.320,00	6.142.500,00	1.043.820,00	85,47	
2.17.2.17.3.301.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.593.457.791,00	4.180.749.720,00	412.708.071,00	91,02	
2.17.2.17.3.301.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.542.907.891,00	4.131.803.520,00	411.104.371,00	90,95	
2.17.2.17.3.301.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.542.907.891,00	4.131.803.520,00	411.104.371,00	90,95	
2.17.2.17.3.301.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.542.907.891,00	4.131.803.520,00	411.104.371,00	90,95	
2.17.2.17.3.301.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.315.100,00	4.271.500,00	1.043.600,00	80,37	
2.17.2.17.3.301.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	5.315.100,00	4.271.500,00	1.043.600,00	80,37	
2.17.2.17.3.301.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.315.100,00	4.271.500,00	1.043.600,00	80,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.301.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	45.234.800,00	44.674.700,00	560.100,00	98,76	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	45.234.800,00	44.674.700,00	560.100,00	98,76	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	40.920.000,00	40.920.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.314.800,00	3.754.700,00	560.100,00	87,02	
2.17.2.17.3.301.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	27.284.320,00	26.941.000,00	343.320,00	98,74	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	27.284.320,00	26.941.000,00	343.320,00	98,74	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	27.284.320,00	26.941.000,00	343.320,00	98,74	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
2.17.2.17.3.301.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.984.320,00	2.641.000,00	343.320,00	88,50	
2.17.2.17.3.301.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	369.020.120,00	352.886.095,00	16.134.025,00	95,63	
2.17.2.17.3.301.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.243.200,00	9.855.000,00	388.200,00	96,21	
2.17.2.17.3.301.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.243.200,00	9.855.000,00	388.200,00	96,21	
2.17.2.17.3.301.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.243.200,00	9.855.000,00	388.200,00	96,21	
2.17.2.17.3.301.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65.712.060,00	62.682.600,00	3.029.460,00	95,39	
2.17.2.17.3.301.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	65.712.060,00	62.682.600,00	3.029.460,00	95,39	
2.17.2.17.3.301.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.712.060,00	62.682.600,00	3.029.460,00	95,39	
2.17.2.17.3.301.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	13.713.100,00	13.614.000,00	99.100,00	99,28	
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	13.713.100,00	13.614.000,00	99.100,00	99,28	
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.713.100,00	13.614.000,00	99.100,00	99,28	
2.17.2.17.3.301.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.408.360,00	19.737.000,00	671.360,00	96,71	
2.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	20.408.360,00	19.737.000,00	671.360,00	96,71	
2.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.408.360,00	19.737.000,00	671.360,00	96,71	
2.17.2.17.3.301.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.062.400,00	8.306.000,00	3.756.400,00	68,86	
2.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	12.062.400,00	8.306.000,00	3.756.400,00	68,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.062.400,00	8.306.000,00	3.756.400,00	68,86	
2.17.2.17.3.301.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	246.881.000,00	238.691.495,00	8.189.505,00	96,68	
2.17.2.17.3.301.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	246.881.000,00	238.691.495,00	8.189.505,00	96,68	
2.17.2.17.3.301.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	246.881.000,00	238.691.495,00	8.189.505,00	96,68	
2.17.2.17.3.301.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	862.380.940,00	833.281.393,00	29.099.547,00	96,63	
2.17.2.17.3.301.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.340.000,00	2.300.000,00	40.000,00	98,29	
2.17.2.17.3.301.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.300.000,00	40.000,00	98,29	
2.17.2.17.3.301.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.300.000,00	40.000,00	98,29	
2.17.2.17.3.301.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	158.315.000,00	140.412.153,00	17.902.847,00	88,69	
2.17.2.17.3.301.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	158.315.000,00	140.412.153,00	17.902.847,00	88,69	
2.17.2.17.3.301.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	158.315.000,00	140.412.153,00	17.902.847,00	88,69	
2.17.2.17.3.301.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	701.725.940,00	690.569.240,00	11.156.700,00	98,41	
2.17.2.17.3.301.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	701.725.940,00	690.569.240,00	11.156.700,00	98,41	
2.17.2.17.3.301.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	701.725.940,00	690.569.240,00	11.156.700,00	98,41	
2.17.2.17.3.301.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	189.266.000,00	189.128.500,00	137.500,00	99,93	
2.17.2.17.3.301.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.496.000,00	34.000,00	99,91	
2.17.2.17.3.301.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.496.000,00	34.000,00	99,91	
2.17.2.17.3.301.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.496.000,00	34.000,00	99,91	
2.17.2.17.3.301.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	84.716.000,00	84.703.500,00	12.500,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	84.716.000,00	84.703.500,00	12.500,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	84.716.000,00	84.703.500,00	12.500,00	99,99	
2.17.2.17.3.301.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.300.000,00	25.250.000,00	50.000,00	99,80	
2.17.2.17.3.301.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	25.300.000,00	25.250.000,00	50.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.3.301.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	25.250.000,00	50.000,00	99,80	
2.17.2.17.3.301.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.720.000,00	40.679.000,00	41.000,00	99,90	
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	40.720.000,00	40.679.000,00	41.000,00	99,90	
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.720.000,00	40.679.000,00	41.000,00	99,90	
2.17.2.17.3.303.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.219.300,00	96.505.440,00	3.713.860,00	96,29	
2.17.2.17.3.303.2.01.	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100.219.300,00	96.505.440,00	3.713.860,00	96,29	
2.17.2.17.3.303.2.01.01.	PENGAWASAN KEKUATAN, KESEHATAN, KEMANDIRIAN, KETANGGUHAN, SERTA AKUNTABILITAS KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.219.300,00	96.505.440,00	3.713.860,00	96,29	
2.17.2.17.3.303.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.219.300,00	96.505.440,00	3.713.860,00	96,29	
2.17.2.17.3.303.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.219.300,00	96.505.440,00	3.713.860,00	96,29	
2.17.2.17.3.307.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.056.452.620,00	1.541.656.940,00	1.514.795.680,00	50,44	
2.17.2.17.3.307.2.01.	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	3.056.452.620,00	1.541.656.940,00	1.514.795.680,00	50,44	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	3.006.452.620,00	1.491.716.940,00	1.514.735.680,00	49,62	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.006.452.620,00	1.491.716.940,00	1.514.735.680,00	49,62	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	203.452.620,00	157.716.940,00	45.735.680,00	77,52	
2.17.2.17.3.307.2.01.01.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	2.803.000.000,00	1.334.000.000,00	1.469.000.000,00	47,59	
2.17.2.17.3.307.2.01.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
2.17.2.17.3.307.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
2.17.2.17.3.307.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
	JUMLAH BELANJA	9.215.465.411,00	7.235.794.888,00	1.979.670.523,00	78,52	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.215.465.411,00)	(7.235.794.888,00)	(1.979.670.523,00)	78,52	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.215.465.411,00)	(7.235.794.888,00)	(1.979.670.523,00)	78,52	
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------	--

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.2.17.02.0000. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.00.00.	BELANJA	12.621.869.768,00	10.949.829.438,00	1.672.040.330,00	86,75	
2.18.2.18.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.887.842.068,00	10.371.771.622,00	1.516.070.446,00	87,25	
2.18.2.18.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.000.000,00	13.228.950,00	771.050,00	94,49	
2.18.2.18.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.381.500,00	2.347.900,00	33.600,00	98,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.381.500,00	2.347.900,00	33.600,00	98,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.381.500,00	2.347.900,00	33.600,00	98,59	
2.18.2.18.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.340.600,00	2.293.500,00	47.100,00	97,99	
2.18.2.18.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.340.600,00	2.293.500,00	47.100,00	97,99	
2.18.2.18.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.340.600,00	2.293.500,00	47.100,00	97,99	
2.18.2.18.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.859.400,00	1.757.900,00	101.500,00	94,54	
2.18.2.18.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.859.400,00	1.757.900,00	101.500,00	94,54	
2.18.2.18.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.859.400,00	1.757.900,00	101.500,00	94,54	
2.18.2.18.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	915.500,00	848.200,00	67.300,00	92,65	
2.18.2.18.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	915.500,00	848.200,00	67.300,00	92,65	
2.18.2.18.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	915.500,00	848.200,00	67.300,00	92,65	
2.18.2.18.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	1.029.400,00	985.700,00	43.700,00	95,75	
2.18.2.18.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.029.400,00	985.700,00	43.700,00	95,75	
2.18.2.18.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.029.400,00	985.700,00	43.700,00	95,75	
2.18.2.18.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.527.300,00	2.520.650,00	6.650,00	99,74	
2.18.2.18.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.527.300,00	2.520.650,00	6.650,00	99,74	
2.18.2.18.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.527.300,00	2.520.650,00	6.650,00	99,74	
2.18.2.18.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.946.300,00	2.475.100,00	471.200,00	84,01	
2.18.2.18.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.946.300,00	2.475.100,00	471.200,00	84,01	
2.18.2.18.0.001.2.01.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.946.300,00	2.475.100,00	471.200,00	84,01	
2.18.2.18.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.730.104.613,00	5.582.907.377,00	1.147.197.236,00	82,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.723.076.713,00	5.576.253.077,00	1.146.823.636,00	82,94	
2.18.2.18.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.723.076.713,00	5.576.253.077,00	1.146.823.636,00	82,94	
2.18.2.18.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	6.723.076.713,00	5.576.253.077,00	1.146.823.636,00	82,94	
1.						
2.18.2.18.0.001.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.990.000,00	1.648.000,00	342.000,00	82,81	
2.18.2.18.0.001.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.990.000,00	1.648.000,00	342.000,00	82,81	
2.18.2.18.0.001.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.648.000,00	342.000,00	82,81	
2.						
2.18.2.18.0.001.2.02.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2.029.200,00	2.000.000,00	29.200,00	98,56	
2.18.2.18.0.001.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.029.200,00	2.000.000,00	29.200,00	98,56	
2.18.2.18.0.001.2.02.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.029.200,00	2.000.000,00	29.200,00	98,56	
2.						
2.18.2.18.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.004.400,00	2.002.000,00	2.400,00	99,88	
2.18.2.18.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.004.400,00	2.002.000,00	2.400,00	99,88	
2.18.2.18.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.004.400,00	2.002.000,00	2.400,00	99,88	
2.						
2.18.2.18.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.004.300,00	1.004.300,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.004.300,00	1.004.300,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.02.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.004.300,00	1.004.300,00	-	100,00	
2.						
2.18.2.18.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.663.100,00	7.515.900,00	1.147.200,00	86,76	
2.18.2.18.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.988.100,00	1.837.400,00	150.700,00	92,42	
2.18.2.18.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.988.100,00	1.837.400,00	150.700,00	92,42	
2.18.2.18.0.001.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.988.100,00	1.837.400,00	150.700,00	92,42	
2.						
2.18.2.18.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.099.400,00	1.679.000,00	420.400,00	79,98	
2.18.2.18.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.099.400,00	1.679.000,00	420.400,00	79,98	
2.18.2.18.0.001.2.03.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.099.400,00	1.679.000,00	420.400,00	79,98	
2.						
2.18.2.18.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.985.100,00	1.734.000,00	251.100,00	87,35	
2.18.2.18.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.985.100,00	1.734.000,00	251.100,00	87,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.100,00	1.734.000,00	251.100,00	87,35	
2.18.2.18.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.590.500,00	2.265.500,00	325.000,00	87,45	
2.18.2.18.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.590.500,00	2.265.500,00	325.000,00	87,45	
2.18.2.18.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.500,00	2.265.500,00	325.000,00	87,45	
2.18.2.18.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	663.948.655,00	545.463.503,00	118.485.152,00	82,15	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.893.200,00	14.180.600,00	2.712.600,00	83,94	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	16.405.200,00	13.692.600,00	2.712.600,00	83,46	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.405.200,00	13.692.600,00	2.712.600,00	83,46	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	488.000,00	488.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.06.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	488.000,00	488.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	127.706.000,00	126.409.400,00	1.296.600,00	98,98	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	127.706.000,00	126.409.400,00	1.296.600,00	98,98	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	113.186.000,00	111.889.400,00	1.296.600,00	98,85	
2.18.2.18.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	34.739.600,00	33.630.800,00	1.108.800,00	96,81	
2.18.2.18.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	34.739.600,00	33.630.800,00	1.108.800,00	96,81	
2.18.2.18.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.739.600,00	33.630.800,00	1.108.800,00	96,81	
2.18.2.18.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	29.726.000,00	10.274.000,00	74,32	
2.18.2.18.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	29.726.000,00	10.274.000,00	74,32	
2.18.2.18.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	29.726.000,00	10.274.000,00	74,32	
2.18.2.18.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	71.353.555,00	58.730.100,00	12.623.455,00	82,31	
2.18.2.18.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	71.353.555,00	58.730.100,00	12.623.455,00	82,31	
2.18.2.18.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	71.353.555,00	58.730.100,00	12.623.455,00	82,31	
2.18.2.18.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.362.000,00	3.004.000,00	3.358.000,00	47,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.362.000,00	3.004.000,00	3.358.000,00	47,22	
2.18.2.18.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	6.362.000,00	3.004.000,00	3.358.000,00	47,22	
2.18.2.18.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	366.894.300,00	279.782.603,00	87.111.697,00	76,26	
2.18.2.18.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	366.894.300,00	279.782.603,00	87.111.697,00	76,26	
2.18.2.18.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	366.894.300,00	279.782.603,00	87.111.697,00	76,26	
2.18.2.18.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.487.778.700,00	3.310.138.910,00	177.639.790,00	94,91	
2.18.2.18.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	947.487.400,00	863.260.300,00	84.227.100,00	91,11	
2.18.2.18.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	947.487.400,00	863.260.300,00	84.227.100,00	91,11	
2.18.2.18.0.001.2.07.05.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	947.487.400,00	863.260.300,00	84.227.100,00	91,11	
2.18.2.18.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.279.174.500,00	2.190.301.000,00	88.873.500,00	96,10	
2.18.2.18.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	2.279.174.500,00	2.190.301.000,00	88.873.500,00	96,10	
2.18.2.18.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.279.174.500,00	2.190.301.000,00	88.873.500,00	96,10	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	261.116.800,00	256.577.610,00	4.539.190,00	98,26	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	210.323.200,00	206.105.910,00	4.217.290,00	97,99	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	210.323.200,00	206.105.910,00	4.217.290,00	97,99	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	50.793.600,00	50.471.700,00	321.900,00	99,37	
2.18.2.18.0.001.2.07.10.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.793.600,00	50.471.700,00	321.900,00	99,37	
2.18.2.18.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	803.807.000,00	734.550.506,00	69.256.494,00	91,38	
2.18.2.18.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	994.500,00	990.000,00	4.500,00	99,55	
2.18.2.18.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	994.500,00	990.000,00	4.500,00	99,55	
2.18.2.18.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	994.500,00	990.000,00	4.500,00	99,55	
2.18.2.18.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	159.612.500,00	110.760.506,00	48.851.994,00	69,39	
2.18.2.18.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	159.612.500,00	110.760.506,00	48.851.994,00	69,39	
2.18.2.18.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	159.612.500,00	110.760.506,00	48.851.994,00	69,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	643.200.000,00	622.800.000,00	20.400.000,00	96,83	
2.18.2.18.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	643.200.000,00	622.800.000,00	20.400.000,00	96,83	
2.18.2.18.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	643.200.000,00	622.800.000,00	20.400.000,00	96,83	
2.18.2.18.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.540.000,00	177.966.476,00	1.573.524,00	99,12	
2.18.2.18.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.388.476,00	141.524,00	99,63	
2.18.2.18.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.388.476,00	141.524,00	99,63	
2.18.2.18.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.388.476,00	141.524,00	99,63	
2.18.2.18.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	108.020.000,00	106.678.000,00	1.342.000,00	98,76	
2.18.2.18.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	108.020.000,00	106.678.000,00	1.342.000,00	98,76	
2.18.2.18.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	108.020.000,00	106.678.000,00	1.342.000,00	98,76	
2.18.2.18.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.990.000,00	32.900.000,00	90.000,00	99,73	
2.18.2.18.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	32.990.000,00	32.900.000,00	90.000,00	99,73	
2.18.2.18.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	32.990.000,00	32.900.000,00	90.000,00	99,73	
2.18.2.18.0.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	221.010.300,00	220.945.200,00	65.100,00	99,97	
2.18.2.18.0.002.2.02.	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	221.010.300,00	220.945.200,00	65.100,00	99,97	
2.18.2.18.0.002.2.02.01.	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.000.300,00	200.935.200,00	65.100,00	99,97	
2.18.2.18.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	201.000.300,00	200.935.200,00	65.100,00	99,97	
2.18.2.18.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	201.000.300,00	200.935.200,00	65.100,00	99,97	
2.18.2.18.0.002.2.02.02.	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	20.010.000,00	20.010.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	20.010.000,00	20.010.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.010.000,00	20.010.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.003.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	21.269.800,00	21.269.800,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.003.2.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.269.800,00	21.269.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.003.2.01.02.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.269.800,00	21.269.800,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	21.269.800,00	21.269.800,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.269.800,00	21.269.800,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.004.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	60.029.500,00	53.435.218,00	6.594.282,00	89,01	
2.18.2.18.0.004.2.01.	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	60.029.500,00	53.435.218,00	6.594.282,00	89,01	
2.18.2.18.0.004.2.01.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	21.492.000,00	18.472.000,00	3.020.000,00	85,95	
2.18.2.18.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	21.492.000,00	18.472.000,00	3.020.000,00	85,95	
2.18.2.18.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.492.000,00	18.472.000,00	3.020.000,00	85,95	
2.18.2.18.0.004.2.01.02.	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.004.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.004.2.01.03.	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	20.087.500,00	16.513.218,00	3.574.282,00	82,21	
2.18.2.18.0.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	20.087.500,00	16.513.218,00	3.574.282,00	82,21	
2.18.2.18.0.004.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.087.500,00	16.513.218,00	3.574.282,00	82,21	
2.18.2.18.0.005.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	431.718.100,00	282.407.598,00	149.310.502,00	65,41	
2.18.2.18.0.005.2.01.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	431.718.100,00	282.407.598,00	149.310.502,00	65,41	
2.18.2.18.0.005.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	51.750.000,00	-	51.750.000,00	0,00	
2.18.2.18.0.005.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	51.750.000,00	-	51.750.000,00	0,00	
2.18.2.18.0.005.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	-	51.750.000,00	0,00	
2.18.2.18.0.005.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	300.673.000,00	213.477.090,00	87.195.910,00	71,00	
2.18.2.18.0.005.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	300.673.000,00	213.477.090,00	87.195.910,00	71,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.005.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	300.673.000,00	213.477.090,00	87.195.910,00	71,00	
2.18.2.18.0.005.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	79.295.100,00	68.930.508,00	10.364.592,00	86,93	
2.18.2.18.0.005.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	79.295.100,00	68.930.508,00	10.364.592,00	86,93	
2.18.2.18.0.005.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	79.295.100,00	68.930.508,00	10.364.592,00	86,93	
	JUMLAH BELANJA	12.621.869.768,00	10.949.829.438,00	1.672.040.330,00	86,75	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.621.869.768,00)	(10.949.829.438,00)	(1.672.040.330,00)	86,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.621.869.768,00)	(10.949.829.438,00)	(1.672.040.330,00)	86,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.01.0000. - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	17.218.749.159,00	14.460.147.345,79	2.758.601.813,21	83,98	
2.19.2.19.3.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.762.178.039,00	5.420.038.231,00	342.139.808,00	94,06	
2.19.2.19.3.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.746.600,00	3.746.600,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.746.600,00	3.746.600,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.746.600,00	3.746.600,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.746.600,00	3.746.600,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.641.495.060,00	3.366.416.884,00	275.078.176,00	92,45	
2.19.2.19.3.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.638.578.160,00	3.363.499.984,00	275.078.176,00	92,44	
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.638.578.160,00	3.363.499.984,00	275.078.176,00	92,44	
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.638.578.160,00	3.363.499.984,00	275.078.176,00	92,44	
2.19.2.19.3.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.916.900,00	2.916.900,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.916.900,00	2.916.900,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.916.900,00	2.916.900,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.540.000,00	24.540.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.540.000,00	24.540.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.540.000,00	24.540.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	24.540.000,00	24.540.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	530.570.150,00	529.495.651,00	1.074.499,00	99,80	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	105.108.689,00	105.096.200,00	12.489,00	99,99	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	93.297.989,00	93.285.500,00	12.489,00	99,99	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	93.297.989,00	93.285.500,00	12.489,00	99,99	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	11.810.700,00	11.810.700,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.06.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.810.700,00	11.810.700,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	103.362.250,00	103.084.100,00	278.150,00	99,73	
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	103.362.250,00	103.084.100,00	278.150,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	103.362.250,00	103.084.100,00	278.150,00	99,73	
2.19.2.19.3.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.059.200,00	58.870.800,00	188.400,00	99,68	
2.19.2.19.3.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	59.059.200,00	58.870.800,00	188.400,00	99,68	
2.19.2.19.3.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	59.059.200,00	58.870.800,00	188.400,00	99,68	
2.19.2.19.3.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	61.683.940,00	61.103.300,00	580.640,00	99,06	
2.19.2.19.3.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	61.683.940,00	61.103.300,00	580.640,00	99,06	
2.19.2.19.3.201.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	61.683.940,00	61.103.300,00	580.640,00	99,06	
2.19.2.19.3.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.992.000,00	7.980.000,00	12.000,00	99,85	
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	7.992.000,00	7.980.000,00	12.000,00	99,85	
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.992.000,00	7.980.000,00	12.000,00	99,85	
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	193.364.071,00	193.361.251,00	2.820,00	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	193.364.071,00	193.361.251,00	2.820,00	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	193.364.071,00	193.361.251,00	2.820,00	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.406.538.529,00	1.341.724.296,00	64.814.233,00	95,39	
2.19.2.19.3.201.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.179.000,00	10.167.000,00	12.000,00	99,88	
2.19.2.19.3.201.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.179.000,00	10.167.000,00	12.000,00	99,88	
2.19.2.19.3.201.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.179.000,00	10.167.000,00	12.000,00	99,88	
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	182.089.600,00	134.901.192,00	47.188.408,00	74,09	
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	182.089.600,00	134.901.192,00	47.188.408,00	74,09	
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	182.089.600,00	134.901.192,00	47.188.408,00	74,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.201.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.224.468,00	26.973.668,00	2.250.800,00	92,30	
2.19.2.19.3.201.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	29.224.468,00	26.973.668,00	2.250.800,00	92,30	
2.19.2.19.3.201.2.08.03.5.1.0	Belanja Pegawai	23.710.000,00	21.460.000,00	2.250.000,00	90,51	
1.						
2.19.2.19.3.201.2.08.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.514.468,00	5.513.668,00	800,00	99,99	
2.						
2.19.2.19.3.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.185.045.461,00	1.169.682.436,00	15.363.025,00	98,70	
2.19.2.19.3.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.167.035.661,00	1.151.672.636,00	15.363.025,00	98,68	
2.19.2.19.3.201.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.167.035.661,00	1.151.672.636,00	15.363.025,00	98,68	
2.						
2.19.2.19.3.201.2.08.04.5.2.	BELANJA MODAL	18.009.800,00	18.009.800,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.08.04.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.009.800,00	18.009.800,00	-	100,00	
2.						
2.19.2.19.3.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.820.400,00	130.647.500,00	1.172.900,00	99,11	
2.19.2.19.3.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	100.680.000,00	100.207.500,00	472.500,00	99,53	
2.19.2.19.3.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	100.680.000,00	100.207.500,00	472.500,00	99,53	
2.19.2.19.3.201.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	100.680.000,00	100.207.500,00	472.500,00	99,53	
2.						
2.19.2.19.3.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.140.400,00	30.440.000,00	700.400,00	97,75	
2.19.2.19.3.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	31.140.400,00	30.440.000,00	700.400,00	97,75	
2.19.2.19.3.201.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	31.140.400,00	30.440.000,00	700.400,00	97,75	
2.						
2.19.2.19.3.201.2.13.	PENATAAN ORGANISASI	13.467.300,00	13.467.300,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.13.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	13.467.300,00	13.467.300,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.13.05.5.1.	BELANJA OPERASI	13.467.300,00	13.467.300,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.201.2.13.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	13.467.300,00	13.467.300,00	-	100,00	
2.						
2.19.2.19.3.202.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	920.485.987,00	914.865.791,00	5.620.196,00	99,39	
2.19.2.19.3.202.2.01.	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRSAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	770.485.987,00	764.865.791,00	5.620.196,00	99,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.3.202.2.01.09.	PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA	770.485.987,00	764.865.791,00	5.620.196,00	99,27	
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	770.485.987,00	764.865.791,00	5.620.196,00	99,27	
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	770.485.987,00	764.865.791,00	5.620.196,00	99,27	
2.19.2.19.3.202.2.02.	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.588.199.952,00	1.586.502.298,00	1.697.654,00	99,89	
2.19.2.19.3.203.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.01.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	-	100,00	
2.19.2.19.3.203.2.02.	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.486.815,00	260.802.166,00	1.684.649,00	99,36	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	262.486.815,00	260.802.166,00	1.684.649,00	99,36	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	262.486.815,00	260.802.166,00	1.684.649,00	99,36	
2.19.2.19.3.203.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	262.486.815,00	260.802.166,00	1.684.649,00	99,36	
2.19.2.19.3.203.2.05.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	248.615.955,00	248.602.950,00	13.005,00	99,99	
2.19.2.19.3.203.2.05.01.	PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	248.615.955,00	248.602.950,00	13.005,00	99,99	
2.19.2.19.3.203.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	248.615.955,00	248.602.950,00	13.005,00	99,99	
2.19.2.19.3.203.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	248.615.955,00	248.602.950,00	13.005,00	99,99	
3.26.2.19.3.202.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	8.637.203.981,00	6.228.112.475,79	2.409.091.505,21	72,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.3.202.2.02.	PENGLOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	8.185.000.000,00	6.001.116.235,79	2.183.883.764,21	73,32	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KA	8.185.000.000,00	6.001.116.235,79	2.183.883.764,21	73,32	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.258.457.601,00	3.244.128.102,62	14.329.498,38	99,56	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.457.601,00	3.244.128.102,62	14.329.498,38	99,56	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.	BELANJA MODAL	4.926.542.399,00	2.756.988.133,17	2.169.554.265,83	55,96	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.500.000,00	285.858.300,00	6.641.700,00	97,73	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.227.574.399,00	2.072.600.806,73	2.154.973.592,27	49,03	
3.26.2.19.3.202.2.02.04.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.468.000,00	398.529.026,44	7.938.973,56	98,05	
3.26.2.19.3.202.2.03.	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	452.203.981,00	226.996.240,00	225.207.741,00	50,20	
3.26.2.19.3.202.2.03.04.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	452.203.981,00	226.996.240,00	225.207.741,00	50,20	
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	197.201.485,00	196.996.240,00	205.245,00	99,90	
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	197.201.485,00	196.996.240,00	205.245,00	99,90	
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.2.	BELANJA MODAL	255.002.496,00	30.000.000,00	225.002.496,00	11,76	
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.002.496,00	30.000.000,00	2.496,00	99,99	
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	-	225.000.000,00	0,00	
3.26.2.19.3.203.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.26.2.19.3.203.2.01.	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.26.2.19.3.203.2.01.01.	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.26.2.19.3.203.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.3.203.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
3.26.2.19.3.205.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	270.681.200,00	270.628.550,00	52.650,00	99,98	
3.26.2.19.3.205.2.01.	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	270.681.200,00	270.628.550,00	52.650,00	99,98	
3.26.2.19.3.205.2.01.02.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	270.681.200,00	270.628.550,00	52.650,00	99,98	
3.26.2.19.3.205.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	270.681.200,00	270.628.550,00	52.650,00	99,98	
3.26.2.19.3.205.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	270.681.200,00	270.628.550,00	52.650,00	99,98	
	JUMLAH BELANJA	17.218.749.159,00	14.460.147.345,79	2.758.601.813,21	83,98	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.218.749.159,00)	(14.460.147.345,79)	(2.758.601.813,21)	83,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.218.749.159,00)	(14.460.147.345,79)	(2.758.601.813,21)	83,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02.0000. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	5.291.532.346,00	4.901.218.316,00	390.314.030,00	92,62	
2.23.2.23.2.201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.648.908.682,00	4.321.809.250,00	327.099.432,00	92,96	
2.23.2.23.2.201.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.099.900,00	7.099.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	872.000,00	872.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	872.000,00	872.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	872.000,00	872.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	688.400,00	688.400,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	688.400,00	688.400,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	688.400,00	688.400,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.263.100,00	1.263.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.263.100,00	1.263.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.263.100,00	1.263.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	986.500,00	986.500,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	986.500,00	986.500,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	986.500,00	986.500,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.289.900,00	3.289.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.289.900,00	3.289.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.289.900,00	3.289.900,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.499.284.242,00	3.188.553.850,00	310.730.392,00	91,12	
2.23.2.23.2.201.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.497.402.142,00	3.186.671.750,00	310.730.392,00	91,12	
2.23.2.23.2.201.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.497.402.142,00	3.186.671.750,00	310.730.392,00	91,12	
2.23.2.23.2.201.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	3.497.402.142,00	3.186.671.750,00	310.730.392,00	91,12	
2.23.2.23.2.201.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.882.100,00	1.882.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.882.100,00	1.882.100,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.882.100,00	1.882.100,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.201.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	209.859.940,00	203.756.622,00	6.103.318,00	97,09	
2.23.2.23.2.201.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.391.200,00	3.391.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.391.200,00	3.391.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.391.200,00	3.391.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65.719.300,00	65.719.300,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	65.719.300,00	65.719.300,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.719.300,00	65.719.300,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.497.200,00	6.497.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	6.497.200,00	6.497.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.497.200,00	6.497.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.597.760,00	8.563.200,00	34.560,00	99,60	
2.23.2.23.2.201.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	8.597.760,00	8.563.200,00	34.560,00	99,60	
2.23.2.23.2.201.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.597.760,00	8.563.200,00	34.560,00	99,60	
2.23.2.23.2.201.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.144.580,00	11.138.600,00	5.980,00	99,95	
2.23.2.23.2.201.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	11.144.580,00	11.138.600,00	5.980,00	99,95	
2.23.2.23.2.201.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.144.580,00	11.138.600,00	5.980,00	99,95	
2.23.2.23.2.201.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79	
2.23.2.23.2.201.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79	
2.23.2.23.2.201.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79	
2.23.2.23.2.201.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	109.709.900,00	103.657.122,00	6.052.778,00	94,48	
2.23.2.23.2.201.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	109.709.900,00	103.657.122,00	6.052.778,00	94,48	
2.23.2.23.2.201.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	109.709.900,00	103.657.122,00	6.052.778,00	94,48	
2.23.2.23.2.201.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	96.752.400,00	95.450.780,00	1.301.620,00	98,65	
2.23.2.23.2.201.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.092.400,00	28.791.180,00	1.301.220,00	95,68	
2.23.2.23.2.201.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	30.092.400,00	28.791.180,00	1.301.220,00	95,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.201.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.092.400,00	28.791.180,00	1.301.220,00	95,68	
2.23.2.23.2.201.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	66.660.000,00	66.659.600,00	400,00	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	66.660.000,00	66.659.600,00	400,00	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.07.11.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	66.660.000,00	66.659.600,00	400,00	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	554.910.000,00	546.216.498,00	8.693.502,00	98,43	
2.23.2.23.2.201.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	133.710.000,00	125.016.498,00	8.693.502,00	93,50	
2.23.2.23.2.201.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	133.710.000,00	125.016.498,00	8.693.502,00	93,50	
2.23.2.23.2.201.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	133.710.000,00	125.016.498,00	8.693.502,00	93,50	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	421.200.000,00	421.200.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	421.200.000,00	421.200.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	421.200.000,00	421.200.000,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	281.002.200,00	280.731.600,00	270.600,00	99,90	
2.23.2.23.2.201.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	225.166.000,00	225.164.850,00	1.150,00	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	225.166.000,00	225.164.850,00	1.150,00	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	225.166.000,00	225.164.850,00	1.150,00	100,00	
2.23.2.23.2.201.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.836.200,00	5.811.000,00	25.200,00	99,57	
2.23.2.23.2.201.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.836.200,00	5.811.000,00	25.200,00	99,57	
2.23.2.23.2.201.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.836.200,00	5.811.000,00	25.200,00	99,57	
2.23.2.23.2.201.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	49.755.750,00	244.250,00	99,51	
2.23.2.23.2.201.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.755.750,00	244.250,00	99,51	
2.23.2.23.2.201.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.755.750,00	244.250,00	99,51	
2.23.2.23.2.202.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	384.642.940,00	381.586.540,00	3.056.400,00	99,21	
2.23.2.23.2.202.2.01.	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	347.046.800,00	344.378.400,00	2.668.400,00	99,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.202.2.01.02.	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	304.614.000,00	302.130.900,00	2.483.100,00	99,18	
2.23.2.23.2.202.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	304.614.000,00	302.130.900,00	2.483.100,00	99,18	
2.23.2.23.2.202.2.01.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.614.000,00	302.130.900,00	2.483.100,00	99,18	
2.23.2.23.2.202.2.01.04.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	15.272.600,00	15.272.600,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	15.272.600,00	15.272.600,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.272.600,00	15.272.600,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.01.05.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA	23.456.100,00	23.282.800,00	173.300,00	99,26	
2.23.2.23.2.202.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	23.456.100,00	23.282.800,00	173.300,00	99,26	
2.23.2.23.2.202.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.456.100,00	23.282.800,00	173.300,00	99,26	
2.23.2.23.2.202.2.01.10.	PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.704.100,00	3.692.100,00	12.000,00	99,68	
2.23.2.23.2.202.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	3.704.100,00	3.692.100,00	12.000,00	99,68	
2.23.2.23.2.202.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.704.100,00	3.692.100,00	12.000,00	99,68	
2.23.2.23.2.202.2.02.	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.596.140,00	37.208.140,00	388.000,00	98,97	
2.23.2.23.2.202.2.02.03.	PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	34.177.940,00	33.789.940,00	388.000,00	98,86	
2.23.2.23.2.202.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	34.177.940,00	33.789.940,00	388.000,00	98,86	
2.23.2.23.2.202.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.177.940,00	33.789.940,00	388.000,00	98,86	
2.23.2.23.2.202.2.02.04.	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	3.418.200,00	3.418.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.418.200,00	3.418.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.202.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.418.200,00	3.418.200,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.203.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	19.758.124,00	17.398.124,00	2.360.000,00	88,06	
2.23.2.23.2.203.2.01.	PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.758.124,00	17.398.124,00	2.360.000,00	88,06	
2.23.2.23.2.203.2.01.01.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO	9.950.124,00	9.950.124,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.203.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.950.124,00	9.950.124,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.203.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.124,00	9.950.124,00	-	100,00	
2.23.2.23.2.203.2.01.02.	PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	9.808.000,00	7.448.000,00	2.360.000,00	75,94	
2.23.2.23.2.203.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.808.000,00	7.448.000,00	2.360.000,00	75,94	
2.23.2.23.2.203.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.808.000,00	7.448.000,00	2.360.000,00	75,94	
2.24.2.23.2.202.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	238.222.600,00	180.424.402,00	57.798.198,00	75,74	
2.24.2.23.2.202.2.01.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	183.276.100,00	173.795.402,00	9.480.698,00	94,83	
2.24.2.23.2.202.2.01.01.	PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	57.831.300,00	56.298.782,00	1.532.518,00	97,35	
2.24.2.23.2.202.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	57.831.300,00	56.298.782,00	1.532.518,00	97,35	
2.24.2.23.2.202.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	57.831.300,00	56.298.782,00	1.532.518,00	97,35	
2.24.2.23.2.202.2.01.03.	PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	125.444.800,00	117.496.620,00	7.948.180,00	93,66	
2.24.2.23.2.202.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	125.444.800,00	117.496.620,00	7.948.180,00	93,66	
2.24.2.23.2.202.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.444.800,00	117.496.620,00	7.948.180,00	93,66	
2.24.2.23.2.202.2.03.	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	54.946.500,00	6.629.000,00	48.317.500,00	12,06	
2.24.2.23.2.202.2.03.01.	PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	54.946.500,00	6.629.000,00	48.317.500,00	12,06	
2.24.2.23.2.202.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	54.946.500,00	6.629.000,00	48.317.500,00	12,06	
2.24.2.23.2.202.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.946.500,00	6.629.000,00	48.317.500,00	12,06	
	JUMLAH BELANJA	5.291.532.346,00	4.901.218.316,00	390.314.030,00	92,62	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(5.291.532.346,00)	(4.901.218.316,00)	(390.314.030,00)	92,62	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.291.532.346,00)	(4.901.218.316,00)	(390.314.030,00)	92,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	25.000.000,00	26.009.600,00	(1.009.600,00)	104,04	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	26.009.600,00	(1.009.600,00)	104,04	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	25.000.000,00	26.009.600,00	(1.009.600,00)	104,04	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.000.000,00	26.009.600,00	(1.009.600,00)	104,04	
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	7.877.088.245,00	7.436.540.150,00	440.548.095,00	94,41	
3.25.3.25.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.279.932.245,00	4.927.587.824,00	352.344.421,00	93,33	
3.25.3.25.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	45.600.000,00	45.560.000,00	40.000,00	99,91	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	45.600.000,00	45.560.000,00	40.000,00	99,91	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	45.600.000,00	45.560.000,00	40.000,00	99,91	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	39.160.000,00	39.160.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00	6.400.000,00	40.000,00	99,38	
3.25.3.25.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.268.602.255,00	2.981.146.860,00	287.455.395,00	91,21	
3.25.3.25.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.268.602.255,00	2.981.146.860,00	287.455.395,00	91,21	
3.25.3.25.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.268.602.255,00	2.981.146.860,00	287.455.395,00	91,21	
3.25.3.25.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.268.602.255,00	2.981.146.860,00	287.455.395,00	91,21	
3.25.3.25.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	34.000.000,00	33.950.000,00	50.000,00	99,85	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	34.000.000,00	33.950.000,00	50.000,00	99,85	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	33.950.000,00	50.000,00	99,85	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.450.000,00	50.000,00	99,23	
3.25.3.25.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	400.900.000,00	396.268.818,00	4.631.182,00	98,84	
3.25.3.25.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	166.000.000,00	161.468.400,00	4.531.600,00	97,27	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	34.836.400,00	34.836.400,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.836.400,00	34.836.400,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	131.163.600,00	126.632.000,00	4.531.600,00	96,55	
3.25.3.25.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.163.600,00	126.632.000,00	4.531.600,00	96,55	
3.25.3.25.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.500.000,00	10.478.000,00	22.000,00	99,79	
3.25.3.25.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.478.000,00	22.000,00	99,79	
3.25.3.25.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.478.000,00	22.000,00	99,79	
3.25.3.25.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	200.000.000,00	199.922.418,00	77.582,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.922.418,00	77.582,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.922.418,00	77.582,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	67.000.000,00	50.370.000,00	16.630.000,00	75,18	
3.25.3.25.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	67.000.000,00	50.370.000,00	16.630.000,00	75,18	
3.25.3.25.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	67.000.000,00	50.370.000,00	16.630.000,00	75,18	
3.25.3.25.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.000.000,00	50.370.000,00	16.630.000,00	75,18	
3.25.3.25.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.110.459.990,00	1.069.325.291,00	41.134.699,00	96,30	
3.25.3.25.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	186.289.990,00	164.119.779,00	22.170.211,00	88,10	
3.25.3.25.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	186.289.990,00	164.119.779,00	22.170.211,00	88,10	
3.25.3.25.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	186.289.990,00	164.119.779,00	22.170.211,00	88,10	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	923.000.000,00	904.035.512,00	18.964.488,00	97,95	
3.25.3.25.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	909.300.000,00	890.335.512,00	18.964.488,00	97,91	
3.25.3.25.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	909.300.000,00	890.335.512,00	18.964.488,00	97,91	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.08.04.5.2.	BELANJA MODAL	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.001.2.08.04.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	353.370.000,00	350.966.855,00	2.403.145,00	99,32	
3.25.3.25.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	140.270.000,00	137.955.575,00	2.314.425,00	98,35	
3.25.3.25.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	140.270.000,00	137.955.575,00	2.314.425,00	98,35	
3.25.3.25.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	140.270.000,00	137.955.575,00	2.314.425,00	98,35	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.100.000,00	13.084.400,00	15.600,00	99,88	
3.25.3.25.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	13.100.000,00	13.084.400,00	15.600,00	99,88	
3.25.3.25.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.084.400,00	15.600,00	99,88	
2.						
3.25.3.25.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	199.926.880,00	73.120,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.926.880,00	73.120,00	99,96	
3.25.3.25.0.001.2.09.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.926.880,00	73.120,00	99,96	
2.						
3.25.3.25.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.160.166.000,00	1.090.129.500,00	70.036.500,00	93,96	
3.25.3.25.0.003.2.02.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.160.166.000,00	1.090.129.500,00	70.036.500,00	93,96	
3.25.3.25.0.003.2.02.01.	PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	428.350.000,00	374.719.400,00	53.630.600,00	87,48	
3.25.3.25.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	428.350.000,00	374.719.400,00	53.630.600,00	87,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	428.350.000,00	374.719.400,00	53.630.600,00	87,48	
3.25.3.25.0.003.2.02.02.	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	31.900.000,00	31.900.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	31.900.000,00	31.900.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	31.900.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.003.2.02.03.	PELAKSANAAN FASILITAST BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA	699.916.000,00	683.510.100,00	16.405.900,00	97,66	
3.25.3.25.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	699.916.000,00	683.510.100,00	16.405.900,00	97,66	
3.25.3.25.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.306.000,00	19.302.000,00	4.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.003.2.02.03.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	680.610.000,00	664.208.100,00	16.401.900,00	97,59	
3.25.3.25.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.361.990.000,00	1.343.828.176,00	18.161.824,00	98,67	
3.25.3.25.0.004.2.02.	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	500.500.000,00	500.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.02.03.	PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA	500.500.000,00	500.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	500.500.000,00	500.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.02.03.5.1.0 6.	Belanja Bantuan Sosial	473.000.000,00	473.000.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.04.	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	861.490.000,00	843.328.176,00	18.161.824,00	97,89	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	798.000.000,00	780.125.000,00	17.875.000,00	97,76	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	798.000.000,00	780.125.000,00	17.875.000,00	97,76	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	232.620.000,00	232.565.000,00	55.000,00	99,98	
3.25.3.25.0.004.2.04.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	565.380.000,00	547.560.000,00	17.820.000,00	96,85	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.990.000,00	26.703.176,00	286.824,00	98,94	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	26.990.000,00	26.703.176,00	286.824,00	98,94	
3.25.3.25.0.004.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.990.000,00	26.703.176,00	286.824,00	98,94	
3.25.3.25.0.004.2.04.05.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.25.0.004.2.04.05.5.1.	BELANJA OPERASI	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.004.2.04.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	-	100,00	
3.25.3.25.0.006.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	75.000.000,00	74.994.650,00	5.350,00	99,99	
3.25.3.25.0.006.2.03.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	75.000.000,00	74.994.650,00	5.350,00	99,99	
3.25.3.25.0.006.2.03.01.	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	74.994.650,00	5.350,00	99,99	
3.25.3.25.0.006.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.994.650,00	5.350,00	99,99	
3.25.3.25.0.006.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.994.650,00	5.350,00	99,99	
	JUMLAH BELANJA	7.877.088.245,00	7.436.540.150,00	440.548.095,00	94,41	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.852.088.245,00)	(7.410.530.550,00)	(441.557.695,00)	94,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.852.088.245,00)	(7.410.530.550,00)	(441.557.695,00)	94,38	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.30. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ORGANISASI : 3.30.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	1.009.950.000,00	681.737.000,00	328.213.000,00	67,50	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.009.950.000,00	681.737.000,00	328.213.000,00	67,50	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.009.950.000,00	681.737.000,00	328.213.000,00	67,50	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.009.950.000,00	681.737.000,00	328.213.000,00	67,50	
3.30.3.30.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	10.823.110.887,00	9.914.998.722,68	908.112.164,32	91,61	
3.30.3.30.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.888.792.577,00	5.481.289.669,00	407.502.908,00	93,08	
3.30.3.30.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.854.100,00	20.764.500,00	2.089.600,00	90,86	
3.30.3.30.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.939.800,00	5.666.000,00	1.273.800,00	81,65	
3.30.3.30.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.939.800,00	5.666.000,00	1.273.800,00	81,65	
3.30.3.30.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.939.800,00	5.666.000,00	1.273.800,00	81,65	
3.30.3.30.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.100,00	1.115.700,00	32.400,00	97,18	
3.30.3.30.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.245.500,00	4.039.900,00	205.600,00	95,16	
3.30.3.30.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.245.500,00	4.039.900,00	205.600,00	95,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.245.500,00	4.039.900,00	205.600,00	95,16	
3.30.3.30.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.076.400,00	6.595.800,00	480.600,00	93,21	
3.30.3.30.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	7.076.400,00	6.595.800,00	480.600,00	93,21	
3.30.3.30.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.076.400,00	6.595.800,00	480.600,00	93,21	
3.30.3.30.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.544.614.097,00	4.276.182.038,00	268.432.059,00	94,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.540.344.797,00	4.271.912.738,00	268.432.059,00	94,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.540.344.797,00	4.271.912.738,00	268.432.059,00	94,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.540.344.797,00	4.271.912.738,00	268.432.059,00	94,09	
3.30.3.30.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.533.900,00	1.533.900,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.533.900,00	1.533.900,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.533.900,00	1.533.900,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.551.600,00	1.551.600,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.551.600,00	1.551.600,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.551.600,00	1.551.600,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.183.800,00	1.183.800,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.183.800,00	1.183.800,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.183.800,00	1.183.800,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.013.750,00	4.651.800,00	361.950,00	92,78	
3.30.3.30.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.013.750,00	4.651.800,00	361.950,00	92,78	
3.30.3.30.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.013.750,00	4.651.800,00	361.950,00	92,78	
3.30.3.30.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.013.750,00	4.651.800,00	361.950,00	92,78	
3.30.3.30.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.990.000,00	-	13.990.000,00	0,00	
3.30.3.30.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.990.000,00	-	13.990.000,00	0,00	
3.30.3.30.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	13.990.000,00	-	13.990.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000,00	-	13.990.000,00	0,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	276.144.750,00	228.607.610,00	47.537.140,00	82,79	
3.30.3.30.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	558.000,00	558.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	558.000,00	558.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	558.000,00	558.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	83.165.950,00	66.382.870,00	16.783.080,00	79,82	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	57.634.350,00	41.962.870,00	15.671.480,00	72,81	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.914.350,00	39.242.870,00	15.671.480,00	71,46	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	25.531.600,00	24.420.000,00	1.111.600,00	95,65	
3.30.3.30.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.531.600,00	24.420.000,00	1.111.600,00	95,65	
3.30.3.30.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.000.000,00	13.427.000,00	1.573.000,00	89,51	
3.30.3.30.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.427.000,00	1.573.000,00	89,51	
3.30.3.30.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.427.000,00	1.573.000,00	89,51	
3.30.3.30.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.343.800,00	7.283.840,00	13.059.960,00	35,80	
3.30.3.30.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	20.343.800,00	7.283.840,00	13.059.960,00	35,80	
3.30.3.30.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.343.800,00	7.283.840,00	13.059.960,00	35,80	
3.30.3.30.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	152.577.000,00	136.455.900,00	16.121.100,00	89,43	
3.30.3.30.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	152.577.000,00	136.455.900,00	16.121.100,00	89,43	
3.30.3.30.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	152.577.000,00	136.455.900,00	16.121.100,00	89,43	
3.30.3.30.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.000.000,00	29.755.000,00	245.000,00	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.000.000,00	29.755.000,00	245.000,00	99,18	
3.30.3.30.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	388.100,00	385.000,00	3.100,00	99,20	
3.30.3.30.0.001.2.07.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	388.100,00	385.000,00	3.100,00	99,20	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	29.611.900,00	29.370.000,00	241.900,00	99,18	
3.30.3.30.0.001.2.07.06.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.611.900,00	29.370.000,00	241.900,00	99,18	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	842.995.030,00	769.213.221,00	73.781.809,00	91,25	
3.30.3.30.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.170.000,00	858.400,00	311.600,00	73,37	
3.30.3.30.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	858.400,00	311.600,00	73,37	
3.30.3.30.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	858.400,00	311.600,00	73,37	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	249.600.150,00	229.014.821,00	20.585.329,00	91,75	
3.30.3.30.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	249.600.150,00	229.014.821,00	20.585.329,00	91,75	
3.30.3.30.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	249.600.150,00	229.014.821,00	20.585.329,00	91,75	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	592.224.880,00	539.340.000,00	52.884.880,00	91,07	
3.30.3.30.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	592.224.880,00	539.340.000,00	52.884.880,00	91,07	
3.30.3.30.0.001.2.08.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	592.224.880,00	539.340.000,00	52.884.880,00	91,07	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	153.180.850,00	152.115.500,00	1.065.350,00	99,30	
3.30.3.30.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.514.000,00	16.000,00	99,96	
3.30.3.30.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.514.000,00	16.000,00	99,96	
3.30.3.30.0.001.2.09.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.514.000,00	16.000,00	99,96	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	85.000.000,00	84.950.500,00	49.500,00	99,94	
3.30.3.30.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.950.500,00	49.500,00	99,94	
3.30.3.30.0.001.2.09.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.950.500,00	49.500,00	99,94	
2.						
3.30.3.30.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.650.850,00	16.461.000,00	189.850,00	98,86	
3.30.3.30.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	16.650.850,00	16.461.000,00	189.850,00	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.650.850,00	16.461.000,00	189.850,00	98,86	
3.30.3.30.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	9.890.000,00	110.000,00	98,90	
3.30.3.30.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.890.000,00	110.000,00	98,90	
3.30.3.30.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.890.000,00	110.000,00	98,90	
3.30.3.30.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00	76,67	
3.30.3.30.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00	76,67	
3.30.3.30.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00	76,67	
3.30.3.30.0.002.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.380.000,00	21.204.764,00	2.175.236,00	90,70	
3.30.3.30.0.002.2.07.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)	23.380.000,00	21.204.764,00	2.175.236,00	90,70	
3.30.3.30.0.002.2.07.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA	23.380.000,00	21.204.764,00	2.175.236,00	90,70	
3.30.3.30.0.002.2.07.01.5.1.	BELANJA OPERASI	23.380.000,00	21.204.764,00	2.175.236,00	90,70	
3.30.3.30.0.002.2.07.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.380.000,00	21.204.764,00	2.175.236,00	90,70	
3.30.3.30.0.003.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.741.072.310,00	4.256.922.709,68	484.149.600,32	89,79	
3.30.3.30.0.003.2.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.727.950.310,00	4.243.800.709,68	484.149.600,32	89,76	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.727.950.310,00	4.243.800.709,68	484.149.600,32	89,76	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.327.950.310,00	1.094.556.970,00	233.393.340,00	82,42	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.630.000,00	6.630.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.321.320.310,00	1.087.926.970,00	233.393.340,00	82,34	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	250.756.260,32	92,62	
3.30.3.30.0.003.2.01.01.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	250.756.260,32	92,62	
3.30.3.30.0.003.2.02.	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	13.122.000,00	13.122.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.003.2.02.01.	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.122.000,00	13.122.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	13.122.000,00	13.122.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.122.000,00	13.122.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.004.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.440.000,00	25.669.000,00	6.771.000,00	79,13	
3.30.3.30.0.004.2.02.	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	32.440.000,00	25.669.000,00	6.771.000,00	79,13	
3.30.3.30.0.004.2.02.01.	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	32.440.000,00	25.669.000,00	6.771.000,00	79,13	
3.30.3.30.0.004.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	32.440.000,00	25.669.000,00	6.771.000,00	79,13	
3.30.3.30.0.004.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	32.440.000,00	25.669.000,00	6.771.000,00	79,13	
3.30.3.30.0.005.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	46.926.000,00	42.388.580,00	4.537.420,00	90,33	
3.30.3.30.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.926.000,00	42.388.580,00	4.537.420,00	90,33	
3.30.3.30.0.005.2.01.06.	PEMBINAAN PELAKU USAHA EKSPOR	46.926.000,00	42.388.580,00	4.537.420,00	90,33	
3.30.3.30.0.005.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	46.926.000,00	42.388.580,00	4.537.420,00	90,33	
3.30.3.30.0.005.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.926.000,00	42.388.580,00	4.537.420,00	90,33	
3.30.3.30.0.006.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	90.500.000,00	87.524.000,00	2.976.000,00	96,71	
3.30.3.30.0.006.2.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	90.500.000,00	87.524.000,00	2.976.000,00	96,71	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	69.500.000,00	66.524.000,00	2.976.000,00	95,72	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	69.500.000,00	66.524.000,00	2.976.000,00	95,72	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.006.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.470.000,00	63.494.000,00	2.976.000,00	95,52	
3.30.3.30.0.006.2.01.02.	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.006.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.0.006.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	10.823.110.887,00	9.914.998.722,68	908.112.164,32	91,61	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.813.160.887,00)	(9.233.261.722,68)	(579.899.164,32)	94,09	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.813.160.887,00)	(9.233.261.722,68)	(579.899.164,32)	94,09	
--	--	--------------------	--------------------	------------------	-------	--

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	PENDAPATAN	50.000.000,00	28.950.000,00	21.050.000,00	57,90	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	28.950.000,00	21.050.000,00	57,90	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	50.000.000,00	28.950.000,00	21.050.000,00	57,90	
	JUMLAH PENDAPATAN	50.000.000,00	28.950.000,00	21.050.000,00	57,90	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	67.124.101.596,00	63.531.192.220,00	3.592.909.376,00	94,65	
4.01.4.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.514.723.917,00	46.264.134.022,00	3.250.589.895,00	93,44	
4.01.4.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	43.359.908,00	34.228.320,00	9.131.588,00	78,94	
4.01.4.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.690.213,00	12.830.320,00	4.859.893,00	72,53	
4.01.4.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	17.690.213,00	12.830.320,00	4.859.893,00	72,53	
4.01.4.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.690.213,00	12.830.320,00	4.859.893,00	72,53	
4.01.4.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.748.645,00	3.125.750,00	2.622.895,00	54,37	
4.01.4.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.748.645,00	3.125.750,00	2.622.895,00	54,37	
4.01.4.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.748.645,00	3.125.750,00	2.622.895,00	54,37	
4.01.4.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.780.350,00	5.131.550,00	1.648.800,00	75,68	
4.01.4.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	6.780.350,00	5.131.550,00	1.648.800,00	75,68	
4.01.4.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.780.350,00	5.131.550,00	1.648.800,00	75,68	
4.01.4.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.140.700,00	13.140.700,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	13.140.700,00	13.140.700,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.140.700,00	13.140.700,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.924.660.318,00	17.850.015.457,00	2.074.644.861,00	89,59	
4.01.4.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.746.261.188,00	17.671.643.707,00	2.074.617.481,00	89,49	
4.01.4.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.746.261.188,00	17.671.643.707,00	2.074.617.481,00	89,49	
4.01.4.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	19.746.261.188,00	17.671.643.707,00	2.074.617.481,00	89,49	
4.01.4.01.0.001.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	110.491.080,00	110.471.950,00	19.130,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	110.491.080,00	110.471.950,00	19.130,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.491.080,00	110.471.950,00	19.130,00	99,98	
4.01.4.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	21.397.000,00	21.397.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	21.397.000,00	21.397.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.397.000,00	21.397.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	14.648.100,00	14.648.100,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	14.648.100,00	14.648.100,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.648.100,00	14.648.100,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	31.862.950,00	31.854.700,00	8.250,00	99,97	
4.01.4.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	31.862.950,00	31.854.700,00	8.250,00	99,97	
4.01.4.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.862.950,00	31.854.700,00	8.250,00	99,97	
4.01.4.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	95.413.210,00	95.055.800,00	357.410,00	99,63	
4.01.4.01.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	81.209.650,00	80.931.750,00	277.900,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	81.209.650,00	80.931.750,00	277.900,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	81.209.650,00	80.931.750,00	277.900,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	14.203.560,00	14.124.050,00	79.510,00	99,44	
4.01.4.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	14.203.560,00	14.124.050,00	79.510,00	99,44	
4.01.4.01.0.001.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.203.560,00	14.124.050,00	79.510,00	99,44	
4.01.4.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	97.340.000,00	95.621.740,00	1.718.260,00	98,23	
4.01.4.01.0.001.2.05.05.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.05.05.5.1.	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.05.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60.340.000,00	58.621.740,00	1.718.260,00	97,15	
4.01.4.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	60.340.000,00	58.621.740,00	1.718.260,00	97,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.340.000,00	58.621.740,00	1.718.260,00	97,15	
4.01.4.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.813.131.458,00	6.498.292.013,00	314.839.445,00	95,38	
4.01.4.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	75.057.084,00	74.909.500,00	147.584,00	99,80	
4.01.4.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	75.057.084,00	74.909.500,00	147.584,00	99,80	
4.01.4.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.057.084,00	74.909.500,00	147.584,00	99,80	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.002.965.921,00	2.831.942.803,00	171.023.118,00	94,30	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	533.446.301,00	426.812.841,00	106.633.460,00	80,01	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	533.446.301,00	426.812.841,00	106.633.460,00	80,01	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.469.519.620,00	2.405.129.962,00	64.389.658,00	97,39	
4.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.469.519.620,00	2.405.129.962,00	64.389.658,00	97,39	
4.01.4.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	524.029.028,00	501.740.500,00	22.288.528,00	95,75	
4.01.4.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	524.029.028,00	501.740.500,00	22.288.528,00	95,75	
4.01.4.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	524.029.028,00	501.740.500,00	22.288.528,00	95,75	
4.01.4.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	149.908.977,00	107.195.000,00	42.713.977,00	71,51	
4.01.4.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	149.908.977,00	107.195.000,00	42.713.977,00	71,51	
4.01.4.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	149.908.977,00	107.195.000,00	42.713.977,00	71,51	
4.01.4.01.0.001.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	99.810.000,00	64.271.000,00	35.539.000,00	64,39	
4.01.4.01.0.001.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	99.810.000,00	64.271.000,00	35.539.000,00	64,39	
4.01.4.01.0.001.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.810.000,00	64.271.000,00	35.539.000,00	64,39	
4.01.4.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.768.460.448,00	2.725.333.210,00	43.127.238,00	98,44	
4.01.4.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	2.768.460.448,00	2.725.333.210,00	43.127.238,00	98,44	
4.01.4.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.768.460.448,00	2.725.333.210,00	43.127.238,00	98,44	
4.01.4.01.0.001.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	192.900.000,00	192.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.06.10.5.1.	BELANJA OPERASI	192.900.000,00	192.900.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.06.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	192.900.000,00	192.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.318.356.366,00	5.244.523.993,00	73.832.373,00	98,61	
4.01.4.01.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.715.536.966,00	1.702.258.000,00	13.278.966,00	99,23	
4.01.4.01.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.715.536.966,00	1.702.258.000,00	13.278.966,00	99,23	
4.01.4.01.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.715.536.966,00	1.702.258.000,00	13.278.966,00	99,23	
4.01.4.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	95.348.000,00	95.020.000,00	328.000,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.07.05.5.1.	BELANJA OPERASI	95.348.000,00	95.020.000,00	328.000,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.07.05.5.1.0 5.	Belanja Hibah	95.348.000,00	95.020.000,00	328.000,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.507.471.400,00	3.447.245.993,00	60.225.407,00	98,28	
4.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	3.507.471.400,00	3.447.245.993,00	60.225.407,00	98,28	
4.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1.0 5.	Belanja Hibah	3.507.471.400,00	3.447.245.993,00	60.225.407,00	98,28	
4.01.4.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.455.563.390,00	4.153.707.513,00	301.855.877,00	93,23	
4.01.4.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.374.589.581,00	2.133.612.368,00	240.977.213,00	89,85	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.370.266.658,00	2.130.894.368,00	239.372.290,00	89,90	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.266.658,00	2.130.894.368,00	239.372.290,00	89,90	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.2.	BELANJA MODAL	4.322.923,00	2.718.000,00	1.604.923,00	62,87	
4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.322.923,00	2.718.000,00	1.604.923,00	62,87	
4.01.4.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	79.801.135,00	77.597.325,00	2.203.810,00	97,24	
4.01.4.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	79.801.135,00	77.597.325,00	2.203.810,00	97,24	
4.01.4.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	79.801.135,00	77.597.325,00	2.203.810,00	97,24	
4.01.4.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.961.172.674,00	1.902.497.820,00	58.674.854,00	97,01	
4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.961.172.674,00	1.902.497.820,00	58.674.854,00	97,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.917.972.674,00	1.859.297.820,00	58.674.854,00	96,94	
4.01.4.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.466.870.313,00	6.207.974.463,00	258.895.850,00	96,00	
4.01.4.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	332.470.000,00	294.222.750,00	38.247.250,00	88,50	
4.01.4.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	332.470.000,00	294.222.750,00	38.247.250,00	88,50	
4.01.4.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	332.470.000,00	294.222.750,00	38.247.250,00	88,50	
4.01.4.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.451.057.177,00	1.426.997.603,00	24.059.574,00	98,34	
4.01.4.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	1.451.057.177,00	1.426.997.603,00	24.059.574,00	98,34	
4.01.4.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.451.057.177,00	1.426.997.603,00	24.059.574,00	98,34	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	494.260.000,00	394.829.300,00	99.430.700,00	79,88	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	359.260.000,00	261.740.300,00	97.519.700,00	72,86	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	359.260.000,00	261.740.300,00	97.519.700,00	72,86	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.5.2.	BELANJA MODAL	135.000.000,00	133.089.000,00	1.911.000,00	98,58	
4.01.4.01.0.001.2.09.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.000.000,00	133.089.000,00	1.911.000,00	98,58	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.189.083.136,00	4.091.924.810,00	97.158.326,00	97,68	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	4.189.083.136,00	4.091.924.810,00	97.158.326,00	97,68	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	11.070.000,00	-	11.070.000,00	0,00	
4.01.4.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.178.013.136,00	4.091.924.810,00	86.088.326,00	97,94	
4.01.4.01.0.001.2.11.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	838.626.590,00	749.146.848,00	89.479.742,00	89,33	
4.01.4.01.0.001.2.11.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	179.513.040,00	90.112.348,00	89.400.692,00	50,20	
4.01.4.01.0.001.2.11.01.5.1.	BELANJA OPERASI	179.513.040,00	90.112.348,00	89.400.692,00	50,20	
4.01.4.01.0.001.2.11.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	179.513.040,00	90.112.348,00	89.400.692,00	50,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.11.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	59.113.550,00	59.034.500,00	79.050,00	99,87	
4.01.4.01.0.001.2.11.02.5.1.	BELANJA OPERASI	59.113.550,00	59.034.500,00	79.050,00	99,87	
4.01.4.01.0.001.2.11.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	59.113.550,00	59.034.500,00	79.050,00	99,87	
4.01.4.01.0.001.2.11.04.	PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.11.04.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.11.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.12.	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	875.673.154,00	791.367.430,00	84.305.724,00	90,37	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	572.134.986,00	554.676.920,00	17.458.066,00	96,95	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.1.	BELANJA OPERASI	536.002.836,00	521.236.920,00	14.765.916,00	97,25	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	536.002.836,00	521.236.920,00	14.765.916,00	97,25	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.2.	BELANJA MODAL	36.132.150,00	33.440.000,00	2.692.150,00	92,55	
4.01.4.01.0.001.2.12.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.132.150,00	33.440.000,00	2.692.150,00	92,55	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	126.607.150,00	124.810.630,00	1.796.520,00	98,58	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.5.1.	BELANJA OPERASI	109.993.350,00	108.197.630,00	1.795.720,00	98,37	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	109.993.350,00	108.197.630,00	1.795.720,00	98,37	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.5.2.	BELANJA MODAL	16.613.800,00	16.613.000,00	800,00	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.12.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.613.800,00	16.613.000,00	800,00	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.12.03.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	176.931.018,00	111.879.880,00	65.051.138,00	63,23	
4.01.4.01.0.001.2.12.03.5.1.	BELANJA OPERASI	176.931.018,00	111.879.880,00	65.051.138,00	63,23	
4.01.4.01.0.001.2.12.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	176.931.018,00	111.879.880,00	65.051.138,00	63,23	
4.01.4.01.0.001.2.13.	PENATAAN ORGANISASI	417.966.400,00	389.855.405,00	28.110.995,00	93,27	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	69.369.250,00	62.754.500,00	6.614.750,00	90,46	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1.	BELANJA OPERASI	69.369.250,00	62.754.500,00	6.614.750,00	90,46	
4.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.369.250,00	62.754.500,00	6.614.750,00	90,46	
4.01.4.01.0.001.2.13.02.	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	74.513.000,00	71.395.130,00	3.117.870,00	95,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.001.2.13.02.5.1.	BELANJA OPERASI	74.513.000,00	71.395.130,00	3.117.870,00	95,82	
4.01.4.01.0.001.2.13.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	74.513.000,00	71.395.130,00	3.117.870,00	95,82	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.13.03.	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	39.697.350,00	33.770.500,00	5.926.850,00	85,07	
4.01.4.01.0.001.2.13.03.5.1.	BELANJA OPERASI	39.697.350,00	33.770.500,00	5.926.850,00	85,07	
4.01.4.01.0.001.2.13.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	39.697.350,00	33.770.500,00	5.926.850,00	85,07	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.13.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	58.376.800,00	56.527.266,00	1.849.534,00	96,83	
4.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1.	BELANJA OPERASI	58.376.800,00	56.527.266,00	1.849.534,00	96,83	
4.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	58.376.800,00	56.527.266,00	1.849.534,00	96,83	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.13.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	176.010.000,00	165.408.009,00	10.601.991,00	93,98	
4.01.4.01.0.001.2.13.05.5.1.	BELANJA OPERASI	176.010.000,00	165.408.009,00	10.601.991,00	93,98	
4.01.4.01.0.001.2.13.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	176.010.000,00	165.408.009,00	10.601.991,00	93,98	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.14.	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4.167.762.810,00	4.154.345.040,00	13.417.770,00	99,68	
4.01.4.01.0.001.2.14.01.	FASILITASI KEPROTOKOLAN	1.876.289.751,00	1.869.993.053,00	6.296.698,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.14.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.876.289.751,00	1.869.993.053,00	6.296.698,00	99,66	
4.01.4.01.0.001.2.14.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.876.289.751,00	1.869.993.053,00	6.296.698,00	99,66	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.14.02.	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	2.081.958.659,00	2.081.220.787,00	737.872,00	99,96	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.081.958.659,00	2.081.220.787,00	737.872,00	99,96	
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.0	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	-	100,00	
1.						
4.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.055.438.659,00	2.054.700.787,00	737.872,00	99,96	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.14.03.	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	209.514.400,00	203.131.200,00	6.383.200,00	96,95	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1.	BELANJA OPERASI	170.423.200,00	164.040.000,00	6.383.200,00	96,25	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	170.423.200,00	164.040.000,00	6.383.200,00	96,25	
2.						
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.2.	BELANJA MODAL	39.091.200,00	39.091.200,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.091.200,00	39.091.200,00	-	100,00	
2.						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.002.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.380.947.679,00	14.107.731.834,00	273.215.845,00	98,10	
4.01.4.01.0.002.2.01.	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	955.805.840,00	925.351.800,00	30.454.040,00	96,81	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	651.865.650,00	641.023.400,00	10.842.250,00	98,34	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	651.865.650,00	641.023.400,00	10.842.250,00	98,34	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	151.865.650,00	141.023.400,00	10.842.250,00	92,86	
4.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1.0 5.	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	216.414.750,00	203.241.400,00	13.173.350,00	93,91	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	126.414.750,00	117.241.400,00	9.173.350,00	92,74	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	126.414.750,00	117.241.400,00	9.173.350,00	92,74	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.2.	BELANJA MODAL	90.000.000,00	86.000.000,00	4.000.000,00	95,56	
4.01.4.01.0.002.2.01.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	86.000.000,00	4.000.000,00	95,56	
4.01.4.01.0.002.2.01.03.	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	87.525.440,00	81.087.000,00	6.438.440,00	92,64	
4.01.4.01.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	87.525.440,00	81.087.000,00	6.438.440,00	92,64	
4.01.4.01.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	87.525.440,00	81.087.000,00	6.438.440,00	92,64	
4.01.4.01.0.002.2.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.009.661.739,00	12.776.144.157,00	233.517.582,00	98,21	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	3.085.088.439,00	2.899.251.741,00	185.836.698,00	93,98	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.085.088.439,00	2.899.251.741,00	185.836.698,00	93,98	
4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.085.088.439,00	2.899.251.741,00	185.836.698,00	93,98	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	4.534.973.300,00	4.504.359.770,00	30.613.530,00	99,32	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.534.973.300,00	4.504.359.770,00	30.613.530,00	99,32	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	124.973.300,00	104.359.770,00	20.613.530,00	83,51	
4.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.0 5.	Belanja Hibah	4.410.000.000,00	4.400.000.000,00	10.000.000,00	99,77	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	5.389.600.000,00	5.372.532.646,00	17.067.354,00	99,68	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.389.600.000,00	5.372.532.646,00	17.067.354,00	99,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	19.100.000,00	19.100.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.370.500.000,00	5.353.432.646,00	17.067.354,00	99,68	
4.01.4.01.0.002.2.03.	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	237.071.400,00	235.106.100,00	1.965.300,00	99,17	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	55.900.900,00	55.736.600,00	164.300,00	99,71	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	55.900.900,00	55.736.600,00	164.300,00	99,71	
4.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.900.900,00	55.736.600,00	164.300,00	99,71	
4.01.4.01.0.002.2.03.02.	FASILITASI BANTUAN HUKUM	142.200.000,00	140.400.000,00	1.800.000,00	98,73	
4.01.4.01.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	142.200.000,00	140.400.000,00	1.800.000,00	98,73	
4.01.4.01.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	142.200.000,00	140.400.000,00	1.800.000,00	98,73	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	38.970.500,00	38.969.500,00	1.000,00	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	38.970.500,00	38.969.500,00	1.000,00	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.970.500,00	38.969.500,00	1.000,00	100,00	
4.01.4.01.0.002.2.04.	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	178.408.700,00	171.129.777,00	7.278.923,00	95,92	
4.01.4.01.0.002.2.04.01.	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	80.385.500,00	77.545.400,00	2.840.100,00	96,47	
4.01.4.01.0.002.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	80.385.500,00	77.545.400,00	2.840.100,00	96,47	
4.01.4.01.0.002.2.04.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.385.500,00	77.545.400,00	2.840.100,00	96,47	
4.01.4.01.0.002.2.04.02.	FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	43.849.200,00	41.750.300,00	2.098.900,00	95,21	
4.01.4.01.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	43.849.200,00	41.750.300,00	2.098.900,00	95,21	
4.01.4.01.0.002.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	43.849.200,00	41.750.300,00	2.098.900,00	95,21	
4.01.4.01.0.002.2.04.03.	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	54.174.000,00	51.834.077,00	2.339.923,00	95,68	
4.01.4.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	54.174.000,00	51.834.077,00	2.339.923,00	95,68	
4.01.4.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.174.000,00	51.834.077,00	2.339.923,00	95,68	
4.01.4.01.0.003.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.228.430.000,00	3.159.326.364,00	69.103.636,00	97,86	
4.01.4.01.0.003.2.01.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	328.759.200,00	323.361.400,00	5.397.800,00	98,36	
4.01.4.01.0.003.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	206.171.200,00	203.005.000,00	3.166.200,00	98,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	206.171.200,00	203.005.000,00	3.166.200,00	98,46	
4.01.4.01.0.003.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	206.171.200,00	203.005.000,00	3.166.200,00	98,46	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.01.02.	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	56.494.000,00	55.324.000,00	1.170.000,00	97,93	
4.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	56.494.000,00	55.324.000,00	1.170.000,00	97,93	
4.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.0	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
1.						
4.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	52.454.000,00	51.284.000,00	1.170.000,00	97,77	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.01.03.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	66.094.000,00	65.032.400,00	1.061.600,00	98,39	
4.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	66.094.000,00	65.032.400,00	1.061.600,00	98,39	
4.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.0	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
1.						
4.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	63.674.000,00	62.612.400,00	1.061.600,00	98,33	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.02.	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.786.500.000,00	1.742.344.830,00	44.155.170,00	97,53	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	790.000.000,00	778.045.000,00	11.955.000,00	98,49	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	790.000.000,00	778.045.000,00	11.955.000,00	98,49	
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	
1.						
4.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	785.770.000,00	773.815.000,00	11.955.000,00	98,48	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.02.02.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	596.500.000,00	586.899.330,00	9.600.670,00	98,39	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	596.500.000,00	586.899.330,00	9.600.670,00	98,39	
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1.0	Belanja Pegawai	11.460.000,00	10.860.000,00	600.000,00	94,76	
1.						
4.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	585.040.000,00	576.039.330,00	9.000.670,00	98,46	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.02.03.	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	400.000.000,00	377.400.500,00	22.599.500,00	94,35	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	377.400.500,00	22.599.500,00	94,35	
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1.0	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	-	100,00	
1.						
4.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	395.170.000,00	372.570.500,00	22.599.500,00	94,28	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.03.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	879.844.700,00	864.729.734,00	15.114.966,00	98,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.003.2.03.01.	PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	224.282.900,00	222.092.900,00	2.190.000,00	99,02	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	224.282.900,00	222.092.900,00	2.190.000,00	99,02	
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.0	Belanja Pegawai	204.810.000,00	202.620.000,00	2.190.000,00	98,93	
1.						
4.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	19.472.900,00	19.472.900,00	-	100,00	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.03.02.	PENGLOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	649.711.400,00	638.035.864,00	11.675.536,00	98,20	
4.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	649.711.400,00	638.035.864,00	11.675.536,00	98,20	
4.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	649.711.400,00	638.035.864,00	11.675.536,00	98,20	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.03.03.	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.850.400,00	4.600.970,00	1.249.430,00	78,64	
4.01.4.01.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.850.400,00	4.600.970,00	1.249.430,00	78,64	
4.01.4.01.0.003.2.03.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.850.400,00	4.600.970,00	1.249.430,00	78,64	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.04.	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	233.326.100,00	228.890.400,00	4.435.700,00	98,10	
4.01.4.01.0.003.2.04.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	77.339.210,00	77.169.100,00	170.110,00	99,78	
4.01.4.01.0.003.2.04.01.5.1.	BELANJA OPERASI	77.339.210,00	77.169.100,00	170.110,00	99,78	
4.01.4.01.0.003.2.04.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	77.339.210,00	77.169.100,00	170.110,00	99,78	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.04.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	89.589.500,00	87.764.000,00	1.825.500,00	97,96	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	89.589.500,00	87.764.000,00	1.825.500,00	97,96	
4.01.4.01.0.003.2.04.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	89.589.500,00	87.764.000,00	1.825.500,00	97,96	
2.						
4.01.4.01.0.003.2.04.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	66.397.390,00	63.957.300,00	2.440.090,00	96,33	
4.01.4.01.0.003.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	66.397.390,00	63.957.300,00	2.440.090,00	96,33	
4.01.4.01.0.003.2.04.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	66.397.390,00	63.957.300,00	2.440.090,00	96,33	
2.						
	JUMLAH BELANJA	67.124.101.596,00	63.531.192.220,00	3.592.909.376,00	94,65	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(67.074.101.596,00)	(63.502.242.220,00)	(3.571.859.376,00)	94,67	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(67.074.101.596,00)	(63.502.242.220,00)	(3.571.859.376,00)	94,67	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	56.293.494.721,00	42.684.718.587,00	13.608.776.134,00	75,83	
4.02.4.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.339.849.314,00	33.752.364.530,00	12.587.484.784,00	72,84	
4.02.4.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.778.300,00	62.931.520,00	2.846.780,00	95,67	
4.02.4.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	22.766.700,00	21.914.120,00	852.580,00	96,26	
4.02.4.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	22.766.700,00	21.914.120,00	852.580,00	96,26	
4.02.4.02.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	22.766.700,00	21.914.120,00	852.580,00	96,26	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	18.039.800,00	17.088.900,00	950.900,00	94,73	
4.02.4.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	18.039.800,00	17.088.900,00	950.900,00	94,73	
4.02.4.02.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	18.039.800,00	17.088.900,00	950.900,00	94,73	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.971.800,00	23.928.500,00	1.043.300,00	95,82	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.971.800,00	23.928.500,00	1.043.300,00	95,82	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	24.971.800,00	23.928.500,00	1.043.300,00	95,82	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	32.834.978.152,00	20.854.902.287,00	11.980.075.865,00	63,51	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	32.834.978.152,00	20.854.902.287,00	11.980.075.865,00	63,51	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	32.834.978.152,00	20.854.902.287,00	11.980.075.865,00	63,51	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	32.834.978.152,00	20.854.902.287,00	11.980.075.865,00	63,51	
1.						
4.02.4.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	25.100.000,00	17.767.000,00	7.333.000,00	70,78	
4.02.4.02.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	25.100.000,00	17.767.000,00	7.333.000,00	70,78	
4.02.4.02.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	25.100.000,00	17.767.000,00	7.333.000,00	70,78	
4.02.4.02.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	17.767.000,00	7.333.000,00	70,78	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	275.000.000,00	138.500.000,00	136.500.000,00	50,36	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	275.000.000,00	138.500.000,00	136.500.000,00	50,36	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	138.500.000,00	136.500.000,00	50,36	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	138.500.000,00	136.500.000,00	50,36	
2.						
4.02.4.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8.508.189.100,00	8.299.359.834,00	208.829.266,00	97,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	120.455.875,00	116.077.520,00	4.378.355,00	96,37	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	120.455.875,00	116.077.520,00	4.378.355,00	96,37	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.455.875,00	116.077.520,00	4.378.355,00	96,37	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	194.835.150,00	192.037.200,00	2.797.950,00	98,56	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	194.835.150,00	192.037.200,00	2.797.950,00	98,56	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	194.835.150,00	192.037.200,00	2.797.950,00	98,56	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	143.538.360,00	137.017.451,00	6.520.909,00	95,46	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	143.538.360,00	137.017.451,00	6.520.909,00	95,46	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.538.360,00	137.017.451,00	6.520.909,00	95,46	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	180.373.600,00	174.097.901,00	6.275.699,00	96,52	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	180.373.600,00	174.097.901,00	6.275.699,00	96,52	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	180.373.600,00	174.097.901,00	6.275.699,00	96,52	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	199.991.544,00	166.002.828,00	33.988.716,00	83,00	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	199.991.544,00	166.002.828,00	33.988.716,00	83,00	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	199.991.544,00	166.002.828,00	33.988.716,00	83,00	
4.02.4.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48.960.000,00	33.298.000,00	15.662.000,00	68,01	
4.02.4.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	48.960.000,00	33.298.000,00	15.662.000,00	68,01	
4.02.4.02.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	33.298.000,00	15.662.000,00	68,01	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	213.701.733,00	79.566.448,00	134.135.285,00	37,23	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.	BELANJA OPERASI	213.701.733,00	79.566.448,00	134.135.285,00	37,23	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	213.701.733,00	79.566.448,00	134.135.285,00	37,23	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	7.406.332.838,00	7.401.262.486,00	5.070.352,00	99,93	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	7.406.332.838,00	7.401.262.486,00	5.070.352,00	99,93	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.406.332.838,00	7.401.262.486,00	5.070.352,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	453.889.338,00	437.797.300,00	16.092.038,00	96,45	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	394.127.338,00	379.055.500,00	15.071.838,00	96,18	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	394.127.338,00	379.055.500,00	15.071.838,00	96,18	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	394.127.338,00	379.055.500,00	15.071.838,00	96,18	
4.02.4.02.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	31.762.000,00	31.741.800,00	20.200,00	99,94	
4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	31.762.000,00	31.741.800,00	20.200,00	99,94	
4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.762.000,00	31.741.800,00	20.200,00	99,94	
4.02.4.02.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	28.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00	96,43	
4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1.	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00	96,43	
4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00	96,43	
4.02.4.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.201.447.010,00	2.064.818.962,00	136.628.048,00	93,79	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.990.600,00	12.500.000,00	7.490.600,00	62,53	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.990.600,00	12.500.000,00	7.490.600,00	62,53	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.990.600,00	12.500.000,00	7.490.600,00	62,53	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	334.400.000,00	328.642.982,00	5.757.018,00	98,28	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	334.400.000,00	328.642.982,00	5.757.018,00	98,28	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	334.400.000,00	328.642.982,00	5.757.018,00	98,28	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.847.056.410,00	1.723.675.980,00	123.380.430,00	93,32	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.847.056.410,00	1.723.675.980,00	123.380.430,00	93,32	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.838.896.410,00	1.715.515.980,00	123.380.430,00	93,29	
4.02.4.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	904.199.234,00	879.379.925,00	24.819.309,00	97,26	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	273.450.000,00	272.409.340,00	1.040.660,00	99,62	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	273.450.000,00	272.409.340,00	1.040.660,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	273.450.000,00	272.409.340,00	1.040.660,00	99,62	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	174.370.000,00	165.231.797,00	9.138.203,00	94,76	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	174.370.000,00	165.231.797,00	9.138.203,00	94,76	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	174.370.000,00	165.231.797,00	9.138.203,00	94,76	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	195.011.554,00	193.519.850,00	1.491.704,00	99,24	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	195.011.554,00	193.519.850,00	1.491.704,00	99,24	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	195.011.554,00	193.519.850,00	1.491.704,00	99,24	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	241.985.140,00	240.124.450,00	1.860.690,00	99,23	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	241.985.140,00	240.124.450,00	1.860.690,00	99,23	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	241.985.140,00	240.124.450,00	1.860.690,00	99,23	
4.02.4.02.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.382.540,00	8.094.488,00	11.288.052,00	41,76	
4.02.4.02.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	19.382.540,00	8.094.488,00	11.288.052,00	41,76	
4.02.4.02.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.382.540,00	8.094.488,00	11.288.052,00	41,76	
4.02.4.02.0.001.2.15.	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	560.300.918,00	521.519.500,00	38.781.418,00	93,08	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	423.300.918,00	417.519.500,00	5.781.418,00	98,63	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.	BELANJA OPERASI	423.300.918,00	417.519.500,00	5.781.418,00	98,63	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	423.300.918,00	417.519.500,00	5.781.418,00	98,63	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	137.000.000,00	104.000.000,00	33.000.000,00	75,91	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1.	BELANJA OPERASI	137.000.000,00	104.000.000,00	33.000.000,00	75,91	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	104.000.000,00	33.000.000,00	75,91	
4.02.4.02.0.001.2.16.	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	510.967.262,00	475.388.202,00	35.579.060,00	93,04	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	510.967.262,00	475.388.202,00	35.579.060,00	93,04	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.	BELANJA OPERASI	510.967.262,00	475.388.202,00	35.579.060,00	93,04	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	510.967.262,00	475.388.202,00	35.579.060,00	93,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.953.645.407,00	8.932.354.057,00	1.021.291.350,00	89,74	
4.02.4.02.0.002.2.01.	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.437.604.330,00	1.297.955.960,00	139.648.370,00	90,29	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	490.011.900,00	411.660.028,00	78.351.872,00	84,01	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	490.011.900,00	411.660.028,00	78.351.872,00	84,01	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	490.011.900,00	411.660.028,00	78.351.872,00	84,01	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	440.315.430,00	436.633.617,00	3.681.813,00	99,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	440.315.430,00	436.633.617,00	3.681.813,00	99,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	440.315.430,00	436.633.617,00	3.681.813,00	99,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	102.197.000,00	102.108.500,00	88.500,00	99,91	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	102.197.000,00	102.108.500,00	88.500,00	99,91	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	102.197.000,00	102.108.500,00	88.500,00	99,91	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK	405.080.000,00	347.553.815,00	57.526.185,00	85,80	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	405.080.000,00	347.553.815,00	57.526.185,00	85,80	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	405.080.000,00	347.553.815,00	57.526.185,00	85,80	
4.02.4.02.0.002.2.02.	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	973.979.940,00	814.579.799,00	159.400.141,00	83,63	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	49.350.400,00	15.035.000,00	34.315.400,00	30,47	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	49.350.400,00	15.035.000,00	34.315.400,00	30,47	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.350.400,00	15.035.000,00	34.315.400,00	30,47	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	221.020.590,00	202.220.890,00	18.799.700,00	91,49	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	221.020.590,00	202.220.890,00	18.799.700,00	91,49	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	221.020.590,00	202.220.890,00	18.799.700,00	91,49	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.	PEMBAHASAN APBD	48.473.250,00	28.010.000,00	20.463.250,00	57,78	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	48.473.250,00	28.010.000,00	20.463.250,00	57,78	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	48.473.250,00	28.010.000,00	20.463.250,00	57,78	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	136.237.800,00	101.824.260,00	34.413.540,00	74,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	136.237.800,00	101.824.260,00	34.413.540,00	74,74	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	136.237.800,00	101.824.260,00	34.413.540,00	74,74	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	158.451.200,00	126.397.066,00	32.054.134,00	79,77	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	158.451.200,00	126.397.066,00	32.054.134,00	79,77	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	158.451.200,00	126.397.066,00	32.054.134,00	79,77	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	360.446.700,00	341.092.583,00	19.354.117,00	94,63	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.	BELANJA OPERASI	360.446.700,00	341.092.583,00	19.354.117,00	94,63	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	360.446.700,00	341.092.583,00	19.354.117,00	94,63	
4.02.4.02.0.002.2.03.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	692.818.400,00	481.769.632,00	211.048.768,00	69,54	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	48.980.000,00	21.755.922,00	27.224.078,00	44,42	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	48.980.000,00	21.755.922,00	27.224.078,00	44,42	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	48.980.000,00	21.755.922,00	27.224.078,00	44,42	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	49.844.000,00	17.221.000,00	32.623.000,00	34,55	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	49.844.000,00	17.221.000,00	32.623.000,00	34,55	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.844.000,00	17.221.000,00	32.623.000,00	34,55	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.832.000,00	19.302.200,00	30.529.800,00	38,73	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	49.832.000,00	19.302.200,00	30.529.800,00	38,73	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.832.000,00	19.302.200,00	30.529.800,00	38,73	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	49.956.000,00	22.949.500,00	27.006.500,00	45,94	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	49.956.000,00	22.949.500,00	27.006.500,00	45,94	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.956.000,00	22.949.500,00	27.006.500,00	45,94	
4.02.4.02.0.002.2.03.05.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	49.865.600,00	34.528.620,00	15.336.980,00	69,24	
4.02.4.02.0.002.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	49.865.600,00	34.528.620,00	15.336.980,00	69,24	
4.02.4.02.0.002.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.865.600,00	34.528.620,00	15.336.980,00	69,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.03.06.	PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	104.544.200,00	77.192.032,00	27.352.168,00	73,84	
4.02.4.02.0.002.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	104.544.200,00	77.192.032,00	27.352.168,00	73,84	
4.02.4.02.0.002.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	104.544.200,00	77.192.032,00	27.352.168,00	73,84	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.03.07.	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	62.280.000,00	31.417.000,00	30.863.000,00	50,44	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	62.280.000,00	31.417.000,00	30.863.000,00	50,44	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	62.280.000,00	31.417.000,00	30.863.000,00	50,44	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.03.08.	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	277.516.600,00	257.403.358,00	20.113.242,00	92,75	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	277.516.600,00	257.403.358,00	20.113.242,00	92,75	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	277.516.600,00	257.403.358,00	20.113.242,00	92,75	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.04.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	1.300.090.666,00	976.076.441,00	324.014.225,00	75,08	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.	PENDALAMAN TUGAS DPRD	777.090.666,00	542.776.441,00	234.314.225,00	69,85	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	777.090.666,00	542.776.441,00	234.314.225,00	69,85	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	777.090.666,00	542.776.441,00	234.314.225,00	69,85	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.04.04.	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	127.000.000,00	37.300.000,00	89.700.000,00	29,37	
4.02.4.02.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	127.000.000,00	37.300.000,00	89.700.000,00	29,37	
4.02.4.02.0.002.2.04.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	37.300.000,00	89.700.000,00	29,37	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.04.05.	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	396.000.000,00	396.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.	BELANJA OPERASI	396.000.000,00	396.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	396.000.000,00	-	100,00	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.05.	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	2.746.879.400,00	2.609.202.255,00	137.677.145,00	94,99	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	470.035.000,00	371.627.832,00	98.407.168,00	79,06	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	470.035.000,00	371.627.832,00	98.407.168,00	79,06	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	470.035.000,00	371.627.832,00	98.407.168,00	79,06	
2.						
4.02.4.02.0.002.2.05.03.	PELAKSANAAN RESES	2.276.844.400,00	2.237.574.423,00	39.269.977,00	98,28	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.276.844.400,00	2.237.574.423,00	39.269.977,00	98,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.276.844.400,00	2.237.574.423,00	39.269.977,00	98,28	
4.02.4.02.0.002.2.06.	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	149.134.200,00	140.673.095,00	8.461.105,00	94,33	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	149.134.200,00	140.673.095,00	8.461.105,00	94,33	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	149.134.200,00	140.673.095,00	8.461.105,00	94,33	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	149.134.200,00	140.673.095,00	8.461.105,00	94,33	
4.02.4.02.0.002.2.07.	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	498.390.400,00	476.052.741,00	22.337.659,00	95,52	
4.02.4.02.0.002.2.07.02.	PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	498.390.400,00	476.052.741,00	22.337.659,00	95,52	
4.02.4.02.0.002.2.07.02.5.1.	BELANJA OPERASI	498.390.400,00	476.052.741,00	22.337.659,00	95,52	
4.02.4.02.0.002.2.07.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	498.390.400,00	476.052.741,00	22.337.659,00	95,52	
4.02.4.02.0.002.2.08.	FASILITASI TUGAS DPRD	2.154.748.071,00	2.136.044.134,00	18.703.937,00	99,13	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	1.395.795.700,00	1.393.212.552,00	2.583.148,00	99,81	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.395.795.700,00	1.393.212.552,00	2.583.148,00	99,81	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.795.700,00	1.393.212.552,00	2.583.148,00	99,81	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	213.952.371,00	205.422.180,00	8.530.191,00	96,01	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	213.952.371,00	205.422.180,00	8.530.191,00	96,01	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	213.952.371,00	205.422.180,00	8.530.191,00	96,01	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	545.000.000,00	537.409.402,00	7.590.598,00	98,61	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	545.000.000,00	537.409.402,00	7.590.598,00	98,61	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	537.409.402,00	7.590.598,00	98,61	
	JUMLAH BELANJA	56.293.494.721,00	42.684.718.587,00	13.608.776.134,00	75,83	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(56.293.494.721,00)	(42.684.718.587,00)	(13.608.776.134,00)	75,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(56.293.494.721,00)	(42.684.718.587,00)	(13.608.776.134,00)	75,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.00.00.	BELANJA	10.176.748.354,00	9.393.400.419,00	783.347.935,00	92,30	
5.01.5.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.727.342.775,00	7.261.970.974,00	465.371.801,00	93,98	
5.01.5.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.699.900,00	13.699.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.709.900,00	2.709.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.709.900,00	2.709.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.709.900,00	2.709.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.639.600,00	2.639.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.639.600,00	2.639.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.639.600,00	2.639.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.383.200,00	3.383.200,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	3.383.200,00	3.383.200,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.383.200,00	3.383.200,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.024.600,00	2.024.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.024.600,00	2.024.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.024.600,00	2.024.600,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	1.304.300,00	1.304.300,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	1.304.300,00	1.304.300,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.304.300,00	1.304.300,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.495.300,00	1.495.300,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.495.300,00	1.495.300,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.300,00	1.495.300,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	143.000,00	143.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	143.000,00	143.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.000,00	143.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.222.876.504,00	5.006.836.480,00	216.040.024,00	95,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.221.828.604,00	5.005.788.580,00	216.040.024,00	95,86	
5.01.5.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.221.828.604,00	5.005.788.580,00	216.040.024,00	95,86	
5.01.5.01.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	5.221.828.604,00	5.005.788.580,00	216.040.024,00	95,86	
1.						
5.01.5.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	629.400,00	629.400,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	629.400,00	629.400,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	629.400,00	629.400,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	418.500,00	418.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	418.500,00	418.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.02.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	418.500,00	418.500,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.03.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	349.500,00	349.500,00	-	100,00	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	144.956.000,00	94.070.000,00	50.886.000,00	64,90	
5.01.5.01.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55.104.000,00	50.670.000,00	4.434.000,00	91,95	
5.01.5.01.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	55.104.000,00	50.670.000,00	4.434.000,00	91,95	
5.01.5.01.0.001.2.05.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	55.104.000,00	50.670.000,00	4.434.000,00	91,95	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	89.852.000,00	43.400.000,00	46.452.000,00	48,30	
5.01.5.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	89.852.000,00	43.400.000,00	46.452.000,00	48,30	
5.01.5.01.0.001.2.05.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	89.852.000,00	43.400.000,00	46.452.000,00	48,30	
2.						
5.01.5.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	624.668.397,00	623.283.674,00	1.384.723,00	99,78	
5.01.5.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.872.900,00	10.872.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.872.900,00	10.872.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.872.900,00	10.872.900,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	181.648.594,00	181.648.594,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	176.086.400,00	176.086.400,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	21.840.000,00	21.840.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	154.246.400,00	154.246.400,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	5.562.194,00	5.562.194,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.562.194,00	5.562.194,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.364.800,00	14.364.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	14.364.800,00	14.364.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.364.800,00	14.364.800,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	87.783.100,00	87.780.600,00	2.500,00	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	87.783.100,00	87.780.600,00	2.500,00	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	87.783.100,00	87.780.600,00	2.500,00	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.612.600,00	47.543.400,00	69.200,00	99,85	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	47.612.600,00	47.543.400,00	69.200,00	99,85	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.132.600,00	35.063.400,00	69.200,00	99,80	
5.01.5.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.680.000,00	28.380.000,00	1.300.000,00	95,62	
5.01.5.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	29.680.000,00	28.380.000,00	1.300.000,00	95,62	
5.01.5.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.680.000,00	28.380.000,00	1.300.000,00	95,62	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	252.706.403,00	252.693.380,00	13.023,00	99,99	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	252.706.403,00	252.693.380,00	13.023,00	99,99	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	230.506.403,00	230.493.380,00	13.023,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	204.678.600,00	195.830.000,00	8.848.600,00	95,68	
5.01.5.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	61.289.000,00	60.000.000,00	1.289.000,00	97,90	
5.01.5.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	61.289.000,00	60.000.000,00	1.289.000,00	97,90	
5.01.5.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.289.000,00	60.000.000,00	1.289.000,00	97,90	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	143.389.600,00	135.830.000,00	7.559.600,00	94,73	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	143.389.600,00	135.830.000,00	7.559.600,00	94,73	
5.01.5.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.389.600,00	135.830.000,00	7.559.600,00	94,73	
5.01.5.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	985.795.200,00	829.404.460,00	156.390.740,00	84,14	
5.01.5.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.740.000,00	12.487.100,00	2.252.900,00	84,72	
5.01.5.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	14.740.000,00	12.487.100,00	2.252.900,00	84,72	
5.01.5.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.740.000,00	12.487.100,00	2.252.900,00	84,72	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	968.715.200,00	814.577.360,00	154.137.840,00	84,09	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	968.715.200,00	814.577.360,00	154.137.840,00	84,09	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	27.960.000,00	27.960.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	940.755.200,00	786.617.360,00	154.137.840,00	83,62	
5.01.5.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	530.318.674,00	498.496.960,00	31.821.714,00	94,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.530.000,00	38.528.515,00	1.485,00	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	38.530.000,00	38.528.515,00	1.485,00	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.528.515,00	1.485,00	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	222.062.856,00	193.224.445,00	28.838.411,00	87,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	222.062.856,00	193.224.445,00	28.838.411,00	87,01	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	204.062.856,00	175.224.445,00	28.838.411,00	85,87	
5.01.5.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	42.225.818,00	39.679.000,00	2.546.818,00	93,97	
5.01.5.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	42.225.818,00	39.679.000,00	2.546.818,00	93,97	
5.01.5.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.225.818,00	39.679.000,00	2.546.818,00	93,97	
5.01.5.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	85.000.000,00	84.930.000,00	70.000,00	99,92	
5.01.5.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.930.000,00	70.000,00	99,92	
5.01.5.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.930.000,00	70.000,00	99,92	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	142.500.000,00	142.135.000,00	365.000,00	99,74	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	139.635.000,00	365.000,00	99,74	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.635.000,00	365.000,00	99,74	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.5.2.	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.001.2.09.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	816.609.200,00	665.074.553,00	151.534.647,00	81,44	
5.01.5.01.0.002.2.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	484.406.052,00	401.609.155,00	82.796.897,00	82,91	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	4.580.000,00	4.580.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	4.580.000,00	4.580.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM SKPD/LINTAS SKPD	36.959.500,00	36.959.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	36.959.500,00	36.959.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.009.500,00	1.009.500,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	35.950.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.002.2.01.05.	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	50.822.552,00	50.822.552,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	50.822.552,00	50.822.552,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.612.552,00	49.612.552,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	392.044.000,00	309.247.103,00	82.796.897,00	78,88	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	392.044.000,00	309.247.103,00	82.796.897,00	78,88	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.690.000,00	12.690.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	379.354.000,00	296.557.103,00	82.796.897,00	78,17	
5.01.5.01.0.002.2.02.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.766.000,00	150.633.531,00	49.132.469,00	75,40	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.766.000,00	150.633.531,00	49.132.469,00	75,40	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	199.766.000,00	150.633.531,00	49.132.469,00	75,40	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	196.136.000,00	147.003.531,00	49.132.469,00	74,95	
5.01.5.01.0.002.2.03.	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	132.437.148,00	112.831.867,00	19.605.281,00	85,20	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	132.437.148,00	112.831.867,00	19.605.281,00	85,20	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	132.437.148,00	112.831.867,00	19.605.281,00	85,20	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.002.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	120.317.148,00	100.711.867,00	19.605.281,00	83,71	
5.01.5.01.0.003.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.444.417.229,00	1.332.068.192,00	112.349.037,00	92,22	
5.01.5.01.0.003.2.01.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	445.330.327,00	370.235.566,00	75.094.761,00	83,14	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	107.881.962,00	91.928.566,00	15.953.396,00	85,21	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	107.881.962,00	91.928.566,00	15.953.396,00	85,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.003.2.01.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	93.361.962,00	77.408.566,00	15.953.396,00	82,91	
5.01.5.01.0.003.2.01.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	126.065.732,00	105.321.000,00	20.744.732,00	83,54	
5.01.5.01.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	126.065.732,00	105.321.000,00	20.744.732,00	83,54	
5.01.5.01.0.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	126.065.732,00	105.321.000,00	20.744.732,00	83,54	
5.01.5.01.0.003.2.01.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	95.742.500,00	77.907.500,00	17.835.000,00	81,37	
5.01.5.01.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	95.742.500,00	77.907.500,00	17.835.000,00	81,37	
5.01.5.01.0.003.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	95.742.500,00	77.907.500,00	17.835.000,00	81,37	
5.01.5.01.0.003.2.01.08.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	115.640.133,00	95.078.500,00	20.561.633,00	82,22	
5.01.5.01.0.003.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	115.640.133,00	95.078.500,00	20.561.633,00	82,22	
5.01.5.01.0.003.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	115.640.133,00	95.078.500,00	20.561.633,00	82,22	
5.01.5.01.0.003.2.02.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	324.621.300,00	306.889.184,00	17.732.116,00	94,54	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	164.077.000,00	160.176.784,00	3.900.216,00	97,62	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	164.077.000,00	160.176.784,00	3.900.216,00	97,62	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	149.557.000,00	145.656.784,00	3.900.216,00	97,39	
5.01.5.01.0.003.2.02.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	42.892.300,00	37.010.000,00	5.882.300,00	86,29	
5.01.5.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	42.892.300,00	37.010.000,00	5.882.300,00	86,29	
5.01.5.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.892.300,00	37.010.000,00	5.882.300,00	86,29	
5.01.5.01.0.003.2.02.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	117.652.000,00	109.702.400,00	7.949.600,00	93,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	117.652.000,00	109.702.400,00	7.949.600,00	93,24	
5.01.5.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	117.652.000,00	109.702.400,00	7.949.600,00	93,24	
5.01.5.01.0.003.2.03.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	674.465.602,00	654.943.442,00	19.522.160,00	97,11	
5.01.5.01.0.003.2.03.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	90.705.000,00	90.654.600,00	50.400,00	99,94	
5.01.5.01.0.003.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	90.705.000,00	90.654.600,00	50.400,00	99,94	
5.01.5.01.0.003.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	90.705.000,00	90.654.600,00	50.400,00	99,94	
5.01.5.01.0.003.2.03.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	10.000.000,00	8.164.700,00	1.835.300,00	81,65	
5.01.5.01.0.003.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.164.700,00	1.835.300,00	81,65	
5.01.5.01.0.003.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.164.700,00	1.835.300,00	81,65	
5.01.5.01.0.003.2.03.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	35.000.000,00	34.850.000,00	150.000,00	99,57	
5.01.5.01.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.850.000,00	150.000,00	99,57	
5.01.5.01.0.003.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.850.000,00	150.000,00	99,57	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	333.326.550,00	322.730.564,00	10.595.986,00	96,82	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	333.326.550,00	322.730.564,00	10.595.986,00	96,82	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
5.01.5.01.0.003.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	316.406.550,00	305.810.564,00	10.595.986,00	96,65	
5.01.5.01.0.003.2.03.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	38.336.400,00	36.239.460,00	2.096.940,00	94,53	
5.01.5.01.0.003.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	38.336.400,00	36.239.460,00	2.096.940,00	94,53	
5.01.5.01.0.003.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.336.400,00	36.239.460,00	2.096.940,00	94,53	
5.01.5.01.0.003.2.03.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	10.000.000,00	8.244.700,00	1.755.300,00	82,45	
5.01.5.01.0.003.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.244.700,00	1.755.300,00	82,45	
5.01.5.01.0.003.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.244.700,00	1.755.300,00	82,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.003.2.03.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	30.000.000,00	29.250.000,00	750.000,00	97,50	
5.01.5.01.0.003.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.250.000,00	750.000,00	97,50	
5.01.5.01.0.003.2.03.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.250.000,00	750.000,00	97,50	
5.01.5.01.0.003.2.03.08.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	127.097.652,00	124.809.418,00	2.288.234,00	98,20	
5.01.5.01.0.003.2.03.08.5.1.	BELANJA OPERASI	127.097.652,00	124.809.418,00	2.288.234,00	98,20	
5.01.5.01.0.003.2.03.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	127.097.652,00	124.809.418,00	2.288.234,00	98,20	
5.05.5.01.0.002.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	188.379.150,00	134.286.700,00	54.092.450,00	71,29	
5.05.5.01.0.002.2.01.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	108.391.300,00	75.495.176,00	32.896.124,00	69,65	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.	PENGLOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	108.391.300,00	75.495.176,00	32.896.124,00	69,65	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	108.391.300,00	75.495.176,00	32.896.124,00	69,65	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
5.05.5.01.0.002.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	104.351.300,00	71.455.176,00	32.896.124,00	68,48	
5.05.5.01.0.002.2.04.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	79.987.850,00	58.791.524,00	21.196.326,00	73,50	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	79.987.850,00	58.791.524,00	21.196.326,00	73,50	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	79.987.850,00	58.791.524,00	21.196.326,00	73,50	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
5.05.5.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	76.957.850,00	55.761.524,00	21.196.326,00	72,46	
	JUMLAH BELANJA	10.176.748.354,00	9.393.400.419,00	783.347.935,00	92,30	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.176.748.354,00)	(9.393.400.419,00)	(783.347.935,00)	92,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.176.748.354,00)	(9.393.400.419,00)	(783.347.935,00)	92,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02.0000. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.	PENDAPATAN	223.189.745.107,00	228.202.063.148,36	(5.012.318.041,36)	102,25	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223.189.745.107,00	228.202.063.148,36	(5.012.318.041,36)	102,25	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.01.	Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	(4.318.107.085,36)	101,94	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	1.175.758.877,00	1.869.969.833,00	(694.210.956,00)	159,04	
	JUMLAH PENDAPATAN	223.189.745.107,00	228.202.063.148,36	(5.012.318.041,36)	102,25	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	25.847.932.084,00	24.505.432.187,00	1.342.499.897,00	94,81	
5.02.5.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.585.639.235,00	19.515.480.269,00	1.070.158.966,00	94,80	
5.02.5.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.515.200,00	76.422.782,00	10.092.418,00	88,33	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.511.400,00	13.558.080,00	953.320,00	93,43	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	14.511.400,00	13.558.080,00	953.320,00	93,43	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.511.400,00	13.558.080,00	953.320,00	93,43	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	19.201.900,00	17.424.772,00	1.777.128,00	90,75	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	19.201.900,00	17.424.772,00	1.777.128,00	90,75	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.201.900,00	17.424.772,00	1.777.128,00	90,75	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	22.416.600,00	19.447.200,00	2.969.400,00	86,75	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	22.416.600,00	19.447.200,00	2.969.400,00	86,75	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.416.600,00	19.447.200,00	2.969.400,00	86,75	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.578.400,00	20.124.430,00	1.453.970,00	93,26	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	21.578.400,00	20.124.430,00	1.453.970,00	93,26	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	21.578.400,00	20.124.430,00	1.453.970,00	93,26	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.806.900,00	5.868.300,00	2.938.600,00	66,63	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	8.806.900,00	5.868.300,00	2.938.600,00	66,63	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.796.900,00	5.868.300,00	1.928.600,00	75,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.000.720.788,00	15.100.289.827,00	900.430.961,00	94,37	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.992.508.988,00	15.093.289.827,00	899.219.161,00	94,38	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.992.508.988,00	15.093.289.827,00	899.219.161,00	94,38	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	15.992.508.988,00	15.093.289.827,00	899.219.161,00	94,38	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.211.800,00	7.000.000,00	1.211.800,00	85,24	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	8.211.800,00	7.000.000,00	1.211.800,00	85,24	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.001.800,00	7.000.000,00	1.800,00	99,97	
5.02.5.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	35.846.300,00	35.779.000,00	67.300,00	99,81	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	35.846.300,00	35.779.000,00	67.300,00	99,81	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	35.846.300,00	35.779.000,00	67.300,00	99,81	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.446.300,00	15.379.000,00	67.300,00	99,56	
5.02.5.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	390.427.600,00	384.904.000,00	5.523.600,00	98,59	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	67.040.000,00	64.540.000,00	2.500.000,00	96,27	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	67.040.000,00	64.540.000,00	2.500.000,00	96,27	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.040.000,00	64.540.000,00	2.500.000,00	96,27	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	31.273.600,00	31.250.000,00	23.600,00	99,92	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	31.273.600,00	31.250.000,00	23.600,00	99,92	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.273.600,00	31.250.000,00	23.600,00	99,92	
5.02.5.02.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	292.114.000,00	289.114.000,00	3.000.000,00	98,97	
5.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1.	BELANJA OPERASI	292.114.000,00	289.114.000,00	3.000.000,00	98,97	
5.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	292.114.000,00	289.114.000,00	3.000.000,00	98,97	
5.02.5.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.208.616.817,00	1.187.345.178,00	21.271.639,00	98,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.564.400,00	16.564.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.438.000,00	5.438.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.438.000,00	5.438.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.2.	BELANJA MODAL	11.126.400,00	11.126.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.126.400,00	11.126.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	225.437.317,00	216.967.649,00	8.469.668,00	96,24	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	223.237.717,00	214.771.649,00	8.466.068,00	96,21	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	223.237.717,00	214.771.649,00	8.466.068,00	96,21	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	2.199.600,00	2.196.000,00	3.600,00	99,84	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.199.600,00	2.196.000,00	3.600,00	99,84	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	131.896.000,00	125.202.800,00	6.693.200,00	94,93	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	131.896.000,00	125.202.800,00	6.693.200,00	94,93	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	131.896.000,00	125.202.800,00	6.693.200,00	94,93	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	175.036.700,00	174.973.050,00	63.650,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	175.036.700,00	174.973.050,00	63.650,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	175.036.700,00	174.973.050,00	63.650,00	99,96	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	18.300.000,00	5.700.000,00	76,25	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	18.300.000,00	5.700.000,00	76,25	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	18.300.000,00	5.700.000,00	76,25	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	635.682.400,00	635.337.279,00	345.121,00	99,95	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	635.682.400,00	635.337.279,00	345.121,00	99,95	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	635.682.400,00	635.337.279,00	345.121,00	99,95	
5.02.5.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	605.886.060,00	539.322.600,00	66.563.460,00	89,01	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	132.298.600,00	126.179.300,00	6.119.300,00	95,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	132.298.600,00	126.179.300,00	6.119.300,00	95,37	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.298.600,00	126.179.300,00	6.119.300,00	95,37	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	473.587.460,00	413.143.300,00	60.444.160,00	87,24	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.875.700,00	15.459.300,00	416.400,00	97,38	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.875.700,00	15.459.300,00	416.400,00	97,38	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	457.711.760,00	397.684.000,00	60.027.760,00	86,89	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.711.760,00	397.684.000,00	60.027.760,00	86,89	
5.02.5.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.384.224.240,00	1.327.843.769,00	56.380.471,00	95,93	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.989.700,00	3.980.000,00	9.700,00	99,76	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.989.700,00	3.980.000,00	9.700,00	99,76	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.989.700,00	3.980.000,00	9.700,00	99,76	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	440.899.000,00	425.858.069,00	15.040.931,00	96,59	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	440.899.000,00	425.858.069,00	15.040.931,00	96,59	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	440.899.000,00	425.858.069,00	15.040.931,00	96,59	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.332.000,00	14.400.000,00	23.932.000,00	37,57	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	38.332.000,00	14.400.000,00	23.932.000,00	37,57	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.332.000,00	14.400.000,00	23.932.000,00	37,57	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	901.003.540,00	883.605.700,00	17.397.840,00	98,07	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	901.003.540,00	883.605.700,00	17.397.840,00	98,07	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	901.003.540,00	883.605.700,00	17.397.840,00	98,07	
5.02.5.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	873.402.230,00	863.573.113,00	9.829.117,00	98,87	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	322.768.700,00	322.052.580,00	716.120,00	99,78	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	322.768.700,00	322.052.580,00	716.120,00	99,78	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	322.768.700,00	322.052.580,00	716.120,00	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	182.571.800,00	179.424.343,00	3.147.457,00	98,28	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	182.571.800,00	179.424.343,00	3.147.457,00	98,28	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	182.571.800,00	179.424.343,00	3.147.457,00	98,28	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	188.605.930,00	188.219.000,00	386.930,00	99,79	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	188.605.930,00	188.219.000,00	386.930,00	99,79	
5.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	188.605.930,00	188.219.000,00	386.930,00	99,79	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	179.455.800,00	173.877.190,00	5.578.610,00	96,89	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	179.455.800,00	173.877.190,00	5.578.610,00	96,89	
5.02.5.02.0.001.2.09.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	179.455.800,00	173.877.190,00	5.578.610,00	96,89	
2.						
5.02.5.02.0.004.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.262.292.849,00	4.989.951.918,00	272.340.931,00	94,82	
5.02.5.02.0.004.2.01.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.262.292.849,00	4.989.951.918,00	272.340.931,00	94,82	
5.02.5.02.0.004.2.01.01.	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	260.978.400,00	250.104.128,00	10.874.272,00	95,83	
5.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	260.978.400,00	250.104.128,00	10.874.272,00	95,83	
5.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1.0	Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
1.						
5.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	251.138.400,00	240.264.128,00	10.874.272,00	95,67	
2.						
5.02.5.02.0.004.2.01.02.	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.	90.292.900,00	76.872.980,00	13.419.920,00	85,14	
5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	90.292.900,00	76.872.980,00	13.419.920,00	85,14	
5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.0	Belanja Pegawai	9.840.000,00	9.840.000,00	-	100,00	
1.						
5.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	80.452.900,00	67.032.980,00	13.419.920,00	83,32	
2.						
5.02.5.02.0.004.2.01.03.	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	307.431.516,00	295.466.769,00	11.964.747,00	96,11	
5.02.5.02.0.004.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	307.431.516,00	295.466.769,00	11.964.747,00	96,11	
5.02.5.02.0.004.2.01.03.5.1.0	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
1.						
5.02.5.02.0.004.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	298.851.516,00	286.886.769,00	11.964.747,00	96,00	
2.						
5.02.5.02.0.004.2.01.04.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	1.652.725.953,00	1.624.062.884,00	28.663.069,00	98,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	787.956.803,00	767.141.300,00	20.815.503,00	97,36	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	782.276.803,00	761.461.300,00	20.815.503,00	97,34	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.2.	BELANJA MODAL	864.769.150,00	856.921.584,00	7.847.566,00	99,09	
5.02.5.02.0.004.2.01.04.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	864.769.150,00	856.921.584,00	7.847.566,00	99,09	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	247.699.300,00	245.976.634,00	1.722.666,00	99,30	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	247.699.300,00	245.976.634,00	1.722.666,00	99,30	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	239.149.300,00	237.426.634,00	1.722.666,00	99,28	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	914.955.900,00	779.235.066,00	135.720.834,00	85,17	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	914.955.900,00	779.235.066,00	135.720.834,00	85,17	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.490.000,00	6.490.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	908.465.900,00	772.745.066,00	135.720.834,00	85,06	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	356.877.200,00	344.413.951,00	12.463.249,00	96,51	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	356.877.200,00	344.413.951,00	12.463.249,00	96,51	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	28.600.000,00	26.200.000,00	2.400.000,00	91,61	
5.02.5.02.0.004.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	328.277.200,00	318.213.951,00	10.063.249,00	96,93	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	169.415.100,00	167.711.364,00	1.703.736,00	98,99	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	169.415.100,00	167.711.364,00	1.703.736,00	98,99	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.880.000,00	4.880.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	164.535.100,00	162.831.364,00	1.703.736,00	98,96	
5.02.5.02.0.004.2.01.09.	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	504.160.400,00	480.640.891,00	23.519.509,00	95,33	
5.02.5.02.0.004.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	504.160.400,00	480.640.891,00	23.519.509,00	95,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.004.2.01.09.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	495.580.400,00	472.060.891,00	23.519.509,00	95,25	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	88.341.000,00	76.025.603,00	12.315.397,00	86,06	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	88.341.000,00	76.025.603,00	12.315.397,00	86,06	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	80.141.000,00	67.825.603,00	12.315.397,00	84,63	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	416.375.100,00	406.772.228,00	9.602.872,00	97,69	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	416.375.100,00	406.772.228,00	9.602.872,00	97,69	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	407.795.100,00	398.192.228,00	9.602.872,00	97,65	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	101.509.900,00	94.988.323,00	6.521.577,00	93,58	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	101.509.900,00	94.988.323,00	6.521.577,00	93,58	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.004.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	97.409.900,00	90.888.323,00	6.521.577,00	93,31	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	151.530.180,00	147.681.097,00	3.849.083,00	97,46	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	151.530.180,00	147.681.097,00	3.849.083,00	97,46	
5.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	151.530.180,00	147.681.097,00	3.849.083,00	97,46	
	JUMLAH BELANJA	25.847.932.084,00	24.505.432.187,00	1.342.499.897,00	94,81	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	197.341.813.023,00	203.696.630.961,36	(6.354.817.938,36)	103,22	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	197.341.813.023,00	203.696.630.961,36	(6.354.817.938,36)	103,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.	PENDAPATAN	951.174.224.428,00	915.311.002.629,19	35.863.221.798,81	96,23	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.396.940.186,67	9.116.297.482,19	2.280.642.704,48	79,99	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	583.987.132,67	64,90	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	9.733.191.863,00	8.036.536.291,19	1.696.655.571,81	82,57	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	33.582.579.094,33	96,43	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	16.042.838.024,00	97,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	17.539.741.070,33	87,90	
	JUMLAH PENDAPATAN	951.174.224.428,00	915.311.002.629,19	35.863.221.798,81	96,23	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.00.00.	BELANJA	50.833.413.741,00	43.120.970.189,00	7.712.443.552,00	84,83	
5.02.5.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.047.563.924,00	31.843.738.770,00	6.203.825.154,00	83,69	
5.02.5.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.003.100,00	22.936.900,00	66.200,00	99,71	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.157.800,00	3.157.800,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.157.800,00	3.157.800,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.157.800,00	3.157.800,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.019.500,00	5.019.500,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.019.500,00	5.019.500,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.019.500,00	5.019.500,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.019.500,00	4.977.000,00	42.500,00	99,15	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.019.500,00	4.977.000,00	42.500,00	99,15	
5.02.5.02.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.019.500,00	4.977.000,00	42.500,00	99,15	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.227.700,00	3.227.700,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.227.700,00	3.227.700,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.227.700,00	3.227.700,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	3.227.700,00	3.204.000,00	23.700,00	99,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.227.700,00	3.204.000,00	23.700,00	99,27	
5.02.5.02.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.227.700,00	3.204.000,00	23.700,00	99,27	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.350.900,00	3.350.900,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.350.900,00	3.350.900,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.900,00	3.350.900,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	32.654.107.568,00	26.661.434.543,00	5.992.673.025,00	81,65	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	32.649.089.893,00	26.656.477.043,00	5.992.612.850,00	81,65	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	32.649.089.893,00	26.656.477.043,00	5.992.612.850,00	81,65	
5.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	32.649.089.893,00	26.656.477.043,00	5.992.612.850,00	81,65	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.007.375,00	2.968.000,00	39.375,00	98,69	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.007.375,00	2.968.000,00	39.375,00	98,69	
5.02.5.02.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.007.375,00	2.968.000,00	39.375,00	98,69	
5.02.5.02.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	2.010.300,00	1.989.500,00	20.800,00	98,97	
5.02.5.02.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.010.300,00	1.989.500,00	20.800,00	98,97	
5.02.5.02.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.300,00	1.989.500,00	20.800,00	98,97	
5.02.5.02.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.997.200,00	1.033.000,00	3.964.200,00	20,67	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.997.200,00	1.033.000,00	3.964.200,00	20,67	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.997.200,00	1.033.000,00	3.964.200,00	20,67	
5.02.5.02.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.997.200,00	1.033.000,00	3.964.200,00	20,67	
5.02.5.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	329.830.830,00	324.974.100,00	4.856.730,00	98,53	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	18.800.000,00	17.720.000,00	1.080.000,00	94,26	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.5.1.	BELANJA OPERASI	18.800.000,00	17.720.000,00	1.080.000,00	94,26	
5.02.5.02.0.001.2.05.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	17.720.000,00	1.080.000,00	94,26	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	65.000.000,00	63.624.000,00	1.376.000,00	97,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	63.624.000,00	1.376.000,00	97,88	
5.02.5.02.0.001.2.05.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	63.624.000,00	1.376.000,00	97,88	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	246.030.830,00	243.630.100,00	2.400.730,00	99,02	
5.02.5.02.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	246.030.830,00	243.630.100,00	2.400.730,00	99,02	
5.02.5.02.0.001.2.05.11.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	246.030.830,00	243.630.100,00	2.400.730,00	99,02	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.643.636.500,00	1.586.800.927,00	56.835.573,00	96,54	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	21.229.000,00	13.520.000,00	7.709.000,00	63,69	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	21.229.000,00	13.520.000,00	7.709.000,00	63,69	
5.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	21.229.000,00	13.520.000,00	7.709.000,00	63,69	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	323.120.500,00	315.853.000,00	7.267.500,00	97,75	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	293.615.100,00	287.403.000,00	6.212.100,00	97,88	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	293.615.100,00	287.403.000,00	6.212.100,00	97,88	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.	BELANJA MODAL	29.505.400,00	28.450.000,00	1.055.400,00	96,42	
5.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.505.400,00	28.450.000,00	1.055.400,00	96,42	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.990.000,00	47.726.600,00	25.263.400,00	65,39	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	72.990.000,00	47.726.600,00	25.263.400,00	65,39	
5.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	72.990.000,00	47.726.600,00	25.263.400,00	65,39	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	186.409.000,00	181.414.000,00	4.995.000,00	97,32	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	186.409.000,00	181.414.000,00	4.995.000,00	97,32	
5.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	186.409.000,00	181.414.000,00	4.995.000,00	97,32	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.840.000,00	10.240.000,00	11.600.000,00	46,89	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	21.840.000,00	10.240.000,00	11.600.000,00	46,89	
5.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	10.240.000,00	11.600.000,00	46,89	
2.						
5.02.5.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.018.048.000,00	1.018.047.327,00	673,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.018.048.000,00	1.018.047.327,00	673,00	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.018.048.000,00	1.018.047.327,00	673,00	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.398.678.308,00	1.329.935.000,00	68.743.308,00	95,09	
5.02.5.02.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	319.112.500,00	310.634.000,00	8.478.500,00	97,34	
5.02.5.02.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	319.112.500,00	310.634.000,00	8.478.500,00	97,34	
5.02.5.02.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.112.500,00	310.634.000,00	8.478.500,00	97,34	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	93.661.300,00	91.425.000,00	2.236.300,00	97,61	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	93.661.300,00	91.425.000,00	2.236.300,00	97,61	
5.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.661.300,00	91.425.000,00	2.236.300,00	97,61	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	599.922.428,00	542.300.000,00	57.622.428,00	90,40	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	599.922.428,00	542.300.000,00	57.622.428,00	90,40	
5.02.5.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599.922.428,00	542.300.000,00	57.622.428,00	90,40	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	385.982.080,00	385.576.000,00	406.080,00	99,89	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1.	BELANJA OPERASI	192.991.040,00	192.926.000,00	65.040,00	99,97	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	192.991.040,00	192.926.000,00	65.040,00	99,97	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	192.991.040,00	192.650.000,00	341.040,00	99,82	
5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192.991.040,00	192.650.000,00	341.040,00	99,82	
5.02.5.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.235.942.500,00	1.177.921.800,00	58.020.700,00	95,31	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.992.500,00	386.500,00	2.606.000,00	12,92	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.992.500,00	386.500,00	2.606.000,00	12,92	
5.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.992.500,00	386.500,00	2.606.000,00	12,92	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.000.000,00	17.805.300,00	15.194.700,00	53,96	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	17.805.300,00	15.194.700,00	53,96	
5.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	17.805.300,00	15.194.700,00	53,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.168.750.000,00	1.128.530.000,00	40.220.000,00	96,56	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.168.750.000,00	1.128.530.000,00	40.220.000,00	96,56	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	339.480.000,00	337.080.000,00	2.400.000,00	99,29	
5.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	829.270.000,00	791.450.000,00	37.820.000,00	95,44	
5.02.5.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	757.367.918,00	738.702.500,00	18.665.418,00	97,54	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	284.460.000,00	271.693.500,00	12.766.500,00	95,51	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	284.460.000,00	271.693.500,00	12.766.500,00	95,51	
5.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	284.460.000,00	271.693.500,00	12.766.500,00	95,51	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	93.000.000,00	88.569.000,00	4.431.000,00	95,24	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	88.569.000,00	4.431.000,00	95,24	
5.02.5.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	88.569.000,00	4.431.000,00	95,24	
5.02.5.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	379.907.918,00	378.440.000,00	1.467.918,00	99,61	
5.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	379.907.918,00	378.440.000,00	1.467.918,00	99,61	
5.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	379.907.918,00	378.440.000,00	1.467.918,00	99,61	
5.02.5.02.0.002.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.866.673.977,00	9.499.481.113,00	1.367.192.864,00	87,42	
5.02.5.02.0.002.2.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	4.192.655.647,00	4.165.324.509,00	27.331.138,00	99,35	
5.02.5.02.0.002.2.01.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	30.000.000,00	29.880.000,00	120.000,00	99,60	
5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.880.000,00	120.000,00	99,60	
5.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.880.000,00	120.000,00	99,60	
5.02.5.02.0.002.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	42.000.000,00	41.760.000,00	240.000,00	99,43	
5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.760.000,00	240.000,00	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.760.000,00	240.000,00	99,43	
5.02.5.02.0.002.2.01.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.242.332.242,00	1.239.412.709,00	2.919.533,00	99,76	
5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	1.242.332.242,00	1.239.412.709,00	2.919.533,00	99,76	
5.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.242.332.242,00	1.239.412.709,00	2.919.533,00	99,76	
5.02.5.02.0.002.2.01.08.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	1.270.872.800,00	1.256.646.300,00	14.226.500,00	98,88	
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.270.872.800,00	1.256.646.300,00	14.226.500,00	98,88	
5.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.872.800,00	1.256.646.300,00	14.226.500,00	98,88	
5.02.5.02.0.002.2.01.09.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	1.206.439.055,00	1.200.854.300,00	5.584.755,00	99,54	
5.02.5.02.0.002.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	1.206.439.055,00	1.200.854.300,00	5.584.755,00	99,54	
5.02.5.02.0.002.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.206.439.055,00	1.200.854.300,00	5.584.755,00	99,54	
5.02.5.02.0.002.2.01.11.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	152.258.600,00	150.209.100,00	2.049.500,00	98,65	
5.02.5.02.0.002.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	152.258.600,00	150.209.100,00	2.049.500,00	98,65	
5.02.5.02.0.002.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	152.258.600,00	150.209.100,00	2.049.500,00	98,65	
5.02.5.02.0.002.2.01.12.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	248.752.950,00	246.562.100,00	2.190.850,00	99,12	
5.02.5.02.0.002.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	248.752.950,00	246.562.100,00	2.190.850,00	99,12	
5.02.5.02.0.002.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	248.752.950,00	246.562.100,00	2.190.850,00	99,12	
5.02.5.02.0.002.2.02.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.329.912.350,00	1.301.922.868,00	27.989.482,00	97,90	
5.02.5.02.0.002.2.02.01.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	161.129.600,00	151.348.000,00	9.781.600,00	93,93	
5.02.5.02.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	161.129.600,00	151.348.000,00	9.781.600,00	93,93	
5.02.5.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	161.129.600,00	151.348.000,00	9.781.600,00	93,93	
5.02.5.02.0.002.2.02.05.	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	207.563.600,00	206.601.600,00	962.000,00	99,54	
5.02.5.02.0.002.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	207.563.600,00	206.601.600,00	962.000,00	99,54	
5.02.5.02.0.002.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	207.563.600,00	206.601.600,00	962.000,00	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	98.659.900,00	94.869.600,00	3.790.300,00	96,16	
5.02.5.02.0.002.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	98.659.900,00	94.869.600,00	3.790.300,00	96,16	
5.02.5.02.0.002.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	98.659.900,00	94.869.600,00	3.790.300,00	96,16	
5.02.5.02.0.002.2.02.09.	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	181.342.500,00	180.847.200,00	495.300,00	99,73	
5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.	BELANJA OPERASI	181.342.500,00	180.847.200,00	495.300,00	99,73	
5.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	181.342.500,00	180.847.200,00	495.300,00	99,73	
5.02.5.02.0.002.2.02.10.	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	413.795.750,00	403.017.768,00	10.777.982,00	97,40	
5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.	BELANJA OPERASI	413.795.750,00	403.017.768,00	10.777.982,00	97,40	
5.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	413.795.750,00	403.017.768,00	10.777.982,00	97,40	
5.02.5.02.0.002.2.02.11.	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	267.421.000,00	265.238.700,00	2.182.300,00	99,18	
5.02.5.02.0.002.2.02.11.5.1.	BELANJA OPERASI	267.421.000,00	265.238.700,00	2.182.300,00	99,18	
5.02.5.02.0.002.2.02.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	267.421.000,00	265.238.700,00	2.182.300,00	99,18	
5.02.5.02.0.002.2.03.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.808.746.700,00	1.468.693.500,00	340.053.200,00	81,20	
5.02.5.02.0.002.2.03.02.	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	12.721.400,00	12.721.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	12.721.400,00	12.721.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.721.400,00	12.721.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.03.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	36.010.000,00	27.995.900,00	8.014.100,00	77,74	
5.02.5.02.0.002.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	36.010.000,00	27.995.900,00	8.014.100,00	77,74	
5.02.5.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.010.000,00	27.995.900,00	8.014.100,00	77,74	
5.02.5.02.0.002.2.03.04.	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	199.637.600,00	188.992.300,00	10.645.300,00	94,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	199.637.600,00	188.992.300,00	10.645.300,00	94,67	
5.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	199.637.600,00	188.992.300,00	10.645.300,00	94,67	
5.02.5.02.0.002.2.03.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	295.836.200,00	292.727.300,00	3.108.900,00	98,95	
5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	295.836.200,00	292.727.300,00	3.108.900,00	98,95	
5.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	295.836.200,00	292.727.300,00	3.108.900,00	98,95	
5.02.5.02.0.002.2.03.07.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	167.992.000,00	42.144.500,00	125.847.500,00	25,09	
5.02.5.02.0.002.2.03.07.5.1.	BELANJA OPERASI	167.992.000,00	42.144.500,00	125.847.500,00	25,09	
5.02.5.02.0.002.2.03.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	167.992.000,00	42.144.500,00	125.847.500,00	25,09	
5.02.5.02.0.002.2.03.09.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	209.100.000,00	174.760.000,00	34.340.000,00	83,58	
5.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1.	BELANJA OPERASI	209.100.000,00	174.760.000,00	34.340.000,00	83,58	
5.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	209.100.000,00	174.760.000,00	34.340.000,00	83,58	
5.02.5.02.0.002.2.03.11.	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	887.449.500,00	729.352.100,00	158.097.400,00	82,19	
5.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1.	BELANJA OPERASI	887.449.500,00	729.352.100,00	158.097.400,00	82,19	
5.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	3.220.000,00	-	3.220.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	884.229.500,00	729.352.100,00	154.877.400,00	82,48	
5.02.5.02.0.002.2.04.	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.535.359.280,00	2.563.540.236,00	971.819.044,00	72,51	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.	ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	3.242.874.149,00	2.303.251.219,00	939.622.930,00	71,02	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.242.874.149,00	2.303.251.219,00	939.622.930,00	71,02	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.242.874.149,00	1.242.874.149,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.002.2.04.04.5.1.0 3.	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	939.622.930,00	53,02	
5.02.5.02.0.002.2.04.09.	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	292.485.131,00	260.289.017,00	32.196.114,00	88,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	292.485.131,00	260.289.017,00	32.196.114,00	88,99	
5.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3.0 1.	Belanja Tidak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	32.196.114,00	88,99	
5.02.5.02.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.919.175.840,00	1.777.750.306,00	141.425.534,00	92,63	
5.02.5.02.0.003.2.01.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.919.175.840,00	1.777.750.306,00	141.425.534,00	92,63	
5.02.5.02.0.003.2.01.01.	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	127.748.000,00	126.237.000,00	1.511.000,00	98,82	
5.02.5.02.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	127.748.000,00	126.237.000,00	1.511.000,00	98,82	
5.02.5.02.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	127.748.000,00	126.237.000,00	1.511.000,00	98,82	
5.02.5.02.0.003.2.01.03.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	84.764.100,00	74.739.100,00	10.025.000,00	88,17	
5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	84.764.100,00	74.739.100,00	10.025.000,00	88,17	
5.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	84.764.100,00	74.739.100,00	10.025.000,00	88,17	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	331.513.900,00	316.219.760,00	15.294.140,00	95,39	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	181.513.900,00	167.650.700,00	13.863.200,00	92,36	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	181.513.900,00	167.650.700,00	13.863.200,00	92,36	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.2.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	148.569.060,00	1.430.940,00	99,05	
5.02.5.02.0.003.2.01.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	148.569.060,00	1.430.940,00	99,05	
5.02.5.02.0.003.2.01.06.	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	96.179.000,00	89.479.000,00	6.700.000,00	93,03	
5.02.5.02.0.003.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	96.179.000,00	89.479.000,00	6.700.000,00	93,03	
5.02.5.02.0.003.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	96.179.000,00	89.479.000,00	6.700.000,00	93,03	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	345.568.040,00	334.875.500,00	10.692.540,00	96,91	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	309.073.100,00	305.853.700,00	3.219.400,00	98,96	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	309.073.100,00	305.853.700,00	3.219.400,00	98,96	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.2.	BELANJA MODAL	36.494.940,00	29.021.800,00	7.473.140,00	79,52	
5.02.5.02.0.003.2.01.07.5.2.0 1.	Belanja Modal Tanah	36.494.940,00	29.021.800,00	7.473.140,00	79,52	
5.02.5.02.0.003.2.01.08.	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	372.564.400,00	367.769.200,00	4.795.200,00	98,71	
5.02.5.02.0.003.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	372.564.400,00	367.769.200,00	4.795.200,00	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.003.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	372.564.400,00	367.769.200,00	4.795.200,00	98,71	
5.02.5.02.0.003.2.01.09.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	157.694.000,00	155.976.800,00	1.717.200,00	98,91	
5.02.5.02.0.003.2.01.09.5.1.	BELANJA OPERASI	157.694.000,00	155.976.800,00	1.717.200,00	98,91	
5.02.5.02.0.003.2.01.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	157.694.000,00	155.976.800,00	1.717.200,00	98,91	
5.02.5.02.0.003.2.01.10.	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	86.990.800,00	79.153.200,00	7.837.600,00	90,99	
5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	86.990.800,00	79.153.200,00	7.837.600,00	90,99	
5.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	86.990.800,00	79.153.200,00	7.837.600,00	90,99	
5.02.5.02.0.003.2.01.11.	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	42.034.200,00	41.874.200,00	160.000,00	99,62	
5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	42.034.200,00	41.874.200,00	160.000,00	99,62	
5.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	42.034.200,00	41.874.200,00	160.000,00	99,62	
5.02.5.02.0.003.2.01.12.	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	223.799.400,00	191.426.546,00	32.372.854,00	85,53	
5.02.5.02.0.003.2.01.12.5.1.	BELANJA OPERASI	223.799.400,00	191.426.546,00	32.372.854,00	85,53	
5.02.5.02.0.003.2.01.12.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	223.799.400,00	191.426.546,00	32.372.854,00	85,53	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	50.320.000,00	-	50.320.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.5.1.	BELANJA OPERASI	50.320.000,00	-	50.320.000,00	0,00	
5.02.5.02.0.003.2.01.13.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	50.320.000,00	-	50.320.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	50.833.413.741,00	43.120.970.189,00	7.712.443.552,00	84,83	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	900.340.810.687,00	872.190.032.440,19	28.150.778.246,81	96,87	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000. 00.00.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000. 00.00.6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	(13.473.472.572,11)	87,47	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000. 00.00.6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	13.469.972.572,11	95,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000. 00.00.6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	257.730.748.879,25	244.260.776.307,14	13.469.972.572,11	94,77	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.158.071.559.566,25	1.116.450.808.747,33	41.620.750.818,92	96,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03. - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5.03.0.00.5.04.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.00.5.04.01.0000.00.00.	BELANJA	8.145.978.394,00	7.650.267.173,00	495.711.221,00	93,91	
5.03.5.03.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.684.722.314,00	5.335.920.771,00	348.801.543,00	93,86	
5.03.5.03.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.467.447.894,00	4.126.662.038,00	340.785.856,00	92,37	
5.03.5.03.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.405.082.594,00	4.064.749.688,00	340.332.906,00	92,27	
5.03.5.03.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.405.082.594,00	4.064.749.688,00	340.332.906,00	92,27	
5.03.5.03.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.405.082.594,00	4.064.749.688,00	340.332.906,00	92,27	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	62.365.300,00	61.912.350,00	452.950,00	99,27	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	62.365.300,00	61.912.350,00	452.950,00	99,27	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	59.700.000,00	59.540.000,00	160.000,00	99,73	
5.03.5.03.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.665.300,00	2.372.350,00	292.950,00	89,01	
5.03.5.03.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.936.000,00	24.074.200,00	861.800,00	96,54	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.936.000,00	24.074.200,00	861.800,00	96,54	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.936.000,00	24.074.200,00	861.800,00	96,54	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.686.000,00	3.824.200,00	861.800,00	81,61	
5.03.5.03.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	489.685.920,00	487.538.683,00	2.147.237,00	99,56	
5.03.5.03.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.093.800,00	5.968.500,00	125.300,00	97,94	
5.03.5.03.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.093.800,00	5.968.500,00	125.300,00	97,94	
5.03.5.03.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.093.800,00	5.968.500,00	125.300,00	97,94	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.735.100,00	70.676.011,00	59.089,00	99,92	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	70.735.100,00	70.676.011,00	59.089,00	99,92	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.065.000,00	7.065.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	63.670.100,00	63.611.011,00	59.089,00	99,91	
5.03.5.03.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.118.000,00	13.105.000,00	13.000,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	13.118.000,00	13.105.000,00	13.000,00	99,90	
5.03.5.03.0.001.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	13.118.000,00	13.105.000,00	13.000,00	99,90	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.601.200,00	59.165.200,00	436.000,00	99,27	
5.03.5.03.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	59.601.200,00	59.165.200,00	436.000,00	99,27	
5.03.5.03.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	59.601.200,00	59.165.200,00	436.000,00	99,27	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	67.407.200,00	65.904.122,00	1.503.078,00	97,77	
5.03.5.03.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	67.407.200,00	65.904.122,00	1.503.078,00	97,77	
5.03.5.03.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Pegawai	5.633.200,00	5.633.000,00	200,00	100,00	
1.						
5.03.5.03.0.001.2.06.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	61.774.000,00	60.271.122,00	1.502.878,00	97,57	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.250.620,00	21.240.000,00	10.620,00	99,95	
5.03.5.03.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	21.250.620,00	21.240.000,00	10.620,00	99,95	
5.03.5.03.0.001.2.06.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	21.250.620,00	21.240.000,00	10.620,00	99,95	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	251.480.000,00	251.479.850,00	150,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	251.480.000,00	251.479.850,00	150,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.06.09.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	251.480.000,00	251.479.850,00	150,00	100,00	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	426.742.500,00	422.463.100,00	4.279.400,00	99,00	
5.03.5.03.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.942.500,00	3.000.000,00	1.942.500,00	60,70	
5.03.5.03.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.942.500,00	3.000.000,00	1.942.500,00	60,70	
5.03.5.03.0.001.2.08.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.942.500,00	3.000.000,00	1.942.500,00	60,70	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.200.000,00	26.813.100,00	1.386.900,00	95,08	
5.03.5.03.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	26.813.100,00	1.386.900,00	95,08	
5.03.5.03.0.001.2.08.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	26.813.100,00	1.386.900,00	95,08	
2.						
5.03.5.03.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	393.600.000,00	392.650.000,00	950.000,00	99,76	
5.03.5.03.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	393.600.000,00	392.650.000,00	950.000,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	393.600.000,00	392.650.000,00	950.000,00	99,76	
5.03.5.03.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	275.910.000,00	275.182.750,00	727.250,00	99,74	
5.03.5.03.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	172.770.000,00	172.766.750,00	3.250,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	172.770.000,00	172.766.750,00	3.250,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	172.770.000,00	172.766.750,00	3.250,00	100,00	
5.03.5.03.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.560.000,00	33.526.000,00	34.000,00	99,90	
5.03.5.03.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	33.560.000,00	33.526.000,00	34.000,00	99,90	
5.03.5.03.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	33.526.000,00	34.000,00	99,90	
5.03.5.03.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.580.000,00	68.890.000,00	690.000,00	99,01	
5.03.5.03.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	69.580.000,00	68.890.000,00	690.000,00	99,01	
5.03.5.03.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	69.580.000,00	68.890.000,00	690.000,00	99,01	
5.03.5.03.0.002.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.699.740.413,00	1.553.024.902,00	146.715.511,00	91,37	
5.03.5.03.0.002.2.01.	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	794.964.980,00	676.325.800,00	118.639.180,00	85,08	
5.03.5.03.0.002.2.01.04.	EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	371.653.780,00	294.922.700,00	76.731.080,00	79,35	
5.03.5.03.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	371.653.780,00	294.922.700,00	76.731.080,00	79,35	
5.03.5.03.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	371.653.780,00	294.922.700,00	76.731.080,00	79,35	
5.03.5.03.0.002.2.01.06.	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	26.645.800,00	26.645.800,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	26.645.800,00	26.645.800,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.645.800,00	26.645.800,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.01.08.	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	25.125.000,00	2.800.000,00	22.325.000,00	11,14	
5.03.5.03.0.002.2.01.08.5.1.	BELANJA OPERASI	25.125.000,00	2.800.000,00	22.325.000,00	11,14	
5.03.5.03.0.002.2.01.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.125.000,00	2.800.000,00	22.325.000,00	11,14	
5.03.5.03.0.002.2.01.10.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	228.396.100,00	208.813.000,00	19.583.100,00	91,43	
5.03.5.03.0.002.2.01.10.5.1.	BELANJA OPERASI	228.396.100,00	208.813.000,00	19.583.100,00	91,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.002.2.01.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	228.396.100,00	208.813.000,00	19.583.100,00	91,43	
5.03.5.03.0.002.2.01.11.	PENGLOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	143.144.300,00	143.144.300,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.01.11.5.1.	BELANJA OPERASI	143.144.300,00	143.144.300,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.01.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.144.300,00	143.144.300,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.02.	MUTASI DAN PROMOSI ASN	239.391.200,00	223.463.202,00	15.927.998,00	93,35	
5.03.5.03.0.002.2.02.01.	PENGLOLAAN MUTASI ASN	94.114.600,00	91.136.185,00	2.978.415,00	96,84	
5.03.5.03.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	94.114.600,00	91.136.185,00	2.978.415,00	96,84	
5.03.5.03.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	94.114.600,00	91.136.185,00	2.978.415,00	96,84	
5.03.5.03.0.002.2.02.02.	PENGLOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	145.276.600,00	132.327.017,00	12.949.583,00	91,09	
5.03.5.03.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	145.276.600,00	132.327.017,00	12.949.583,00	91,09	
5.03.5.03.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	145.276.600,00	132.327.017,00	12.949.583,00	91,09	
5.03.5.03.0.002.2.03.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	54.112.900,00	51.624.800,00	2.488.100,00	95,40	
5.03.5.03.0.002.2.03.04.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	54.112.900,00	51.624.800,00	2.488.100,00	95,40	
5.03.5.03.0.002.2.03.04.5.1.	BELANJA OPERASI	54.112.900,00	51.624.800,00	2.488.100,00	95,40	
5.03.5.03.0.002.2.03.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	54.112.900,00	51.624.800,00	2.488.100,00	95,40	
5.03.5.03.0.002.2.04.	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	611.271.333,00	601.611.100,00	9.660.233,00	98,42	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	511.020.333,00	510.973.100,00	47.233,00	99,99	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.5.1.	BELANJA OPERASI	511.020.333,00	510.973.100,00	47.233,00	99,99	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.002.2.04.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	506.190.333,00	506.143.100,00	47.233,00	99,99	
5.03.5.03.0.002.2.04.04.	PENGLOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	46.551.000,00	44.459.000,00	2.092.000,00	95,51	
5.03.5.03.0.002.2.04.04.5.1.	BELANJA OPERASI	46.551.000,00	44.459.000,00	2.092.000,00	95,51	
5.03.5.03.0.002.2.04.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.551.000,00	44.459.000,00	2.092.000,00	95,51	
5.03.5.03.0.002.2.04.07.	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	53.700.000,00	46.179.000,00	7.521.000,00	85,99	
5.03.5.03.0.002.2.04.07.5.1.	BELANJA OPERASI	53.700.000,00	46.179.000,00	7.521.000,00	85,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.002.2.04.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	46.179.000,00	7.521.000,00	85,99	
5.04.5.03.0.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	761.515.667,00	761.321.500,00	194.167,00	99,97	
5.04.5.03.0.002.2.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	23.240.000,00	23.182.000,00	58.000,00	99,75	
5.04.5.03.0.002.2.01.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.240.000,00	23.182.000,00	58.000,00	99,75	
5.04.5.03.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	23.240.000,00	23.182.000,00	58.000,00	99,75	
5.04.5.03.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.240.000,00	23.182.000,00	58.000,00	99,75	
5.04.5.03.0.002.2.02.	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	738.275.667,00	738.139.500,00	136.167,00	99,98	
5.04.5.03.0.002.2.02.07.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	738.275.667,00	738.139.500,00	136.167,00	99,98	
5.04.5.03.0.002.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	738.275.667,00	738.139.500,00	136.167,00	99,98	
5.04.5.03.0.002.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	738.275.667,00	738.139.500,00	136.167,00	99,98	
	JUMLAH BELANJA	8.145.978.394,00	7.650.267.173,00	495.711.221,00	93,91	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.145.978.394,00)	(7.650.267.173,00)	(495.711.221,00)	93,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.145.978.394,00)	(7.650.267.173,00)	(495.711.221,00)	93,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01.0000. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	14.858.074.831,00	12.867.287.746,00	1.990.787.085,00	86,60	
6.01.6.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.881.630.207,00	10.959.631.046,00	1.921.999.161,00	85,08	
6.01.6.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.493.500,00	25.445.600,00	5.047.900,00	83,45	
6.01.6.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.870.800,00	11.115.000,00	755.800,00	93,63	
6.01.6.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	11.870.800,00	11.115.000,00	755.800,00	93,63	
6.01.6.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.870.800,00	11.115.000,00	755.800,00	93,63	
6.01.6.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.622.700,00	14.330.600,00	4.292.100,00	76,95	
6.01.6.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	18.622.700,00	14.330.600,00	4.292.100,00	76,95	
6.01.6.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.622.700,00	14.330.600,00	4.292.100,00	76,95	
6.01.6.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.487.492.372,00	8.651.806.846,00	1.835.685.526,00	82,50	
6.01.6.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.487.492.372,00	8.651.806.846,00	1.835.685.526,00	82,50	
6.01.6.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	10.487.492.372,00	8.651.806.846,00	1.835.685.526,00	82,50	
6.01.6.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	10.487.492.372,00	8.651.806.846,00	1.835.685.526,00	82,50	
6.01.6.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	119.953.600,00	118.759.250,00	1.194.350,00	99,00	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	119.953.600,00	118.759.250,00	1.194.350,00	99,00	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	119.953.600,00	118.759.250,00	1.194.350,00	99,00	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	119.480.000,00	118.759.250,00	720.750,00	99,40	
6.01.6.01.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	473.600,00	-	473.600,00	0,00	
6.01.6.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	633.508.000,00	602.546.600,00	30.961.400,00	95,11	
6.01.6.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.161.600,00	19.161.600,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.161.600,00	19.161.600,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.161.600,00	19.161.600,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	123.041.700,00	112.504.800,00	10.536.900,00	91,44	
6.01.6.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	123.041.700,00	112.504.800,00	10.536.900,00	91,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	123.041.700,00	112.504.800,00	10.536.900,00	91,44	
6.01.6.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.360.000,00	77.920.000,00	440.000,00	99,44	
6.01.6.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	78.360.000,00	77.920.000,00	440.000,00	99,44	
6.01.6.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	78.360.000,00	77.920.000,00	440.000,00	99,44	
6.01.6.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	65.422.700,00	45.932.200,00	19.490.500,00	70,21	
6.01.6.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	65.422.700,00	45.932.200,00	19.490.500,00	70,21	
6.01.6.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.422.700,00	45.932.200,00	19.490.500,00	70,21	
6.01.6.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.988.000,00	4.950.000,00	38.000,00	99,24	
6.01.6.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.988.000,00	4.950.000,00	38.000,00	99,24	
6.01.6.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.988.000,00	4.950.000,00	38.000,00	99,24	
6.01.6.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	342.534.000,00	342.078.000,00	456.000,00	99,87	
6.01.6.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	342.534.000,00	342.078.000,00	456.000,00	99,87	
6.01.6.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	342.534.000,00	342.078.000,00	456.000,00	99,87	
6.01.6.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	571.881.700,00	566.270.850,00	5.610.850,00	99,02	
6.01.6.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	391.881.700,00	386.502.850,00	5.378.850,00	98,63	
6.01.6.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	391.881.700,00	386.502.850,00	5.378.850,00	98,63	
6.01.6.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.881.700,00	386.502.850,00	5.378.850,00	98,63	
6.01.6.01.0.001.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	180.000.000,00	179.768.000,00	232.000,00	99,87	
6.01.6.01.0.001.2.07.09.5.2.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	179.768.000,00	232.000,00	99,87	
6.01.6.01.0.001.2.07.09.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.768.000,00	232.000,00	99,87	
6.01.6.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	374.442.100,00	352.244.900,00	22.197.200,00	94,07	
6.01.6.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.000.000,00	21.993.300,00	6.700,00	99,97	
6.01.6.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.993.300,00	6.700,00	99,97	
6.01.6.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.993.300,00	6.700,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	352.442.100,00	330.251.600,00	22.190.500,00	93,70	
6.01.6.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	352.442.100,00	330.251.600,00	22.190.500,00	93,70	
6.01.6.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	352.442.100,00	330.251.600,00	22.190.500,00	93,70	
6.01.6.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	663.858.935,00	642.557.000,00	21.301.935,00	96,79	
6.01.6.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	251.482.800,00	233.094.000,00	18.388.800,00	92,69	
6.01.6.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	251.482.800,00	233.094.000,00	18.388.800,00	92,69	
6.01.6.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	251.482.800,00	233.094.000,00	18.388.800,00	92,69	
6.01.6.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.020.000,00	24.015.000,00	5.000,00	99,98	
6.01.6.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	24.020.000,00	24.015.000,00	5.000,00	99,98	
6.01.6.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.020.000,00	24.015.000,00	5.000,00	99,98	
6.01.6.01.0.001.2.09.07.	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	26.640.000,00	26.635.000,00	5.000,00	99,98	
6.01.6.01.0.001.2.09.07.5.1.	BELANJA OPERASI	26.640.000,00	26.635.000,00	5.000,00	99,98	
6.01.6.01.0.001.2.09.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.640.000,00	26.635.000,00	5.000,00	99,98	
6.01.6.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	361.716.135,00	358.813.000,00	2.903.135,00	99,20	
6.01.6.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	361.716.135,00	358.813.000,00	2.903.135,00	99,20	
6.01.6.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	361.716.135,00	358.813.000,00	2.903.135,00	99,20	
6.01.6.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.293.166.624,00	1.280.996.500,00	12.170.124,00	99,06	
6.01.6.01.0.002.2.01.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.218.160.624,00	1.206.082.000,00	12.078.624,00	99,01	
6.01.6.01.0.002.2.01.01.	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	815.250.000,00	810.000.000,00	5.250.000,00	99,36	
6.01.6.01.0.002.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	815.250.000,00	810.000.000,00	5.250.000,00	99,36	
6.01.6.01.0.002.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	815.250.000,00	810.000.000,00	5.250.000,00	99,36	
6.01.6.01.0.002.2.01.03.	REVIU LAPORAN KINERJA	60.539.250,00	57.654.000,00	2.885.250,00	95,23	
6.01.6.01.0.002.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	60.539.250,00	57.654.000,00	2.885.250,00	95,23	
6.01.6.01.0.002.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.539.250,00	57.654.000,00	2.885.250,00	95,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.002.2.01.04.	REVIU LAPORAN KEUANGAN	41.962.530,00	41.962.000,00	530,00	100,00	
6.01.6.01.0.002.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	41.962.530,00	41.962.000,00	530,00	100,00	
6.01.6.01.0.002.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	41.962.530,00	41.962.000,00	530,00	100,00	
6.01.6.01.0.002.2.01.07.	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	300.408.844,00	296.466.000,00	3.942.844,00	98,69	
6.01.6.01.0.002.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	300.408.844,00	296.466.000,00	3.942.844,00	98,69	
6.01.6.01.0.002.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	300.408.844,00	296.466.000,00	3.942.844,00	98,69	
6.01.6.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	75.006.000,00	74.914.500,00	91.500,00	99,88	
6.01.6.01.0.002.2.02.02.	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	75.006.000,00	74.914.500,00	91.500,00	99,88	
6.01.6.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	75.006.000,00	74.914.500,00	91.500,00	99,88	
6.01.6.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.006.000,00	74.914.500,00	91.500,00	99,88	
6.01.6.01.0.003.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	683.278.000,00	626.660.200,00	56.617.800,00	91,71	
6.01.6.01.0.003.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	362.996.000,00	339.541.400,00	23.454.600,00	93,54	
6.01.6.01.0.003.2.01.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	55.028.000,00	54.545.600,00	482.400,00	99,12	
6.01.6.01.0.003.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	55.028.000,00	54.545.600,00	482.400,00	99,12	
6.01.6.01.0.003.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	55.028.000,00	54.545.600,00	482.400,00	99,12	
6.01.6.01.0.003.2.01.02.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	307.968.000,00	284.995.800,00	22.972.200,00	92,54	
6.01.6.01.0.003.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	307.968.000,00	284.995.800,00	22.972.200,00	92,54	
6.01.6.01.0.003.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	307.968.000,00	284.995.800,00	22.972.200,00	92,54	
6.01.6.01.0.003.2.02.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	320.282.000,00	287.118.800,00	33.163.200,00	89,65	
6.01.6.01.0.003.2.02.02.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	45.000.000,00	31.857.000,00	13.143.000,00	70,79	
6.01.6.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	31.857.000,00	13.143.000,00	70,79	
6.01.6.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	31.857.000,00	13.143.000,00	70,79	
6.01.6.01.0.003.2.02.03.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	197.622.000,00	182.034.800,00	15.587.200,00	92,11	
6.01.6.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	197.622.000,00	182.034.800,00	15.587.200,00	92,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	197.622.000,00	182.034.800,00	15.587.200,00	92,11	
6.01.6.01.0.003.2.02.04.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	77.660.000,00	73.227.000,00	4.433.000,00	94,29	
6.01.6.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	77.660.000,00	73.227.000,00	4.433.000,00	94,29	
6.01.6.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	77.660.000,00	73.227.000,00	4.433.000,00	94,29	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.858.074.831,00)	(12.867.287.746,00)	(1.990.787.085,00)	86,60	
	JUMLAH BELANJA	14.858.074.831,00	12.867.287.746,00	1.990.787.085,00	86,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.858.074.831,00)	(12.867.287.746,00)	(1.990.787.085,00)	86,60	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01.0000. - KECAMATAN DUMAI BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.00.00.	BELANJA	9.243.700.309,00	8.886.542.573,00	357.157.736,00	96,14	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.268.243.609,00	7.953.871.793,00	314.371.816,00	96,20	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.401.400,00	28.401.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.928.700,00	4.928.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.928.700,00	4.928.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.928.700,00	4.928.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.832.600,00	4.832.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	4.832.600,00	4.832.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.832.600,00	4.832.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.494.200,00	4.494.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	4.494.200,00	4.494.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.494.200,00	4.494.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.552.600,00	4.552.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	4.552.600,00	4.552.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.552.600,00	4.552.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	4.717.600,00	4.717.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	4.717.600,00	4.717.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.717.600,00	4.717.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.875.700,00	4.875.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	4.875.700,00	4.875.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.700,00	4.875.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.155.327.809,00	4.902.774.565,00	252.553.244,00	95,10	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.140.360.709,00	4.887.807.465,00	252.553.244,00	95,09	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.140.360.709,00	4.887.807.465,00	252.553.244,00	95,09	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.140.360.709,00	4.887.807.465,00	252.553.244,00	95,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.106.000,00	10.106.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	10.106.000,00	10.106.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	10.106.000,00	10.106.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.861.100,00	4.861.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	4.861.100,00	4.861.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.861.100,00	4.861.100,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.682.500,00	3.682.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.682.500,00	3.682.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.682.500,00	3.682.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.682.500,00	3.682.500,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	345.863.800,00	345.065.127,00	798.673,00	99,77	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.947.500,00	9.674.795,00	272.705,00	97,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	9.947.500,00	9.674.795,00	272.705,00	97,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.947.500,00	9.674.795,00	272.705,00	97,26	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.345.400,00	95.345.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	95.345.400,00	95.345.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	95.345.400,00	95.345.400,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.041.900,00	5.013.456,00	28.444,00	99,44	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.041.900,00	5.013.456,00	28.444,00	99,44	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	5.041.900,00	5.013.456,00	28.444,00	99,44	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	44.880.000,00	44.821.092,00	58.908,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	44.880.000,00	44.821.092,00	58.908,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	44.880.000,00	44.821.092,00	58.908,00	99,87	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.360.000,00	26.360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	26.360.000,00	26.360.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	26.360.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	66.400.000,00	66.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	66.400.000,00	66.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	66.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	97.889.000,00	97.450.384,00	438.616,00	99,55	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	97.889.000,00	97.450.384,00	438.616,00	99,55	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	97.889.000,00	97.450.384,00	438.616,00	99,55	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87.456.300,00	86.321.250,00	1.135.050,00	98,70	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	68.115.500,00	67.106.250,00	1.009.250,00	98,52	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	68.115.500,00	67.106.250,00	1.009.250,00	98,52	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.115.500,00	67.106.250,00	1.009.250,00	98,52	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.340.800,00	19.215.000,00	125.800,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	19.340.800,00	19.215.000,00	125.800,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.340.800,00	19.215.000,00	125.800,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.506.983.800,00	2.448.060.989,00	58.922.811,00	97,65	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.207.000,00	57.575.176,00	17.631.824,00	76,56	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	75.207.000,00	57.575.176,00	17.631.824,00	76,56	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.207.000,00	57.575.176,00	17.631.824,00	76,56	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.429.436.800,00	2.388.145.813,00	41.290.987,00	98,30	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.429.436.800,00	2.388.145.813,00	41.290.987,00	98,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.429.436.800,00	2.388.145.813,00	41.290.987,00	98,30	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	140.528.000,00	139.565.962,00	962.038,00	99,32	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	127.528.000,00	127.202.435,00	325.565,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	127.528.000,00	127.202.435,00	325.565,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	127.528.000,00	127.202.435,00	325.565,00	99,74	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.900.000,00	6.518.618,00	381.382,00	94,47	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	6.518.618,00	381.382,00	94,47	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.518.618,00	381.382,00	94,47	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.100.000,00	5.844.909,00	255.091,00	95,82	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	5.844.909,00	255.091,00	95,82	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	5.844.909,00	255.091,00	95,82	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.743.400,00	56.692.492,00	50.908,00	99,91	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.901.500,00	14.850.592,00	50.908,00	99,66	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.901.500,00	14.850.592,00	50.908,00	99,66	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	14.901.500,00	14.850.592,00	50.908,00	99,66	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.901.500,00	14.850.592,00	50.908,00	99,66	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	11.844.200,00	11.844.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.01.	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	1.948.800,00	1.948.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.948.800,00	1.948.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.948.800,00	1.948.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	9.895.400,00	9.895.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	9.895.400,00	9.895.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.895.400,00	9.895.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	29.997.700,00	29.997.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	29.997.700,00	29.997.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	29.997.700,00	29.997.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.997.700,00	29.997.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	778.882.400,00	755.644.388,00	23.238.012,00	97,02	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	778.882.400,00	755.644.388,00	23.238.012,00	97,02	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.000.000,00	3.927.274,00	72.726,00	98,18	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.927.274,00	72.726,00	98,18	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.927.274,00	72.726,00	98,18	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	629.668.600,00	624.903.314,00	4.765.286,00	99,24	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	108.455.300,00	106.723.764,00	1.731.536,00	98,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	108.455.300,00	106.723.764,00	1.731.536,00	98,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	521.213.300,00	518.179.550,00	3.033.750,00	99,42	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.000.000,00	356.966.250,00	3.033.750,00	99,16	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.213.300,00	161.213.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	130.216.000,00	115.816.000,00	14.400.000,00	88,94	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	130.216.000,00	115.816.000,00	14.400.000,00	88,94	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	130.216.000,00	115.816.000,00	14.400.000,00	88,94	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	14.997.800,00	10.997.800,00	4.000.000,00	73,33	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	14.997.800,00	10.997.800,00	4.000.000,00	73,33	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.997.800,00	10.997.800,00	4.000.000,00	73,33	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.000.000,00	81.503.000,00	19.497.000,00	80,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	80.503.000,00	19.497.000,00	80,50	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	80.503.000,00	19.497.000,00	80,50	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	80.503.000,00	19.497.000,00	80,50	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	80.503.000,00	19.497.000,00	80,50	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.830.900,00	38.830.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	38.830.900,00	38.830.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	38.830.900,00	38.830.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	38.830.900,00	38.830.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	38.830.900,00	38.830.900,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.243.700.309,00)	(8.886.542.573,00)	(357.157.736,00)	96,14	
	JUMLAH BELANJA	9.243.700.309,00	8.886.542.573,00	357.157.736,00	96,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.243.700.309,00)	(8.886.542.573,00)	(357.157.736,00)	96,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.02.0000. - KECAMATAN DUMAI TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.00.00.	BELANJA	10.527.519.072,00	10.228.597.526,00	298.921.546,00	97,16	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.527.189.634,00	9.274.709.141,00	252.480.493,00	97,35	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.118.800,00	13.178.800,00	940.000,00	93,34	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.872.400,00	2.872.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.872.400,00	2.872.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.872.400,00	2.872.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.614.400,00	2.614.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.614.400,00	2.614.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.614.400,00	2.614.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.158.000,00	2.158.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.158.000,00	1.218.000,00	940.000,00	56,44	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.158.000,00	1.218.000,00	940.000,00	56,44	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.158.000,00	1.218.000,00	940.000,00	56,44	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.559.480.152,00	5.320.023.958,00	239.456.194,00	95,69	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.526.661.392,00	5.287.418.858,00	239.242.534,00	95,67	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.526.661.392,00	5.287.418.858,00	239.242.534,00	95,67	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	5.526.661.392,00	5.287.418.858,00	239.242.534,00	95,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	29.764.800,00	29.551.200,00	213.600,00	99,28	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	29.764.800,00	29.551.200,00	213.600,00	99,28	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	26.880.000,00	26.880.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.884.800,00	2.671.200,00	213.600,00	92,60	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.053.960,00	3.053.900,00	60,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	3.053.960,00	3.053.900,00	60,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.053.960,00	3.053.900,00	60,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.950.000,00	16.200.000,00	1.750.000,00	90,25	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	17.950.000,00	16.200.000,00	1.750.000,00	90,25	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	17.950.000,00	16.200.000,00	1.750.000,00	90,25	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	17.950.000,00	16.200.000,00	1.750.000,00	90,25	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	292.910.560,00	290.620.700,00	2.289.860,00	99,22	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.857.100,00	13.857.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	13.857.100,00	13.857.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.857.100,00	13.857.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65.887.750,00	65.870.100,00	17.650,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	65.887.750,00	65.870.100,00	17.650,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	65.887.750,00	65.870.100,00	17.650,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.471.500,00	8.468.800,00	2.700,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	8.471.500,00	8.468.800,00	2.700,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.471.500,00	8.468.800,00	2.700,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.420.000,00	67.420.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	67.420.000,00	67.420.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.420.000,00	67.420.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.488.030,00	36.296.300,00	191.730,00	99,47	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	36.488.030,00	36.296.300,00	191.730,00	99,47	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.488.030,00	36.296.300,00	191.730,00	99,47	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.770.180,00	40.612.000,00	158.180,00	99,61	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	40.770.180,00	40.612.000,00	158.180,00	99,61	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	40.770.180,00	40.612.000,00	158.180,00	99,61	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.016.000,00	58.096.400,00	1.919.600,00	96,80	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	60.016.000,00	58.096.400,00	1.919.600,00	96,80	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	60.016.000,00	58.096.400,00	1.919.600,00	96,80	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18.568.400,00	18.564.750,00	3.650,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.568.400,00	18.564.750,00	3.650,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	18.568.400,00	18.564.750,00	3.650,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.568.400,00	18.564.750,00	3.650,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.427.533.900,00	3.420.664.598,00	6.869.302,00	99,80	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.498.300,00	3.497.550,00	750,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.498.300,00	3.497.550,00	750,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.498.300,00	3.497.550,00	750,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.635.600,00	63.767.048,00	6.868.552,00	90,28	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	70.635.600,00	63.767.048,00	6.868.552,00	90,28	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	70.635.600,00	63.767.048,00	6.868.552,00	90,28	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000.000,00	3.315.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	196.627.822,00	195.456.335,00	1.171.487,00	99,40	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	187.977.822,00	186.806.335,00	1.171.487,00	99,38	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	187.977.822,00	186.806.335,00	1.171.487,00	99,38	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	187.977.822,00	186.806.335,00	1.171.487,00	99,38	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.650.000,00	8.650.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	8.650.000,00	8.650.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	8.650.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.916.800,00	14.540.200,00	376.600,00	97,48	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.916.800,00	14.540.200,00	376.600,00	97,48	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.916.800,00	14.540.200,00	376.600,00	97,48	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	14.916.800,00	14.540.200,00	376.600,00	97,48	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.916.800,00	14.540.200,00	376.600,00	97,48	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	867.071.978,00	824.657.525,00	42.414.453,00	95,11	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	867.071.978,00	824.657.525,00	42.414.453,00	95,11	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	18.000.000,00	17.150.000,00	850.000,00	95,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.150.000,00	850.000,00	95,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.150.000,00	850.000,00	95,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	537.939.700,00	515.629.447,00	22.310.253,00	95,85	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	87.939.700,00	68.743.199,00	19.196.501,00	78,17	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	87.939.700,00	68.743.199,00	19.196.501,00	78,17	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	450.000.000,00	446.886.248,00	3.113.752,00	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000.000,00	446.886.248,00	3.113.752,00	99,31	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	302.132.278,00	282.878.078,00	19.254.200,00	93,63	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	296.475.800,00	277.221.600,00	19.254.200,00	93,51	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	296.475.800,00	277.221.600,00	19.254.200,00	93,51	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	5.656.478,00	5.656.478,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.656.478,00	5.656.478,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	96.350.000,00	3.650.000,00	96,35	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	96.350.000,00	3.650.000,00	96,35	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	96.350.000,00	3.650.000,00	96,35	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	96.350.000,00	3.650.000,00	96,35	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	96.350.000,00	3.650.000,00	96,35	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.340.660,00	18.340.660,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	18.340.660,00	18.340.660,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	18.340.660,00	18.340.660,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	18.340.660,00	18.340.660,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.340.660,00	18.340.660,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.527.519.072,00)	(10.228.597.526,00)	(298.921.546,00)	97,16	
	JUMLAH BELANJA	10.527.519.072,00	10.228.597.526,00	298.921.546,00	97,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.527.519.072,00)	(10.228.597.526,00)	(298.921.546,00)	97,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03.0000. - KECAMATAN DUMAI SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.00.00.	BELANJA	10.476.259.589,00	10.178.026.757,00	298.232.832,00	97,15	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.671.130.889,00	9.398.107.707,00	273.023.182,00	97,18	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.302.100,00	27.732.432,00	569.668,00	97,99	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.593.200,00	7.572.200,00	21.000,00	99,72	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.593.200,00	7.572.200,00	21.000,00	99,72	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.593.200,00	7.572.200,00	21.000,00	99,72	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.271.900,00	5.057.300,00	214.600,00	95,93	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.271.900,00	5.057.300,00	214.600,00	95,93	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.271.900,00	5.057.300,00	214.600,00	95,93	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.061.500,00	2.061.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.061.500,00	2.061.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.061.500,00	2.061.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.906.100,00	2.694.900,00	211.200,00	92,73	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.906.100,00	2.694.900,00	211.200,00	92,73	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.906.100,00	2.694.900,00	211.200,00	92,73	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.110.000,00	2.110.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.110.000,00	2.110.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	2.110.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.413.100,00	5.296.532,00	116.568,00	97,85	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	5.413.100,00	5.296.532,00	116.568,00	97,85	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.413.100,00	5.296.532,00	116.568,00	97,85	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.946.300,00	2.940.000,00	6.300,00	99,79	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	2.946.300,00	2.940.000,00	6.300,00	99,79	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.946.300,00	2.940.000,00	6.300,00	99,79	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.535.055.239,00	5.316.506.450,00	218.548.789,00	96,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.486.172.639,00	5.267.767.632,00	218.405.007,00	96,02	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.486.172.639,00	5.267.767.632,00	218.405.007,00	96,02	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	5.486.172.639,00	5.267.767.632,00	218.405.007,00	96,02	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	39.891.300,00	39.891.218,00	82,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	39.891.300,00	39.891.218,00	82,00	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Pegawai	30.320.000,00	30.320.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	9.571.300,00	9.571.218,00	82,00	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	4.472.700,00	4.329.000,00	143.700,00	96,79	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	4.472.700,00	4.329.000,00	143.700,00	96,79	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.472.700,00	4.329.000,00	143.700,00	96,79	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.518.600,00	4.518.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	4.518.600,00	4.518.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.518.600,00	4.518.600,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	54.718.000,00	53.662.000,00	1.056.000,00	98,07	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	54.718.000,00	53.662.000,00	1.056.000,00	98,07	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	54.718.000,00	53.662.000,00	1.056.000,00	98,07	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0	Belanja Pegawai	52.296.000,00	51.244.000,00	1.052.000,00	97,99	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.422.000,00	2.418.000,00	4.000,00	99,83	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	105.500.000,00	105.394.500,00	105.500,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	105.500.000,00	105.394.500,00	105.500,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	105.500.000,00	105.394.500,00	105.500,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.05.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	105.500.000,00	105.394.500,00	105.500,00	99,90	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	355.004.627,00	349.581.216,00	5.423.411,00	98,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.454.900,00	6.062.866,00	392.034,00	93,93	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.454.900,00	6.062.866,00	392.034,00	93,93	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.454.900,00	6.062.866,00	392.034,00	93,93	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	89.668.927,00	89.279.950,00	388.977,00	99,57	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	89.668.927,00	89.279.950,00	388.977,00	99,57	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	89.668.927,00	89.279.950,00	388.977,00	99,57	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	57.910.000,00	54.910.000,00	3.000.000,00	94,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	57.910.000,00	54.910.000,00	3.000.000,00	94,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	57.910.000,00	54.910.000,00	3.000.000,00	94,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.974.800,00	36.571.600,00	403.200,00	98,91	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	36.974.800,00	36.571.600,00	403.200,00	98,91	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	36.974.800,00	36.571.600,00	403.200,00	98,91	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53.508.000,00	52.920.000,00	588.000,00	98,90	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	53.508.000,00	52.920.000,00	588.000,00	98,90	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	53.508.000,00	52.920.000,00	588.000,00	98,90	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	110.488.000,00	109.836.800,00	651.200,00	99,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	110.488.000,00	109.836.800,00	651.200,00	99,41	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.488.000,00	109.836.800,00	651.200,00	99,41	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	222.547.000,00	219.783.250,00	2.763.750,00	98,76	
7.01.7.01.0.001.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.000.000,00	132.236.250,00	2.763.750,00	97,95	
7.01.7.01.0.001.2.07.02.5.2.	BELANJA MODAL	135.000.000,00	132.236.250,00	2.763.750,00	97,95	
7.01.7.01.0.001.2.07.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.000.000,00	132.236.250,00	2.763.750,00	97,95	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	24.272.000,00	24.272.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	24.272.000,00	24.272.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.272.000,00	24.272.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.775.000,00	45.775.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	45.775.000,00	45.775.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.775.000,00	45.775.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.	BELANJA MODAL	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.730.651.500,00	2.702.019.985,00	28.631.515,00	98,95	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.398.500,00	1.053.000,00	1.345.500,00	43,90	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.398.500,00	1.053.000,00	1.345.500,00	43,90	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.398.500,00	1.053.000,00	1.345.500,00	43,90	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	118.987.400,00	106.871.385,00	12.116.015,00	89,82	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	118.987.400,00	106.871.385,00	12.116.015,00	89,82	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	118.987.400,00	106.871.385,00	12.116.015,00	89,82	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.609.265.600,00	2.594.095.600,00	15.170.000,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.609.265.600,00	2.594.095.600,00	15.170.000,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.609.265.600,00	2.594.095.600,00	15.170.000,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	639.352.423,00	623.427.874,00	15.924.549,00	97,51	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	212.910.000,00	203.375.411,00	9.534.589,00	95,52	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	212.910.000,00	203.375.411,00	9.534.589,00	95,52	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	212.910.000,00	203.375.411,00	9.534.589,00	95,52	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.820.000,00	12.144.000,00	3.676.000,00	76,76	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	15.820.000,00	12.144.000,00	3.676.000,00	76,76	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.820.000,00	12.144.000,00	3.676.000,00	76,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	391.697.423,00	391.328.463,00	368.960,00	99,91	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.	BELANJA OPERASI	252.841.232,00	252.648.000,00	193.232,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	252.841.232,00	252.648.000,00	193.232,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.2.	BELANJA MODAL	138.856.191,00	138.680.463,00	175.728,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.607.463,00	27.607.463,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.10.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.248.728,00	111.073.000,00	175.728,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	18.925.000,00	16.580.000,00	2.345.000,00	87,61	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	18.925.000,00	16.580.000,00	2.345.000,00	87,61	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	16.580.000,00	2.345.000,00	87,61	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.300.250,00	68.183.700,00	116.550,00	99,83	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	34.835.100,00	34.815.100,00	20.000,00	99,94	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	34.835.100,00	34.815.100,00	20.000,00	99,94	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	34.835.100,00	34.815.100,00	20.000,00	99,94	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.835.100,00	34.815.100,00	20.000,00	99,94	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	8.065.250,00	7.968.700,00	96.550,00	98,80	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	8.065.250,00	7.968.700,00	96.550,00	98,80	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	8.065.250,00	7.968.700,00	96.550,00	98,80	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	8.065.250,00	7.968.700,00	96.550,00	98,80	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	25.399.900,00	25.399.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	25.399.900,00	25.399.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	25.399.900,00	25.399.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.399.900,00	25.399.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	626.428.450,00	603.246.450,00	23.182.000,00	96,30	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	626.428.450,00	603.246.450,00	23.182.000,00	96,30	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.670.000,00	4.670.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.670.000,00	4.670.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	4.670.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	494.710.950,00	473.451.350,00	21.259.600,00	95,70	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	110.989.200,00	89.729.600,00	21.259.600,00	80,85	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	110.989.200,00	89.729.600,00	21.259.600,00	80,85	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	383.721.750,00	383.721.750,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.721.750,00	383.721.750,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	127.047.500,00	125.125.100,00	1.922.400,00	98,49	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	127.047.500,00	125.125.100,00	1.922.400,00	98,49	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	127.047.500,00	125.125.100,00	1.922.400,00	98,49	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	98.088.900,00	1.911.100,00	98,09	
7.01.7.01.0.004.2.03.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	98.088.900,00	1.911.100,00	98,09	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	98.088.900,00	1.911.100,00	98,09	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.088.900,00	1.911.100,00	98,09	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.088.900,00	1.911.100,00	98,09	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.476.259.589,00)	(10.178.026.757,00)	(298.232.832,00)	97,15	
	JUMLAH BELANJA	10.476.259.589,00	10.178.026.757,00	298.232.832,00	97,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.476.259.589,00)	(10.178.026.757,00)	(298.232.832,00)	97,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04.0000. - KECAMATAN DUMAI KOTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.00.00.	BELANJA	11.281.034.946,00	10.944.772.000,00	336.262.946,00	97,02	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.177.713.170,00	9.874.675.806,00	303.037.364,00	97,02	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.685.087,00	14.681.000,00	1.004.087,00	93,60	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.972.631,00	2.928.000,00	44.631,00	98,50	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.972.631,00	2.928.000,00	44.631,00	98,50	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.972.631,00	2.928.000,00	44.631,00	98,50	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.918.895,00	2.902.000,00	16.895,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.918.895,00	2.902.000,00	16.895,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.918.895,00	2.902.000,00	16.895,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.469.195,00	1.713.000,00	756.195,00	69,37	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.469.195,00	1.713.000,00	756.195,00	69,37	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.469.195,00	1.713.000,00	756.195,00	69,37	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.858.895,00	1.722.000,00	136.895,00	92,64	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.858.895,00	1.722.000,00	136.895,00	92,64	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.858.895,00	1.722.000,00	136.895,00	92,64	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.383.560,00	2.363.000,00	20.560,00	99,14	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.383.560,00	2.363.000,00	20.560,00	99,14	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.383.560,00	2.363.000,00	20.560,00	99,14	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.281.911,00	2.253.000,00	28.911,00	98,73	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.281.911,00	2.253.000,00	28.911,00	98,73	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.281.911,00	2.253.000,00	28.911,00	98,73	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.798.612.403,00	5.563.043.761,00	235.568.642,00	95,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.795.315.923,00	5.559.762.761,00	235.553.162,00	95,94	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.795.315.923,00	5.559.762.761,00	235.553.162,00	95,94	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	5.795.315.923,00	5.559.762.761,00	235.553.162,00	95,94	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.470.860,00	2.463.000,00	7.860,00	99,68	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.470.860,00	2.463.000,00	7.860,00	99,68	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.470.860,00	2.463.000,00	7.860,00	99,68	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	825.620,00	818.000,00	7.620,00	99,08	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	825.620,00	818.000,00	7.620,00	99,08	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	825.620,00	818.000,00	7.620,00	99,08	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.875.455,00	4.053.500,00	821.955,00	83,14	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.574.755,00	1.070.800,00	503.955,00	68,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.574.755,00	1.070.800,00	503.955,00	68,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.574.755,00	1.070.800,00	503.955,00	68,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	900.000,00	750.000,00	150.000,00	83,33	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.	BELANJA OPERASI	900.000,00	750.000,00	150.000,00	83,33	
7.01.7.01.0.001.2.03.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	750.000,00	150.000,00	83,33	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.400.700,00	2.232.700,00	168.000,00	93,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.400.700,00	2.232.700,00	168.000,00	93,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.400.700,00	2.232.700,00	168.000,00	93,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.02.5.1.	BELANJA OPERASI	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	460.728.500,00	427.311.014,00	33.417.486,00	92,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.999.000,00	4.755.000,00	244.000,00	95,12	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.999.000,00	4.755.000,00	244.000,00	95,12	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000,00	4.755.000,00	244.000,00	95,12	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	134.999.400,00	121.667.366,00	13.332.034,00	90,12	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	134.999.400,00	121.667.366,00	13.332.034,00	90,12	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	134.999.400,00	121.667.366,00	13.332.034,00	90,12	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.728.400,00	18.516.600,00	211.800,00	98,87	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.	BELANJA OPERASI	18.728.400,00	18.516.600,00	211.800,00	98,87	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	18.728.400,00	18.516.600,00	211.800,00	98,87	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.000.000,00	81.575.500,00	12.424.500,00	86,78	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	94.000.000,00	81.575.500,00	12.424.500,00	86,78	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	81.575.500,00	12.424.500,00	86,78	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.826.700,00	24.086.750,00	1.739.950,00	93,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	25.826.700,00	24.086.750,00	1.739.950,00	93,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	25.826.700,00	24.086.750,00	1.739.950,00	93,26	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	67.000.000,00	62.619.000,00	4.381.000,00	93,46	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	62.619.000,00	4.381.000,00	93,46	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	62.619.000,00	4.381.000,00	93,46	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	115.175.000,00	114.090.798,00	1.084.202,00	99,06	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	115.175.000,00	114.090.798,00	1.084.202,00	99,06	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	115.175.000,00	114.090.798,00	1.084.202,00	99,06	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.645.000,00	119.375.000,00	6.270.000,00	95,01	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	30.072.000,00	24.010.000,00	6.062.000,00	79,84	
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.	BELANJA MODAL	30.072.000,00	24.010.000,00	6.062.000,00	79,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.072.000,00	24.010.000,00	6.062.000,00	79,84	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	79.019.000,00	78.865.000,00	154.000,00	99,81	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	79.019.000,00	78.865.000,00	154.000,00	99,81	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.019.000,00	78.865.000,00	154.000,00	99,81	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.554.000,00	16.500.000,00	54.000,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.	BELANJA MODAL	16.554.000,00	16.500.000,00	54.000,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.554.000,00	16.500.000,00	54.000,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.039.975.725,00	3.020.155.006,00	19.820.719,00	99,35	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.525,00	1.500.000,00	525,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.500.525,00	1.500.000,00	525,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.525,00	1.500.000,00	525,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	107.440.000,00	92.253.606,00	15.186.394,00	85,87	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	107.440.000,00	92.253.606,00	15.186.394,00	85,87	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	107.440.000,00	92.253.606,00	15.186.394,00	85,87	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.921.335.200,00	2.916.701.400,00	4.633.800,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.921.335.200,00	2.916.701.400,00	4.633.800,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.921.335.200,00	2.916.701.400,00	4.633.800,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	658.691.000,00	652.556.525,00	6.134.475,00	99,07	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	235.140.000,00	229.790.525,00	5.349.475,00	97,72	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	235.140.000,00	229.790.525,00	5.349.475,00	97,72	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	235.140.000,00	229.790.525,00	5.349.475,00	97,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.551.000,00	23.245.000,00	306.000,00	98,70	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	23.551.000,00	23.245.000,00	306.000,00	98,70	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	23.551.000,00	23.245.000,00	306.000,00	98,70	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	100.000.000,00	99.841.000,00	159.000,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.841.000,00	159.000,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.841.000,00	159.000,00	99,84	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	300.000.000,00	299.680.000,00	320.000,00	99,89	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.2.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.680.000,00	320.000,00	99,89	
7.01.7.01.0.001.2.09.11.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.680.000,00	320.000,00	99,89	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.485.922,00	66.139.310,00	1.346.612,00	98,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	27.090.563,00	25.744.000,00	1.346.563,00	95,03	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	27.090.563,00	25.744.000,00	1.346.563,00	95,03	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	27.090.563,00	25.744.000,00	1.346.563,00	95,03	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	27.090.563,00	25.744.000,00	1.346.563,00	95,03	
7.01.7.01.0.002.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.275.710,00	7.275.710,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.275.710,00	2.275.710,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.275.710,00	2.275.710,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.710,00	2.275.710,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	33.119.649,00	33.119.600,00	49,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	33.119.649,00	33.119.600,00	49,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	33.119.649,00	33.119.600,00	49,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.119.649,00	33.119.600,00	49,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	831.418.650,00	807.729.780,00	23.688.870,00	97,15	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	831.418.650,00	807.729.780,00	23.688.870,00	97,15	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	650.822.850,00	644.357.500,00	6.465.350,00	99,01	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	46.829.600,00	43.128.000,00	3.701.600,00	92,10	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.829.600,00	43.128.000,00	3.701.600,00	92,10	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	603.993.250,00	601.229.500,00	2.763.750,00	99,54	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	603.993.250,00	601.229.500,00	2.763.750,00	99,54	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	144.670.400,00	127.446.880,00	17.223.520,00	88,09	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	124.827.840,00	107.946.380,00	16.881.460,00	86,48	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	124.827.840,00	107.946.380,00	16.881.460,00	86,48	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	19.842.560,00	19.500.500,00	342.060,00	98,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.842.560,00	19.500.500,00	342.060,00	98,28	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	24.325.400,00	24.325.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	24.325.400,00	24.325.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.325.400,00	24.325.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.800.000,00	96.609.900,00	8.190.100,00	92,19	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	91.809.900,00	8.190.100,00	91,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	91.809.900,00	8.190.100,00	91,81	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	64.989.900,00	64.809.900,00	180.000,00	99,72	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	64.989.900,00	64.809.900,00	180.000,00	99,72	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.	BELANJA MODAL	35.010.100,00	27.000.000,00	8.010.100,00	77,12	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.010.100,00	27.000.000,00	8.010.100,00	77,12	
7.01.7.01.0.004.2.03.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.617.204,00	99.617.204,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	99.617.204,00	99.617.204,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.	PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	99.617.204,00	99.617.204,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	99.617.204,00	99.617.204,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.617.204,00	99.617.204,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.281.034.946,00)	(10.944.772.000,00)	(336.262.946,00)	97,02	
	JUMLAH BELANJA	11.281.034.946,00	10.944.772.000,00	336.262.946,00	97,02	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.281.034.946,00)	(10.944.772.000,00)	(336.262.946,00)	97,02	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05.0000. - KECAMATAN BUKIT KAPUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.00.00.	BELANJA	11.898.896.475,00	11.511.371.758,00	387.524.717,00	96,74	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.251.254.975,00	9.903.755.462,00	347.499.513,00	96,61	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	26.394.720,00	26.384.457,00	10.263,00	99,96	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	13.197.360,00	13.187.097,00	10.263,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	13.197.360,00	13.187.097,00	10.263,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.197.360,00	13.187.097,00	10.263,00	99,92	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	13.197.360,00	13.197.360,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	13.197.360,00	13.197.360,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	13.197.360,00	13.197.360,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.076.795.535,00	6.759.545.850,00	317.249.685,00	95,52	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.015.384.735,00	6.699.785.050,00	315.599.685,00	95,50	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	7.015.384.735,00	6.699.785.050,00	315.599.685,00	95,50	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	7.015.384.735,00	6.699.785.050,00	315.599.685,00	95,50	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	61.410.800,00	59.760.800,00	1.650.000,00	97,31	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	61.410.800,00	59.760.800,00	1.650.000,00	97,31	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	54.160.000,00	54.160.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.800,00	5.600.800,00	1.650.000,00	77,24	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.02.5.1.	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.02.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	750.663.300,00	746.296.135,00	4.367.165,00	99,42	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.628.000,00	19.560.200,00	67.800,00	99,65	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	19.628.000,00	19.560.200,00	67.800,00	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	19.628.000,00	19.560.200,00	67.800,00	99,65	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	217.412.900,00	214.742.029,00	2.670.871,00	98,77	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	217.412.900,00	214.742.029,00	2.670.871,00	98,77	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	217.412.900,00	214.742.029,00	2.670.871,00	98,77	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	218.260.000,00	217.135.000,00	1.125.000,00	99,48	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	218.260.000,00	217.135.000,00	1.125.000,00	99,48	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	218.260.000,00	217.135.000,00	1.125.000,00	99,48	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	58.752.400,00	58.539.696,00	212.704,00	99,64	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	58.752.400,00	58.539.696,00	212.704,00	99,64	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	58.752.400,00	58.539.696,00	212.704,00	99,64	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	108.160.000,00	107.960.000,00	200.000,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	108.160.000,00	107.960.000,00	200.000,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	108.160.000,00	107.960.000,00	200.000,00	99,82	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	128.450.000,00	128.359.210,00	90.790,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	128.450.000,00	128.359.210,00	90.790,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	128.450.000,00	128.359.210,00	90.790,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.176.155.420,00	2.150.796.929,00	25.358.491,00	98,83	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	16.497.000,00	16.497.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	16.497.000,00	16.497.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	16.497.000,00	16.497.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.700.000,00	71.450.789,00	14.249.211,00	83,37	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	85.700.000,00	71.450.789,00	14.249.211,00	83,37	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	85.700.000,00	71.450.789,00	14.249.211,00	83,37	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.073.958.420,00	2.062.849.140,00	11.109.280,00	99,46	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.073.958.420,00	2.062.849.140,00	11.109.280,00	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.073.958.420,00	2.062.849.140,00	11.109.280,00	99,46	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.846.000,00	182.332.091,00	513.909,00	99,72	
7.01.7.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	68.516.000,00	68.184.091,00	331.909,00	99,52	
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	68.516.000,00	68.184.091,00	331.909,00	99,52	
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	68.516.000,00	68.184.091,00	331.909,00	99,52	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	39.330.000,00	39.244.000,00	86.000,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	39.330.000,00	39.244.000,00	86.000,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	39.330.000,00	39.244.000,00	86.000,00	99,78	
7.01.7.01.0.001.2.09.07.	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	75.000.000,00	74.904.000,00	96.000,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.09.07.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.904.000,00	96.000,00	99,87	
7.01.7.01.0.001.2.09.07.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.904.000,00	96.000,00	99,87	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.390.900,00	24.390.407,00	493,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	24.390.900,00	24.390.407,00	493,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	24.390.900,00	24.390.407,00	493,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	24.390.900,00	24.390.407,00	493,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	24.390.900,00	24.390.407,00	493,00	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.523.250.600,00	1.483.228.889,00	40.021.711,00	97,37	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.523.250.600,00	1.483.228.889,00	40.021.711,00	97,37	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	92.562.400,00	90.546.000,00	2.016.400,00	97,82	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	92.562.400,00	90.546.000,00	2.016.400,00	97,82	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	92.562.400,00	90.546.000,00	2.016.400,00	97,82	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.083.927.180,00	1.078.800.400,00	5.126.780,00	99,53	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	236.069.980,00	236.000.000,00	69.980,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	236.069.980,00	236.000.000,00	69.980,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	847.857.200,00	842.800.400,00	5.056.800,00	99,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.927.200,00	8.870.400,00	5.056.800,00	63,69	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.400.000,00	56.400.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	777.530.000,00	777.530.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	346.761.020,00	313.882.489,00	32.878.531,00	90,52	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	178.389.400,00	161.260.580,00	17.128.820,00	90,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	178.389.400,00	161.260.580,00	17.128.820,00	90,40	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.	BELANJA MODAL	168.371.620,00	152.621.909,00	15.749.711,00	90,65	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.589.120,00	122.839.409,00	15.749.711,00	88,64	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.782.500,00	29.782.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.997.000,00	3.000,00	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.997.000,00	3.000,00	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	99.997.000,00	3.000,00	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.997.000,00	3.000,00	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.997.000,00	3.000,00	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.898.896.475,00)	(11.511.371.758,00)	(387.524.717,00)	96,74	
	JUMLAH BELANJA	11.898.896.475,00	11.511.371.758,00	387.524.717,00	96,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.898.896.475,00)	(11.511.371.758,00)	(387.524.717,00)	96,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06.0000. - KECAMATAN MEDANG KAMPAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.00.00.	BELANJA	7.901.180.723,00	7.574.545.065,00	326.635.658,00	95,87	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.944.962.001,00	6.620.017.765,00	324.944.236,00	95,32	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.936.450,00	4.936.450,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.836.700,00	1.836.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.836.700,00	1.836.700,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.836.700,00	1.836.700,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.571.650,00	1.571.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.571.650,00	1.571.650,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.571.650,00	1.571.650,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.528.100,00	1.528.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	1.528.100,00	1.528.100,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	1.528.100,00	1.528.100,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.152.789.001,00	4.855.861.607,00	296.927.394,00	94,24	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.083.896.701,00	4.786.969.307,00	296.927.394,00	94,16	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	5.083.896.701,00	4.786.969.307,00	296.927.394,00	94,16	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0	Belanja Pegawai	5.083.896.701,00	4.786.969.307,00	296.927.394,00	94,16	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.710.400,00	3.710.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.710.400,00	3.710.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	3.710.400,00	3.710.400,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	63.480.000,00	63.480.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.	BELANJA OPERASI	63.480.000,00	63.480.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.07.5.1.0	Belanja Pegawai	63.480.000,00	63.480.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.701.900,00	1.701.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.701.900,00	1.701.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.701.900,00	1.701.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	354.417.440,00	344.669.234,00	9.748.206,00	97,25	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.465.400,00	3.465.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.465.400,00	3.465.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.400,00	3.465.400,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.368.740,00	95.353.620,00	15.120,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	95.368.740,00	95.353.620,00	15.120,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	95.368.740,00	95.353.620,00	15.120,00	99,98	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	95.860.000,00	95.860.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	95.860.000,00	95.860.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	95.860.000,00	95.860.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.292.500,00	26.204.100,00	88.400,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	26.292.500,00	26.204.100,00	88.400,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.292.500,00	26.204.100,00	88.400,00	99,66	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.480.000,00	31.758.000,00	1.722.000,00	94,86	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	33.480.000,00	31.758.000,00	1.722.000,00	94,86	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	33.480.000,00	31.758.000,00	1.722.000,00	94,86	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	99.950.800,00	92.028.114,00	7.922.686,00	92,07	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	99.950.800,00	92.028.114,00	7.922.686,00	92,07	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	99.950.800,00	92.028.114,00	7.922.686,00	92,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.283.858.910,00	1.265.598.124,00	18.260.786,00	98,58	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.350,00	1.000.000,00	350,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.000.350,00	1.000.000,00	350,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.350,00	1.000.000,00	350,00	99,97	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.302.000,00	32.321.064,00	16.980.936,00	65,56	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	49.302.000,00	32.321.064,00	16.980.936,00	65,56	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	49.302.000,00	32.321.064,00	16.980.936,00	65,56	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.233.556.560,00	1.232.277.060,00	1.279.500,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	1.233.556.560,00	1.232.277.060,00	1.279.500,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.233.556.560,00	1.232.277.060,00	1.279.500,00	99,90	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.160.200,00	114.152.350,00	7.850,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	104.005.200,00	103.997.350,00	7.850,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.	BELANJA OPERASI	104.005.200,00	103.997.350,00	7.850,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	104.005.200,00	103.997.350,00	7.850,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.155.000,00	10.155.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	10.155.000,00	10.155.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	10.155.000,00	10.155.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.271.500,00	42.674.500,00	1.597.000,00	96,39	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.490.700,00	12.893.700,00	1.597.000,00	88,98	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.490.700,00	12.893.700,00	1.597.000,00	88,98	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	14.490.700,00	12.893.700,00	1.597.000,00	88,98	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.490.700,00	12.893.700,00	1.597.000,00	88,98	
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	29.780.800,00	29.780.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	29.780.800,00	29.780.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	29.780.800,00	29.780.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.780.800,00	29.780.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	806.976.622,00	806.882.200,00	94.422,00	99,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	806.976.622,00	806.882.200,00	94.422,00	99,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	656.134.422,00	656.040.000,00	94.422,00	99,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.	BELANJA OPERASI	266.401.350,00	266.385.000,00	16.350,00	99,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	266.401.350,00	266.385.000,00	16.350,00	99,99	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	389.733.072,00	389.655.000,00	78.072,00	99,98	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.718.072,00	49.640.000,00	78.072,00	99,84	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	340.015.000,00	340.015.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	143.863.200,00	143.863.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	143.863.200,00	143.863.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	143.863.200,00	143.863.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	6.979.000,00	6.979.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	6.979.000,00	6.979.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.979.000,00	6.979.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.970.600,00	104.970.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.970.600,00	4.970.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.970.600,00	4.970.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	4.970.600,00	4.970.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.600,00	4.970.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.03.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.901.180.723,00)	(7.574.545.065,00)	(326.635.658,00)	95,87	
	JUMLAH BELANJA	7.901.180.723,00	7.574.545.065,00	326.635.658,00	95,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.901.180.723,00)	(7.574.545.065,00)	(326.635.658,00)	95,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.07.0000. - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.00.00.	BELANJA	10.869.637.137,00	10.471.023.827,00	398.613.310,00	96,33	
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.446.341.637,00	9.060.232.027,00	386.109.610,00	95,91	
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	82.508.800,00	81.716.800,00	792.000,00	99,04	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.523.600,00	2.523.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	2.523.600,00	2.523.600,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.523.600,00	2.523.600,00	-	100,00	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.03.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.	BELANJA OPERASI	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.001.2.01.05.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	69.890.800,00	69.674.800,00	216.000,00	99,69	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	69.890.800,00	69.674.800,00	216.000,00	99,69	
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Pegawai	65.610.000,00	65.610.000,00	-	100,00	
1.						
7.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.0	Belanja Barang dan Jasa	4.280.800,00	4.064.800,00	216.000,00	94,95	
2.						
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.570.501.733,00	6.209.982.908,00	360.518.825,00	94,51	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.565.794.333,00	6.205.611.508,00	360.182.825,00	94,51	
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	6.565.794.333,00	6.205.611.508,00	360.182.825,00	94,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	6.565.794.333,00	6.205.611.508,00	360.182.825,00	94,51	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.055.000,00	2.839.000,00	216.000,00	92,93	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.	BELANJA OPERASI	3.055.000,00	2.839.000,00	216.000,00	92,93	
7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.055.000,00	2.839.000,00	216.000,00	92,93	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.652.400,00	1.532.400,00	120.000,00	92,74	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.	BELANJA OPERASI	1.652.400,00	1.532.400,00	120.000,00	92,74	
7.01.7.01.0.001.2.02.08.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.652.400,00	1.532.400,00	120.000,00	92,74	
7.01.7.01.0.001.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	25.359.000,00	25.239.000,00	120.000,00	99,53	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.542.000,00	1.482.000,00	60.000,00	96,11	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.	BELANJA OPERASI	1.542.000,00	1.482.000,00	60.000,00	96,11	
7.01.7.01.0.001.2.03.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.542.000,00	1.482.000,00	60.000,00	96,11	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.817.000,00	23.757.000,00	60.000,00	99,75	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.	BELANJA OPERASI	23.817.000,00	23.757.000,00	60.000,00	99,75	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0 1.	Belanja Pegawai	22.275.000,00	22.275.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.03.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	1.542.000,00	1.482.000,00	60.000,00	96,11	
7.01.7.01.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	405.817.664,00	394.999.244,00	10.818.420,00	97,33	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.793.000,00	15.793.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.	BELANJA OPERASI	15.793.000,00	15.793.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.793.000,00	15.793.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	113.204.064,00	113.194.700,00	9.364,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.	BELANJA OPERASI	113.204.064,00	113.194.700,00	9.364,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	113.204.064,00	113.194.700,00	9.364,00	99,99	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.664.800,00	3.650.000,00	14.800,00	99,60	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.2.	BELANJA MODAL	3.664.800,00	3.650.000,00	14.800,00	99,60	
7.01.7.01.0.001.2.06.03.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.664.800,00	3.650.000,00	14.800,00	99,60	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	91.513.300,00	84.022.000,00	7.491.300,00	91,81	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.	BELANJA OPERASI	91.513.300,00	84.022.000,00	7.491.300,00	91,81	
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	91.513.300,00	84.022.000,00	7.491.300,00	91,81	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.076.500,00	46.731.300,00	345.200,00	99,27	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.	BELANJA OPERASI	47.076.500,00	46.731.300,00	345.200,00	99,27	
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	47.076.500,00	46.731.300,00	345.200,00	99,27	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.216.000,00	7.712.000,00	1.504.000,00	83,68	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.	BELANJA OPERASI	9.216.000,00	7.712.000,00	1.504.000,00	83,68	
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	7.712.000,00	1.504.000,00	83,68	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	125.350.000,00	123.896.244,00	1.453.756,00	98,84	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.	BELANJA OPERASI	125.350.000,00	123.896.244,00	1.453.756,00	98,84	
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	125.350.000,00	123.896.244,00	1.453.756,00	98,84	
7.01.7.01.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	44.313.200,00	44.090.062,00	223.138,00	99,50	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	44.313.200,00	44.090.062,00	223.138,00	99,50	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.	BELANJA MODAL	44.313.200,00	44.090.062,00	223.138,00	99,50	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.266.200,00	34.050.000,00	216.200,00	99,37	
7.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.0 5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.047.000,00	10.040.062,00	6.938,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.263.496.240,00	2.250.019.291,00	13.476.949,00	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.510.000,00	3.507.500,00	2.500,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	3.507.500,00	2.500,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.507.500,00	2.500,00	99,93	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	74.550.000,00	73.045.191,00	1.504.809,00	97,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.	BELANJA OPERASI	74.550.000,00	73.045.191,00	1.504.809,00	97,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	74.550.000,00	73.045.191,00	1.504.809,00	97,98	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.165.436.240,00	2.153.466.600,00	11.969.640,00	99,45	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.165.436.240,00	2.153.466.600,00	11.969.640,00	99,45	
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.165.436.240,00	2.153.466.600,00	11.969.640,00	99,45	
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.845.000,00	48.684.722,00	160.278,00	99,67	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	46.405.000,00	46.244.722,00	160.278,00	99,65	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.	BELANJA OPERASI	46.405.000,00	46.244.722,00	160.278,00	99,65	
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	46.405.000,00	46.244.722,00	160.278,00	99,65	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.	BELANJA OPERASI	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.429.500,00	35.427.900,00	1.600,00	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.546.900,00	5.546.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.546.900,00	5.546.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.	BELANJA OPERASI	5.546.900,00	5.546.900,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	5.546.900,00	5.546.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.002.2.04.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	29.882.600,00	29.881.000,00	1.600,00	99,99	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAPKAN	29.882.600,00	29.881.000,00	1.600,00	99,99	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.	BELANJA OPERASI	29.882.600,00	29.881.000,00	1.600,00	99,99	
7.01.7.01.0.002.2.04.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	29.882.600,00	29.881.000,00	1.600,00	99,99	
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.287.866.000,00	1.282.199.100,00	5.666.900,00	99,56	
7.01.7.01.0.003.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.201.866.000,00	1.196.305.600,00	5.560.400,00	99,54	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	26.894.400,00	26.886.000,00	8.400,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.	BELANJA OPERASI	26.894.400,00	26.886.000,00	8.400,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	26.894.400,00	26.886.000,00	8.400,00	99,97	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.	BELANJA MODAL	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.0 4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	32.448.000,00	27.040.000,00	5.408.000,00	83,33	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.	BELANJA OPERASI	32.448.000,00	27.040.000,00	5.408.000,00	83,33	
7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	32.448.000,00	27.040.000,00	5.408.000,00	83,33	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.	EVALUASI KELURAHAN	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.	BELANJA OPERASI	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.003.2.02.04.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.523.600,00	2.379.600,00	144.000,00	94,29	
7.01.7.01.0.003.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	86.000.000,00	85.893.500,00	106.500,00	99,88	
7.01.7.01.0.003.2.03.03.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	86.000.000,00	85.893.500,00	106.500,00	99,88	
7.01.7.01.0.003.2.03.03.5.1.	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	85.893.500,00	106.500,00	99,88	
7.01.7.01.0.003.2.03.03.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	85.893.500,00	106.500,00	99,88	
7.01.7.01.0.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	93.164.800,00	6.835.200,00	93,16	
7.01.7.01.0.004.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	93.164.800,00	6.835.200,00	93,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.000.000,00	93.164.800,00	6.835.200,00	93,16	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.164.800,00	6.835.200,00	93,16	
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.0 2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.164.800,00	6.835.200,00	93,16	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.869.637.137,00)	(10.471.023.827,00)	(398.613.310,00)	96,33	
	JUMLAH BELANJA	10.869.637.137,00	10.471.023.827,00	398.613.310,00	96,33	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.869.637.137,00)	(10.471.023.827,00)	(398.613.310,00)	96,33	



KOTA DUMAI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	861.388.936.435,00	818.149.392.290,98	263.722.174.751,00	220.962.954.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	316.280.963.462,00	289.421.662.268,00	43.154.545.526,00	35.655.846.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	316.280.963.462,00	289.421.662.268,00	43.154.545.526,00	35.655.846.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.322.761.076,00	236.362.520.467,00	1.304.374.878,00	1.290.797.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.068.549.657,00	2.915.991.203,00	72.548.897,00	71.772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.289.159.787,00	1.247.273.099,00	61.213.000,00	60.472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	365.309.453,00	353.686.487,00	11.335.897,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.414.080.417,00	1.315.031.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.735.936.264,00	229.982.413.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	246.360.432.735,00	229.608.015.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	375.503.529,00	374.398.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	752.142.407,00	749.548.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	752.142.407,00	749.548.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	942.315.596,00	920.922.197,00	781.825.981,00	769.285.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.638.576,00	380.701.500,00	781.825.981,00	769.285.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.432.000,00	83.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.155.500,00	84.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.205.520,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.884.000,00	368.670.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.703.710.952,00	1.673.854.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.879.672,00	400.222.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.218.000,00	63.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.613.280,00	1.210.414.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.106.200,00	119.790.000,00	450.000.000,00	449.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.106.200,00	104.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	450.000.000,00	449.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	62.958.202.386,00	53.059.141.801,00	41.850.170.648,00	34.365.049.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.304.356.631,00	46.124.393.088,00	22.016.546.752,00	19.781.605.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	528.753.900,00	512.420.000,00	2.258.211.100,00	2.235.412.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	346.586.522,00	340.431.821,00	4.036.795.152,00	3.872.048.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	377.160.000,00	377.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	164.000.000,00	163.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	159.220.000,00	159.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	30.000.000,00	30.000.000,00	4.625.000.000,00	4.565.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	290.967.533,00	290.958.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	247.458.726,00	246.772.702,00	6.963.200,00	6.963.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14.024.800.000,00	12.114.920.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	105.117.250,00	104.895.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	320.000.000,00	317.150.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.191.672.700,00	31.947.871.800,00	10.553.197.300,00	8.565.052.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.290.205.705,00	6.001.184.333,00	18.078.162.696,00	12.829.555.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	91.453.683,00	91.255.300,00	908.218.171,00	896.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	608.022.700,00	608.020.700,00	2.514.875.000,00	2.514.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.09.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	924.237.000,00	924.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.330.695,00	17.250.000,00	7.461.289.325,00	7.460.550.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	25.000.000,00	25.000.000,00	1.064.410.000,00	1.033.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	110.544.480,00	109.974.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	45.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.337.600.000,00	4.971.539.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.227.347,00	107.457.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.913.026.800,00	0,00	5.205.133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.442.498.900,00	762.265.632,00	1.307.576.200,00	1.306.003.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	15.000.000,00	15.000.000,00	233.162.200,00	233.162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	68.819.800,00	68.819.800,00	749.414.000,00	749.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.07.	Pengadaan Mebel PAUD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.12.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	30.000.000,00	30.000.000,00	325.000.000,00	323.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	396.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	175.000.000,00	169.029.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	65.979.100,00	65.416.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.661.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.00.01.0000.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	921.141.150,00	171.298.748,00	447.885.000,00	447.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .04.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	48.000.000,00	48.000.000,00	447.885.000,00	447.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	125.941.150,00	123.298.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0 .00.01.0000.02.2 .04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	747.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	399.054.733.442,00	397.394.867.300,90	59.050.560.542,00	50.228.450.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	399.054.733.442,00	397.394.867.300,90	59.050.560.542,00	50.228.450.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	297.328.989.560,00	304.417.373.998,00	17.706.185.795,00	15.715.229.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.666.244,00	144.157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.754.104,00	59.450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.804.928,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	904.928,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.765.756,00	24.579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	26.329.856,00	22.477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.689.424,00	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.417.248,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.861.111.905,00	81.797.086.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.791.511.905,00	81.727.486.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	104.000.000,00	97.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	89.000.000,00	83.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.03.0 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.05 :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	605.733.832,00	563.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	296.637.400,00	293.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	165.013.824,00	146.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.05.0 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.082.608,00	123.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.00.01.01.2.06 :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.540.219.123,00	1.485.543.968,00	795.245.879,00	786.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.789.900,00	18.592.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	524.322.500,00	504.249.235,00	795.245.879,00	786.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.142.000,00	17.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.395.000,00	56.928.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.995.723,00	73.879.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.452.000,00	18.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	764.768.000,00	753.262.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.06.1 1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.354.000,00	43.287.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	434.055.448,00	418.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	434.055.448,00	418.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.341.347.108,00	22.317.099.007,00	100.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.999.000.000,00	4.576.144.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	741.673.700,00	582.218.500,00	100.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.600.673.408,00	17.158.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.285.506.296,00	1.155.582.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.560.000,00	32.954.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	902.031.000,00	773.568.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.915.296,00	349.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.10 :	Peningkatan Pelayanan BLUD	178.418.405.052,00	196.856.764.657,00	16.376.884.468,00	14.410.845.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.01.2.10.0 1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	178.418.405.052,00	196.856.764.657,00	16.376.884.468,00	14.410.845.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02. :	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.552.777.139,00	83.795.393.534,90	41.344.374.747,00	34.513.220.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01 :	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.850.178.562,00	33.432.687.572,90	39.502.453.067,00	32.776.678.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 1.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	0,00	12.664.552.572,00	7.780.237.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 8.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	751.226.800,00	749.251.000,00	199.950.000,00	199.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.0 9.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.025.499.583,00	1.024.244.583,00	470.000.000,00	469.682.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 0.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.618.053.250,00	1.602.413.869,90	200.000.000,00	199.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 3.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	1.420.851.000,00	1.417.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	142.328.000,00	138.032.998,00	24.204.029.695,00	22.371.608.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 5.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	120.799.480,00	87.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 6.	Pengadaan Obat, Vaksin	10.536.379.543,00	10.334.116.241,00	343.069.800,00	337.685.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.1 7.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	19.114.988.806,00	18.957.889.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.2 0.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	460.420.000,00	458.999.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.01.2 1.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	80.483.100,00	80.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.235.730.953,00	40.618.914.668,00	1.819.932.880,00	1.721.291.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	437.343.000,00	373.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	142.484.450,00	104.100.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.117.250,00	91.525.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	223.317.500,00	211.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	334.325.000,00	289.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	113.927.000,00	97.572.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	88.265.500,00	83.465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.175.000,00	14.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.0 9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 0.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	140.578.500,00	116.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	158.970.000,00	118.978.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	156.350.000,00	131.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.344.738.899,00	7.032.790.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	762.529.390,00	704.221.250,00	1.430.234.000,00	1.338.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	58.894.400,00	44.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	559.597.370,00	522.700.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.1 8.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	318.145.720,00	298.547.976,00	2.198.880,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 0.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	522.366.590,00	446.583.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 5.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	691.219.086,00	583.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.2 6.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.235.420.962,00	26.579.359.029,00	295.000.000,00	294.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 0.	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	38.500.000,00	33.452.500,00	92.500.000,00	86.397.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 2.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.333.484.736,00	2.308.368.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 3.	Operasional Pelayanan Puskesmas	466.015.900,00	283.711.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 5.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	743.764.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.02.3 9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	227.700.000,00	134.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	230.951.756,00	177.739.068,00	21.988.800,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.03.0 1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	230.951.756,00	177.739.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.03.0 3.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	0,00	0,00	21.988.800,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.235.915.868,00	9.566.052.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	35.398.058,00	34.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 2.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.980.000,00	78.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 3.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9.866.397.810,00	9.400.932.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.02.2.04.0 4.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	255.140.000,00	51.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.922.476.262,00	8.014.524.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.01.0 1.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.688.188.862,00	7.801.205.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.02.0 2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.639.105.462,00	7.753.355.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.02.0 3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	49.083.400,00	47.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.787.400,00	190.819.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.03.2.03.0 1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.787.400,00	190.819.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	970.681.481,00	903.894.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	76.977.000,00	68.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	76.977.000,00	68.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.423.309,00	146.587.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.423.309,00	146.587.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	254.053.756,00	248.120.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	254.053.756,00	248.120.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	164.112.936,00	161.070.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.05.0 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	164.112.936,00	161.070.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	323.114.480,00	279.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.04.2.06.0 1.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	323.114.480,00	279.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	279.809.000,00	263.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.029.200,00	180.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.05.2.01.0 1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	193.029.200,00	180.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.779.800,00	83.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0 .00.01.05.2.03.0 1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	86.779.800,00	83.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88.279.669.144,00	80.156.674.389,08	151.527.391.933,00	125.447.029.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88.279.669.144,00	80.156.674.389,08	151.527.391.933,00	125.447.029.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.949.932.875,00	11.694.898.261,00	5.552.174.520,00	5.507.283.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.01 :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.545.725,00	102.661.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.158.440,00	33.857.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.948.575,00	10.144.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.948.575,00	10.223.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.948.575,00	10.159.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.948.575,00	10.158.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.948.575,00	10.121.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.644.410,00	17.995.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.02 :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.110.422.250,00	7.371.612.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.095.352.995,00	7.357.579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.069.255,00	14.033.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.03 :	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.403.510,00	25.020.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.511.755,00	9.250.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.03.0 3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.03.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.491.755,00	7.369.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.05.0 1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.887.001,00	633.108.610,00	65.000.000,00	64.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.690.600,00	13.864.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.097.715,00	156.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.126.400,00	43.452.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.585.231,00	65.343.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000,00	12.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.788.000,00	280.439.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.06.1 1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.399.055,00	60.399.055,00	65.000.000,00	64.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.07 :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.000,00	2.700.000,00	5.487.174.520,00	5.442.681.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.07.0 3.	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	5.300.000.000,00	5.259.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	2.700.000,00	187.174.520,00	183.624.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.08 :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.737.445,00	1.262.432.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.957.445,00	329.211.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.780.000,00	933.220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09 :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.664.436.944,00	2.286.362.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	387.380.000,00	278.177.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.212.800,00	199.890.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.875.944.144,00	1.794.305.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.900.000,00	13.988.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.178.413.255,00	33.422.462.382,00	11.624.585.406,00	7.528.913.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.02.2.01 .	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.111.173.255,00	32.367.522.382,00	11.624.585.406,00	7.528.913.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.0 3.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	791.351.754,00	740.393.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.1 0.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	62.320.000,00	61.010.929,00	988.566.609,00	942.834.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.1 3.	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	506.981.203,00	506.277.000,00	10.636.018.797,00	6.586.078.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.2 4.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	4.537.755.266,00	4.311.040.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.2 6.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	895.974.532,00	721.695.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.01.4 6.	Normalisasi/Restorasi Sungai	26.316.790.500,00	26.027.104.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.02.2.02 .	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.067.240.000,00	1.054.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.02.2.02.1 4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.067.240.000,00	1.054.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	493.304.700,00	481.754.073,00	11.896.077.300,00	11.708.169.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.03.2.01 :	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	493.304.700,00	481.754.073,00	11.896.077.300,00	11.708.169.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.03.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	402.584.700,00	391.034.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.03.2.01.0 7.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	49.920.000,00	49.920.000,00	11.896.077.300,00	11.708.169.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.03.2.01.1 6.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	165.489.400,00	30.410.400,00	5.334.510.600,00	5.233.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.04.2.01 :	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	165.489.400,00	30.410.400,00	5.334.510.600,00	5.233.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.04.2.01.0 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	132.529.400,00	13.930.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.04.2.01.0 5.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	32.960.000,00	16.480.000,00	5.334.510.600,00	5.233.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.05.2.01 :	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.05.2.01.0 6.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.803.838.000,00	4.756.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.982.558.574,00	2.407.070.000,00	12.240.441.813,00	9.576.347.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.05.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.982.558.574,00	2.407.070.000,00	12.240.441.813,00	9.576.347.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	49.440.000,00	49.440.000,00	12.153.441.813,00	9.501.722.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.933.118.574,00	2.357.630.000,00	87.000.000,00	74.625.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.514.428.043,00	8.273.715.101,08	54.170.053.332,00	45.853.890.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12.514.428.043,00	8.273.715.101,08	54.170.053.332,00	45.853.890.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.08.2.01.1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	179.421.100,00	179.421.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11.454.825.643,00	7.230.894.401,08	54.170.053.332,00	45.853.890.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.08.2.01.02.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	880.181.300,00	863.399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	229.740.000,00	216.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	229.740.000,00	216.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.09.2.01.03.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	229.740.000,00	216.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.512.463.497,00	17.742.759.185,00	50.709.548.962,00	40.038.465.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	18.512.463.497,00	17.742.759.185,00	50.709.548.962,00	40.038.465.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.0 4.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	205.315.225,00	106.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.0 5.	Pembangunan Jalan	3.671.692.000,00	3.479.655.655,00	49.154.650.962,00	38.534.665.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.0 9.	Rehabilitasi Jalan	10.804.075.136,00	10.587.168.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.1 2.	Pembangunan Jembatan	589.566.000,00	588.057.710,00	1.554.898.000,00	1.503.800.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.10.2.01.1 8.	Rehabilitasi Jembatan	3.241.815.136,00	2.981.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	43.357.600,00	43.284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	43.357.600,00	43.284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.01.0 4.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.614.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2 .10.01.11.2.01.0 5.	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	39.743.600,00	39.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00. 2.10.01.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.406.143.200,00	1.087.618.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	256.826.000,00	135.539.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	128.277.300,00	57.576.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	128.548.700,00	77.962.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	137.161.200,00	117.412.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	137.161.200,00	117.412.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1.012.156.000,00	834.666.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	93.392.300,00	59.072.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	164.142.900,00	127.123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.2.10.01.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	754.620.800,00	648.470.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.674.046.235,00	25.884.827.443,00	3.646.880.450,00	3.379.872.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.674.046.235,00	25.884.827.443,00	3.646.880.450,00	3.379.872.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.030.591.539,00	4.671.779.502,00	111.631.750,00	111.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.920.703,00	5.793.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.749.818,00	1.738.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.170.885,00	4.054.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.675.908.621,00	3.384.738.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.673.860.071,00	3.382.753.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.048.550,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.536.464,00	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.536.464,00	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.097.033,00	428.716.059,00	1.653.750,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.782.100,00	3.409.000,00	1.653.750,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.158.900,00	59.351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.482.100,00	13.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.726.973,00	15.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.522.350,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.424.610,00	332.306.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.040.000,00	92.240.000,00	109.978.000,00	109.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	39.694.375,00	39.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	70.283.625,00	70.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.040.000,00	92.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.468.718,00	562.498.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.585.000,00	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.370.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.513.718,00	550.740.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.620.000,00	196.323.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.860.000,00	141.832.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000,00	44.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.190.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	450.000.000,00	98.570.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.570.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.570.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.01.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.893.049.900,00	17.874.662.679,00	2.565.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	249.372.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.02.	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	250.000.000,00	249.372.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	111.850.200,00	101.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.065.100,00	92.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	11.785.100,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	17.531.199.700,00	17.523.919.994,00	2.565.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100.000.000,00	98.775.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	216.798.000,00	215.113.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.07.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.08.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	17.214.336.600,00	17.210.031.150,00	2.565.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.499.349.700,00	2.499.275.377,00	1.280.300,00	1.280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.499.349.700,00	2.499.275.377,00	1.280.300,00	1.280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.01.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.499.349.700,00	2.499.275.377,00	1.280.300,00	1.280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	801.055.096,00	740.538.891,00	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	801.055.096,00	740.538.891,00	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	264.000.000,00	243.652.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	513.395.096,00	473.231.298,00	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	23.660.000,00	23.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.868.950.205,00	18.981.509.181,00	6.338.796.300,00	6.247.755.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.564.215.428,00	8.758.432.943,00	39.149.600,00	37.216.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.101.771.624,00	8.296.005.039,00	39.149.600,00	37.216.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.829.400,00	17.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.992.900,00	3.891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.943.200,00	2.943.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.922.500,00	1.922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.116.300,00	4.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.632.694.028,00	5.871.897.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.628.186.328,00	5.867.389.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.388.800,00	3.388.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.118.900,00	1.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.714.600,00	3.714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.834.500,00	1.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.880.100,00	1.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.235.596,00	321.811.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.758.800,00	6.758.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.009.600,00	60.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.290.696,00	74.030.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.072.500,00	19.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.064.000,00	138.900.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	39.149.600,00	37.216.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	39.149.600,00	37.216.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.579.928.000,00	1.543.285.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.115.000,00	92.868.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.560.000,00	102.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.342.853.000,00	1.342.852.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.270.000,00	493.467.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.980.000,00	282.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.290.000,00	19.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000,00	192.093.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	462.443.804,00	462.427.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	333.574.804,00	333.558.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	282.060.000,00	282.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.458.900,00	35.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.055.904,00	16.055.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	128.869.000,00	128.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100.869.000,00	100.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.116.007.943,00	6.292.407.831,00	6.254.741.800,00	6.165.692.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.074.481.141,00	4.207.096.656,00	3.522.341.800,00	3.433.292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.02 :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.631.971.193,00	3.319.891.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.605.010.393,00	3.293.329.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.960.800,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	19.961.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.06 :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.716.548,00	194.817.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.505.148,00	42.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.411.900,00	23.899.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.898.500,00	12.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.260.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.641.000,00	111.633.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.165.000,00	151.932.570,00	3.499.620.000,00	3.410.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.07.0 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.765.000,00	0,00	2.938.920.000,00	2.908.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.07.0 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	196.400.000,00	151.932.570,00	560.700.000,00	502.430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.238.400,00	471.449.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.220.000,00	58.436.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.040.000,00	71.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.468.400,00	338.463.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.390.000,00	69.005.500,00	22.721.800,00	22.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.390.000,00	69.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	22.721.800,00	22.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.041.526.802,00	2.085.311.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.840.932.396,00	645.825.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.02.0 3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.840.932.396,00	645.825.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.200.594.406,00	1.439.486.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.03.0 2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.192.571.882,00	1.157.422.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.03.2.03.0 5.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.008.022.524,00	282.063.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	0,00	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0 .00.02.04.2.01.0 6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	2.732.400.000,00	2.732.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.188.726.834,00	3.930.668.407,00	44.904.900,00	44.846.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.188.726.834,00	3.930.668.407,00	44.904.900,00	44.846.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.722.700,00	338.772.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.443.300,00	6.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.427.900,00	49.478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.950.000,00	22.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.178.900,00	29.514.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.822.600,00	227.386.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	44.904.900,00	44.846.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	15.647.500,00	15.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	29.257.400,00	29.199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01. 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.861.500,00	402.361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.861.500,00	393.361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01. 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.838.700,00	109.622.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.679.600,00	59.631.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.049.100,00	32.616.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.8.01.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.110.000,00	17.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.230.573.947,00	6.309.851.709,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.230.573.947,00	6.309.851.709,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.830.889.945,00	4.584.600.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.900.000,00	18.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.100.000,00	1.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.100.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.300.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.555.378.867,00	3.369.581.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.503.818.867,00	3.318.121.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.460.000,00	49.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.100.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.910.258,00	283.333.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.972.550,00	3.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.800.465,00	42.938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.908.050,00	8.842.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.217.500,00	21.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.008.308,00	7.702.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.408.385,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.595.000,00	191.291.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.490.440,00	735.238.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.345.000,00	104.930.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.945.440,00	629.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.985.380,00	159.930.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.444.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.855.380,00	98.908.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.600.000,00	22.578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	243.143.040,00	242.556.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	243.143.040,00	242.556.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.02.2 .03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	221.598.720,00	221.163.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.02.2 .03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.544.320,00	21.393.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.3.2.13.01.0000.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	4.699.507,00	4.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.699.507,00	4.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.03.2.01.01.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.699.507,00	4.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.442.608.095,00	790.537.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.442.608.095,00	790.537.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan	19.684.000,00	19.386.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang	3.210.210,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.199.507,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	131.511.107,00	131.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.180.082.557,00	528.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.199.507,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.04.2 .01.12.	Pemberian Layanan Rujukan	101.721.207,00	101.477.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	128.200.000,00	126.531.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 5.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	28.200.000,00	26.998.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.03.	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	28.200.000,00	26.998.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 5.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.533.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.533.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	372.081.200,00	353.401.870,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 6.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	222.921.200,00	207.271.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .01.01.	Penyediaan Makanan	91.069.700,00	90.306.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .01.02.	Penyediaan Sandang	41.851.500,00	33.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	90.000.000,00	83.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00. 2.13.01.0000.0 6.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	149.160.000,00	146.130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.06.2 .02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	149.160.000,00	146.130.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	208.952.160,00	207.736.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2.13.01.0000.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	208.952.160,00	207.736.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.07.2 .01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11.660.400,00	10.951.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.2 .13.01.0000.07.2 .01.03.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	197.291.760,00	196.785.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	153.163.195.991,00	143.304.376.683,43	19.345.186.591,00	18.961.601.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.451.042.839,00	6.208.005.219,00	163.315.080,00	160.879.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.	DINAS TENAGA KERJA	6.451.042.839,00	6.208.005.219,00	163.315.080,00	160.879.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.129.691.564,00	4.894.147.462,00	109.884.400,00	108.047.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.168.335,00	4.746.917,00	2.565.400,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.168.335,00	4.746.917,00	2.565.400,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.758.305.564,00	3.548.691.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.750.879.564,00	3.542.732.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.426.000,00	5.959.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.776.805,00	261.976.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.975.000,00	9.939.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.505.375,00	69.985.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.787.400,00	31.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.837.030,00	10.308.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.930.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.742.000,00	134.737.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	57.328.600,00	56.557.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	25.000.000,00	24.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	32.328.600,00	31.569.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.031.860,00	742.433.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.726.400,00	108.410.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641.305.460,00	634.023.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.409.000,00	306.299.167,00	49.990.400,00	49.990.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.770.000,00	172.654.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.340.000,00	47.614.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.299.000,00	86.029.400,00	49.990.400,00	49.990.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	485.209.478,00	482.087.398,00	49.949.080,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.00.02.0000.01.3.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	465.209.478,00	462.437.398,00	49.949.080,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	465.209.478,00	462.437.398,00	49.949.080,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.01.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.03.2.02.01.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.05.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	716.141.797,00	711.784.859,00	3.481.600,00	3.481.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.05.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	666.141.797,00	662.034.859,00	3.481.600,00	3.481.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.01.05.	Perluasan Kesempatan Kerja	666.141.797,00	662.034.859,00	3.481.600,00	3.481.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.01.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.000.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	120.000.000,00	119.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	119.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.02.0000.05.2.01.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	120.000.000,00	119.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.832.285.231,00	6.501.885.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.832.285.231,00	6.501.885.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.857.789.681,00	5.611.923.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.721.851,00	51.209.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.509.124,00	18.398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.639.739,00	4.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.801.539,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.029.608,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.202.394,00	1.181.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.213.947,00	15.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.325.500,00	7.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.455.770.222,00	4.261.651.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.445.616.222,00	4.251.510.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.154.000,00	10.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.215.608,00	407.248.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.591.200,00	6.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.985.550,00	90.971.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.076.200,00	11.076.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.441.900,00	20.327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.747.388,00	47.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.728.000,00	7.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.645.370,00	223.548.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.468.000,00	776.257.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	198.900,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.669.100,00	79.487.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.600.000,00	696.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.170.000,00	107.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.090.000,00	82.085.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.340.000,00	13.287.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	277.799.900,00	271.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	67.267.400,00	66.661.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	64.223.000,00	64.039.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	3.044.400,00	2.622.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.426.200,00	118.023.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	122.426.200,00	118.023.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.106.300,00	86.352.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.106.300,00	86.352.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	438.133.950,00	368.537.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.100.000,00	71.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.100.000,00	71.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	349.044.000,00	280.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	349.044.000,00	280.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.989.950,00	16.989.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.989.950,00	16.989.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16.898.800,00	16.570.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.898.800,00	16.570.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.05.2 .01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.822.400,00	8.793.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.05.2 .01.02.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.076.400,00	7.777.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.999.400,00	49.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 6.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.389.000,00	10.385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.06.2 .01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.389.000,00	10.385.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 6.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.610.400,00	39.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.06.2 .02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.235.400,00	13.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.06.2 .02.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.267.400,00	8.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.06.2 .02.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.107.600,00	16.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	190.663.500,00	184.185.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 7.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	78.350.000,00	76.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.07.2 .01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	78.350.000,00	76.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 7.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.007.500,00	8.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.07.2 .02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.007.500,00	8.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 0.00.01.0000.0 7.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	102.306.000,00	99.202.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.0.00.0 .00.01.0000.07.2 .03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000,00	99.202.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.972.362.905,00	13.294.630.971,00	563.028.364,00	556.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.972.362.905,00	13.294.630.971,00	563.028.364,00	556.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.979.772.787,00	10.499.379.602,00	563.028.364,00	556.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.690.400,00	91.690.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.690.400,00	81.690.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.596.233.596,00	8.126.710.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.570.023.736,00	8.100.550.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.209.860,00	26.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.900.000,00	14.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14.900.000,00	14.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.656.641,00	780.683.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.988.300,00	20.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.651.641,00	78.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.786.200,00	19.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.554.500,00	74.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.694.000,00	17.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.982.000,00	549.977.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.432.600,00	67.164.000,00	563.028.364,00	556.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	61.000.000,00	55.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.432.600,00	67.164.000,00	117.022.100,00	116.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	385.006.264,00	384.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.999.550,00	838.399.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.639.550,00	225.491.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	613.360.000,00	608.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.260.000,00	540.752.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.400.000,00	315.336.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.860.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.000.000,00	134.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.789.158.918,00	2.591.820.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0.00.02.0000.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.482.013.918,00	1.318.585.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .01.02.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.202.075.000,00	1.170.673.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .01.04.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	279.938.918,00	147.911.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.257.145.000,00	1.229.836.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .04.01.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	260.575.000,00	247.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	996.570.000,00	982.246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.03.2.4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	103.431.200,00	103.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.03.2.4.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	103.431.200,00	103.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .01.01.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	103.431.200,00	103.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	99.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.5.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.27.0 .00.02.0000.05.2 .01.01.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000,00	99.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100.000.000,00	99.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.1 0.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000,00	99.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.04.0.00.0 .00.01.0000.10.2 .01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.329.708.773,00	20.506.217.338,00	5.317.192.100,00	5.161.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.329.708.773,00	20.506.217.338,00	5.317.192.100,00	5.161.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.980.566.573,00	9.621.989.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.847.755,00	65.615.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.051.105,00	22.017.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.998.500,00	14.986.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.996.650,00	11.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.811.600,00	11.746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.989.900,00	4.949.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.768.066.528,00	4.419.643.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.825.028,00	4.383.238.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.240.000,00	26.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.001.500,00	9.845.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	11.550.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	11.550.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.664.000,00	399.055.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	124.897.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.955.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.664.000,00	14.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	174.648.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.039.750,00	666.209.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.520.000,00	139.937.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.319.750,00	498.071.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.061.948.540,00	4.059.914.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.026.948.540,00	4.025.104.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	34.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	231.171.820,00	227.709.640,00	11.521.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	231.171.820,00	227.709.640,00	11.521.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	192.420.000,00	192.032.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.03.2.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	28.751.820,00	25.676.881,00	11.521.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.04.2.01.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.343.872.350,00	4.964.967.613,00	3.103.956.100,00	2.970.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.04.2.01.04.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.343.872.350,00	4.964.967.613,00	3.103.956.100,00	2.970.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.343.872.350,00	4.964.967.613,00	3.103.956.100,00	2.970.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.08.2.01.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.575.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.08.2.01.02.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000,00	39.575.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.575.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.09.2.01.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000,00	39.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000,00	39.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.10.2.01.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000,00	29.405.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.405.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.405.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.01.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.664.098.030,00	5.582.636.854,00	2.201.715.000,00	2.180.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	5.664.098.030,00	5.582.636.854,00	2.201.715.000,00	2.180.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.664.098.030,00	5.582.636.854,00	1.715.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.00.02.0000.11.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.179.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.094.429.736,00	6.746.400.521,00	568.600.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.094.429.736,00	6.746.400.521,00	568.600.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.094.429.736,00	6.746.400.521,00	568.600.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.952.050,00	15.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.084.150,00	9.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.790.150,00	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.459.800,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.617.950,00	2.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.490.986.566,00	4.151.648.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.480.149.816,00	4.140.834.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.742.650,00	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.094.100,00	7.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.555.900,00	21.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.555.900,00	21.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.593.845.970,00	1.587.416.014,00	568.600.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.313.800,00	31.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.116.668.460,00	1.114.562.200,00	568.600.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.360.900,00	61.916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.117.000,00	25.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.849.810,00	59.773.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000,00	14.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.936.000,00	279.926.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.909.250,00	791.127.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.409.250,00	120.627.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.00.01.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.180.000,00	178.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.690.000,00	111.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.490.000,00	67.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	510.000.000,00	507.505.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	510.000.000,00	507.505.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.000.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	500.000.000,00	497.635.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.1.06.0.00.2.13.01.0000.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	497.635.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.1.06.0.00.2 .13.01.0000.05.2 .01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500.000.000,00	497.635.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.622.353.015,00	6.843.680.878,00	757.800.000,00	744.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.622.353.015,00	6.843.680.878,00	757.800.000,00	744.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.029.661.565,00	3.723.806.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.799.500,00	12.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.799.500,00	12.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.247.518.152,00	2.977.238.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.166.678.252,00	2.896.398.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.839.900,00	50.839.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.692.050,00	249.184.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.907.000,00	4.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.270.904,00	38.187.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.292.300,00	6.723.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.112.100,00	45.832.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	4.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.109.746,00	137.107.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.033.300,00	298.151.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.463.300,00	88.151.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.400.000,00	209.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.028.563,00	166.841.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.628.563,00	139.471.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.400.000,00	27.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	300.439.950,00	296.468.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	204.119.950,00	202.419.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	32.119.150,00	31.954.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.09.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	172.000.800,00	170.464.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96.320.000,00	94.048.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.11.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.13.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	93.600.000,00	91.328.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.115.571.500,00	1.993.606.298,00	757.800.000,00	744.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	713.995.000,00	713.678.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.01.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.02.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.04.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	67.470.000,00	67.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	294.840.000,00	294.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	283.500.000,00	283.183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.08.	Pengendalian Program KKBPK	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	425.100.000,00	424.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.03.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	266.700.000,00	266.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.04.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	855.726.500,00	734.377.898,00	757.800.000,00	744.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.197.800,00	25.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	446.849.300,00	329.174.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	366.677.000,00	363.603.000,00	757.800.000,00	744.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.002.400,00	16.467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.03.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.176.680.000,00	829.799.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.176.680.000,00	829.799.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.04.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.000.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.05.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.116.560.000,00	770.039.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.07.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.500.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.14.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	40.620.000,00	40.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	45.410.685.932,00	43.285.000.674,43	7.777.784.975,00	7.757.170.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.	DINAS PERHUBUNGAN	45.410.685.932,00	43.285.000.674,43	7.777.784.975,00	7.757.170.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.397.566.239,00	21.844.190.942,21	1.325.898.605,00	1.324.799.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.340.000,00	30.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.350.000,00	24.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.914.977.032,00	7.481.769.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.884.477.032,00	7.452.835.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.000.000,00	16.718.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.500.000,00	12.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.400.000,00	73.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.400.000,00	73.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.397.750,00	99.724.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000,00	26.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.397.750,00	72.751.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.670.122.608,00	1.664.171.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.862.800,00	69.781.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.994.026,00	184.849.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.788.000,00	94.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.039.782,00	249.934.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160.000.000,00	156.425.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	910.438.000,00	908.441.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.709.600,00	64.474.400,00	1.034.042.920,00	1.033.185.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	150.000.000,00	149.898.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.949.600,00	35.802.500,00	416.342.920,00	416.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00	29.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	200.000.000,00	199.855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.760.000,00	28.671.900,00	237.700.000,00	237.422.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.676.167.058,00	9.573.969.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.168.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769.642.280,00	762.620.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.899.356.778,00	8.805.349.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.860.452.191,00	2.856.222.771,21	291.855.685,00	291.613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.009.999.054,00	1.009.641.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	692.717.137,00	692.470.320,00	291.855.685,00	291.613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.157.736.000,00	1.154.111.262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.013.119.693,00	21.440.809.732,22	6.451.886.370,00	6.432.371.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	500.000.000,00	499.533.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .01.01.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	500.000.000,00	499.533.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.944.866.487,00	17.918.634.532,71	5.846.849.350,00	5.830.161.002,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .02.01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	344.071.000,00	343.862.920,01	900.000.000,00	885.000.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.264.691.453,00	3.259.392.461,76	1.433.853.000,00	1.432.224.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .02.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	303.000.000,00	302.500.130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .02.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	14.033.104.034,00	14.012.879.020,70	3.512.996.350,00	3.512.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.015.000.000,00	1.012.647.122,36	141.612.200,00	141.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .04.01.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	771.000.000,00	769.738.622,36	141.612.200,00	141.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	244.000.000,00	242.908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	559.538.942,00	550.736.881,15	463.424.820,00	460.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.01.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	463.424.820,00	460.933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70.134.834,00	62.721.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.04.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.004.108,00	54.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .05.07.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	434.400.000,00	433.377.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551.400.000,00	550.056.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .06.04.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	531.400.000,00	530.309.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .06.05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.0.2.2.07.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.855.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .07.01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100.000.000,00	99.855.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.0.2.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.292.314.264,00	759.345.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.292.314.264,00	759.345.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.02.0000.0.2.2.10.	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .10.02.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.872.955.589,00	10.569.724.940,00	478.853.304,00	478.300.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10.872.955.589,00	10.569.724.940,00	478.853.304,00	478.300.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.0.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.307.835.780,00	5.088.937.651,00	98.476.700,00	98.266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.416.000,00	53.415.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.979.500,00	5.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.129.500,00	4.129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.555.500,00	4.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.207.400,00	4.207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.869.300,00	26.869.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.674.800,00	7.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.073.339.681,00	3.884.659.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.459.381,00	3.786.405.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.388.300,00	54.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44.492.000,00	44.226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.768.100,00	26.720.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.768.100,00	26.720.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.578.000,00	151.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.578.000,00	98.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.000.000,00	52.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.608.999,00	333.604.526,00	1.366.400,00	1.366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.884.000,00	7.884.000,00	1.366.400,00	1.366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.729.400,00	49.927.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.548.900,00	51.471.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.437.200,00	22.437.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.009.499,00	201.885.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	97.110.300,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	97.110.300,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.175.000,00	507.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.450.000,00	204.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.800.000,00	299.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.950.000,00	131.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.520.000,00	94.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.430.000,00	27.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.362.598.748,00	2.358.110.170,00	72.346.004,00	72.050.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.362.598.748,00	2.358.110.170,00	72.346.004,00	72.050.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	308.613.045,00	307.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	414.982.380,00	414.338.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.06.	Pelayanan Informasi Publik	51.339.300,00	50.944.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.07.	Layanan Hubungan Media	1.415.380.000,00	1.414.329.428,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	47.400.000,00	46.859.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	120.632.423,00	120.401.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.02.2 .01.13.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.251.600,00	4.199.999,00	70.946.004,00	70.650.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.202.521.061,00	3.122.677.119,00	308.030.600,00	307.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 3.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.370.260.946,00	2.366.125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.523.250,00	9.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.360.737.696,00	2.357.123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21. 2.20.02.0000.0 3.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	832.260.115,00	756.551.319,00	308.030.600,00	307.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	217.010.000,00	216.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.02.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	224.000.000,00	223.660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	72.674.804,00	71.814.000,00	308.030.600,00	307.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	36.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	16.624.910,00	16.374.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	16.011.000,00	14.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	239.159.401,00	169.630.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.2 .20.02.0000.03.2 .02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10.780.000,00	10.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.215.465.411,00	7.235.794.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31. 0.00.02.0000.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	9.215.465.411,00	7.235.794.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31. 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.058.793.491,00	5.597.632.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31. 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.384.320,00	14.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.608.900,00	2.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.619.200,00	2.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.485.700,00	2.160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.484.200,00	2.022.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.186.320,00	6.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.593.457.791,00	4.180.749.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.542.907.891,00	4.131.803.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.315.100,00	4.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.234.800,00	44.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.284.320,00	26.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.284.320,00	26.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.020.120,00	352.886.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.243.200,00	9.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.712.060,00	62.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.713.100,00	13.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.408.360,00	19.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.062.400,00	8.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.881.000,00	238.691.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.380.940,00	833.281.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.315.000,00	140.412.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.725.940,00	690.569.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.266.000,00	189.128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.716.000,00	84.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.300.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.720.000,00	40.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.219.300,00	96.505.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.219.300,00	96.505.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.219.300,00	96.505.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.056.452.620,00	1.541.656.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0.00.02.0000.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.056.452.620,00	1.541.656.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.07.2 .01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.006.452.620,00	1.491.716.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.0 .00.02.0000.07.2 .01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50.000.000,00	49.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.343.926.268,00	7.845.308.438,00	3.277.943.500,00	3.104.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2.17.02.0000.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.343.926.268,00	7.845.308.438,00	3.277.943.500,00	3.104.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.609.898.568,00	7.267.250.622,00	3.277.943.500,00	3.104.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.228.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.381.500,00	2.347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.340.600,00	2.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.859.400,00	1.757.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	915.500,00	848.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.029.400,00	985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.527.300,00	2.520.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.946.300,00	2.475.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.730.104.613,00	5.582.907.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.723.076.713,00	5.576.253.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.990.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.029.200,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.004.400,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.004.300,00	1.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.663.100,00	7.515.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.988.100,00	1.837.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.099.400,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.985.100,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.590.500,00	2.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.460.655,00	544.975.503,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.405.200,00	13.692.600,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.706.000,00	126.409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.739.600,00	33.630.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	29.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.353.555,00	58.730.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.362.000,00	3.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.894.300,00	279.782.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.323.200,00	206.105.910,00	3.277.455.500,00	3.104.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	947.487.400,00	863.260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	2.279.174.500,00	2.190.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.323.200,00	206.105.910,00	50.793.600,00	50.471.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.807.000,00	734.550.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	994.500,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.612.500,00	110.760.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.200.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.540.000,00	177.966.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.388.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.020.000,00	106.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.990.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	221.010.300,00	220.945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 2.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	221.010.300,00	220.945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.02.2 .02.01.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	201.000.300,00	200.935.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.02.2 .02.02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	21.269.800,00	21.269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 3.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21.269.800,00	21.269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.03.2 .01.02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	21.269.800,00	21.269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	60.029.500,00	53.435.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 4.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	60.029.500,00	53.435.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.04.2 .01.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.492.000,00	18.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.04.2 .01.02.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.04.2 .01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.087.500,00	16.513.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	431.718.100,00	282.407.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00. 2.17.02.0000.0 5.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	431.718.100,00	282.407.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.05.2 .01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	51.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.05.2 .01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300.673.000,00	213.477.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.0.00.2 .17.02.0000.05.2 .01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	79.295.100,00	68.930.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.231.043.478,00	7.881.585.820,00	39.820.500,00	39.820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26. 0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.231.043.478,00	7.881.585.820,00	39.820.500,00	39.820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26. 0.00.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.722.357.539,00	5.380.217.731,00	39.820.500,00	39.820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.746.600,00	3.746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.746.600,00	3.746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.641.495.060,00	3.366.416.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.638.578.160,00	3.363.499.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.916.900,00	2.916.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.759.450,00	517.684.951,00	11.810.700,00	11.810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.297.989,00	93.285.500,00	11.810.700,00	11.810.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.362.250,00	103.084.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.059.200,00	58.870.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.683.940,00	61.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.992.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.364.071,00	193.361.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.388.528.729,00	1.323.714.496,00	18.009.800,00	18.009.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.179.000,00	10.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.089.600,00	134.901.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.224.468,00	26.973.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.167.035.661,00	1.151.672.636,00	18.009.800,00	18.009.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.820.400,00	130.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.680.000,00	100.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.140.400,00	30.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.13.05.	2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.13.05.	13.467.300,00	13.467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	13.467.300,00	13.467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	920.485.987,00	914.865.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	920.485.987,00	914.865.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	770.485.987,00	764.865.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	770.485.987,00	764.865.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	1.588.199.952,00	1.586.502.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.588.199.952,00	1.586.502.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.486.815,00	260.802.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	262.486.815,00	260.802.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	248.615.955,00	248.602.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	248.615.955,00	248.602.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	132.478.000,00	130.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	132.478.000,00	130.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	132.478.000,00	130.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	132.478.000,00	130.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	77.230.000,00	75.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	55.248.000,00	55.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	72.957.000,00	71.996.710,00	66.142.368,00	64.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	72.957.000,00	71.996.710,00	66.142.368,00	64.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	72.957.000,00	71.996.710,00	66.142.368,00	64.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.957.000,00	71.996.710,00	66.142.368,00	64.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	31.215.000,00	30.509.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.2.16.2.21.2.20.02.0000.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.742.000,00	41.487.000,00	66.142.368,00	64.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.014.675.868,00	1.006.475.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.718.603.346,00	4.389.871.834,00	334.706.400,00	330.922.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.718.603.346,00	4.389.871.834,00	334.706.400,00	330.922.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.618.816.282,00	4.293.018.070,00	30.092.400,00	28.791.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.099.900,00	7.099.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.02.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	688.400,00	688.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.263.100,00	1.263.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	986.500,00	986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.289.900,00	3.289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.284.242,00	3.188.553.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.497.402.142,00	3.186.671.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.882.100,00	1.882.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.859.940,00	203.756.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.391.200,00	3.391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.719.300,00	65.719.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.497.200,00	6.497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.597.760,00	8.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.144.580,00	11.138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.709.900,00	103.657.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.660.000,00	66.659.600,00	30.092.400,00	28.791.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	30.092.400,00	28.791.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.660.000,00	66.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.910.000,00	546.216.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.710.000,00	125.016.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.002.200,00	280.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.166.000,00	225.164.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.836.200,00	5.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.755.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	80.028.940,00	79.455.640,00	304.614.000,00	302.130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.02.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.432.800,00	42.247.500,00	304.614.000,00	302.130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	304.614.000,00	302.130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	15.272.600,00	15.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.05.	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	23.456.100,00	23.282.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .01.10.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.704.100,00	3.692.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.02.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.596.140,00	37.208.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .02.03.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	34.177.940,00	33.789.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0 .00.02.0000.02.2 .02.04.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	3.418.200,00	3.418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	19.758.124,00	17.398.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.03.2.01.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	19.758.124,00	17.398.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.03.2.01.01.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	9.950.124,00	9.950.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.00.02.0000.03.2.01.02.	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	9.808.000,00	7.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	238.222.600,00	180.424.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	238.222.600,00	180.424.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	238.222.600,00	180.424.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	183.276.100,00	173.795.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	57.831.300,00	56.298.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.01.03.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	125.444.800,00	117.496.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	54.946.500,00	6.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.2.24.00.02.0000.02.2.03.01.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	54.946.500,00	6.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.019.565.777,00	21.882.979.516,62	9.151.655.635,00	6.483.527.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.665.224.645,00	7.245.838.150,00	211.863.600,00	190.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.	DINAS PERIKANAN	7.665.224.645,00	7.245.838.150,00	211.863.600,00	190.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.068.068.645,00	4.736.885.824,00	211.863.600,00	190.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.600.000,00	45.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.600.000,00	45.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.268.602.255,00	2.981.146.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.268.602.255,00	2.981.146.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.000.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.736.400,00	269.636.818,00	131.163.600,00	126.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.836.400,00	34.836.400,00	131.163.600,00	126.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	199.922.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	67.000.000,00	50.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	67.000.000,00	50.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.096.759.990,00	1.055.625.291,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.289.990,00	164.119.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.300.000,00	890.335.512,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.370.000,00	350.966.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.270.000,00	137.955.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.100.000,00	13.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.926.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.160.166.000,00	1.090.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.160.166.000,00	1.090.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	428.350.000,00	374.719.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	699.916.000,00	683.510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.361.990.000,00	1.343.828.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	500.500.000,00	500.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	500.500.000,00	500.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	861.490.000,00	843.328.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	798.000.000,00	780.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .04.04.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.990.000,00	26.703.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .04.05.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00. 0.00.02.0000.0 6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	75.000.000,00	74.994.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00. 0.00.02.0000.0 6.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	74.994.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0 .00.02.0000.06.2 .03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.994.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.766.340.286,00	3.751.752.892,62	5.181.544.895,00	2.786.988.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26. 0.00.01.0000.	DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	3.766.340.286,00	3.751.752.892,62	5.181.544.895,00	2.786.988.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26. 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.455.659.086,00	3.441.124.342,62	5.181.544.895,00	2.786.988.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26. 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.258.457.601,00	3.244.128.102,62	4.926.542.399,00	2.756.988.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Ka	3.258.457.601,00	3.244.128.102,62	4.926.542.399,00	2.756.988.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26. 0.00.01.0000.0 2.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	197.201.485,00	196.996.240,00	255.002.496,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0 .00.01.0000.02.2 .03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	197.201.485,00	196.996.240,00	255.002.496,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.01.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	270.681.200,00	270.628.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	270.681.200,00	270.628.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	270.681.200,00	270.628.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.220.033.459,00	4.173.423.491,00	303.103.640,00	302.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.220.033.459,00	4.173.423.491,00	303.103.640,00	302.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.298.464.259,00	1.283.190.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	309.905.200,00	299.405.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	309.905.200,00	299.405.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0.00.02.0000.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.966.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.02.2 .02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000,00	99.966.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 0.00.02.0000.0 2.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	888.559.059,00	883.819.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.02.2 .05.01.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	548.259.059,00	543.903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.02.2 .05.05.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	340.300.000,00	339.915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 0.00.02.0000.0 3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.102.813.200,00	1.100.527.600,00	303.103.640,00	302.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 0.00.02.0000.0 3.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .01.02.	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	100.000.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 0.00.02.0000.0 3.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.002.813.200,00	1.000.627.600,00	303.103.640,00	302.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.03.2 .02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.002.813.200,00	1.000.627.600,00	303.103.640,00	302.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 0.00.02.0000.0 4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	750.497.200,00	721.873.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 0.00.02.0000.0 4.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.417.300,00	230.166.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	248.417.300,00	230.166.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	126.106.000,00	126.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .02.02.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	126.106.000,00	126.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	189.956.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .03.02.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	200.000.000,00	189.956.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	175.973.900,00	175.645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.04.2 .04.02.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	175.973.900,00	175.645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	640.608.800,00	640.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	640.608.800,00	640.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.05.2 .01.03.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	640.608.800,00	640.522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	427.650.000,00	427.308.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.3.27.00.02.0000.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	427.650.000,00	427.308.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.0 .00.02.0000.07.2 .01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	427.650.000,00	427.308.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.367.967.387,00	6.711.964.983,00	3.455.143.500,00	3.203.033.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00. 0.00.02.0000.	DINAS PERDAGANGAN	7.367.967.387,00	6.711.964.983,00	3.455.143.500,00	3.203.033.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00. 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.833.649.077,00	5.427.499.669,00	55.143.500,00	53.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00. 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.854.100,00	20.764.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.939.800,00	5.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.245.500,00	4.039.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.076.400,00	6.595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.544.614.097,00	4.276.182.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.540.344.797,00	4.271.912.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.533.900,00	1.533.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.551.600,00	1.551.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.183.800,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.013.750,00	4.651.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.013.750,00	4.651.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.613.150,00	204.187.610,00	25.531.600,00	24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.634.350,00	41.962.870,00	25.531.600,00	24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	13.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.343.800,00	7.283.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.577.000,00	136.455.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	388.100,00	385.000,00	29.611.900,00	29.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	388.100,00	385.000,00	29.611.900,00	29.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.995.030,00	769.213.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	858.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.600.150,00	229.014.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.224.880,00	539.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.180.850,00	152.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	84.950.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.650.850,00	16.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.0 2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	23.380.000,00	21.204.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.0 2.2.07.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	23.380.000,00	21.204.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .07.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	23.380.000,00	21.204.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.0 3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.341.072.310,00	1.107.678.970,00	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.0 3.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.327.950.310,00	1.094.556.970,00	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.327.950.310,00	1.094.556.970,00	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.0 3.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	13.122.000,00	13.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13.122.000,00	13.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.440.000,00	25.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	32.440.000,00	25.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .02.01.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	32.440.000,00	25.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 5.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	46.926.000,00	42.388.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 5.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.926.000,00	42.388.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.05.2 .01.06.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	46.926.000,00	42.388.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	90.500.000,00	87.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 0.00.02.0000.0 6.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	90.500.000,00	87.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.06.2 .01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	69.500.000,00	66.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.3.30.0.00.0 .00.02.0000.06.2 .01.02.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	118.485.490.320,00	101.386.774.345,00	4.932.105.997,00	4.829.136.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	62.617.884.937,00	59.112.853.058,00	4.506.216.659,00	4.418.339.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	62.617.884.937,00	59.112.853.058,00	4.506.216.659,00	4.418.339.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.098.507.258,00	41.931.794.860,00	4.416.216.659,00	4.332.339.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.359.908,00	34.228.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.690.213,00	12.830.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.748.645,00	3.125.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.780.350,00	5.131.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.140.700,00	13.140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.924.660.318,00	17.850.015.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.746.261.188,00	17.671.643.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.491.080,00	110.471.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.397.000,00	21.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.648.100,00	14.648.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	31.862.950,00	31.854.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.413.210,00	95.055.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	81.209.650,00	80.931.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.203.560,00	14.124.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.340.000,00	95.621.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.340.000,00	58.621.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.343.611.838,00	4.093.162.051,00	2.469.519.620,00	2.405.129.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.057.084,00	74.909.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533.446.301,00	426.812.841,00	2.469.519.620,00	2.405.129.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	524.029.028,00	501.740.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.908.977,00	107.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.810.000,00	64.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.768.460.448,00	2.725.333.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	192.900.000,00	192.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.602.819.400,00	3.542.265.993,00	1.715.536.966,00	1.702.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	1.715.536.966,00	1.702.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	95.348.000,00	95.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.507.471.400,00	3.447.245.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.451.240.467,00	4.150.989.513,00	4.322.923,00	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.370.266.658,00	2.130.894.368,00	4.322.923,00	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.801.135,00	77.597.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.961.172.674,00	1.902.497.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.331.870.313,00	6.074.885.463,00	135.000.000,00	133.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.470.000,00	294.222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.451.057.177,00	1.426.997.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	359.260.000,00	261.740.300,00	135.000.000,00	133.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.189.083.136,00	4.091.924.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	838.626.590,00	749.146.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.513.040,00	90.112.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .11.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59.113.550,00	59.034.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	822.927.204,00	741.314.430,00	52.745.950,00	50.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	536.002.836,00	521.236.920,00	36.132.150,00	33.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .12.02.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	109.993.350,00	108.197.630,00	16.613.800,00	16.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	176.931.018,00	111.879.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.13.	Penataan Organisasi	417.966.400,00	389.855.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	69.369.250,00	62.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	74.513.000,00	71.395.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39.697.350,00	33.770.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	58.376.800,00	56.527.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	176.010.000,00	165.408.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.128.671.610,00	4.115.253.840,00	39.091.200,00	39.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	1.876.289.751,00	1.869.993.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.081.958.659,00	2.081.220.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	170.423.200,00	164.040.000,00	39.091.200,00	39.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.290.947.679,00	14.021.731.834,00	90.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	865.805.840,00	839.351.800,00	90.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	651.865.650,00	641.023.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	126.414.750,00	117.241.400,00	90.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	87.525.440,00	81.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.009.661.739,00	12.776.144.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.085.088.439,00	2.899.251.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.534.973.300,00	4.504.359.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.389.600.000,00	5.372.532.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	237.071.400,00	235.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	55.900.900,00	55.736.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	142.200.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	38.970.500,00	38.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.04.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	178.408.700,00	171.129.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80.385.500,00	77.545.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	43.849.200,00	41.750.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	54.174.000,00	51.834.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.228.430.000,00	3.159.326.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	328.759.200,00	323.361.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	206.171.200,00	203.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	56.494.000,00	55.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	66.094.000,00	65.032.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.786.500.000,00	1.742.344.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	790.000.000,00	778.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	596.500.000,00	586.899.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	400.000.000,00	377.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	879.844.700,00	864.729.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	224.282.900,00	222.092.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	649.711.400,00	638.035.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.400,00	4.600.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	233.326.100,00	228.890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	77.339.210,00	77.169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.02.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	89.589.500,00	87.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .04.03.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	66.397.390,00	63.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	55.867.605.383,00	42.273.921.287,00	425.889.338,00	410.797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.	SEKRETARIAT DPRD	55.867.605.383,00	42.273.921.287,00	425.889.338,00	410.797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.913.959.976,00	33.341.567.230,00	425.889.338,00	410.797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.778.300,00	62.931.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.766.700,00	21.914.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.039.800,00	17.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.971.800,00	23.928.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.834.978.152,00	20.854.902.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.834.978.152,00	20.854.902.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.100.000,00	17.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.100.000,00	17.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275.000.000,00	138.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.000.000,00	138.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0001.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.508.189.100,00	8.299.359.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.455.875,00	116.077.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.835.150,00	192.037.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.538.360,00	137.017.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.373.600,00	174.097.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.991.544,00	166.002.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.960.000,00	33.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	213.701.733,00	79.566.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.406.332.838,00	7.401.262.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000,00	27.000.000,00	425.889.338,00	410.797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	394.127.338,00	379.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	31.762.000,00	31.741.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.201.447.010,00	2.064.818.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.990.600,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.400.000,00	328.642.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.847.056.410,00	1.723.675.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.199.234,00	879.379.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.450.000,00	272.409.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.370.000,00	165.231.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.011.554,00	193.519.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.985.140,00	240.124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.382.540,00	8.094.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	560.300.918,00	521.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	423.300.918,00	417.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	137.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	510.967.262,00	475.388.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .16.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	510.967.262,00	475.388.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.953.645.407,00	8.932.354.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.437.604.330,00	1.297.955.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	490.011.900,00	411.660.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	440.315.430,00	436.633.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	102.197.000,00	102.108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	405.080.000,00	347.553.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	973.979.940,00	814.579.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	49.350.400,00	15.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	221.020.590,00	202.220.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.03.	Pembahasan APBD	48.473.250,00	28.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	136.237.800,00	101.824.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.05.	Pembahasan Laporan Semester	158.451.200,00	126.397.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	360.446.700,00	341.092.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	692.818.400,00	481.769.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	48.980.000,00	21.755.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	49.844.000,00	17.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.832.000,00	19.302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	49.956.000,00	22.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	49.865.600,00	34.528.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.06.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	104.544.200,00	77.192.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	62.280.000,00	31.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	277.516.600,00	257.403.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00. 0.00.01.0000.0 2.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.300.090.666,00	976.076.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	777.090.666,00	542.776.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	127.000.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00. 0.00.01.0000.0 2.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.746.879.400,00	2.609.202.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	470.035.000,00	371.627.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .05.03.	Pelaksanaan Reses	2.276.844.400,00	2.237.574.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00. 0.00.01.0000.0 2.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	149.134.200,00	140.673.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	149.134.200,00	140.673.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00. 0.00.01.0000.0 2.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	498.390.400,00	476.052.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	498.390.400,00	476.052.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.01.	Fasilitasi Tugas DPRD	2.154.748.071,00	2.136.044.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.395.795.700,00	1.393.212.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	213.952.371,00	205.422.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	545.000.000,00	537.409.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	91.609.053.530,00	81.468.731.613,00	3.102.533.912,00	2.941.049.338,00	292.485.131,00	260.289.017,00	0,00	0,00
5.01.	PERENCANAAN	9.775.628.410,00	9.055.221.525,00	212.740.794,00	203.892.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.775.628.410,00	9.055.221.525,00	212.740.794,00	203.892.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.514.601.981,00	7.058.078.780,00	212.740.794,00	203.892.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.699.900,00	13.699.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.709.900,00	2.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.639.600,00	2.639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.383.200,00	3.383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.024.600,00	2.024.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.304.300,00	1.304.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.495.300,00	1.495.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.222.876.504,00	5.006.836.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.221.828.604,00	5.005.788.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	629.400,00	629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	349.500,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	349.500,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.956.000,00	94.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.104.000,00	50.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89.852.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.106.203,00	617.721.480,00	5.562.194,00	5.562.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.872.900,00	10.872.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.086.400,00	176.086.400,00	5.562.194,00	5.562.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.364.800,00	14.364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.783.100,00	87.780.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.612.600,00	47.543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.680.000,00	28.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.706.403,00	252.693.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	204.678.600,00	195.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	61.289.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	143.389.600,00	135.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.795.200,00	829.404.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.740.000,00	12.487.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	968.715.200,00	814.577.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.818.674,00	495.996.960,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.528.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.062.856,00	193.224.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.225.818,00	39.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	84.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000,00	139.635.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	816.609.200,00	665.074.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	484.406.052,00	401.609.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	36.959.500,00	36.959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	50.822.552,00	50.822.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	392.044.000,00	309.247.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199.766.000,00	150.633.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	199.766.000,00	150.633.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	132.437.148,00	112.831.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	132.437.148,00	112.831.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.444.417.229,00	1.332.068.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 3.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	445.330.327,00	370.235.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107.881.962,00	91.928.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	126.065.732,00	105.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	95.742.500,00	77.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	115.640.133,00	95.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00. 0.00.05.0000.0 3.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	324.621.300,00	306.889.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	164.077.000,00	160.176.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.892.300,00	37.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	117.652.000,00	109.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00. 0.00.05.0000.0 3.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	674.465.602,00	654.943.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.705.000,00	90.654.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000,00	8.164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	35.000.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	333.326.550,00	322.730.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.336.400,00	36.239.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000,00	8.244.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	127.097.652,00	124.809.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.	KEUANGAN	73.499.067.576,00	64.628.956.215,00	2.889.793.118,00	2.737.157.144,00	292.485.131,00	260.289.017,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.379.826.574,00	23.111.324.903,00	1.468.105.510,00	1.394.107.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.982.302.875,00	18.978.294.569,00	603.336.360,00	537.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.515.200,00	76.422.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.511.400,00	13.558.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.201.900,00	17.424.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.416.600,00	19.447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.578.400,00	20.124.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.806.900,00	5.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.000.720.788,00	15.100.289.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.992.508.988,00	15.093.289.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.211.800,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.846.300,00	35.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.846.300,00	35.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390.427.600,00	384.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	67.040.000,00	64.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.273.600,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	292.114.000,00	289.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.195.290.817,00	1.174.022.778,00	13.326.000,00	13.322.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.438.000,00	5.438.000,00	11.126.400,00	11.126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.237.717,00	214.771.649,00	2.199.600,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.896.000,00	125.202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.036.700,00	174.973.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.682.400,00	635.337.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.875.700,00	15.459.300,00	590.010.360,00	523.863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	132.298.600,00	126.179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.875.700,00	15.459.300,00	457.711.760,00	397.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.384.224.240,00	1.327.843.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.989.700,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440.899.000,00	425.858.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.332.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	901.003.540,00	883.605.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.402.230,00	863.573.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.768.700,00	322.052.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.571.800,00	179.424.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.605.930,00	188.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.455.800,00	173.877.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.397.523.699,00	4.133.030.334,00	864.769.150,00	856.921.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.02.0000.0 4.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.397.523.699,00	4.133.030.334,00	864.769.150,00	856.921.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.01.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	260.978.400,00	250.104.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	90.292.900,00	76.872.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	307.431.516,00	295.466.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	787.956.803,00	767.141.300,00	864.769.150,00	856.921.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	247.699.300,00	245.976.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	914.955.900,00	779.235.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	356.877.200,00	344.413.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	169.415.100,00	167.711.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	504.160.400,00	480.640.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.341.000,00	76.025.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.11.	Penagihan Pajak Daerah	416.375.100,00	406.772.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	101.509.900,00	94.988.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.530.180,00	147.681.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49.119.241.002,00	41.517.631.312,00	1.421.687.608,00	1.343.049.860,00	292.485.131,00	260.289.017,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.00.05.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.812.371.256,00	30.678.279.770,00	1.235.192.668,00	1.165.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.003.100,00	22.936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.157.800,00	3.157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.019.500,00	5.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.019.500,00	4.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.227.700,00	3.227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.227.700,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.350.900,00	3.350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.654.107.568,00	26.661.434.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.649.089.893,00	26.656.477.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.007.375,00	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.010.300,00	1.989.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.997.200,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.997.200,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	329.830.830,00	324.974.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18.800.000,00	17.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.000.000,00	63.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	246.030.830,00	243.630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.614.131.100,00	1.558.350.927,00	29.505.400,00	28.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.229.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	293.615.100,00	287.403.000,00	29.505.400,00	28.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.990.000,00	47.726.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186.409.000,00	181.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.840.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.018.048.000,00	1.018.047.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.991.040,00	192.926.000,00	1.205.687.268,00	1.137.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	319.112.500,00	310.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	93.661.300,00	91.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	599.922.428,00	542.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.991.040,00	192.926.000,00	192.991.040,00	192.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.942.500,00	1.177.921.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.500,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	17.805.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.168.750.000,00	1.128.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.367.918,00	738.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.460.000,00	271.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.000.000,00	88.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	379.907.918,00	378.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.574.188.846,00	9.239.192.096,00	0,00	0,00	292.485.131,00	260.289.017,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.192.655.647,00	4.165.324.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.000.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	42.000.000,00	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.242.332.242,00	1.239.412.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.270.872.800,00	1.256.646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.206.439.055,00	1.200.854.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	152.258.600,00	150.209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	248.752.950,00	246.562.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.329.912.350,00	1.301.922.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	161.129.600,00	151.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	207.563.600,00	206.601.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	98.659.900,00	94.869.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	181.342.500,00	180.847.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	413.795.750,00	403.017.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	267.421.000,00	265.238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.808.746.700,00	1.468.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12.721.400,00	12.721.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	36.010.000,00	27.995.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	199.637.600,00	188.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	295.836.200,00	292.727.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	167.992.000,00	42.144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	209.100.000,00	174.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	887.449.500,00	729.352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.242.874.149,00	2.303.251.219,00	0,00	0,00	292.485.131,00	260.289.017,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.04.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.242.874.149,00	2.303.251.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	292.485.131,00	260.289.017,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.732.680.900,00	1.600.159.446,00	186.494.940,00	177.590.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 0.00.05.0000.0 3.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.732.680.900,00	1.600.159.446,00	186.494.940,00	177.590.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.01.	Penyusunan Standar Harga	127.748.000,00	126.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	84.764.100,00	74.739.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	181.513.900,00	167.650.700,00	150.000.000,00	148.569.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	96.179.000,00	89.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	309.073.100,00	305.853.700,00	36.494.940,00	29.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	372.564.400,00	367.769.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	157.694.000,00	155.976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	86.990.800,00	79.153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42.034.200,00	41.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	223.799.400,00	191.426.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.	KEPEGAWAIAN	7.384.462.727,00	6.888.945.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.384.462.727,00	6.888.945.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.684.722.314,00	5.335.920.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.467.447.894,00	4.126.662.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.082.594,00	4.064.749.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.365.300,00	61.912.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.936.000,00	24.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.936.000,00	24.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.685.920,00	487.538.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.093.800,00	5.968.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.735.100,00	70.676.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.118.000,00	13.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.601.200,00	59.165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.407.200,00	65.904.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.250.620,00	21.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.480.000,00	251.479.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.742.500,00	422.463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.942.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000,00	26.813.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393.600.000,00	392.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.910.000,00	275.182.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.770.000,00	172.766.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.560.000,00	33.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.580.000,00	68.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.699.740.413,00	1.553.024.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	794.964.980,00	676.325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.04.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	371.653.780,00	294.922.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	26.645.800,00	26.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	25.125.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	228.396.100,00	208.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	143.144.300,00	143.144.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	239.391.200,00	223.463.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	94.114.600,00	91.136.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	145.276.600,00	132.327.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	54.112.900,00	51.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	54.112.900,00	51.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	611.271.333,00	601.611.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	511.020.333,00	510.973.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.04.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	46.551.000,00	44.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	53.700.000,00	46.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	761.515.667,00	761.321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	761.515.667,00	761.321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	761.515.667,00	761.321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	23.240.000,00	23.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .01.01.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	23.240.000,00	23.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00. 5.04.01.0000.0 2.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	738.275.667,00	738.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.5.03.0.00.5 .04.01.0000.02.2 .02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	738.275.667,00	738.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	188.379.150,00	134.286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00. 0.00.05.0000.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	188.379.150,00	134.286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00. 0.00.05.0000.0 2.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	188.379.150,00	134.286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00. 0.00.05.0000.0 2.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	108.391.300,00	75.495.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	108.391.300,00	75.495.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 2.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	79.987.850,00	58.791.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	79.987.850,00	58.791.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.286.193.131,00	12.301.016.896,00	571.881.700,00	566.270.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	14.286.193.131,00	12.301.016.896,00	571.881.700,00	566.270.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.	INSPEKTORAT	14.286.193.131,00	12.301.016.896,00	571.881.700,00	566.270.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.309.748.507,00	10.393.360.196,00	571.881.700,00	566.270.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.493.500,00	25.445.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.870.800,00	11.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.622.700,00	14.330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.487.492.372,00	8.651.806.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.487.492.372,00	8.651.806.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119.953.600,00	118.759.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.953.600,00	118.759.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.508.000,00	602.546.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.161.600,00	19.161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.041.700,00	112.504.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.360.000,00	77.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.422.700,00	45.932.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.988.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.534.000,00	342.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	571.881.700,00	566.270.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	391.881.700,00	386.502.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	180.000.000,00	179.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.442.100,00	352.244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	21.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.442.100,00	330.251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.858.935,00	642.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.482.800,00	233.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000,00	24.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	26.640.000,00	26.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.716.135,00	358.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.293.166.624,00	1.280.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.218.160.624,00	1.206.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	815.250.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.03.	Reviu Laporan Kinerja	60.539.250,00	57.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.04.	Reviu Laporan Keuangan	41.962.530,00	41.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	300.408.844,00	296.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75.006.000,00	74.914.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75.006.000,00	74.914.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	683.278.000,00	626.660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	362.996.000,00	339.541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	55.028.000,00	54.545.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	307.968.000,00	284.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	320.282.000,00	287.118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.000.000,00	31.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	197.622.000,00	182.034.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	77.660.000,00	73.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	66.691.778.030,00	64.337.483.396,00	5.506.450.221,00	5.457.396.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.	KECAMATAN	66.691.778.030,00	64.337.483.396,00	5.506.450.221,00	5.457.396.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.	KECAMATAN DUMAI BARAT	8.635.030.709,00	8.282.041.773,00	608.669.600,00	604.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.180.787.309,00	7.867.550.543,00	87.456.300,00	86.321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.401.400,00	28.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.928.700,00	4.928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.832.600,00	4.832.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.494.200,00	4.494.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.552.600,00	4.552.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.717.600,00	4.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.875.700,00	4.875.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.155.327.809,00	4.902.774.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.140.360.709,00	4.887.807.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.106.000,00	10.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.861.100,00	4.861.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.682.500,00	3.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.682.500,00	3.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.863.800,00	345.065.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.947.500,00	9.674.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.345.400,00	95.345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.041.900,00	5.013.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.880.000,00	44.821.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.889.000,00	97.450.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	87.456.300,00	86.321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	68.115.500,00	67.106.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	19.340.800,00	19.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.506.983.800,00	2.448.060.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.207.000,00	57.575.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.429.436.800,00	2.388.145.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.528.000,00	139.565.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.528.000,00	127.202.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.518.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000,00	5.844.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56.743.400,00	56.692.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.901.500,00	14.850.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.901.500,00	14.850.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.844.200,00	11.844.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.01.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.948.800,00	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.895.400,00	9.895.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.997.700,00	29.997.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.02.2 .04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.997.700,00	29.997.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	257.669.100,00	237.464.838,00	521.213.300,00	518.179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	257.669.100,00	237.464.838,00	521.213.300,00	518.179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.000.000,00	3.927.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	108.455.300,00	106.723.764,00	521.213.300,00	518.179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.216.000,00	115.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.03.2 .02.04.	Evaluasi Kelurahan	14.997.800,00	10.997.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.000.000,00	81.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 4.2.03.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	80.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.04.2 .03.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	80.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.830.900,00	38.830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.01.0000.0 5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.830.900,00	38.830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.01.0000.05.2 .01.04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	38.830.900,00	38.830.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.	KECAMATAN DUMAI TIMUR	10.053.294.194,00	9.757.490.050,00	474.224.878,00	471.107.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.508.621.234,00	9.256.144.391,00	18.568.400,00	18.564.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.118.800,00	13.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.872.400,00	2.872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.614.400,00	2.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.158.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.559.480.152,00	5.320.023.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.526.661.392,00	5.287.418.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.764.800,00	29.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.053.960,00	3.053.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .03.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.950.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.950.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.910.560,00	290.620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.857.100,00	13.857.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.887.750,00	65.870.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.471.500,00	8.468.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.420.000,00	67.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.488.030,00	36.296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.770.180,00	40.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.016.000,00	58.096.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	18.568.400,00	18.564.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	18.568.400,00	18.564.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.427.533.900,00	3.420.664.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.498.300,00	3.497.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.635.600,00	63.767.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.627.822,00	195.456.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.977.822,00	186.806.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.916.800,00	14.540.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.916.800,00	14.540.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.916.800,00	14.540.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	411.415.500,00	372.114.799,00	455.656.478,00	452.542.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.02.0000.0 3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	411.415.500,00	372.114.799,00	455.656.478,00	452.542.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.000.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.939.700,00	68.743.199,00	450.000.000,00	446.886.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	296.475.800,00	277.221.600,00	5.656.478,00	5.656.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.03.2 .02.04.	Evaluasi Kelurahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	96.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	96.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.04.2 .01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	96.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.340.660,00	18.340.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.340.660,00	18.340.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.02.0000.05.2 .01.04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	18.340.660,00	18.340.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.	KECAMATAN DUMAI SELATAN	9.731.134.648,00	9.435.841.294,00	745.124.941,00	742.185.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.309.727.698,00	9.039.643.994,00	361.403.191,00	358.463.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.302.100,00	27.732.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.593.200,00	7.572.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.271.900,00	5.057.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.061.500,00	2.061.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.906.100,00	2.694.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.413.100,00	5.296.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.946.300,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.535.055.239,00	5.316.506.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.486.172.639,00	5.267.767.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.891.300,00	39.891.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.472.700,00	4.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.518.600,00	4.518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.718.000,00	53.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	54.718.000,00	53.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.500.000,00	105.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.500.000,00	105.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.004.627,00	349.581.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.454.900,00	6.062.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.668.927,00	89.279.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.910.000,00	54.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.974.800,00	36.571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.508.000,00	52.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.488.000,00	109.836.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	222.547.000,00	219.783.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	135.000.000,00	132.236.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	24.272.000,00	24.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	45.775.000,00	45.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.730.651.500,00	2.702.019.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.398.500,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.987.400,00	106.871.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.609.265.600,00	2.594.095.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.496.232,00	484.747.411,00	138.856.191,00	138.680.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.910.000,00	203.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.820.000,00	12.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.841.232,00	252.648.000,00	138.856.191,00	138.680.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.925.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.300.250,00	68.183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.835.100,00	34.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.835.100,00	34.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 2.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.065.250,00	7.968.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.02.2 .02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8.065.250,00	7.968.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.399.900,00	25.399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.02.2 .04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.399.900,00	25.399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	242.706.700,00	219.524.700,00	383.721.750,00	383.721.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.03.0000.0 3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	242.706.700,00	219.524.700,00	383.721.750,00	383.721.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.03.2 .02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.03.2 .02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.989.200,00	89.729.600,00	383.721.750,00	383.721.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.03.2 .02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.047.500,00	125.125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.03.0000.0 4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	98.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.03.0000.0 4.2.03.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	98.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.04.2 .03.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	98.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.03.0000.0 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.03.0000.0 5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.03.0000.05.2 .01.04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.04.0000.	KECAMATAN DUMAI KOTA	10.196.544.036,00	9.877.987.000,00	1.084.490.910,00	1.066.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.04.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.752.068.170,00	9.455.620.806,00	425.645.000,00	419.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.04.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.685.087,00	14.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.972.631,00	2.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.918.895,00	2.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.469.195,00	1.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.858.895,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.383.560,00	2.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.281.911,00	2.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .02.01.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.798.612.403,00	5.563.043.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.795.315.923,00	5.559.762.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.470.860,00	2.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	825.620,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .03.01.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.875.455,00	4.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.574.755,00	1.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.400.700,00	2.232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.728.500,00	427.311.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000,00	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.999.400,00	121.667.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.728.400,00	18.516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.000.000,00	81.575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.826.700,00	24.086.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.000.000,00	62.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.175.000,00	114.090.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	125.645.000,00	119.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	30.072.000,00	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	79.019.000,00	78.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	16.554.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.039.975.725,00	3.020.155.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.525,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.440.000,00	92.253.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.921.335.200,00	2.916.701.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.691.000,00	352.876.525,00	300.000.000,00	299.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.140.000,00	229.790.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.551.000,00	23.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	300.000.000,00	299.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.485.922,00	66.139.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.090.563,00	25.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.090.563,00	25.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 2.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.275.710,00	7.275.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.02.2 .02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.275.710,00	2.275.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.02.2 .02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.119.649,00	33.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.02.2 .04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.119.649,00	33.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.04.0000.0 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	207.582.840,00	186.999.780,00	623.835.810,00	620.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	207.582.840,00	186.999.780,00	623.835.810,00	620.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	46.829.600,00	43.128.000,00	603.993.250,00	601.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.827.840,00	107.946.380,00	19.842.560,00	19.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	24.325.400,00	24.325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	69.789.900,00	69.609.900,00	35.010.100,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.989.900,00	64.809.900,00	35.010.100,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.989.900,00	64.809.900,00	35.010.100,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.03.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.03.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.617.204,00	99.617.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.617.204,00	99.617.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.04.0000.05.2 .01.04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	99.617.204,00	99.617.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.	KECAMATAN BUKIT KAPUR	10.882.667.655,00	10.515.949.449,00	1.016.228.820,00	995.422.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.251.254.975,00	9.903.755.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.394.720,00	26.384.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.197.360,00	13.187.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.197.360,00	13.197.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.076.795.535,00	6.759.545.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.015.384.735,00	6.699.785.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.410.800,00	59.760.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.663.300,00	746.296.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.628.000,00	19.560.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.412.900,00	214.742.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.260.000,00	217.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.752.400,00	58.539.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.160.000,00	107.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.450.000,00	128.359.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.176.155.420,00	2.150.796.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.497.000,00	16.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.700.000,00	71.450.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.073.958.420,00	2.062.849.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.05.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.846.000,00	182.332.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.516.000,00	68.184.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.330.000,00	39.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.01.2 .09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	74.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.05.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.390.900,00	24.390.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.05.0000.0 2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.390.900,00	24.390.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.390.900,00	24.390.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.05.0000.0 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	507.021.780,00	487.806.580,00	1.016.228.820,00	995.422.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.05.0000.0 3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	507.021.780,00	487.806.580,00	1.016.228.820,00	995.422.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	92.562.400,00	90.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	236.069.980,00	236.000.000,00	847.857.200,00	842.800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.03.2 .02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	178.389.400,00	161.260.580,00	168.371.620,00	152.621.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.05.0000.0 4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	99.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.05.0000.0 4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	99.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.05.0000.04.2 .01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	99.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	7.511.447.651,00	7.184.890.065,00	389.733.072,00	389.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.944.962.001,00	6.620.017.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.936.450,00	4.936.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.836.700,00	1.836.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.571.650,00	1.571.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.528.100,00	1.528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.152.789.001,00	4.855.861.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.083.896.701,00	4.786.969.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.710.400,00	3.710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	63.480.000,00	63.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.701.900,00	1.701.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.417.440,00	344.669.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.465.400,00	3.465.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.368.740,00	95.353.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.860.000,00	95.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.292.500,00	26.204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.480.000,00	31.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.950.800,00	92.028.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.283.858.910,00	1.265.598.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.350,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.302.000,00	32.321.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.233.556.560,00	1.232.277.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.160.200,00	114.152.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.005.200,00	103.997.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.155.000,00	10.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.271.500,00	42.674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.490.700,00	12.893.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.490.700,00	12.893.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.780.800,00	29.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.02.2 .04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.780.800,00	29.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	417.243.550,00	417.227.200,00	389.733.072,00	389.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.06.0000.0 3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	417.243.550,00	417.227.200,00	389.733.072,00	389.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.03.2 .02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	266.401.350,00	266.385.000,00	389.733.072,00	389.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.03.2 .02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143.863.200,00	143.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.03.2 .02.04.	Evaluasi Kelurahan	6.979.000,00	6.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.06.0000.0 4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.970.600,00	104.970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.06.0000.0 4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.970.600,00	4.970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.04.2 .01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.970.600,00	4.970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.06.0000.0 4.2.03.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.06.0000.04.2 .03.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.07.0000.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	9.681.659.137,00	9.283.283.765,00	1.187.978.000,00	1.187.740.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.07.0000.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.398.363.637,00	9.012.491.965,00	47.978.000,00	47.740.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.07.0000.0 1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.508.800,00	81.716.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.523.600,00	2.523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.523.600,00	2.379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.890.800,00	69.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.570.501.733,00	6.209.982.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.565.794.333,00	6.205.611.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.055.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.652.400,00	1.532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.359.000,00	25.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.542.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.817.000,00	23.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.07.0000.0 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.152.864,00	391.349.244,00	3.664.800,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.793.000,00	15.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.204.064,00	113.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	3.664.800,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.513.300,00	84.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.076.500,00	46.731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.216.000,00	7.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.350.000,00	123.896.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.07.0000.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	44.313.200,00	44.090.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	44.313.200,00	44.090.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 0.00.07.0000.0 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.263.496.240,00	2.250.019.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	3.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.550.000,00	73.045.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.165.436.240,00	2.153.466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.845.000,00	48.684.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.405.000,00	46.244.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.429.500,00	35.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.546.900,00	5.546.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.546.900,00	5.546.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.882.600,00	29.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0 .00.07.0000.02.2 .04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.882.600,00	29.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	147.866.000,00	142.199.100,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	61.866.000,00	56.305.600,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.894.400,00	26.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32.448.000,00	27.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	2.523.600,00	2.379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	86.000.000,00	85.893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.03.03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	86.000.000,00	85.893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	93.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	93.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	93.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.944.818.900,00	3.748.634.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.944.818.900,00	3.748.634.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.944.818.900,00	3.748.634.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	119.620.000,00	119.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	119.620.000,00	119.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.820.000,00	8.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.02.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.354.469.400,00	2.352.277.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser	2.354.469.400,00	2.352.277.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poli	2.342.609.400,00	2.342.377.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.03.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	11.860.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	45.216.000,00	41.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45.216.000,00	41.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.04.2 .01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.04.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14.336.000,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	445.212.000,00	444.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0.00.01.0000.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	445.212.000,00	444.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.05.2 .01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	107.530.000,00	107.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.05.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	337.682.000,00	337.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.00.01.0000.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	980.301.500,00	790.574.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.00.01.0000.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	980.301.500,00	790.574.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	107.132.600,00	102.554.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	59.172.000,00	58.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s	13.996.900,00	13.747.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.05.8.01.0 .00.01.0000.06.2 .01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	615.296.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	292.485.131,00	260.388.017,00	0,00	0,00



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	2022	2021
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	168.196.735.341,25	195.481.309.973,51
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	168.196.735.341,25	195.481.309.973,34
SUB TOTAL	0,00	(0,17)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	107.417.609.614,33	168.196.735.341,25
SUB TOTAL	107.417.609.614,33	168.196.735.341,08
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,17
LAIN-LAIN	0,00	-0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	107.417.609.614,33	168.196.735.341,25

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>	1.404.760.236.811,95	1.372.376.641.914,38	32.383.594.897,57	2,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH	429.802.097.071,52	426.299.014.021,79	3.503.083.049,73	0,82
Pendapatan Pajak Daerah	235.710.177.866,02	195.616.934.382,69	40.093.243.483,33	20,50
Pendapatan Retribusi Daerah	32.238.321.945,17	23.688.650.046,46	8.549.671.898,71	36,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)
Lain-lain PAD yang Sah	160.773.836.069,33	205.578.304.337,64	(44.804.468.268,31)	(21,79)
PENDAPATAN TRANSFER	958.348.926.927,00	889.269.161.050,39	69.079.765.876,61	7,77
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	790.780.529.327,00	731.422.367.681,00	59.358.161.646,00	8,12
Dana Bagi Hasil Pajak	64.162.803.916,00	61.856.297.144,00	2.306.506.772,00	3,73
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	135.899.976.308,00	83.612.659.443,00	52.287.316.865,00	62,54
Dana Alokasi Umum	427.742.257.138,00	429.427.931.000,00	(1.685.673.862,00)	(0,39)
Dana Alokasi Khusus	162.975.491.965,00	156.525.480.094,00	6.450.011.871,00	4,12
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)
TRANSFER ANTAR DAERAH	147.207.501.600,00	126.243.548.369,39	20.963.953.230,61	16,61
Pendapatan Bagi Hasil	138.791.251.600,00	118.255.548.369,39	20.535.703.230,61	17,37
Bantuan Keuangan	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.609.212.813,43	56.808.466.842,20	(40.199.254.028,77)	(70,76)
Pendapatan Hibah	16.609.212.813,43	16.112.703.842,20	496.508.971,23	3,08
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	40.695.763.000,00	(40.695.763.000,00)	100,00
BEBAN	1.399.193.113.871,93	1.348.648.467.648,14	50.544.646.223,79	3,75
BEBAN OPERASI	1.216.751.291.805,51	1.160.810.397.994,14	55.940.893.811,37	4,82
Beban Pegawai	613.745.405.027,00	624.362.020.295,00	(10.616.615.268,00)	(1,70)
Beban Barang Jasa	534.009.973.169,57	500.306.843.431,15	33.703.129.738,42	6,74
Beban Bunga	1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	42.565.151.769,26	15.192.998.932,38	27.372.152.836,88	180,16
Beban Bantuan Sosial	12.911.808.100,00	0,00	12.911.808.100,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang	12.458.576.669,68	20.948.535.335,61	(8.489.958.665,93)	(40,53)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	182.181.533.049,42	181.734.858.783,00	446.674.266,42	0,25
Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.181.533.049,42	181.734.858.783,00	446.674.266,42	0,25
BEBAN TAK TERDUGA	260.289.017,00	6.103.210.871,00	(5.842.921.854,00)	(95,74)
Beban Tak Terduga	260.289.017,00	6.103.210.871,00	(5.842.921.854,00)	(95,74)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	5.567.122.940,02	23.728.174.266,24	(18.161.051.326,22)	(76,54)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(10.479.419.877,05)	(18.358.694.247,11)	7.879.274.370,06	(42,92)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	880.302.000,00	1.463.468.896,94	(583.166.896,94)	(39,85)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.370.953.346,23	0,00	4.370.953.346,23	100,00
Jumlah Surplus Non Operasional	5.251.255.346,23	1.463.468.896,94	3.787.786.449,29	258,82
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	4.678.396.225,98	6.478.794.739,75	(1.800.398.513,77)	(27,79)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.052.278.997,30	13.343.368.404,30	(2.291.089.407,00)	(17,17)
Jumlah Defisit Non Operasional	15.730.675.223,28	19.822.163.144,05	(4.091.487.920,77)	(20,64)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.912.296.937,03)	5.369.480.019,14	(10.281.776.956,17)	(191,49)
POS LUAR BIASA	-	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.912.296.937,03)	5.369.480.019,14	(10.281.776.956,17)	(191,49)

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	2.974.537.461.488,77	2.957.502.181.459,58
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.912.296.937,03)	5.369.480.019,14
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :	18.858.371.966,06	11.665.800.010,05
Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	0,00	0,17
Koreksi Piutang	(45.087.899,00)	(830.438.438,45)
Koreksi Penyisihan Piutang	13.084.782.824,50	23.562.679,60
Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	(264.600.000,00)
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(229.500.000,00)	264.600.000,00
Koreksi Aset Tetap	745.887.550,00	16.929.497.316,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.532.592.975,81	(2.469.708.141,47)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(2,50)
Koreksi Aset Lain-lain	0,00	(2.706.770.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.924.303,75	669.949.025,71
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	108.500.000,00	(45.000.000,00)
Koreksi Utang Belanja	2.655.272.211,00	94.707.571,00
EKUITAS AKHIR	2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77



Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah	99.365.595.756,32	141.438.187.794,38
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.277.437,00	334.000,00
Kas di BLUD	7.902.462.768,01	26.691.058.326,87
Kas Dana BOS	115.792.949,51	68.938.982,00
Kas Dana Kapitalisasi pada FTKP	0,00	0,00
Kas Lainnya	295.262.912,00	168.578.067,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana Desa	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	123.461.182.102,15	119.990.864.839,45
Piutang Retribusi Daerah	1.938.872.529,09	1.906.918.879,09
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	29.085.651.138,52	71.665.920.927,79
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	29.390.520.807,00	9.656.723.625,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(83.863.366.847,86)	(90.643.237.451,68)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	114.500.000,00
Persediaan	33.459.430.232,56	50.892.554.145,49
Jumlah Aset Lancar	241.211.681.784,30	331.951.342.135,39

Uraian	2022	2021
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	8.620.480.000,00	8.623.980.000,00
Penyisihan Dana Bergulir	(8.620.480.000,00)	(8.390.980.000,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	233.000.000,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	51.088.523.186,33	57.769.848.837,39
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	51.088.523.186,33	57.769.848.837,39
Jumlah Investasi Jangka Panjang	51.088.523.186,33	58.002.848.837,39
ASET TETAP		
Tanah	663.869.747.203,42	661.486.214.865,96
Peralatan dan Mesin	847.100.176.538,41	776.533.030.032,11
Gedung dan Bangunan	1.081.480.906.107,57	1.014.947.165.081,88
Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.457.323.337.875,90	2.390.039.096.680,91
Aset Tetap Lainnya	59.805.527.274,44	56.223.639.963,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	259.619.088.807,87	217.661.117.431,33
Akumulasi Penyusutan	(2.599.700.211.378,08)	(2.437.848.269.174,51)
Jumlah Aset Tetap	2.769.498.572.429,53	2.679.041.994.881,42
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00

Uraian	2022	2021
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.073.670.980,27	846.288.500,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.030.597.849,07	16.325.594.848,86
Aset Tidak Berwujud	7.430.279.868,09	6.964.930.368,09
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	23.258.105.780,09	(5.871.337.443,09)
Aset Lain-lain	(6.341.856.161,84)	16.550.872.161,10
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(21.177.088.977,29)	(14.217.295.851,08)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	32.420.424.598,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	45.763.433.936,39	20.668.352.583,88
JUMLAH ASET	3.107.562.211.336,55	3.089.664.538.438,08
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.497.308,51	1.783.762,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	295.284.900,00	168.578.067,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.386.340.133,35	1.049.253.734,31
Utang Belanja	41.310.011.511,00	113.907.461.386,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	43.018.133.852,86	115.127.076.949,31
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	76.060.540.965,89	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	76.060.540.965,89	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	119.078.674.818,75	115.127.076.949,31

Uraian	2022	2021
EKUITAS		
EKUITAS	2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77
JUMLAH EKUITAS	2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.107.562.211.336,55	3.089.664.538.438,08

Dumai, 29 Agustus 2023



Wali Kota Dumai,

PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	226.332.093.315,36	185.979.625.987,00
Penerimaan Retribusi Daerah	32.206.368.295,17	23.776.863.396,46
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	203.278.362.717,33	153.082.950.820,26
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	57.079.079.012,00	61.856.297.144,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	110.563.276.614,00	83.612.659.443,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	427.742.257.138,00	429.427.931.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	162.975.491.965,00	156.525.480.094,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.057.454.418,00	108.598.824.744,39
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	40.705.721.968,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.369.091.290.665,86	1.284.572.724.852,11
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	649.325.852.373,00	587.860.841.072,00
Pembayaran Barang	559.998.434.987,95	481.698.811.775,84
Pembayaran Bunga	1.060.377.070,00	0,00

Uraian	2022	2021
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	23.282.916.899,08	35.855.199.901,00
Pembayaran Bantuan Sosial	12.911.808.100,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	260.289.017,00	9.056.476.757,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.246.839.678.447,03	1.114.471.329.505,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	122.251.612.218,83	170.101.395.346,27
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	880.302.000,00	2.187.764.625,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	226.855.800,00	244.595.148,03
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus masuk Kas	1.107.157.800,00	2.432.359.773,03
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	3.534.281.800,00	17.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	91.334.440.997,63	84.262.101.427,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	87.322.813.477,02	52.910.399.271,31
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.340.485.070,99	56.397.085.845,08
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.201.199.866,00	5.971.626.308,00
Perolehan Aset lainnya	468.715.500,00	260.116.900,00

Uraian	2022	2021
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	260.201.936.711,64	199.818.329.751,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(259.094.778.911,64)	(197.385.969.978,36)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	94.060.540.965,89	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	3.500.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	94.064.040.965,89	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	18.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana DPPID	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	18.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	76.064.040.965,89	0,00

Uraian	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73.477.946.218,93	64.985.014.845,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya	295.262.912,00	168.578.067,00
Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyesuaian Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD RSUD Tahun Sebelumnya	0,00	0,17
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	63.476,00	0,00
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	21.988,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	73.773.294.594,93	65.153.592.912,17
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73.451.448.910,42	64.983.231.083,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun N-1	1.783.762,00	11.944.763,33
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	168.578.067,00	0,00
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD	63.476,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	73.621.874.215,42	64.995.175.846,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	151.420.379,51	158.417.065,84
Kenaikan/Penurunan Kas	(60.627.705.347,41)	(27.126.157.566,25)
Saldo Awal Kas	168.367.097.170,25	195.493.254.736,50
Saldo Akhir Kas	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25

Dumai, 29 Agustus 2023



PEMERINTAH KOTA DUMAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.1.1 Pendapatan – LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban

BAB VI BAB VII	<p>5.1.8 Ekuitas dana</p> <p>5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua! Pada Pemerintah Daerah</p> <p>Penjelasan atas informasi-Informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Penutup</p>
---------------------------------	--

Dumai, 29 Agustus 2023



Wali Kota Dumai,

PAISAL



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah APBD disahkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan APBD. Pemerintah Daerah harus bisa merealisasikan target-target pendapatan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap. Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada DPRD. Sebelum Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Dumai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Dumai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
 30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 60 Seri E);
 31. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
 32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 10 Seri A); dan

33. Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III** : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV** : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- BAB V :** Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.
- BAB VI :** Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII :** Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Ekonomi makro
2. Kebijakan fiskal/keuangan
3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

4. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6. Pengungkapan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah**
- 7. Penutup**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II

**KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO,
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Perekonomian Kota Dumai secara makro sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Dunia, Nasional dan Provinsi Riau. Namun melihat perkembangan ekonomi global dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, Perekonomian Kota Dumai secara makro pada Triwulan I diperkirakan membaik seiring membaiknya perekonomian nasional dan Riau secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari membaiknya permintaan global dan domestik. Jika dilihat berdasarkan PDRB berdasarkan lapangan usaha, Perekonomian Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor industri pengolahan (kontribusi > 50%).

Menurut Bank Indonesia (2022), Tren pemulihan perekonomian Riau terus berlanjut pada Triwulan I 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,72% *year on year (yoy)*. Pertumbuhan ekonomi Riau mengalami akselerasi jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 yang tumbuh 3,81% (*year on year*). Akselerasi perekonomian Riau pada Triwulan I 2022 ditopang oleh kinerja komponen investasi. Terjaganya permintaan terhadap komoditas Riau dan tren harga komoditas yang relatif tinggi turut mendorong investor untuk melakukan ekspansi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau khususnya kota Dumai ditopang oleh peningkatan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi serta penyediaan jasa akomodasi, makanan dan minuman. Akselerasi kinerja sektor-sektor ini sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus positif COVID-19. Sementara itu, peningkatan kinerja pada sektor konstruksi didukung oleh meningkatnya intensitas pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek infrastruktur strategis nasional. Secara umum, perekonomian Kota Dumai tumbuh lebih baik dari Triwulan I dan II Tahun 2022. Hal ini ditinjau dari kebijakan terkait beberapa pelonggaran aktivitas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat dan aktivitas bagi pemerintah sendiri, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan belanja pemerintah.

Proses pemulihan global dan domestik yang masih berlanjut, mendorong akselerasi ekonomi Riau termasuk Kota Dumai pada Tahun 2022. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang positif akan berlanjut pada Tahun 2022, meski dibayangi berbagai risiko. Permintaan global diyakini akan mendorong ekspor dan kinerja sektor-sektor utama Riau termasuk Kota Dumai, khususnya perkebunan serta industri pengolahan. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh membaik didorong peningkatan aktivitas eksplorasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak Agustus 2021.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kota Dumai. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi ekonomi Kota Dumai Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/Industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/ *Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB dengan jenis ini isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Dengan menggunakan harga berlaku, kita bisa melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu, bisa juga untuk melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

2) PDRB atas dasar harga konstan

PDRB dengan jenis ini, isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Biasanya, tahun yang dijadikan harga dasar ini diubah setiap 10 tahun sekali, dengan tujuan untuk pembaruan. Selain itu juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah daerah dari tahun ke tahun. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor. Indeks implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Indeks implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga produsen dari barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi di sisi produsen.

Bila kita lihat angka PDRB Tahun 2021-2022 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 36.326,79 miliar rupiah pada Tahun 2021 meningkat menjadi 39.999,41 miliar rupiah di Tahun 2022. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 24.597,99 miliar rupiah pada Tahun 2021 meningkat menjadi 26.068,58 miliar rupiah pada Tahun 2022.

Indeks implisit di Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 153,44 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 53,44 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada Tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada Tahun 2022 sebesar 3,90 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 3,90 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 6,55 persen.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan inflasi. Selain menjadi indikator ekonomi, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi indikator kemakmuran suatu daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laju pertumbuhan PDRB Kota Dumai Tahun 2022 sebesar 6,36%, sementara Provinsi Riau sebesar 4,55%.

Tabel 2.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai Tahun 2018 - 2022

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.223,32	1.247,92	1.299,76	1.351,37	1.353,31
B.	Pertambangan & penggalian	76,74	78,51	77,47	77,97	79,58
C.	Industri pengolahan	13.605,10	14.581,61	15.020,31	16.006,34	17.241,07
D.	Pengadaan listrik dan gas.	17,84	19,14	45,61	57,81	82,60
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,72	3,95	4,11	4,43	4,79
F.	Konstruksi	2.360,06	2.458,03	2.383,80	2.384,99	2.502,10
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.042,84	4.158,87	3.730,30	4.066,73	4.202,23
H.	Transportasi dan pergudangan	675,94	712,13	465,48	467,44	510,17
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	174,35	180,83	145,58	173,38	181,31
J.	Informasi dan komunikasi	287,48	308,20	336,68	350,59	360,50
K.	Jasa keuangan dan asuransi	270,44	270,75	280,07	292,58	307,31
L.	Real estat	103,20	108,66	110,43	113,30	119,37
M,N	Jasa perusahaan	1,25	1,34	1,05	1,06	1,08
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	432,38	442,43	432,88	442,18	482,18
P.	Jasa pendidikan	101,57	107,28	108,79	111,57	114,00
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	36,29	40,22	46,10	50,86	53,09
R.,S,T,U	Jasa lainnya	125,95	137,02	109,57	115,97	131,19
PDRB		23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58	27.725,88

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.2 PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kota Dumai Tahun 2018 - 2022

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.875,18	1.923,59	2.079,11	2.303,17	2.452,76
B.	Pertambangan & penggalian	120,04	128,17	129,55	132,99	139,35
C.	Industri pengolahan	18.660,48	20.867,98	21.785,57	24.346,07	27.843,51
D.	Pengadaan listrik dan gas.	28,10	31,77	73,72	92,98	140,55
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,88	5,33	5,60	6,04	6,60
F.	Konstruksi	3.786,76	4.049,17	3.941,63	3.995,66	4.510,78
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.413,96	5.736,01	5.258,19	5.873,68	6.350,00
H.	Transportasi dan pergudangan	973,79	1.055,62	726,94	759,02	889,95
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	303,73	319,40	260,31	314,99	335,60



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
J.	Informasi dan komunikasi	380,26	418,39	457,24	478,07	500,69
K.	Jasa keuangan dan asuransi	390,06	397,13	409,20	449,22	517,34
L.	Real estate	153,05	161,76	164,08	168,40	182,03
M.N	Jasa perusahaan	1,84	2,06	1,63	1,65	1,75
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	568,68	587,76	590,24	605,35	667,05
P.	Jasa pendidikan	161,94	177,13	185,34	192,27	199,18
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	56,82	65,84	77,38	86,28	93,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	196,64	220,03	181,04	193,57	225,57
PDRB		33.076,21	36.147,15	36.326,79	39.999,41	45.056,39

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2022 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	1,99	4,18	3,97	0,14
B.	Pertambangan dan Penggalian	-3,75	2,30	-1,30	0,65	2,06
C.	Industri Pengolahan	7,51	7,17	3,01	6,56	7,72
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	3,21	7,29	138,28	26,75	42,88
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,13	6,24	3,90	7,78	8,13
F.	Konstruksi / Bangunan	2,58	4,15	-3,02	0,05	4,91
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,91	2,89	-10,30	9,02	3,33
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,85	5,35	-34,64	0,42	9,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	3,79	-20,01	19,10	4,57
J.	Informasi dan Komunikasi	5,75	7,21	9,24	4,13	2,83
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	0,12	3,44	4,47	5,03
L.	Real Estate	3,81	5,24	1,65	2,60	5,35
M, N	Jasa Perusahaan	9,07	7,74	-22,06	1,65	1,35
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,28	2,33	-2,16	2,15	9,04
P.	Jasa Pendidikan	3,94	5,62	1,41	2,55	2,18
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,57	10,83	14,62	10,32	4,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,61	8,79	-20,03	5,84	13,12
PERTUMBUHAN EKONOMI		5,34	5,60	-1,05	5,98	6,36

Sumber Data : BPS Kota Dumai

b. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Secara umum tingkat inflasi yang cukup tinggi biasanya terjadi pada bulan menjelang atau bertepatan dengan hari raya keagamaan, misalnya hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat inflasi lebih disebabkan oleh faktor musiman, sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat pada bulan-bulan tersebut.

Selama Tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 1,56 persen, hal ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas pangan yang ada di masyarakat terutama cabai merah, cabai rawit dan bawang merah yang memiliki andil terbesar dalam mempengaruhi nilai inflasi pada bulan Juli. peningkatan harga ini disebabkan curah hujan yang tinggi di sentra komoditas yang menyebabkan gagal panen dan terganggunya distribusi pasokan. Sementara itu, kenaikan permintaan menjelang hari raya Idul Fitri juga menyebabkan inflasi tinggi selama Mei yakni mencapai 1,51 persen, tertinggi kedua sepanjang semester pertama tahun 2022. Selama Tahun 2022, pergerakan inflasi umum bulanan di Kota Dumai relatif menunjukkan pola yang searah dengan inflasi di Provinsi Riau di bulan yang sama, kecuali pada bulan April yang menunjukkan arah yang berbeda antara Kota Dumai dan Provinsi Riau.

Tabel 2.4 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 – 2022

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,36	-0,04	0,54	0,4	0,68
Februari	-0,24	-0,32	0,21	-0,38	-0,38
Maret	0,05	0,07	-0,05	-0,04	0,66
April	0,14	0,35	-0,19	0,24	0,74
Mei	0,16	1,05	0,95	0,65	1,51
Juni	0,65	0,80	0,11	0,02	1,56
Juli	-0,10	0,41	-0,26	0,22	0,57
Agustus	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05
September	-0,26	-0,79	-0,02	0,1	1,57
Oktober	0,50	0,05	0,44	0,46	-0,59
November	0,70	-0,12	0,37	0,36	0,17
Desember	0,22	0,07	0,80	-0,13	0,88

Catatan: Tahun 2020 menghitung inflasi dengan menggunakan Tahun Dasar 2018 dan terdiri dari 11 kelompok pengeluaran

Sumber Data : BPS Kota Dumai

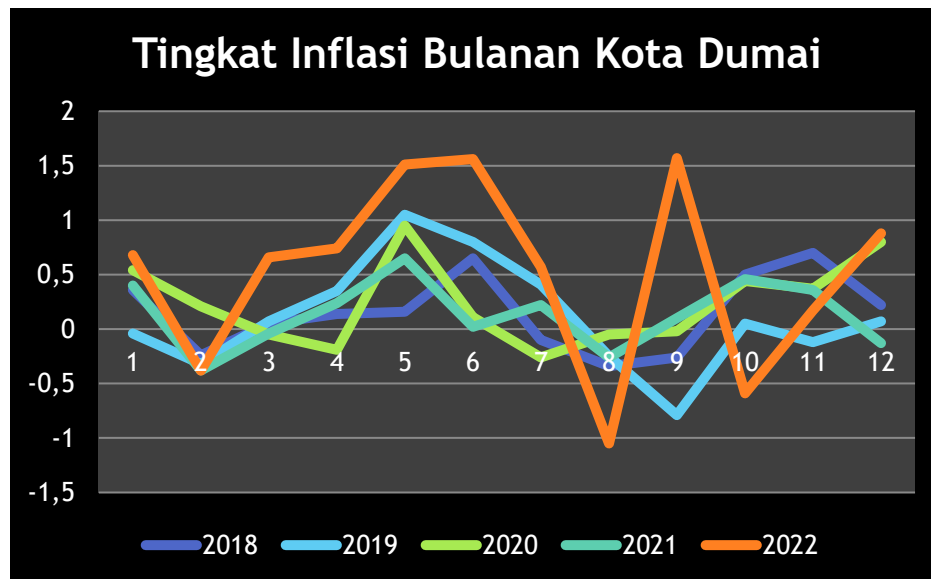


PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 – 2022



Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan.
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif.
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer.
- 2) Aspek Program
 - a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program *multiyears* dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
 - a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID.
 - b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. **Pembangunan Manusia**

Manusia sudah sepantasnya menjadi tujuan utama dalam pembangunan, karena manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Keberhasilan pembangunan seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan kualitas manusianya. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1) **Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)**

Dimensi ini diwakili oleh indikator umur harapan hidup pada waktu lahir. Pertimbangannya adalah umur harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Umur harapan hidup pada waktu lahir diukur dengan tahun.

2) **Pengetahuan (*knowledge*)**

Dimensi ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah yang mencerminkan harapan bagi penduduk usia 7 tahun untuk merasakan bangku pendidikan dan indikator rata-rata lama sekolah yang mencerminkan lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku sekolah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator pendapatan perkapita. Namun agar dapat diperbandingkan antar negara, angka pendapatan perkapita tersebut perlu disesuaikan daya belinya melalui konsep yang disebut “purchasing power parity” (PPP) atau daya beli yang disesuaikan. Penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan adanya “diminishing return of the income utility”.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Perubahan yang dilakukan UNDP terhadap penghitungan IPM disadari atas kebutuhan bahwa suatu indeks komposit seperti IPM harus mampu menjadi alat ukur yang tepat, dengan pemilihan variabel dan metode yang akurat. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmetik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.

Kategori IPM sesuai UNDP:

- 1) Rendah : $IPM < 60$
- 2) Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi : $IPM \geq 80$

Pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai sebesar 75,26. Nilai ini berada diatas nilai IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 73,52. Nilai capaian IPM pada Tahun 2022 mengalami peningkatan 0,51 poin dibanding Tahun 2021. Walaupun ada sedikit peningkatan capaian IPM akibat Pandemi Covid19, dengan nilai capaian IPM 2022 ini masih diatas angka 70, yang artinya kualitas pembangunan manusia di Kota Dumai masih berstatus ‘tinggi’.

Tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Dumai tidak terlepas dari tiga dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Capaian yang telah dicapai Kota Dumai dari sisi pembangunan manusia merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Butuh waktu dan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia, dan Kota Dumai telah berhasil mencapainya. Namun, selain berbangga, kita juga perlu memperhatikan bahwa masih ada kabupaten kota yang masih berada pada kategori sedang. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan manusia di Riau pada umumnya belum merata.

Tabel 2.5 Indikator IPM Kota Dumai

Uraian	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	70,82	70,93	70,98	71,25
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,10	13,12	13,31	13,32
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,85	10,07	10,14	10,15
Pengeluaran PerKapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	12.453	11.751	11.818	12.249



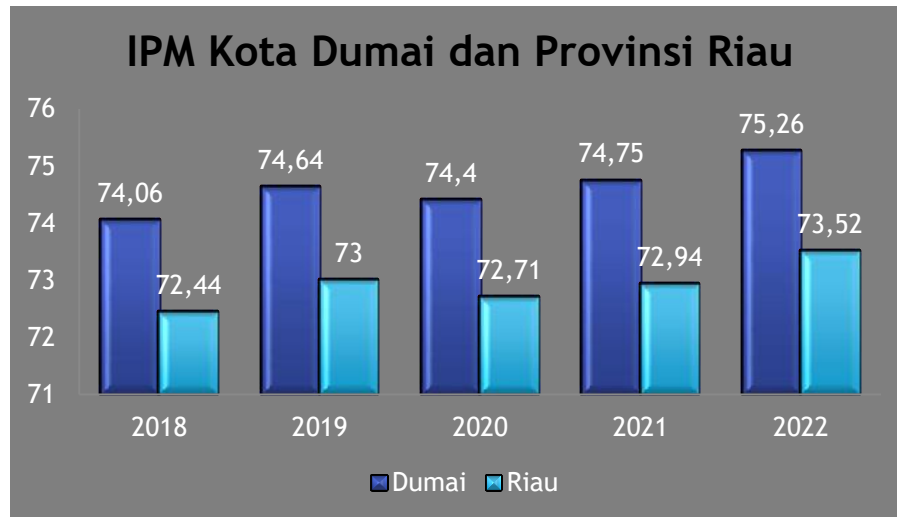
PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai	74,06	74,64	74,40	74,75	75,26
Riau	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai



d. Hotel dan Pariwisata

Pada Tahun 2022, di Kota Dumai tersedia sembilan hotel berbintang (satu bintang satu, tiga bintang dua, tiga bintang tiga dan dua bintang empat) dengan 748 kamar dan 1.134 tempat tidur serta 28 hotel melati dengan 747 kamar dan 1.108 tempat tidur. Selama Tahun 2021 di Kota Dumai tercatat tidak terdapat kedatangan dan keberangkatan warga negara asing.

Tabel 2.7 Statistik Hotel di Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Akomodasi					
Hotel Berbintang	7	8	9	9	9
Akomodasi lainnya	28	28	28	31	31
Total	35	36	37	40	40
Jumlah Kamar					
Hotel berbintang	524	635	748	748	748
Hotel Non Bintang	657	657	723	808	808
Total	1.181	1.292	1.471	1.556	1.556
Jumlah Tempat Tidur					
Hotel berbintang	729	905	1.134	1.134	1.134
Hotel Non Bintang	1.020	1.020	1.078	1.182	1.182
Total	1.749	1.925	2.212	2.316	2.316

Sumber Data : BPS Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.8 Tempat-tempat Pariwisata di Kota Dumai

Jenis	Lokasi
A. WISATA ALAM	
1. Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei - Pakning (Kel. Teluk Makmur)
2. Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
3. Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
4. Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
5. Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
6. Pantai Koneng	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
7. Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
8. Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
9. Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
10. Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
11. Pantai Salam Lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
12. Pantai Kampung Mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
13. Pantai Pesona Batu Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
14. Hutan Wisata	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
15. Danau Bunga Tujuh	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
16. Hutan Bakau UNRI	Jl. Raja Ali Haji Kel. Purnama
17. Wisata Sungai Mesjid	Jl. Dr. Wahidin Purnama
18. Kuala Sungai Dumai	Jl. Syekh Umar
19. Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
20. Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai
21. Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
22. Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
23. Kampung Lamo Pulau Bungk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
24. Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana)
25. Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
26. Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. HR Soebrantas
27. Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan
28. Embung Bukit Cahaya	Kel. Bumi Ayu
29. Sungai Dumai (Wisata Air)	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
30. Telaga Tirta Bukit Datuk	Komplek PERTAMINA - Bukit Datuk
B. WISATA SEJARAH	
1. Makan Pawang Lion	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
2. Perigi Tuk Kurus	Komplek Pertamina Bukit Datuk
3. Batu Telapak Harimau Sakti	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
4. Keramat Cengal Sakti	Jl. Teduh (Pangkalan Sesai)
5. Makan Tuk Kedondong	Komplek Patra Dock
6. Makam Tuk Syech Umar	Jl. Syech Umar
7. Pesanggarahan Putri Tujuh	Jl. Putri Tujuh (Kilang Pertamina)
C. WISATA AGAMA	
1. Dumai Islamic Center (DIC)	Jl. HR Soebrantas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Klenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Ratu Sima - Kelakap Tujuh
3. Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
4. Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
5. Wisata Religi Rumah Suluk	Kec. Sungai Sembilan - Basilam Baru
6. Masjid Terapung Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai- Sei. Pakning (Kel. Teluk Makmur)
D. WISATA OLAH RAGA	
1. Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
2. Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
3. Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
4. Wisata Mancing Wak Ngah Kampung Mundam	Mundam
E. WISATA KULINER	
1. DEKRANASDA Kota Dumai (BKemojo, Dodol, Keripik, dll)	Jl. Jend Sudirman No.55 (Samping Ramayana Plaza)
2. Wisata Kuliner Ombak (Menyediakan Berbagai Jenis Kuliner)	Jl. Sultan Hasanuddin / Jl. Ombak
3. Oleh - Oleh Khas Dumai (Kerupuk Cabe)	Jl. Pulau Mampu (Dekat Pasar P. Payung)
4. Dendeng Pucuk Ubi Fatmawa	Jl. Jeruk Jayamukti
5. Restoran Dan Rumah Makan	Jl. Tenaga - Sultan Syarif Kasim
6. Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	Jl. Kelakap Tujuh
7. Wisata Kuliner Dock Yard	Jl. Dock Yard
8. Kuliner Janur Kuning Jayamukti	Jl. Janur Kuning – Jaya Mukti
9. Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	Jl. Jend. Sudirman
F. WISATA BELANJA	
1. Ramayana Plaza	Jl. Jend. Sudirman
2. Citimall	Jl. Raya Bukit Datuk
3. Pasar Bunda Sei Mersing/ PPulau Payung	Jl. Diponegoro
4. Pasar Senggol	Jl. Jend. Sudirman
5. Pasar Lepin	Jl. Jend. Sudirman

Sumber Data : BPS Kota Dumai

e. Kependudukan

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Admuduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak Tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015.

Hasil Proyeksi Interim Penduduk Kota Dumai pada pertengahan Tahun 2022 sebanyak 331.832 jiwa. Jumlah penduduk Kota Dumai mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 8.380 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 105. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kota Dumai Tahun 2022 mencapai 161 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dumai Kota sebesar 7.695 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 32 jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terbanyak Tahun 2022 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 72.106 jiwa (21,73 persen), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 18.512 jiwa (5,58 persen). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun keatas, dengan jumlah masing-masing sebesar 34.761 jiwa dan 2.759 jiwa.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Tahun 2018 - 2022 Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki (Jiwa)	155.638	158.287	162.769	166.049	170.201
Perempuan(Jiwa)	147.654	150.525	154.013	157.403	161.631
Total (Jiwa)	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832
Sex Ratio	105,41	105,16	105,69	105,49	105,30
Pertumbuhan (%)	1,90	2,15	2,17	0,19	2,71
Kepadatan (Jiwa/km ²)	176	178,77	183	187	192,1

Sumber Data : BPS Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

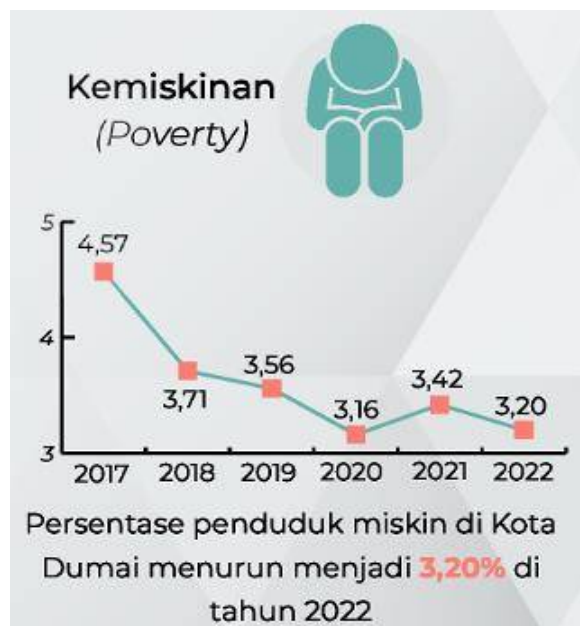
Gambar 3 - Penduduk Kota Dumai Tahun 2022



Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, secara umum perkembangan jumlah penduduk Riau mengalami peningkatan pada kurun waktu 2015-2022. Secara regional, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru, yakni 1.007.540 jiwa. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk (Interim) Tahun 2020-2023 adalah 6,61 juta jiwa.

Dan sebagai salah satu cara mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari tingkat kemiskinan daerah tersebut. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 6,84%. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kota Dumai memiliki 3,20% penduduk miskin di Tahun 2022. Persentase penduduk miskin di tahun ini menurun dibanding dengan Tahun 2021 yang sebesar 3,42%.

Gambar 4 – Persentase Penduduk Miskin Kota Dumai Tahun 2022





PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 5 – Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2022



Untuk menghitung pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indikator rasio indeks gini. Tingkat ketimpangan merupakan indikator yang menggambarkan derajat ketimpangan dalam suatu wilayah dengan nilai yang terletak antara 0 (kemeraan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Kriteria koefisien rasio gini dibagi tiga, yakni ketimpangan Rendah (rasio gini $< 0,3$), Sedang ($0,3 \leq$ rasio gini $\leq 0,5$) dan Tinggi (rasio gini $> 0,5$). Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan di Kota Dumai berada di kriteria sedang dengan nilai rasio gini sebesar 0,36 dan tetap konsisten mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan pemerataan distribusi ekonomi dan kesempatan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial di Kota Dumai semakin membaik.

f. Ketenagakerjaan

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati masalah ketenagakerjaan adalah angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari sekitar 222 ribu penduduk usia kerja Kota Dumai pada Tahun 2021, tercatat sekitar 64,91 persen termasuk dalam angkatan kerja. Angka ini menurun daripada tahun sebelumnya, sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan proporsi penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya).

Sementara itu, selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT adalah angka perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di dunia kerja. Pada Tahun 2021, TPT Kota Dumai menurun dibandingkan Tahun 2020, yaitu dari 8,19 persen menjadi 6,29 persen, yang menunjukkan semakin tingginya proporsi angkatan kerja yang terserap dunia kerja.

Pada Tahun 2022, BPS mencatat dari 148.506 orang Angkatan Kerja (penduduk 15 tahun ke atas), 140.509 orang adalah Pekerja dan 7.997 orang adalah Penganggur. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Dumai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 2.627 orang dan terjadi penurunan sebesar 53,85 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yang mana pada Tahun 2022 terdaftar 1.817 laki-laki dan 810 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tahun 2022 adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 73,20 persen (1.923 orang).

Tabel 2.10 Statistik Ketenagakerjaan Kota Dumai

Uraian	2019	2020	2021	2022
Penduduk 15 tahun Keatas	216.983	218.283	222.553	226.891
Angkatan Kerja	150.323	146.586	144.465	148.506
1. Bekerja	140.600	134.581	135.381	140.509
2. Pengangguran Terbuka	9.723	12.005	9.084	7.997
Bukan Angkatan Kerja	66.660	71.697	78.088	78.385
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,28	67,15	64,91	65,45
Tingkat Pengangguran (TPT) (%)	6,47	8,19	6,29	5,38

Sumber Data : BPS Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Dumai pada Tahun 2022 mencapai 148.506 orang, bertambah secara absolut sebanyak 4.041 orang dibanding Tahun 2021 (144.465 orang). Peningkatan jumlah angkatan kerja pada Tahun 2021 diikuti dengan peningkatan persentase TPAK pada Tahun 2022. Persentase TPAK mengalami peningkatan persentase sebesar 0,54 persen, dari 64,91 persen pada Tahun 2021 menjadi 65,45 persen pada Tahun 2022. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Dumai semakin meningkat. Sementara itu, TPT menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai 5,38 persen pada Tahun 2022. Penurunan angka TPT pada Tahun 2022 mengandung makna bahwa semakin besar proporsi angkatan kerja yang telah terserap dunia kerja. Peningkatan TPAK yang diiringi dengan penurunan TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan produktivitas penduduk angkatan kerja melalui perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja di Tahun 2022.

Berdasarkan status pekerjaan utama, selama tiga tahun terakhir, total penduduk Kota Dumai yang bekerja didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya mencapai 49,78 persen pada Tahun 2022, menurun dibandingkan Tahun 2021. Persentase penduduk yang berusaha juga mengalami penurunan pada Tahun 2022. Sementara itu, kelompok pekerja bebas mengalami peningkatan persentase yang signifikan, dari 4,23 persen menjadi 11,22 persen di Tahun 2022. Adapun pekerja keluarga mengalami penurunan persentase. Dari empat klasifikasi tersebut, hanya kelompok pekerja bebas yang mengalami peningkatan persentase.

Tabel 2.11 - Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	2020	2021	2022
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	52,37	54,30	49,78
Berusaha/Wiraswasta	31,77	32,32	29,97
Berusaha sendiri	16,54	18,44	16,84
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	10,36	10,23	10,23
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	4,88	3,65	2,90
Pekerja Bebas	5,08	4,23	11,22
Pekerja Keluarga	10,78	9,14	9,03
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Pola pada tiga tahun terakhir dapat menjelaskan bahwa, telah terjadi pergeseran pola pekerjaan masyarakat Kota Dumai, yaitu sebagian kecil pekerja beralih menjadi pekerja bebas atau *freelancer* di mana mereka menerima upah tidak secara tetap, tetapi secara harian atau borongan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Kelompok pekerja bebas bekerja untuk lebih dari satu majikan dalam satu bulan terakhir karena belum ada pekerjaan tetap atau usaha yang dapat digelutinya, baik karena alasan rendahnya upah atau jaminan pekerjaan dalam jangka panjang. Berhubung Kota Dumai merupakan salah satu wilayah produsen kelapa sawit dan merupakan kota



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelabuhan, pekerja bebas di Kota Dumai umumnya bekerja di perkebunan sawit atau pelabuhan barang. Lapangan pekerjaan ini tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan tinggi, sehingga memegang kendali yang krusial dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi dikhawatirkan menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan Pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan, sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 2.12 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2020	2021	2022
Tidak Memiliki Ijazah SD / Memiliki Ijazah SD	6,45	5,83	3,43
SMP	4,88	2,20	4,51
SMA	8,65	5,82	4,24
SMK	11,16	9,28	9,47
Perguruan Tinggi	9,21	7,36	6,88
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,19	6,29	5,38

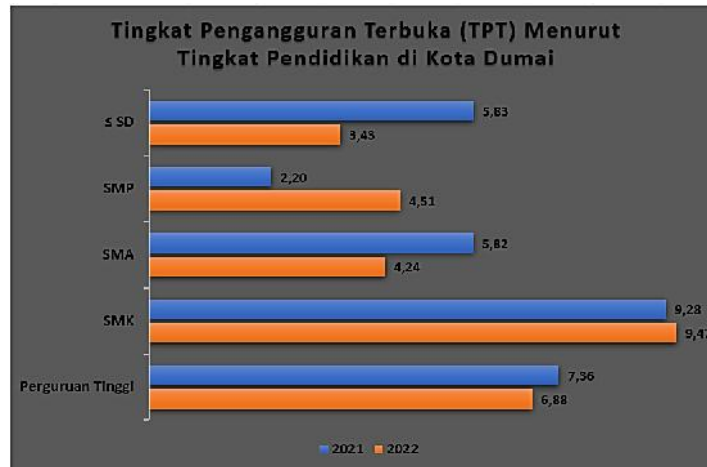
Sumber Data : BPS Kota Dumai

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan SMK merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 11,16 pada Tahun 2020, menurun menjadi 9,28 pada Tahun 2021, dan sedikit meningkat menjadi 9,47 pada Tahun 2022. Tingginya pengangguran dari tamatan SMK menunjukkan bahwa masih banyak lulusan SMK yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar lulusan SMK semakin banyak yang bekerja, baik melalui peningkatan motivasi bekerja atau melalui perluasan spesifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Tahun 2022, TPT tertinggi berikutnya setelah tamatan SMK adalah pada kelompok tamatan perguruan tinggi sebesar 6,88 persen, diikuti kelompok tamatan SMP sebesar 4,51 persen, tamatan SMA sebesar 4,24 persen, dan terakhir tamatan SD ke bawah sebesar 3,43 persen. TPT di Kota Dumai bernilai tinggi pada kelompok tamatan SMK dan perguruan tinggi, sama halnya dengan yang terjadi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Dumai tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki para pencari pekerjaan lulusan SMK dan perguruan tinggi. Sementara itu, rendahnya TPT pada tamatan SD ke bawah di Tahun 2022 dapat mengindikasikan bahwa para pencari kerja tamatan SD ke bawah cenderung tidak selektif terhadap jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 6 – Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Kondisi pengangguran di Kota Dumai diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat keahlian penduduk. Pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di Kota Dumai akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pekerja dalam pembangunan. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha, sehingga dapat turut serta membangun daerahnya karena telah membantu perluasan lapangan pekerjaan baru. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

2.2 Kebijakan Keuangan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka memastikan kebijakan dan tujuan nasional menggunakan instrumen kebijakan fiskal di APBN tetap sinkron dengan yang dilakukan pemerintah daerah. APBN dan APBD bekerja sama secara sinergis, harmonis, dan selaras untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

Ada tiga tugas utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bidang ekonomi sebagai prioritas pembangunan, yaitu Pertama, merumuskan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus fungsi penyediaan kesempatan kerja. Kedua, mencermati karakter pertumbuhan ekonomi di tiap daerah agar bisa mencetak model pembangunan ekonomi regional. Ketiga, pemetaan potensi daerah dari segala sisi untuk menajamkan fokus pembangunan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu Tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah kebijakan bagi perencanaan pembangunan Kota Dumai dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah " Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ". RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Selain itu, agenda-agenda reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak positif kepada daya saing destinasi investasi dan produk-produk ekspor unggulan nasional. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di Tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen. Dari sisi sektoral, arah pemulihan sektor usaha strategis seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata sangat bergantung pada sisi pengendalian Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan dukungan pemulihan terhadap dunia usaha dan industri, kinerja sektor-sektor strategis diperkirakan tetap mampu melanjutkan momentum pertumbuhan positif secara keseluruhan Tahun 2021.

Keberhasilan pengendalian pandemi mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas sebagaimana dilakukan sebelum pandemi. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat. Penguatan program perlindungan sosial akan dijalankan dengan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi program yang relevan, termasuk program



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

subsidi bagi masyarakat. Lebih jauh, stabilitas inflasi yang terkendali pada rentang 3 ± 1 persen secara berkelanjutan juga turut mendukung menjaga daya beli masyarakat.

Tema utama pada prioritas kebijakan fiskal Tahun 2022 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi. Selanjutnya, prioritas kebijakan fiskal Tahun 2022 adalah penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas Kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi yang terjadi.

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi Tahun 2022 akan mencakup:

a. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

b. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

c. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

d. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

e. **Akselerasi Investasi**

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission (OSS)*, meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.

f. **Pemulihan Industri dan Perdagangan**

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA)* *Free Trade Agreement (FTA)*, *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor dan peningkatan efisiensi logistik.

g. **Pembangunan Pariwisata**

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE)*; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

h. **Pendalaman Sektor Keuangan**

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengefektifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan pada Tahun Anggaran 2021.

Hal lain yang juga mempengaruhi kebijakan umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 khususnya untuk penyesuaian belanja daerah adalah pertimbangan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi akibat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta menjaga stabilitas perekonomian masyarakat, dimana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan menjalankan visi serta misi pembangunan daerah.

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

b. **Disiplin Anggaran**

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

c. **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. **Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Kebijakan terhadap struktur APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan Kota Dumai yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b) Transfer Antar Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KM.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada Tahun 2021;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/pmk.07/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;
- 5) Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai 13 Desember 2021, PPJ tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan dihasilkan sumber lain selain PLN. Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut, Pemda hanya dapat memungut PPJ atas listrik yang dihasilkan PLN kepada masyarakat; dan
- 6) Realisasi Pendapatan Tahun 2021.

Peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan usaha, baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kota Dumai melalui berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan dan keberhasilan penggalan potensi pendapatan daerah Kota Dumai, telah diupayakan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi, diantaranya diarahkan pada:



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan memperbaiki program kegiatan yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- 3) Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah untuk tercapainya peningkatan PAD;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya;
- 2) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah; dan
- 3) Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2022 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun 2021.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi di bidang pendapatan;
- 2) Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
- 3) Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah;
- 4) Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
- 5) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PAD;
- 6) Peningkatan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
- 7) Koordinasi antar SKPD ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan PAD;
- 8) Peningkatan kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- 9) Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 10) Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
- 11) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan alokasi dana transfer;
- 12) Melakukan reviu untuk penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
- 13) Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 14) Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan retribusi daerah; dan
- 15) Pemanfaatan teknologi informasi dan di bidang pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit perbendaharaan.

Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2022, yang sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Ketujuh Prioritas Nasional (PN) tersebut, dengan penjabaran masing-masing, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan kata lain prioritas pendanaan ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selain belanja dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan pendanaan untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya sesuai peraturan perundangan yang paling sedikit meliputi:

- 1) Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- 2) Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 3) Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
- 4) Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
- 5) Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- 6) Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Kota Dumai, diarahkan pada:

- 1) Mengutamakan pemanfaatan belanja yang menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- 3) Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Dumai; dan
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja daerah Tahun 2022 dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut asas proporsional, efisien dan efektif dengan penjabaran sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun berjalan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
- 5) Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- 6) Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
- 7) Pengalokasian belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
- 8) Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun Pemerintah Pusat;
- 9) Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
- 10) Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi SKPD.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2022 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berasal dari Banku Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman.

Adapun Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit anggaran. Sehingga dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang/pinjaman.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah deviden (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesungguhnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membagi kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini kemudian: (a). dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; (b). dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; (c). diserahkan kepada Kepala Daerah (gubernur/wali kota/bupati) selaku



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jika kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan & kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, dikuasakan, maka kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, diserahkan. Konsepsi diserahkan, berkesesuaian dengan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pendapatan daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat baik dana perimbangan (DAU, DBH dan DAK), DID & dana desa sudah terbagi dalam belanja pemerintah pusat dalam mandatory spending. Mandatory spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Dalam menyusun APBD perlu diperhatikan pengeluaran wajib bagi Pemerintah Daerah yakni *mandatory spending* yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang. Dipahami & dimaknai secara paripurna, *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial & ekonomi daerah.

Pengalokasian anggaran sebagai *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Alokasi anggaran fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, & Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00. Dan untuk anggaran pendidikan pada Tahun 2022 telah dialokasikan senilai Rp360.450.184.856,00, yaitu sebesar 21,99% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2022.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp326.083.984.482,09 atau sebesar 90,47% dari anggaran.

b. Alokasi anggaran Kesehatan

Pemda Provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, & anak terlantar.

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00. Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja diluar gaji senilai Rp270.912.859.357,00, yaitu sebesar 16,53% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2022.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun Anggaran 2022, total alokasi dana belanja untuk bidang ini senilai Rp458.105.293.984,00 sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp447.623.317.455,90 atau sebesar 97,71% dari anggaran.

c. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Sebagaimana amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan (5 Januari 2022).

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00. Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana senilai Rp205.833.844.805,00, yaitu sebesar 12,56% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2022.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp168.867.495.714,01 atau sebesar 82,04% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 disajikan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian target dan realisasi kinerja Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4.	PENDAPATAN	1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	98,41	1.287.005.084.625,14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	452.558.659.244,67	464.003.743.318,86	102,53	366.696.884.199,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.895.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99	155.525.269.561,29
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43	879.612.437.425,39
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	97,98	763.025.612.681,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	774.402.942.753,00	758.360.104.729,00	97,93	731.422.367.681,00
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	162.373.681.000,00	167.642.355.626,00	103,24	145.468.956.587,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	429.554.051.000,00	427.742.257.138,00	99,58	429.427.931.000,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.721.068.973,00	61.389.147.488,00	97,88	92.602.935.776,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119.754.141.780,00	101.586.344.477,00	84,83	63.922.544.318,00
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,00	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	40.695.763.000,00
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	0	0	0	40.695.763.000,00

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 tercatat senilai Rp1.370.173.351.941,86 atau sebesar 98,41% dari target APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan senilai Rp1.392.335.943.486,00 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan senilai Rp83.168.267.316,72 atau sebesar 6,64% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp1.287.005.084.625,14. Secara garis besar, komposisi pendapatan daerah terbagi dalam:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp452.558.659.244,67 dengan realisasi senilai Rp464.003.743.318,86 atau sebesar 102,53%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp97.306.859.119,11 atau sebesar 26,54% dari realisasi tahun lalu senilai Rp366.696.884.199,75.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah yang mencakup Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp939.777.284.241,33 dengan realisasi senilai Rp906.194.705.147,00 atau sebesar 96,43%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp26.582.267.721,61 atau sebesar 3,02% dari realisasi tahun lalu senilai Rp879.612.437.425,39.

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Dumai tidak menganggarkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan juga tidak ada realisasinya atau sebesar 0,00%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp40.695.763.000,00.

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, salah satunya adalah melihat pada rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi Rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dan untuk Rasio kemandirian daerah Kota Dumai pada Tahun 2022, tergambar sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

- 1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 sedangkan Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 33,86%.
- 2) Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp226.332.093.315,36. Rasio Pendapatan Pajak terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 48,78%.
- 3) Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Pendapatan Retribusi daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp32.206.368.295,17. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 6,94%.
- 4) Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp1.079.761.191,00. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2021 sebesar 0,23%.
- 5) Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp204.385.520.517,33 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 44,05%.
- 6) Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86 sedangkan Pendapatan Transfer Kota Dumai pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp906.194.705.147,00 Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 66,14%.
- 7) Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86 sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil Sumber



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daya Alam Kota Dumai pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp110.563.276.614,00 Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 8,07%.

8) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86 sedangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp427.742.257.138,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2021 sebesar 31,22 %.

9) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022 tercatat senilai Rp427.742.257.138,00 Sedangkan jumlah Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2022 yaitu senilai Rp649.325.852.373,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 65,87%.

10) Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.173.351.941,86 sedangkan pada Tahun 2022 tidak ada realisasi atas lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Dumai, dengan kata lain lain-lain pendapatan daerah yang sah, tercatat senilai Rp0,00. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,00%.

Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022, dihitung berdasarkan PAD terhadap jumlah antara Dana Transfer dan Pinjaman Daerah. Sehingga Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022 yaitu sebesar 46,39%. Kota Dumai masih memiliki nilai Rasio kemandirian Daerah di bawah 50% yang artinya memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah.

b. Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 setelah di konversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.	BELANJA	1.639.213.506.052,00	1.507.041.615.158,67	91,94	1.314.289.659.257,23
5.1.	BELANJA OPERASI	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	93,55	1.105.414.852.748,84
5.1.1	Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	559.998.434.987,95	95,57	481.698.811.775,84
5.1.3	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0
5.1.4	Belanja Subsidi	132.027.000,00	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	30.956.352.225,00	23.282.916.899,08	75,21	35.855.199.901,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	83,53	0
5.2.	BELANJA MODAL	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	84,94	199.818.329.751,39
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(246.877.562.566,00)	(136.843.166.692,81)	55,43	(27.284.574.632,09)

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00 dengan realisasi senilai Rp1.507.041.615.158,67 atau sebesar 91,94%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp192.751.955.901,44 atau sebesar 14,67% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.314.289.659.257,23 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan senilai Rp1.246.579.403.615,03 atau sebesar 93,55% dari yang dianggarkan.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan senilai Rp260.201.936.711,64 atau sebesar 84,94 % dari anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya senilai Rp292.485.131,00 pada Tahun 2022 dan realisasi senilai Rp260.289.017,00 atau 88,99% dari anggaran.

Berikut ini akan beberapa jenis rasio yang terkait dalam pos belanja yaitu:

a) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Operasi yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp1.246.579.403.615,03. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 82,72%

b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Modal yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp260.201.936.711,64. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 17,27%



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c) Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Tak Terduga yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp260.289.017,00. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,02%

d) Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Transfer yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp0,00. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,00%

e) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp649.325.852.373,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 43,09%

f) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi

Realisasi Total Belanja Operasi Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.246.579.403.615,03 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp649.325.852.373,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 52,09%

g) Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut, jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp12.911.808.100,00. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,86%.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.370.198.448.465,86 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.507.041.629.343,67 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit senilai Rp136.868.277.401,81.

c. Ikhtisar Pembiayaan Daerah

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	95,11	195.481.309.973,34
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	100,00	195.481.309.973,34
7.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0
7.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	3.500.000,00	0	0
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0
7.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	257.730.748.879,25	244.260.776.307,14	94,77	195.481.309.973,34
	SURPLUS / (DEFISIT)	(246.877.562.566,00)	(136.843.180.877,81)	55,44	(27.284.574.632,09)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	10.853.186.313,25	107.417.595.429,33	989,73	168.196.735.341,25

Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Penerimaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp262.260.776.307,14 atau sebesar 95,11% dari yang dianggarkan.

2) Pembiayaan Pengeluaran Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari yang di anggarkan.

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto senilai Rp244.260.776.307,14 atau 94,77% dari yang dianggarkan, merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 senilai Rp107.392.498.905,33 atau sebesar 989,50% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan jumlah dari defisit belanja senilai Rp136.868.277.401,81 ditambah dengan Pembiayaan Netto senilai Rp244.260.776.307,14.

d. Ikhtisar Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Format Susunan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) URUSAN WAJIB

Pada Tahun Anggaran 2022 urusan wajib mendapat alokasi dana senilai Rp1.277.738.300.065,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp1.070.590.456.127,09 atau sebesar 83,79% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a) **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

(1) **PENDIDIKAN**

(a) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp360.450.184.856,00 sampai akhir tahun anggaran unit kerja ini terealisasi senilai Rp326.083.984.482,00 atau sebesar 90,47% dari anggaran.

(2) **KESEHATAN**

(a) **Dinas Kesehatan**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp458.105.293.984,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp447.623.317.455,90 atau sebesar 97,71% dari anggaran. Dinas Kesehatan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp168.986.533.951,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp192.479.014.394,14 atau sebesar 113,90% dari anggaran.

(3) **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

(a) **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp239.807.061.077,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp205.603.703.843,68 atau sebesar 85,74% dari anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp15.125.050.000,00 sampai akhir tahun pendapatan realisasi senilai Rp6.363.880.145,17 atau sebesar 42,08% dari anggaran..

(4) **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

(a) **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp30.420.926.685,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp29.364.083.743,00 atau sebesar 96,53% dari anggaran.

(5) **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

(a) **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.603.365.028,00 sampai akhir tahun



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.795.649.835,00 atau sebesar 91,59% dari anggaran.

(b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp16.370.749.743,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.458.100.131,00 atau sebesar 76,10% dari anggaran.

(c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.178.450.634,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.724.149.796,00 atau sebesar 94,45% dari anggaran.

(6) SOSIAL

(a) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.744.573.947,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.821.356.900,00 atau sebesar 88,08% dari anggaran.

b) URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

(1) TENAGA KERJA

(a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.614.357.919,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.368.884.673,00 atau sebesar 96,29 % dari anggaran.

(2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.832.285.231,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.501.885.491,00 atau sebesar 95,16 % dari anggaran.

(3) PANGAN

(a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp19.058.528.368,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp18.327.280.462,00 atau sebesar 96,16 % dari anggaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mengalokasikan anggaran pendapatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

senilai Rp25.440.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp18.160.000,00 atau sebesar 71,38% dari anggaran.

(4) LINGKUNGAN HIDUP

(a) Dinas Lingkungan Hidup.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp26.646.900.873,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp25.667.573.338,00 atau sebesar 96,32% dari anggaran. Dinas Lingkungan Hidup juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp750.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp717.640.000,00 atau sebesar 95,69% dari anggaran.

(5) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

(a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.663.029.736,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.309.900.521,00 atau sebesar 95,39% dari anggaran.

(6) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.380.153.015,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.588.010.878,00 atau sebesar 90,55% dari anggaran.

(7) PERHUBUNGAN

(a) Dinas Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp53.188.470.907,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp51.042.171.358,62 atau sebesar 95,96% dari anggaran. Dinas Perhubungan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp31.000.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp25.844.794.449,00 atau 83,37% dari anggaran.

(8) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(a) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.623.386.261,00 sampai akhir tahun



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.314.885.363,00 atau 97,35% dari anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp1.000.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp525.197.100,00 atau 52,52% dari anggaran.

(9) PENANAMAN MODAL

(a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp12.621.869.768,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.949.829.438,00 atau 86,75% dari anggaran.

(10) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

(a) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp17.218.749.159,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp14.460.147.345,79 atau 83,98% dari anggaran.

(11) PERPUSTAKAAN

(a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp5.291.532.346,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp4.901.218.316,00 atau 92,62% dari anggaran.

2) URUSAN PILIHAN

Pada Tahun Anggaran 2021 urusan pilihan mendapat alokasi dana senilai Rp28.950.614.543,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp25.295.080.360,68 atau 87,37% dari anggaran.

a) KELAUTAN DAN PERIKANAN

(1) Dinas Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.877.088.245,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.436.540.150,00 atau 94,41% dari anggaran. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp25.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp26.009.600,00 atau 104,04% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) **PERDAGANGAN**

(1) **Dinas Perdagangan.**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.823.110.887,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.914.998.722,68 atau 91,61% dari anggaran. Dinas Perdagangan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp1.009.950.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp681.737.000,00 atau 67,50% dari anggaran.

c) **KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

(1) **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.215.465.411,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.235.794.888,00 atau 78,52%

3) URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENDUKUNG DAN PENUNJANG

Pada Tahun Anggaran 2022 urusan pemerintahan fungsi penunjang mendapat alokasi dana senilai Rp1.479.891.941.507,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp1.417.065.067.280,55 atau 95,75% dari anggaran.

a) **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

(1) **Sekretariat Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp67.124.101.596,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp63.531.192.220,00 atau sebesar 94,65% dari anggaran. Sekretariat Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp50.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp28.950.000,00 atau sebesar 57,90% dari anggaran.

(2) **Sekretariat DPRD**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp56.293.494.721,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp42.684.718.587,00 atau sebesar 75,83% dari anggaran.

(3) **Kecamatan Dumai Barat**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.243.700.309,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.886.542.573,00 atau sebesar 96,14% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

(4) Kecamatan Dumai Timur

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja Rp10.527.519.072,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.228.597.526,00 atau sebesar 97,16% dari anggaran.

(5) Kecamatan Bukit Kapur

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.898.896.475,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.511.371.758,00 atau sebesar 96,74% dari anggaran.

(6) Kecamatan Medang Kampai

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.901.180.723,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.574.545.065,00 atau sebesar 95,87% dari anggaran.

(7) Kecamatan Sungai Sembilan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.869.637.137,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.471.023.827,00 atau sebesar 96,33% dari anggaran.

(8) Kecamatan Dumai Kota

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.281.034.946,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.944.772.000,00 atau sebesar 97,02% dari anggaran.

(9) Kecamatan Dumai Selatan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.476.259.589,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.178.026.757,00 atau sebesar 97,15% dari anggaran.

b) PENGAWASAN

(1) Inspektorat

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp14.858.074.831,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.867.287.746,00 atau sebesar 86,60% dari anggaran.

c) PERENCANAAN

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.176.748.354,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.393.400.419,00 atau sebesar 92,30% dari anggaran.

d) KEUANGAN

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp50.833.413.741,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp43.120.970.189,00 atau sebesar 84,83% dari anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp951.174.224.428,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp915.311.002.629,19 atau sebesar 96,23% dari anggaran.

(2) Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp25.847.932.084,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp24.505.432.187,00 atau sebesar 94,81% dari anggaran. Badan Pendapatan Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp223.189.745.107,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp228.202.063.148,36 atau sebesar 102,25% dari anggaran.

e) KEPEGAWAIAN

(1) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.145.978.394,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.650.267.173,00 atau sebesar 93,91% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- b. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- d. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan faktor demografis, yaitu semakin berkembangnya Kota yang menarik penduduk dari



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

daerah lain yang menyebabkan tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik harus selalu prima demi kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan publik;

- e. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan sehingga menyebabkan pemekaran wilayah administrasi;
- f. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal; dan
- g. Pelaksanaan lelang kegiatan fisik yang terlambat, karena prosesnya terkadang baru dimulai pada bulan April dan bahkan ada yang baru dimulai pada Semester II. Hal ini juga disebabkan oleh perencanaan Detail Engineering Design (DED) dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik, sehingga apabila pelaksanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan

- 1) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Dumai dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 2) Pemerintah Kota Dumai sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

b. Entitas Akuntansi

- 1) Setiap satuan kerja perangkat daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- 2) Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu, seperti badan layanan umum daerah (BLUD), yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kota Dumai ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Dumai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Dumai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah Kota Dumai mulai Tahun 2015 menggunakan Basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrua dan Buletin Teknis yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Basis akrua digunakan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan - LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrua.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Dumai, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam lingkup



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kota Dumai, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Pembiayaan;
 - h. Saldo Anggaran Lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi LRA ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), PPKD, dan Pemda.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintahan Kota Dumai).

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. Nama SKPD/PPKD/Pemda;
 - b. Periode yang dicakup;
 - c. Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - d. Satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar LO adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LO Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan entitas pelaporan;
 - c. Periode yang dicakup;
 - d. Mata uang pelaporan; dan
 - e. Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan - LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari Operasi;
 - d. Kegiatan Non-operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit - LO.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Klasifikasi

1. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Kewajiban jangka pendek;
 - h. Kewajiban jangka panjang; dan
 - i. Ekuitas.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KAS DAN SETARA KAS

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian BLUD pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

KETENTUAN UMUM

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

Tujuan

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LRA Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan - LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang biaya terhadap Pendapatan - LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LRA adalah:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. apabila pada saat proses penyusunan laporan keuangan tahun berkenaan terjadi transfer atas pendapatan tahun berkenaan dan tahun-



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tahun sebelumnya, yang penerimaan kasnya setelah tanggal 31 Desember tahun berkenaan sampai saat penerbitan laporan keuangan, maka pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan – LO tahun berkenaan.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LO yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan - LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan atau;
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.

PENGUKURAN

1. Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, dan sebagainya.
4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat senilai nilai nominal kas yang diterima pemda.
5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat senilai estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan - LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan - LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan - LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

12. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban Pegawai

1. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan atau disebut belanja tidak langsung (seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, dan sebagainya) dan belanja pegawai yang terkait dengan kegiatan atau disebut belanja langsung (seperti belanja honor).
2. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
3. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

Beban Barang dan Jasa

1. Beban barang dan jasa termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
2. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
3. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
4. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima pemda.
5. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
6. Belanja persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.
7. Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Pengungkapan beban persediaan dalam CaLK meliputi beban persediaan yang merupakan konsumsi persediaan selama periode akuntansi dan persediaan dalam kondisi rusak atau usang pada periode akuntansi.
9. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.
 - b. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir.
 - c. Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.
10. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
11. Belanja yang dibayar di muka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
12. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
13. Beban penyusutan atas pengeluaran setelah tanggal perolehan (rehab/pemeliharaan) yang terjadi sebelum Tahun 2016 dihitung sesuai perhitungan beban penyusutan aset induk. Untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan yang terjadi mulai Tahun 2016, maka beban penyusutannya dihitung berdasarkan tabel tambahan masa manfaat.
14. Semua aset tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum dapat ditentukan masa manfaatnya sebagaimana diatur di dalam kebijakan akuntansi aset tetap.
15. Aset tetap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakomptabel, yaitu aset tetap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi, tidak dilaporkan di dalam neraca.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).
17. Tabel masa manfaat aset tetap yang disusutkan diatur di dalam Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap.
18. Masa manfaat aset diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan harus dilakukan koreksi penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.
19. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
20. Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
21. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
22. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca.
23. Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.
24. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
25. Beban Bunga terkait dengan penarikan pinjaman oleh pemda kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga keuangan/nonkeuangan, masyarakat). Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan basis akrual tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan belanja bunga yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.
26. Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya.
27. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.
28. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Beban Subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
30. Beban bantuan sosial yang dibayar dengan uang persediaan diakui pada saat SPJ Belanja Bantuan Sosial telah disahkan oleh PPKD.
31. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
32. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang tidak memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
33. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun setelah dikurangi dengan jumlah agunan. Apabila jumlah agunan lebih besar dari pada jumlah tagihan dana bergulir terkait, penyisihan dana bergulir tak tertagih tidak dihitung.
34. Besarnya penyisihan dana bergulir yang tidak dapat diterima kembali, dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

TABEL 4.1 PERSENTASE PENYISIHAN DANA BERGULIR

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Periode 1 s.d 2 Tahun Setelah Jatuh Tempo	25%
2	Periode 2 s.d 3 Tahun Setelah Jatuh Tempo	50%
3	Periode 3 s.d 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	75%
4	Periode Diatas 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	100%

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Beban Non-operasional
- d. Beban Luar Biasa
- 2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non- Operasional.
- 3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO DAN POS LUAR BIASA

Tujuan

Kebijakan akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa mengatur perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- 1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi surplus/defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang meliputi definisi, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGUKURAN

- 1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
- 2. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
- 3. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
- 4. Selisih dari Pendapatan - LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- 5. Yang termasuk ke dalam Pendapatan - LO/beban dari kegiatan non- operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non-lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional lainnya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional.
7. Surplus/Defisit - LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan pos kejadian luar biasa.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Surplus/defisit LO merupakan bottom line item atau item bads terakhir dari LO.
2. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.
3. Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
5. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam CaLK.

14. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas mengatur perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

Definisi

1. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Kas meliputi:
 - a. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
 - b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
 - c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
 - d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.
4. **Kas terdiri dari:**
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di BLUD;
 - e. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - f. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
5. Setara **kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
7. Setara kas terdiri dari:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.
8. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
9. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
10. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Kas di Bendahara BOS adalah merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan yang tidak melalui RKUD.
13. Kas di Bendahara JKN merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan yang tidak melalui RKUD.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan maupun Bendahara umum Daerah.

PENGUKURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. **Saldo** kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
 - c. Kebijakan manajemen setara kas.

15. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Dumai tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Piutang pendapatan;
 - b. Piutang Lainnya.
5. Piutang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - h. Piutang Pendapatan Lainnya.
6. Piutang lainnya terdiri dari:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Uang Muka.

7. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

Piutang pendapatan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
4. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari tiga tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lima tahun ke atas;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
6. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun;
 - 2) Wajib Pajak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari tiga tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lima tahun ke atas;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 7. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari satu tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu tahun sampai kurang dari tiga tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lima tahun ke atas.
- 8. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- 9. Wajib pajak/retribusi dinyatakan bangkrut, tidak ditemukan dan meninggal dunia harus didukung oleh bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

- 1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:
 - a. Kualitas Lancar senilai 0% (nol persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:
 - a. Kualitas Lancar senilai 0% (nol persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan senilai 50 % (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:
 - a. Nol persen (0%) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Sepuluh persen (10%) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Lima puluh (50%) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Seratus persen (100%) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - c. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - d. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

16. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
6. Persediaan meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan baku ;
 - l. Barang dalam proses/setengah jadi;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
3. Persediaan diakui sebagai:
 - a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan/terus-menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
 - b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

PENGUKURAN PERSEDIAAN

1. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
2. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
3. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
4. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Untuk persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi, persediaan disajikan senilai:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
6. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

17. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI INVESTASI

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Dumai, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
4. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.
 - b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur senilai nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

TABEL 4.2 PERSENTASE PENYISIHAN PENGEMBALIAN INVESTASI

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode di atas 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

6. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
7. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

18. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*nonregenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Definisi

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. **Masa manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. **Jumlah** produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah nilai minimum pengeluaran atas pengadaan baru suatu aset tetap yang dihitung sesuai nilai aset tetap per satuan/unit untuk dikapitalisir menjadi aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal (pengadaan baru) berlaku hanya untuk aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai per unitnya \geq Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah ke atas).
3. Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dikecualikan dari batasan jumlah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal, sehingga berapapun nilai perolehan awal tersebut yang berasal dari belanja modal seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap.
4. Belanja pengadaan yang memenuhi kriteria aset tetap, dengan nilai perolehan dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dan pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja modal maka dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*) dan **tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.**

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada Poin satu diatas, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang **tidak serupa** atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi setelah perolehan adalah batasan nilai minimum yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, renovasi, atau restorasi yang memenuhi kriteria tertentu.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk penambahan fungsi, peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah **pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi **akumulasi** penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap, terlampir pada bagian akhir kebijakan akuntansi ini.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan/atau
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 3. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
4. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

19. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau yang sejenis nyaatas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur senilai nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

20. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kebuildmitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Aset Lain-lain.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat namun masih memiliki nilai buku maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap dan atas penyusutan tersebut disajikan ke dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.

PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
6. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
3. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurnagi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (*Sewa, Build Operate Transfer/BOT dan Build Transfer Operate/BTO*); dan
- d. Informasi lainnya yang penting.

21. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. **Kewajiban** muncul antara lain karena:
 - a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
 - c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
 - d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. **Nilai** nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Klasifikasi

1. Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - b. Kewajiban Jangka Panjang.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - e. Utang Beban; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
4. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Asuran Kesehatan (Askes), Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen), dan Tabungan Perumahan (Taperum).
5. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya
6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca
7. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
8. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
9. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
10. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kewajiban Jangka Panjang adalah:

- a. Utang Dalam Negeri;
 - b. Utang Luar Negeri; dan
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.
11. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari dua belas bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
 12. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
 13. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
 14. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
 15. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*) diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*) diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
4. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam dua belas bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
6. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
7. Utang Beban, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
8. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
10. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
14. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui senilai nilai kekurangan transfer

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

22. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

23. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai.

Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LRA:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kesalahan Pendapatan - LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

24. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Definisi

1. BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi (entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LPE, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
2. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh PPKD.
4. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD.
5. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
6. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan PPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.
7. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
8. Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
2. Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.

PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

entitas akuntansi (SKPD dan PPKD), dan mengeliminasi Akun Resiprokal (jika ada).

- Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor satu sampai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor lima.

PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	PERALATAN DAN MESIN	
	ALAT BESAR	
	ALAT BESAR DARAT	10
	ALAT BESAR APUNG	8
	ALAT BANTU	7
	ALAT ANGKUTAN	
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
	ALAT UKUR	5
	ALAT PERTANIAN	
	ALAT PENGOLAHAN	4
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
	ALAT KANTOR	5
	ALAT RUMAH TANGGA	5
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	ALAT STUDIO	5
	ALAT KOMUNIKASI	5
	PERALATAN PEMANCAR	10
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
	ALAT KEDOKTERAN	5
	ALAT KESEHATAN UMUM	5
	ALAT LABORATORIUM	
	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIK	15
	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN	10
	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
	ALAT PERSENJATAAN	
	SENJATA API	10
	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
	SENJATA SINAR	5
	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
	KOMPUTER	
	KOMPUTER UNIT	4
	PERALATAN KOMPUTER	4
	ALAT EKSPLORASI	
	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
	ALAT PENGEBORAN	
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
	PERALATAN SUMUR	10
	PERALATAN PRODUKSI	10
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
	ALAT BANTU EKSPLORASI	
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
	ALAT BANTU PRODUKSI	10
	ALAT KESELAMATAN KERJA	
	ALAT DETEKSI	5
	ALAT PELINDUNG	5
	ALAT SAR	2
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
	ALAT PERAGA	
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
	UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSI	8
	RAMBU-RAMBU	
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
	PERALATAN OLAHRAGA	
	PERALATAN OLAHRAGA	3
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	BANGUNAN GEDUNG	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
	BANGUNAN MONUMEN	
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
	BANGUNAN MENARA	
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
	TUGU/TANDA BATAS	50
3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	JALAN DAN JEMBATAN	
	JALAN	10
	JEMBATAN	50
	BANGUNAN AIR	
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
	BANGUNAN AIR KOTOR	40
	INSTALASI	
	INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	30
	INSTALASI AIR KOTOR	30
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
	INSTALASI PERTAHANAN	30
	INSTALASI GAS	30
	INSTALASI PENGAMAN	20
	INSTALASI LAIN	5
	JARINGAN	
	JARINGAN AIR MINUM	30
	JARINGAN LISTRIK	40
	JARINGAN TELEPON	20
	JARINGAN GAS	30



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**TABEL KAPITALISASI, BATASAN DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET
TETAP SETELAH PEROLEHAN AWAL**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
1	TANAH	Tidak dikapitalisasi	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN :	Tidak dikapitalisasi	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN :			
	BANGUNAN GEDUNG			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	MONUMEN			
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		7
		>75% s.d 100%		10
	BANGUNAN MENARA			
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
	TUGU/TANDA BATAS	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			
	JALAN DAN JEMBATAN			



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	JALAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JEMBATAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN AIR			
	BANGUNAN AIR IRIGASI	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	BANGUNAN AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	INSTALASI			
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GARDU LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI PERTAHANAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	INSTALASI GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI PENGAMAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI LAIN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	JARINGAN			
	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	JARINGAN GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
4	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-
Penambahan masa manfaat paling tinggi sebesar masa manfaat aset bersangkutan dan tidak melebihi masa manfaat aset tersebut.				



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Hak Paten	10
4	Hak Cipta	10
5	Waralaba	20
6	Hasil Kajian / Pengembangan	20



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 PENDAPATAN

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	98,41	1.287.005.084.625,14

Penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Dumai diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Peraturan Daerah Kota Dumai mengalami perubahan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun Anggaran 2022 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2022.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.392.335.943.486,00 dengan realisasi senilai Rp1.370.198.448.465,86 atau sebesar 98,41%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.287.005.084.625,14 mengalami kenaikan senilai Rp83.193.363.840,72 atau sebesar 6,46% .

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, berikut rinciannya:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	452.558.659.244,67	464.003.743.318,86	102,53	366.696.884.199,75
Pendapatan Transfer	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43	879.612.437.425,39
Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00
Jumlah	1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	98,41	1.287.005.084.625,14

Dasar Hukum Pungutan atas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
452.558.659.244,67	464.003.743.318,86	102,53	366.696.884.199,75

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp452.558.659.244,67 dengan realisasi senilai Rp464.003.743.318,86 atau sebesar 102,53%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp366.696.884.199,75 mengalami kenaikan senilai Rp97.306.859.119,11 atau sebesar 26,54% .

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00
Pendapatan Retribusi Daerah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.895.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99	155.525.269.561,29
Jumlah	452.558.659.244,67	464.003.743.318,86	102,53	366.696.884.199,75

5.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00

Pendapatan Pajak Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp222.013.986.230,00 dengan realisasi senilai Rp226.332.093.315,36 atau sebesar 101,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp185.979.625.987,00 mengalami kenaikan senilai Rp40.352.467.328,36 atau sebesar 21,70% .

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak atau Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT/SPTD)/ Dokumen Pemberitahuan/Pemesanan diketahui bahwa pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak atau pajak yang telah dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan terjadinya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Restitusi ini dapat terjadi pada periode yang sama ataupun tidak sama antara tahun pajak dengan tahun anggarannya. Hal ini terjadi terus menerus setiap tahun sehingga transaksi ini merupakan transaksi yang berulang. Oleh karena itu transaksi pengembalian penerimaan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian, tanpa memperhatikan tahun penerimaan pajak yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2022 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2022 senilai Rp 226.332.093.315,36 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel	4.550.000.000,00	5.074.791.223,00	111,53	4.361.663.283,00
Pajak Restoran	10.000.000.000,00	11.356.465.806,00	113,56	9.048.442.070,00
Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.964.400.861,00	109,13	798.429.705,00
Pajak Reklame	2.900.000.000,00	2.948.451.655,00	101,67	2.564.739.618,00
Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000,00	53.107.445.718,36	104,13	49.460.966.966,00
Pajak Parkir	600.000.000,00	762.420.003,00	127,07	696.543.612,00
Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54	1.092.931.785,00
Pajak Sarang Burung Walet	92.000.000,00	99.458.475,00	108,11	91.147.560,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	130.971.986.230,00	134.826.570.198,00	102,94	97.362.170.939,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.000.000.000,00	14.987.150.552,00	78,88	20.502.590.449,00
Jumlah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00

Tabel 5.1.3a Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya

Uraian	Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi LRA
Pajak Hotel	4.967.851.420,00	106.939.803,00	5.074.791.223,00
Pajak Restoran	11.224.936.653,00	131.529.153,00	11.356.465.806,00

Uraian	Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi LRA
Pajak Hiburan	1.937.938.580,00	26.462.281,00	1.964.400.861,00
Pajak Reklame	2.911.870.139,00	36.581.516,00	2.948.451.655,00
Pajak Penerangan Jalan	53.071.690.244,36	35.755.474,00	53.107.445.718,36
Pajak Parkir	759.711.603,00	2.708.400,00	762.420.003,00
Pajak Air Tanah	1.181.018.899,00	23.919.925,00	1.204.938.824,00
Pajak Sarang Burung Walet	96.736.475,00	2.722.000,00	99.458.475,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	134.826.570.198,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	14.987.150.552,00
Jumlah	76.151.754.013,36	366.618.552,00	226.332.093.315,36

Pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Daftar jenis pungutan dan dasar hukum pungutan serta SKPD pemungutan terlampir.

Rincian Pajak Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	4.550.000.000,00	5.074.791.223,00	111,53	4.361.663.283,00
Jumlah	4.550.000.000,00	5.074.791.223,00	111,53	4.361.663.283,00

b. Pajak Restoran

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	10.000.000.000,00	11.356.465.806,00	113,56	9.048.442.070,00
Jumlah	10.000.000.000,00	11.356.465.806,00	113,56	9.048.442.070,00

c. Pajak Hiburan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.800.000.000,00	1.964.400.861,00	109,13	798.429.705,00
Jumlah	1.800.000.000,00	1.964.400.861,00	109,13	798.429.705,00

d. Pajak Reklame

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2.900.000.000,00	2.948.451.655,00	101,67	2.564.739.618,00
Jumlah	2.900.000.000,00	2.948.451.655,00	101,67	2.564.739.618,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	51.000.000.000,00	53.107.445.718,36	104,13	49.460.966.966,00
Jumlah	51.000.000.000,00	53.107.445.718,36	104,13	49.460.966.966,00

f. Pajak Parkir

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	762.420.003,00	127,07	696.543.612,00
Jumlah	600.000.000,00	762.420.003,00	127,07	696.543.612,00

g. Pajak Air Bawah Tanah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54	1.092.931.785,00
Jumlah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54	1.092.931.785,00

h. Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	92.000.000,00	99.458.475,00	108,11	91.147.560,00
Jumlah	92.000.000,00	99.458.475,00	108,11	91.147.560,00

i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	130.971.986.230,00	134.826.570.198,00	102,94	97.362.170.939,00
Jumlah	130.971.986.230,00	134.826.570.198,00	102,94	97.362.170.939,00

j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	19.000.000.000,00	14.987.150.552,00	78,88	20.502.590.449,00
Jumlah	19.000.000.000,00	14.987.150.552,00	78,88	20.502.590.449,00

5.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp47.985.440.000,00 dengan realisasi senilai Rp32.206.368.295,17 atau sebesar 67,12%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp23.776.863.396,46 mengalami kenaikan senilai Rp8.429.504.898,71 atau sebesar 35,45% .

Penerimaan Retribusi Daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2022 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun 2022 senilai Rp 32.206.368.295,17 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Umum	4.579.475.000,00	2.494.026.850,00	54,46	2.119.372.650,00
Jasa Usaha	28.403.965.000,00	23.468.411.300,00	82,62	18.300.235.746,46
Perizinan Tertentu	15.002.000.000,00	6.243.930.145,17	41,62	3.357.255.000,00
Jumlah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan atas piutang tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dirincikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	750.000.000,00	717.640.000,00	95,69	775.275.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	427.750.000,00	42,78	144.779.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	750.000.000,00	393.516.000,00	52,47	368.187.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829.475.000,00	178.702.750,00	21,54	71.080.550,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000.000,00	251.221.000,00	100,49	203.602.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	525.197.100,00	52,52	556.449.100,00
Jumlah	4.579.475.000,00	2.494.026.850,00	54,46	2.119.372.650,00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Umum per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	750.000.000,00	717.640.000,00	95,69	775.275.000,00
Jumlah	750.000.000,00	717.640.000,00	95,69	775.275.000,00

(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	1.000.000.000,00	427.750.000,00	42,78	144.779.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	427.750.000,00	42,78	144.779.000,00

(3) Retribusi Pelayanan Pasar

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	750.000.000,00	393.516.000,00	52,47	368.187.000,00
Jumlah	750.000.000,00	393.516.000,00	52,47	368.187.000,00

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	829.475.000,00	178.702.750,00	8,60	71.080.550,00
Jumlah	829.475.000,00	178.702.750,00	21,54	71.080.550,00

(5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	250.000.000,00	251.221.000,00	100,49	203.602.000,00
Jumlah	250.000.000,00	251.221.000,00	100,49	203.602.000,00

(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	1.000.000.000,00	525.197.100,00	52,52	556.449.100,00
Jumlah	1.000.000.000,00	525.197.100,00	52,52	556.449.100,00

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000,00	157.000.000,00	116,30	38.250.000,00
Retribusi Terminal	74.722.500,00	141.688.000,00	189,62	106.910.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.808.802.500,00	22.971.389.300,00	82,60	18.090.824.546,46
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	28.950.000,00	57,90	0,00
Retribusi Rumah potong Hewan	25.440.000,00	18.160.000,00	71,38	24.680.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	285.000.000,00	125.214.400,00	43,93	31.686.200,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	26.009.600,00	104,04	7.885.000,00
Jumlah	28.403.965.000,00	23.468.411.300,00	82,62	18.300.235.746,46

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	38.250.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.000.000,00	157.000.000,00	116,30	0,00
Jumlah	135.000.000,00	157.000.000,00	116,30	38.250.000,00

(2) Retribusi Terminal

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	74.722.500,00	141.688.000,00	189,62	106.910.000,00
Jumlah	74.722.500,00	141.688.000,00	189,62	106.910.000,00

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	27.808.802.500,00	22.971.389.300,00	82,60	18.090.824.546,46
Jumlah	27.808.802.500,00	22.971.389.300,00	82,60	18.090.824.546,46

(4) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	50.000.000,00	28.950.000,00	57,90	0,00
Jumlah	50.000.000,00	28.950.000,00	57,90	0,00

(5) Retribusi Rumah potong Hewan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.440.000,00	18.160.000,00	71,38	24.680.000,00
Jumlah	25.440.000,00	18.160.000,00	71,38	24.680.000,00

(6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	285.000.000,00	125.214.400,00	43,93	31.686.200,00
Jumlah	285.000.000,00	125.214.400,00	43,93	31.686.200,00

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	25.000.000,00	26.009.600,00	104,04	7.885.000,00
Jumlah	25.000.000,00	26.009.600,00	104,04	7.885.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan dianggarkan senilai Rp25.000.0000,00 terealisasi senilai Rp26.009.600,00 merupakan hasil penjualan bibit ikan yang pembibitannya dilakukan oleh Dinas Perikanan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.348.255.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	37.000.000,00	371,86	9.000.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	50.000,00	2,50	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	14.990.050.000,00	6.206.880.145,17	41,41	0,00
Jumlah	15.002.000.000,00	6.243.930.145,17	41,62	3.357.255.000,00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	3.348.255.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.348.255.000,00

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	9.950.000,00	37.000.000,00	371,86	9.000.000,00
Jumlah	9.950.000,00	37.000.000,00	371,86	9.000.000,00

(3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2.000.000,00	50.000,00	2,50	0,00
Jumlah	2.000.000,00	50.000,00	2,50	0,00

(4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.990.050.000,00	6.206.880.145,17	41,41	0,00
Jumlah	14.990.050.000,00	6.206.880.145,17	41,41	0,00

5.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.663.748.323,67 dengan realisasi senilai Rp1.079.761.191,00 atau sebesar 64,90%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.415.125.255,00 mengalami penurunan senilai Rp335.364.064,00 atau sebesar 23,70%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah

Tabel 5.1.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT. Bank Riau Kepri	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
Jumlah	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp1.079.761.191,00 dari anggaran senilai Rp1.663.748.323,67 atau sebesar 64,90% yang dibagikan oleh PT. Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri tanggal 18 Juni 2022.

5.1.a.4) Lain-lain PAD yang sah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	180.895.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99	155.525.269.561,29

Belanja Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp180.895.484.691,00 dengan realisasi senilai Rp204.385.520.517,33 atau sebesar 112,99%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp48.860.250.956,04 atau sebesar 31,42% dari realisasi tahun lalu senilai Rp155.525.269.561,29

Untuk Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah selama Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan atas piutang tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.049.424.600,00	1.107.157.800,00	36,31	2.432.359.773,03
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	801.206.585,00	853.733.335,00	106,56	514.768.500,00
Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000,00	1.999.999.999,00	200,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	2.750.000.000,00	3.540.712.219,01	128,75	4.697.811.210,09
Penerimaan Bunga Deposito	3.100.000.000,00	793.646.059,95	25,60	1.135.241.649,19
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.586.341.852,39	100,00	6.901.321.180,88
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.175.758.877,00	1.869.969.833,00	159,04	618.882.522,00
Pendapatan Dari Pengembalian	32.560.678,00	154.945.024,84	475,87	258.427.665,00
Pendapatan BLUD	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	113,90	138.966.457.061,10
Jumlah	180.895.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99	155.525.269.561,29

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Peralatan dan Mesin	3.049.424.600,00	880.302.000,00	28,87	2.187.764.625,00
Gedung dan Bangunan	0,00	226.855.800,00	100,00	244.595.148,03
Jumlah	3.049.424.600,00	1.107.157.800,00	36,31	2.432.359.773,03

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	801.206.585,00	853.733.335,00	106,56	381.768.500,00
Jumlah	801.206.585,00	853.733.335,00	106,56	514.768.500,00

(3) Hasil Kerja Sama Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000,00	1.999.999.999,00	200,00	0,00
Jumlah	1.000.000.000,00	1.999.999.999,00	200,00	0,00

(4) Jasa Giro

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.450.542.404,01	138,02	4.544.788.522,09
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000,00	90.169.815,00	36,07	153.022.688,00
Jumlah	2.750.000.000,00	3.540.712.219,01	128,75	4.697.811.210,09

(5) Penerimaan Bunga Deposito

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.100.000.000,00	793.646.059,95	25,60	1.135.241.649,19
Jumlah	3.100.000.000,00	793.646.059,95	25,60	1.135.241.649,19

(6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.586.341.852,39	100,00	6.901.321.180,88
Jumlah	0,00	1.586.341.852,39	0,00	6.901.321.180,88

(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Hotel	12.881.622,00	21.892.978,00	169,96	618.882.522,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	20.147.339,00	50.568.239,00	250,99	80.889.803,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	8.222.100,00	35.629.981,00	433,34	17.612.429,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.112.877,00	3.763.944,00	338,22	7.680.986,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	818.170.264,00	862.809.160,00	105,46	178.691.012,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.128.173,00	6.473.205,00	304,17	3.189.268,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	11.665.567,00	18.520.345,00	158,76	3.189.268,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1.001.910,00	4.402.830,00	439,44	1.493.030,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	300.429.025,00	865.909.151,00	288,22	248.516.325,00
Jumlah	1.175.758.877,00	1.869.969.833,00	159,04	1.160.144.643,00

(8) Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.000.000,00	57.619.144,84	384,13	83.530.148,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	17.560.678,00	97.325.880,00	554,23	174.897.517,00
Jumlah	32.560.678,00	154.945.024,84	475,87	258.427.665,00

(9) Pendapatan BLUD

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan BLUD	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	113,90	138.966.457.061,10
Jumlah	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	113,90	138.966.457.061,10

Pendapatan BLUD senilai Rp192.479.014.394,14 yang terdiri dari BLUD-RSUD senilai Rp178.253.562.735,00, BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A senilai Rp118.132.821,00 dan BLUD-Puskesmas senilai Rp14.107.318.838,14 yang digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 untuk BLUD-RSUD dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 tanggal 5 Desember 2014 untuk BLUD-Puskesmas.

Tabe 5.1.10 Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas dan UPT LABKES Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.672.806.012,64
BLUD Puskesmas Dumai Barat	1.093.425.890,43
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.329.364.254,60
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2.306.619.170,45
BLUD Puskesmas Medang Kampai	911.622.312,79
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.119.859.928,79
BLUD Puskesmas Bukit Timah	633.100.760,32
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2.409.331.511,01
BLUD Puskesmas Purnama	1.138.190.636,56
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.492.998.360,55
Jumlah I	14.107.318.838,14
UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	118.132.821,00
Jumlah II	118.132.821,00
Jumlah BLUD PUSKESMAS dan UPT LABKES	14.225.451.659,14

Tabe 5.1.11 Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Tahun 2022

BLUD RSUD Dumai	178.253.562.735,00
Jumlah Pendapatan BLUD - RSUD	178.253.562.735,00
Jumlah Pendapatan BLUD PUSKESMAS, UPT LABKES, dan BLUD RSUD	192.479.014.394,14

5.1.b Pendapatan Transfer

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43	879.612.437.425,39

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai.

Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 senilai Rp906.194.705.147,00 atau sebesar 96,43% dengan anggaran senilai Rp939.777.284.241,33, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp879.612.437.425,39 mengalami kenaikan senilai Rp26.582.267.721,61 atau sebesar 3,02%.

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	97,98	763.025.612.681,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39
Jumlah	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43	879.612.437.425,39

5.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	97,98	763.025.612.681,00

Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tabel 5.1.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Perimbangan	774.402.942.753,00	758.360.104.729,00	97,93	731.422.367.681,00
Dana Insentif Daerah (DID)	20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00
Jumlah	794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	97,98	763.025.612.681,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 senilai Rp778.721.000.729,00 atau sebesar 97,98% dengan anggaran senilai Rp794.763.838.753,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp763.025.612.681,00 mengalami kenaikan senilai Rp15.695.388.048,00 atau sebesar 2,06% , dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
774.402.942.753,00	758.360.104.729,00	97,93	731.422.367.681,00

Realisasi Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 senilai Rp758.360.104.729,00 atau sebesar 97,93% dengan anggaran senilai Rp774.402.942.753,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp731.422.367.681,00 mengalami kenaikan senilai Rp26.937.737.048,00 atau sebesar 3,68%.

Tabel 5.1.14 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	162.373.681.000,00	167.642.355.626,00	103,24	145.468.956.587,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	429.554.051.000,00	427.742.257.138,00	99,58	429.427.931.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.721.068.973,00	61.389.147.488,00	97,88	92.602.935.776,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119.754.141.780,00	101.586.344.477,00	84,83	63.922.544.318,00
Jumlah	774.402.942.753,00	758.360.104.729,00	97,93	731.422.367.681,00

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
162.373.681.000,00	167.642.355.626,00	103,24	145.468.956.587,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp167.642.355.626,00 atau sebesar 103,24% dengan anggaran senilai Rp162.373.681.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp145.468.956.587,00 mengalami kenaikan senilai Rp22.173.399.039,00 atau sebesar 15,24% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Tranfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.807.415.000,00	28.290.914.676,00	105,53	32.489.986.139,00
DBH PPh Pasal 21	26.523.015.000,00	26.523.015.000,00	100,00	28.458.745.600,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.150.983.000,00	2.265.106.496,00	196,80	907.558.300,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	261.000,00	42.840,00	16,41	7.105,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	90.637.250.000,00	93.308.519.614,00	102,95	65.037.087.400,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.994.893.000,00	3.994.893.000,00	100,00	1.732.767.313,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.892.430.000,00	2.892.430.000,00	100,00	2.011.059.867,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.409.123.000,00	8.409.123.000,00	100,00	13.157.244.713,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
Jumlah	162.373.681.000,00	167.642.355.626,00	103,24	145.468.956.587,00

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	429.554.051.000,00	427.742.257.138,00	99,58	429.427.931.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp427.742.257.138,00 atau sebesar 99,58% dengan anggaran senilai Rp429.554.051.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp429.427.931.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.685.673.862,00 atau sebesar 0,39%.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	62.721.068.973,00	61.389.147.488,00	97,88	92.602.935.776,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp61.389.147.488,00 atau sebesar 97,88% dengan anggaran senilai Rp62.721.068.973,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp92.602.935.776,00 mengalami penurunan senilai Rp31.213.788.288,00 atau sebesar 33,71% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.16 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.376.396.000,00	1.374.823.000,00	99,89	1.164.180.030,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.775.078.000,00	10.715.841.000,00	99,45	13.973.518.877,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.360.454.000,00	10.329.665.000,00	99,70	7.420.333.655,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	470.885.000,00	470.885.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304.614.000,00	302.130.900,00	99,18	497.949.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	6.961.322.360,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	2.612.930.185,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.892.701.000,00	2.793.306.235,00	96,56	2.604.123.885,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	33.250.090.451,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	5.305.345.110,00	5.073.521.108,00	95,63	740.017.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.340.205.000,00	7.326.130.000,00	99,81	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	684.582.499,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	2.221.395.747,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.569.233.064,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.188.582.000,00	6.068.554.005,00	98,06	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.556.055.598,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.803.838.000,00	4.775.800.000,00	99,42	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.660.233.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Keselamatan Sistem Kesehatan	12.902.970.863,00	12.158.491.240,00	94,23	3.994.119.110,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.121.535.315,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.571.315.000,00
Jumlah	62.721.068.973,00	61.389.147.488,00	97,88	92.602.935.776,00

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	119.754.141.780,00	101.586.344.477,00	84,83	63.922.544.318,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp101.586.344.477,00 atau sebesar 84,83% dengan anggaran senilai Rp119.754.141.780,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp63.922.544.318,00 mengalami kenaikan senilai Rp37.663.800.159,00 atau sebesar 58,92% .

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	50.738.030.000,00	39.790.809.140,00	78,42	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.125.000.000,00	720.000.000,00	64,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.724.109.000,00	51.967.177.370,00	96,73	55.565.896.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.271.000.000,00	1.558.500.000,00	68,63	528.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.661.700.000,00	0,00	0,00	2.761.200.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	747.200.000,00	0,00	0,00	248.850.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.898.007.720,00	4.119.961.607,00	105,69	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	586.357.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	113.748.200,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.133.477.900,00	2.133.478.400,00	100,00	1.812.823.476,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.514.289.842,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	99.692.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	254.403.060,00	254.403.060,00	100,00	326.122.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	289.414.900,00	289.414.900,00	100,00	575.671.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	752.600.000,00	752.600.000,00	100,00	490.000.000,00
Jumlah	119.754.141.780,00	101.586.344.477,00	84,83	63.922.544.318,00

Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler senilai Rp39.790.809.140,00 merupakan realisasi atas Sekolah Dasar Negeri senilai Rp28.277.287.442,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp11.513.521.698,00

Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja senilai Rp720.000.000,00 merupakan realisasi atas Sekolah Dasar Negeri senilai Rp340.000.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp380.000.000,00

Realisasi DAK Non Fisik-BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan tidak disajikan sebagai realisasi di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena mekanisme penyalurannya menggunakan Belanja Hibah.

Berikut rincian realisasi Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Masyarakat:

Tabel 5.1.18 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	5.555.387.650,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	3.333.380.000,00
Jumlah	8.888.767.650,00

Tabel 5.1.19 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	285.000.000,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	120.000.000,00
Jumlah	405.000.000,00

Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik-BOP Paud Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Paud dan Taman Kanak-Kanak	2.650.636.000,00
Jumlah	2.650.636.000,00

Tabel 5.1.21 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Lembaga Pendidikan Kesetaraan	670.850.000,00
Jumlah	670.850.000,00

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp20.360.896.000,00 atau sebesar 100,00% dengan anggaran senilai Rp20.360.896.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp31.603.245.000,00 mengalami penurunan senilai Rp11.242.349.000,00 atau sebesar 35,57%.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode kedua Pada Tahun 2022.

5.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember Tahun 2022 senilai Rp127.473.704.418,00 atau sebesar 87,90% dengan anggaran senilai Rp145.013.445.488,33, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp116.586.824.744,39 mengalami kenaikan senilai Rp10.886.879.673,61 atau sebesar 9,34%.

Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Tabel 5.1.22 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil - Pajak	135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39
Bantuan Keuangan	9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00
Jumlah	145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39

a. Pendapatan Bagi Hasil-Pajak

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39

Realisasi Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil - Pajak Desember Tahun 2022 senilai Rp119.057.454.418,00 atau sebesar 88,17% dengan anggaran senilai Rp135.038.655.888,33, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp108.598.824.744,39 mengalami kenaikan senilai Rp10.458.629.673,61 atau sebesar 9,63%.

Rincian Pendapatan Bagi Hasil-Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.23 Rincian Pendapatan Bagi Hasil - Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.896.492.585,00	22.971.874.473,00	65,83	29.992.973.539,39
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.832.685.376,00	21.921.639.641,00	110,53	17.354.434.978,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.990.711.781,00	49.412.202.929,00	86,70	40.254.549.943,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.511.341.254,00	1.132.139.769,00	25,10	1.063.038.420,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.807.424.892,33	23.619.597.606,00	125,59	19.933.827.864,00
Jumlah	135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39

Realisasi Dana Bagi Hasil dari Tahun 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 809 /IV/ 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1137/VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 756 /IV / 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2021) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 868 /V/ 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1220 /VIII / 2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1658/XI /2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 867 /V / 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1851 /XII / 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober - November) Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

b. Bantuan Keuangan

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp9.974.789.600,00 dengan realisasi senilai Rp8.416.250.000,00 atau sebesar 84,38%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi penurunan senilai Rp428.250.000,00 atau sebesar 5,36% dari realisasi tahun lalu senilai Rp7.988.000.000,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari Tahun 2022 dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1651/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

5.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00

Lain - lain Pendapatan - Hibah Dana Bos

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	40.695.763.000,00

Lain - lain Pendapatan merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0 % mengalami penurunan dari Tahun 2021 senilai Rp40.695.763,00 atau sebesar 100%. Pada Tahun 2022 alokasi Pendapatan Dana BOS telah dianggarkan pada Pendapatan DAK Non Fisik.

5.2 BELANJA

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.639.213.506.052,00	1.507.041.615.158,67	91,94	1.314.289.659.257,23

Belanja Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00 dengan realisasi senilai Rp1.507.041.615.158,67 atau sebesar 91,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp192.751.955.901,44 atau sebesar 14,67% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.314.289.659.257,23. Yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Rincian Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	93,55	1.105.414.852.748,84
Belanja Modal	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	84,94	199.818.329.751,39
Belanja Tidak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
Jumlah	1.639.213.506.052,00	1.507.041.615.158,67	91,94	1.314.289.659.257,23

5.2.a Belanja Operasi

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	93,55	1.105.414.852.748,84

Belanja Operasi Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.332.589.032.114,00 dengan realisasi senilai Rp1.246.579.389.430,03 atau sebesar 93,55%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp141.164.536.681,19 atau sebesar 12,77% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.105.414.852.748,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Rincian Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00
Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	559.998.434.987,95	95,57	481.698.811.775,84
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00
Belanja Subsidi	132.027.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	30.956.352.225,00	23.282.916.899,08	75,21	35.855.199.901,00
Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	83,53	0,00
Jumlah	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	93,55	1.105.414.852.748,84

5.2.a.1) Belanja Pegawai

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00

Belanja Pegawai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp698.106.313.302,00 dengan realisasi senilai Rp649.325.852.373,00 atau sebesar 93,01%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp61.465.011.301,00 atau sebesar 10,46% dari realisasi tahun lalu senilai Rp587.860.841.072,00

Tabel 5.2.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	305.050.873.034,00	273.861.489.044,00	89,78	264.398.713.084,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	195.022.865.866,00	184.476.904.079,00	94,59	176.126.304.790,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74.007.872.524,00	66.297.988.023,00	89,58	70.662.436.970,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.300.079.400,00	15.996.033.321,00	58,59	16.005.055.941,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.106.903.009,00	955.752.317,00	86,34	867.676.247,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	964.560.000,00	801.600.000,00	83,11	731.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	94.653.159.469,00	106.936.085.589,00	112,98	59.069.054.040,00
Jumlah	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Tabel 5.2.5 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.199.400.127,00	115.866.747.496,00	92,55	109.607.991.163,00
Dinas Kesehatan + RSUD	54.547.034.746,00	46.160.358.111,00	84,62	44.338.165.658,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.483.162.995,00	4.035.992.649,00	90,03	4.332.922.594,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.024.651.240,00	1.811.468.079,00	89,47	1.539.293.883,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.242.212.160,00	3.044.886.232,00	93,91	3.057.993.720,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.058.294.393,00	1.852.081.277,00	89,98	1.831.923.658,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.592.494.934,00	1.531.595.485,00	96,18	1.489.105.874,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.865.064.600,00	1.691.915.293,00	90,72	1.276.703.727,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.042.316.480,00	1.896.039.953,00	92,84	1.755.111.248,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.408.880.222,00	2.255.882.488,00	93,65	2.199.000.089,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.545.590.700,00	2.307.013.648,00	90,63	2.525.572.039,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.222.949.816,00	1.978.416.101,00	89,00	1.982.126.556,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.712.732.164,00	1.510.462.587,00	88,19	1.672.198.906,00
Dinas Perhubungan	4.546.837.032,00	4.271.860.674,00	93,95	4.409.864.372,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.087.509.381,00	1.915.306.770,00	91,75	1.965.311.344,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.574.915.440,00	2.265.166.716,00	87,97	2.315.892.455,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.958.732.705,00	2.722.318.797,00	92,01	2.757.633.258,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.948.762.160,00	1.760.159.906,00	90,32	1.773.535.646,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.939.673.320,00	1.726.048.827,00	88,99	1.681.981.117,00
Dinas Perikanan	1.737.186.520,00	1.557.320.318,00	89,65	1.762.800.790,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.797.319.532,00	4.474.556.614,00	93,27	4.487.359.422,00
Dinas Perdagangan	2.541.583.560,00	2.353.000.762,00	92,58	2.494.326.642,00
Sekretariat Daerah	9.246.407.840,00	8.042.081.295,00	86,98	8.115.674.803,00
Sekretariat DPRD	2.858.947.800,00	2.592.353.901,00	90,68	2.452.828.454,00
Kecamatan Dumai Barat	2.805.573.760,00	2.632.972.353,00	93,85	2.556.412.091,00
Kecamatan Dumai Timur	3.029.461.392,00	2.844.446.077,00	93,89	2.538.532.411,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.843.592.195,00	3.614.944.973,00	94,05	3.341.266.560,00
Kecamatan Medang Kampai	2.815.930.086,00	2.625.860.942,00	93,25	2.553.140.323,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.611.513.133,00	3.360.973.411,00	93,06	3.014.707.947,00
Kecamatan Dumai Kota	2.994.715.560,00	2.935.612.338,00	98,03	2.880.320.396,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.937.772.639,00	2.792.878.216,00	95,07	2.780.155.618,00
Inspektorat	3.982.222.875,00	3.643.073.816,00	91,48	3.465.354.799,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.523.787.490,00	2.357.785.046,00	93,42	2.428.129.130,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.463.691.480,00	21.241.098.008,00	80,27	21.111.876.690,00
Badan Pendapatan Daerah	4.717.418.757,00	4.239.027.893,00	89,86	3.993.847.702,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.142.533.800,00	1.949.781.992,00	91,00	1.909.651.999,00
Jumlah	305.050.873.034,00	273.861.489.044,00	89,78	264.398.713.084,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel 5.2.6 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.165.923.608,00	62.898.987.813,00	96,52	61.565.463.813,00
Dinas Kesehatan + RSUD	37.141.637.159,00	35.464.288.454,00	95,48	31.785.722.796,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.421.320.000,00	3.130.716.930,00	91,51	3.173.016.392,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.649.208.831,00	1.571.285.800,00	95,28	1.256.154.901,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.385.974.168,00	2.822.503.200,00	83,36	2.666.440.080,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.546.716.000,00	1.441.248.429,00	93,18	1.482.746.781,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.649.349.000,00	1.476.856.928,00	89,54	1.357.564.836,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.638.754.267,00	1.626.206.020,00	99,23	1.096.349.006,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.708.563.084,00	1.646.692.155,00	96,38	1.499.395.077,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.036.736.000,00	1.995.628.213,00	97,98	1.874.381.639,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.160.234.328,00	2.053.724.761,00	95,07	2.133.428.583,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.257.200.000,00	2.162.418.155,00	95,80	2.121.067.374,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.453.946.088,00	1.385.935.934,00	95,32	1.421.584.960,00
Dinas Perhubungan	3.183.240.000,00	3.135.442.888,00	98,50	3.064.919.305,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.886.950.000,00	1.871.098.956,00	99,16	1.792.451.729,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.967.992.451,00	1.866.636.804,00	94,85	1.800.976.729,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.998.194.008,00	2.750.385.030,00	91,73	2.759.987.326,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.689.816.000,00	1.603.340.078,00	94,88	1.519.912.978,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.557.728.822,00	1.460.622.923,00	93,77	1.293.092.734,00
Dinas Perikanan	1.530.165.735,00	1.422.576.542,00	92,97	1.433.609.761,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.771.480.204,00	3.625.993.724,00	96,14	3.512.733.148,00
Dinas Perdagangan	1.906.911.237,00	1.845.121.976,00	96,76	1.814.231.058,00
Sekretariat Daerah	10.059.853.348,00	9.434.802.412,00	93,79	9.812.849.719,00
Sekretariat DPRD	1.926.358.952,00	1.845.575.065,00	95,81	1.713.402.435,00
Kecamatan Dumai Barat	2.240.571.949,00	2.161.670.112,00	96,48	1.995.780.547,00
Kecamatan Dumai Timur	2.497.200.000,00	2.442.972.781,00	97,83	2.180.812.040,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.171.792.540,00	3.084.840.077,00	97,26	2.728.286.709,00
Kecamatan Medang Kampai	2.267.966.615,00	2.161.108.365,00	95,29	2.039.364.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.954.281.200,00	2.844.638.097,00	96,29	2.376.112.758,00
Kecamatan Dumai Kota	2.660.520.363,00	2.487.420.423,00	93,49	2.283.603.805,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.516.400.000,00	2.442.889.416,00	97,08	2.313.192.817,00
Inspektorat	6.505.269.497,00	5.008.733.030,00	77,00	5.138.905.117,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.698.041.114,00	2.648.003.534,00	98,15	2.479.161.026,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.168.474.773,00	3.515.839.035,00	84,34	3.841.043.278,00
Badan Pendapatan Daerah	3.385.545.731,00	3.025.732.323,00	89,37	2.759.880.340,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.262.548.794,00	2.114.967.696,00	93,48	2.038.678.693,00
Jumlah	195.022.865.866,00	184.476.904.079,00	94,59	176.126.304.790,00

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.2.7 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.374.447.400,00	51.221.618.400,00	90,86	56.579.577.040,00
Dinas Kesehatan + RSUD	850.603.253,00	757.829.214,00	89,09	370.400.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.187.824.000,00	1.145.984.000,00	96,48	1.009.630.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	178.000.000,00	141.830.000,00	79,68	118.147.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	121.560.000,00	102.165.000,00	84,04	65.190.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.040.000,00	71.040.000,00	100,00	31.720.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	71.460.000,00	71.460.000,00	100,00	71.460.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	71.475.000,00	71.475.000,00	100,00	71.400.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81.005.000,00	77.095.000,00	95,17	66.220.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	128.350.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	183.600.000,00	180.420.000,00	98,27	76.893.983,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.700.000,00	32.700.000,00	100,00	32.700.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	145.290.000,00	145.290.000,00	100,00	119.670.000,00
Dinas Perhubungan	1.349.920.000,00	235.542.167,00	17,45	330.440.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	236.280.000,00	234.770.000,00	99,36	208.040.600,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	65.220.000,00	65.220.000,00	100,00	65.220.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	718.920.000,00	118.069.250,00	16,42	164.305.711,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	48.250.000,00	46.000.000,00	95,34	51.030.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.660.000,00	66.659.600,00	100,00	69.750.000,00
Dinas Perikanan	67.910.000,00	67.910.000,00	100,00	55.270.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	161.934.000,00	160.710.000,00	99,24	147.804.000,00
Dinas Perdagangan	104.230.000,00	86.170.000,00	82,67	100.573.550,00
Sekretariat Daerah	771.680.000,00	512.580.000,00	66,42	374.060.000,00
Sekretariat DPRD	393.192.000,00	227.500.000,00	57,86	239.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	94.215.000,00	93.165.000,00	98,89	110.820.000,00
Kecamatan Dumai Timur	80.830.000,00	79.080.000,00	97,83	88.740.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	92.560.000,00	92.560.000,00	100,00	125.137.000,00
Kecamatan Medang Kampai	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	68.620.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	87.885.000,00	87.885.000,00	100,00	63.572.000,00
Kecamatan Dumai Kota	140.080.000,00	136.730.000,00	97,61	98.370.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	115.216.000,00	114.164.000,00	99,09	95.218.600,00
Inspektorat	119.480.000,00	118.759.250,00	99,40	56.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	187.179.500,00	187.179.500,00	100,00	185.120.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.359.623.640,00	2.236.620.000,00	94,79	1.598.434.000,00
Badan Pendapatan Daerah	7.158.444.531,00	7.092.809.642,00	99,08	7.541.133.486,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.478.200,00	97.318.000,00	99,84	83.920.000,00
Jumlah	74.007.872.524,00	66.297.988.023,00	89,58	70.662.436.970,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel 5.2.8 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat DPRD	27.300.079.400,00	15.996.033.321,00	58,59	16.005.055.941,00
Jumlah	27.300.079.400,00	15.996.033.321,00	58,59	16.005.055.941,00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel 5.2.9 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	179.513.040,00	90.112.348,00	50,20	136.043.407,00
Badan Pendapatan Daerah	865.639.969,00	865.639.969,00	100,00	730.306.840,00
Jumlah	1.106.903.009,00	955.752.317,00	86,34	867.676.247,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Pendapatan Daerah merupakan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah,

f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.2.10 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	530.000.000,00
Sekretariat DPRD	364.560.000,00	201.600.000,00	55,30	201.600.000,00
Jumlah	964.560.000,00	801.600.000,00	83,11	731.600.000,00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Belanja Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

g. Belanja Pegawai BLUD

Tabel 5.2.11 Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan+RSUD	94.653.159.469,00	106.936.085.589,00	112,98	59.069.054.040,00
Jumlah	94.653.159.469,00	106.936.085.589,00	112,98	59.069.054.040,00

Rincian Belanja Pegawai per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.2.12 Rincian Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	246.739.771.135,00	229.987.353.709,00	93,21	227.753.032.016,00
Dinas Kesehatan + RSUD	187.192.434.627,00	189.318.561.368,00	101,14	135.563.342.494,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.092.306.995,00	8.312.693.579,00	91,43	8.515.568.986,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.851.860.071,00	3.524.583.879,00	91,50	2.913.595.784,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.749.746.328,00	5.969.554.432,00	88,44	5.789.623.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.676.050.393,00	3.364.369.706,00	91,52	3.346.390.439,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	3.313.303.934,00	3.079.912.413,00	92,96	2.918.130.710,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.575.293.867,00	3.389.596.313,00	94,81	2.444.452.733,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.831.884.564,00	3.619.827.108,00	94,47	3.320.726.325,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.469.016.222,00	4.274.910.701,00	95,66	4.201.731.728,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.889.425.028,00	4.541.158.409,00	92,88	4.735.894.605,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.512.849.816,00	4.173.534.256,00	92,48	4.135.893.930,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.311.968.252,00	3.041.688.521,00	91,84	3.213.453.866,00
Dinas Perhubungan	9.079.997.032,00	7.642.845.729,00	84,17	7.805.223.677,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.210.739.381,00	4.021.175.726,00	95,50	3.967.129.673,00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.608.127.891,00	4.197.023.520,00	91,08	4.182.089.184,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.737.596.713,00	5.590.773.077,00	82,98	5.681.926.295,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.686.828.160,00	3.409.499.984,00	92,48	3.344.478.624,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.564.062.142,00	3.253.331.350,00	91,28	3.044.823.851,00
Dinas Perikanan	3.335.262.255,00	3.047.806.860,00	91,38	3.251.680.551,00
Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	8.730.733.736,00	8.261.260.338,00	94,62	8.147.896.570,00
Dinas Perdagangan	4.552.724.797,00	4.284.292.738,00	94,10	4.409.131.250,00
Sekretariat Daerah	20.857.454.228,00	18.679.576.055,00	89,56	18.968.627.929,00
Sekretariat DPRD	32.843.138.152,00	20.863.062.287,00	63,52	20.611.886.830,00
Kecamatan Dumai Barat	5.140.360.709,00	4.887.807.465,00	95,09	4.663.012.638,00
Kecamatan Dumai Timur	5.607.491.392,00	5.366.498.858,00	95,70	4.808.084.451,00
Kecamatan Bukit Kapur	7.107.944.735,00	6.792.345.050,00	95,56	6.194.690.269,00
Kecamatan Medang Kampai	5.182.176.701,00	4.885.249.307,00	94,27	4.661.124.823,00
Kecamatan Sungai Sembilan	6.653.679.333,00	6.293.496.508,00	94,59	5.454.392.705,00
Kecamatan Dumai Kota	5.795.315.923,00	5.559.762.761,00	95,94	5.262.294.201,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.569.388.639,00	5.349.931.632,00	96,06	5.188.567.035,00
Inspektorat	10.606.972.372,00	8.770.566.096,00	82,69	8.660.759.916,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.409.008.104,00	5.192.968.080,00	96,01	5.092.410.156,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.991.789.893,00	26.993.557.043,00	81,82	26.551.353.968,00
Badan Pendapatan Daerah	16.127.048.988,00	15.223.209.827,00	94,40	15.025.168.368,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.502.560.794,00	4.162.067.688,00	92,44	4.032.250.692,00
Jumlah	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00

5.2.a.2) Belanja Barang Dan Jasa

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
585.937.529.587,00	559.998.434.987,95	95,57	481.698.811.775,84

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp585.937.529.587,00 dengan realisasi senilai Rp559.998.434.987,95 atau sebesar 95,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp78.299.623.212,11 atau sebesar 16,25% dari realisasi tahun lalu senilai Rp481.698.811.775,84

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.2.13 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang	107.830.463.142,00	100.611.417.194,76	93,31	71.658.965.621,76
Belanja Jasa	229.062.824.220,00	214.602.274.534,00	93,69	207.941.185.381,00
Belanja Pemeliharaan	58.581.354.009,00	56.896.834.399,19	97,12	57.923.284.043,08
Belanja Perjalanan Dinas	57.430.622.841,00	52.881.607.692,00	92,08	45.083.480.276,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.162.320.292,00	13.137.750.300,00	99,81	6.088.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	36.104.699.500,00	31.947.871.800,00	88,49	29.942.171.389,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.765.245.583,00	89.920.679.068,00	107,35	63.061.465.065,00
Jumlah	585.937.529.587,00	559.998.434.987,95	95,57	481.698.811.775,84

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Tabel 5.2.14 Rincian Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	103.938.915.233,00	96.724.503.053,00	93,06	71.587.059.821,76
Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.891.547.909,00	3.886.914.141,76	99,88	71.905.800,00
Jumlah	107.830.463.142,00	100.611.417.194,76	93,31	71.658.965.621,76

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Tabel 5.2.15 Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.570.002.018,00	4.490.465.534,00	98,26	2.798.937.108,00
Dinas Kesehatan + RSUD	36.501.319.272,00	35.498.010.354,00	97,25	19.842.753.466,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.027.436.130,00	18.642.654.136,00	93,09	14.720.780.794,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.985.672.937,00	2.645.885.902,00	88,62	197.772.773,00
Satuan Polisi Pamong Praja	358.014.596,00	357.527.096,00	99,86	434.704.788,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.443.784.943,00	745.185.010,00	30,49	1.637.702.342,76
Badan kesatuan bangsa dan politik	157.477.700,00	139.862.001,00	88,81	194.649.638,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	592.380.860,00	493.758.729,00	83,35	566.314.995,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	957.244.923,00	937.158.855,00	97,90	176.587.260,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	596.916.539,00	572.338.796,00	95,88	777.316.908,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.658.063.425,00	2.521.009.699,00	94,84	1.725.580.055,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.334.744.670,00	1.331.464.510,00	99,75	1.566.242.594,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	937.363.554,00	906.601.490,00	96,72	1.504.640.320,00
Dinas Perhubungan	2.783.252.077,00	2.715.810.830,00	97,58	777.808.620,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	998.499.833,00	916.526.675,00	91,79	5.059.091.547,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	295.072.010,00	242.509.300,00	82,19	776.964.335,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	699.067.755,00	571.293.560,00	81,72	340.698.616,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.370.217.035,00	1.364.703.471,00	99,60	941.854.808,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176.306.404,00	165.002.764,00	93,59	192.393.103,00
Dinas Perikanan	529.028.872,00	528.142.587,00	99,83	887.886.835,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	992.390.608,00	980.483.768,00	98,80	129.876.689,00
Dinas Perdagangan	180.492.960,00	136.398.510,00	75,57	170.178.700,00
Sekretariat Daerah	5.354.809.437,00	4.981.877.701,00	93,04	3.704.754.480,00
Sekretariat DPRD	4.979.041.572,00	4.194.248.386,00	84,24	3.792.626.620,00
Kecamatan Dumai Barat	604.157.200,00	563.612.973,00	93,29	355.369.546,00
Kecamatan Dumai Timur	644.842.720,00	612.411.609,00	94,97	550.573.157,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.007.751.740,00	985.294.960,00	97,77	710.150.387,00
Kecamatan Medang Kampai	502.518.190,00	502.360.470,00	99,97	740.580.585,00
Kecamatan Sungai Sembilan	599.547.204,00	583.549.100,00	97,33	510.342.700,00
Kecamatan Dumai Kota	686.691.913,00	636.957.910,00	92,76	1.040.445.808,00
Kecamatan Dumai Selatan	775.807.809,00	744.095.466,00	95,91	650.341.315,00
Inspektorat	477.444.985,00	407.844.500,00	85,42	357.877.554,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	800.810.845,00	666.312.100,00	83,20	602.412.427,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.660.423.972,00	2.415.530.750,00	90,79	1.426.842.705,00
Badan Pendapatan Daerah	2.157.054.016,00	2.014.243.066,00	93,38	1.273.729.135,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	543.264.509,00	513.370.485,00	94,50	450.277.108,00
Jumlah	103.938.915.233,00	96.724.503.053,00	93,06	71.587.059.821,76

2. Belanja Barang Tak Pakai Habis

Tabel 5.2.16 Belanja Barang Tak Pakai Habis Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	117.300.000,00	117.208.000,00	99,92	105.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Dinas Perhubungan	3.774.247.909,00	3.769.706.141,76	99,88	29.148.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	816.900,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	13.272.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	8.879.200,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	543.600,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	18.721.100,00
Jumlah	3.891.547.909,00	3.886.914.141,76	99,88	71.905.800,00

b. Belanja Jasa

Tabel 5.2.17 Rincian Belanja Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	182.400.390.606,00	173.737.758.588,00	95,25	170.331.365.223,00
Belanja Jaminan/Asuransi	19.827.767.308,00	19.625.710.325,00	98,98	20.482.319.490,00
Belanja Sewa Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.411.597.006,00	4.180.106.860,00	94,75	2.954.888.260,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.029.214.601,00	877.927.837,00	85,30	2.215.125.012,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	305.000.001,00	290.000.000,00	95,08	150.650.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.602.608.980,00	2.575.694.221,00	98,97	4.062.366.050,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Non Konstruksi	15.335.715.376,00	10.484.590.538,00	68,37	4.555.020.582,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.090.530.342,00	2.770.486.165,00	89,64	3.178.450.764,00
Jumlah	229.062.824.220,00	214.602.274.534,00	93,69	207.941.185.381,00

1. Belanja Jasa Kantor

Tabel 5.2.18 Belanja Jasa Kantor Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.110.861.459,00	20.699.696.281,00	89,57	25.390.635.924,00
Dinas Kesehatan + RSUD	46.788.183.529,00	44.369.820.271,00	94,83	51.308.932.666,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.279.974.670,00	11.409.947.710,00	92,92	7.937.152.003,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.723.418.625,00	1.633.936.927,00	94,81	940.384.638,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.535.765.000,00	1.518.518.062,00	98,88	1.299.643.923,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.326.549.000,00	1.034.016.112,00	77,95	968.350.957,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.185.220.000,00	1.096.120.000,00	92,48	1.171.695.933,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.514.875.000,00	1.482.960.757,00	97,89	1.469.127.379,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	918.626.400,00	911.185.001,00	99,19	660.728.685,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.032.678.100,00	942.596.763,00	91,28	999.181.300,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.700.293.400,00	8.597.796.761,00	98,82	2.730.167.533,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	804.009.250,00	800.837.251,00	99,61	8.084.282.543,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.634.767.800,00	1.531.276.810,00	93,67	1.132.069.207,00
Dinas Perhubungan	18.648.226.215,00	18.541.423.014,00	99,43	1.206.633.533,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.606.761.246,00	4.577.678.000,00	99,37	16.490.966.299,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.063.419.200,00	1.025.918.153,00	96,47	5.114.736.732,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	999.109.500,00	911.099.506,00	91,19	772.193.313,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.873.657.086,00	1.812.322.596,00	96,73	1.297.106.171,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	586.865.000,00	572.401.498,00	97,54	532.010.963,00
Dinas Perikanan	1.105.989.990,00	1.066.019.779,00	96,39	1.085.048.554,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.008.279.860,00	2.958.535.045,00	98,35	1.640.850.177,00
Dinas Perdagangan	1.951.425.150,00	1.749.668.821,00	89,66	954.886.313,00
Sekretariat Daerah	14.258.556.079,00	13.819.049.115,00	96,92	10.780.719.889,00
Sekretariat DPRD	3.391.119.198,00	3.008.047.046,00	88,70	2.511.768.720,00
Kecamatan Dumai Barat	2.555.045.240,00	2.507.325.176,00	98,13	2.042.859.014,00
Kecamatan Dumai Timur	3.493.505.780,00	3.485.179.048,00	99,76	2.788.872.360,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.214.299.980,00	2.189.097.229,00	98,86	2.083.116.823,00
Kecamatan Medang Kampai	1.316.532.000,00	1.297.829.064,00	98,58	1.264.210.531,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.200.016.000,00	2.190.807.191,00	99,58	2.124.401.309,00
Kecamatan Dumai Kota	3.162.685.000,00	3.141.547.606,00	99,33	2.485.057.139,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.832.914.600,00	2.810.106.385,00	99,19	2.347.698.116,00
Inspektorat	513.538.000,00	477.043.300,00	92,89	546.577.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.450.920.000,00	1.209.550.000,00	83,36	1.288.533.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.099.596.649,00	4.975.110.649,00	97,56	3.510.825.500,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2.391.721.500,00	2.314.165.761,00	96,76	2.090.293.076,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.120.985.100,00	1.069.125.900,00	95,37	1.279.648.000,00
Jumlah	182.400.390.606,00	173.737.758.588,00	95,25	170.331.365.223,00

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.2.19 Belanja iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan	4.013.280,00	3.114.720,00	77,61	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	19.631.999.378,00	19.486.840.658,00	99,26	20.410.623.927,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.655.744,00	4.635.360,00	53,55	1.146.960,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.063.680,00	12.670.560,00	96,99	6.432.739,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.609.600,00	6.609.600,00	100,00	1.636.260,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.468.602,00	5.447.736,00	99,62	0,00
Dinas Perikanan	703.488,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.411.200,00	1.411.200,00	100,00	1.411.200,00
Dinas Perdagangan	624.880,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.895.944,00	3.895.944,00	100,00	1.676.160,00
Sekretariat Daerah	19.784.520,00	19.784.520,00	100,00	14.752.530,00
Sekretariat DPRD	3.000.240,00	734.130,00	24,47	0,00
Kecamatan Dumai Barat	13.498.560,00	6.779.813,00	50,23	3.675.780,00
Kecamatan Dumai Kota	8.035.200,00	4.001.400,00	49,80	1.995.840,00
Kecamatan Dumai Selatan	6.782.400,00	1.695.600,00	25,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	9.060.480,00	847.800,00	9,36	0,00
Kecamatan Medang Kampai	5.056.560,00	3.814.560,00	75,44	941.760,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.811.600,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	11.391.840,00	9.913.596,00	87,02	1.624.332,00
Dinas Lingkungan Hidup	54.959.040,00	41.290.714,00	75,13	30.683.402,00
Dinas Perhubungan	1.905.120,00	1.878.660,00	98,61	1.379.700,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.840.560,00	4.723.920,00	97,59	4.338.900,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.274.992,00	2.796.174,00	85,38	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.555.200,00	1.017.360,00	65,42	0,00
Badan Pendapatan Daerah	2.365.200,00	1.806.300,00	76,37	0,00
Jumlah	19.827.767.308,00	19.625.710.325,00	98,98	20.482.319.490,00

3. Belanja Sewa Tanah

Tabel 5.2.20 Belanja Sewa Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.21 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.400.000,00	82.300.000,00	97,51	60.121.260,00
Dinas Kesehatan + RSUD	165.550.000,00	129.815.460,00	78,41	157.150.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.825.969.456,00	2.802.752.000,00	99,18	1.968.464.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45.450.000,00	45.300.000,00	99,67	61.450.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	107.900.000,00	106.900.000,00	99,07	70.675.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.645.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Dinas Tenaga Kerja	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	31.500.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	81.577.550,00	81.127.000,00	99,45	26.900.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000,00	150.000,00	100,00	1.400.000,00
Dinas Perikanan	19.700.000,00	19.700.000,00	100,00	47.100.000,00
Sekretariat Daerah	921.200.000,00	833.190.000,00	90,45	423.075.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.700.000,00	7.567.100,00	55,23	8.288.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.400.000,00	38.205.300,00	71,55	32.530.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.500.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Kecamatan Dumai Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.600.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	13.700.000,00	11.700.000,00	85,40	0,00
Jumlah	4.411.597.006,00	4.180.106.860,00	94,75	2.954.888.260,00

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.22 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.540.000,00	57.037.055,00	83,22	422.010.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	165.400.000,00	139.800.000,00	84,52	1.374.670.012,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.916.000,00	1.350.000,00	46,30	14.900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.000.000,00	12.150.000,00	81,00	41.050.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
Dinas Perhubungan	162.002.101,00	162.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	49.300.000,00	47.260.000,00	95,86	2.400.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.800.000,00	4.597.782,00	52,25	1.400.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Sekretariat Daerah	309.810.000,00	265.809.500,00	85,80	115.615.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.946.500,00	33.626.500,00	57,05	106.700.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	40.000.000,00	37.400.000,00	93,50	26.900.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	24.900.000,00	22.855.000,00	91,79	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	600.000,00	555.000,00	92,50	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89.500.000,00	59.987.000,00	67,02	0,00
Jumlah	1.029.214.601,00	877.927.837,00	85,30	2.215.125.012,00

6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.23 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	10.500.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	1.500.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8.500.001,00	8.500.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	251.000.000,00	245.000.000,00	97,61	122.400.000,00
Sekretariat DPRD	9.000.000,00	1.500.000,00	16,67	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kecamatan Dumai Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Jumlah	305.000.001,00	290.000.000,00	95,08	150.650.000,00

7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel 5.2.24 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.370.900,00	548.935.121,00	98,84	1.643.849.700,00
Dinas Kesehatan + RSUD	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	268.522.450,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.620.150.195,00	1.617.100.000,00	99,81	1.456.011.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	179.500.000,00	179.111.700,00	99,78	0,00
Dinas Perdagangan	101.913.750,00	95.300.000,00	93,51	29.478.900,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	19.980.000,00	66,60	0,00
Inspektorat Daerah	5.174.135,00	5.100.000,00	98,57	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	17.779.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	276.810.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	10.500.000,00	10.367.400,00	98,74	10000000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	54.230.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	300.135.000,00
Jumlah	2.602.608.980,00	2.575.694.221,00	98,97	4.062.366.050,00

8. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.2.25 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	11.288.633.700,00	6.555.725.328,00	58,07	2.403.828.482,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	598.290.000,00	598.290.000,00	100,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	170.000.000,00	169.242.750,00	99,55	100.000.000,00
Dinas Perhubungan	1.877.531.732,00	1.872.271.910,00	99,72	1.580.773.000,00
Dinas Tenaga Kerja	80.000.000,00	79.750.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	90.000.000,00	89.630.000,00	99,59	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	212.259.944,00	207.368.900,00	0,00	28.703.100,00
Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian	224.000.000,00	223.660.800,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	390.000.000,00	288.450.850,00	0,00	162.533.000,00
Kecamatan Dumai Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000,00	395.200.000,00	0,00	265.400.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	13.783.000,00
Jumlah	15.335.715.376,00	10.484.590.538,00	68,37	4.555.020.582,00

9. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Tabel 5.2.26 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00

10. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tabel 5.2.27 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	99.405.739,00
Dinas Kesehatan + RSUD	641.714.126,00	542.298.143,00	84,51	439.120.025,00
Dinas Kominfo, Informatika, Statistika dan Persandian	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	93.041.550,00	81.629.000,00	87,73	182.500.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	361.600.000,00
Sekretariat Daerah	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	125.985.000,00
Sekretariat DPRD	608.272.666,00	464.000.000,00	76,28	796.780.000,00
Dinas Perikanan	160.600.000,00	155.940.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200.500.000,00	181.500.000,00	90,52	259.915.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	638.522.000,00	638.522.000,00	100,00	753.270.000,00
Dinas Tenaga Kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00	11.550.022,00	0,00	24.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Inspektorat	53.000.000,00	32.457.000,00	0,00	30.375.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	38.500.000,00	35.090.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	195.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.090.530.342,00	2.770.486.165,00	89,64	3.178.450.764,00

c. Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.2.28 Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah	2.656.110.668,00	2.446.840.139,69	92,12	1.398.082.846,99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.064.954.526,00	18.934.447.782,95	94,37	18.217.754.364,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.669.065.054,00	12.356.427.610,99	97,53	20.862.788.932,09
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.178.723.761,00	23.148.118.865,56	99,87	17.257.872.900,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	11.000.000,00	88,00	186.785.000,00
Jumlah	58.581.354.009,00	56.896.834.399,19	97,12	57.923.284.043,08

1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Tabel 5.2.29 Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.906.068.000,00	1.897.479.966,69	99,55	1.398.082.846,99
Dinas Perhubungan	49.980.000,00	49.939.800,00	99,92	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100.062.668,00	99.885.000,00	99,82	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000,00	399.535.373,00	66,59	0,00
Jumlah	2.656.110.668,00	2.446.840.139,69	92,12	1.398.082.846,99

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	225.701.500,00	210.955.500,00	93,47	201.484.700,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.468.240.000,00	1.316.746.750,00	89,68	955.408.230,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.616.372.800,00	1.268.329.101,00	78,47	1.451.535.363,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	196.620.000,00	196.323.440,00	99,85	187.751.613,00
Satuan Polisi Pamong Praja	280.060.000,00	275.274.000,00	98,29	289.886.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	676.903.477,00	312.985.055,00	46,24	417.135.063,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	116.838.700,00	109.622.160,00	93,82	125.120.779,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	162.985.380,00	159.930.761,00	98,13	137.775.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	221.110.000,00	220.269.767,00	99,62	160.390.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.170.000,00	107.113.000,00	99,95	143.326.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.550.772.972,00	3.548.713.011,00	99,94	3.856.868.107,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	170.130.000,00	169.878.000,00	99,85	241.062.350,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	171.028.563,00	166.841.799,00	97,55	138.900.044,00
Dinas Perhubungan	4.838.877.162,00	4.830.526.661,95	99,83	3.681.346.659,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	168.408.504,00	167.434.600,00	99,42	206.779.678,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	148.546.000,00	148.449.500,00	99,94	161.841.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.540.000,00	177.966.476,00	99,12	170.599.681,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	131.820.400,00	130.647.500,00	99,11	271.397.350,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.002.200,00	230.975.850,00	99,99	222.362.600,00
Dinas Perikanan	81.710.040,00	79.628.950,00	97,45	71.811.550,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.260.000,00	300.111.198,00	99,95	291.875.000,00
Dinas Perdagangan	140.180.850,00	139.925.500,00	99,82	166.858.600,00
Sekretariat Daerah	1.699.733.400,00	1.572.715.653,00	92,53	1.277.551.720,00
Sekretariat DPRD	422.580.000,00	412.491.137,00	97,61	390.512.497,00
Kecamatan Dumai Barat	140.528.000,00	139.565.962,00	99,32	94.781.800,00
Kecamatan Dumai Timur	196.627.822,00	195.456.335,00	99,40	158.654.880,00
Kecamatan Bukit Kapur	69.534.000,00	69.169.000,00	99,48	99.153.850,00
Kecamatan Medang Kampai	114.160.200,00	114.152.350,00	99,99	273.344.690,00
Kecamatan Sungai Sembilan	48.845.000,00	48.684.722,00	99,67	156.430.110,00
Kecamatan Dumai Kota	258.691.000,00	253.035.525,00	97,81	236.199.310,00
Kecamatan Dumai Selatan	247.655.000,00	232.099.411,00	93,72	243.277.925,00
Inspektorat	252.020.000,00	251.244.000,00	99,69	195.241.550,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	280.492.856,00	249.131.960,00	88,82	321.064.058,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	377.460.000,00	360.262.500,00	95,44	557.847.350,00
Badan Pendapatan Daerah	496.438.700,00	492.607.898,00	99,23	413.535.357,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275.910.000,00	275.182.750,00	99,74	248.641.800,00
Jumlah	20.064.954.526,00	18.934.447.782,95	94,37	18.217.754.364,00

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.31 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	164.000.000,00	163.972.000,00	99,98	13.034.416.829,09
Dinas Kesehatan + RSUD	3.314.894.929,00	3.295.669.452,90	99,42	1.223.812.754,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	370.028.000,00	367.901.000,00	99,43	1.167.043.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	195.000.000,00	192.093.750,00	98,51	119.345.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.790.000,00	20.600.000,00	99,09	0,00
Dinas Perhubungan	1.618.656.000,00	1.616.754.777,16	99,88	691.237.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	79.500.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.578.750,00	44.479.000,00	97,59	6.400.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	894.665.211,00	893.826.735,93	99,91	721.562.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00	49.755.750,00	99,51	99.925.000,00
Dinas Perikanan	194.300.000,00	194.226.880,00	99,96	131.376.549,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	334.999.692,00	334.390.000,00	99,82	1.153.926.420,00
Dinas Perdagangan	13.000.000,00	12.190.000,00	93,77	37.187.780,00
Sekretariat Daerah	2.915.373.350,00	2.842.557.140,00	97,50	1.144.705.600,00
Sekretariat DPRD	438.703.734,00	435.325.100,00	99,23	165.661.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	75.000.000,00	74.904.000,00	99,87	314.670.000,00
Kecamatan Medang Kampai	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	148.200.000,00
Kecamatan Dumai Kota	100.000.000,00	99.841.000,00	99,84	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	142.344.200,00	142.326.000,00	99,99	0,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	137.336.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	97080000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	32.936.000,00
Inspektorat	356.542.000,00	353.713.000,00	99,21	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	225.000.000,00	224.565.000,00	99,81	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	668.618.958,00	666.966.000,00	99,75	296.468.000,00
Badan Pendapatan Daerah	271.570.230,00	270.371.025,00	99,56	0,00
Jumlah	12.669.065.054,00	12.356.427.610,99	97,53	20.862.788.932,09

4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 5.2.32 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	179.800.000,00	179.500.000,00	99,83	195.336.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.360.946.761,00	22.330.897.000,00	99,87	10.982.240.000,00
Dinas Perhubungan	194.905.000,00	194.701.865,56	99,90	199.252.000,00
Kecamatan Dumai Barat	47.052.000,00	47.000.000,00	99,89	1.278.060.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	1.475.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	196.020.000,00	196.020.000,00	100,00	188.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	297.605.500,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	103.027.400,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	285.940.000,00
Kecamatan Selatan	0,00	0,00	0,00	169.770.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	2.083.642.000,00
Jumlah	23.178.723.761,00	23.148.118.865,56	99,87	17.257.872.900,00

5. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.33 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	12.500.000,00	11.000.000,00	88,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	156.805.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	29.980.000,00
Jumlah	12.500.000,00	11.000.000,00	88,00	186.785.000,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.2.34 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.430.622.841,00	52.881.607.692,00	92,08	45.083.480.276,00
Jumlah	57.430.622.841,00	52.881.607.692,00	92,08	45.083.480.276,00

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel 5.2.35 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.520.879.538,00	1.497.936.416,00	98,49	1.437.340.205,00
Dinas Kesehatan + RSUD	7.396.396.578,00	6.087.392.448,00	82,30	6.737.967.219,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.950.708.750,00	1.402.169.530,00	71,88	1.800.708.626,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	952.199.610,00	920.830.671,00	96,71	385.279.335,00
Satuan Polisi Pamong Praja	434.519.904,00	434.356.003,00	99,96	411.540.794,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.767.656.450,00	823.181.388,00	46,57	553.785.645,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	491.142.600,00	384.223.722,00	78,23	551.225.800,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	647.497.000,00	637.696.744,00	98,49	501.394.967,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	332.181.008,00	331.863.544,00	99,90	228.307.125,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	613.338.370,00	593.326.231,00	96,74	505.368.785,00
Dinas Lingkungan Hidup	809.804.908,00	804.028.349,00	99,29	2.590.769.463,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.696.000,00	270.686.504,00	99,26	666.656.919,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.404.624.846,00	1.034.672.258,00	73,66	414.917.360,00
Dinas Perhubungan	1.577.064.034,00	1.568.512.288,00	99,46	1.054.855.934,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	779.481.625,00	775.229.349,00	99,45	1.427.920.198,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	246.881.000,00	238.691.495,00	96,68	889.103.131,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	728.612.300,00	594.175.819,00	81,55	267.676.280,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	437.766.021,00	435.947.341,00	99,58	420.102.488,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	330.700.200,00	285.141.242,00	86,22	438.219.060,00
Dinas Perikanan	518.940.000,00	469.604.994,00	90,49	368.278.720,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.815.568.400,00	1.806.171.959,00	99,48	421.823.101,00
Dinas Perdagangan	416.725.000,00	294.189.414,00	70,60	309.075.610,00
Sekretariat Daerah	6.230.344.523,00	6.137.159.981,00	98,50	5.166.005.977,00
Sekretariat DPRD	13.159.049.821,00	12.882.813.201,00	97,90	7.809.911.425,00
Kecamatan Dumai Barat	97.889.000,00	97.450.384,00	99,55	119.304.948,00
Kecamatan Dumai Timur	101.766.000,00	97.096.400,00	95,41	118.211.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	168.137.200,00	167.739.210,00	99,76	222.635.037,00
Kecamatan Medang Kampai	144.984.000,00	135.464.314,00	93,43	119.511.227,00
Kecamatan Sungai Sembilan	146.260.000,00	139.246.244,00	95,20	67.805.476,00
Kecamatan Dumai Kota	143.675.000,00	141.390.798,00	98,41	196.940.680,00
Kecamatan Dumai Selatan	156.242.000,00	155.586.800,00	99,58	240.824.700,00
Inspektorat	2.021.501.639,00	2.003.049.000,00	99,09	2.105.963.560,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.744.020.555,00	1.603.306.625,00	91,93	1.295.820.908,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.576.451.530,00	4.370.935.000,00	95,51	3.004.366.337,00
Badan Pendapatan Daerah	2.334.627.940,00	2.301.970.176,00	98,60	1.254.022.886,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	960.289.491,00	958.371.850,00	99,80	979.839.350,00
Jumlah	57.430.622.841,00	52.881.607.692,00	92,08	45.083.480.276,00

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.36 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.999.720.292,00	12.975.150.300,00	99,81	6.088.260.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162.600.000,00	162.600.000,00	100,00	0,00
Jumlah	13.162.320.292,00	13.137.750.300,00	99,81	6.088.260.000,00

1. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.37 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.500.000,00	68.500.000,00	100,00	106.400.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	74.621.720,00	74.000.000,00	99,17	10.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.564.000.000,00	4.564.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.960.000.000,00	6.960.000.000,00	100,00	4.150.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	10.480.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.530.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	855.000.000,00
Sekretariat Daerah	988.500.000,00	975.500.000,00	98,68	576.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	145.500.000,00	138.600.000,00	95,26	344.100.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	112.158.572,00	112.110.300,00	99,96	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.940.000,00	8.940.000,00	100,00	4.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	1.500.000,00
Kecamatan Dumai Barat	36.500.000,00	32.500.000,00	89,04	0,00
Jumlah	12.999.720.292,00	12.975.150.300,00	99,81	6.088.260.000,00

2. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.38 Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	162.600.000,00	162.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	162.600.000,00	162.600.000,00	100,00	0,00

f. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Tabel 5.2.39 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS	36.104.699.500,00	31.947.871.800,00	88,49	29.942.171.389,00
Jumlah	36.104.699.500,00	31.947.871.800,00	88,49	29.942.171.389,00

1. Belanja Barang dan Jasa Dana Bos

Tabel 5.2.40 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.104.699.500,00	31.947.871.800,00	88,49	29.942.171.389,00
Jumlah	36.104.699.500,00	31.947.871.800,00	88,49	29.942.171.389,00

Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp36.104.699.500,00, yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp31.947.871.800,00 ini merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp22.480.447.836,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Senilai Rp9.467.423.964,00.

Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022:

Tabel 5.2.41 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	209.121.784,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	88.874.770,00
Jumlah	297.996.554,00

g. Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD

Tabel 5.2.42 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.765.245.583,00	89.920.679.068,00	107,35	63.061.465.065,00
Jumlah	83.765.245.583,00	89.920.679.068,00	107,35	63.061.465.065,00

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.2.43 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	83.765.245.583,00	89.920.679.068,00	107,35	63.061.465.065,00
Jumlah	83.765.245.583,00	89.920.679.068,00	107,35	63.061.465.065,00

5.2.a.3) Belanja Bunga

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 53,02%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Rincian Belanja Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.2.44 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00

1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Tabel 5.2.45 Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0,00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 53,02%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 100% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) merupakan Bunga yang dikenakan atas pinjaman kepada PT. BPD Riau Kepri Syariah (Persero) dengan perhitungan menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) korporasi ditambah 0,5%.

5.2.a.4) Belanja Subsidi

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
132.027.000,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp132.027.000,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 tidak mengalami perubahan atau dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Tabel 5.2.46 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	132.027.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	132.027.000,00	0,00	0,00	0,00

1. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Tabel 5.2.47 Realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	132.027.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	132.027.000,00	0,00	0,00	0,00

5.2.a.5) Belanja Hibah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
30.956.352.225,00	23.282.916.899,08	75,21	35.855.199.901,00

Belanja Hibah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp30.956.352.225,00 dengan realisasi senilai Rp23.282.916.899,08 atau sebesar 75,21%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp12.572.283.001,92 atau sebesar 35,06% dari realisasi tahun lalu senilai Rp35.855.199.901,00

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.2.48 Rincian Belanja Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.061.649.043,00	10.871.570.966,08	72,18	23.488.088.951,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.575.140.382,00	10.091.783.133,00	74,34	10.047.548.150,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00
Jumlah	30.956.352.225,00	23.282.916.899,08	75,21	35.855.199.901,00

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.49 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	400.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.561.649.043,00	10.371.570.966,08	71,23	23.088.088.951,00
Jumlah	15.061.649.043,00	10.871.570.966,08	72,18	23.488.088.951,00

A. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.50 Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Sekretariat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Jumlah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	400.000.000,00

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp500.000.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp100.000.000,00 atau sebesar 25,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp400.000.000,00

B. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.51 Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.958.829.643,00	6.829.304.973,08	62,32	23.088.088.951,00
Sekretariat Daerah	3.602.819.400,00	3.542.265.993,00	98,32	0,00
Jumlah	14.561.649.043,00	10.371.570.966,08	71,23	23.488.088.951,00

Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp14.561.649.043,00 dengan realisasi senilai Rp10.371.570.966,08 atau sebesar 71,23%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp13.116.517.984,92 atau sebesar 55,84% dari realisasi tahun lalu senilai Rp23.488.088.951,00

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.2.52 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	350.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.685.997.182,00	1.277.097.182,00	27,25	4.961.450.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.789.143.200,00	7.714.685.951,00	99,04	4.736.098.150,00
Jumlah	13.575.140.382,00	10.091.783.133,00	74,34	10.047.548.150,00

A. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.2.53 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	250.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	350.000.000,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.100.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.100.000.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp750.000.000,00 atau sebesar 214,29% dari realisasi tahun lalu senilai Rp350.000.000,00

B. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Tabel 5.2.54 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.408.900.000,00	0,00	0,00	2.691.450.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.077.097.182,00	1.077.097.182,00	100,00	2.000.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Jumlah	4.685.997.182,00	1.277.097.182,00	27,25	4.961.450.000,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp4.685.997.182,00 dengan realisasi senilai Rp1.277.097.182,00 atau sebesar 27,25%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp927.097.182,00 atau sebesar 74,26% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.961.450.000,00

C. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Tabel 5.2.55 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.563.763.200,00	2.517.125.951,00	98,18	1.216.098.150,00
Dinas Perikanan	565.380.000,00	547.560.000,00	96,85	0,00
Sekretariat Daerah	4.410.000.000,00	4.400.000.000,00	99,77	2.865.000.000,00
Jumlah	7.789.143.200,00	7.714.685.951,00	99,04	4.736.098.150,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp7.789.143.200,00 dengan realisasi senilai Rp7.714.685.951,00 atau sebesar 99,04%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.978.587.801,00 atau sebesar 62,89% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.736.098.150,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp650.000.000 tidak termasuk realisasi Belanja Hibah BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Berikut rincian realisasi Belanja Hibah untuk BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan:

Tabel 5.2.56 Rincian Realisasi Belanja Hibah BOP Paud Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Paud dan Taman Kanak-Kanak	2.650.636.000,00
Jumlah	2.650.636.000,00

Tabel 5.2.57 Rincian Realisasi Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Lembaga Pendidikan Kesetaraan	670.739.002,00
Jumlah	670.739.002,00

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel 5.2.58 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00
Jumlah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.319.562.800,00 dengan realisasi senilai Rp2.319.562.800,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp2.319.562.800,00

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.2.59 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Partai Hanura	131.840.640,00	131.840.640,00	100,00	131.840.640,00
Partai Golongan Karya	216.931.320,00	216.931.320,00	100,00	216.931.320,00
Partai Persatuan Pembangunan	157.914.360,00	157.914.360,00	100,00	157.914.360,00
Partai Amanat Nasional	303.950.880,00	303.950.880,00	100,00	303.950.880,00
Partai Demokrat	342.342.360,00	342.342.360,00	100,00	342.342.360,00
Partai Keadilan Sejahtera	333.036.360,00	333.036.360,00	100,00	333.036.360,00
Partai Nasdem	257.014.800,00	257.014.800,00	100,00	257.014.800,00

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	320.126.400,00	320.126.400,00	100,00	320.126.400,00
Partai Gerindra	256.405.680,00	256.405.680,00	100,00	256.405.680,00
Jumlah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00

5.2.a.6) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	83,53	0,00

Belanja Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp15.456.810.000,00 dengan realisasi senilai Rp12.911.808.100,00 atau sebesar 83,53%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.911.808.100,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.2.60 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.983.810.000,00	12.438.808.100,00	83,01	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	473.000.000,00	473.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	83,53	0,00

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Tabel 5.2.61 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.983.810.000,00	12.438.808.100,00	83,01	0,00
Jumlah	14.983.810.000,00	12.438.808.100,00	83,01	0,00

A. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Tabel 5.2.62 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9.744.000.000,00	9.744.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.045.200.000,00	459.600.000,00	43,97	0,00
Dinas Perhubungan	711.000.000,00	237.000.000,00	33,33	0,00
Dinas Perikanan	680.610.000,00	664.208.100,00	97,59	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2.803.000.000,00	1.334.000.000,00	47,59	0,00
Jumlah	14.983.810.000,00	12.438.808.100,00	83,01	0,00

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.2.63 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	473.000.000,00	473.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	473.000.000,00	473.000.000,00	100,00	0,00

A. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.2.64 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Perikanan	473.000.000,00	473.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	473.000.000,00	473.000.000,00	100,00	0,00

5.2.b Belanja Modal

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	84,94	199.818.329.751,39

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp306.331.988.807,00 dengan realisasi senilai Rp260.201.936.711,64 atau sebesar 84,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp60.383.606.960,25 atau sebesar 30,22% dari realisasi tahun lalu senilai Rp199.818.329.751,39

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.2.65 Rincian Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00
Jumlah	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	84,94	199.818.329.751,39

Adapun realisasi dan rincian jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

5.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp3.541.754.940,00 dengan realisasi senilai Rp3.534.281.800,00 atau sebesar 99,79%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.517.281.800,00 atau sebesar 20689,89% dari realisasi tahun lalu senilai Rp17.000.000,00

Tabel 5.2.66 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00
Jumlah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00

1. Pengadaan Tanah Untuk Persil

Tabel 5.2.67 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36.494.940,00	29.021.800,00	79,52	17.000.000,00
Dinas Perhubungan	3.505.260.000,00	3.505.260.000,00	100,00	0,00
Jumlah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Persil Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.2.68 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Pelayanan Pemeriksaan Tanah Kelurahan Teluk Makmur	2.506.000,00
Pembuatan Akta Perubahan (adendum) Pelepasan Hak Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Kementerian Kelautan POLTEK Perikanan	750.000,00
Proses pelepasan Hak SHM Kantor Kelurahan Sungai Geniot	7.500.000,00
Belanja Modal Tanah Basilam Baru	6.100.000,00
Belanja Modal Tanah Kampung Baru	12.165.800,00
Jumlah	29.021.800,00

Tabel 5.2.69 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Pada Dinas Perhubungan Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Tanah Jl. Gatot Subroto Kel. Purnama Kec. Dumai Barat	3.505.260.000,00
Jumlah	3.505.260.000,00

5.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp100.498.144.002,00 dengan realisasi senilai Rp91.334.440.997,63 atau sebesar 90,88%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.846.971.820,63 atau sebesar 8,10% dari realisasi tahun lalu senilai Rp84.487.469.177,00

Tabel 5.2.70 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	10.434.856.736,00	9.058.011.303,30	86,81	6.174.879.550,00
Belanja Modal Alat Angkutan	16.421.665.466,00	16.197.885.848,00	98,64	8.468.561.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	219.172.600,00	217.384.900,00	99,18	48.874.400,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	180.617.552,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.433.017.929,00	10.061.137.615,10	96,44	9.255.750.575,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	953.665.452,00	942.893.956,00	98,87	1.221.559.600,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.962.471.988,00	22.435.533.976,00	93,63	20.686.823.311,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.701.641.567,00	2.265.980.134,00	83,87	1.484.092.500,00
Belanja Modal Komputer	11.630.804.616,00	11.348.148.363,00	97,57	21.162.449.350,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	430.000.000,00	425.077.984,74	98,86	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	14.652.646,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	2.612.930.185,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	300.114.000,00	299.832.986,49	99,91	5.124.671.500,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.240.626.300,00	4.778.211.035,00	51,71	5.608.559.365,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.770.107.348,00	13.304.342.896,00	0,00	2.438.387.543,00
Jumlah	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00

1. Belanja Modal Alat Besar

Tabel 5.2.71 Rincian Belanja Modal Alat Besar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	37.576.000,00	35.600.000,00	94,74	718.520.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.800.894.370,00	8.440.140.103,30	86,12	4.950.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.000.000,00	27.528.000,00	83,42	197.175.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.627.516,00	10.500.000,00	98,80	4.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	467.370.000,00	466.906.200,00	99,90	35.000.000,00
Dinas Perhubungan	5.236.350,00	5.206.000,00	99,42	0,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Dinas Perikanan	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	9.065.400,00
Sekretariat Daerah	10.090.000,00	10.086.000,00	99,96	9.400.000,00
Sekretariat DPRD	6.352.400,00	6.345.000,00	99,88	7.229.250,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	35.010.100,00	27.000.000,00	77,12	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	17.689.900,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00
Jumlah	10.434.856.736,00	9.058.011.303,30	86,12	6.174.879.550,00

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Tabel 5.2.72 Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1.840.851.000,00	1.833.645.350,00	99,61	2.775.862.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.671.320.000,00	5.640.540.000,00	99,46	1.842.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61.000.000,00	55.543.000,00	91,05	193.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.566.690.000,00	4.457.300.000,00	97,60	537.075.000,00
Kecamatan Dumai Barat	360.000.000,00	356.966.250,00	99,16	179.840.600,00
Kecamatan Dumai Timur	450.000.000,00	446.886.248,00	99,31	404.590.800,00
Kecamatan Bukit Kapur	33.440.000,00	21.737.500,00	65,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	343.868.600,00
Kecamatan Dumai Kota	603.993.250,00	601.229.500,00	99,54	392.830.600,00
Kecamatan Dumai Selatan	518.721.750,00	515.958.000,00	99,47	286.592.000,00
Dinas Perikanan	67.000.000,00	50.370.000,00	75,18	276.430.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00
Sekretariat Daerah	1.715.536.966,00	1.702.258.000,00	99,23	874.320.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	251.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	189.000.000,00	179.830.000,00	95,15	0,00
Dinas Tenaga Kerja	25.000.000,00	24.988.000,00	99,95	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	319.112.500,00	310.634.000,00	97,34	74.751.000,00
Jumlah	16.421.665.466,00	16.197.885.848,00	98,64	8.468.561.100,00

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Tabel 5.2.73 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	11.076.600,00
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	198.301.500,00	99,15	5.400.000,00
Sekretariat Daerah	5.089.200,00	5.000.000,00	98,25	0,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	2.813.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	10.834.700,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.850.100,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.083.400,00	14.083.400,00	100,00	0,00
Jumlah	219.172.600,00	217.384.900,00	99,18	48.874.400,00

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Tabel 5.2.74 Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.507.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.891.252,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	138.569.300,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	180.617.552,00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tabel 5.2.75 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	481.403.224,00	479.431.024,00	99,59	1.240.220.775,00
Dinas Kesehatan + RSUD	821.661.367,00	805.842.700,00	98,07	2.112.162.139,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000,00	69.507.090,00	99,30	30.109.100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	51.243.125,00	48.661.000,00	94,96	181.040.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	531.975.600,00	479.178.100,00	90,08	387.238.750,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	83.650.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	63.391.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	25.371.500,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	20.980.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.999.900,00	21.996.700,00	99,99	0,00
Dinas Tenaga Kerja	59.068.500,00	56.769.589,00	96,11	82.076.250,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	226.800.000,00	224.100.000,00	98,81	189.254.300,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.366.400,00	1.366.400,00	100,00	62.907.100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.184.030.900,00	2.039.609.500,00	93,39	55.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.000.000,00	31.635.000,00	98,86	520.367.500,00
Dinas Perikanan	18.791.400,00	18.700.000,00	99,51	41.279.900,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.352.400,00	5.451.802,00	85,82	1.470.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	38.775.450,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	568.800.000,00	564.500.000,00	99,24	147.470.000,00
Dinas Perhubungan	1.427.133.340,00	1.425.228.370,10	99,87	859.997.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.736.384,00	56.300.000,00	99,23	78.809.725,00
Sekretariat Daerah	2.183.437.770,00	2.133.000.962,00	97,69	675.975.450,00
Sekretariat DPRD	122.633.000,00	117.146.100,00	95,53	343.417.750,00
Kecamatan Dumai Barat	19.340.800,00	19.215.000,00	99,35	57.436.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	315.001.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	112.137.460,00	107.080.660,00	95,49	352.580.970,00
Kecamatan Medang Kampai	49.718.072,00	49.640.000,00	99,84	28.680.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	11.238.800,00	11.170.000,00	99,39	236.333.800,00
Kecamatan Dumai Kota	53.923.960,00	47.583.500,00	88,24	249.838.030,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Selatan	75.779.463,00	75.779.463,00	100,00	269.570.050,00
Badan Pendapatan Daerah	432.766.810,00	415.848.411,00	96,09	99.431.376,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	92.036.794,00	85.562.194,00	92,97	88.182.360,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	296.618.664,00	255.785.000,00	86,23	99.200.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	91.440.000,00
Inspektorat	48.784.200,00	46.453.650,00	95,22	27.456.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	348.239.596,00	341.595.400,00	98,09	99.637.300,00
Jumlah	10.433.017.929,00	10.061.137.615,10	96,44	9.255.750.575,00

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tabel 5.2.76 Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	142.450.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	12.843.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	46.851.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	194.720.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	4.079.100,00
Dinas Kesehatan + RSUD	96.580.578,00	95.950.000,00	99,35	31.700.000,00
Dinas Perdagangan	623.100,00	560.000,00	89,87	0,00
Dinas Tenaga Kerja	2.469.499,00	2.450.000,00	99,21	7.637.750,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	34.800.000,00	34.600.000,00	99,43	7.260.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	23.493.100,00	23.377.453,00	99,51	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	34.204.800,00	34.165.000,00	99,88	12.214.700,00
Dinas Perhubungan	75.536.397,00	75.503.000,00	99,96	166.264.850,00
Sekretariat Daerah	132.328.200,00	131.500.000,00	99,37	264.644.000,00
Sekretariat DPRD	100.383.600,00	99.300.000,00	98,92	20.900.000,00
Kecamatan Dumai Timur	5.656.478,00	5.656.478,00	100,00	9.614.000,00
Kecamatan Dumai Kota	5.970.000,00	5.950.000,00	99,66	41.304.500,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	21.676.200,00
Kecamatan Dumai Selatan	29.375.000,00	29.375.000,00	100,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	311.773.000,00	305.460.025,00	97,98	31.800.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.455.400,00	9.000.000,00	95,18	192.000.000,00
Inspektorat	91.016.300,00	90.047.000,00	98,94	0,00
Jumlah	953.665.452,00	942.893.956,00	98,87	1.221.559.600,00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Tabel 5.2.77 Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	733.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	23.930.695.228,00	22.408.627.327,00	0,00	20.621.673.311,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.844.000,00	22.755.000,00	99,61	0,00
Kecamatan Dumai Kota	1.260.900,00	1.260.000,00	99,93	6.600.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	6.938.860,00	2.891.649,00	41,67	16.200.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00
Jumlah	23.962.471.988,00	22.435.533.976,00	93,63	20.686.823.311,00

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Tabel 5.2.78 Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	989.410.000,00	957.048.000,00	96,73	298.179.700,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.696.068.467,00	1.293.825.634,00	76,28	1.183.615.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.521.000,00	10.500.000,00	91,14	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.642.100,00	4.606.500,00	99,23	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	1.777.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Jumlah	2.701.641.567,00	2.265.980.134,00	83,87	1.484.092.500,00

9. Belanja Modal Komputer

Tabel 5.2.79 Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.733.421.854,00	5.663.469.190,00	0,00	16.244.824.700,00
Dinas Kesehatan + RSUD	515.740.862,00	495.580.300,00	0,00	463.138.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.860.100,00	4.393.935,00	0,00	217.537.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	64.234.325,00	64.211.300,00	0,00	23.303.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.446.200,00	18.446.200,00	0,00	17.450.000,00
Dinas Perikanan	112.372.200,00	107.932.000,00	0,00	32.999.000,00
Dinas Perdagangan	54.520.400,00	53.230.000,00	97,63	32.003.000,00
Dinas Tenaga Kerja	26.786.681,00	26.681.600,00	99,61	83.517.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	307.000.000,00	304.800.000,00	99,28	265.434.200,00
Satuan Polisi Pamong Praja	32.797.200,00	31.765.090,00	0,00	57.135.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.905.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	40.280.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	221.753.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	79.960.650,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	388.710.804,00	388.273.360,00	99,89	166.686.941,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	49.669.250,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49.658.200,00	49.500.000,00	99,68	53.108.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan	120.704.000,00	118.330.000,00	98,03	124.499.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.066.426.500,00	1.037.550.000,00	97,29	45.710.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	302.706.400,00	299.287.080,00	98,87	85.359.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	210.406.300,00	165.484.800,00	78,65	52.504.760,00
Dinas Perhubungan	281.804.888,00	281.538.000,00	99,91	944.882.000,00
Sekretariat Daerah	365.411.600,00	347.776.200,00	95,17	375.449.499,00
Sekretariat DPRD	196.520.338,00	188.006.200,00	95,67	69.369.000,00
Kecamatan Dumai Timur	18.568.400,00	18.564.750,00	99,98	9.198.750,00
Kecamatan Dumai Kota	84.332.700,00	84.082.000,00	99,70	119.934.900,00
Kecamatan Dumai Barat	68.115.500,00	67.106.250,00	0,00	54.004.700,00
Kecamatan Sungai Sembilan	26.692.200,00	26.530.000,00	0,00	21.544.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	196.999.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	95.306.650,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	92.840.000,00
Badan Pendapatan Daerah	723.565.700,00	672.798.848,00	92,98	279.056.800,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	567.015.064,00	545.959.060,00	96,29	274.650.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	124.128.000,00
Inspektorat	252.081.200,00	250.002.200,00	99,18	110.463.000,00
Jumlah	11.630.804.616,00	11.348.148.363,00	97,57	21.162.449.350,00

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Tabel 5.2.80 Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	430.000.000	425.077.985	98,86	0,00
Jumlah	430.000.000,00	425.077.984,74	98,86	0,00

11. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Tabel 5.2.81 Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Tabel 5.2.82 Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	3.553.200,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	10.162.446,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	187.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.652.646,00

13. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Tabel 5.2.83 Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	2.612.930.185,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.612.930.185,00

14. Belanja Modal Rambu-Rambu

Tabel 5.2.84 Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	20.350.000,00
Dinas Perhubungan	300.114.000,00	299.832.986,49	99,91	5.004.571.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	99.750.500,00
Jumlah	300.114.000,00	299.832.986,49	99,91	5.124.671.500,00

15. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Tabel 5.2.85 Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00

16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Tabel 5.2.86 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.240.626.300,00	4.778.211.035,00	51,71	5.608.559.365,00
Jumlah	9.240.626.300,00	4.778.211.035,00	51,71	5.608.559.365,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp9.240.626.300,00, yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS senilai Rp4.778.211.035,00 ini merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp3.648.909.895,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp1.129.301.140,00.

Capaian Realisasi sebesar 51,71% disebabkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS untuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai karena Satuan Pendidikan Swasta merupakan Entitas diluar lingkup Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kota Dumai

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagai berikut:

Tabel 5.2.87 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Sekolah Swasta Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	961.003.082,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	463.952.510,00
Jumlah	1.424.955.592,00

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 5.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	13.770.107.348,00	13.304.342.896,00	96,62	2.438.387.543,00
Jumlah	13.770.107.348,00	13.304.342.896,00	96,62	2.438.387.543,00

Tabel 5.2.89 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.445.594.378,00	11.878.159.249,00	72,23	23.534.984.540,00
Dinas Kesehatan + RSUD	42.709.280.850,00	40.273.414.207,00	94,30	32.999.989.478,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.306.754.470,00	8.939.119.113,04	86,73	5.214.043.300,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	115.477.450,00	112.872.300,00	97,74	251.194.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.254.741.800,00	6.165.692.300,00	98,58	2.639.083.750,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	133.319.250,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	106.098.000,00
Dinas Perdagangan	55.143.500,00	53.790.000,00	0,00	57.374.500,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	63.930.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.904.900,00	44.846.700,00	99,87	0,00
Dinas Tenaga Kerja	113.324.680,00	110.889.189,00	97,85	173.231.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	568.600.000,00	563.500.000,00	99,10	461.948.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	428.570.304,00	428.017.213,00	99,87	229.594.041,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.277.943.500,00	3.104.521.000,00	94,71	100.710.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	334.706.400,00	330.922.080,00	98,87	605.726.500,00
Dinas Perikanan	211.863.600,00	190.702.000,00	90,01	504.272.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	39.149.600,00	37.216.892,00	95,06	58.605.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.317.192.100,00	5.161.356.000,00	97,07	711.187.762,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	757.800.000,00	744.330.000,00	98,22	369.223.000,00
Dinas Perhubungan	2.289.824.975,00	2.285.609.856,59	99,82	6.981.114.850,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	178.022.100,00	171.843.000,00	96,53	333.988.475,00
Sekretariat Daerah	4.411.893.736,00	4.329.621.162,00	98,14	2.205.938.949,00
Sekretariat DPRD	425.889.338,00	410.797.300,00	96,46	692.416.000,00
Kecamatan Dumai Barat	447.456.300,00	443.287.500,00	99,07	307.694.300,00
Kecamatan Dumai Timur	474.224.878,00	471.107.476,00	0,00	743.904.550,00
Kecamatan Bukit Kapur	152.516.320,00	131.709.809,00	86,36	587.456.170,00
Kecamatan Medang Kampai	49.718.072,00	49.640.000,00	99,84	693.288.600,00
Kecamatan Sungai Sembilan	37.931.000,00	37.700.000,00	99,39	257.877.800,00
Kecamatan Dumai Kota	784.490.910,00	767.105.000,00	97,78	810.695.030,00
Kecamatan Dumai Selatan	633.876.213,00	631.112.463,00	99,56	720.055.746,00
Badan Pendapatan Daerah	1.468.105.510,00	1.394.107.284,00	94,96	413.288.176,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	212.740.794,00	203.892.194,00	95,84	212.681.360,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.192.201.628,00	1.121.378.060,00	94,06	640.601.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	215.568.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Inspektorat	391.881.700,00	386.502.850,00	98,63	137.919.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	362.322.996,00	355.678.800,00	98,17	318.465.450,00
Jumlah	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00

5.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp104.485.105.586,00 dengan realisasi senilai Rp87.322.813.477,02 atau sebesar 83,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp34.637.781.955,71 atau sebesar 65,75% dari realisasi tahun lalu senilai Rp52.685.031.521,31

Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.90 Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	102.202.456.866,00	86.045.004.477,02	84,19	50.961.671.221,31
Belanja Modal Monumen	90.000.000,00	86.000.000,00	0,00	96.000.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	700.000.000,00	699.435.000,00	99,92	794.463.300,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.492.648.720,00	492.374.000,00	32,99	832.897.000,00
Jumlah	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Tabel 5.2.91 Realisasi Belanja Modal Gedung Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.191.246.948,00	19.990.845.953,00	99,01	5.099.857.505,00
Dinas Kesehatan + RSUD	12.664.552.572,00	7.780.237.348,00	61,43	32.593.693.736,65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.510.752.779,00	51.845.191.783,01	85,68	7.421.486.699,27
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	210.142.000,00
Dinas Tenaga Kerja	49.990.400,00	49.990.265,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	445.696.000,00
Dinas Perhubungan	417.700.000,00	417.313.581,60	99,91	26.714.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.227.574.399,00	2.072.600.806,73	49,03	2.656.715.498,63
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	199.178.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	214.589.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	199.690.000,00	99,85	596.843.300,00
Dinas Perdagangan	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	92,62	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	56.400.000,00	56.400.000,00	100,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	119.940.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	111.248.728,00	111.073.000,00	99,84	198.970.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	189.565.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	192.991.040,00	192.650.000,00	99,82	197.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	572.279.981,76
Inspektorat	180.000.000,00	179.768.000,00	99,87	0,00
Jumlah	102.202.456.866,00	86.045.004.477,02	84,19	50.961.671.221,31

2. Belanja Modal Monumen

Tabel 5.2.92 Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	90.000.000,00	86.000.000,00	95,56	96.000.000,00
Jumlah	90.000.000,00	86.000.000,00	95,56	96.000.000,00

3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel 5.2.93 Realiasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	400.000.000,00	399.755.000,00	99,94	117.452.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	313.130.300,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	149.450.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	214.431.000,00
Kecamatan Dumai Kota	300.000.000,00	299.680.000,00	99,89	0,00
Jumlah	700.000.000,00	699.435.000,00	99,92	794.463.300,00

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Tabel 5.2.94 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1.492.648.720,00	492.374.000,00	32,99	832.897.000,00
Jumlah	1.492.648.720,00	492.374.000,00	32,99	832.897.000,00

Tabel 5.2.95 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.191.246.948,00	19.990.845.953,00	99,01	5.099.857.505,00
Dinas Kesehatan + RSUD	14.557.201.292,00	8.672.366.348,00	59,57	33.544.042.736,65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.510.752.779,00	51.845.191.783,01	85,68	7.421.486.699,27
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	210.142.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	189.565.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	445.696.000,00
Dinas Perdagangan	3.400.000.000,00	3.149.243.739,68	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	49.990.400,00	49.990.265,00	100,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	199.178.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	429.020.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	417.700.000,00	417.313.581,60	99,91	176.164.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	199.690.000,00	99,85	909.973.600,00
Sekretariat Daerah	90.000.000,00	86.000.000,00	95,56	96.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	119.940.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	56.400.000,00	56.400.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	300.000.000,00	299.680.000,00	99,89	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	111.248.728,00	111.073.000,00	99,84	198.970.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	572.279.981,76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	192.991.040,00	192.650.000,00	99,82	197.000.000,00
Inspektorat	180.000.000,00	179.768.000,00	99,87	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.227.574.399,00	2.072.600.806,73	49,03	2.656.715.498,63
Jumlah	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31

5.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp90.178.025.211,00 dengan realisasi senilai Rp73.340.485.070,99 atau sebesar 81,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.943.399.225,91 atau sebesar 30,04% dari realisasi tahun lalu senilai Rp56.397.085.845,08

Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.96 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.892.393.902,00	45.936.016.531,14	80,74	34.933.495.062,25
Belanja Modal Bangunan Air	20.031.102.686,00	14.836.016.725,54	74,06	8.633.477.051,88
Belanja Modal Instalasi	570.000.000,00	568.692.000,00	99,77	5.558.571.775,98
Belanja Modal Jaringan	11.570.400.223,00	11.385.631.414,31	0,00	6.094.030.954,97
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.114.128.400,00	614.128.400,00	55,12	1.177.511.000,00
Jumlah	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Tabel 5.2.97 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	199.950.000,00	199.815.000,00	99,93	213.844.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.709.548.962,00	40.038.465.618,70	78,96	21.687.983.627,25
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.553.765.000,00	2.291.420.000,00	89,73	185.854.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	195.800.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	103.103.640,00	103.016.000,00	99,91	992.578.435,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	89.191.000,00
Dinas Perhubungan	900.000.000,00	885.000.586,00	98,33	198.650.000,00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	197.268.000,00	189.541.026,44	96,08	698.414.000,00
Kecamatan Dumai Barat	161.213.300,00	161.213.300,00	100,00	1.090.250.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	1.734.570.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	587.530.000,00	587.530.000,00	100,00	1.693.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	340.015.000,00	340.015.000,00	100,00	1.552.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00	2.473.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	2.128.360.000,00
Jumlah	56.892.393.902,00	45.936.016.531,14	80,74	34.933.495.062,25

2. Belanja Modal Bangunan Air

Tabel 5.2.98 Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.469.258.422,00	13.276.559.725,54	71,88	4.391.617.051,88
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	977.638.000,00	975.580.000,00	99,79	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	185.006.264,00	184.889.000,00	99,94	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	209.200.000,00	208.988.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	1.227.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	883.560.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	382.500.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	940.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	592.800.000,00
Jumlah	20.031.102.686,00	14.836.016.725,54	74,06	8.633.477.051,88

3. Belanja Modal Instalasi

Tabel 5.2.99 Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	370.000.000,00	368.904.000,00	99,70	2.224.651.633,13
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.915.295.142,85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	199.937.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	199.788.000,00	99,89	999.121.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	219.567.000,00
Jumlah	570.000.000,00	568.692.000,00	99,77	5.558.571.775,98

4. Belanja Modal Jaringan

Tabel 5.2.100 Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	100.000.000,00	99.822.200,00	99,82	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.466.077.300,00	11.283.091.214,31	98,40	5.974.030.954,97
Sekretariat Daerah	4.322.923,00	2.718.000,00	62,87	0,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Jumlah	11.570.400.223,00	11.385.631.414,31	98,40	6.094.030.954,97

5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Tabel 5.2.101 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1.114.128.400,00	614.128.400,00	55,12	1.177.511.000,00
Jumlah	1.114.128.400,00	614.128.400,00	55,12	1.177.511.000,00

Rincian Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.102 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1.784.078.400,00	1.282.669.600,00	71,90	3.616.006.633,13
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.644.884.684,00	64.598.116.558,55	80,10	33.968.926.776,95
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	92,51	185.854.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	395.737.000,00
Dinas Perhubungan	900.000.000,00	885.000.586,00	98,33	198.650.000,00
Sekretariat Daerah	4.322.923,00	2.718.000,00	62,87	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	406.468.000,00	398.529.026,44	98,05	698.414.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	219.567.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	488.109.904,00	487.693.000,00	99,91	1.991.699.435,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	89.191.000,00
Kecamatan Dumai Barat	161.213.300,00	161.213.300,00	100,00	1.973.810.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	2.117.070.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	777.530.000,00	777.530.000,00	100,00	2.920.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	340.015.000,00	340.015.000,00	100,00	2.264.800.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00	2.473.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	3.068.360.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00
Jumlah	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08

5.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp7.628.959.068,00 dengan realisasi senilai Rp4.669.915.366,00 atau sebesar 61,21%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp1.561.827.842,00 atau sebesar 25,06% dari realisasi tahun lalu senilai Rp6.231.743.208,00

Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.103 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	375.000.000,00	374.536.160,00	99,88	99.594.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	39.829.500,00	39.822.562,00	99,98	130.184.700,00
Belanja Modal Hewan	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	471.425.368,00	468.715.500,00	99,43	260.116.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.517.704.200,00	3.786.841.144,00	58,10	5.186.987.700,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	554.859.908,00
Jumlah	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per akun SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Tabel 5.2.104 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	375.000.000,00	374.536.160,00	99,88	99.594.000,00
Jumlah	375.000.000,00	374.536.160,00	99,88	99.594.000,00

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Tabel 5.2.105 Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	29.782.500,00	29.782.500,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	10.047.000,00	10.040.062,00	99,93	100.184.700,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah	39.829.500,00	39.822.562,00	99,98	130.184.700,00

3. Belanja Modal Hewan

Tabel 5.2.106 Realisasi Belanja Modal Hewan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.107 Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	290.000.000,00	289.450.500,00	99,81	199.595.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	116.425.368,00	114.663.000,00	98,49	51.725.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	8.796.900,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000,00	64.602.000,00	99,39	0,00
Jumlah	471.425.368,00	468.715.500,00	99,43	260.116.900,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Tabel 5.2.108 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.517.704.200,00	3.786.841.144,00	58,10	5.186.987.700,00
Jumlah	6.517.704.200,00	3.786.841.144,00	58,10	5.186.987.700,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp6.517.704.200,00, yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOS senilai Rp3.786.841.144,00 ini merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp2.489.982.269,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Senilai Rp1.296.858.875,00.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS untuk Satuan Pendidikan Swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.109 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Sekolah Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	568.288.200,00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	248.656.200,00
Jumlah	816.944.400,00

6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD

Tabel 5.2.110 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	554.859.908,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	554.859.908,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.111 Realisasi Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.517.704.200,00	3.786.841.144,00	58,10	5.186.987.700,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000,00	64.602.000,00	99,39	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	554.859.908,00
Dinas Perhubungan	665.000.000,00	663.986.660,00	99,85	199.595.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	116.425.368,00	114.663.000,00	98,49	51.725.000,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	225.000.000,00	0,00	0,00	8.796.900,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	99.594.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	10.047.000,00	10.040.062,00	99,93	100.184.700,00
Kecamatan Bukit Kapur	29.782.500,00	29.782.500,00	100,00	0,00
Jumlah	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00

5.2.c Belanja Tidak Terduga

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja Tak Terduga juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Tidak Terduga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp292.485.131,00 dengan realisasi senilai Rp260.289.017,00 atau sebesar 88,99%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp8.796.187.740,00 atau sebesar 97,13% dari realisasi tahun lalu senilai Rp9.056.476.757,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.2.112 Realisasi Belanja Tidak Terduga per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	260.289.017,00	9.056.476.757,00
Jumlah		260.289.017,00	9.056.476.757,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.2.113 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun

No	Uraian	Realisasi
1.	Pengembalian Bankeu Tahun Anggaran 2019	35.680.898,00
2.	Pengembalian Dana Bos Tahun Anggaran 2011	197.137.500,00
3.	Pengembalian Kelebihan Bayar PBB	5.617.619,00
4	Pengembalian Kelebihan Bayar BPHTB	21.853.000,00
Jumlah		260.289.017,00

Surplus/(Defisit)

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
(246.877.562.566,00)	(136.843.166.692,81)	55,43	(27.284.574.632,09)

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pada Tahun 2022 Kota Dumai menganggarkan defisit senilai Rp246.877.562.566,00 dengan realisasi defisit senilai Rp136.843.166.692,81 atau sebesar 55,43%, jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp109.558.592.060,72 atau sebesar 401,54% dari realisasi tahun lalu defisit senilai Rp27.284.574.632,09

5.3 PEMBIAYAAN

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	95,11	195.481.309.973,34

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp275.730.748.879,25 dengan realisasi senilai Rp262.260.776.307,14 atau sebesar 95,11%. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp66.779.466.333,80 atau sebesar 34,16% dari realisasi tahun lalu senilai Rp195.481.309.973,34

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	100,00	195.481.309.973,34
Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	95,11	195.481.309.973,34

5.3.1.a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	100,00	195.481.309.973,34

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp168.196.735.341,25 dengan realisasi senilai Rp168.196.735.341,25 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp27.284.574.632,09 atau sebesar 13,96% dari realisasi tahun lalu senilai Rp195.481.309.973,34

Tabel 5.3.4 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.033.697.264,80	34.033.697.264,80	100,00	195.481.309.973,17
Penghematan Belanja	107.404.824.529,58	107.404.824.529,58	100,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	26.758.213.546,87	26.758.213.546,87	100,00	0,17
Jumlah	168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	100,00	195.481.309.973,34

5.3.1.b Penerimaan Pinjaman Daerah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp107.534.013.538,00 dengan realisasi senilai Rp94.060.540.965,89 atau sebesar 87,47%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp94.060.540.965,89 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp0,00

Tabel 5.3.5 Penerimaan Pinjaman Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0,00
Jumlah	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0,00

Sesuai Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah antara PT. BPD Riau Kepri dan Pemerintah Kota Dumai dengan Perjanjian Nomor 12 Tanggal 08 Juni 2022 dihadapan Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn dan Surat dari PT. BPD Riau Kepri Nomor 40/KR.02/DMI/2023 Tanggal 21 Februari 2023 perihal Konfirmasi Hutang/Pinjaman Daerah, Pemerintah Kota Dumai mendapat fasilitas plafond pinjaman senilai Rp107.534.013.538,00. Selama Tahun 2022 realisasi Penerimaan Dana Pinjaman tersebut senilai Rp94.060.540.965,89.

5.3.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	3.500.000,00	100,00	0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp3.500.000,00 atau sebesar 100,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.500.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp0,00

Tabel 5.3.6 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Koperasi merupakan pembayaran atas pinjaman modal kerja oleh Koperasi Puteri Tujuh kepada Pemerintah Kota Dumai. Pada Tahun 2022 terdapat pelunasan sebesar Rp3.500.000,00. Penjelasan lebih lanjut terkait pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Koperasi Puteri Tujuh dijelaskan pada akun Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Dumai.

5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00

5.3.2.a Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Besaran pembayaran cicilan pokok utang ditetapkan Sesuai Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah antara PT. BPD Riau Kepri dan Pemerintah Kota Dumai dengan Perjanjian Nomor 12 Tanggal 08 Juni 2022 dihadapan Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn dan Surat dari PT. BPD Riau Kepri Nomor 40/KR.02/DMI/2023 Tanggal 21 Februari 2023 perihal Konfirmasi Hutang/Pinjaman Daerah.

Pembayaran atas cicilan pokok utang tersebut diajukan pada tanggal 26 Desember 2022 dengan SPM Nomor 0164/SPM/LS dan dicairkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui SP2D LS dengan nomor 04445/SP2D/LS.

Tabel 5.3.8 Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0,00

Pembiayaan Neto

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	257.730.748.879,25	244.260.776.307,14	94,77	195.481.309.973,34

Pembiayaan Neto Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp257.730.748.879,25 dengan realisasi senilai Rp244.260.776.307,14 atau sebesar 94,77%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 Pembiayaan Neto mengalami kenaikan senilai Rp48.779.466.333,80 atau sebesar 24,95% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
10.853.186.313,25	107.417.609.614,33	989,73	168.196.735.341,25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp10.853.186.313,25 dengan realisasi senilai Rp107.417.609.614,33 atau sebesar 989,73%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp60.779.125.726,92 atau sebesar 36,14% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp168.196.735.341,25

Rincian SiLPA terikat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2019 bidang Pasar	606.615.802,00
Tunjangan Profesi Guru 2022	4.748.433.600,00
Tambahan Penghasilan Guru 2022	86.250.000,00
DID Kinerja Tahun Berjalan	14.608.867.785,00
Dana Insentif Daerah Tambahan 2020	1.242.495,00
Sisa Bantuan Keuangan 2022	102.160.723,00
Dana Alokasi Khusus 2022	141.623.000,99
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi 2022	12.554.535.313,37
Bantuan Operasional Kesehatan	1.554.848.059,00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	466.460.797,00
Usaha Kecil Menengah	417.358.000,00
Jumlah	35.288.395.575,36

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.10 Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2022

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	64.077.200.180,96
Kas di Bendahara Pengeluaran	59.414.185,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	7.902.462.768,01
Kas BOS	90.136.905,00
Jumlah	72.129.214.038,97

Total SiLPA (Subtotal 1 + Subtotal 2)	107.417.609.614,33
--	---------------------------



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.4.a SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Realisasi 2022	Realisasi 2021
168.196.735.341,25	195.481.309.973,17

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah senilai Rp168.196.735.341,25.

5.4.a.1) PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Realisasi 2022	Realisasi 2021
168.196.735.341,25	195.481.309.973,34

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, yaitu senilai Rp168.196.735.341,25.

5.4.a.2) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2022	Realisasi 2021
107.417.609.614,33	168.196.735.341,25

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp107.417.595.429,33 yang diperoleh dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan	1.370.198.448.465,86
Belanja	1.507.041.615.158,67
Surplus/defisit	(136.843.166.692,81)
Penerimaan Pembiayaan	262.260.776.307,14
Penggunaan SAL	168.196.735.341,25
Penerimaan Pinjaman Daerah	94.060.540.965,89
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.500.000,00
Pengeluaran Pengeluaran	18.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	244.260.776.307,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	107.417.609.614,33

Rincian SiLPA terikat Tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dana alokasi khusus Penugasan 2019 bidang pasar	606.615.802,00
Tunjangan Profesi Guru 2022	4.748.433.600,00
Tambahan Penghasilan Guru 2022	86.250.000,00
DID Kinerja Tahun Berjalan	14.608.867.785,00
Dana Insentif Daerah Tambahan 2020	1.242.495,00
Sisa Bantuan Keuangan 2022	102.160.723,00
Dana Alokasi Khusus 2022	141.623.000,99
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi 2022	12.554.535.313,37
Bantuan Operasional Kesehatan	1.554.848.059,00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	466.460.797,00
Usaha Kecil Menengah	417.358.000,00
Subtotal (1)	35.288.395.575,36

Rincian SILPA Tidak Terikat Tahun 2022

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	64.077.200.180,96
Kas di Bendahara Pengeluaran	59.414.185,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-
Kas di BLUD	7.902.462.768,01
Kas BOS	90.136.905,00
Subtotal (2)	72.129.214.038,97

Total SILPA (Subtotal 1 + Subtotal 2)

107.417.609.614,33

5.4.a.3) KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022	Realisasi 2021
0,00	0,17

Tidak ada Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2022

5.4.a.4) LAIN-LAIN

Realisasi 2022	Realisasi 2021
0,00	0,00

Tidak ada Koreksi Lain-lain Tahun 2022

5.4.b SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Realisasi 2022	Realisasi 2021
107.417.609.614,33	168.196.735.341,25

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp107.417.595.429,33 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp168.196.735.341,25 maka mengalami penurunan senilai Rp60.779.139.911,92 atau sebesar 36,14%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. Aset

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3.107.562.211.336,55	3.089.664.538.438,08	17.897.672.898,47	0,58

Aset pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp3.107.562.211.336,55 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.089.664.538.438,08 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.897.672.898,47 atau sebesar 0,58%. Aset pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Rincian Aset

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Aset lancar	241.211.681.784,30	331.951.342.135,39	(90.739.660.351,09)	(27,34)
2	Investasi Jangka Panjang	51.088.523.186,33	58.002.848.837,39	(6.914.325.651,06)	(11,92)
3	Aset Tetap	2.769.498.572.429,53	2.679.041.994.881,42	90.456.577.548,11	3,38
5	Aset Lainnya	45.763.433.936,39	20.668.352.583,88	25.095.081.352,51	121,42
TOTAL		3.107.562.211.336,55	3.089.664.538.438,08	17.897.672.898,47	0,58

a. Aset Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
241.211.681.784,30	331.951.342.135,39	(90.739.660.351,09)	(27,34)

Aset Lancar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp241.211.681.784,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp331.951.342.135,39 maka mengalami penurunan senilai Rp90.739.660.351,09 atau sebesar 27,34%.

Aset Lancar Kota Dumai Tahun 2022 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD - RSUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Persediaan, dan Beban dibayar dimuka dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Rincian Aset Lancar

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas Di Kas Daerah	99.365.595.756,32	141.438.187.794,38	(42.072.592.038,06)	(29,75)
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	60.277.437,00	334.000,00	59.943.437,00	17.947,14
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	7.902.462.768,01	26.691.058.326,87	(18.788.595.558,86)	(70,39)
5	Kas Di Bendahara BOS	115.792.949,51	68.938.982,00	46.853.967,51	67,96
6	Kas Lainnya	295.262.912,00	168.578.067,00	126.684.845,00	75,15
7	Piutang Pajak Daerah	123.461.182.102,15	119.990.864.839,45	3.470.317.262,70	2,89
8	Piutang Retribusi	1.938.872.529,09	1.906.918.879,09	31.953.650,00	1,68
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.085.651.138,52	71.665.920.927,79	(42.580.269.789,27)	(59,41)
10	Piutang Transfer - DBH Provinsi	29.390.520.807,00	9.656.723.625,00	19.733.797.182,00	204,35
11	Penyisihan Piutang	(83.863.366.847,86)	(90.643.237.451,68)	6.779.870.603,82	(7,48)
12	Persediaan	33.459.430.232,56	50.892.554.145,49	(17.433.123.912,93)	(34,25)
13	Beban Dibayar Dimuka	0,00	114.500.000,00	(114.500.000,00)	(100,00)
Total		241.211.681.784,30	331.951.342.135,39	(90.739.660.351,09)	(27,34)

1) Kas Di Kas Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
99.365.595.756,32	141.438.187.794,38	(42.072.592.038,06)	(29,75)

Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 disajikan senilai Rp99.365.595.756,32 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp141.438.187.794,38 maka mengalami penurunan senilai Rp42.072.592.038,06 atau sebesar 29,75%. Untuk rincian nilai Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kas di Bank

Tabel 5.5.3 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	GIRO				
1.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110.92	99.365.595.755,32	141.438.187.794,38	(42.072.592.039,06)

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
2.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.111.09	0,00	0,00	0,00
3.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.000.90	0,00	0,00	0,00
4.	Bank Syariah Indonesia	7038923522	1,00	0,00	1,00
5.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	015901001396302	0,00	0,00	0,00
Jumlah			99.365.595.756,32	141.438.187.794,38	(42.072.592.038,06)

Sebagai tambahan informasi jika dibandingkan Kas di Kasda pada Neraca dengan Rekening Koran Kas Umum Daerah terdapat perbedaan sebagai berikut:

Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai (Rek 7038923522) terdapat perbedaan senilai Rp1,00 yang disebabkan adanya kekurangan pembayaran pajak bunga yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2022, tetapi sudah dibayar oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai ditahun berikutnya pada Tanggal 02 Februari 2023.

2. Deposito

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	Deposito Bank Riau Kepri	Nomor : 900/172/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 8 Agustus 2022	0,00	0,00	0,00
	Deposito Bank Riau Kepri	Nomor : 900/249/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 22 November 2022	0,00	0,00	0,00
	Deposito BNI	Nomor : 900/248/BPKAD-PERBEN Tanggal 21 November 2022	0,00	0,00	0,00
	Deposito BSI	Nomor : 900/248/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022	0,00	0,00	0,00
	Deposito BRI	Nomor : 900/246/BPKAD-PERBEN Tanggal 21 November 2022	0,00	0,00	0,00
	Deposito Mandiri	Nomor : 900/245/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

Saldo Deposito Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00, seluruh Deposito telah ditutup dan dicairkan ke kas Daerah pada tahun berjalan. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang saldo Deposito adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.4 Rincian Deposito

No	Nama Bank	Saldo 2021	Saldo 2022		Saldo Akhir 2022
			Tambah	Kurang	
1	Deposito Bank Riau Kepri	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2	Deposito Bank Riau Kepri	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3	Deposito Bank BRI	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4	Deposito BSI	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5	Deposito BNI	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6	Deposito Mandiri	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah		0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 membuka beberapa deposito terhadap uang yang siap digunakan (*idle money*) pada bank yang berbeda untuk meningkatkan PAD Kota Dumai. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. Pemerintah Kota Dumai telah mencairkan seluruh Deposito ke Rekening Kas Daerah. Untuk perhitungan nilai bunga deposito, ketentuan perjanjian antara Kuasa BUD dan pihak Bank adalah setara RUPS dengan masa berlakunya setiap 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis, kecuali perjanjian akan diberhentikan. Adapun rincian redaksi nomor perjanjian deposito per Bank yaitu:

1. Bank Riau Kepri Cabang Dumai
Bank Riau Kepri Cabang Dumai Nomor: 900/172/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 dan Nomor : 900/249/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 22 November 2022.
2. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai
Bank Negara Indonesia Nomor: 900/248/BPKAD-PERBEN Tanggal 21 November 2022
3. Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai
Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai Nomor: 900/248/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022.

4. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai
Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Dumai Nomor: 900/246/BPKAD-PERBEN Tanggal 21 November 2022
5. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Dumai
Bank Mandiri Persero, Tbk Cabang Dumai Nomor: 900/245/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022

2) Kas Di Bendahara Penerimaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Kas pada Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 disajikan senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka tidak mengalami perubahan.

3) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
60.277.437,00	334.000,00	59.943.437,00	17.947,14

Akun ini merupakan saldo Kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan pada Tahun 2022, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2022 senilai Rp60.277.437,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, maka mengalami kenaikan senilai Rp59.943.437,00 atau sebesar 17.947,14%.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp59.400.000,00 merupakan Koreksi oleh Bank Riau atas Pengembalian Dana / Kontrapos belanja hibah bantuan UMKM pada Dinas Koperasi UMKM yang belum terposting ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2022, tetapi sudah diposting oleh Bank Riau di tahun berikutnya pada Tanggal 06 Januari 2023 ke Kasda.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp877.437,00 merupakan saldo kas yang berasal dari Pajak Pusat dan kelebihan pembayaran belanja tagihan listrik yang belum disetor per 31 Desember 2022 dan telah disetor di Tahun 2023. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	Tanggal Setor
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574.500,00	PPh Pasal 22	10 Januari 2023
2	Kecamatan Dumai Barat	288.702,00	PPh Pasal 22	20 Februari 2023
3	Kecamatan Dumai Selatan	50,00	PPh Pasal 21	03 Maret 2023
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.185,00	Kelebihan Pembayaran Belanja Tagihan Listrik	03 Februari 2023
5	Dinas Koperasi UMKM	59.400.000,00	Kekurangan setor pengembalian Dana Bansos thn 2022	06 Januari 2023
Total		60.277.437,00		

4) Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
7.902.462.768,01	26.691.058.326,87	(18.788.595.558,86)	(70,39)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp7.902.462.768,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp26.691.058.326,87 maka mengalami penurunan senilai Rp18.788.595.558,86 atau sebesar 70,39%.

Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD - RSUD dan BLUD - Puskesmas Kota Dumai tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 30 Desember 2009.

Kebijakan akuntansi untuk BLUD pada RSUD maupun Puskesmas mengacu pada Perwako Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai, sedangkan Perwako Dumai Nomor 18 Tahun 2016 tidak digunakan. Rincian saldo Kas di masing-masing BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.5.6 Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya

No	Rekening Bank	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
A.	BLUD RSUD			
1	Bank Riau Kepri (Bend.Pengeluaran BLUD)	5.697.255.079,76	23.906.808.068,76	(18.209.552.989,00)
2	Bank Riau Kepri (Bend.Penerimaan BLUD)	71.030.180,67	35.766.653,67	35.263.527,00
3	BRI Bend. Penerimaan BLUD	69.159,00	69.015,00	144,00
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD	0,00	0,00	0,00
5	BSI Bend. Penerimaan BLUD	40.991.048,65	41.561.048,65	(570.000,00)

No	Rekening Bank		Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
6	BSI Bend.Penerimaan BLUD	05.700.69950/7009046849	405.520.224,01	405.628.624,01	(108.400,00)
7	Kas Bendahara Penerimaan BLUD		20.776.593,00	17.736.409,00	3.040.184,00
	Kas BLUD RSUD		6.235.642.285,09	24.407.569.819,09	(18.171.927.534,00)
B	BLUD PUSKESMAS:				
	Kas di Bank				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	172-00-0018560-5	144.243.934,68	253.850.408,04	(109.606.473,36)
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	172-00-0018559-7	88.049.705,77	110.288.663,34	(22.238.957,57)
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	172-00-0018567-0	56.516.541,54	236.041.280,94	(179.524.739,40)
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	172-00-0018565-4	76.421.291,72	197.753.644,27	(121.332.352,55)
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	172-00-0018566-2	81.604.334,44	84.861.847,65	(3.257.513,21)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	172-00-0018562-1	387.939.930,42	372.706.909,63	15.233.020,79
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	172-00-0018563-9	37.842.389,07	62.390.972,75	(24.548.583,68)
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	172-00-0018561-3	445.603.321,82	243.204.164,81	202.399.157,01
9	BLUD Puskesmas Purnama	172-00-0018564-7	48.082.256,72	112.072.170,16	(63.989.913,44)
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	172-00-0027962-2	237.976.533,74	489.594.996,19	(251.618.462,45)
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A	10-40-20117-7	62.445.243,00	120.723.450,00	(58.278.207,00)
	Kas BLUD Puskesmas		1.666.725.482,92	2.283.488.507,78	(616.763.024,86)
	Kas Tunai:				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota		0,00	0,00	0,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat		95.000,00	0,00	95.000,00
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur		0,00	0,00	0,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan		0,00	0,00	0,00
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai		0,00	0,00	0,00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu		0,00	0,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah		0,00	0,00	0,00
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti		0,00	0,00	0,00
9	BLUD Puskesmas Purnama		0,00	0,00	0,00
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur		0,00	0,00	0,00
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A		0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas BLUD Puskesmas		1.666.820.482,92	2.283.488.507,78	(616.668.024,86)
JUMLAH KAS BLUD			7.902.462.768,01	26.691.058.326,87	(18.788.595.558,86)

5) Kas Di Bendahara BOS

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
115.792.949,51	68.938.982,00	46.853.967,51	67,96

Nilai akhir Kas di Bendahara BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp115.792.949,51 yang merupakan sisa Kas yang berada pada Bendahara Pengelola Dana BOS pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS dari masing-masing sekolah negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Nilai Kas di Bendahara BOS mengalami peningkatan senilai Rp46.853.967,51 atau sebesar 67,96% dibandingkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp68.938.982,00.

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 menerima Dana BOS dengan 2 (dua) jenis yaitu BOS Reguler dan BOS Kinerja. Penerimaan dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat PAUD senilai Rp610.000,00 (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per satu peserta didik setiap satu tahun;
2. Tingkat SD senilai Rp910.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per satu peserta didik setiap satu tahun; dan
3. Tingkat SMP senilai Rp1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per satu peserta didik setiap satu tahun.

Dalam mengelola Dana BOS, tiap sekolah tidak menggunakan sistem panjar, karena uang masuk per tahap dari Pusat ke rekening sekolah. Adapun penjelasan atas rincian saldo Kas Bendahara BOS senilai Rp115.792.949,51 sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS

No	Keterangan	Saldo Kas BOS			
		Bank	Tunai		Total
			Bendahara Bos	Utang PFK	
1	BOS SD	73.360.784,00	0,00	24.757.918,51	98.118.702,51
2	BOS SMP	16.786.109,00	12.000,00	876.138,00	17.674.247,00
	Jumlah	90.146.893,00	12.000,00	25.634.056,51	115.792.949,51

Saldo Kas di Bendahara BOS senilai Rp115.792.949,51, yang terdiri dari saldo Kas tunai senilai Rp25.646.056,51 dan saldo Kas di Bank senilai Rp90.146.893,00. Saldo Kas Tunai Senilai Rp25.634.056,51 merupakan Utang Pajak pada BOS Sekolah Dasar Negeri dan BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri yang disetor di Tahun Anggaran 2023. Saldo Kas di Bendahara BOS di Bank terdiri dari Saldo Bos Reguler senilai Rp90.146.893,00 dan Saldo Bos Kinerja senilai Rp0,00.

Tabel 5.5.8 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2022

NO	Keterangan	Saldo Kas			Total
		Tunai	Bank		
			Bos Reguler	Bos Kinerja	
1	BOS SD	24.757.918,51	73.360.784,00	0,00	98.118.702,51
2	BOS SMP	888.138,00	16.786.109,00	0,00	17.674.247,00
	TOTAL	25.646.056,51	90.146.893,00	0,00	115.792.949,51

Untuk rincian Kas di Bendahara BOS SD dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 untuk Kas di Bendahara BOS SMP.

6) Kas lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
295.262.912,00	168.578.067,00	126.684.845,00	75,15

Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 senilai Rp295.262.912,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 pada rekening Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 834 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang digunakan sebagai uang jaminan bongkar atas pajak reklame. Uang jaminan bongkar tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2020 akan menjadi hak Pemerintah Kota Dumai jika penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk rincian Kas lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

7) Piutang Pajak Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
123.461.182.102,15	119.990.864.839,45	3.470.317.262,70	2,89

Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp123.461.182.102,15 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp119.990.864.839,45 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.470.317.262,70 atau sebesar 2,89%. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran 5 dan 7.

Akun Piutang Pajak Daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk atas tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.9 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	598.487.121,00	426.474.376,00	172.012.745,00	40,33
2	Piutang Pajak Restoran	2.290.011.349,26	1.939.590.078,26	350.421.271,00	18,07
3	Piutang Pajak Hiburan	1.128.675.372,00	1.108.745.939,00	19.929.433,00	1,80
4	Piutang Pajak Reklame	875.696.586,00	673.674.710,00	202.021.876,00	29,99
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	638.416.866,70	648.294.656,00	(9.877.789,30)	(1,52)
6	Piutang Pajak Air Tanah	1.595.660.154,00	1.612.751.046,00	(17.090.892,00)	(1,06)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99.244.672,00	99.244.672,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	116.231.846.111,19	113.475.195.762,19	2.756.650.349,00	2,43
9	Piutang Pajak Parkir	2.193.870,00	3.921.600,00	(1.727.730,00)	(44,06)
10	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	950.000,00	2.972.000,00	(2.022.000,00)	(68,03)
	Jumlah	123.461.182.102,15	119.990.864.839,45	3.470.317.262,70	2,89

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp598.487.121,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp426.474.376,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp172.012.745,00 atau sebesar 40,33%.

Akun Piutang Pajak Hotel merupakan selisih antara nilai pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hotel Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2008	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00
2	Tahun 2009	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
3	Tahun 2010	103.162.900,00	0,00	23.781.600,00	79.381.300,00
4	Tahun 2011	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00
5	Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2016	9.278.235,00	0,00	735.000,00	8.543.235,00
10	Tahun 2017	2.199.094,00	0,00	0,00	2.199.094,00
11	Tahun 2018	137.478.405,00	0,00	25.702.037,00	111.776.368,00
12	Tahun 2019	25.469.457,00	0,00	500.000,00	24.969.457,00
13	Tahun 2020	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
14	Tahun 2021	74.133.229,00	0,00	56.056.166,00	18.077.063,00
15	Tahun 2022		5.246.803.968,00	4.967.851.420,00	278.952.548,00
	Jumlah	426.474.376,00	5.246.803.968,00	5.074.791.223,00	598.487.121,00

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.290.011.349,26 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.939.590.078,26 maka mengalami kenaikan senilai Rp350.421.271,00 atau sebesar 0,18%.

Piutang Pajak Restoran merupakan selisih antara nilai pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.11 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00
2	Tahun 2010	32.063.963,00	0,00	43.800,00	32.020.163,00
3	Tahun 2011	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00
4	Tahun 2012	2.063.500,00	0,00	57.600,00	2.005.900,00
5	Tahun 2013	4.107.900,00	0,00	180.100,00	3.927.800,00
6	Tahun 2014	31.797.995,00	0,00	2.134.836,00	29.663.159,00
7	Tahun 2015	9.963.799,00	0,00	761.300,00	9.202.499,00
8	Tahun 2016	428.157.444,00	0,00	9.085.000,00	419.072.444,00
9	Tahun 2017	50.078.467,26	0,00	0,00	50.078.467,26
10	Tahun 2018	154.291.518,00	0,00	194.500,00	154.097.018,00
11	Tahun 2019	514.884.413,00	0,00	1.110.500,00	513.773.913,00
12	Tahun 2020	216.738.551,00	0,00	104.000,00	216.634.551,00
13	Tahun 2021	475.608.732,00	0,00	117.857.517,00	357.751.215,00
14	Tahun 2022	0,00	11.706.887.077,00	11.224.936.653,00	481.950.424,00
	Jumlah	1.939.590.078,26	11.706.887.077,00	11.356.465.806,00	2.290.011.349,26

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.128.675.372,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp1.108.745.939,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp19.929.433,00 atau sebesar 0,02%.

Akun Piutang Pajak Hiburan merupakan selisih antara nilai pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hiburan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Hiburan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	Tahun 2011	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00
3	Tahun 2012	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00
4	Tahun 2013	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00
5	Tahun 2014	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	Tahun 2015	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00
7	Tahun 2016	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00
8	Tahun 2017	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
9	Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2019	779.506.063,00	0,00	10.000.000,00	769.506.063,00
11	Tahun 2020	7.119.063,00	0,00	1.800.000,00	5.319.063,00
12	Tahun 2021	185.695.427,00	0,00	14.662.281,00	171.033.146,00
13	Tahun 2022	0,00	1.984.330.294,00	1.937.938.580,00	46.391.714,00
Jumlah		1.108.745.939,00	1.984.330.294,00	1.964.400.861,00	1.128.675.372,00

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp875.696.586,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp673.674.710,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp202.021.876,00 atau sebesar 29,99%.

Akun Piutang Pajak Reklame merupakan selisih antara nilai pajak reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Reklame Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2	Tahun 2006	2.667.205,00	0,00	0,00	2.667.205,00
3	Tahun 2007	2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00
4	Tahun 2008	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
5	Tahun 2009	2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00
6	Tahun 2010	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00
7	Tahun 2011	15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00
8	Tahun 2012	25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00
9	Tahun 2013	69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00
10	Tahun 2014	161.517.990,00	0,00	0,00	161.517.990,00
11	Tahun 2015	44.420.003,00	0,00	0,00	44.420.003,00
12	Tahun 2016	110.436.972,00	0,00	0,00	110.436.972,00
13	Tahun 2017	42.429.403,00	0,00	351.540,00	42.077.863,00
14	Tahun 2018	22.064.094,00	0,00	518.985,00	21.545.109,00
15	Tahun 2019	23.129.875,00	0,00	4.380.000,00	18.749.875,00
16	Tahun 2020	100.373.562,00	0,00	0,00	100.373.562,00
17	Tahun 2021	44.824.581,00	0,00	31.330.991,00	13.493.590,00
18	Tahun 2022	0,00	3.150.473.531,00	2.911.870.139,00	238.603.392,00
Jumlah		673.674.710,00	3.150.473.531,00	2.948.451.655,00	875.696.586,00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp638.416.866,70 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp648.294.656,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.877.789,30 atau sebesar 0,02%.

Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan selisih antara nilai Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.14 Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak PPJ - Non PLN	102.007.898,00	11.629.278.576,06	11.639.156.365,36	92.130.108,70

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
2	Piutang Pajak PPJ -PLN	546.286.758,00	41.479.433.111,00	41.479.433.111,00	546.286.758,00
Jumlah		648.294.656,00	53.108.711.687,06	53.118.589.476,36	638.416.866,70

1. Piutang PPJ Non PLN

Tabel 5.5.15 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2012	5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00
2	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2018	2.104.259,00	0,00	2.103.698,00	561,00
8	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2020	11.143.758,00	2.806.145,00	11.143.758,00	2.806.145,00
4	Tahun 2021	83.336.481,00	0,00	33.651.776,00	49.684.705,00
5	Tahun 2022	0,00	11.626.472.431,06	11.592.257.133,36	34.215.297,70
Jumlah		102.007.898,00	11.629.278.576,06	11.639.156.365,36	92.130.108,70

Sebagai tambahan informasi dari mutasi tambah atas Piutang Pajak PPJ Non PLN tahun 2022 senilai Rp11.629.278.578,06 terdapat koreksi saldo awal tahun senilai Rp2.806.145 yang dikarenakan wajib pajak melaporkan omset yang terlalu rendah. Dari mutasi kurang 2022 senilai Rp11.639.156.365,35 Piutang pajak PPJ Non PLN selain pelunasan atas piutang tahun sebelumnya juga terdapat koreksi saldo awal senilai Rp11.143.758 yang dikarenakan ada wajib pajak yang sudah membayar tanpa mencantumkan nama usaha serta tanpa konfirmasi, sehingga tidak terpantau dan diketahui kemudian setelah dikirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan.

2. Piutang PPJ - PLN

Tabel 5.5.16 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	Saldo akhir Piutang PPJ -PLN Tahun 2021	Mutasi		Saldo Akhir Piutang PPJ - PLN Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2018	546.286.758,00	0,00	0,00	546.286.758,00
2	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tahun 2022	0,00	41.479.433.111,00	41.479.433.111,00	0,00
Jumlah		546.286.758,00	41.479.433.111,00	41.479.433.111,00	546.286.758,00

f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.595.660.154,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp1.612.751.046,00 maka mengalami penurunan senilai Rp17.090.892,0 atau sebesar 0,01%.

Akun Piutang Pajak Air Tanah merupakan selisih antara nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Air Tanah Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.17 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2011	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
2	Tahun 2012	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00
3	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2014	2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00
5	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2016	6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00
7	Tahun 2017	277.031.845,00	0,00	0,00	277.031.845,00
8	Tahun 2018	4.728.661,00	0,00	0,00	4.728.661,00
9	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2020	26.339.569,00	0,00	16.070.590,00	10.268.979,00
11	Tahun 2021	1.292.071.071,00	0,00	20.319.925,00	1.271.751.146,00
12	Tahun 2022	0,00	1.200.318.522,00	1.181.018.899,00	19.299.623,00
Jumlah		1.612.751.046,00	1.200.318.522,00	1.217.409.414,00	1.595.660.154,00

g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp99.244.672,00, Tahun 2022 tidak ada penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun sebelumnya.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp116.231.846.111,19 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp113.475.195.762,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.756.650.349,00 atau sebesar 2,43%. Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan PBB - P2 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 7.

Akun Piutang PBB – P2 merupakan selisih antara nilai PBB - P2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak PBB – P2 termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.18 Rincian Piutang PBB Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 1994	191.636,00	0,00	0,00	191.636,00
2	Tahun 1995	289.915,00	0,00	0,00	289.915,00
3	Tahun 1996	39.502.677,00	0,00	0,00	39.502.677,00
4	Tahun 1997	57.404.494,00	0,00	3.023.985,00	54.380.509,00
5	Tahun 1998	102.299.758,00	0,00	3.060.626,00	99.239.132,00
6	Tahun 1999	96.940.592,00	0,00	20.566.603,00	76.373.989,00
7	Tahun 2000	85.624.241,00	0,00	14.317.241,00	71.307.000,00
8	Tahun 2001	919.115.193,72	0,00	19.488.929,00	899.626.264,72
9	Tahun 2002	946.659.871,78	0,00	48.640.747,00	898.019.124,78
10	Tahun 2003	200.297.530,54	0,00	55.390.964,00	144.906.566,54
11	Tahun 2004	233.781.214,74	0,00	65.048.016,00	168.733.198,74
12	Tahun 2005	933.159.590,82	0,00	92.241.842,00	840.917.748,82
13	Tahun 2006	1.600.060.948,69	0,00	115.244.545,00	1.484.816.403,69
14	Tahun 2007	2.605.260.863,64	0,00	155.210.653,00	2.450.050.210,64
15	Tahun 2008	2.807.003.074,73	0,00	158.046.083,00	2.648.956.991,73
16	Tahun 2009	4.302.614.097,18	0,00	156.565.244,00	4.146.048.853,18
17	Tahun 2010	7.395.931.651,04	0,00	186.393.109,00	7.209.538.542,04
18	Tahun 2011	7.676.685.324,40	0,00	223.690.283,00	7.452.995.041,40
19	Tahun 2012	7.574.150.860,71	0,00	209.291.798,00	7.364.859.062,71
20	Tahun 2013	7.427.743.126,24	0,00	200.910.031,00	7.226.833.095,24
21	Tahun 2014	5.646.933.716,11	0,00	212.176.772,00	5.434.756.944,11
22	Tahun 2015	5.710.111.414,24	0,00	225.504.878,00	5.484.606.536,24
23	Tahun 2016	2.848.711.880,61	0,00	242.699.664,00	2.606.012.216,61
24	Tahun 2017	7.242.694.340,00	0,00	671.034.624,00	6.571.659.716,00
25	Tahun 2018	11.082.711.715,00	0,00	1.633.441.291,00	9.449.270.424,00
26	Tahun 2019	10.971.568.553,00	0,00	1.571.437.237,00	9.400.131.316,00
27	Tahun 2020	11.738.752.537,00	0,00	1.705.069.616,00	10.033.682.921,00
28	Tahun 2021	13.228.994.945,00	0,00	2.031.418.432,00	11.197.576.513,00
29	Tahun 2022	0,00	143.893.836.264,00	131.117.272.702,00	12.776.563.562,00
	Jumlah	113.475.195.762,19	143.893.836.264,00	141.137.185.915,00	116.231.846.111,19

Sebagai tambahan informasi dari total mutasi kurang senilai Rp141.137.185.915,00 terdapat Penghapusan Piutang PBB senilai Rp6.310.615.717,00 yang dikarenakan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda, alamat objek pajak tidak dijumpai, objek dan subjek pajak tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penghapusan piutang PBB-P2.

i. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.193.870,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp3.921.600,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.727.730,00 atau sebesar 44,06%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	1.204.200,00	0,00	0,00	1.204.200,00
2	Tahun 2021	2.717.400,00	0,00	2.708.400,00	9.000,00

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
3	Tahun 2022	0,00	760.692.273,00	759.711.603,00	980.670,00
	Jumlah	3.921.600,00	0,00	2.708.400,00	2.193.870,00

j. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp950.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp2.972.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.022.000,00 atau sebesar 68,03%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	-	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2021	2.972.000,00	0,00	2.722.000,00	250.000,00
3	Tahun 2022	0,00	97.436.475,00	96.736.475,00	700.000,00
	Jumlah	2.972.000,00	97.436.475,00	99.458.475,00	950.000,00

8) Piutang Retribusi

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.938.872.529,09	1.906.918.879,09	31.953.650,00	1,68

Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.938.872.529,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.906.918.879,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp31.953.650,00 atau sebesar 1,68%.

Akun Piutang Retribusi Daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan Piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pengakuan saldo Piutang Retribusi tersebut hanya berdasarkan pengakuan tahun-tahun sebelumnya. Piutang Retribusi daerah ini terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah yaitu:

Tabel 5.5.21 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Lingkungan Hidup	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	65.509.400,00	33.555.750,00	31.953.650,00	95,23
3	Badan Pendapatan Daerah	1.822.723.129,09	1.822.723.129,09	0,00	0,00
	Jumlah	1.938.872.529,09	1.906.918.879,09	31.953.650,00	1,68

Rincian Piutang Retribusi berdasarkan jenis Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.22 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
b.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39.200.000,00	22.200.000,00	17.000.000,00	76,58
c.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	780.000,00	7.140.000,00	(6.360.000,00)	(89,08)
d.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.996.000,00	605.000,00	8.391.000,00	1.386,94
e.	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	16.533.400,00	3.610.750,00	12.922.650,00	357,89
f.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.765.420.215,09	1.765.420.215,09	0,00	0,00
g.	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57.302.914,00	57.302.914,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.938.872.529,09	1.906.918.879,09	31.953.650,00	1,68

a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp50.640.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp50.640.000,00 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Lampiran 6.

b. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp39.200.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp22.200.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.000.000,00 atau sebesar 76,58%.

Tabel 5.5.23 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	22.200.000,00	39.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00

c. Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha

Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp780.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp7.140.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp6.360.000,00 atau sebesar 89,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan tempat kegiatan usaha Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	7.140.000,00	780.000,00	7.140.000,00	780.000,00

d. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Khusus Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp8.996.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp605.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp8.391.000,00 atau sebesar 1.386,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	605.000,00	8.996.000,00	605.000,00	8.996.000,00
	Jumlah	605.000,00	8.996.000,00	605.000,00	8.996.000,00

e. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp16.533.400,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.610.750,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.922.650,00 atau sebesar 357,89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	3.610.750,00	16.533.400,00	3.610.750,00	16.533.400,00
	Jumlah	3.610.750,00	16.533.400,00	3.610.750,00	16.533.400,00

f. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.765.420.215,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.765.420.215,09 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.27 Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00
2	Tahun 2006	51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00
3	Tahun 2007	45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00
4	Tahun 2008	20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00
5	Tahun 2009	45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00
6	Tahun 2010	266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00
7	Tahun 2011	72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00
8	Tahun 2012	121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00
9	Tahun 2013	183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00
10	Tahun 2014	129.629.925,00	0,00	0,00	129.629.925,00

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
11	Tahun 2015	116.484.514,00	0,00	0,00	116.484.514,00
12	Tahun 2016	223.163.849,00	0,00	0,00	223.163.849,00
13	Tahun 2017	484.151.529,09	0,00	0,00	484.151.529,09
14	Tahun 2018	1.205.640,00	0,00	0,00	1.205.640,00
15	Tahun 2019	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00
16	Tahun 2020	141.840,00	0,00	0,00	141.840,00
17	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.765.420.215,09	0,00	0,00	1.765.420.215,09

g. Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi Peruntukan Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp57.302.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp57.302.914,00 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	26.832.482,00	0,00	0,00	26.832.482,00
2	Tahun 2010	30.470.432,00	0,00	0,00	30.470.432,00
3	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	57.302.914,00	0,00	0,00	57.302.914,00

9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
29.085.651.138,52	71.665.920.927,79	(42.580.269.789,27)	(59,41)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 senilai Rp29.085.651.138,52 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp71.665.920.927,79 maka mengalami penurunan senilai Rp42.580.269.789,27 atau sebesar 59,41%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.29 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	25.299.174.025,00	68.027.364.818,00	(42.728.190.793,00)	(62,81)
2	Badan Pendapatan Daerah	3.209.395.253,15	3.347.127.430,15	(137.732.177,00)	(4,11)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	486.000.000,00	0,00	486.000.000,00	100,00
4	PPKD	91.081.860,37	291.428.679,64	(200.346.819,27)	(68,75)
	Jumlah	29.085.651.138,52	71.665.920.927,79	(42.580.269.789,27)	(59,41)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.30 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
a.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	486.000.000,00	0,00	486.000.000,00
b.	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	84.460.000,00	7.790.000,00	13.010.000,00	79.240.000,00
c.	Piutang Pendapatan BLUD - RSUD	67.852.173.968,00	24.778.459.005,00	67.530.780.048,00	25.099.852.925,00
d.	Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas	90.730.850,00	120.081.100,00	90.730.850,00	120.081.100,00
e.	Piutang Denda Pajak (Bapenda)	3.095.339.131,51	866.328.505,00	1.004.060.682,00	2.957.606.954,51
f.	Piutang Denda Retribusi (Bapenda)	251.788.298,64	0,00	0,00	251.788.298,64
g.	Piutang Lainnya	291.428.679,64	26.625.000,00	236.382.480,27	81.671.199,37
h.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	-	9.410.661,00	0,00	9.410.661,00
	Jumlah	71.665.920.927,79	26.294.694.271,00	68.874.964.060,27	29.085.651.138,52

Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang disajikan pada Lampiran 8, 9, 10, 11.

a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Merupakan kontribusi tahunan oleh pihak kedua atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, yang terdiri dari:

1. Piutang Kontribusi BGS PT. Satwa Sarana Karunia

Piutang Kontribusi Tahunan BGS PT. Satwa Sarana Karunia per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp186.000.000,00 Piutang ini merupakan kontribusi tahunan yang harus dibayarkan oleh PT. Satwa Sarana Karunia berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Dumai yaitu Tanah dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang dibuat antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Satwa Sarana karunia berdasarkan akta Notaris No. 03 Tanggal 06 Agustus 2021 dihadapan Notaris Apriliyani, S.H., M.Kn. dalam perjanjian dijelaskan bahwa Kontribusi Tahunan senilai Rp186.000.000,00 harus dibayarkan setiap tahunnya. Namun per 31 Desember 2022 PT. Satwa Sarana Karunia belum menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Piutang Kontribusi BGS PT. Mayatama Solusindo

Piutang Kontribusi BGS PT. Mayatama Solusindo per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp300.000.000,00. Piutang ini merupakan kontribusi tahunan yang harus dibayarkan oleh PT. Mayatama Solusindo berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Dumai yaitu Bahu Jalan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang dibuat antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo berdasarkan akta notaris No. 17 Tanggal 14 Februari 2022 dihadapan Notaris Apriliyani, S.H., M.Kn. Kontribusi tahunan ini harus dibayarkan PT. Mayatama solusindo setiap tahunnya senilai Rp300.000.000,00. Namun per 31 Desember 2022 PT. Mayatama solusindo belum menyetorkan Kontribusi tahunan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan per 31 Desember 2022 senilai Rp486.000.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp486.000.000,00 atau sebesar 100%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.31 Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	Keterangan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	PT. Mayatama Solusindo	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
2	PT. Satwa Sarana Karunia	0,00	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
	Jumlah	0,00	486.000.000,00	0,00	486.000.000,00

Atas Piutang Kontribusi Tahunan ini, PT. Satwa Sarana Karunia dan PT. Mayatama Solusindo telah menyetor kontribusi tahunan ke Rekening Kas Umum Daerah masing masing pada tanggal 13 Januari 2023 dan 21 Februari 2023.

b. Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)

Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp79.240.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp84.460.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp5.220.000,00 atau sebesar 6,18%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.32 Rincian Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	84.460.000,00	7.790.000,00	13.010.000,00	79.240.000,00
	Jumlah	84.460.000,00	7.790.000,00	13.010.000,00	79.240.000,00

c. Piutang Pendapatan BLUD-RSUD

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp25.099.852.925,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp67.852.173.968,00 maka mengalami penurunan senilai Rp42.752.321.043,00 atau sebesar 63,01%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.33 Rincian Piutang Pendapatan BLUD-RSUD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Perusahaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	BPJS(Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)	17.634.005.824,00	8.097.792.933,00	9.536.212.891,00	117,76
2	Kemenkes RI	0,00	57.483.515.550,00	(57.483.515.550,00)	(100,00)
3	BKR (PT. Wilmar Group)	144.307.505,00	129.107.105,00	15.200.400,00	11,77

No	Nama Perusahaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
4	JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)	0,00	20.457.576,00	(20.457.576,00)	(100,00)
5	JAMKESDA BENGKALIS	70.411.004,00	35.538.078,00	34.872.926,00	98,13
6	CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)	23.000.000,00	52.750.000,00	(29.750.000,00)	(56,40)
7	OBAT KRONIS	1.166.318.646,00	423.775.158,00	742.543.488,00	175,22
8	JAMKESKO (Jaminan Kesehatan Kota)	4.037.361.574,00	143.117.390,00	3.894.244.184,00	2.721,01
9	INHEALTH	21.809.668,00	1.622.828,00	20.186.840,00	1.243,93
10	AMBULANCE BPJS	133.887.000,00	82.258.800,00	51.628.200,00	62,76
12	PELINDO PEGAWAI (Pelabuhan Indonesia)	19.355.818,00	18.359.094,00	996.724,00	5,43
13	PELINDO PENSIUNAN (pelabuhan Indonesia)	33.632.685,00	28.820.877,00	4.811.808,00	16,70
14	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	42.281.252,00	40.589.405,00	1.691.847,00	4,17
15	Pertamina Bina Medika	310.647.555,00	200.530.737,00	110.116.818,00	54,91
16	PT. Nira Murni Konstruksi	79.552.900,00	79.552.900,00	0,00	0,00
17	PT. OWLEXA / HEALTCARE	1.724.083,00	1.724.083,00	0,00	0,00
18	PT. KLK (Kuala Lumpur Kepong)	20.651.224,00	4.051.352,00	16.599.872,00	409,74
19	PT. SURYA MADISTRINDO	782.400,00	782.400,00	0,00	0,00
20	PT. Margie Andalan	19.060.829,00	19.060.829,00	0,00	0,00
21	Trauma Center (Jamsostek /Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	143.822.044,00	15.161.649,00	128.660.395,00	848,59
22	PT.Murini Wood Indah Industry	0,00	1.588.193,00	(1.588.193,00)	(100,00)
23	CV. Akbar 77	21.953.545,00	48.589.615,00	(26.636.070,00)	(54,82)
24	PT. BANK BRI	74.469.021,00	74.469.021,00	0,00	0,00
25	PT. BANK RIAU KEPRI	0,00	10.446.932,00	(10.446.932,00)	(100,00)
27	Pendapatan Kerjasama (Sewa Kios)	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00
28	SEWA KANTIN (RUANGAN)	6.680.000,00	10.320.000,00	(3.640.000,00)	(35,27)
29	Sewa Parkir	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
30	PT. Arafah Alam Sejahtera	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
31	Bumida	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00
32	Intibenua	6.229.450,00	6.229.450,00	0,00	0,00
33	PT. AAB	19.426.207,00	15.941.217,00	3.484.990,00	21,86
34	PT. APICAL KAO CHEMICALS	365.707,00	0,00	365.707,00	100,00
35	PT. Admedika (PATRA SK)	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
36	PT. Admedika (PLN)	9.213.909,00	3.037.312,00	6.176.597,00	203,36
37	PT. Admedika (BNI LIFE)	11.027.819,00	0,00	11.027.819,00	100,00
38	PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN)	2.607.262,00	2.607.262,00	0,00	0,00
39	PT. SDS (Sari Dumai Sejati)	55.121.684,00	19.175.391,00	35.946.293,00	187,46
40	PT. SARI DUMAI OLEO	18.841.657,00	13.662.463,00	5.179.194,00	37,91
41	PT. APICAL	0,00	283.863,00	(283.863,00)	(100,00)
42	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	20.063.367,00	205.962,00	19.857.405,00	9.641,30
43	PT. MANDIRI INHEALTH	4.135.258,00	6.635.591,00	(2.500.333,00)	(37,68)
44	Pasien Umum	17.776.905,00	81.635.750,00	(63.858.845,00)	(78,22)
45	Pasien Perusahaan (PT. PLN)	0,00	20.278.746,00	(20.278.746,00)	(100,00)
47	Pasien BPJS	539.194.975,00	231.861.838,00	307.333.137,00	132,55
48	Pasien Non BPJS	251.614.156,00	278.779.487,00	(27.165.331,00)	(9,74)
49	Pasien Jamkesko	67.343.485,00	84.372.934,00	(17.029.449,00)	(20,18)
50	Pasien Jamkesda	2.742.310,00	0,00	2.742.310,00	100,00
51	Kemenkes	20.245.197,00	20.245.197,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.099.852.925,00	67.852.173.968,00	(42.752.321.043,00)	(63,01)

Sebagai Tambahan informasi untuk perbedaan antara Jamkesko dengan Jampersal:

- 1 Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota) merupakan Suatu Penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2 Jampersal (Jaminan Persalinan) merupakan Program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai yang mengelola dana kesehatan untuk menjamin persalinan bagi masyarakat dan tidak mampu di Kota Dumai dalam anggaran dan kurun waktu tertentu.

Tabel 5.5.34 Rincian Item Perbedaan Jamkesko dan Jampersal

No	Item Perbedaan	Jamkesko	Jampersal
1	Sumber Dana	APBD	APBN
2	Peserta	Masyarakat Kota Dumai yang tidak mampu (miskin) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.	Ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Rekapitulasi Piutang Pendapatan BLUD - RSUD beserta Penyisihan Piutang Tak tertagih dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 9.

d. Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas

Piutang Pendapatan pada BLUD - Puskesmas yang sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Piutang pada BLUD - Puskesmas Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp120.081.100,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp90.730.850,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp29.350.250,00 atau sebesar 32,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian 5.5.35 Rincian Piutang Pendapatan pada BLUD-Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang BPJS 2022:				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	32.435.000,00	0,00	32.435.000,00	0,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	10.065.000,00	0,00	10.065.000,00	0,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	14.417.850,00	0,00	14.417.850,00	0,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	15.533.000,00	0,00	15.533.000,00	0,00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
2	Piutang BPJS 2022:				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	0,00	40.111.100,00	0,00	40.111.100,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	10.759.000,00	0,00	10.759.000,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	29.420.000,00	0,00	29.420.000,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	24.181.000,00	0,00	24.181.000,00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00
Jumlah		90.730.850,00	120.081.100,00	90.730.850,00	120.081.100,00

e. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.957.606.954,51 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.095.339.131,51 maka mengalami penurunan senilai Rp137.732.177,00 atau sebesar 4,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.36 Rincian Piutang Denda Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Denda Pajak Hotel Tahun 2020	4.979.099,32	91.523.619,00	21.892.978,00	74.609.740,32
2	Denda Pajak Restoran Tahun 2020	241.236.672,20	170.374.808,00	50.568.239,00	361.043.241,20
3	Denda Pajak Hiburan Tahun 2020	117.378.883,59	41.541.086,00	35.629.981,00	123.289.988,59
4	Denda Pajak Reklame Tahun 2020	8.656.145,96	2.074.323,00	3.763.944,00	6.966.524,96
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2018	2.719.248.264,44	533.298.331,00	862.809.160,00	2.389.737.435,44
6	Denda Pajak Parkir tahun 2020	64.911,00	6.408.522,00	6.473.205,00	228,00
7	Denda Pajak Air Tanah Tahun 2020	3.775.155,00	16.704.986,00	18.520.345,00	1.959.796,00
8	Denda Pajak Walet 2022	0,00	4.402.830,00	4.402.830,00	0,00
Jumlah		3.095.339.131,51	866.328.505,00	1.004.060.682,00	2.957.606.954,51

f. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp251.788.298,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp251.788.298,64 maka tidak mengalami perubahan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Denda Retribusi Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pendapatan Daerah	251.788.298,64	251.788.298,64	0,00	0,00
	Jumlah	251.788.298,64	251.788.298,64	0,00	0,00

g. Piutang Lainnya Pada PPKD

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp81.671.199,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp291.428.679,64 maka mengalami kenaikan senilai Rp209.757.480,27 atau sebesar 71,98%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.38 Rincian Piutang Lainnya pada PPKD Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang bunga Koperasi Putri Tujuh	7.653.399,37	0,00	0,00	7.653.399,37
2	Piutang PT Pembangunan Dumai	2.306.000,00	0,00	0,00	2.306.000,00
3	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	227.382.480,27	26.625.000,00	227.382.480,27	26.625.000,00
4	Piutang Gaji PNS	54.086.800,00	0,00	9.000.000,00	45.086.800,00
	Jumlah	291.428.679,64	26.625.000,00	236.382.480,27	81.671.199,37

1. Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman Koperasi Putri Tujuh per Tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp7.653.399,37. Piutang ini merupakan Piutang yang timbul atas Bunga Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh, yaitu sebesar 0,5% dari pokok pinjaman senilai Rp500.000.000,00 selama 10 Tahun (sejak Nopember 2001 hingga Desember 2011) senilai Rp25.570.066,02.

2. Piutang PT Pembangunan Dumai

Piutang PT Pembangunan Dumai senilai Rp2.306.000,00 merupakan sisa sewa gedung yang belum disetor ke Kas Daerah. Pendapatan sewa senilai Rp9.160.000,00, merupakan pendapatan sewa gedung Tahun 2012 s.d 2015 yang disetor ke Kas Daerah pada Tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp9.070.000,00. Pendapatan sewa gedung Tahun 2016 s.d 2017 senilai Rp9.920.000,00 telah disetor pada tanggal 24 Januari 2018 senilai Rp7.704.000,00. Atas kedua penyetoran tersebut, terdapat kekurangan setor senilai Rp2.306.000,00 yang baru diketahui Tahun 2020, sehingga sisa sewa gedung yang belum disetor per 31 Desember 2022 ke Kas Daerah senilai Rp2.306.000,00.

3. Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 senilai Rp26.625.000,00 mengalami penurunan senilai Rp200.757.480,27 atau sebesar 88,29% dari Tahun 2021 senilai Rp227.382.480,27. Penurunan ini disebabkan adanya reklasifikasi dari Piutang Lainnya Pihak Ketiga ke Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Piutang ini merupakan klaim tuntutan ganti kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak ketiga a.n Sdr.A berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 900/946/2022 Tanggal 8 Desember 2022.

4. Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp45.086.800,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp54.086.800,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.000.000 atau sebesar 16,64% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.39 Rincian Piutang Gaji PNS Tahun 2022 dan 2021

No	Nama	2022	2021	Peningkatan/ (Penurunan)	Keterangan
1	D F	45.086.800,00	54.086.800,00	(9.000.000,00)	Gaji, THR dan gaji 13 Maret 2019 s/d November 2020 Atas Nama D F.
	Jumlah	45.086.800,00	54.086.800,00	(9.000.000,00)	

Rekapitulasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi – Piutang Gaji PNS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 12.

h. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp9.410.661,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023.

10) Piutang Transfer Antar Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
29.390.520.807,00	9.656.723.625,00	19.733.797.182,00	204,35

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp29.390.520.807,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp9.656.723.625,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp19.733.797.182,00 atau sebesar 204,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.40 Rincian Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.114.597.124,00	2.690.492.585,00	5.424.104.539,00	201,60
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.404.791.983,00	2.004.702.813,00	1.400.089.170,00	69,84
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.769.730.944,00	4.867.170.924,00	12.902.560.020,00	265,09
4	Pajak Air Permukaan	101.400.756,00	94.357.303,00	7.043.453,00	7,46
	Jumlah	29.390.520.807,00	9.656.723.625,00	19.733.797.182,00	204,35

Tabel 5.5.41 Rincian Mutasi Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.690.492.585,00	8.114.597.124,00	2.690.492.585,00	8.114.597.124,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.004.702.813,00	3.404.791.983,00	2.004.702.813,00	3.404.791.983,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.867.170.924,00	17.769.730.944,00	4.867.170.924,00	17.769.730.944,00
4	Pajak Air Permukaan	94.357.303,00	101.400.756,00	94.357.303,00	101.400.756,00
	Jumlah	9.656.723.625,00	29.390.520.807,00	9.656.723.625,00	29.390.520.807,00

11) Penyisihan Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021	(Peningkatan)/Penurunan	
		Rp	%
(83.863.366.847,86)	(90.643.237.451,68)	6.779.870.603,82	(7,48)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 senilai minus Rp83.863.366.847,86 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp90.643.237.451,68 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.779.870.603,82 atau sebesar 7,48%. Penyisihan tersebut muncul akibat penerapan SAP berbasis akrual. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 5.5.42 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	(32.844.500,00)	(18.804.500,00)	(14.040.000,00)	74,66
2	BLUD RSUD	(3.986.825.003,90)	(16.155.543.705,00)	12.168.718.701,10	(75,32)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(50.640.000,00)	(50.640.000,00)	0,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	(79.793.057.343,96)	(74.418.249.246,68)	(5.374.808.097,28)	7,22
	Jumlah	(83.863.366.847,86)	(90.643.237.451,68)	6.779.870.603,82	(7,48)

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 5,6,7,8,9,10, dan 11.

12) Beban dibayar Dimuka

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	114.500.000,00	(114.500.000,00)	(100,00)

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum dibebankan seluruhnya pada akhir tahun berjalan. Asuransi Dibayar Dimuka Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp114.500.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp114.500.000 atau sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.43 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Sekretariat Daerah	0,00	114.500.000,00	(114.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	114.500.000,00	(114.500.000,00)	(100,00)

13) Persediaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
33.459.430.232,56	50.892.554.145,49	(17.433.123.912,93)	(34,25)

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp33.459.430.232,56 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp50.892.554.145,49 maka mengalami penurunan senilai Rp17.433.123.913 atau sebesar 34,25% Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 13.

Kebijakan Akuntansi Persediaan mengacu pada Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Perwako Dumai Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang tertuang dalam Kebijakan Nomor 16 tentang Akuntansi Persediaan. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa pengukuran persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Adapun rincian persediaan per SKPD di Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.44 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.696.300,00	5.318.620,00	(1.622.320,00)	(30,50)
2	Dinas Kesehatan	14.206.644.251,56	14.392.757.261,87	(186.113.010,31)	(1,29)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	13.146.639.039,00	12.952.011.026,00	194.628.013,00	1,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.173.655.123,00	22.641.163.018,62	(17.467.507.895,62)	(77,15)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.447.000,00	0,00	2.447.000,00	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.666.700,00	1.053.990,00	612.710,00	58,13
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.209.600,00	9.295.650,00	(7.086.050,00)	(76,23)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.663.200,00	311.850,00	7.351.350,00	2.357,34
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.612.600,00	70.183.780,00	(63.571.180,00)	(90,58)
10	Dinas Tenaga Kerja	1.207.255,00	1.958.803,00	(751.548,00)	(38,37)
11	Dinas Lingkungan Hidup	302.824.078,00	61.314.478,00	241.509.600,00	393,89
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.324.200,00	252.571.766,00	(154.247.566,00)	(61,07)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.673.069,00	187.839.061,00	(77.165.992,00)	(41,08)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.114.500,00	2.657.900,00	(543.400,00)	(20,44)
15	Dinas Perhubungan	213.247.973,00	147.053.788,00	66.194.185,00	45,01
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.144.600,00	334.500,00	4.810.100,00	1.438,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.348.750,00	2.398.000,00	(49.250,00)	(2,05)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.791.400,00	7.332.800,00	1.458.600,00	19,89
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	252.600,00	277.200,00	(24.600,00)	(8,87)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.227.900,00	1.055.250,00	172.650,00	16,36
21	Dinas Perikanan	3.879.050,00	3.712.900,00	166.150,00	4,47

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.445.500,00	789.800,00	1.655.700,00	209,64
23	Dinas Perdagangan	861.800,00	2.040.780,00	(1.178.980,00)	(57,77)
24	Sekretariat Daerah	47.005.822,00	60.243.080,00	(13.237.258,00)	(21,97)
25	Sekretariat DPRD	12.355.000,00	15.389.500,00	(3.034.500,00)	(19,72)
26	Kecamatan Dumai Barat	1.730.000,00	2.745.985,00	(1.015.985,00)	(37,00)
27	Kecamatan Dumai Timur	725.100,00	160.650,00	564.450,00	351,35
28	Kecamatan Bukit Kapur	1.966.400,00	1.098.000,00	868.400,00	79,09
29	Kecamatan Medang Kampai	799.700,00	1.047.710,00	(248.010,00)	(23,67)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	2.820.700,00	436.825,00	2.383.875,00	545,73
31	Kecamatan Dumai Kota	304.800,00	1.021.300,00	(716.500,00)	(70,16)
32	Kecamatan Dumai Selatan	1.817.300,00	1.582.047,00	235.253,00	14,87
33	Inspektorat	4.803.640,00	4.498.500,00	305.140,00	6,78
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.299.800,00	5.418.100,00	(4.118.300,00)	(76,01)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.944.640,00	13.502.370,00	(6.557.730,00)	(48,57)
36	Badan Pendapatan Daerah	71.726.442,00	41.195.550,00	30.530.892,00	74,11
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	554.400,00	782.306,00	(227.906,00)	(29,13)
	Jumlah	33.459.430.232,56	50.892.554.145,49	(17.433.123.912,93)	(34,25)

Dari total Persediaan per OPD senilai Rp29.624.460.779,82, Persediaan per OPD yang berasal dari Belanja Tak Terduga - Covid 19 (BTT - Covid 19) adalah senilai Rp5.925.661.246,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.44.a Rincian Persediaan per OPD yang berasal dari BTT

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	2.979.962.989,10
2	RSUD	2.402.666.957,00
3	BPBD	543.031.300,00
	Jumlah	5.925.661.246,10

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari beberapa jenis persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.5.45 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Pakai Habis	33.459.430.232,56	50.892.554.145,49	(17.433.123.912,93)	(34,25)
2	Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	33.459.430.232,56	50.892.554.145,49	(17.433.123.912,93)	(34,25)

Tabel 5.5.46 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bahan	19.033.706.436,15	20.532.964.223,73	(1.499.257.787,58)	(7,30)
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.072.939.803,31	1.149.887.433,35	(76.947.630,04)	(6,69)
4	Obat-obatan	8.449.064.120,10	6.824.773.219,79	1.624.290.900,31	23,80
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	4.903.719.873,00	22.379.368.268,62	(17.475.648.395,62)	(78,09)
6	Natura dan Pakan	0,00	5.561.000,00	(5.561.000,00)	(100,00)
	Jumlah	33.459.430.232,56	50.892.554.145,49	(17.433.123.912,93)	(34,25)

a. Persediaan Bahan

Persediaan Bahan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp19.033.706.436,15 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp20.532.964.223,73 maka mengalami penurunan senilai Rp1.499.257.787,58 atau sebesar 7,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.47 Rincian Persediaan Bahan Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	9.844.813.422,15	11.232.560.157,73	(1.387.746.735,58)	(12,35)

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8.577.664.214,00	8.912.068.988,00	(334.404.774,00)	(3,75)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.630.000,00	326.630.000,00	(15.000.000,00)	(4,59)
4	Dinas Lingkungan Hidup	295.615.700,00	58.200.078,00	237.415.622,00	407,93
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	183.100,00	0,00	183.100,00	100,00
6	Inspektorat	3.800.000,00	3.505.000,00	295.000,00	8,42
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.033.706.436,15	20.532.964.223,73	(1.499.257.787,58)	(7,30)

b. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp1.072.939.803,31 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.149.887.433,35 maka mengalami penurunan senilai Rp76.947.630 atau sebesar 6,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.48 Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.696.300,00	5.318.620,00	(1.622.320,00)	(30,50)
2	Dinas Kesehatan	219.374.178,31	303.598.333,35	(84.224.155,04)	(27,74)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	329.489.065,00	253.619.650,00	75.869.415,00	29,91
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.326.250,00	2.214.750,00	(888.500,00)	(40,12)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.447.000,00	0,00	2.447.000,00	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.666.700,00	1.053.990,00	612.710,00	58,13
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.209.600,00	9.295.650,00	(7.086.050,00)	(76,23)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.663.200,00	311.850,00	7.351.350,00	2.357,34
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.612.600,00	3.133.780,00	3.478.820,00	111,01
10	Dinas Tenaga Kerja	1.207.255,00	1.958.803,00	(751.548,00)	(38,37)
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.208.378,00	3.114.400,00	4.093.978,00	131,45
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.324.200,00	252.571.766,00	(154.247.566,00)	(61,07)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	530.360,00	426.000,00	104.360,00	24,50
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.114.500,00	2.657.900,00	(543.400,00)	(20,44)
15	Dinas Perhubungan	213.247.973,00	147.053.788,00	66.194.185,00	45,01
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.144.600,00	334.500,00	4.810.100,00	1.438,00
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.348.750,00	2.398.000,00	(49.250,00)	(2,05)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.791.400,00	7.332.800,00	1.458.600,00	19,89
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	69.500,00	277.200,00	(207.700,00)	(74,93)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.227.900,00	1.055.250,00	172.650,00	16,36
21	Dinas Perikanan	3.879.050,00	3.712.900,00	166.150,00	4,47
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.445.500,00	789.800,00	1.655.700,00	209,64
23	Dinas Perdagangan	861.800,00	2.040.780,00	(1.178.980,00)	(57,77)
24	Sekretariat Daerah	47.005.822,00	60.243.080,00	(13.237.258,00)	(21,97)
25	Sekretariat DPRD	12.355.000,00	15.389.500,00	(3.034.500,00)	(19,72)
26	Kecamatan Dumai Barat	1.730.000,00	2.745.985,00	(1.015.985,00)	(37,00)
27	Kecamatan Dumai Timur	725.100,00	160.650,00	564.450,00	351,35

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
28	Kecamatan Bukit Kapur	1.966.400,00	1.098.000,00	868.400,00	79,09
29	Kecamatan Medang Kampai	799.700,00	1.047.710,00	(248.010,00)	(23,67)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	2.820.700,00	436.825,00	2.383.875,00	545,73
31	Kecamatan Dumai Kota	304.800,00	1.021.300,00	(716.500,00)	(70,16)
32	Kecamatan Dumai Selatan	1.817.300,00	1.582.047,00	235.253,00	14,87
33	Inspektorat	1.003.640,00	993.500,00	10.140,00	1,02
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.299.800,00	5.418.100,00	(4.118.300,00)	(76,01)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.944.640,00	13.502.370,00	(6.557.730,00)	(48,57)
36	Badan Pendapatan Daerah	71.726.442,00	41.195.550,00	30.530.892,00	74,11
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	554.400,00	782.306,00	(227.906,00)	(29,13)
	Jumlah	1.072.939.803,31	1.149.887.433,35	(76.947.630,04)	(6,69)

c. Persediaan Obat - obatan

Persediaan Obat - obatan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp8.449.064.120,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp6.824.773.219,79 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.624.290.900,31 atau sebesar 23,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.49 Rincian Persediaan Obat - obatan Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	4.099.435.651,10	2.851.037.770,79	1.248.397.880,31	43,79
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.239.485.760,00	3.786.322.388,00	453.163.372,00	11,97
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.142.709,00	187.413.061,00	(77.270.352,00)	(41,23)
	Jumlah	8.449.064.120,10	6.824.773.219,79	1.624.290.900,31	23,80

d. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk dijual/diserahkan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp4.903.719.873,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp22.379.368.268,62 maka mengalami penurunan senilai Rp17.475.648.395,62 atau sebesar 78,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.50 Rincian Persediaan untuk dijual/diserahkan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	43.021.000,00	0,00	43.021.000,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.860.698.873,00	22.312.318.268,62	(17.451.619.395,62)	(78,22)
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	67.050.000,00	(67.050.000,00)	(100,00)
	Jumlah	4.903.719.873,00	22.379.368.268,62	(17.475.648.395,62)	(78,09)

e. Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.561.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp5.561.000 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51 Rincian Persediaan Natura dan Pakan per OPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
2	Dinas Kesehatan	0,00	5.561.000,00	(5.561.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	5.561.000,00	(5.561.000,00)	(100,00)

b. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
51.088.523.186,33	58.002.848.837,39	(6.914.325.651,06)	(11,92)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp58.002.848.837,39 maka mengalami penurunan senilai Rp6.914.325.651 atau sebesar 11,92%. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Investasi Jangka Panjang Tahun 2022 dan 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Dana Bergulir	8.620.480.000,00	8.623.980.000,00	(3.500.000,00)	(0,04)
Penyisihan Dana Bergulir	(8.620.480.000,00)	(8.390.980.000,00)	(229.500.000,00)	2,74
Investasi Permanen	51.088.523.186,33	57.769.848.837,39	(6.681.325.651,06)	(11,57)
Jumlah	51.088.523.186,33	58.002.848.837,39	(6.914.325.651,06)	(11,92)

1) Dana Bergulir

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8.620.480.000,00	8.623.980.000,00	(3.500.000,00)	(0,04)

Dana Bergulir Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp8.620.480.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp8.623.980.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp3.500.000 atau sebesar 0,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Peminjam	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp.	%
1	Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi				
	- Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pinjaman Kepada lembaga lainnya				
	- Koperasi Putri Tujuh	229.500.000,00	233.000.000,00	(3.500.000,00)	(1,50)
	- Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan	305.100.000,00	305.100.000,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	1.085.880.000,00	0,00	0,00
Jumlah		8.620.480.000,00	8.623.980.000,00	(3.500.000,00)	(0,04)

a. Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan

Pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) berlangsung sejak Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang digunakan dalam rangka penyaluran dana bergulir kepada masyarakat/kelompok masyarakat. LEK merupakan lembaga penyalur dana bergulir kepada masyarakat. LEK berhak untuk menilai kelayakan peminjam dalam mengelola dana.

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.431.271.331,00, yang berada pada rekening penampung yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2021	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2022
1	LEK Dumai qq Zulfikar 104-2-000279	30.280,00	0,00	28,00	30.308,00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	675.858.260,00	0,00	5.426.790,00	681.285.050,00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1.643.576.786,00	69.248.533,00	26.826.497,00	1.739.651.816,00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10.273.507,00	0,00	30.650,00	10.304.157,00
Jumlah		2.329.738.833,00	69.248.533,00	32.283.965,00	2.431.271.331,00

Adapun sepanjang Tahun 2022 terdapat penyetoran dari nasabah senilai Rp69.248.533,00 pada Rekening 10-40-70003-8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Penyetoran Nasabah Tahun 2022

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
1	22 Maret 2022	Iskandar	24.000.000,00
2	08 Juli 2022	Aidawati	12.000.000,00

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
3	30 Agustus 2022	Kamaruddin	17.520.000,00
4	06 Septembr 2022	TRF Rek 60349470091	3.700.000,00
5	19 Desember 2022	Pelunasan Pokok LEK	11.428.533,00
6	19 Desember 2022	Pelunasan Bunga Pinjaman LEK	600.000,00
	Jumlah		69.248.533,00

b. Pinjaman Kepada Lembaga Lainnya

1. Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh

Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Putri Tujuh adalah senilai Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada November 2001. Dana tersebut digunakan oleh Koperasi Putri Tujuh untuk membeli sebidang tanah yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Nilai Pinjaman Koperasi Putri tujuh sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp229.500.000,00.

Tabel 5.5.56 Rincian Penyetoran Nilai Pinjaman Koperasi Putri Tujuh Tahun 2022

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Pemberian Pinjaman Bulan November 2001	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2	Pembayaran Tahun 2015	0,00	0,00	100.000.000,00	400.000.000,00
3	Pembayaran Tahun 2016	0,00	0,00	90.000.000,00	310.000.000,00
4	Pembayaran Tahun 2017	0,00	0,00	50.000.000,00	260.000.000,00
5	Pembayaran Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00
6	Pembayaran Tahun 2019	0,00	0,00	27.000.000,00	233.000.000,00
7	Pembayaran Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00
8	Pembayaran Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00
9	Pembayaran Tahun 2022	0,00	0,00	3.500.000,00	229.500.000,00

Pada Tanggal 04 Mei 2023, terdapat penyetoran ke Kas Umum daerah untuk pembayaran pinjaman Koperasi Puteri Tujuh senilai Rp1.000.000,00.

2. Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima - Dinas Perdagangan

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perdagangan merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp1.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh, Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan Tahun 2022 senilai Rp305.100.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

3. Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Usaha Kecil. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp2.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2022 masih terdapat tunggakan senilai Rp1.085.880.000,00.

2) Penyisihan Dana Bergulir

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(8.620.480.000,00)	(8.390.980.000,00)	(229.500.000,00)	2,74

Nilai Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai minus Rp8.620.480.000,00. Nilai tersebut merupakan penyisihan dana bergulir senilai 100% atas dana bergulir yang jatuh tempo mulai lima tahun ke atas, yang terdiri dari penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK senilai Rp7.000.000.000,00, penyisihan pinjaman usaha kecil dan koperasi pada Dinas Perdagangan senilai Rp305.100.000,00 penyisihan investasi non permanen pada Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp1.085.880.000,00 penyisihan Koperasi Puteri Tujuh senilai Rp229.500.000,00.

Tabel 5.5.57 Rincian Penyisihan Dana Bergulir

No	Penyisihan Dana Bergulir	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
2	Penyisihan Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi Pada Dinas Perdagangan	305.100.000,00	0,00	0,00	305.100.000,00
3	Penyisihan Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	0,00	0,00	1.085.880.000,00
4	Penyisihan Koperasi Putri Tujuh	-	229.500.000,00	0,00	229.500.000,00
	JUMLAH	8.390.980.000,00	229.500.000,00	-	8.620.480.000,00

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.431.271.331,00, yang berada pada rekening penampung yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.58 Rincian Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2021	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2022
1	LEK Dumai qq Zulfikar 104-2-000279	30.280,00	0,00	28,00	30.308,00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	675.858.260,00	0,00	5.426.790,00	681.285.050,00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1.643.576.786,00	69.248.533,00	26.826.497,00	1.739.651.816,00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10.273.507,00	0,00	30.650,00	10.304.157,00
Jumlah		2.329.738.833,00	69.248.533,00	32.283.965,00	2.431.271.331,00

Empat rekening LEK tersebut merupakan rekening dengan specimen tandatangan Sdr. Zulfikar atau manager LEK periode terakhir. Empat rekening tersebut tidak dapat dilakukan penarikan dana, namun hanya digunakan sebagai penyeteroran pengembalian dana bergulir oleh nasabah sejak tahun 2012.

Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 dan Daftar Pinjaman dan Tunggakan Fasilitas Pengembangan UKM Keluarga Miskin Tahun 2007 terdapat dalam Lampiran 14 dan Lampiran 15.

3) Investasi Permanen

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
51.088.523.186,33	57.769.848.837,39	(6.681.325.651,06)	(11,57)

Investasi Permanen Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp57.769.848.837,39 maka mengalami penurunan senilai Rp6.681.325.651 atau sebesar 11,57% dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
51.088.523.186,33	57.769.848.837,39	(6.681.325.651,06)	(11,57)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp57.769.848.837,39 maka mengalami penurunan senilai Rp6.681.325.651 atau sebesar 11,57% dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.59 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PT. Bank Riau	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	4.716.000.553,13	3.536.009.301,90	1.179.991.251,23	33,37
3	PT. Pembangunan Dumai	14.738.743.079,19	25.791.022.076,49	(11.052.278.997,30)	(42,85)
4	PT. Riau Air Line	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	21.030.779.554,00	17.839.817.459,00	3.190.962.095,00	17,89
Jumlah		51.088.523.186,33	57.769.848.837,39	(6.681.325.651,06)	(11,57)

1. PT Bank Riau Kepri

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per Tahun 2022 senilai Rp5.203.000.000,00, yang terdiri dari 52.030 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 0,43%. penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Bank Riau Kepri, Tahun 2022 PT. Bank Riau Kepri telah membagikan dividen senilai Rp1.079.761.191,00 untuk tahun buku 2021 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Riau Kepri pada Tanggal 23 April 2022.

2. PT Pelabuhan Dumai Berseri

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp4.716.000.553,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.536.009.301,90 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.179.991.251,23 atau sebesar 33,37%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97% yang disajikan dengan menggunakan Metode Ekuitas (*Equity Method*).

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pelabuhan Dumai Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 8.217.600.000,00	Modal Saham
2	Laba/Rugi Ditahan	Rp (4.679.821.809,00)	Saldo Awal Laba (rugi) Ditahan
3	Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp 1.533.142.801,00	Rugi Tahun Berjalan
4	Deviden	0,00	Saldo Awal Deviden
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp (352.561.259,00)	Saldo Koreksi Beban Laba (Rugi) Tahun lalu
6	Sharing Pendapatan BSJ	0,00	Sharing Pendapatan BSJ
	Jumlah a	Rp 4.718.359.733,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,95%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 4.716.000.553,13	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

Pada Tahun 2022 PT. Pelabuhan Dumai Berseri memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan audit KAP Khairul. PT. Pelabuhan Dumai Berseri Tahun 2022 membukukan Laba bersih setelah Pajak Senilai Rp1.533.142.801,00. Peningkatan Laba bersih yang signifikan setelah tahun sebelumnya sempat mengalami kerugian akibat gelombang Covid-19, diperoleh dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri dengan PT. Pelindo Cabang Dumai berupa:

1. Pemuatan Semen Bag (FOB) Semen Padang, Perjanjian Kerjasama kegiatan ini dimulai sejak tanggal 01 Mei 2022 s/d 01 April 2025.
2. Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal, Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan KSO PT.PDB dari PT. SLUP dimulai sejak Tanggal 19 Mei 2021 melalui SK Pelimpahan dari Dirjen Perhubungan Laut pada Tersus PT. Oleo Kimia Mas dan PT. Ivo Mas Tunggal.
3. KSO 1 (Satu) unit Kapal Tunda: Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan KSO Antara PT.PDB dan PT.PMS dimulai sejak tanggal 4 Januari 2022.
4. KSO antara PT.PDB dan PT. KBS supporting Pelayanan Jasa Tunda di Tersus Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal Milik PT.KBS dimulai sejak Tanggal 20 Maret 2022.

3. PT Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp14.738.743.079,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp25.791.022.076,49 maka mengalami penurunan senilai Rp11.052.278.997 atau sebesar 42,85%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97%.

Sebagai tambahan informasi pada Tanggal 06 September 2022 sesuai Agenda RUPS-LB Walikota Dumai sebagai Pemilik Saham Utama BUMD PT Pembangunan Dumai memberhentikan Direktur Utama Saudara Bennedi Boiman, memberhentikan Komisaris Saudara Drs. H. Wan Fauzy Effendi dan Syahrinaldi, S.Sos, M.Si mengangkat Saudara Aditya Romas, SST sebagai Direktur, Saudara Sepranef Syamsir, AP, M.Si sebagai Komisaris. Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pada PT Pembangunan Dumai dengan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pembangunan Dumai Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 31.182.264.000,00	Modal Saham
2	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (9.173.389.326,00)	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Laba / (Rugi) Periode Berjalan	Rp (2.994.539.877,00)	Rugi Tahun Berjalan
4	Deviden	Rp0,00	Deviden yang sudah disetor
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp (4.271.168.768,00)	Koreksi Laba/Rugi Ditahan
	Jumlah a	Rp 14.743.166.029,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99,97%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 14.738.743.079,19	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

Berdasarkan hasil dari Laporan Auditor Independen KAP Boy Febrian memberikan Opini untuk Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan PT. Pembangunan, dengan basis opini sebagai berikut:

Pada saldo akun Kas dan Setara Kas untuk saldo Rekening Bank senilai Rp315.885.681,00 terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan perusahaan senilai Rp315.88.681,00 dengan konfirmasi saldo Bank senilai Rp33.853.359,00. Juga terdapat saldo yang belum dibukukan yaitu Rp134.192.698,00.

Pada saldo akun Piutang tidak bisa dibuktikan kevaliditasan atas akun Piutang secara keseluruhan, dan nilai yang ditelusuri merupakan nilai yang materialitas senilai Rp1.85321.554,00 sebagaimana tertuang dalam catatan atas laporan keuangan PT. Pembangunan, Auditor tidak bisa mendapatkan konfirmasi atas jumlah piutang, prosedur alternatif juga tidak didapatkan sampai dengan Laporan Audit diterbitkan.

Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum pada pencatatan Aset Tetap. Ditambah dengan dilakukannya koreksi secara material terhadap Aset Tetap secara internal dan merubah metode pencatatan. Mutasi biaya penyusutan akibat perhitungan ulang internal cukup material, dimana biaya penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp2820.299.531,00 sementara pada tahun 2021 biaya penyusutan sebesar Rp745.680.962,00.

Pada saldo akun Aset dalam proses senilai Rp5.397.003.395,00 sebagaimana tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Pembangunan merupakan transaksi yang terjadi sebelum Tahun 2022 Auditor tidak dapat menelusuri keberadaan Aset, prosedur alternatif juga tidak didapatkan sampai dengan Laporan Audit diterbitkan.

Saldo akun Kewajiban terdapat Hutang-hutang yang belum didapatkan kevaliditasannya atas Utang Usaha dan lain-lain, ditambah Utang Bank yang nilainya sangat besar dan sudah pernah dilakukan Restrukturisasi. Prosedur alternatif juga tidak didapatkan sampai dengan Laporan Audit diterbitkan.

Perusahaan belum mengakui Kewajiban Imbalan Pasca kerja dalam Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2022. Kewajiban tersebut harusnya diakui agar penerapannya sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 23 dan undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

4. PT Riau Air Line

Nilai penyertaan modal pertama Pemerintah Kota Dumai pada Riau Airline dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 yang terdiri dari 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,00 perlembar saham melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline nomor: 27501-29000/RAL/2005. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 Pemerintah Kota Dumai kembali menambah penyertaan modal kepada Riau Airline senilai Rp3.900.000.000,00 yang terdiri dari 3.900 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline Nomor: 51151-55050/RAL/2006. Persentase kepemilikan Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Airline per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,42% menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Pada tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Airline dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. Riau Airline sehingga status pailit PT Riau Airline berakhir.

Tabel 5.5.61 Penyertaan Modal Pada Riau Airline

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	Rp 1.500.000.000,00
2	2006	Rp 3.900.000.000,00
Jumlah		Rp 5.400.000.000,00

5. PDAM Tirta Dumai Bersemai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai per 31 Desember 2022 senilai Rp21.030.779.554,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp17.839.817.459,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.190.962.095,00 atau sebesar 17,89%, dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dengan menggunakan metode ekuitas dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.62 Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Awal (Aset)	Rp 53.303.392.000,00	
2	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 10.320.520.000,00	
	Jumlah Modal	Rp 63.623.912.000,00	
3	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (45.784.094.541,00)	Saldo laba (rugi) Ditahan
4	Koreksi Laba Ditahan	Rp 680.107.379,00	Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu
5	Lab a / (Rugi) Berjalan	Rp 2.510.854.716,00	Lab a Tahun Berjalan
	Jumlah a	Rp 21.030.779.554,00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	100,00%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 21.030.779.554,00	

Pada Tahun 2022 PDAM Tirta Dumai Bersemai mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan audit KAP Khairul. PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2022 membukukan Laba Bersih sebelum pajak senilai Rp2.510.854.716,00 Kenaikan Laba yang signifikan dari tahun sebelumnya didapat dari adanya peningkatan pertumbuhan pelanggan (Sambungan Langganan) sebesar 37,4% yang otomatis berdampak pada Peningkatan Air Terjual sebesar 100,2%.

c. Aset Tetap

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.769.498.572.429,53	2.679.041.994.881,42	90.456.577.548,11	3,38

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.769.498.572.429,53 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.679.041.994.881,42 maka mengalami kenaikan senilai Rp90.456.577.548,11 atau sebesar 3,38% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.63 Rincian Aset Tetap per Jenis Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	663.869.747.203,42	661.486.214.865,96	2.383.532.337,46	0,36
2	Peralatan dan Mesin	847.100.176.538,41	776.533.030.032,11	70.567.146.506,30	9,09
3	Gedung dan Bangunan	1.081.480.906.107,57	1.014.947.165.081,88	66.533.741.025,69	6,56
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.457.323.337.875,90	2.390.039.096.680,91	67.284.241.194,99	2,82
5	Aset Tetap Lainnya	59.805.527.274,44	56.223.639.963,74	3.581.887.310,70	6,37
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	259.619.088.807,87	217.661.117.431,33	41.957.971.376,54	19,28
7	Akumulasi Penyusutan	(2.599.700.211.378,08)	(2.437.848.269.174,51)	(161.851.942.203,57)	6,64
	Jumlah	2.769.498.572.429,53	2.679.041.994.881,42	90.456.577.548,11	3,38

Peningkatan Aset Tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	266.354.087.756,95
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	13.202.873.425,65
	Reklasifikasi Masuk	30.425.078.619,08
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	18.406.619.325,26
	Hasil Inventarisasi	525.723.450,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	9.977.000,00
	Koreksi Pencatatan	410.187.100,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	329.334.546.676,94
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	12.650.158.732,81
	Transfer ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	13.202.873.425,65
	Reklasifikasi Keluar	26.575.950.654,00
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	24.397.044.112,79
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	76.826.026.925,26
Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan (c)		(162.051.942.203,58)
Kenaikan/(Penurunan) = (a) - (b) + (c)		90.456.577.548,11

Keterangan:

1	Pengadaan adalah penambahan Aset Tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan, sedangkan penghapusan adalah kebalikannya yaitu pengurangan Aset Tetap karena dihapuskan.
2	Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan Aset Tetap akibat Aset Tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan, sedangkan transfer ke Aset Tetapnya adalah pengurangan Aset Tetap KDP akibat telah selesai Tahun pelaporan.
3	Transfer Masuk adalah penambahan Aset Tetap dari SKPD lain dalam satu entitas pelaporan, sedangkan Transfer Keluar adalah pengurangan Aset Tetap akibat penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan.
4	Reklasifikasi Masuk adalah penambahan Aset Tetap dari jenis Aset Tetap yang lain atau Aset lainnya dalam satu SKPD, sedangkan Reklasifikasi Keluar adalah pengurangan Aset Tetap kepada jenis Aset Tetap yang lain atau Aset Lainnya dalam satu SKPD.

5	Penerimaan Hibah adalah penambahan Aset Tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun, sedangkan Pemberian Hibah adalah pengurangan Aset Tetap akibat memberikan Aset Tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.
6	Koreksi pencatatan adalah mengoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam Laporan Keuangan (akun Aset Tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	260.201.936.711,64
	Belanja Pegawai	162.491.100,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	17.007.164.105,31
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	55.686.767.894,68
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	756.319.347,50
	Masuk dari BM JIJ	2.451.333.902,24
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	531.169.222,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	336.797.182.283,37
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	(555.729.200,00)
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(951.672.548,50)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(2.000.551.036,24)
	Keluar ke aset JIJ	(3.849.170.808,14)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	(150.802.500,00)
	Keluar ke aset KDP	(51.909.561.273,54)
	Keluar ke Aset Lainnya	(468.715.500,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(2.532.867.870,00)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(8.024.023.790,00)
	Jumlah ---2	(70.443.094.526,42)
3	Selisih lebih/(kurang)	266.354.087.756,95

Rekapitulasi Daftar Aset Tetap, Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2022 terdapat pada Lampiran 16 dan 17.

Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
663.869.747.203,42	661.486.214.865,96	2.383.532.337,46	0,36

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp663.869.747.203,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp661.486.214.865,96 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.383.532.337,46 atau sebesar 0,36%

Tanah Pemerintah Kota Dumai sebanyak 330 persil, 230 persil telah bersertifikat. Sisanya 100 persil dengan nilai Rp79.638.012.736,00 belum memiliki sertifikat. Dari 100 persil tanah tersebut terdapat 55 persil senilai Rp59.984.280.647,00 tidak dapat dilakukan sertifikasi disebabkan beberapa alasan yaitu:

- (1) Proses sertifikasi atas 22 persil aset tanah senilai Rp26.739.247.327,00 tidak dapat diterbitkan oleh BPN karena diindikasikan lokasi titik koordinat lahan berada di kawasan hutan, DAS, area 100 meter sempadan pantai, dan 100 meter dari as jalan BMN,
- (2) Tercatat dua persil aset tanah yang dicatat di KIB A merupakan aset eks PT CPI antara lain Tanah kantor Kelurahan Mekar Sari senilai Rp96.979.800,00 dan Tanah SDN 006 Mekar sari senilai 615.570.000,00. DJKN menyatakan bahwa seluruh barang yang diperoleh atau dibeli dan digunakan oleh KKKS PT CPI dalam kegiatan usaha hulu migas sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak kerja sama termasuk tanah adalah BMN. Selanjutnya DJKN menegaskan agar kantor pertanahan tidak menerbitkan hak-hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) BMN dimaksud, selain kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan, dan
- (3) Proses sertifikasi 31 persil tanah dengan total nilai Rp32.532.483.520 tidak dapat diterbitkan sertifikat dikarenakan daerah tersebut merupakan area konsesi eks PT CPI.

Pemerintah Kota Dumai bersama dengan DPRD Kota Dumai akan membahas dengan instansi terkait atas kejelasan status 55 persil tanah yang berlokasi di kawasan konsesi, kawasan hutan, area DAS, 100 meter sempadan pantai, dan 100 meter dari as jalan BMN.

Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.64 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.060.980.050,00	25.135.980.050,00	(75.000.000,00)	(0,30)
2	Dinas Kesehatan	10.485.918.870,00	9.580.131.870,00	905.787.000,00	9,45
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.993.880.744,03	426.385.572.744,03	(391.692.000,00)	(0,09)

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.788.000,00	100.788.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.700.000,00	1.323.700.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	700.000.000,00	739.200.000,00	(39.200.000,00)	(5,30)
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	1.444.800.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	13.774.037.079,33	9.650.306.000,00	4.123.731.079,33	42,73
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.046.592.000,00	12.796.592.000,00	250.000.000,00	1,95
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	106.624.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	6.759.158.571,00	0,00	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.848.562.000,00	13.048.562.000,00	(200.000.000,00)	(1,53)
15	Dinas Perdagangan	8.300.883.840,00	7.952.693.840,00	348.190.000,00	4,38
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270.480.000,00	270.480.000,00	0,00	100,00
17	Sekretariat Daerah	69.980.087.020,00	69.940.887.020,00	39.200.000,00	0,06
18	Sekretariat DPRD	920.372.500,00	920.372.500,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Barat	2.435.396.492,00	2.435.396.492,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Dumai Timur	2.520.278.280,00	2.520.278.280,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	818.462.650,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	492.320.000,00	492.320.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	928.530.250,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Kota	1.093.780.000,00	1.999.567.000,00	(905.787.000,00)	(45,30)
25	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	3.088.853.550,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58.415.961.307,06	60.087.658.048,93	(1.671.696.741,87)	(2,78)
Jumlah		663.869.747.203,42	661.486.214.865,96	2.383.532.337,46	0,36

Peningkatan aset tetap tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	4.123.731.079,33
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	1.793.177.000,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	22.037.500,00
	Hasil Inventarisasi	525.723.450,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	410.187.100,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	6.874.856.129,33
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	1.793.177.000,00
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	2.498.146.791,87
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Pencatatan	200.000.000,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	4.491.323.791,87
Kenaikan/(Penurunan) --2		2.383.532.337,46
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	3.534.281.800,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	62.741.879,33
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00

No	URAIAN	NILAI
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	555.729.200,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	4.152.752.879,33
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung dan Bagunan	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(29.021.800,00)
	Jumlah ---2	(29.021.800,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	4.123.731.079,33

Tabel 5.5.65 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dan 2021

NO	SKPD	Tahun 2021	MUTASI		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.135.980.050,00	0,00	75.000.000,00	25.060.980.050,00
2	Dinas Kesehatan	9.580.131.870,00	905.787.000,00	0,00	10.485.918.870,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	426.385.572.744,03	0,00	391.692.000,00	425.993.880.744,03
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.788.000,00	0,00	0,00	100.788.000,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.323.700.000,00	0,00	0,00	1.323.700.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	739.200.000,00	0,00	39.200.000,00	700.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	0,00	0,00	2.905.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	0,00	0,00	1.444.800.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00
10	Dinas Perhubungan	9.650.306.000,00	4.123.731.079,33	0,00	13.774.037.079,33
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.796.592.000,00	250.000.000,00	0,00	13.046.592.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	0,00	0,00	106.624.000,00
13	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	0,00	0,00	6.759.158.571,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	0,00	200.000.000,00	12.848.562.000,00
15	Dinas Perdagangan	7.952.693.840,00	598.190.000,00	250.000.000,00	8.300.883.840,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270.480.000,00	0,00	0,00	270.480.000,00
17	Sekretariat Daerah	69.940.887.020,00	39.200.000,00	0,00	69.980.087.020,00
18	Sekretariat DPRD	920.372.500,00	0,00	0,00	920.372.500,00
19	Kecamatan Dumai Barat	2.435.396.492,00	0,00	0,00	2.435.396.492,00
20	Kecamatan Dumai Timur	2.520.278.280,00	0,00	0,00	2.520.278.280,00
21	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	0,00	0,00	818.462.650,00
22	Kecamatan Medang Kampai	492.320.000,00	0,00	0,00	492.320.000,00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	0,00	0,00	928.530.250,00
24	Kecamatan Dumai Kota	1.999.567.000,00	0,00	905.787.000,00	1.093.780.000,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	0,00	0,00	3.088.853.550,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60.087.658.048,93	986.969.850,00	2.658.666.591,87	58.415.961.307,06
	JUMLAH	661.486.214.865,96	6.903.877.929,33	4.520.345.591,87	663.869.747.203,42

Hibah Tanah dari PPKD ke KKP POLTEK PERIKANAN senilai Rp1.201.461.991,87 berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah NO.B.245/BRSDM/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan BAP NO.02/BA-PENELITIAN/2022 tanggal 16 Maret 2022. Hibah Tanah dari PPKD ke Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Dumai (BKGD) senilai Rp829.992.800,00 berdasarkan Surat Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Dumai (BKGD) NO.02/BKGD-SP/X/2022 tanggal 01 November 2022, Surat Persetujuan WALI KOTA NO.032/541/BPKAD-ASET tanggal 25 November 2022 dan SK HIBAH NO.900/928/2022 tanggal 28 November 2022.

Tabel 5.5.66 Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dan 2021

NO	Aset Tanah	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.289.500.000,00	4.328.700.000,00	(39.200.000,00)	(0,91)
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	34.669.634.919,33	34.301.163.840,00	368.471.079,33	1,07
3	Tanah untuk Bangunan Industri	22.528.873.500,00	22.528.873.500,00	0,00	0,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	129.799.131.233,00	129.874.131.233,00	(75.000.000,00)	(0,06)
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.916.082.447,00	5.894.044.947,00	22.037.500,00	0,37
7	Tanah Persil Lainnya	13.848.374.110,00	9.368.003.560,00	4.480.370.550,00	47,83
8	Tanah Basah	11.805.470.000,00	11.805.470.000,00	0,00	0,00
9	Tanah Kering	5.427.456.700,00	6.257.449.500,00	(829.992.800,00)	(13,26)
10	Tanah Hutan	2.539.997.350,06	3.741.459.341,93	(1.201.461.991,87)	(32,11)
11	Tanah Pertanian	5.283.770.000,00	5.483.770.000,00	(200.000.000,00)	(3,65)
12	Tanah Lapangan Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
13	Tanah Lapangan Parkir	482.553.953,00	482.553.953,00	0,00	0,00
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.959.300.000,00	2.959.300.000,00	0,00	0,00
15	Tanah untuk Jalan	384.488.388.402,53	384.880.080.402,53	(391.692.000,00)	(0,10)
16	Tanah untuk Bangunan Air	39.280.426.588,50	39.280.426.588,50	0,00	0,00
17	Tanah untuk Bangunan Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tanah untuk Makam	100.788.000,00	100.788.000,00	0,00	0,00
Jumlah		663.869.747.203,42	661.486.214.865,96	2.383.532.337,46	0,36

Rincian Hibah Tanah senilai Rp2.498.146.791,87 sebagai berikut:

Tabel 5.5.67 Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
1	TANAH HUTAN WISATA TELUK MAKMUR 1 PERSIL LUAS 53.944M3 TH 2012	1.201.461.991,87	KKP POLTEK PERIKANAN	BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH NO.B.245/BRSDM/III/2022 TGL.31.03.2022 BAP NO.02/BA-PENELITIAN/2022 TGL.16.03.2022 SURAT WALIKOTA DUMAI NO.032/404.1/BPKAD-ASET TGL.12.04.2022 TTG PERSETUJUAN HIBAH SK WALIKOTA DUMAI NO.032/537/2022 TTG PENGHAPUSAN BMD TGL.27.05.2022
No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
2	TANAH KOSONG YG SUDAH DIPERUNTUKKAN LUAS 45.604M2 TH2012 FASILITAS TANAH OLAH RAGA	829.992.800,00	BADAN KERJASAMA GEREJA-GEREJA KOTA DUMAI (BKGD)	BERDASARKAN SURAT KETUA BADAN KERJASAMA GEREJA-GEREJA KOTA DUMAI (BKGD) NO.02/BKGD-SP/X/2022 TGL.01.11.2022 SURAT PERSETUJUAN WALIKOTA NO.032/541/BPKAD-ASET TGL.25.11.2022 SK HIBAH NO.900/928/2022 TGL.28.11.2022
3	1.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) TANAH Rp75.000.000 SBB: -SDN 010 KAYU KAPUR Rp75.000.000 -SMPN 16 KOTA DUMAI Rp0	75.000.000,00	KABUPATEN BENGKALIS	BERDASARKAN SK HIBAH NO.900/1017/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 NHPD NO.53/NP/BPKAD-ASET/2022 DAN 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 BAST NO.54/BAST/BPKAD/2022 DAN 667/BAST/ASET/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1018/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
4	1.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) TANAH Rp394.674.000 SBB: -TANAH Jl. Bukit Abas Luas 24,018M2 TH2004 Bukit Kapur Rp336.252.000.00 -TANAH Jl. Bukit Abas II Luas 3,960M2 TH2004 Bukit Kapur	391.692.000,00	KABUPATEN BENGKALIS	BERDASARKAN SK HIBAH NO.900/1017/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 NHPD NO.53/NP/BPKAD-ASET/2022 DAN 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 BAST NO.54/BAST/BPKAD/2022 DAN 667/BAST/ASET/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1018/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
		2.498.146.791,87		

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
847.100.176.538,41	776.533.030.032,11	70.567.146.506,30	9,09

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp847.100.176.538,41 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp776.533.030.032,11 maka mengalami kenaikan senilai Rp70.567.146.506,30 atau sebesar 9,09%. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.68 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112.900.451.527,17	106.799.578.273,60	6.100.873.253,57	5,71
2	Dinas Kesehatan	356.641.001.800,13	317.699.426.105,13	38.941.575.695,00	12,26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.003.317.565,08	43.213.440.540,08	6.789.877.025,00	15,71
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.724.698.446,00	2.618.396.046,00	106.302.400,00	4,06
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.475.494.420,00	3.423.377.528,00	52.116.892,00	1,52
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.219.975.210,00	24.312.687.460,00	4.907.287.750,00	20,18
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.259.567.684,00	2.025.086.884,00	234.480.800,00	11,58
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.014.245.550,00	2.897.745.550,00	116.500.000,00	4,02
9	Dinas Tenaga Kerja	5.329.395.507,00	5.045.506.318,00	283.889.189,00	5,63
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.193.888.792,00	2.193.888.792,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	24.316.824.073,30	19.916.778.376,20	4.400.045.697,10	22,09
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.945.394.330,00	5.381.894.330,00	563.500.000,00	10,47
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.803.453.698,00	4.106.638.698,00	696.815.000,00	16,97
14	Dinas Perhubungan	52.026.425.784,99	52.828.821.642,36	(802.395.857,37)	(1,52)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.199.025.455,17	8.764.271.642,16	434.753.813,01	4,96
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.398.130.755,00	3.398.130.755,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.599.425.400,00	6.087.325.809,00	512.099.591,00	8,41
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.742.860.844,00	2.391.655.444,00	351.205.400,00	14,68
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.073.904.553,00	4.486.282.473,00	587.622.080,00	13,10
20	Dinas Perikanan	4.311.748.193,20	5.348.286.193,20	(1.036.538.000,00)	(19,38)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.265.210.468,20	13.671.003.468,20	(405.793.000,00)	(2,97)
22	Dinas Perdagangan	4.967.983.797,86	4.915.093.797,86	52.890.000,00	1,08
23	Sekretariat Daerah	62.011.381.238,00	59.202.605.676,00	2.808.775.562,00	4,74
24	Sekretariat DPRD	12.501.436.420,00	12.266.639.120,00	234.797.300,00	1,91
25	Kecamatan Dumai Barat	2.889.248.745,00	2.394.947.300,00	494.301.445,00	20,64
26	Kecamatan Dumai Timur	3.964.529.996,00	3.327.922.520,00	636.607.476,00	19,13
27	Kecamatan Bukit Kapur	2.892.773.885,00	2.772.876.585,00	119.897.300,00	4,32
28	Kecamatan Medang Kampai	4.251.612.136,00	4.221.142.136,00	30.470.000,00	0,72
29	Kecamatan Sungai Sembilan	3.077.734.882,00	3.164.994.820,00	(87.259.938,00)	(2,76)
30	Kecamatan Dumai Kota	3.760.204.637,34	2.877.979.637,34	882.225.000,00	30,65
31	Kecamatan Dumai Selatan	3.828.397.851,00	3.206.557.388,00	621.840.463,00	19,39
32	Inspektorat	4.674.851.059,00	4.200.648.209,00	474.202.850,00	11,29
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.607.740.589,00	7.283.165.395,00	324.575.194,00	4,46
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.830.008.167,00	12.049.000.107,00	(218.991.940,00)	(1,82)
35	Badan Pendapatan Daerah	14.949.556.662,98	13.590.958.596,98	1.358.598.066,00	10,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.448.276.416,00	4.448.276.416,00	0,00	0,00
Jumlah		847.100.176.538,41	776.533.030.032,11	70.567.146.506,30	9,09

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	80.909.754.042,13
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	6.484.830.100,00
	Reklasifikasi Masuk	68.870.000,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	3.209.301.943,10
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	9.977.000,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	90.682.733.085,23
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	6.414.147.300,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	6.484.830.100,00
	Reklasifikasi Keluar	5.000.644.419,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	2.215.964.759,93
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	20.115.586.578,93
Kenaikan/(Penurunan) --2		70.567.146.506,30

No	URAIAN	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	91.334.440.997,63
	Belanja Pegawai	162.491.100,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	266.967.485,14
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	107.222.326,50
	Masuk dari BM JIJ	459.874.000,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	392.679.222,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	92.723.675.131,27
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(217.663.134,00)
	Keluar ke Aset JIJ	(3.849.170.808,14)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	(150.802.500,00)
	Keluar ke Aset KDP	(586.963.550,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	-
	Keluar ke Ekstrakomtabel	(2.532.867.870,00)
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT dan pembayaran utang Tahun 2020	(4.476.453.227,00)
	Jumlah ---2	(11.813.921.089,14)
3	Selisih lebih/(kurang)	80.909.754.042,13

Adapun rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.69 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.799.578.273,61	11.878.159.249,00	5.777.285.995,43	112.900.451.527,17
2	Dinas Kesehatan	72.509.313.862,97	9.070.062.585,00	1.021.574.455,00	80.557.801.992,97
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	245.190.112.242,17	33.434.976.807,00	2.541.889.242,00	276.083.199.807,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.213.440.540,08	11.768.209.113,04	4.978.332.088,04	50.003.317.565,08
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.618.396.046,00	355.151.400,00	248.849.000,00	2.724.698.446,00

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.423.377.528,00	52.116.892,00	0,00	3.475.494.420,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.312.687.460,00	6.838.287.300,00	1.930.999.550,00	29.219.975.210,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.025.086.884,00	235.346.700,00	865.900,00	2.259.567.684,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.897.745.550,00	116.500.000,00	0,00	3.014.245.550,00
10	Dinas Tenaga Kerja	5.045.506.318,00	283.889.189,00	0,00	5.329.395.507,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.193.888.792,00	0,00	0,00	2.193.888.792,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.916.778.376,20	5.663.881.697,10	1.263.836.000,00	24.316.824.073,30
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.381.894.330,00	563.500.000,00	0,00	5.945.394.330,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.106.638.698,00	744.330.000,00	47.515.000,00	4.803.453.698,00
15	Dinas Perhubungan	52.828.821.642,34	3.421.799.044,23	4.224.194.901,59	52.026.425.784,98
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.764.271.642,16	436.120.213,00	1.366.400,00	9.199.025.455,16
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.398.130.755,00	0,00	0,00	3.398.130.755,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.087.325.809,00	3.104.521.000,00	2.592.421.409,00	6.599.425.400,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.391.655.444,00	367.866.800,00	16.661.400,00	2.742.860.844,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.486.282.473,00	587.622.080,00	0,00	5.073.904.553,00
21	Dinas Perikanan	5.348.286.193,20	437.902.000,00	1.474.440.000,00	4.311.748.193,20
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.671.003.468,20	239.007.000,00	644.800.000,00	13.265.210.468,20
23	Dinas Perdagangan	4.915.093.797,86	53.790.000,00	900.000,00	4.967.983.797,86
24	Sekretariat Daerah	59.202.605.676,00	5.274.121.162,00	2.465.345.600,00	62.011.381.238,00
25	Sekretariat DPRD	12.266.639.120,00	410.797.300,00	176.000.000,00	12.501.436.420,00
26	Kecamatan Dumai Barat	2.394.947.300,00	520.701.445,00	26.400.000,00	2.889.248.745,00
27	Kecamatan Dumai Timur	3.327.922.520,00	636.607.476,00	0,00	3.964.529.996,00
28	Kecamatan Bukit Kapur	2.772.876.585,00	169.959.809,00	50.062.509,00	2.892.773.885,00
29	Kecamatan Medang Kampai	4.221.142.136,00	49.640.000,00	19.170.000,00	4.251.612.136,00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	3.164.994.820,00	47.740.062,00	135.000.000,00	3.077.734.882,00
31	Kecamatan Dumai Kota	2.877.979.637,35	939.355.000,00	57.130.000,00	3.760.204.637,35
32	Kecamatan Dumai Selatan	3.206.557.388,00	631.112.463,00	9.272.000,00	3.828.397.851,00
33	Inspektorat	4.200.648.209,00	1.087.902.850,00	613.700.000,00	4.674.851.059,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.283.165.395,00	447.692.194,00	123.117.000,00	7.607.740.589,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.240.903.857,00	1.121.378.060,00	243.800.000,00	9.118.481.917,00
35B	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	3.808.096.250,00	112.500.000,00	1.209.070.000,00	2.711.526.250,00
36	Badan Pendapatan Daerah	13.590.958.596,98	1.394.107.284,00	35.509.218,00	14.949.556.662,98
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.448.276.416,00	0,00	0,00	4.448.276.416,00
	JUMLAH	776.533.030.032,11	102.496.654.174,36	31.929.507.668,07	847.100.176.538,41

Terdapat 26 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp120.525.855,43 tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang. Dari jumlah total 26 unit Aset Tetap yang telah dinyatakan hilang, 23 unit telah dilengkapi dengan laporan kehilangan dari kepolisian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.70 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Tidak Diketahui Keberadaannya

NO	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	Kec. Dumai Kota	Sepeda Motor	1	2014	16.818.000,00
2	Kec. Dumai Kota	Kursi Manager	3	2012	2.970.000,00
3	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Staff	4	2012	2.279.200,00
4	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Staf Kecamatan	2	2013	1.074.700,00
5	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Lurah	1	2012	1.000.000,00
6	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2013	2.300.000,00
7	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2013	2.300.000,00
8	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2016	2.915.000,00
9	Kec. Dumai Kota	Sound Sistem Mobile	1	2014	2.805.000,00

NO	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
10	Kec. Dumai Kota	Infokus	1	2012	6.325.000,00
11	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2011	6.855.571,43
12	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7.920.000,00
13	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7.920.000,00
14	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7.920.000,00
15	Kec. Dumai Kota	Komputer PC	1	2015	7.969.500,00
16	Kec. Dumai Kota	Printer	1	2010	632.429,00
17	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9.992.000,00
18	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9.992.000,00
19	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9.992.000,00
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sepeda Motor	1	2006	10.545.455,00
Jumlah			26		120.525.855,43

Atas Aset Tetap yang hilang tersebut belum dilakukan proses penyelesaian ganti rugi melalui penetapan MP TPTGR. Bidang Aset menyatakan bahwa BPKAD telah menyurati Inspektur Kota Dumai pada 4 Oktober 2022 terkait pemeriksaan Aset tetap yang hilang dan melaporkan hasilnya ke Wali Kota Dumai atau melalui BPKAD Kota Dumai untuk dapat diproses lebih lanjut. Sampai posisi 29 Mei 2023 belum didapatkan jawaban dari Inspektur Kota Dumai atas surat Kepala BPKAD tersebut

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.71 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Aset Peralatan dan Mesin	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Besar	67.107.369.434,38	62.730.023.774,12	4.377.345.660,26	6,98
2	Alat Angkutan	144.324.223.629,30	131.713.502.913,20	12.610.720.716,10	9,57
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.681.188.718,00	5.519.283.418,00	161.905.300,00	2,93
4	Alat Pertanian	5.991.898.299,00	5.991.898.299,00	0,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	166.892.116.964,89	155.451.236.091,39	11.440.880.873,50	7,36
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.262.561.068,83	14.905.622.726,83	1.356.938.342,00	9,10
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	243.237.423.627,19	211.385.703.705,19	31.851.719.922,00	15,07
8	Alat Laboratorium	53.069.479.963,02	51.970.580.881,92	1.098.899.081,10	2,11
9	Komputer	106.821.700.881,18	97.239.652.928,71	9.582.047.952,47	9,85
10	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	425.077.984,74	0,00	425.077.984,74	100,00
11	Alat Keselamatan Kerja	2.440.491.521,00	2.889.098.769,00	(448.607.248,00)	(15,53)
12	Alat Peraga	48.873.500,00	45.573.500,00	3.300.000,00	7,24
13	Peralatan Proses/Produksi	2.612.930.185,00	2.612.930.185,00	0,00	0,00
14	Rambu-rambu	24.932.520.837,57	25.089.953.432,43	(157.432.594,86)	(0,63)
15	Peralatan Olahraga	409.485.279,31	391.266.779,31	18.218.500,00	4,66
16	Peralatan dan Mesin BOS	6.842.834.645,01	8.596.702.628,01	(1.753.867.983,00)	(20,40)
Jumlah		847.100.176.538,41	776.533.030.032,11	70.567.146.506,30	9,09

a. Alat Besar

Alat Besar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp67.107.369.434,38 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp62.730.023.774,12, maka mengalami kenaikan senilai Rp4.377.345.660,26 atau sebesar 6,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.72 Rincian Alat Besar

NO	Alat Besar	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tractor	2.296.962.800,00	2.996.962.800,00	(700.000.000,00)	(23,36)
2	Grader	3.489.900.000,00	2.789.900.000,00	700.000.000,00	25,09
3	Excavator	20.598.349.388,00	16.503.349.388,00	4.095.000.000,00	24,81
4	Hauler	1.013.829.010,00	1.103.829.010,00	(90.000.000,00)	(8,15)
5	Compacting Equipment	3.457.575.000,00	3.361.560.000,00	96.015.000,00	2,86
6	Aggregate and Concrete Equipment	106.986.850,00	106.986.850,00	0,00	0,00
7	Loader	3.469.950.000,00	4.069.950.000,00	(600.000.000,00)	(14,74)

NO	Alat Besar	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
8	Alat Pengangkat	0,00	1.259.150.000,00	(1.259.150.000,00)	(100,00)
9	Mesin Proses	1.032.667.000,00	1.032.667.000,00	0,00	0,00
10	Alat Besar Darat Lainnya	2.672.976.997,00	2.672.976.997,00	0,00	0,00
11	Alat Penarik	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	0,00
12	Feeder	858.920.000,00	858.920.000,00	0,00	0,00
13	Compressor	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
14	Electric Generating Set	6.363.869.368,00	6.349.060.868,00	14.808.500,00	0,23
15	Pompa	6.904.605.489,99	6.721.468.489,99	183.137.000,00	2,72
16	Unit Pemeliharaan Lapangan	39.163.945,00	0,00	39.163.945,00	100,00
17	Alat Pengolahan Air Kotor	4.340.310.633,13	4.340.310.633,13	(0,01)	(0,00)
18	Perlengkapan Kebakaran Hutan	3.836.881.350,00	3.164.286.350,00	672.595.000,00	21,26
19	Alat Bantu Lainnya	6.563.941.603,26	5.338.165.388,00	1.225.776.215,26	22,96
Jumlah		67.107.369.434,38	62.730.023.774,12	4.377.345.660,26	6,98

b. Alat Angkutan

Alat Angkutan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp144.324.223.629,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp131.713.502.913,20, maka mengalami kenaikan senilai Rp12.610.720.716,10 atau sebesar 9,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.73 Rincian Alat Angkutan

NO	Alat Angkutan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.794.246.319,00	39.064.029.798,00	(269.783.479,00)	(0,69)
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	34.270.026.050,00	34.539.052.550,00	(269.026.500,00)	(0,78)
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.230.786.711,30	18.745.416.664,20	5.485.370.047,10	29,26
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.475.769.543,00	9.084.749.893,00	1.391.019.650,00	15,31
5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.631.321.412,00	2.480.927.414,00	2.150.393.998,00	86,68
6	Kendaraan Bermotor Khusus	27.515.157.600,00	23.387.020.600,00	4.128.137.000,00	17,65
7	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	340.247.400,00	345.637.400,00	(5.390.000,00)	(1,56)
8	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	533.842.600,00	533.842.600,00	0,00	0,00
9	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	521.065.000,00	521.065.000,00	0,00	0,00
10	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.959.258.394,00	2.959.258.394,00	0,00	0,00
11	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	52.502.600,00	52.502.600,00	0,00	0,00
Jumlah		144.324.223.629,30	131.713.502.913,20	12.610.720.716,10	9,57

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp5.681.188.718,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.519.283.418,00, maka mengalami penurunan senilai Rp161.905.300,00 atau sebesar 2,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.74 Rincian Alat Bengkel dan Alat Ukur

NO	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	1.095.070.250,00	1.067.542.250,00	27.528.000,00	2,58
2	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	41.482.000,00	41.482.000,00	0,00	0,00
3	Perkakas Bengkel Listrik	51.008.750,00	51.008.750,00	0,00	0,00
4	Perkakas Bengkel Service	75.349.800,00	75.349.800,00	0,00	0,00
5	Perkakas Pengangkat Bermesin	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00
6	Perkakas Bengkel Kayu	62.019.000,00	44.597.000,00	17.422.000,00	39,07
7	Perkakas Bengkel Khusus	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
8	Peralatan Las	5.250.000,00	7.900.000,00	(2.650.000,00)	(33,54)
9	Perkakas Pabrik Es	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	249.904.000,00	51.602.500,00	198.301.500,00	384,29

NO	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
11	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
12	Perkakas Bengkel Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
13	Perkakas Pengangkat	40.535.000,00	40.535.000,00	0,00	0,00
14	Perkakas Standard (Standard Tools)	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00
15	Perkakas Khusus (Special Tools)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
16	Perkakas Bengkel Kerja	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00
17	Peralatan Tukang Besi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
18	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	13.514.000,00	13.514.000,00	0,00	0,00
19	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
20	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	25.905.000,00	25.905.000,00	0,00	0,00
21	Alat Ukur Universal	1.147.700.170,00	1.230.871.170,00	(83.171.000,00)	(6,76)
22	Universal Tester	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
23	Alat Ukur/Pembanding	21.325.000,00	21.325.000,00	0,00	0,00
24	Alat Ukur Lain-Lain	324.475.500,00	324.475.500,00	0,00	0,00
25	Alat Timbangan/Biara	4.474.800,00	0,00	4.474.800,00	100,00
26	Anak Timbangan/Biara	277.494.800,00	277.494.800,00	0,00	0,00
27	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	0,00
28	Specific Set	1.406.834.750,00	1.406.834.750,00	0,00	0,00
29	Alat Pengukur Keadaan Alam	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00
30	Alat Ukur Lainnya	578.625.898,00	578.625.898,00	0,00	0,00
Jumlah		5.681.188.718,00	5.519.283.418,00	161.905.300,00	2,93

d. Alat Pertanian

Alat Pertanian pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp5.991.898.299,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.991.898.299,00, maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.75 Rincian Alat Pertanian

NO	Alat Pertanian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.892.636.047,00	4.892.636.047,00	0,00	0,00
2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	53.280.252,00	53.280.252,00	0,00	0,00
3	Alat Panen	51.069.000,00	51.069.000,00	0,00	0,00
4	Alat Processing	580.400.000,00	580.400.000,00	0,00	0,00
5	Alat Pasca Panen	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00
6	Alat Produksi Perikanan	127.810.000,00	127.810.000,00	0,00	0,00
7	Alat-Alat Peternakan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
8	Alat Pengolahan Lainnya	231.353.000,00	231.353.000,00	0,00	0,00
Jumlah		5.991.898.299,00	5.991.898.299,00	0,00	0,00

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp166.892.116.964,89 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp155.451.236.091,39, maka mengalami penurunan senilai Rp11.440.880.873,50 atau sebesar 7,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.76 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Mesin ketik	1.024.930.120,00	993.320.120,00	31.610.000,00	3,18
2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	777.539.500,00	785.479.500,00	(7.940.000,00)	(1,01)
3	Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.252.240.670,00	4.222.888.670,00	29.352.000,00	0,70
4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.085.662.369,67	16.327.833.760,67	757.828.609,00	4,64
5	Alat Kantor Lainnya	22.459.841.693,66	14.761.831.988,66	7.698.009.705,00	52,15

NO	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
6	Mebel	47.547.760.075,35	46.219.733.455,35	1.328.026.620,00	2,87
7	Alat Pengukur Waktu	47.967.650,00	38.287.650,00	9.680.000,00	25,28
8	Alat Pembersih	3.929.398.797,00	3.917.754.897,00	11.643.900,00	0,30
9	Alat Pendingin	19.924.747.304,61	19.495.470.882,61	429.276.422,00	2,20
10	Alat Dapur	1.688.977.678,64	1.561.345.781,64	127.631.897,00	8,17
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.744.620.633,03	34.934.727.550,03	809.893.083,00	2,32
12	Alat Pemadam Kebakaran	3.965.829.803,00	4.056.021.303,00	(90.191.500,00)	(2,22)
13	Meja Kerja Pejabat	1.790.560.613,42	1.766.484.313,42	24.076.300,00	1,36
14	Meja Rapat Pejabat	1.209.464.037,16	1.168.747.849,66	40.716.187,50	3,48
15	Kursi Kerja Pejabat	1.949.629.802,50	1.731.937.152,50	217.692.650,00	12,57
16	Kursi Rapat Pejabat	148.360.000,00	148.360.000,00	0,00	0,00
17	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	79.548.449,08	81.948.449,08	(2.400.000,00)	(2,93)
18	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	457.732.466,00	457.732.466,00	0,00	0,00
19	Lemari dan Arsip Pejabat	2.807.305.301,77	2.781.330.301,77	25.975.000,00	0,93
Jumlah		166.892.116.964,89	155.451.236.091,39	11.440.880.873,50	7,36

f. Alat Studio dan Komunikasi

Alat Studio dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp16.262.561.068,83 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp14.905.622.726,83 maka mengalami penurunan senilai Rp1.356.938.342,00 atau sebesar 9,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.77 Rincian Alat Studio dan Komunikasi

NO	Alat Studio dan Komunikasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan Studio Audio	4.030.604.842,00	4.009.337.364,00	21.267.478,00	0,53
2	Peralatan Studio Video dan Film	5.566.678.748,16	4.978.573.138,16	588.105.610,00	11,81
3	Peralatan Studio Gambar	189.916.398,00	181.683.445,00	8.232.953,00	4,53
4	Peralatan Cetak	14.925.000,00	4.425.000,00	10.500.000,00	237,29
5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	386.406.300,00	308.502.200,00	77.904.100,00	25,25
6	Alat Studio Lainnya	1.461.879.401,00	1.192.811.200,00	269.068.201,00	22,56
7	Alat Komunikasi Telephone	2.389.034.099,00	2.010.166.599,00	378.867.500,00	18,85
8	Alat Komunikasi Radio SSB	190.929.864,00	190.929.864,00	0,00	0,00
9	Alat Komunikasi Radio HF/FM	50.372.090,00	50.372.090,00	0,00	0,00
10	Alat Komunikasi Radio VHF	67.711.000,00	67.711.000,00	0,00	0,00
11	Alat Komunikasi Radio UHF	182.356.500,00	182.356.500,00	0,00	0,00
12	Alat Komunikasi Sosial	13.108.300,00	13.108.300,00	0,00	0,00
13	Alat-Alat Sandi	28.313.000,00	28.313.000,00	0,00	0,00
14	Alat Komunikasi Khusus	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
15	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	119.079.500,00	119.079.500,00	0,00	0,00
16	Alat Komunikasi Lainnya	352.079.750,00	352.079.750,00	0,00	0,00
17	Peralatan Pemancar MF/MW	1.292.500,00	0,00	1.292.500,00	100,00
18	Peralatan Pemancar VHF/FM	45.676.500,00	45.676.500,00	0,00	0,00
19	Peralatan Antena VHF/FM	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00
20	Peralatan Antena UHF	68.385.000,00	68.385.000,00	0,00	0,00
21	Peralatan Antena SHF/Parabola	17.231.500,00	17.231.500,00	0,00	0,00
22	Switcher Antena	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
23	Switcher/Menara Antena	533.659.216,67	533.659.216,67	0,00	0,00
24	Peralatan Antena Penerima VHF	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
25	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	194.820.000,00	194.820.000,00	0,00	0,00
26	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
27	Sumber Tenaga	215.579.500,00	215.579.500,00	0,00	0,00
28	Peralatan Pemancar Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
29	Distance Measuring Equipment (DME)	15.197.060,00	15.197.060,00	0,00	0,00
Jumlah		16.262.561.068,83	14.905.622.726,83	1.356.938.342,00	9,10

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp243.237.423.627,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp211.385.703.705,19 maka mengalami penurunan senilai Rp31.851.719.922,00 atau sebesar 15,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.78 Rincian Alat Kedokteran dan Kesehatan

NO	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Kedokteran Umum	66.157.920.312,64	57.797.512.032,64	8.360.408.280,00	14,46
2	Alat Kedokteran Gigi	6.528.180.063,00	5.048.983.138,00	1.479.196.925,00	29,30
3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	125.575.971,00	125.575.971,00	0,00	0,00
4	Alat Kedokteran Bedah	38.358.705.279,47	33.691.896.593,47	4.666.808.686,00	13,85
5	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	11.822.252.225,56	11.819.602.225,56	2.650.000,00	0,02
6	Alat Kedokteran THT	3.054.616.349,49	3.044.626.349,49	9.990.000,00	0,33
7	Alat Kedokteran Mata	4.888.820.117,50	4.413.220.117,50	475.600.000,00	10,78
8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	8.089.488.867,00	7.426.218.867,00	663.270.000,00	8,93
9	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	1.507.851.695,00	1.507.851.695,00	0,00	0,00
10	Alat Kedokteran Anak	10.086.933.656,00	10.016.998.656,00	69.935.000,00	0,70
11	Alat Kedokteran Poliklinik	4.720.532.592,00	4.720.865.592,00	(333.000,00)	(0,01)
12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.953.913.591,00	2.951.915.591,00	1.998.000,00	0,07
13	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	11.554.094.332,00	11.554.094.332,00	0,00	0,00
14	Alat Kedokteran Jantung	14.256.818.235,00	5.822.702.235,00	8.434.116.000,00	100,00
15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	16.110.432.327,00	11.077.213.327,00	5.033.219.000,00	45,44
16	Alat Kedokteran Transfusi Darah	100.125.600,00	100.125.600,00	0,00	0,00
17	Alat Kedokteran Radioterapi	917.982.694,00	875.425.294,00	42.557.400,00	100,00
18	Alat Kedokteran Nuklir	799.795.793,00	799.795.793,00	0,00	0,00
19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	375.610.696,00	375.610.696,00	0,00	0,00
20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5.009.367.043,97	5.009.367.043,97	0,00	0,00
21	Alat Kedokteran Jiwa	56.527.500,00	56.527.500,00	0,00	0,00
22	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	149.490.000,00	149.490.000,00	0,00	0,00
23	Alat Kedokteran ICU	4.639.017.194,78	4.407.017.196,78	231.999.998,00	5,26
24	Alat Kedokteran ICCU	17.983.315.530,00	17.983.315.530,00	0,00	0,00
25	Alat Kedokteran Bedah Jantung	110.431.090,00	110.431.090,00	0,00	0,00
26	Alat Kedokteran Anestesi	3.619.739.236,50	3.619.739.236,50	0,00	0,00
27	Alat Kedokteran Lainnya	1.864.235.200,00	224.843.600,00	1.639.391.600,00	729,13
28	Alat Kesehatan Olahraga	245.067.961,00	245.067.961,00	0,00	0,00
29	Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.150.582.474,28	6.409.670.441,28	740.912.033,00	11,56
Jumlah		243.237.423.627,19	211.385.703.705,19	31.851.719.922,00	15,07

h. Alat Laboratorium

Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp53.069.479.963,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp51.970.580.881,92 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.098.899.081,10 atau sebesar 2,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.79 Rincian Alat Laboratorium

NO	Alat Laboratorium	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	2.037.605.452,00	2.037.605.452,00	0,00	0,00
2	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	126.800.000,00	126.800.000,00	0,00	0,00
3	Alat Laboratorium Hidrokimia	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	0,00
4	Alat Laboratorium Model Hidrolika	257.890.946,00	257.890.946,00	0,00	0,00
5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	121.424.900,00	121.424.900,00	0,00	0,00
6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	2.825.836.000,00	2.825.836.000,00	0,00	0,00
7	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00	0,00

NO	Alat Laboratorium	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	673.588.000,00	673.588.000,00	0,00	0,00
9	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	900.180.000,00	1.094.880.000,00	(194.700.000,00)	(17,78)
10	Alat Laboratorium Umum	7.569.642.591,00	6.346.276.957,00	1.223.365.634,00	19,28
11	Alat Laboratorium Mikrobiologi	8.987.321.595,00	8.987.321.595,00	0,00	0,00
12	Alat Laboratorium Kimia	4.812.500,00	4.812.500,00	0,00	0,00
13	Alat Laboratorium Patologi	1.568.447.697,00	1.568.447.697,00	0,00	0,00
14	Alat Laboratorium Immunologi	775.999.400,00	775.999.400,00	0,00	0,00
15	Alat Laboratorium Hematologi	2.183.034.925,00	2.183.034.925,00	0,00	0,00
16	Alat Laboratorium Film	113.350.000,00	113.350.000,00	0,00	0,00
17	Alat Laboratorium Fisika	463.063.500,00	194.603.000,00	268.460.500,00	100,00
18	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	48.712.000,00	48.712.000,00	0,00	0,00
19	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	87.120.000,00	87.120.000,00	0,00	0,00
20	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	334.125.000,00	334.125.000,00	0,00	0,00
21	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00
22	Alat Laboratorium Pertanian	690.850.080,00	690.850.080,00	0,00	0,00
23	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	59.070.000,00	59.070.000,00	0,00	0,00
24	Alat Laboratorium Oseanografi	34.430.000,00	34.430.000,00	0,00	0,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	10.903.000,00	10.903.000,00	0,00	0,00
26	Alat Laboratorium Biologi	265.160.500,00	0,00	265.160.500,00	100,00
27	Alat Laboratorium Geofisika	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00
28	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	291.200.000,00	291.200.000,00	0,00	0,00
29	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00
30	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	605.400.000,00	605.400.000,00	0,00	0,00
31	Alat Laboratorium Lain	1.939.297.956,00	1.939.297.956,00	0,00	0,00
32	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.600.554.329,00	2.166.350.529,00	(565.796.200,00)	(26,12)
33	Analytical Instrument	46.167.000,00	46.167.000,00	0,00	0,00
34	Instrument Probe/Sensor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
35	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	716.534.280,00	716.534.280,00	0,00	0,00
36	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	448.957.320,00	448.957.320,00	0,00	0,00
37	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	1.310.687.000,00	1.310.687.000,00	0,00	0,00
38	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00
39	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	228.200.000,00	228.200.000,00	0,00	0,00
40	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	822.276.069,40	822.276.069,40	0,00	0,00
41	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1.604.718.002,72	1.604.718.002,72	0,00	0,00
42	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	823.806.524,01	823.806.524,01	0,00	0,00
43	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	762.431.624,47	762.431.624,47	0,00	0,00
44	Alat Peraga PAUD/TK	408.069.700,00	84.642.700,00	323.427.000,00	382,11
45	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	9.564.930.537,42	9.785.948.890,32	(221.018.352,90)	(2,26)
46	Assembly/Counting System	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00	0,00
47	Peralatan Hidrologi	28.349.000,00	28.349.000,00	0,00	0,00
48	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	101.503.934,00	101.503.934,00	0,00	0,00
49	Alat Laboratorium Kualitas Udara	430.048.000,00	430.048.000,00	0,00	0,00
50	Laboratorium Lingkungan	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00
51	Alat Laboratorium Penunjang	515.558.600,00	515.558.600,00	0,00	0,00
52	Pemesinan: Electrical Workshop	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00
53	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	36.432.000,00	36.432.000,00	0,00	0,00
54	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		53.069.479.963,02	51.970.580.881,92	1.098.899.081,10	2,11

i. Komputer

Komputer pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp106.821.700.881,18 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp97.239.652.928,71 maka mengalami kenaikan senilai Rp9.582.047.952,47 atau sebesar 9,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.80 Rincian Komputer

NO	Komputer	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Komputer Jaringan	3.210.454.260,00	2.958.270.260,00	252.184.000,00	8,52
2	Personal Computer	59.693.449.031,78	54.612.698.013,78	5.080.751.018,00	9,30
3	Komputer Unit Lainnya	5.951.301.171,00	5.802.732.111,00	148.569.060,00	2,56
4	Peralatan Mainframe	2.750.505.483,16	2.714.428.683,16	36.076.800,00	1,33
5	Peralatan Mini Computer	201.831.000,00	200.411.000,00	1.420.000,00	0,71
6	Peralatan Personal Computer	18.564.834.651,33	12.722.045.140,33	5.842.789.511,00	45,93
7	Peralatan Jaringan	5.423.097.794,54	5.383.022.320,54	40.075.474,00	0,74
8	Peralatan Komputer Lainnya	11.026.227.489,37	12.846.045.399,90	(1.819.817.910,53)	(14,17)
Jumlah		106.821.700.881,18	97.239.652.928,71	9.582.047.952,47	9,85

j. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp425.077.984,74 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp425.077.984,74 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.81 Rincian Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

NO	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Sumur Pemboran	425.077.984,74	0,00	425.077.984,74	100,00
Jumlah		425.077.984,74	0,00	425.077.984,74	100,00

k. Alat Keselamatan Kerja

Alat Keselamatan Kerja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.440.491.521,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.889.098.769,00 maka mengalami penurunan senilai Rp448.607.248,00 atau sebesar 15,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.82 Rincian Alat Keselamatan Kerja

NO	Alat Keselamatan Kerja	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Radiasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	Alat Deteksi Lainnya	68.180.250,00	68.180.250,00	0,00	0,00
3	Topi Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
4	Sepatu Lapangan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00
5	Alat Pelindung Lainnya	1.098.721.821,00	1.098.721.821,00	0,00	0,00
6	Alat Penolong	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7	Alat Pendukung Pencarian	952.621.000,00	952.621.000,00	0,00	0,00
8	Alat SAR Lainnya	261.239.000,00	261.239.000,00	0,00	0,00
9	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	37.179.450,00	485.786.698,00	(448.607.248,00)	(92,35)
Jumlah		2.440.491.521,00	2.889.098.769,00	(448.607.248,00)	(15,53)

l. Alat Peraga

Alat Peraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp48.873.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp45.573.500,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.300.000,00 atau sebesar 7,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.83 Rincian Alat Peraga

NO	Alat Peraga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Peraga Pelatihan	1.523.500,00	1.523.500,00	0,00	0,00
2	Alat Peraga Percontohan	47.350.000,00	44.050.000,00	3.300.000,00	7,49

Jumlah	48.873.500,00	45.573.500,00	3.300.000,00	7,24
--------	---------------	---------------	--------------	------

m. Peralatan Proses/Produksi

Peralatan Proses/Produksi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.612.930.185,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.612.930.185,00 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.84 Rincian Peralatan Proses/Produksi

NO	Peralatan Proses/Produksi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Heat Generating Equipment	2.612.930.185,00	2.612.930.185,00	0,00	0,00
Jumlah		2.612.930.185,00	2.612.930.185,00	0,00	0,00

n. Rambu-Rambu

Rambu-rambu pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp24.932.520.837,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp25.089.953.432,43 maka mengalami penurunan senilai Rp157.432.594,86 atau sebesar 0,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.85 Rincian Rambu-rambu

NO	Rambu-rambu	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rambu Bersuar	7.619.368.184,71	8.036.532.806,20	(417.164.621,49)	(5,19)
2	Rambu Tidak Bersuar	16.483.249.652,86	16.223.517.626,23	259.732.026,63	1,60
3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	829.903.000,00	829.903.000,00	0,00	0,00
Jumlah		24.932.520.837,57	25.089.953.432,43	(157.432.594,86)	(0,63)

o. Peralatan Olahraga

Peralatan Olahraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp409.485.279,31 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp391.266.779,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.218.500,00 atau sebesar 4,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.86 Rincian Peralatan Olahraga

NO	Peralatan Olahraga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan Olahraga Atletik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Peralatan Permainan	375.643.300,14	364.924.800,14	10.718.500,00	2,94
3	Peralatan Senam	13.100.000,00	2.600.000,00	10.500.000,00	403,85
4	Peralatan Olahraga Lainnya	19.741.979,17	22.741.979,17	(3.000.000,00)	(13,19)
Jumlah		409.485.279,31	391.266.779,31	18.218.500,00	4,66

p. Peralatan dan Mesin BOS

Peralatan dan Mesin BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp6.842.834.645,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp8.596.702.628,01 maka mengalami penurunan senilai Rp1.753.867.983,00 atau sebesar 20,40%.

3) Gedung dan Bangunan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.081.480.906.107,57	1.014.947.165.081,88	66.533.741.025,69	6,56

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.081.480.906.107,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.014.947.165.081,88 maka mengalami kenaikan senilai Rp66.533.741.025,69 atau sebesar 6,56% Adapun penjelasan atas peningkatan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.87 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	442.008.900.904,92	427.029.801.760,87	14.979.099.144,05	3,51
2	Dinas Kesehatan	103.411.124.339,56	104.352.343.722,63	(941.219.383,07)	(0,90)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	172.836.388.511,83	143.407.954.259,31	29.428.434.252,52	20,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.537.344.803,85	28.625.612.944,62	7.911.731.859,23	27,64

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9.310.425.605,51	9.310.425.605,51	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.580.780.061,88	1.388.686.311,88	192.093.750,00	13,83
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.682.837.160,00	2.682.837.160,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5.380.826.430,07	3.538.625.847,00	1.842.200.583,07	52,06
10	Dinas Tenaga Kerja	4.499.129.671,00	4.554.139.406,00	(55.009.735,00)	(1,21)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.285.460.003,60	1.285.460.003,60	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.804.882.475,00	6.944.832.475,00	(139.950.000,00)	(2,02)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	899.370.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00	2.399.771.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	27.701.945.925,76	26.984.673.730,07	717.272.195,70	2,66
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.155.754.317,76	1.155.754.317,76	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.755.970.225,83	4.826.415.845,83	(1.070.445.620,00)	(22,18)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	505.585.000,00	3.431.180.000,00	(2.925.595.000,00)	(85,26)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	33.216.984.076,58	27.066.893.018,21	6.150.091.058,37	22,72
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	4.530.870.362,36	0,00	0,00
21	Dinas Perikanan	5.848.164.810,00	5.848.164.810,00	0,00	0,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.084.968.507,00	11.885.278.507,00	199.690.000,00	1,68
23	Dinas Perdagangan	24.405.396.574,14	21.256.152.834,46	3.149.243.739,68	14,82
24	Sekretariat Daerah	77.639.782.483,49	73.385.707.023,49	4.254.075.460,00	5,80
25	Sekretariat DPRD	23.065.137.240,00	23.065.137.240,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Dumai Barat	5.713.990.544,17	5.713.990.544,17	0,00	0,00
27	Kecamatan Dumai Timur	7.116.941.779,38	7.116.941.779,38	0,00	0,00
28	Kecamatan Bukit Kapur	5.833.945.963,61	5.702.641.963,61	131.304.000,00	2,30
29	Kecamatan Medang Kampai	3.373.348.540,54	3.373.348.540,54	0,00	0,00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	4.470.742.409,46	4.470.742.409,46	(0,00)	(0,00)
31	Kecamatan Dumai Kota	3.992.961.331,17	3.693.281.331,17	299.680.000,00	8,11
32	Kecamatan Dumai Selatan	7.990.275.616,08	7.879.202.616,08	111.073.000,00	1,41
33	Inspektorat	5.792.427.827,07	5.469.278.827,07	323.149.000,00	5,91
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.683.731.972,26	7.683.731.972,26	0,00	0,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	13.987.630.135,76	12.331.078.439,60	1.656.551.696,16	13,43
36	Badan Pendapatan Daerah	7.312.361.897,94	6.992.090.872,94	320.271.025,00	4,58
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	4.664.747.600,00	0,00	0,00
Jumlah		1.081.480.906.107,57	1.014.947.165.081,88	66.533.741.025,69	6,56

Peningkatan aset Tetap gedung dan bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	53.681.356.350,33
	Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
	Transfer Masuk	4.924.866.325,65
	Reklasifikasi Masuk	29.941.510.125,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	3.049.362.882,16
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	91.597.095.683,14

Pengurangan (b)		
	Penghapusan	6.221.121.432,80
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	4.924.866.325,66
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	13.917.366.898,99
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	25.063.354.657,45
Kenaikan/(Penurunan) --2		66.533.741.025,69
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	87.322.813.477,02
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	10.686.057.882,57
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	217.663.134,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bangunan	208.667.200,00
	Masuk dari BM JIJ	1.435.730.702,24
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	138.490.000,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	100.009.422.395,83
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(107.222.326,50)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00
	Keluar ke Aset JIJ	0,00
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	(45.038.504.519,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(1.182.339.200,00)
	Jumlah ---2	(46.328.066.045,50)
3	Selisih lebih/(kurang)	53.681.356.350,33

Tabel 5.5.88 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	427.029.801.760,87	22.363.954.560,00	7.384.855.415,95	442.008.900.904,92
2	Dinas Kesehatan	104.352.343.722,63	900.981.200,00	1.842.200.583,07	103.411.124.339,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	143.407.954.259,32	29.968.212.091,52	539.777.839,00	172.836.388.511,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.625.612.944,62	54.926.697.079,81	47.014.965.220,58	36.537.344.803,85
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9.310.425.605,51	0,00	0,00	9.310.425.605,51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.388.686.311,88	192.093.750,00	0,00	1.580.780.061,88
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.682.837.160,00	0,00	0,00	2.682.837.160,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.538.625.847,00	1.842.200.583,07	0,00	5.380.826.430,07
10	Dinas Tenaga Kerja	4.554.139.406,00	49.990.265,00	105.000.000,00	4.499.129.671,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.285.460.003,60	0,00	0,00	1.285.460.003,60
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.944.832.475,00	0,00	139.950.000,00	6.804.882.475,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	0,00	0,00	899.370.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00	0,00	0,00	2.399.771.000,00
15	Dinas Perhubungan	26.984.673.730,06	9.816.228.220,03	9.098.956.024,34	27.701.945.925,75
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.155.754.317,76	0,00	0,00	1.155.754.317,76
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.826.415.845,83	0,00	1.070.445.620,00	3.755.970.225,83

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.431.180.000,00	0,00	2.925.595.000,00	505.585.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	27.066.893.018,21	7.191.286.058,36	1.041.195.000,00	33.216.984.076,57
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	0,00	0,00	4.530.870.362,36
21	Dinas Perikanan	5.848.164.810,00	0,00	0,00	5.848.164.810,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.885.278.507,00	199.690.000,00	0,00	12.084.968.507,00
23	Dinas Perdagangan	21.256.152.834,46	3.149.243.739,67	0,00	24.405.396.574,14
24	Sekretariat Daerah	73.385.707.023,49	4.482.555.460,00	228.480.000,00	77.639.782.483,49
25	Sekretariat DPRD	23.065.137.240,00	0,00	0,00	23.065.137.240,00
26	Kecamatan Dumai Barat	5.713.990.544,17	0,00	0,00	5.713.990.544,17
27	Kecamatan Dumai Timur	7.116.941.779,38	0,00	0,00	7.116.941.779,38
28	Kecamatan Bukit Kapur	5.702.641.963,61	131.304.000,00	0,00	5.833.945.963,61
29	Kecamatan Medang Kampai	3.373.348.540,54	0,00	0,00	3.373.348.540,54
30	Kecamatan Sungai Sembilan	4.470.742.409,46	0,00	0,00	4.470.742.409,46
31	Kecamatan Dumai Kota	3.693.281.331,17	299.680.000,00	0,00	3.992.961.331,17
32	Kecamatan Dumai Selatan	7.879.202.616,08	111.073.000,00	0,00	7.990.275.616,08
33	Inspektorat	5.469.278.827,07	323.149.000,00	0,00	5.792.427.827,07
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.683.731.972,26	0,00	0,00	7.683.731.972,26
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.331.078.439,60	1.656.551.696,16	0,00	13.987.630.135,76
36	Badan Pendapatan Daerah	6.992.090.872,94	320.271.025,00	0,00	7.312.361.897,94
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	0,00	0,00	4.664.747.600,00
	Jumlah	1.014.947.165.081,88	137.925.161.728,63	71.391.420.702,94	1.081.480.906.107,57

Di dalam Aset Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp1.081.480.906.107,57 terdapat 32 item Gedung Bangunan yang berada diatas Tanah Pinjam Pakai. Daftar Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 yang terdapat dalam Lampiran 18.

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.89 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Aset Gedung dan Bangunan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung	1.062.371.348.721,41	996.378.025.182,13	65.993.323.539,29	6,62
2	Monumen	2.732.696.656,68	2.786.646.656,68	(53.950.000,00)	(1,94)
3	Bangunan Menara	1.332.113.159,80	1.332.113.159,80	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.044.747.569,69	14.450.380.083,29	594.367.486,40	4,11
	Jumlah	1.081.480.906.107,57	1.014.947.165.081,88	66.533.741.025,69	6,56

a. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.062.371.348.721,41 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp996.378.025.182,13 maka mengalami kenaikan senilai Rp65.993.323.539,29 atau sebesar 6,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.90 Rincian Bangunan Gedung

NO	Bangunan Gedung	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung Kantor	628.185.594.459,55	612.719.880.314,12	15.465.714.145,43	2,52
2	Bangunan Gudang	11.421.700.114,31	9.750.157.824,51	1.671.542.289,80	17,14
3	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	866.184.834,36	866.184.834,36	0,00	0,00
4	Bangunan Gedung Instalasi	176.999.974,00	176.999.974,00	0,00	0,00
5	Bangunan Gedung Laboratorium	1.263.462.319,45	1.263.462.319,45	0,00	0,00
6	Bangunan Kesehatan	175.713.623.624,75	149.465.030.345,31	26.248.593.279,44	17,56
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13.178.976.033,93	10.756.772.766,17	2.422.203.267,76	22,52
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.754.922.861,93	15.129.211.536,93	625.711.325,00	4,14
9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	69.988.972.347,41	58.732.482.644,56	11.256.489.702,85	19,17
10	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	15.483.808.000,00	15.198.393.000,00	285.415.000,00	1,88

NO	Bangunan Gedung	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	29.864.694.093,82	26.911.650.354,14	2.953.043.739,68	10,97
12	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.121.987.536,97	4.740.002.150,97	381.985.386,00	8,06
13	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.207.060.000,00	1.207.060.000,00	0,00	0,00
14	Bangunan Gedung Pematong Hewan	166.832.000,00	166.832.000,00	0,00	0,00
15	Bangunan Gedung Perpustakaan	1.525.382.440,00	1.525.382.440,00	0,00	0,00
16	Bangunan Gedung Museum	199.637.000,00	199.637.000,00	0,00	0,00
17	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	7.228.199.660,34	7.228.199.660,34	(0,00)	(0,00)
18	Bangunan Pengujian Kelaikan	1.718.795.601,12	1.718.795.601,12	(0,00)	(0,00)
19	Bangunan Terbuka	808.703.000,00	622.291.000,00	186.412.000,00	29,96
20	Bangunan Industri	329.853.000,00	329.853.000,00	0,00	0,00
21	Bangunan Peternakan/Perikanan	2.028.133.000,00	2.028.133.000,00	0,00	0,00
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.593.153.948,09	15.403.612.921,65	189.541.026,44	1,23
23	Bangunan Fasilitas Umum	4.200.441.214,79	3.373.226.785,12	827.214.429,67	24,52
24	Bangunan Parkir	5.415.834.564,00	5.090.911.982,50	324.922.581,50	6,38
25	Taman	16.542.591.244,68	16.492.706.244,68	49.885.000,00	0,30
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.155.556.100,00	2.126.063.000,00	2.029.493.100,00	95,46
27	Rumah Negara Golongan I	7.145.841.795,00	7.004.035.000,00	141.806.795,00	2,02
28	Rumah Negara Golongan II	17.289.403.662,47	16.704.077.387,55	585.326.274,92	3,50
29	Rumah Negara Golongan III	4.755.092.626,13	4.755.092.626,13	0,00	0,00
30	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.495.171.900,00	2.355.273.350,00	139.898.550,00	5,94
31	Asrama	933.959.625,86	725.833.980,05	208.125.645,81	28,67
32	Rumah Tidak Bersusun	995.922.037,00	995.922.037,00	0,00	0,00
33	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	614.858.101,46	614.858.101,46	0,00	0,00
Jumlah		1.062.371.348.721,41	996.378.025.182,13	65.993.323.539,29	6,62

b. Monumen

Monumen pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.732.696.656,68 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.786.646.656,68 maka mengalami penurunan senilai Rp53.950.000,00 atau sebesar 1,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.91 Rincian Monumen

NO	Monumen	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Candi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
2	Tugu	1.660.405.901,00	1.714.355.901,00	(53.950.000,00)	(3,15)
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.052.790.755,68	1.052.790.755,68	(0,00)	(0,00)
Jumlah		2.732.696.656,68	2.786.646.656,68	(53.950.000,00)	(1,94)

c. Bangunan Menara

Bangunan Menara pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.332.113.159,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.332.113.159,80 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.92 Rincian Monumen

NO	Bangunan Menara	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	274.015.000,00	274.015.000,00	0,00	0,00
2	Bangunan Menara Telekomunikasi	535.882.259,80	535.882.259,80	0,00	0,00
3	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	522.215.900,00	522.215.900,00	0,00	0,00
Jumlah		1.332.113.159,80	1.332.113.159,80	0,00	0,00

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp15.044.747.569,69 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp14.450.380.083,29 maka mengalami kenaikan senilai Rp594.367.486,40 atau sebesar 4,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.93 Rincian Tugu Titik Kontrol/Pasti

NO	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pagar	11.446.866.916,69	10.852.499.430,29	594.367.486,40	5,48
2	Tugu/Tanda Batas Lainnya	3.597.880.653,00	3.597.880.653,00	0,00	0,00
Jumlah		15.044.747.569,69	14.450.380.083,29	594.367.486,40	4,11

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.457.323.337.875,90	2.390.039.096.680,91	67.284.241.194,99	2,82

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.457.323.337.875,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.390.039.096.680,91 maka mengalami kenaikan senilai Rp67.284.241.194,99 atau sebesar 2,82% Peningkatan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.94 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.848.164.489,93	2.943.657.210,93	(95.492.721,00)	(3,24)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.292.610.963.951,11	2.234.190.695.151,71	58.420.268.799,40	2,61
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	25.895.861.800,00	22.341.413.500,00	3.554.448.300,00	15,91
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.787.000,00	364.787.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	869.910.000,00	869.910.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.548.123.000,00	6.548.123.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	81.320.886.085,37	79.468.485.068,78	1.852.401.016,59	2,33
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	14.890.000,00	(14.890.000,00)	(100,00)
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.669.201.645,89	5.451.167.145,89	218.034.500,00	4,00
12	Dinas Perikanan	1.878.389.186,00	1.878.389.186,00	0,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.501.045.627,00	5.013.352.627,00	487.693.000,00	9,73
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	122.152.598,60	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	5.540.271.000,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Dumai Barat	4.127.985.572,00	3.919.772.272,00	208.213.300,00	5,31
17	Kecamatan Dumai Timur	2.615.530.000,00	2.615.530.000,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Bukit Kapur	6.158.706.650,00	5.181.176.650,00	977.530.000,00	18,87
19	Kecamatan Medang Kampai	3.459.719.000,00	2.923.684.000,00	536.035.000,00	18,33
20	Kecamatan Sungai Sembilan	4.399.250.500,00	3.259.250.500,00	1.140.000.000,00	34,98
21	Kecamatan Dumai Kota	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	3.538.166.770,00	3.538.166.770,00	0,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	3.122.546.000,00	0,00	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	291.433.000,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	199.744.000,00	199.744.000,00	0,00	0,00
Jumlah		2.457.323.337.875,90	2.390.039.096.680,91	67.284.241.194,99	2,82

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	72.490.649.950,62
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	
Reklasifikasi Masuk	414.698.494,08
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00

URAIAN		NILAI
Hasil Inventarisasi		0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel		0,00
Koreksi Pencatatan		0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0,00
Jumlah (a)		72.905.348.444,70
Pengurangan (b)		
Penghapusan		14.890.000,00
Transfer Ke Asetnya		0,00
Transfer Keluar		0,00
Reklasifikasi Keluar		95.492.721,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)		5.510.724.528,71
Hasil Inventarisasi		0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel		0,00
Koreksi Pencatatan		0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0,00
Jumlah (b)		5.621.107.249,71
Kenaikan/(Penurunan) --2		67.284.241.194,99
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	73.340.485.070,99
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	4.859.216.778,27
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	3.849.170.808,14
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	82.048.872.657,40
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	(555.729.200,00)
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(459.874.000,00)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	(1.644.397.902,24)
	Keluar ke Aset JIJ	0,00
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	(6.284.093.204,54)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(614.128.400,00)
	Jumlah ---2	(9.558.222.706,78)
3	Selisih lebih/(kurang)	72.490.649.950,62

Tabel 5.5.95 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.943.657.210,93	0,00	95.492.721,00	2.848.164.489,93
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.234.190.695.151,71	69.514.008.821,59	11.093.740.022,19	2.292.610.963.951,11
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	22.341.413.500,00	3.554.448.300,00	0,00	25.895.861.800,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.787.000,00	0,00	0,00	364.787.000,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	869.910.000,00	0,00	0,00	869.910.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.548.123.000,00	0,00	0,00	6.548.123.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	79.468.485.068,78	4.352.679.603,45	2.500.278.586,86	81.320.886.085,37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.890.000,00	0,00	14.890.000,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.451.167.145,89	407.575.526,44	189.541.026,44	5.669.201.645,89
12	Dinas Perikanan	1.878.389.186,00	0,00	0,00	1.878.389.186,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.013.352.627,00	487.693.000,00	0,00	5.501.045.627,00

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,61	0,00	0,00	122.152.598,61
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	0,00	0,00	5.540.271.000,00
16	Kecamatan Dumai Barat	3.919.772.272,00	208.213.300,00	0,00	4.127.985.572,00
17	Kecamatan Dumai Timur	2.615.530.000,00	0,00	0,00	2.615.530.000,00
18	Kecamatan Bukit Kapur	5.181.176.650,00	977.530.000,00	0,00	6.158.706.650,00
19	Kecamatan Medang Kampai	2.923.684.000,00	536.035.000,00	0,00	3.459.719.000,00
20	Kecamatan Sungai Sembilan	3.259.250.500,00	1.140.000.000,00	0,00	4.399.250.500,00
21	Kecamatan Dumai Kota	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	3.538.166.770,00	0,00	0,00	3.538.166.770,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	0,00	0,00	3.122.546.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	0,00	0,00	291.433.000,00
26	Inspektorat	199.744.000,00	0,00	0,00	199.744.000,00
	JUMLAH	2.390.039.096.680,91	81.178.183.551,48	13.893.942.356,49	2.457.323.337.875,90

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.96 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Jalan dan Jembatan	2.050.428.373.359,50	2.014.772.889.175,97	35.655.484.183,53	1,77
2	Bangunan Air	280.583.043.816,55	262.863.394.552,97	17.719.649.263,58	6,74
3	Instalasi	18.042.963.734,76	17.843.175.734,76	199.788.000,00	1,12
4	Jaringan	107.981.508.665,09	94.559.637.217,21	13.421.871.447,88	14,19
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	287.448.300,00	0,00	287.448.300,00	100,00
	Jumlah	2.457.323.337.875,90	2.390.039.096.680,91	67.284.241.194,99	2,82

Sebagai Tambahan Catatan pada tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai melakukan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT. Mayatama Solusindo berupa Tanah Bahu Jalan dilindungi Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor: 17 Tanggal 14 Februari 2022 dihadapan Notaris dan PPAT Aprilliyani, SH.,M.Kn. Rincian Tanah bahu jalan yang digunakan dalam Perjanjian ini terdapat dalam Lampiran 19.

5) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
59.805.527.274,44	56.223.639.963,74	3.581.887.310,70	6,37

Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp59.805.527.274,44 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp56.223.639.963,74 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.581.887.310,70 atau sebesar 6,37%. Peningkatan Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.97 Rincian Aset Tetap lainnya per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.777.361.070,79	47.223.464.560,09	3.553.896.510,70	7,53
2	Dinas Kesehatan	74.515.000,00	74.515.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	12.527.500,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250.018.000,00	250.018.000,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	34.120.000,00	34.120.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.084.216.000,00	1.084.216.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.768.700,00	(2.768.700,00)	(100,00)
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	1.298.620.270,00	0,00	0,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.142.224.633,65	4.141.247.633,65	977.000,00	0,02
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	1.154.901.000,00	0,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	280.779.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	302.562.600,00	0,00	0,00
18	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	32.752.000,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	39.149.500,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	34.534.500,00	4.752.000,00	29.782.500,00	626,74
21	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	54.552.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	123.651.700,00	123.651.700,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	62.805.000,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	6.957.500,00	0,00	0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah		59.805.527.274,44	56.223.639.963,74	3.581.887.310,70	6,37

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	3.828.936.144,00
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	977.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	3.829.913.144,00
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Reklasifikasi Keluar	2.768.700,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	245.257.133,30
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomptabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	248.025.833,30
Kenaikan/(Penurunan) --2		3.581.887.310,70
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	4.669.915.366,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	150.802.500,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	4.820.717.866,00
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(384.576.222,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(138.490.000,00)
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00

No	URAIAN	NILAI
	Keluar ke Aset Lainnya	(468.715.500,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke Pembayaran Hutang BLUD Tahun 2018	0,00
	Jumlah ---2	(991.781.722,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	3.828.936.144,00

Tabel 5.5.98 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.223.464.560,09	3.937.643.644,00	383.747.133,30	50.777.361.070,79
2	Dinas Kesehatan	74.515.000,00	0,00	0,00	74.515.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	0,00	0,00	12.527.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250.018.000,00	0,00	0,00	250.018.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.915.000,00	0,00	0,00	13.915.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	0,00	0,00	3.579.000,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	34.120.000,00	0,00	0,00	34.120.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.084.216.000,00	0,00	0,00	1.084.216.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	0,00	2.768.700,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	0,00	0,00	1.298.620.270,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.141.247.633,65	977.000,00	0,00	4.142.224.633,65
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	0,00	0,00	1.154.901.000,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	0,00	0,00	280.779.000,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	0,00	0,00	302.562.600,00
18	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	0,00	0,00	32.752.000,00
19	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	0,00	0,00	39.149.500,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	29.782.500,00	0,00	34.534.500,00
21	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	0,00	0,00	54.552.000,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	123.651.700,00	0,00	0,00	123.651.700,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	0,00	0,00	62.805.000,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	0,00	0,00	6.957.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Jumlah	56.223.639.963,74	3.968.403.144,00	386.515.833,30	59.805.527.274,44

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.99 Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Buku Umum	28.823.055.114,76	28.822.078.114,76	977.000,00	0,00
2	Buku Filsafat	128.649.853,00	128.649.853,00	0,00	0,00
3	Buku Agama	507.306.644,65	507.306.644,65	0,00	0,00
4	Buku Ilmu Sosial	575.197.696,50	575.197.696,50	0,00	0,00
5	Buku Ilmu Bahasa	693.987.783,50	693.987.783,50	0,00	0,00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.474.535.122,00	1.474.535.122,00	0,00	0,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.969.740.369,00	2.969.740.369,00	0,00	0,00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	526.082.015,00	526.082.015,00	0,00	0,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	294.742.913,00	294.742.913,00	0,00	0,00
10	Buku Laporan	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00

NO	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	567.146.166,70	664.019.500,00	(96.873.333,30)	(14,59)
12	Bahan Kartografi	12.473.350,00	12.473.350,00	0,00	0,00
13	Alat Musik	3.275.372.928,33	3.245.590.428,33	29.782.500,00	0,92
14	Lukisan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00
15	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	552.273.200,00	552.623.200,00	(350.000,00)	(0,06)
16	Pahatan	170.084.000,00	170.084.000,00	0,00	0,00
17	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
18	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3.023.440.130,00	3.023.440.130,00	0,00	0,00
19	Ternak Potong	247.911.000,00	247.911.000,00	0,00	0,00
20	Tanaman	1.591.171.000,00	1.591.171.000,00	0,00	0,00
21	Aset Tetap Dalam Renovasi	498.100.000,00	498.100.000,00	0,00	0,00
22	Aset Tetap Lainnya BOS	13.848.137.988,00	10.199.786.844,00	3.648.351.144,00	35,77
Jumlah		59.805.527.274,44	56.223.639.963,74	3.581.887.310,70	6,37

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
259.619.088.807,87	217.661.117.431,33	41.957.971.376,54	19,28

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan atau belum memiliki nilai manfaat hingga tahun anggaran berakhir Per 31 Desember 2022, KDP Pemerintah Kota Dumai senilai Rp259.619.088.807,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp217.661.117.431,33 maka mengalami kenaikan senilai Rp41.957.971.376,54 atau sebesar 19,28%. Adapun rincian KDP per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.100 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.767.667.384,33	10.336.821.563,33	430.845.821,00	4,17
2	Dinas Kesehatan	158.207.761,00	158.207.761,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	19.209.954.807,00	(19.209.954.807,00)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.269.682.052,54	184.130.776.240,00	60.138.905.812,54	32,66
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	639.033.950,00	290.679.500,00	348.354.450,00	119,84
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja	288.685.000,00	288.685.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	842.985.100,00	543.274.000,00	299.711.100,00	55,17
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170.403.560,00	170.394.560,00	9.000,00	0,01
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00	1.561.475.000,00	0,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	147.970.000,00	0,00	0,00
14	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	626.149.000,00	0,00	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	0,00	49.900.000,00	(49.900.000,00)	(100,00)
Jumlah		259.619.088.807,87	217.661.117.431,33	41.957.971.376,54	19,28

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 20. Adapun, penjelasan atas penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	51.319.660.190,54
Transfer dari KDP Tahun-Tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	12.124.940.000,00

URAIAN		NILAI
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (a)	63.444.600.190,54
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Reklasifikasi Keluar	21.477.044.814,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	9.584.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	Jumlah (b)	21.486.628.814,00
Kenaikan/(Penurunan) --2		41.957.971.376,54
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	0,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	1.132.180.080,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	51.469.131.452,54
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	440.429.821,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah ---1	53.041.741.353,54
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(1.722.081.163,00)
	Jumlah ---2	(1.722.081.163,00)
3	Selisih lebih/(kurang)	51.319.660.190,54

Tabel 5.5.101 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.336.821.563,34	440.429.821,00	9.584.000,00	10.767.667.384,34
2	Dinas Kesehatan	158.207.761,00	0,00	0,00	158.207.761,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19.209.954.807,00	0,00	19.209.954.807,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.130.776.239,99	64.028.291.982,54	3.889.386.170,00	244.269.682.052,53
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	290.679.500,00	348.354.450,00	0,00	639.033.950,00
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	288.685.000,00	0,00	0,00	288.685.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	543.274.000,00	299.711.100,00	0,00	842.985.100,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170.394.560,00	49.894.000,00	49.885.000,00	170.403.560,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00	0,00	0,00	1.561.475.000,00
13	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	0,00	0,00	147.970.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
14	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	0,00	0,00	626.149.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	0,00
	JUMLAH	217.661.117.431,33	65.166.681.353,54	23.208.709.977,00	259.619.088.807,87

Perbandingan Aset Tetap Menurut Neraca dan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran 21.

7) Akumulasi Penyusutan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2.599.700.211.378,08)	(2.437.848.269.174,51)	(161.851.942.203,57)	6,64

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan dan tercatat sebagai lawan Akun Aset Tetap (*Contra Account*).

Hingga 31 Desember 2022 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap senilai minus Rp2.599.700.211.378,08 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp2.437.848.269.174,51 maka mengalami kenaikan senilai Rp161.851.942.203,57 atau sebesar 6,64%

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2022	(2.437.848.269.174,51)
Beban Penyusutan Per 31 Desember 2022	(181.536.477.699,71)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	19.684.535.496,14
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(2.599.700.211.378,08)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai minus Rp2.599.700.211.378,08 terdiri dari Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2022 senilai minus Rp2.437.848.269.174,51, Beban Penyusutan Tahun 2022 senilai minus Rp181.536.477.699,71 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp19.684.535.496,14. adapun rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.102 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(174.621.679.069,60)	(157.611.797.937,01)	(17.009.881.132,60)	10,79
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	(286.165.813.805,89)	(245.753.540.666,13)	(40.412.273.139,76)	16,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.748.860.220.175,55)	(1.668.383.164.502,85)	(80.477.055.672,70)	4,82
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(12.276.614.899,05)	(9.543.520.561,35)	(2.733.094.337,70)	28,64
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.570.854.602,27)	(3.378.579.606,40)	(192.274.995,87)	5,69
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(16.136.579.099,66)	(12.729.733.455,72)	(3.406.845.643,94)	26,76
7	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	(2.206.021.214,00)	(1.978.553.312,57)	(227.467.901,43)	11,50
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(4.040.793.901,28)	(3.123.098.135,38)	(917.695.765,90)	29,38
9	Dinas Tenaga Kerja	(6.855.946.720,68)	(6.518.599.269,48)	(337.347.451,20)	5,18
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.306.102.923,14)	(2.188.109.562,50)	(117.993.360,64)	5,39
11	Dinas Lingkungan Hidup	(23.398.067.345,09)	(22.377.813.777,72)	(1.020.253.567,37)	4,56
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.316.658.745,05)	(5.043.640.520,93)	(273.018.224,13)	5,41
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.666.591.131,74)	(3.231.081.207,80)	(435.509.923,94)	13,48
14	Dinas Perhubungan	(71.985.214.724,97)	(69.237.771.765,64)	(2.747.442.959,33)	3,97
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(8.152.403.807,15)	(7.350.271.530,98)	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(4.279.476.616,16)	(4.360.841.246,27)	81.364.630,11	(1,87)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.876.288.512,86)	(6.284.067.019,50)	2.407.778.506,64	(38,32)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(8.168.469.045,19)	(7.363.413.700,86)	(805.055.344,33)	10,93
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.862.666.102,83)	(4.142.393.679,99)	(720.272.422,85)	17,39
20	Dinas Perikanan	(6.306.300.187,64)	(7.377.170.280,31)	1.070.870.092,67	(14,52)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(15.503.568.427,37)	(15.084.072.236,86)	(419.496.190,52)	2,78
22	Dinas Perdagangan	(11.134.809.721,42)	(10.432.645.589,35)	(702.164.132,06)	6,73

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
23	Sekretariat Daerah	(79.932.816.453,80)	(76.708.948.864,20)	(3.223.867.589,60)	4,20
24	Sekretariat DPRD	(18.396.186.418,58)	(17.768.374.071,67)	(627.812.346,90)	3,53
25	Kecamatan Dumai Barat	(3.734.665.841,85)	(3.025.701.622,11)	(708.964.219,74)	23,43
26	Kecamatan Dumai Timur	(5.042.210.087,59)	(4.213.981.121,77)	(828.228.965,82)	19,65
27	Kecamatan Bukit Kapur	(5.082.644.779,19)	(4.259.885.676,83)	(822.759.102,36)	19,31
28	Kecamatan Medang Kampai	(4.804.343.131,02)	(4.199.270.361,88)	(605.072.769,14)	14,41
29	Kecamatan Sungai Sembilan	(3.956.837.490,81)	(3.371.042.984,75)	(585.794.506,06)	17,38
30	Kecamatan Dumai Kota	(2.895.569.087,38)	(2.513.975.204,66)	(381.593.882,72)	15,18
31	Kecamatan Dumai Selatan	(4.201.542.253,69)	(3.376.241.162,65)	(825.301.091,04)	24,44
32	Inspektorat	(5.352.339.527,65)	(4.792.794.784,63)	(559.544.743,02)	11,67
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(8.707.332.024,71)	(8.129.224.051,73)	(578.107.972,98)	7,11
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(14.180.831.220,31)	(13.439.875.988,33)	(740.955.231,98)	5,51
35	Badan Pendapatan Daerah	(14.086.067.678,86)	(13.150.970.979,10)	(935.096.699,76)	7,11
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.635.684.604,08)	(5.404.102.734,62)	(231.581.869,46)	4,29
Jumlah		(2.599.700.211.378,08)	(2.437.848.269.174,51)	(161.851.942.203,58)	6,64

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.103 Rincian Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Peralatan dan Mesin	(634.233.489.960,86)	(569.417.149.424,80)	(64.816.340.536,06)	11,38
2	Gedung dan Bangunan	(208.228.735.596,91)	(194.749.964.276,02)	(13.478.771.320,90)	6,92
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.757.237.985.820,31)	(1.673.681.155.473,69)	(83.556.830.346,62)	4,99
Jumlah		(2.599.700.211.378,08)	(2.437.848.269.174,51)	(161.851.942.203,57)	6,64

d. Aset Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
45.763.433.936,39	20.668.352.583,88	25.095.081.352,51	121,42

Aset Lainnya Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp45.763.433.936,39 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp20.668.352.583,88 maka mengalami kenaikan senilai Rp25.095.081.352,51 atau sebesar 121,42%. Aset Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Rincian Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.104 Rincian Aset Lainnya

No	Keterangan	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.073.670.980,27	846.288.500,00	227.382.480,27	26,87
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.030.597.849,07	18.004.828.933,15	(8.974.231.084,08)	(49,84)
4	Aset Tidak Berwujud	7.430.279.868,09	6.964.930.368,09	465.349.500,00	6,68
5	Aset Lain-lain	23.258.105.780,09	16.550.872.161,10	6.707.233.618,99	40,52
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.341.856.161,84)	(5.871.337.443,09)	(470.518.718,74)	8,01
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(21.177.088.977,29)	(15.896.529.935,37)	(5.280.559.041,92)	33,22
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	32.420.424.598,00	0,00	32.420.424.598,00	100,00
JUMLAH		45.763.433.936,39	20.668.352.583,88	25.095.081.352,51	121,42

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00

Tagihan Penjualan Angsuran Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp69.300.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Tagihan Penjualan Angsuran tidak mengalami perubahan. Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp69.300.000,00 tersebut merupakan tagihan penjualan Mobil Nissan Terrano Grandroast XTR BM 1957 RS.

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.073.670.980,27	846.288.500,00	227.382.480,27	26,87

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.073.670.980,27 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp846.288.500,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp227.382.480,27 atau sebesar 26,87%. Perubahan tersebut dikarenakan reklasifikasi dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah ke Aset Lainnya senilai Rp227.382.480,27. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.105 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Keterangan	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	846.288.500,00	846.288.500,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga	227.382.480,27	0,00
Jumlah		1.073.670.980,27	846.288.500,00

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap Saudara I.S atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak Ketiga. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga terdapat dalam Lampiran 22.

3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
9.030.597.849,07	18.004.828.933,15	(8.974.231.084,08)	(49,84)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp9.030.597.849,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp18.004.828.933,15 maka mengalami penurunan senilai Rp8.974.231.084 atau sebesar 49,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.106 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Nama Mitra	Saldo 2022	Saldo 2021
1	PT. Panca Belia Primakarsa	1.218.240.000,00	1.218.240.000,00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	0,00	8.974.231.084,08
3	PT. Satwa Sarana Karunia	7.812.357.849,07	7.812.357.849,07
Jumlah		9.030.597.849,07	18.004.828.933,15

a. PT Panca Belia Primakarsa

Sebidang tanah seluas 13.645,75 m² dengan nilai Rp1.218.240.000,00 di Kelurahan Rimba Sekampung yang dikelola oleh PT Panca Belia Primakarsa dengan perubahan perjanjian terakhir Nomor 500/EK/2002/314 Tanggal 20 Agustus 2002 yang di atasnya didirikan Pasar dan Komplek Pertokoan Pasar Pulau Payung. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 20 tahun setelah operasional dan 2,5 Tahun masa pembangunan, terhitung sejak Tahun 2002. Dalam kontrak perjanjian menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi berupa 14 Unit Los Ikan, 11 Unit Los Daging dan 60 Unit Los Sayur serta 1 unit kantor UPTD (Lantai III) dengan total senilai Rp1.218.240.000,00 dan setelah perjanjian berakhir Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan bangunan beserta isinya.

b. PT. Pelabuhan Dumai Berseri

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri Nomor 13/DISHUB/2018 dan Nomor 003/PT PDB-PEMKO DUMAI/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, objek perjanjian KSP ini adalah barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai. Perjanjian Kerjasama ini berakhir ditahun 2022 sesuai dengan isi perjanjian yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani, yang diperkuat dengan Surat Wali Kota Dumai nomor: 032/BPKAD/146.1 perihal keputusan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) barang milik daerah antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Dinas Perhubungan telah melakukan Reklasifikasi akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya berada dibagian Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp8.974.231.084,08

Tabel 5.5.107 Rincian PT. Pelabuan Dumai Berseri

Keterangan	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
			RP	%
Harga Perolehan Aset Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	8.974.231.084,08	(8.974.231.084,08)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	(1.679.234.084,29)	1.679.234.084,29	(100,00)
Nilai Buku	0,00	7.294.996.999,79	(7.294.996.999,79)	(100,00)

c. PT. Satwa Sarana Karunia

Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Satwa Sarana Karunia berdasarkan Akta Notaris Parilliyani, S.H, M.Kn Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2021. Objek perjanjian BGS ini adalah barang milik daerah berupa tanah seluas 351.089,3 m2 di Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai yang berada pada Pengelola (PPKD) Kota Dumai. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dengan Kontribusi tahunan kepada Pemerintah Kota Dumai senilai Rp186.000.000,00.

4) Aset Tidak Berwujud

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
7.430.279.868,09	6.964.930.368,09	465.349.500,00	6,68

Aset tidak berwujud pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp7.430.279.868,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp6.964.930.368,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp465.349.500,00 atau sebesar 6,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.108 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.685.240.939,37	3.710.140.939,37	(24.900.000,00)	(0,67)
2	Dinas Kesehatan	433.920.000,00	433.920.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.602.000,00	0,00	64.602.000,00	100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	1.301.609.500,00	982.522.000,00	319.087.500,00	32,48
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	696.943.065,72	590.383.065,72	106.560.000,00	18,05
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.450.000,00	104.450.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	181.506.050,00	181.506.050,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.796.900,00	8.796.900,00	0,00	100,00
12	Dinas Perikanan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	77.985.000,00	77.985.000,00	0,00	0,00
14	Inspektorat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
16	Badan Pendapatan Daerah	402.507.413,00	402.507.413,00	0,00	0,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235.309.000,00	235.309.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.430.279.868,09	6.964.930.368,09	465.349.500,00	6,68

5) Aset Lain-Lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
23.258.105.780,09	16.550.872.161,10	6.707.233.618,99	40,52

Aset Lain-Lain pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp23.258.105.780,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp16.550.872.161,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.707.233.618,99 atau sebesar 40,52% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.109 Rincian Aset Lain-Lain

No	Jenis Aset Lain-lain	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	22.799.745.780,09	15.796.299.161,10	7.003.446.618,99	44,34
2	Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	458.360.000,00	754.573.000,00	(296.213.000,00)	(39,26)
Jumlah		23.258.105.780,09	16.550.872.161,10	6.707.233.618,99	40,52

a. Aset Rusak Berat/Usang

Jumlah Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp22.799.745.780,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp15.796.299.161,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp7.003.446.618,99 atau sebesar 44,34%. dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.5.110 Rincian Aset Rusak Berat

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.617.780,00	116.617.780,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	6.499.433.643,19	4.317.273.243,19	2.182.160.400,00	50,54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.550.000,00	696.550.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	424.194.000,00	424.194.000,00	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	185.725.000,00	207.671.546,00	(21.946.546,00)	(10,57)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10.898.500,00	10.898.500,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	124.705.000,00	124.705.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,00	1,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	4.695.657.419,91	2.428.327.963,91	2.267.329.456,00	93,37
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	25.102.000,00	25.102.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.561.903.309,00	0,00	2.561.903.309,00	100,00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	36.292.856,00	36.292.856,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	355.380.591,00	355.380.591,00	0,00	0,00
15	Dinas Perikanan	1.029.122.750,00	1.029.122.750,00	0,00	0,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	388.750.000,00	388.750.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	2.816.161.050,00	2.816.161.050,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Barat	195.462.821,00	195.462.821,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	59.479.440,00	59.479.440,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Medang Kampai	41.700.000,00	27.700.000,00	14.000.000,00	50,54
22	Kecamatan Sungai Sembilan	400.085.960,00	400.085.960,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Dumai Kota	27.094.000,00	27.094.000,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	107.277.944,00	107.277.944,00	0,00	0,00
25	Inspektorat	153.246.267,00	153.246.267,00	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	475.394.050,00	475.394.050,00	0,00	0,00
27	Badan Pendapatan Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.195.011.398,00	1.195.011.398,00	0,00	0,00
Jumlah		22.799.745.780,09	15.796.299.161,10	7.003.446.618,99	44,34

b. Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp458.360.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp754.573.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp458.360.000,00 atau sebesar 39,26%. Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga merupakan Aset Dinas PUPR yang akan diserahkan ke masyarakat. Rincian Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.5.111 Rincian Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga

No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
1	Pembetonan jalan masuk kompleks rumah dinas kejaksaan negeri kota dumai kel.bukit datuk	31.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
2	Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin Kota dumai	427.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jumlah		458.360.000,00	

6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(6.341.856.161,84)	(5.871.337.443,09)	(470.518.718,74)	8,01

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai minus Rp6.341.856.161,84 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp5.871.337.443,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp470.518.718,74 atau sebesar 8,01%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.112 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.644.951.151,87)	(3.566.596.070,62)	(78.355.081,25)	2,20
2	Dinas Kesehatan	(302.982.500,00)	(249.902.500,00)	(53.080.000,00)	21,24
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15.312.500,00)	(10.937.500,00)	(4.375.000,00)	40,00
4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(44.950.000,00)	(44.950.000,00)	0,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	(43.725.000,00)	(26.235.000,00)	(17.490.000,00)	66,67
6	Dinas Perhubungan	(620.071.250,00)	(412.519.125,00)	(207.552.125,00)	50,31
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(584.694.940,72)	(545.123.690,72)	(39.571.250,00)	7,26
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(104.450.000,00)	(85.787.500,00)	(18.662.500,00)	21,75
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(158.817.793,75)	(113.441.281,25)	(45.376.512,50)	40,00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1.099.612,50)	(1.099.612,50)	0,00	0,00
11	Dinas Perikanan	(46.000.000,00)	(46.000.000,00)	0,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	(77.985.000,00)	(77.985.000,00)	0,00	0,00
13	Inspektorat	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	(402.507.413,00)	(396.451.163,01)	(6.056.249,99)	1,53
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(235.309.000,00)	(235.309.000,00)	0,00	0,00
JUMLAH		(6.341.856.161,84)	(5.871.337.443,09)	(470.518.718,74)	8,01

7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(21.177.088.977,29)	(14.217.295.851,08)	(6.959.793.126,21)	48,95

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai minus Rp21.177.088.977,29 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp14.217.295.851,08 maka mengalami Kenaikan senilai Rp6.959.793.126,21 atau sebesar 48,95% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.113 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(116.617.780,00)	(116.617.780,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(6.499.433.643,19)	(4.317.093.833,19)	(2.182.339.810,00)	50,55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(856.976.000,00)	(910.013.530,00)	53.037.530,00	(5,83)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(424.194.000,00)	(424.194.000,00)	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(181.621.000,00)	(203.423.546,00)	21.802.546,00	(10,72)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	0,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(10.898.500,00)	(10.898.500,00)	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	(124.705.000,00)	(124.705.000,00)	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(83.000.000,00)	(83.000.000,00)	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1,00)	(1,00)	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	(3.591.763.657,10)	(1.290.618.731,98)	(2.301.144.925,12)	178,30
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(25.102.000,00)	(25.102.000,00)	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.510.939.709,00)	0,00	(2.510.939.709,00)	100,00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(36.292.856,00)	(36.292.856,00)	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(355.380.591,00)	(355.380.591,00)	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	(555.544.630,00)	(538.139.670,00)	(17.404.960,00)	3,23
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(332.499.999,9980)	(328.333.333,34)	(4.166.666,66)	1,27
18	Sekretariat Daerah	(87.500.000,00)	(87.500.000,00)	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	(2.740.478.550,00)	(2.738.227.550,00)	(2.251.000,00)	0,08
20	Kecamatan Dumai Barat	(176.852.001,00)	(176.314.441,00)	(537.560,00)	0,30
21	Kecamatan Bukit Kapur	(59.479.440,00)	(59.479.440,00)	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	(41.700.000,00)	(27.700.000,00)	(14.000.000,00)	50,54
23	Kecamatan Sungai Sembilan	(400.085.960,00)	(398.237.388,58)	(1.848.571,42)	0,46
24	Kecamatan Dumai Kota	(27.094.000,00)	(27.094.000,00)	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	(107.277.944,00)	(107.277.944,00)	0,00	0,00
26	Inspektorat	(153.246.267,00)	(153.246.267,00)	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(475.394.050,00)	(475.394.050,00)	0,00	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	(6.800.000,00)	(6.800.000,00)	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.195.011.398,00)	(1.195.011.398,00)	0,00	0,00
	Jumlah	(21.177.088.977,29)	(14.217.295.851,08)	(6.959.793.126,21)	48,95

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.114 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(21.016.662.977,29)	(14.003.832.321,08)	(7.012.830.656,21)	50,08
2	Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	(160.426.000,00)	(213.463.530,00)	53.037.530,00	(24,85)
	Jumlah	(21.177.088.977,29)	(14.217.295.851,08)	(6.959.793.126,21)	48,95

8) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
32.420.424.598,00	0,00	32.420.424.598,00	100,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp32.420.424.598,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.115 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan Ke 4, DBH PPH PASAL 21 Tahun 2022	3.280.894.794,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan Ke 4, DBH PPH PASAL 25/29 OP Tahun 2022	142.376.503,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	12.356.755,00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	299.179.880,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perkebunan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	2.054.655,00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Minyak Dan Gas Bumi Non Tunai Triwulan Ke 4 Tahun 2022	2.436.519.026,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	411.920,00
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Perhutanan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	11.634.472,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Perkebunan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	91.290,00
10	Dana Bagi Hasil BP Pajak Bumi Dan Bangunan Minyak Dan Gas Bumi Non Tunai Triwulan Ke 4 Tahun 2022	81.221.242,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai Tahap Ke 3 Tahun 2022	472.605.805,00
12	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai- TDF Tahap Ke 3 Tahun 2022	344.421.402,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	9.484.496.424,00
14	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	5.529.726.188,00
15	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	316.157.673,00
16	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	347.049.210,00
17	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 30 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	424.886.708,00
18	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 30 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	5.050.665.087,00
19	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	7.083.198,00
20	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	84.177.718,00
21	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	312.759.995,00
22	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	907.084.322,00
23	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	1.344.425.198,00
24	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	211.753.211,00
25	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	32.285,00
26	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	909.282.946,00
27	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	407.076.691,00
	J U M L A H	32.420.424.598,00

2. Kewajiban

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
119.078.674.818,75	115.127.076.949,31	3.951.597.869,44	3,43

Kewajiban Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp119.078.674.818,75 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp115.127.076.949,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.951.597.869,44 atau sebesar 3,43% dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
43.018.133.852,86	115.127.076.949,31	(72.108.943.096,45)	(62,63)

Kewajiban Jangka Pendek Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp43.018.133.852,86 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp115.127.076.949,31 maka mengalami penurunan senilai Rp72.108.943.096,45 atau sebesar 62,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.116 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.497.308,51	1.783.762,00	24.713.546,51	1.385,47
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	295.284.900,00	168.578.067,00	126.706.833,00	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.386.340.133,35	1.049.253.734,31	337.086.399,04	32,13
Utang Belanja	41.310.011.511,00	113.907.461.386,00	(72.597.449.875,00)	(63,73)
Jumlah	43.018.133.852,86	115.127.076.949,31	(72.108.943.096,45)	(62,63)

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
26.497.308,51	1.783.762,00	24.713.546,51	1.385,47

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp26.497.308,51 merupakan Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2022 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.116 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nama SKPD	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dana BOS	25.634.056,51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574.500,00
Kecamatan Dumai Barat	288.702,00
Kecamatan Dumai Selatan	50,00
Total	26.497.308,51

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
295.284.900,00	168.578.067,00	126.706.833,00	75,16

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp295.284.900,00 merupakan Saldo Kas pada Rekening penampungan Jasa Bongkar Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Dumai senilai Rp295.262.912,00 dan Bunga Dana BOS senilai Rp21.988,00 yang belum disetor ke Kas Daerah Kota Dumai, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp168.578.067,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp126.706.833,00 atau sebesar 75,16%.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.386.340.133,35	1.049.253.734,31	337.086.399,04	32,13

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian Barang/Jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.386.340.133,35 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.049.253.734,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp337.086.399,04 atau sebesar 32,13%.

Tabel 5.5.117 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Sewa lahan atau tempat	607.189.435,00	536.808.400,00	70.381.035,00	13,11
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ketiga atas Pajak Reklame Diterima Dimuka	779.150.698,35	512.445.334,31	266.705.364,04	52,05
Jumlah	1.386.340.133,35	1.049.253.734,31	337.086.399,04	32,13

Untuk rincian Pendapatan Diterima Dimuka lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23.

4) Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
41.310.011.511,00	113.907.461.386,00	(72.597.449.875,00)	(63,73)

Utang Belanja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp41.310.011.511,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp113.907.461.386,00 maka mengalami penurunan senilai Rp72.597.449.875,00 atau sebesar 63,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.118 Rincian Utang Belanja

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Belanja Pegawai	1.193.065.598,00	45.532.167,00	1.147.533.431,00	2.520,27
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.906.049.480,00	9.344.776.653,00	(4.438.727.173,00)	(47,50)
Utang Belanja Pegawai BLUD	17.328.762.835,00	54.056.743.612,00	(36.727.980.777,00)	(67,94)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.035.625.368,00	47.080.036.656,00	(30.044.411.288,00)	(63,82)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Belanja Modal BLUD	846.508.230,00	3.380.372.298,00	(2.533.864.068,00)	(74,96)
JUMLAH	41.310.011.511,00	113.907.461.386,00	(72.597.449.875,00)	(63,73)

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan Kewajiban Akruwal yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun yang terdiri dari:

1. Utang Belanja Gaji Pokok ASN/Gaji Pokok PNS atas nama Drs.Rozali Umar pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai.
2. Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Dumai sesuai dengan SK Walikota Dumai Nomor : 973/962/2022 Tahun 2022.

Jumlah utang belanja pegawai pada SKPD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.119 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Utang Beban Pegawai	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Perhubungan	1.042.830.094,00	45.532.167,00	997.297.927,00	2.190,32
2	Dinas Koperasi UMKM	150.235.504,00	0,00	150.235.504,00	100,00
	Jumlah	1.193.065.598,00	45.532.167,00	1.147.533.431,00	2.520,27

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja barang dan jasa merupakan Kewajiban Akruwal yang muncul akibat dari penggunaan atas Jasa Listrik, Telpon, Air, Langganan TV/Internet, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP, Insentif Tenaga Kesehatan vaksinator serta penanganan COVID- 19 yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, Rincian Utang belanja barang dan jasa pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.120 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Utang Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	4.417.974.590,00	8.411.524.403,00	(3.993.549.813,00)	(47,48)
2	Dinas Perhubungan	368.509.082,00	812.318.693,00	(443.809.611,00)	(54,63)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	11.472.897,00	6.182.329,00	5.290.568,00	85,58
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.947.999,00	8.188.822,00	759.177,00	9,27
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	8.013.973,00	(8.013.973,00)	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.096.146,00	6.914.639,00	181.507,00	2,62
8	Dinas Lingkungan Hidup	9.944.025,00	6.095.974,00	3.848.051,00	63,12
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.431.289,00	8.545.844,00	1.885.445,00	22,06
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.662.390,00	(4.662.390,00)	(100,00)
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.108.535,00	13.163.712,00	(11.055.177,00)	(83,98)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	16.465.789,00	5.689.670,00	10.776.119,00	189,40
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.907.364,00	8.016.396,00	(5.109.032,00)	(63,73)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.816.842,00	6.785.864,00	1.030.978,00	15,19
15	Dinas Perikanan	12.619.295,00	12.409.990,00	209.305,00	1,69
16	Dinas Perdagangan	15.155.627,00	0,00	15.155.627,00	100,00
17	Sekretariat DPRD	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
18	Kecamatan Dumai Barat	0,00	4.976.840,00	(4.976.840,00)	(100,00)
19	Kecamatan Dumai Timur	0,00	5.165.775,00	(5.165.775,00)	(100,00)
20	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	4.691.515,00	(4.691.515,00)	(100,00)
21	Kecamatan Medang Kampai	0,00	3.038.494,00	(3.038.494,00)	(100,00)
22	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	6.791.330,00	(6.791.330,00)	(100,00)
	Jumlah	4.906.049.480,00	9.344.776.653,00	(4.438.727.173,00)	(47,50)

Untuk rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24.

c. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD senilai Rp17.328.762.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.121 Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Kota Dumai Tahun 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	100,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	33.293.100,00	3.204.000,00	30.089.100,00	939,11
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	9.309.000,00	3.360.000,00	5.949.000,00	177,05
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	28.315.000,00	18.443.000,00	9.872.000,00	53,53
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	8.285.000,00	0,00	8.285.000,00	100,00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	4.040.000,00	7.072.000,00	(3.032.000,00)	(42,87)
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	18.683.040,00	14.417.850,00	4.265.190,00	29,58
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	82.510.190,00	0,00	82.510.190,00	100,00
10	BLUD Puskesmas Purnama	36.053.660,00	12.518.000,00	23.535.660,00	188,01
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	4.380.000,00	4.720.000,00	(340.000,00)	(7,20)
12	UPT. Lab Kualitas Air Kelas A	9.519.000,00	9.928.000,00	(409.000,00)	(4,12)
13	BLUD RSUD	17.093.290.845,00	53.983.080.762,00	(36.889.789.917,00)	(68,34)
	Total	17.328.762.835,00	54.056.743.612,00	(36.727.980.777,00)	(67,94)

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 25 s.d Lampiran 28.

d. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Merupakan utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.122 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kota Dumai Tahun 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				RP	%
1	BLUD RSUD	16.968.833.651,00	45.203.734.489,00	(28.234.900.838,00)	(62,46)
2	BLUD Puskesmas	66.791.717,00	1.876.302.167,00	(1.809.510.450,00)	(96,44)
	Total	17.035.625.368,00	47.080.036.656,00	(30.044.411.288,00)	(63,82)

Untuk Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada Lampiran 29 s.d. Lampiran 31

e. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp846.508.230,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.380.372.298,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.533.864.068,00 atau sebesar 74,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.123 Rincian Utang Belanja Modal BLUD RSUD

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	751.804.600,00	2.306.369.898,00	(1.554.565.298,00)	(67,40)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.703.630,00	459.874.000,00	(365.170.370,00)	(79,41)
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	614.128.400,00	(614.128.400,00)	(100,00)
	Jumlah	846.508.230,00	3.380.372.298,00	(2.533.864.068,00)	(74,96)

Rincian Utang Belanja Modal BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 32.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
76.060.540.965,89	0,00	76.060.540.965,89	100,00

Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah

2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
76.060.540.965,89	0,00	76.060.540.965,89	100,00

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank Jangka Menengah merupakan utang kepada Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas kredit pinjaman daerah, berdasarkan Akad atas perjanjian kredit Nomor: 12 TGL08/06/2022 dan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah dikantor Notaris-PPAT Firman,SH.,M.Kn. dengan keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jumlah Plafond Fasilitas Pembiayaan adalah senilai Rp107.534.013.538,00.
2. Jumlah Penarikan Pembiayaan senilai Rp94.060.540.965,89 dan pengembalian pokok pada tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp18.000.000.000,00 sehingga baki debet pembiayaan per 30 Desember 2022 sebesar Rp76.060.540.965,89.
3. Jangka waktu pinjaman selama 32 Bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 s.d 31 Desember 2024.
4. Pembayaran Bunga/Bagi Hasil setiap bulan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dihitung setelah tanggal pencairan pembiayaan dilakukan.
5. Jadwal angsuran pembiayaan pinjaman daerah sampai dengan jatuh tempo seperti berikut:
 - a. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap I senilai Rp18.000.000.000,00 telah dibayar pada tanggal 30 Desember 2022
 - b. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap II senilai Rp45.000.000.000,00 akan dibayar pada bulan Desember 2023
 - c. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap III senilai Rp31.060.540.965,89 akan dibayar pada bulan Desember 2024

3. Ekuitas

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77	13.946.075.029,03	0,47

Ekuitas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.988.483.536.517,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.974.537.461.488,77 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.946.075.029,03 atau sebesar 0,47% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.124 Rincian Ekuitas

Ekuitas Awal	Rp	2.974.537.461.488,77
Surplus/Defisit LO	Rp	(4.912.296.937,03)
Penyesuaian / Mutasi :		
Penambahan	Rp	19.132.959.865,06
Pengurangan	Rp	(274.587.899,00)
Ekuitas Akhir	Rp	2.988.483.536.517,80

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci ada pada Catatan atas Laporan Keuangan di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5. 6. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kota Dumai.

1 Pendapatan - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.404.760.236.811,95	1.372.376.641.914,38	32.383.594.897,57	2,36

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp1.404.760.236.811,95 mengalami kenaikan senilai Rp32.383.594.897,57 atau sebesar 2,36% jika dibandingkan Tahun 2021 senilai Rp1.372.376.641.914,38 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	429.802.097.071,52	426.299.014.021,79	3.503.083.049,73	0,82
Pendapatan Transfer	958.348.926.927,00	889.269.161.050,39	69.079.765.876,61	7,77
Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.609.212.813,43	56.808.466.842,20	(40.199.254.028,77)	(70,76)
Jumlah	1.404.760.236.811,95	1.372.376.641.914,38	32.383.594.897,57	2,36

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
429.802.097.071,52	426.299.014.021,79	3.503.083.049,73	0,82

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2022 dan Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 senilai Rp429.802.097.071,52 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp426.299.014.021,79. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan senilai Rp3.503.083.049,73 atau sebesar 0,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	235.710.177.866,02	195.616.934.382,69	40.093.243.483,33	20,50
Pendapatan Retribusi Daerah	32.238.321.945,17	23.688.650.046,46	8.549.671.898,71	36,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)
Lain-lain PAD yang Sah	160.773.836.069,33	205.578.304.337,64	(44.804.468.268,31)	(21,79)
Jumlah	429.802.097.071,52	426.299.014.021,79	3.503.083.049,73	0,82

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
235.710.177.866,02	195.616.934.382,69	40.093.243.483,33	20,50

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterima pada Tahun 2022 (SKPD) dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp235.710.177.866,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp195.616.934.382,69. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp40.093.243.483,33 atau sebesar 20,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.3 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	5.246.803.968,00	4.254.135.688,00	992.668.280,00	23,33
Pajak Restoran	11.706.887.077,00	9.321.329.460,00	2.385.557.617,00	25,59
Pajak Hiburan	1.984.330.294,00	952.102.028,00	1.032.228.266,00	108,42
Pajak Reklame	2.883.768.166,96	1.941.742.376,69	942.025.790,27	48,51
Pajak Penerangan Jalan	53.105.905.542,06	49.467.546.601,00	3.638.358.941,06	7,36
Pajak Parkir	760.692.273,00	691.186.812,00	69.505.461,00	10,06
Pajak Air Tanah	1.200.318.522,00	2.271.126.489,00	(1.070.807.967,00)	(47,15)
Pajak Sarang Burung Walet	97.436.475,00	90.270.560,00	7.165.915,00	7,94
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	143.736.884.996,00	106.124.903.919,00	37.611.981.077,00	35,44
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.987.150.552,00	20.502.590.449,00	(5.515.439.897,00)	(26,90)
Jumlah	235.710.177.866,02	195.616.934.382,69	40.093.243.483,33	20,50

Tabel 5.6.1.3a Rincian Pendapatan Pajak – LO Berdasarkan Pengakuan Tahun 2022

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan yang Diakui Berdasarkan Hak	Berdasarkan Realisasi	Pendapatan Pajak LO
Pajak Hotel	5.246.803.968,00	0,00	5.246.803.968,00
Pajak Restoran	11.706.887.077,00	0,00	11.706.887.077,00
Pajak Hiburan	1.984.330.294,00	0,00	1.984.330.294,00
Pajak Reklame	2.883.768.166,96	0,00	2.883.768.166,96
Pajak Penerangan Jalan PLN	41.479.433.111,00	0,00	41.479.433.111,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	11.626.472.431,06	0,00	11.626.472.431,06
Pajak Parkir	760.692.273,00	0,00	760.692.273,00
Pajak Air Tanah	1.200.318.522,00	0,00	1.200.318.522,00
Pajak Sarang Burung Walet	97.436.475,00	0,00	97.436.475,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	143.736.884.996,00	0,00	143.736.884.996,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	14.987.150.552,00	14.987.150.552,00
Jumlah	220.723.027.314,02	14.987.150.552,00	235.710.177.866,02

Realisasi Pendapatan Pajak per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	5.246.803.968,00	4.254.135.688,00	992.668.280,00	23,33
Jumlah	5.246.803.968,00	4.254.135.688,00	992.668.280,00	23,33

2. Pajak Restoran

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	11.706.887.077,00	9.321.329.460,00	2.385.557.617,00	25,59
Jumlah	11.706.887.077,00	9.321.329.460,00	2.385.557.617,00	25,59

3. Pajak Hiburan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	1.984.330.294,00	952.102.028,00	1.032.228.266,00	108,42
Jumlah	1.984.330.294,00	952.102.028,00	1.032.228.266,00	108,42

4. Pajak Reklame

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	2.883.768.166,96	1.941.742.376,69	942.025.790,27	48,51
Jumlah	2.883.768.166,96	1.941.742.376,69	942.025.790,27	48,51

5. Pajak Penerangan Jalan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	53.105.905.542,06	49.467.546.601,00	3.638.358.941,06	7,36
Jumlah	53.105.905.542,06	49.467.546.601,00	3.638.358.941,06	7,36

7. Pajak Parkir

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	760.692.273,00	691.186.812,00	69.505.461,00	10,06
Jumlah	760.692.273,00	691.186.812,00	69.505.461,00	10,06

8. Pajak Air Tanah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	1.200.318.522,00	2.271.126.489,00	(1.070.807.967,00)	(47,15)
Jumlah	1.200.318.522,00	2.271.126.489,00	(1.070.807.967,00)	(47,15)

9. Pajak Sarang Burung Walet

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	97.436.475,00	90.270.560,00	7.165.915,00	7,94
Jumlah	97.436.475,00	90.270.560,00	7.165.915,00	7,94

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	143.736.884.996,00	106.124.903.919,00	37.611.981.077,00	35,44
Jumlah	143.736.884.996,00	106.124.903.919,00	37.611.981.077,00	35,44

12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	14.987.150.552,00	20.502.590.449,00	(5.515.439.897,00)	(26,90)
Jumlah	14.987.150.552,00	20.502.590.449,00	(5.515.439.897,00)	(26,90)

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
32.238.321.945,17	23.688.650.046,46	8.549.671.898,71	36,09

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 9 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan retribusi daerah Pemerintah Kota Dumai didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2022 senilai Rp32.238.321.945,17, jika dibandingkan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp23.688.650.046,46 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan senilai Rp8.549.671.898,71 atau sebesar 36,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.363.880.145,17	0,00	6.363.880.145,17	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	18.160.000,00	24.680.000,00	(6.520.000,00)	(26,42)
Dinas Lingkungan Hidup	717.640.000,00	775.275.000,00	(57.635.000,00)	(7,43)
Dinas Perhubungan	23.876.748.100,00	18.357.066.946,46	5.519.681.153,54	30,07
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	525.197.100,00	556.449.100,00	(31.252.000,00)	(5,62)
Dinas Perikanan	26.009.600,00	7.885.000,00	18.124.600,00	229,86
Dinas Perdagangan	681.737.000,00	571.789.000,00	109.948.000,00	19,23
Sekretariat Daerah Kota Dumai	28.950.000,00	38.250.000,00	(9.300.000,00)	(24,31)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.357.255.000,00	(3.357.255.000,00)	(100,00)
Jumlah	32.238.321.945,17	23.688.650.046,46	8.549.671.898,71	36,09

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO Tahun 2022 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.6.1.5 Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	717.640.000,00	775.275.000,00	(57.635.000,00)	(7,43)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	444.750.000,00	113.159.000,00	331.591.000,00	293,03
Retribusi Pelayanan Pasar	393.516.000,00	183.991.000,00	209.525.000,00	113,88
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	178.702.750,00	71.080.550,00	107.622.200,00	151,41
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	251.221.000,00	203.602.000,00	47.619.000,00	23,39
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	525.197.100,00	556.449.100,00	(31.252.000,00)	(5,62)
Jumlah	2.511.026.850,00	1.903.556.650,00	607.470.200,00	31,91

b. Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.6.1.6 Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.000.000,00	38.250.000,00	118.750.000,00	310,46
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	184.196.000,00	(184.196.000,00)	(100,00)
Retribusi Terminal	135.328.000,00	48.950.000,00	86.378.000,00	176,46
Retribusi Tempat Khusus Parkir	22.979.780.300,00	18.091.319.546,46	4.888.460.753,54	27,02
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	28.950.000,00	0,00	28.950.000,00	100,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	26.009.600,00	7.885.000,00	18.124.600,00	229,86
Retribusi Rumah Potong Hewan	18.160.000,00	24.680.000,00	(6.520.000,00)	(26,42)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	138.137.050,00	32.557.850,00	105.579.200,00	324,28
Jumlah	23.483.364.950,00	18.427.838.396,46	5.055.526.553,54	27,43

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.6.1.7 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	3.348.255.000,00	(3.348.255.000,00)	(100,00)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	37.000.000,00	9.000.000,00	28.000.000,00	311,11
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.206.880.145,17	0,00	6.206.880.145,17	100,00
Jumlah	6.243.930.145,17	3.357.255.000,00	2.886.675.145,17	85,98

Realisasi Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	717.640.000,00	775.275.000,00	(57.635.000,00)	(7,43)
Jumlah	717.640.000,00	775.275.000,00	(57.635.000,00)	(7,43)

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	444.750.000,00	113.159.000,00	331.591.000,00	293,03
Jumlah	444.750.000,00	113.159.000,00	331.591.000,00	293,03

3. Retribusi Pelayanan Pasar

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	393.516.000,00	183.991.000,00	209.525.000,00	113,88
Jumlah	393.516.000,00	183.991.000,00	209.525.000,00	113,88

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	178.702.750,00	71.080.550,00	107.622.200,00	151,41
Jumlah	178.702.750,00	71.080.550,00	107.622.200,00	151,41

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	251.221.000,00	203.602.000,00	47.619.000,00	23,39
Jumlah	251.221.000,00	203.602.000,00	47.619.000,00	23,39

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	525.197.100,00	556.449.100,00	(31.252.000,00)	(5,62)
Jumlah	525.197.100,00	556.449.100,00	(31.252.000,00)	(5,62)

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	157.000.000,00	38.250.000,00	118.750.000,00	310,46
Jumlah	157.000.000,00	38.250.000,00	118.750.000,00	310,46

8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	0,00	184.196.000,00	(184.196.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	184.196.000,00	(184.196.000,00)	(100,00)

9. Retribusi Terminal

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	135.328.000,00	48.950.000,00	86.378.000,00	176,46
Jumlah	135.328.000,00	48.950.000,00	86.378.000,00	176,46

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	22.979.780.300,00	18.091.319.546,46	4.888.460.753,54	27,02
Jumlah	22.979.780.300,00	18.091.319.546,46	4.888.460.753,54	27,02

11. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	28.950.000,00	0,00	28.950.000,00	100,00
Jumlah	28.950.000,00	0,00	28.950.000,00	100,00

12. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	26.009.600,00	7.885.000,00	18.124.600,00	229,86
Jumlah	26.009.600,00	7.885.000,00	18.124.600,00	229,86

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	18.160.000,00	24.680.000,00	(6.520.000,00)	(26,42)
Jumlah	18.160.000,00	24.680.000,00	(6.520.000,00)	(26,42)

14. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	138.137.050,00	32.557.850,00	105.579.200,00	324,28
Jumlah	138.137.050,00	32.557.850,00	105.579.200,00	324,28

15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.348.255.000,00	(3.348.255.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	3.348.255.000,00	(3.348.255.000,00)	(100,00)

16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.000.000,00	9.000.000,00	28.000.000,00	311,11
Jumlah	37.000.000,00	9.000.000,00	28.000.000,00	311,11

17. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Jumlah	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

18. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.206.880.145,17	0,00	6.206.880.145,17	100,00
Jumlah	6.206.880.145,17	0,00	6.206.880.145,17	100,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.079.761.191,00 mengalami penurunan senilai Rp335.364.064,00 atau sebesar 23,70% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.415.125.255,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)
Jumlah	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
PT Bank Riau Kepri	1.079.761.191,00	1.316.194.590,00	236.433.399,00	17,96
PT Pembangunan Dumai		98.930.665,00	98.930.665,00	100,00
Jumlah	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 bersumber dari pembagian Dividen dari PT. Bank Riau Kepri

4) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
160.773.836.069,33	205.578.304.337,64	(44.804.468.268,31)	(21,79)

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 senilai Rp160.773.836.069,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp205.578.304.337,64 mengalami penurunan senilai Rp44.804.468.268,31 atau sebesar 21,79%.

Tabel 5.6.1.9 Perbandingan Lain – Lain PAD – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.962.000,00	3.452.000,00	(490.000,00)	(14,19)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.142.102.300,00	432.859.972,33	709.242.327,67	163,85
Hasil Kerja Sama Daerah	1.999.999.999,00	0,00	1.999.999.999,00	100,00
Jasa Giro	3.540.712.219,01	4.697.811.210,09	(1.157.098.991,08)	(24,63)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF-LO	9.410.661,00	0,00	9.410.661,00	100,00
Pendapatan Bunga	793.646.059,95	1.135.241.649,19	(341.595.589,24)	(30,09)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.612.966.852,39	6.391.677.976,42	(4.778.711.124,03)	(74,76)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.732.181.976,00	3.619.846.565,51	(1.887.664.589,51)	(52,15)
Pendapatan dari Pengembalian	145.945.024,84	230.291.915,00	(84.346.890,16)	(36,63)
Pendapatan dari BLUD	149.793.908.977,14	189.067.123.049,10	(39.273.214.071,96)	(20,77)
Jumlah	160.773.836.069,33	205.578.304.337,64	(44.804.468.268,31)	(21,79)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.962.000,00	3.452.000,00	(490.000,00)	(14,19)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.142.102.300,00	299.859.972,33	842.242.327,67	280,88
Jasa Giro	3.540.712.219,01	4.697.811.210,09	(1.157.098.991,08)	(24,63)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF-LO	9.410.661,00	0,00	9.410.661,00	100,00
Pendapatan Bunga	793.646.059,95	1.135.241.649,19	(341.595.589,24)	(30,09)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.612.966.852,39	6.391.677.976,42	(4.778.711.124,03)	(74,76)
Pendapatan dari Pengembalian	145.945.024,84	230.291.915,00	(84.346.890,16)	(36,63)
Jumlah	7.247.745.117,19	12.758.334.723,03	(5.510.589.605,84)	(43,19)

Sebagai tambahan informasi atas pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan senilai Rp1.142.102.300,00 terdiri dari Kontribusi Tetap hasil Bangun Guna Serah (BGS) oleh PT. Mayatama Solusindo senilai Rp300.000.000,00 dan PT. Satwa Sarana Karunia senilai Rp186.000.000,00. Sementara untuk sisanya senilai Rp656.102.300,00 merupakan pendapatan Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

Hasil Bangun Guna Serah (BGS) PT. Mayatama Solusindo senilai Rp300.000.000,00 merupakan pembayaran atas kontribusi tetap Tahun 2022 yang telah di setor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Tanggal 21 Februari 2023. Hasil Bangun Guna Serah (BGS) PT. Satwa Sarana Karunia senilai Rp186.000.000,00 merupakan pembayaran atas kontribusi tetap Tahun 2022 yang telah di setor pada Tanggal 13 Januari 2023. Atas pembayaran tersebut telah diakui sebagai Piutang BGS per 31 Desember 2022.

b) Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD	149.793.908.977,14	189.067.123.049,10	(39.273.214.071,96)	(20,77)
Jumlah	149.793.908.977,14	189.067.123.049,10	(39.273.214.071,96)	(20,77)

c) Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.732.181.976,00	3.619.846.565,51	(1.887.664.589,51)	(52,15)
Jumlah	1.732.181.976,00	3.619.846.565,51	(1.887.664.589,51)	(52,15)

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	133.000.000,00	(133.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	133.000.000,00	(133.000.000,00)	(100,00)

f) Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	1.999.999.999,00	0,00	1.999.999.999,00	100,00
Jumlah	1.999.999.999,00	0,00	1.999.999.999,00	100,00

b. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
958.348.926.927,00	889.269.161.050,39	69.079.765.876,61	7,77

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 adalah senilai Rp958.348.926.927,00, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 senilai Rp889.269.161.050,39 mengalami kenaikan senilai Rp69.079.765.876,61 atau sebesar 7,77%.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Rincian realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.10 Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	790.780.529.327,00	731.422.367.681,00	59.358.161.646,00	8,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)
Pendapatan Bagi Hasil	138.791.251.600,00	118.255.548.369,39	20.535.703.230,61	17,37
Bantuan Keuangan	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36
Jumlah	958.348.926.927,00	889.269.161.050,39	69.079.765.876,61	7,77

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
790.780.529.327,00	731.422.367.681,00	59.358.161.646,00	8,12

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 senilai Rp790.780.529.327,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp731.422.367.681,00 mengalami kenaikan senilai 59.358.161.646,00 atau sebesar 8,12%. Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.11 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	200.062.780.224,00	145.468.956.587,00	54.593.823.637,00	37,53
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427.742.257.138,00	429.427.931.000,00	(1.685.673.862,00)	(0,39)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.389.147.488,00	92.602.935.776,00	(31.213.788.288,00)	(33,71)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.586.344.477,00	63.922.544.318,00	37.663.800.159,00	58,92
Jumlah	790.780.529.327,00	731.422.367.681,00	59.358.161.646,00	8,12

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
200.062.780.224,00	145.468.956.587,00	54.593.823.637,00	37,53

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2022 senilai Rp200.062.780.224,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp145.468.956.587,00 mengalami kenaikan senilai 54.593.823.637,00 atau sebesar 37,53%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.12 Perbandingan Dana Bagi Hasil – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
PBB	31.951.411.123,00	32.489.986.139,00	(538.575.016,00)	(1,66)
PPh Pasal 21	29.803.909.794,00	28.458.745.600,00	1.345.164.194,00	4,73
PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	2.407.482.999,00	907.558.300,00	1.499.924.699,00	165,27
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	75.125,00	7.105,00	68.020,00	957,35
SDA Minyak Bumi	108.985.949.109,00	65.037.087.400,00	43.948.861.709,00	67,58
SDA Gas Bumi	9.561.705.711,00	1.732.767.313,00	7.828.938.398,00	451,82
SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.456.699.515,00	2.011.059.867,00	3.445.639.648,00	171,33
SDA Kehutanan-PSDH	9.725.482.637,00	13.157.244.713,00	(3.431.762.076,00)	(26,08)
SDA Kehutanan-DR	2.170.064.211,00	1.674.500.150,00	495.564.061,00	29,59
Jumlah	200.062.780.224,00	145.468.956.587,00	54.593.823.637,00	37,53

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
427.742.257.138,00	429.427.931.000,00	(1.685.673.862,00)	(0,39)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Desember 2022 senilai Rp427.742.257.138,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp429.427.931.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.685.673.862,00 atau sebesar 0,39%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.13 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAU	427.742.257.138,00	429.427.931.000,00	(1.685.673.862,00)	(0,39)
Jumlah	427.742.257.138,00	429.427.931.000,00	(1.685.673.862,00)	(0,39)

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
61.389.147.488,00	92.602.935.776,00	(31.213.788.288,00)	(33,71)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2022 senilai Rp61.389.147.488,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp92.602.935.776,00 mengalami penurunan senilai Rp31.213.788.288,00 atau sebesar 33,71%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.14 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.374.823.000,00	1.164.180.030,00	210.642.970,00	18,09
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.715.841.000,00	13.973.518.877,00	(3.257.677.877,00)	(23,31)
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.329.665.000,00	7.420.333.655,00	2.909.331.345,00	39,21
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	470.885.000,00	0,00	470.885.000,00	100,00
Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	302.130.900,00	497.949.500,00	(195.818.600,00)	(39,32)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	6.961.322.360,00	(6.961.322.360,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	2.612.930.185,00	(2.612.930.185,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	2.793.306.235,00	2.604.123.885,00	189.182.350,00	7,26
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	33.250.090.451,00	(33.250.090.451,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB	5.073.521.108,00	740.017.000,00	4.333.504.108,00	585,60
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.326.130.000,00	0,00	7.326.130.000,00	100,00
Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	684.582.499,00	(684.582.499,00)	(100,00)
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	2.221.395.747,00	(2.221.395.747,00)	(100,00)
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	4.569.233.064,00	(4.569.233.064,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.068.554.005,00	0,00	6.068.554.005,00	100,00
Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	4.556.055.598,00	(4.556.055.598,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.775.800.000,00	0,00	4.775.800.000,00	100,00
Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	1.660.233.500,00	(1.660.233.500,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	12.158.491.240,00	3.994.119.110,00	8.164.372.130,00	204,41
Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	4.121.535.315,00	(4.121.535.315,00)	(100,00)
Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	1.571.315.000,00	(1.571.315.000,00)	(100,00)
Jumlah	61.389.147.488,00	92.602.935.776,00	(31.213.788.288,00)	(33,71)

c) **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
101.586.344.477,00	63.922.544.318,00	37.663.800.159,00	58,92

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2022 senilai Rp101.586.344.477,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp63.922.544.318,00 mengalami kenaikan senilai 37.663.800.159,00 atau sebesar 58,92%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.15 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	39.790.809.140,00	0,00	39.790.809.140,00	100,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	720.000.000,00	0,00	720.000.000,00	100,00
TPG PNSD	51.967.177.370,00	55.565.896.000,00	(3.598.718.630,00)	(6,48)
Tamsil Guru PNSD	1.558.500.000,00	528.000.000,00	1.030.500.000,00	195,17
BOP PAUD	0,00	2.761.200.000,00	(2.761.200.000,00)	(100,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	248.850.000,00	(248.850.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.119.961.607,00	0,00	4.119.961.607,00	100,00
BOKKB-BOKB	2.133.478.400,00	1.812.823.476,00	320.654.924,00	17,69
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.514.289.842,00	(1.514.289.842,00)	(100,00)
Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	99.692.000,00	(99.692.000,00)	(100,00)
Fasilitasi Penanaman Modal	254.403.060,00	326.122.000,00	(71.718.940,00)	(21,99)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	289.414.900,00	575.671.000,00	(286.256.100,00)	(49,73)
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	752.600.000,00	490.000.000,00	262.600.000,00	53,59
Jumlah	101.586.344.477,00	63.922.544.318,00	37.663.800.159,00	58,92

2) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah**

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp20.360.896.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp31.603.245.000,00 mengalami penurunan senilai Rp11.242.349.000,00 atau sebesar 35,57%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.16 Perbandingan Dana Insentif Daerah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Insentif Daerah (DID)	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)
Jumlah	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)

3) **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
147.207.501.600,00	126.243.548.369,39	20.963.953.230,61	16,61

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp147.207.501.600,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp126.243.548.369,39,00 mengalami kenaikan senilai Rp20.963.953.230,61,00 atau sebesar 16,61%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	138.791.251.600,00	118.255.548.369,39	20.535.703.230,61	17,37
Bantuan Keuangan	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36
Jumlah	147.207.501.600,00	126.243.548.369,39	20.963.953.230,61	16,61

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
138.791.251.600,00	118.255.548.369,39	20.535.703.230,61	17,37

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp138.791.251.600,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp118.255.548.369,39 mengalami kenaikan senilai 20.535.703.230,61 atau sebesar 17,37%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.17 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	28.395.979.012,00	32.683.466.124,39	(4.287.487.112,39)	(13,12)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.321.728.811,00	19.359.137.791,00	3.962.591.020,00	20,47
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.314.762.949,00	45.121.720.867,00	17.193.042.082,00	38,10
Pajak Air Permukaan	1.139.183.222,00	1.157.395.723,00	(18.212.501,00)	(1,57)
Pajak Rokok	23.619.597.606,00	19.933.827.864,00	3.685.769.742,00	18,49
Jumlah	138.791.251.600,00	118.255.548.369,39	20.535.703.230,61	17,37

b) Bantuan Keuangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36

Realisasi Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 senilai Rp8.416.250.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp7.988.000.000,00 mengalami kenaikan senilai 428.250.000,00 atau sebesar 5,36%. Berikut ini adalah rincian realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.18 Perbandingan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36
Jumlah	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
16.609.212.813,43	56.808.466.842,20	(40.199.254.028,77)	(70,76)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2022 adalah senilai Rp16.609.212.813,43 mengalami penurunan senilai Rp40.199.254.028,77 atau sebesar 70,76% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp56.808.466.842,20. Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.19 Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah	16.609.212.813,43	16.112.703.842,20	496.508.971,23	3,08
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	40.695.763.000,00	(40.695.763.000,00)	(100,00)
Jumlah	16.609.212.813,43	56.808.466.842,20	(40.199.254.028,77)	(70,76)

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 adalah senilai Rp16.609.212.813,43 mengalami kenaikan senilai Rp496.508.971,23 atau sebesar 3,08% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp16.112.703.842,20. Berikut rincian dari Pendapatan Hibah:

Tabel 5.6.1.20 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.794.469.206,85	13.312.730.660,00	(10.518.261.453,15)	(79,01)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	306.559.000,00	2.687.463.182,20	(2.380.904.182,20)	(88,59)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	143.381.000,00	112.510.000,00	30.871.000,00	27,44
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	785.601.988,58	0,00	785.601.988,58	100,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	12.579.201.618,00	0,00	12.579.201.618,00	100,00
Jumlah	16.609.212.813,43	16.112.703.842,20	496.508.971,23	3,08

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Berikut adalah SKPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan aset yang diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.21 Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

SKPD	Realisasi 2021	Keterangan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.521.711.486,00	Hibah Masuk dari Kementerian PUPR
Dinas Kesehatan	306.471.446,00	Hibah Masuk dari Kementerian Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.124.940.000,00	Hibah dari Dewan FTJSP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	310.541.785,71	Hibah dari BNPB
Dinas Lingkungan Hidup	191.250.000,00	Hibah Masuk dari Bank Riau
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	306.559.000,00	Hibah Dari Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	331.214.132,00	Hibah Masuk dari Pemerintah Pusat
Dinas Perhubungan	324.530.357,14	Hibah Masuk dari Kementerian Perhubungan
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	100.000.000,00	Hibah Lapangan Tenis dari The Zuri
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	977.000,00	Hibah Buku dari <i>Founder</i> Komunitas Merangkai Aksara
Sekretariat Daerah Kota Dumai	353.284.618,00	Hibah Masuk dari Masjid Agung Al Mannan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	594.351.988,58	Hibah dari pengurus Masjid Jami'atul Muslimin
Inspektorat	143.381.000,00	Hibah Masuk Kelompok Masyarakat
Jumlah	16.609.212.813,43	

Daftar Pendapatan Hibah dapat dilihat pada Lampiran 33.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	40.695.763.000,00	(40.695.763.000,00)	(100,00)

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp40.695.763.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp40.695.763.000,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Lain-lain Pendapatan dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.22 Perbandingan Lain-lain Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	40.695.763.000,00	(40.695.763.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	40.695.763.000,00	(40.695.763.000,00)	(100,00)

2. Beban - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.399.193.113.871,93	1.348.648.467.648,14	50.544.646.223,79	3,75

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban-LO Kota Dumai selama Tahun 2022 adalah senilai Rp1.399.193.113.871,93, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.348.648.467.648,14 mengalami kenaikan senilai Rp50.544.646.223,79 atau sebesar 3,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.1 Rincian Beban-LO

Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	1.398.932.824.854,93	1.342.545.256.777,14	56.387.568.077,79	4,20
Beban Tak Terduga	260.289.017,00	6.103.210.871,00	(5.842.921.854,00)	(95,74)
Jumlah	1.399.193.113.871,93	1.348.648.467.648,14	50.544.646.223,79	3,75

a. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Kota Dumai selama Tahun 2022 adalah senilai Rp1.399.193.113.871,93 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.348.648.467.648,14, mengalami kenaikan senilai Rp50.544.646.223,79, atau sebesar 3,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.2 Rincian Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	613.745.405.027,00	624.362.020.295,00	(10.620.901.268,00)	(1,70)
Beban Barang dan Jasa	534.009.973.169,57	500.306.843.431,15	33.703.129.738,42	6,74

Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga	1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00
Beban Hibah	42.565.151.769,26	15.192.998.932,38	27.372.152.836,88	180,16
Beban Bantuan Sosial	12.911.808.100,00	0,00	12.911.808.100,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang	12.458.576.669,68	20.948.535.335,61	(12.181.949.246,83)	(58,15)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.181.533.049,42	181.734.858.783,00	446.958.266,42	0,25
Jumlah	1.398.932.824.854,93	1.342.545.256.777,14	56.387.568.077,79	4,20

1. Beban Pegawai

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
613.745.405.027,00	624.362.020.295,00	(10.620.901.268,00)	(1,70)

Beban Pegawai yang bersumber dari Belanja APBD diakui pada saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang bersumber dari kekurangan pembayaran atas Belanja APBD tahun sebelumnya dan Belanja yang berumber dari BLUD diakui pada saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas. Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2022 senilai Rp613.745,405,027 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp624.362.020.295,00 mengalami penurunan senilai Rp10.620.901.268,00 atau sebesar 1,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.3 Rincian Beban Pegawai LO

Beban Pegawai	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan ASN	274.011.724.548,00	264.398.713.084,00	9.613.011.464,00	3,64
Tambahan Penghasilan PNS	184.476.904.079,00	176.126.304.790,00	8.350.599.289,00	4,74
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.295.285.950,00	70.662.436.970,00	(3.367.151.020,00)	(4,77)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.996.033.321,00	16.005.055.941,00	(9.022.620,00)	(0,06)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	955.752.317,00	867.676.247,00	88.076.070,00	10,15
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	731.600.000,00	70.000.000,00	9,57
Beban Pegawai Blud	70.208.104.812,00	95.570.233.263,00	(25.362.128.451,00)	(26,54)
Jumlah	613.745.405.027,00	624.362.020.295,00	(10.616.615.268,00)	(1,70)

Tabel 5.6.2.3.a Rincian Beban Berdasarkan Timbulnya Beban

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Gaji dan Tunjangan ASN	273.861.489.044,00	150.235.504,00	274.011.724.548,00
Tambahan Penghasilan PNS	184.476.904.079,00	0,00	184.476.904.079,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.252.455.856,00	1.042.830.094,00	67.295.285.950,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.996.033.321,00	0,00	15.996.033.321,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	955.752.317,00	0,00	955.752.317,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	0,00	801.600.000,00
Beban Pegawai Blud	52.896.298.477,00	17.311.806.335,00	70.208.104.812,00
Jumlah	595.240.533.094,00	18.504.871.933,00	613.745.405.027,00

Tabel 5.6.2.4 Rincian Beban Pegawai LO per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	229.987.353.709,00	227.753.032.016,00	2.234.321.693,00	0,98
Dinas Kesehatan	152.590.580.591,00	172.064.521.717,00	(19.473.941.126,00)	(11,32)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.312.693.579,00	8.515.568.986,00	(202.875.407,00)	(2,38)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.524.583.879,00	2.913.595.784,00	610.988.095,00	20,97
Satuan Polisi Pamong Praja	5.969.554.432,00	5.789.623.800,00	179.930.632,00	3,11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.364.369.706,00	3.346.390.439,00	17.979.267,00	0,54
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.079.912.413,00	2.918.130.710,00	161.781.703,00	5,54
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.389.596.313,00	2.444.452.733,00	945.143.580,00	38,66
Dinas Tenaga Kerja	3.619.827.108,00	3.320.726.325,00	299.100.783,00	9,01
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.274.910.701,00	4.201.731.728,00	73.178.973,00	1,74
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.261.260.341,00	8.147.896.570,00	113.363.771,00	1,39
Dinas Lingkungan Hidup	4.541.158.409,00	4.735.894.605,00	(194.736.196,00)	(4,11)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.173.534.256,00	4.135.893.930,00	37.640.326,00	0,91

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.041.688.521,00	3.213.453.866,00	(171.765.345,00)	(5,35)
Dinas Perhubungan	8.640.143.653,00	7.805.223.677,00	834.919.976,00	10,70
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.021.175.726,00	3.967.129.673,00	54.046.053,00	1,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.590.773.077,00	5.681.926.295,00	(91.153.218,00)	(1,60)
Dinas Kepemudaan OlahRaga dan Pariwisata	3.409.499.984,00	3.344.478.624,00	65.021.360,00	1,94
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.253.331.350,00	3.044.823.851,00	208.507.499,00	6,85
Dinas Perikanan	3.047.806.860,00	3.251.680.551,00	(203.873.691,00)	(6,27)
Dinas Perdagangan	4.284.292.738,00	4.409.131.250,00	(124.838.512,00)	(2,83)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.347.259.024,00	4.182.089.184,00	165.169.840,00	3,95
Sekretariat Daerah Kota Dumai	18.679.576.055,00	18.968.627.929,00	(289.051.874,00)	(1,52)
Sekretariat DPRD	20.863.062.287,00	20.611.886.830,00	251.175.457,00	1,22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.192.968.080,00	5.092.410.156,00	100.557.924,00	1,97
Badan Pendapatan Daerah	15.223.209.827,00	15.025.168.368,00	198.041.459,00	1,32
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.993.557.043,00	26.551.353.968,00	442.203.075,00	1,67
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.162.067.688,00	4.032.250.692,00	129.816.996,00	3,22
Inspektorat	8.770.566.096,00	8.660.759.916,00	109.806.180,00	1,27
Kecamatan Dumai Barat	4.887.807.465,00	4.663.012.638,00	224.794.827,00	4,82
Kecamatan Dumai Timur	5.366.498.858,00	4.808.084.451,00	558.414.407,00	11,61
Kecamatan Dumai Selatan	5.349.931.632,00	5.188.567.035,00	161.364.597,00	3,11
Kecamatan Dumai Kota	5.559.762.761,00	5.262.294.201,00	297.468.560,00	5,65
Kecamatan Bukit Kapur	6.792.345.050,00	6.194.690.269,00	597.654.781,00	9,65
Kecamatan Medang Kampai	4.885.249.307,00	4.661.124.823,00	224.124.484,00	4,81
Kecamatan Sungai Sembilan	6.293.496.508,00	5.454.392.705,00	839.103.803,00	15,38
Jumlah	613.745.405.027,00	624.362.020.295,00	(10.616.615.268,00)	(1,70)

Realisasi Beban Pegawai LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel 5.6.2.5 Gaji dan Tunjangan ASN per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115.866.747.496,00	109.607.991.163,00	6.258.756.333,00	5,71
Dinas Kesehatan	46.160.358.111,00	44.338.165.658,00	1.822.192.453,00	4,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.035.992.649,00	4.332.922.594,00	(296.929.945,00)	(6,85)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.811.468.079,00	1.539.293.883,00	272.174.196,00	17,68
Satuan Polisi Pamong Praja	3.044.886.232,00	3.057.993.720,00	(13.107.488,00)	(0,43)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.852.081.277,00	1.831.923.658,00	20.157.619,00	1,10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.531.595.485,00	1.489.105.874,00	42.489.611,00	2,85
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.691.915.293,00	1.276.703.727,00	415.211.566,00	32,52
Dinas Tenaga Kerja	1.896.039.953,00	1.755.111.248,00	140.928.705,00	8,03
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.255.882.488,00	2.199.000.089,00	56.882.399,00	2,59
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.474.556.617,00	4.487.359.422,00	(12.802.805,00)	(0,29)
Dinas Lingkungan Hidup	2.307.013.648,00	2.525.572.039,00	(218.558.391,00)	(8,65)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.978.416.101,00	1.982.126.556,00	(3.710.455,00)	(0,19)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.510.462.587,00	1.672.198.906,00	(161.736.319,00)	(9,67)
Dinas Perhubungan	4.271.860.671,00	4.409.864.372,00	(138.003.701,00)	(3,13)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.915.306.770,00	1.965.311.344,00	(50.004.574,00)	(2,54)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.722.318.797,00	2.757.633.258,00	(35.314.461,00)	(1,28)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.760.159.906,00	1.773.535.646,00	(13.375.740,00)	(0,75)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.726.048.827,00	1.681.981.117,00	44.067.710,00	2,62
Dinas Perikanan	1.557.320.318,00	1.762.800.790,00	(205.480.472,00)	(11,66)
Dinas Perdagangan	2.353.000.762,00	2.494.326.642,00	(141.325.880,00)	(5,67)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.415.402.220,00	2.315.892.455,00	99.509.765,00	4,30
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.042.081.295,00	8.115.674.803,00	(73.593.508,00)	(0,91)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	2.592.353.901,00	2.452.828.454,00	139.525.447,00	5,69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.357.785.046,00	2.428.129.130,00	(70.344.084,00)	(2,90)
Badan Pendapatan Daerah	4.239.027.893,00	3.993.847.702,00	245.180.191,00	6,14
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.241.098.008,00	21.111.876.690,00	129.221.318,00	0,61
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.949.781.992,00	1.909.651.999,00	40.129.993,00	2,10
Inspektorat	3.643.073.816,00	3.465.354.799,00	177.719.017,00	5,13
Kecamatan Dumai Barat	2.632.972.353,00	2.556.412.091,00	76.560.262,00	2,99
Kecamatan Dumai Timur	2.844.446.077,00	2.538.532.411,00	305.913.666,00	12,05
Kecamatan Dumai Selatan	2.792.878.216,00	2.780.155.618,00	12.722.598,00	0,46
Kecamatan Dumai Kota	2.935.612.338,00	2.880.320.396,00	55.291.942,00	1,92
Kecamatan Bukit Kapur	3.614.944.973,00	3.341.266.560,00	273.678.413,00	8,19
Kecamatan Medang Kampai	2.625.860.942,00	2.553.140.323,00	72.720.619,00	2,85
Kecamatan Sungai Sembilan	3.360.973.411,00	3.014.707.947,00	346.265.464,00	11,49
Jumlah	274.011.724.548,00	264.398.713.084,00	9.613.011.464,00	3,64

b. Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 5.6.2.6 Tambahan Penghasilan PNS per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.898.987.813,00	61.565.463.813,00	1.333.524.000,00	2,17
Dinas Kesehatan	35.464.288.454,00	31.785.722.796,00	3.678.565.658,00	11,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.130.716.930,00	3.173.016.392,00	(42.299.462,00)	(1,33)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.571.285.800,00	1.256.154.901,00	315.130.899,00	25,09
Satuan Polisi Pamong Praja	2.822.503.200,00	2.666.440.080,00	156.063.120,00	5,85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.441.248.429,00	1.482.746.781,00	(41.498.352,00)	(2,80)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.476.856.928,00	1.357.564.836,00	119.292.092,00	8,79
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.626.206.020,00	1.096.349.006,00	529.857.014,00	48,33
Dinas Tenaga Kerja	1.646.692.155,00	1.499.395.077,00	147.297.078,00	9,82
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.995.628.213,00	1.874.381.639,00	121.246.574,00	6,47
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.625.993.724,00	3.512.733.148,00	113.260.576,00	3,22
Dinas Lingkungan Hidup	2.053.724.761,00	2.133.428.583,00	(79.703.822,00)	(3,74)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.162.418.155,00	2.121.067.374,00	41.350.781,00	1,95
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.385.935.934,00	1.421.584.960,00	(35.649.026,00)	(2,51)
Dinas Perhubungan	3.135.442.888,00	3.064.919.305,00	70.523.583,00	2,30
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.871.098.956,00	1.792.451.729,00	78.647.227,00	4,39
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.750.385.030,00	2.759.987.326,00	(9.602.296,00)	(0,35)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.603.340.078,00	1.519.912.978,00	83.427.100,00	5,49
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.460.622.923,00	1.293.092.734,00	167.530.189,00	12,96
Dinas Perikanan	1.422.576.542,00	1.433.609.761,00	(11.033.219,00)	(0,77)
Dinas Perdagangan	1.845.121.976,00	1.814.231.058,00	30.890.918,00	1,70
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.866.636.804,00	1.800.976.729,00	65.660.075,00	3,65
Sekretariat Daerah Kota Dumai	9.434.802.412,00	9.812.849.719,00	(378.047.307,00)	(3,85)
Sekretariat DPRD	1.845.575.065,00	1.713.402.435,00	132.172.630,00	7,71
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.648.003.534,00	2.479.161.026,00	168.842.508,00	6,81
Badan Pendapatan Daerah	3.025.732.323,00	2.759.880.340,00	265.851.983,00	9,63
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.515.839.035,00	3.841.043.278,00	(325.204.243,00)	(8,47)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.114.967.696,00	2.038.678.693,00	76.289.003,00	3,74
Inspektorat	5.008.733.030,00	5.138.905.117,00	(130.172.087,00)	(2,53)
Kecamatan Dumai Barat	2.161.670.112,00	1.995.780.547,00	165.889.565,00	8,31
Kecamatan Dumai Timur	2.442.972.781,00	2.180.812.040,00	262.160.741,00	12,02
Kecamatan Dumai Selatan	2.442.889.416,00	2.313.192.817,00	129.696.599,00	5,61
Kecamatan Dumai Kota	2.487.420.423,00	2.283.603.805,00	203.816.618,00	8,93
Kecamatan Bukit Kapur	3.084.840.077,00	2.728.286.709,00	356.553.368,00	13,07
Kecamatan Medang Kampai	2.161.108.365,00	2.039.364.500,00	121.743.865,00	5,97
Kecamatan Sungai Sembilan	2.844.638.097,00	2.376.112.758,00	468.525.339,00	19,72
Jumlah	184.476.904.079,00	176.126.304.790,00	8.350.599.289,00	4,74

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.6.2.7 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.221.618.400,00	56.579.577.040,00	(5.357.958.640,00)	(9,47)
Dinas Kesehatan	757.829.214,00	370.400.000,00	387.429.214,00	104,60
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.145.984.000,00	1.009.630.000,00	136.354.000,00	13,51
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	141.830.000,00	118.147.000,00	23.683.000,00	20,05
Satuan Polisi Pamong Praja	102.165.000,00	65.190.000,00	36.975.000,00	56,72
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.040.000,00	31.720.000,00	39.320.000,00	123,96
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	71.460.000,00	71.460.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	71.475.000,00	71.400.000,00	75.000,00	0,11
Dinas Tenaga Kerja	77.095.000,00	66.220.000,00	10.875.000,00	16,42
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23.400.000,00	128.350.000,00	(104.950.000,00)	(81,77)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	160.710.000,00	147.804.000,00	12.906.000,00	8,73
Dinas Lingkungan Hidup	180.420.000,00	76.893.983,00	103.526.017,00	134,63
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	145.290.000,00	119.670.000,00	25.620.000,00	21,41
Dinas Perhubungan	1.232.840.094,00	330.440.000,00	902.400.094,00	273,09
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	234.770.000,00	208.040.600,00	26.729.400,00	12,85
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.069.250,00	164.305.711,00	(46.236.461,00)	(28,14)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	46.000.000,00	51.030.000,00	(5.030.000,00)	(9,86)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	66.659.600,00	69.750.000,00	(3.090.400,00)	(4,43)
Dinas Perikanan	67.910.000,00	55.270.000,00	12.640.000,00	22,87
Dinas Perdagangan	86.170.000,00	100.573.550,00	(14.403.550,00)	(14,32)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	65.220.000,00	65.220.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	512.580.000,00	374.060.000,00	138.520.000,00	37,03
Sekretariat DPRD	227.500.000,00	239.000.000,00	(11.500.000,00)	(4,81)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	187.179.500,00	185.120.000,00	2.059.500,00	1,11
Badan Pendapatan Daerah	7.092.809.642,00	7.541.133.486,00	(448.323.844,00)	(5,95)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.236.620.000,00	1.598.434.000,00	638.186.000,00	39,93
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.318.000,00	83.920.000,00	13.398.000,00	15,97
Inspektorat	118.759.250,00	56.500.000,00	62.259.250,00	110,19
Kecamatan Dumai Barat	93.165.000,00	110.820.000,00	(17.655.000,00)	(15,93)
Kecamatan Dumai Timur	79.080.000,00	88.740.000,00	(9.660.000,00)	(10,89)
Kecamatan Dumai Selatan	114.164.000,00	95.218.600,00	18.945.400,00	19,90
Kecamatan Dumai Kota	136.730.000,00	98.370.000,00	38.360.000,00	39,00
Kecamatan Bukit Kapur	92.560.000,00	125.137.000,00	(32.577.000,00)	(26,03)
Kecamatan Medang Kampai	98.280.000,00	68.620.000,00	29.660.000,00	43,22
Kecamatan Sungai Sembilan	87.885.000,00	63.572.000,00	24.313.000,00	38,24
Jumlah	67.295.285.950,00	70.662.436.970,00	(3.367.151.020,00)	(4,77)

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

5.6.2.8 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	15.996.033.321,00	16.005.055.941,00	(9.022.620,00)	(0,06)
Jumlah	15.996.033.321,00	16.005.055.941,00	(9.022.620,00)	(0,06)

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

5.6.2.9 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	1.326.000,00	(1.326.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	90.112.348,00	136.043.407,00	(45.931.059,00)	(33,76)
Badan Pendapatan Daerah	865.639.969,00	730.306.840,00	135.333.129,00	18,53
Jumlah	955.752.317,00	867.676.247,00	88.076.070,00	10,15

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Pendapatan Daerah merupakan beban insentif KDH/WKDH atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.6.2.10 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	600.000.000,00	530.000.000,00	70.000.000,00	13,21
Sekretariat DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	801.600.000,00	731.600.000,00	70.000.000,00	9,57

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Beban Operasional Bagi Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.

g. Beban Pegawai BLUD

Tabel 5.6.2.11 Beban Gaji BLUD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	70.208.104.812,00	95.570.233.263,00	(25.362.128.451,00)	(26,54)
Jumlah	70.208.104.812,00	95.570.233.263,00	(25.362.128.451,00)	(26,54)

2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
534.009.973.169,57	500.306.843.431,15	33.703.129.738,42	6,74

Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2022 adalah senilai Rp534.009.973.169,57, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp500.306.843.431,15 mengalami kenaikan senilai Rp33.703.129.738,42 atau sebesar 6,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.12 Rincian Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang	120.823.186.174,47	81.508.355.976,82	39.314.830.197,65	48,23
Beban Jasa	205.797.851.206,05	212.708.424.110,50	(6.910.572.904,45)	(3,25)
Beban Pemeliharaan	48.850.772.485,57	36.825.902.971,70	12.024.869.513,87	32,65
Beban Perjalanan Dinas	52.881.607.692,00	45.106.900.776,00	7.774.706.916,00	17,24
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.139.900.300,00	6.088.260.000,00	7.051.640.300,00	115,82
Beban Barang dan Jasa BOS	31.947.871.800,00	29.942.171.389,00	2.005.700.411,00	6,70
Beban Barang dan Jasa BLUD	60.568.783.511,48	88.126.828.207,13	(27.558.044.695,65)	(31,27)
Jumlah	534.009.973.169,57	500.306.843.431,15	33.703.129.738,42	6,74

Tabel 5.6.2.12.a Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Pengakuannya

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Beban Barang	120.823.186.174,47	0,00	120.823.186.174,47
Beban Jasa	200.893.401.726,05	4.904.449.480,00	205.797.851.206,05
Beban Pemeliharaan	48.850.772.485,57	0,00	48.850.772.485,57
Beban Perjalanan Dinas	52.881.607.692,00	0,00	52.881.607.692,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.139.900.300,00	0,00	13.139.900.300,00
Beban Barang dan Jasa BOS	31.947.871.800,00	0,00	31.947.871.800,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	44.670.128.760,48	15.898.654.751,00	60.568.783.511,48
Jumlah	513.206.868.938,57	20.803.104.231,00	534.009.973.169,57

Tabel 5.6.2.12.b Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Konsumsi Aset

1. Beban Barang

Beban Barang yang diakui saat pengeluaran kas, pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	118.767.455.304,69
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	2.532.867.870,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	1.829.869.492,00
Beban Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(2.307.006.492,22)
Jumlah Beban	120.823.186.174,47

2. Beban Jasa

Beban Jasa yang diakui saat pengeluaran kas, dan pengurangan beban atas pelunasan Utang tahun sebelumnya	205.303.947.881,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	2.413.661,00
Beban Jasa yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(4.412.959.815,95)
Jumlah Beban	200.893.401.726,05

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang diakui saat pengeluaran kas	57.011.334.399,19
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	178.974.800,00
Beban Pemeliharaan yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(8.339.536.713,62)
Jumlah Beban	48.850.772.485,57

4. Beban Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	52.881.607.692,00
Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	52.881.607.692,00

5. Beban Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban yang diakui pada saat pengeluaran kas	13.137.750.300,00
Belanja Modal berupa hadiah perlombaan yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	2.150.000,00
Jumlah Beban	13.139.900.300,00

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban yang diakui pada saat Pengesahan Belanja oleh BUD (SPB)	31.947.871.800,00
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	0,00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0,00
Jumlah Beban	31.947.871.800,00

7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD yang diakui saat pengesahan Belanja oleh BUD (SP2B), pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	46.649.945.505,00
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	993.600,00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(1.980.810.344,52)
Jumlah Beban	44.670.128.760,48
Jumlah Beban Barang dan Jasa Saat Terjadinya Konsumsi Aset (1 s.d 7)	513.206.868.938,57

Tabel 5.6.2.13 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60.846.949.233,00	63.411.130.210,11	(2.564.180.977,11)	(4,04)
Dinas Kesehatan	174.602.686.653,69	204.278.835.345,82	(29.742.940.409,13)	(14,56)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	81.937.175.140,62	41.406.603.184,00	40.530.571.956,62	97,88
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12.079.026.814,00	6.037.231.859,00	6.041.794.955,00	100,08
Satuan Polisi Pamong Praja	2.601.462.619,00	2.452.870.075,00	148.592.544,00	6,06
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.935.124.175,00	4.150.278.045,76	(1.215.153.870,76)	(29,28)

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.723.342.433,00	2.031.523.212,00	(308.180.779,00)	(15,17)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.032.490.944,00	3.096.331.085,00	(63.840.141,00)	(2,06)
Dinas Tenaga Kerja	2.580.915.686,00	1.230.964.182,00	1.349.951.504,00	109,67
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.227.699.697,00	2.509.719.391,00	(282.019.694,00)	(11,24)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.651.148.470,00	8.970.167.889,00	(2.319.019.419,00)	(25,85)
Dinas Lingkungan Hidup	15.727.397.380,00	15.025.156.891,00	702.240.489,00	4,67
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.035.558.276,00	3.471.852.272,00	(436.293.996,00)	(12,57)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.253.225.091,00	3.711.197.576,00	542.027.515,00	14,61
Dinas Perhubungan	31.612.867.217,26	29.661.981.605,96	1.950.885.611,30	6,58
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.736.530.547,00	7.191.327.698,00	(454.797.151,00)	(6,32)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.281.254.529,00	1.558.095.012,00	723.159.517,00	46,41
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	4.082.447.944,00	3.184.905.792,00	897.542.152,00	28,18
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.317.823.214,00	1.530.547.098,00	(212.723.884,00)	(13,90)
Dinas Perikanan	2.513.306.345,00	2.621.443.080,00	(108.136.735,00)	(4,13)
Dinas Perdagangan	2.444.906.852,00	2.421.003.867,00	23.902.985,00	0,99
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.715.596.737,00	1.607.798.207,00	107.798.530,00	6,70
Sekretariat Daerah Kota Dumai	29.365.501.128,00	22.956.941.770,50	6.408.559.357,50	27,92
Sekretariat DPRD	21.426.893.500,00	15.477.438.613,00	5.949.454.887,00	38,44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.001.283.445,00	3.536.440.853,00	464.842.592,00	13,14
Badan Pendapatan Daerah	7.622.722.377,00	5.280.089.480,00	2.342.632.897,00	44,37
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.943.810.729,00	9.054.525.522,00	3.889.285.207,00	42,95
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.488.427.391,00	3.883.343.952,00	(394.916.561,00)	(10,17)
Inspektorat	3.534.995.660,00	3.234.861.214,00	300.134.446,00	9,28
Kecamatan Dumai Barat	3.304.109.508,00	2.616.583.476,00	687.526.032,00	26,28
Kecamatan Dumai Timur	4.385.260.967,00	3.702.115.129,00	683.145.838,00	18,45
Kecamatan Dumai Selatan	4.088.155.079,00	3.736.559.431,00	351.595.648,00	9,41
Kecamatan Dumai Kota	4.323.270.739,00	6.198.170.927,00	(1.874.900.188,00)	(30,25)
Kecamatan Bukit Kapur	3.493.202.993,00	3.474.273.581,00	18.929.412,00	0,54
Kecamatan Medang Kampai	2.106.000.274,00	2.720.688.770,00	(614.688.496,00)	(22,59)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.987.403.382,00	2.873.847.135,00	113.556.247,00	3,95
Jumlah	534.009.973.169,57	500.306.843.431,15	33.703.129.738,42	6,74

a. Beban Barang

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
120.823.186.174,47	81.508.355.976,82	39.314.830.197,65	48,23

Beban Barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pencatatan Barang Kota Dumai menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai Beban Barang. Hingga pada akhir periode Beban Persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari Beban Operasional. Realisasi Beban Barang selama Tahun 2022 senilai Rp120.823.186.174,47 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp81.508.355.976,82 mengalami kenaikan senilai Rp39.314.830.197,65 atau sebesar 48,23%.

Tabel 5.6.2.14 Rincian Beban Barang LO

Beban Barang	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	116.519.764.911,93	77.400.829.447,71	39.118.935.464,22	50,54
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.303.421.262,54	4.107.526.529,11	195.894.733,43	4,77
Jumlah	120.823.186.174,47	81.508.355.976,82	39.314.830.197,65	48,23

Tabel 5.6.2.15 Perbandingan Beban Barang LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.259.537.461,00	5.746.835.993,11	512.701.467,89	8,92
Dinas Kesehatan	36.059.276.783,31	23.057.142.677,95	13.002.134.105,36	56,39
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.855.839.194,62	14.724.581.744,00	23.131.257.450,62	157,09

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.645.087.902,00	287.629.273,00	2.357.458.629,00	819,62
Satuan Polisi Pamong Praja	356.914.386,00	436.253.108,00	(79.338.722,00)	(18,19)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	752.271.060,00	2.207.272.992,76	(1.455.001.932,76)	(65,92)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.376.551,00	194.977.338,00	(61.600.787,00)	(31,59)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	557.329.909,00	565.669.715,00	(8.339.806,00)	(1,47)
Dinas Tenaga Kerja	937.910.403,00	179.900.557,00	758.009.846,00	421,35
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	572.882.196,00	802.190.708,00	(229.308.512,00)	(28,59)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	941.964.068,00	1.727.895.655,00	(785.931.587,00)	(45,48)
Dinas Lingkungan Hidup	2.279.500.099,00	1.553.797.868,00	725.702.231,00	46,71
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.792.271.076,00	1.689.687.982,00	102.583.094,00	6,07
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.362.496.614,00	1.302.292.437,00	60.204.177,00	4,62
Dinas Perhubungan	4.369.149.237,54	6.835.219.980,00	(2.466.070.742,46)	(36,08)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	913.082.975,00	794.071.795,00	119.011.180,00	14,99
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	603.121.760,00	347.171.516,00	255.950.244,00	73,72
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.381.389.471,00	955.007.258,00	426.382.213,00	44,65
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.830.114,00	230.552.353,00	(65.722.239,00)	(28,51)
Dinas Perikanan	527.976.437,00	891.711.335,00	(363.734.898,00)	(40,79)
Dinas Perdagangan	138.477.490,00	124.805.309,00	13.672.181,00	10,95
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	242.558.550,00	170.532.700,00	72.025.850,00	42,24
Sekretariat Daerah Kota Dumai	5.084.424.959,00	3.816.387.067,00	1.268.037.892,00	33,23
Sekretariat DPRD	4.197.282.886,00	3.807.588.649,00	389.694.237,00	10,23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	671.055.400,00	622.734.887,00	48.320.513,00	7,76
Badan Pendapatan Daerah	2.019.221.392,00	1.346.404.585,00	672.816.807,00	49,97
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.422.088.480,00	1.423.641.335,00	998.447.145,00	70,13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	513.598.391,00	450.244.802,00	63.353.589,00	14,07
Inspektorat	412.389.360,00	356.704.104,00	55.685.256,00	15,61
Kecamatan Dumai Barat	525.465.013,00	356.095.061,00	169.369.952,00	47,56
Kecamatan Dumai Timur	611.847.159,00	632.249.113,00	(20.401.954,00)	(3,23)
Kecamatan Dumai Selatan	753.132.213,00	716.041.614,00	37.090.599,00	5,18
Kecamatan Dumai Kota	642.004.410,00	1.149.255.958,00	(507.251.548,00)	(44,14)
Kecamatan Bukit Kapur	1.034.489.069,00	727.940.857,00	306.548.212,00	42,11
Kecamatan Medang Kampai	507.778.480,00	762.173.775,00	(254.395.295,00)	(33,38)
Kecamatan Sungai Sembilan	581.165.225,00	515.693.875,00	65.471.350,00	12,70
Jumlah	120.823.186.174,47	81.508.355.976,82	39.314.830.197,65	48,23

Daftar Beban Barang dapat dilihat pada Lampiran 34.

1. Beban Barang Pakai Habis

Tabel 5.6.2.16 Beban Barang Pakai Habis per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.492.087.854,00	5.746.835.993,11	(1.254.748.139,11)	(21,83)
Dinas Kesehatan	35.578.991.418,31	19.021.416.948,84	16.557.574.469,47	87,05
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.855.839.194,62	14.724.581.744,00	23.131.257.450,62	157,09
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.645.087.902,00	287.629.273,00	2.357.458.629,00	819,62
Satuan Polisi Pamong Praja	356.914.386,00	436.253.108,00	(79.338.722,00)	(18,19)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	752.271.060,00	2.207.062.992,76	(1.454.791.932,76)	(65,92)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132.510.651,00	194.977.338,00	(62.466.687,00)	(32,04)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	557.329.909,00	565.459.715,00	(8.129.806,00)	(1,44)
Dinas Tenaga Kerja	937.910.403,00	179.900.557,00	758.009.846,00	421,35
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	572.882.196,00	802.190.708,00	(229.308.512,00)	(28,59)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	911.664.068,00	1.727.895.655,00	(816.231.587,00)	(47,24)
Dinas Lingkungan Hidup	2.279.500.099,00	1.553.797.868,00	725.702.231,00	46,71
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.792.271.076,00	1.689.687.982,00	102.583.094,00	6,07
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.314.981.614,00	1.302.292.437,00	12.689.177,00	0,97

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	2.640.113.845,00	6.806.071.980,00	(4.165.958.135,00)	(61,21)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	911.716.575,00	794.071.795,00	117.644.780,00	14,82
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.322.960,00	347.171.516,00	223.151.444,00	64,28
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.364.728.071,00	955.007.258,00	409.720.813,00	42,90
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.830.114,00	230.552.353,00	(65.722.239,00)	(28,51)
Dinas Perikanan	527.976.437,00	890.894.435,00	(362.917.998,00)	(40,74)
Dinas Perdagangan	137.577.490,00	124.805.309,00	12.772.181,00	10,23
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	242.558.550,00	170.532.700,00	72.025.850,00	42,24
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.995.114.959,00	3.803.115.067,00	1.191.999.892,00	31,34
Sekretariat DPRD	4.197.282.886,00	3.798.709.449,00	398.573.437,00	10,49
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	670.430.400,00	622.734.887,00	47.695.513,00	7,66
Badan Pendapatan Daerah	1.983.712.174,00	1.346.404.585,00	637.307.589,00	47,33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.422.088.480,00	1.423.641.335,00	998.447.145,00	70,13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	513.598.391,00	450.244.802,00	63.353.589,00	14,07
Inspektorat	407.539.360,00	356.704.104,00	50.835.256,00	14,25
Kecamatan Dumai Barat	525.465.013,00	356.095.061,00	169.369.952,00	47,56
Kecamatan Dumai Timur	611.847.159,00	632.249.113,00	(20.401.954,00)	(3,23)
Kecamatan Dumai Selatan	743.860.213,00	697.320.514,00	46.539.699,00	6,67
Kecamatan Dumai Kota	637.674.410,00	1.148.712.358,00	(511.037.948,00)	(44,49)
Kecamatan Bukit Kapur	987.311.889,00	727.940.857,00	259.371.032,00	35,63
Kecamatan Medang Kampai	502.608.480,00	762.173.775,00	(259.565.295,00)	(34,06)
Kecamatan Sungai Sembilan	581.165.225,00	515.693.875,00	65.471.350,00	12,70
Jumlah	116.519.764.911,93	77.400.829.447,71	39.118.935.464,22	50,54

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Tabel 5.6.2.17 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.767.449.607,00	0,00	1.767.449.607,00	100,00
Dinas Kesehatan	480.285.365,00	4.035.725.729,11	(3.555.440.364,11)	(88,10)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	865.900,00	0,00	865.900,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.515.000,00	0,00	47.515.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	210.000,00	(210.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	210.000,00	(210.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	1.729.035.392,54	29.148.000,00	1.699.887.392,54	5.831,92
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.366.400,00	0,00	1.366.400,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.798.800,00	0,00	32.798.800,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	16.661.400,00	0,00	16.661.400,00	100,00
Dinas Perdagangan	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Dinas Perikanan	0,00	816.900,00	(816.900,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	89.310.000,00	13.272.000,00	76.038.000,00	572,92
Sekretariat DPRD	0,00	8.879.200,00	(8.879.200,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	35.509.218,00	0,00	35.509.218,00	100,00
Inspektorat	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	9.272.000,00	18.721.100,00	(9.449.100,00)	(50,47)
Kecamatan Dumai Kota	4.330.000,00	543.600,00	3.786.400,00	696,54
Kecamatan Bukit Kapur	47.177.180,00	0,00	47.177.180,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	100,00
Jumlah	4.303.421.262,54	4.107.526.529,11	195.894.733,43	4,77

b. Beban Jasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
205.797.851.206,05	212.708.424.110,50	(6.910.572.904,45)	(3,25)

Beban Jasa diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah dan juga saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban Jasa Kota Dumai Tahun 2022 terealisasi senilai Rp205.797.851.206,05, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp212.708.424.110,50 mengalami penurunan senilai Rp6.910.572.904,45 atau sebesar 3,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.18 Rincian Beban Jasa Menurut Jenisnya

Beban Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	166.304.708.221,00	178.415.775.002,00	(12.111.066.781,00)	(6,79)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.939.210.125,00	20.639.208.341,50	(699.998.216,50)	(3,39)
Beban Sewa Tanah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.180.106.860,00	2.954.888.260,00	1.225.218.600,00	41,46
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	877.927.837,00	2.215.125.012,00	(1.337.197.175,00)	(60,37)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	290.000.000,00	150.650.000,00	139.350.000,00	92,50
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.847.647.400,00	1.598.788.900,00	248.858.500,00	15,57
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.527.764.598,05	3.544.537.831,00	5.983.226.767,05	168,80
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.770.486.165,00	3.178.450.764,00	(407.964.599,00)	(12,84)
Jumlah	205.797.851.206,05	212.708.424.110,50	(6.910.572.904,45)	(3,25)

Tabel 5.6.2.19 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.862.148.056,00	25.975.172.923,00	(5.113.024.867,00)	(19,68)
Dinas Kesehatan	67.440.813.708,00	84.221.991.126,00	(16.781.177.418,00)	(19,92)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.998.086.315,00	11.345.494.451,00	2.652.591.864,00	23,38
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.356.784.801,00	1.026.571.638,00	330.213.163,00	32,17
Satuan Polisi Pamong Praja	1.530.418.230,00	1.302.644.773,00	227.773.457,00	17,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.046.686.672,00	972.084.345,00	74.602.327,00	7,67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.096.120.000,00	1.160.233.945,00	(64.113.945,00)	(5,53)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.538.933.530,00	1.543.336.087,00	(4.402.557,00)	(0,29)
Dinas Tenaga Kerja	1.090.871.972,00	662.366.200,00	428.505.772,00	64,69
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	948.628.270,00	1.015.416.998,00	(66.788.728,00)	(6,58)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.168.626.245,00	3.198.171.351,00	(29.545.106,00)	(0,92)
Dinas Lingkungan Hidup	8.675.020.548,00	8.138.358.997,00	536.661.551,00	6,59
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	802.722.696,00	1.126.184.580,00	(323.461.884,00)	(28,72)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.526.614.420,00	1.209.899.161,00	316.715.259,00	26,18
Dinas Perhubungan	19.567.482.683,05	17.407.803.937,00	2.159.678.746,05	12,41
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.863.283.623,00	5.221.873.094,00	(358.589.471,00)	(6,87)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	905.990.474,00	772.647.535,00	133.342.939,00	17,26
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.022.353.332,00	1.424.590.196,00	597.763.136,00	41,96
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	578.180.258,00	535.488.085,00	42.692.173,00	7,97
Dinas Perikanan	1.241.869.084,00	1.158.264.926,00	83.604.158,00	7,22
Dinas Perdagangan	1.860.124.448,00	1.670.329.077,00	189.795.371,00	11,36
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.041.418.192,00	959.948.397,00	81.469.795,00	8,49
Sekretariat Daerah Kota Dumai	15.481.200.535,00	11.727.444.406,50	3.753.756.128,50	32,01
Sekretariat DPRD	3.498.981.176,00	3.303.765.042,00	195.216.134,00	5,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.253.224.460,00	1.296.821.000,00	(43.596.540,00)	(3,36)
Badan Pendapatan Daerah	2.797.922.911,00	2.266.126.652,00	531.796.259,00	23,47
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.650.002.949,00	4.068.670.500,00	1.581.332.449,00	38,87

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.741.274.400,00	2.204.618.000,00	(463.343.600,00)	(21,02)
Inspektorat	514.600.300,00	576.952.000,00	(62.351.700,00)	(10,81)
Kecamatan Dumai Barat	2.509.128.149,00	2.046.401.667,00	462.726.482,00	22,61
Kecamatan Dumai Timur	3.480.861.073,00	2.793.000.136,00	687.860.937,00	24,63
Kecamatan Dumai Selatan	2.805.010.655,00	2.349.645.192,00	455.365.463,00	19,38
Kecamatan Dumai Kota	3.163.749.006,00	2.500.652.979,00	663.096.027,00	26,52
Kecamatan Bukit Kapur	2.221.805.714,00	2.109.873.837,00	111.931.877,00	5,31
Kecamatan Medang Kampai	1.298.605.130,00	1.271.179.568,00	27.425.562,00	2,16
Kecamatan Sungai Sembilan	2.218.307.191,00	2.144.401.309,00	73.905.882,00	3,45
Jumlah	205.797.851.206,05	212.708.424.110,50	(6.910.572.904,45)	(3,25)

1. Beban Jasa Kantor

Tabel 5.6.2.20 Rincian Beban Jasa Kantor per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.699.696.281,00	25.390.635.924,00	(4.690.939.643,00)	(18,48)
Dinas Kesehatan	40.110.034.319,00	59.426.098.680,00	(19.316.064.361,00)	(32,50)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.969.308.955,00	7.913.872.491,00	1.055.436.464,00	13,34
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.346.488.627,00	926.571.638,00	419.916.989,00	45,32
Satuan Polisi Pamong Praja	1.523.808.630,00	1.300.314.150,00	223.494.480,00	17,19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.034.016.112,00	965.651.606,00	68.364.506,00	7,08
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.096.120.000,00	1.160.233.945,00	(64.113.945,00)	(5,53)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.483.719.934,00	1.470.461.755,00	13.258.179,00	0,90
Dinas Tenaga Kerja	903.171.028,00	660.690.040,00	242.480.988,00	36,70
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	942.778.270,00	999.016.998,00	(56.238.728,00)	(5,63)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.958.535.045,00	2.723.435.151,00	235.099.894,00	8,63
Dinas Lingkungan Hidup	8.601.644.812,00	8.080.030.595,00	521.614.217,00	6,46
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	802.722.696,00	1.126.184.580,00	(323.461.884,00)	(28,72)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.526.614.420,00	1.204.629.161,00	321.985.259,00	26,73
Dinas Perhubungan	18.097.613.403,00	16.575.854.988,00	1.521.758.415,00	9,18
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.566.622.823,00	5.118.373.094,00	(551.750.271,00)	(10,78)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	905.990.474,00	769.047.535,00	136.942.939,00	17,81
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.812.322.596,00	1.286.617.096,00	525.705.500,00	40,86
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	573.432.476,00	532.688.085,00	40.744.391,00	7,65
Dinas Perikanan	1.066.229.084,00	1.087.381.926,00	(21.152.842,00)	(1,95)
Dinas Perdagangan	1.764.824.448,00	1.640.850.177,00	123.974.271,00	7,56
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.036.694.272,00	955.609.497,00	81.084.775,00	8,49
Sekretariat Daerah Kota Dumai	13.819.049.115,00	10.780.719.889,00	3.038.329.226,00	28,18
Sekretariat DPRD	3.021.047.046,00	2.485.687.541,00	535.359.505,00	21,54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.209.550.000,00	1.288.533.000,00	(78.983.000,00)	(6,13)
Badan Pendapatan Daerah	2.314.165.761,00	2.070.593.652,00	243.572.109,00	11,76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.975.110.649,00	3.510.825.500,00	1.464.285.149,00	41,71
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.069.125.900,00	1.279.648.000,00	(210.522.100,00)	(16,45)
Inspektorat	477.043.300,00	546.577.000,00	(69.533.700,00)	(12,72)
Kecamatan Dumai Barat	2.502.348.336,00	2.042.725.887,00	459.622.449,00	22,50
Kecamatan Dumai Timur	3.480.013.273,00	2.790.900.136,00	689.113.137,00	24,69
Kecamatan Dumai Selatan	2.803.315.055,00	2.348.145.192,00	455.169.863,00	19,38
Kecamatan Dumai Kota	3.141.547.606,00	2.485.057.139,00	656.490.467,00	26,42
Kecamatan Bukit Kapur	2.184.405.714,00	2.082.973.837,00	101.431.877,00	4,87
Kecamatan Medang Kampai	1.294.790.570,00	1.264.737.808,00	30.052.762,00	2,38
Kecamatan Sungai Sembilan	2.190.807.191,00	2.124.401.309,00	66.405.882,00	3,13
Jumlah	166.304.708.221,00	178.415.775.002,00	(12.111.066.781,00)	(6,79)

Daftar Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada Lampiran 35.

2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.6.2.21 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.114.720,00	0,00	3.114.720,00	100,00
Dinas Kesehatan	19.800.340.458,00	20.410.623.927,00	(610.283.469,00)	(2,99)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.635.360,00	1.146.960,00	3.488.400,00	304,14
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.796.174,00	0,00	2.796.174,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.609.600,00	2.330.623,00	4.278.977,00	183,60
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.670.560,00	6.432.739,00	6.237.821,00	96,97
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.913.596,00	1.624.332,00	8.289.264,00	510,32
Dinas Tenaga Kerja	3.895.944,00	1.676.160,00	2.219.784,00	132,43
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.411.200,00	1.411.200,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	41.290.714,00	30.683.402,00	10.607.312,00	34,57
Dinas Perhubungan	1.878.660,00	1.379.700,00	498.960,00	36,16
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	5.447.736,00	0,00	5.447.736,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.723.920,00	4.338.900,00	385.020,00	8,87
Sekretariat Daerah Kota Dumai	19.784.520,00	149.649.517,50	(129.864.997,50)	(86,78)
Sekretariat DPRD	734.130,00	21.297.501,00	(20.563.371,00)	(96,55)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.017.360,00	0,00	1.017.360,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	1.806.300,00	0,00	1.806.300,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	6.779.813,00	3.675.780,00	3.104.033,00	84,45
Kecamatan Dumai Timur	847.800,00	0,00	847.800,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.695.600,00	0,00	1.695.600,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	4.001.400,00	1.995.840,00	2.005.560,00	100,49
Kecamatan Medang Kampai	3.814.560,00	941.760,00	2.872.800,00	305,05
Jumlah	19.939.210.125,00	20.639.208.341,50	(699.998.216,50)	(3,39)

3. Beban Sewa Tanah

Tabel 5.6.2.22 Beban Sewa Tanah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
Jumlah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00

Beban Sewa Tanah ini merupakan sewa Rumah Tunggu untuk kelahiran yang beralamat di Jl. Tegalega Dumai

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.23 Beban Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	82.300.000,00	60.121.260,00	22.178.740,00	36,89
Dinas Kesehatan	129.815.460,00	157.150.000,00	(27.334.540,00)	(17,39)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.802.752.000,00	1.968.464.000,00	834.288.000,00	42,38
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45.300.000,00	61.450.000,00	(16.150.000,00)	(26,28)
Dinas Tenaga Kerja	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	106.900.000,00	70.675.000,00	36.225.000,00	51,26
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.645.000,00	(3.645.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	390.000,00	(390.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.000.000,00	31.500.000,00	(30.500.000,00)	(96,83)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	81.127.000,00	26.900.000,00	54.227.000,00	201,59
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	150.000,00	1.400.000,00	(1.250.000,00)	(89,29)
Dinas Perikanan	19.700.000,00	47.100.000,00	(27.400.000,00)	(58,17)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	833.190.000,00	423.075.000,00	410.115.000,00	96,94
Sekretariat DPRD	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.567.100,00	8.288.000,00	(720.900,00)	(8,70)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	38.205.300,00	32.530.000,00	5.675.300,00	17,45
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Timur	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	7.200.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	(5,26)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Jumlah	4.180.106.860,00	2.954.888.260,00	1.225.218.600,00	41,46

5. Beban Jasa Sewa Gedung

Tabel 5.6.2.24 Beban Jasa Sewa Gedung per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.037.055,00	422.010.000,00	(364.972.945,00)	(86,48)
Dinas Kesehatan	139.800.000,00	1.374.670.012,00	(1.234.870.012,00)	(89,83)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	22.855.000,00	0,00	22.855.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.350.000,00	14.900.000,00	(13.550.000,00)	(90,94)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.150.000,00	41.050.000,00	(28.900.000,00)	(70,40)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.880.000,00	(4.880.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	162.000.000,00	60.000.000,00	102.000.000,00	170,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	47.260.000,00	2.400.000,00	44.860.000,00	1.869,17
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.597.782,00	1.400.000,00	3.197.782,00	228,41
Dinas Perikanan	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	265.809.500,00	115.615.000,00	150.194.500,00	129,91
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.987.000,00	0,00	59.987.000,00	100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.626.500,00	106.700.000,00	(73.073.500,00)	(68,49)
Kecamatan Bukit Kapur	37.400.000,00	26.900.000,00	10.500.000,00	39,03
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	877.927.837,00	2.215.125.012,00	(1.337.197.175,00)	(60,37)

6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.25 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	566,67
Dinas Kesehatan	3.000.000,00	10.500.000,00	(7.500.000,00)	(71,43)
Dinas Sosial	0,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	200,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	245.000.000,00	122.400.000,00	122.600.000,00	100,16
Sekretariat DPRD	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	290.000.000,00	150.650.000,00	139.350.000,00	92,50

7. Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Tabel 5.6.2.26 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	99.800.000,00	0,00	99.800.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.617.100.000,00	1.456.011.000,00	161.089.000,00	11,06
Dinas Lingkungan Hidup	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	100,00
Dinas Sosial	0,00	5.550.000,00	(5.550.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	17.779.000,00	(17.779.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0,00	79.970.000,00	(79.970.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	95.300.000,00	29.478.900,00	65.821.100,00	223,28
Sekretariat Daerah Kota Dumai	10.367.400,00	10.000.000,00	367.400,00	3,67
Inspektorat	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00
Jumlah	1.847.647.400,00	1.598.788.900,00	248.858.500,00	15,57

8. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.6.2.27 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	6.555.725.328,00	2.403.828.482,00	4.151.896.846,00	172,72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	598.290.000,00	0,00	598.290.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	79.750.000,00	0,00	79.750.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89.630.000,00	0,00	89.630.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	1.224.361.620,05	570.290.249,00	654.071.371,05	114,69
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	223.660.800,00	0,00	223.660.800,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	67.696.000,00	28.703.100,00	38.992.900,00	135,85
Dinas Perikanan	0,00	13.783.000,00	(13.783.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	288.450.850,00	162.533.000,00	125.917.850,00	77,47
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	395.200.000,00	265.400.000,00	129.800.000,00	48,91
Kecamatan Dumai Kota	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Jumlah	9.527.764.598,05	3.544.537.831,00	5.983.226.767,05	168,80

9. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Tabel 5.6.2.28 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)

10. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.6.2.29 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	99.405.739,00	(99.405.739,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	542.298.143,00	439.120.025,00	103.178.118,00	23,50
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	361.600.000,00	(361.600.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.550.022,00	24000000,00	(12.449.978,00)	(51,87)
Dinas Perhubungan	81.629.000,00	182.500.000,00	(100.871.000,00)	(55,27)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	72.000.000,00	67.000.000,00	5.000.000,00	7,46
Dinas Perikanan	155.940.000,00	0,00	155.940.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	288.000.000,00	125.985.000,00	162.015.000,00	128,60
Sekretariat DPRD	464.000.000,00	796.780.000,00	(332.780.000,00)	(41,77)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	35.090.000,00	0,00	35.090.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	192.000.000,00	33.000.000,00	159.000.000,00	481,82
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	181.500.000,00	259.915.000,00	(78.415.000,00)	(30,17)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	638.522.000,00	753.270.000,00	(114.748.000,00)	(15,23)
Inspektorat	32.457.000,00	30.375.000,00	2.082.000,00	6,85
Kecamatan Medang Kampai	0,00	5500000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
Jumlah	2.770.486.165,00	3.178.450.764,00	(407.964.599,00)	(12,84)

c. **Beban Pemeliharaan**

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
48.850.772.485,57	36.825.902.971,70	12.024.869.513,87	32,65

Beban Pemeliharaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Pemeliharaan selama Tahun 2022 senilai Rp48.850.772.485,57, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp36.825.902.971,70 mengalami kenaikan senilai Rp12.024.869.513,87 atau sebesar 32,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.30 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	528.442.173,00	50.286.500,00	478.155.673,00	950,86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.019.310.782,95	17.185.126.089,00	1.834.184.693,95	10,67
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	6.586.920.664,06	5.386.815.382,70	1.200.105.281,36	22,28
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.705.098.865,56	14.016.890.000,00	8.688.208.865,56	61,98
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00	186.785.000,00	(175.785.000,00)	(94,11)
Jumlah	48.850.772.485,57	36.825.902.971,70	12.024.869.513,87	32,65

Tabel 5.6.2.30.a Perbandingan Beban Pemeliharaan Berdasarkan Timbulnya Beban

a. **Beban Pemeliharaan Tanah**

Pemeliharaan Tanah	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
2.446.840.139,69	0,00	29.021.800,00	(1.947.419.766,69)	528.442.173,00
Jumlah	0,00	29.021.800,00	(1.947.419.766,69)	528.442.173,00

b. **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
19.048.947.782,95	0,00	0,00	(29.637.000,00)	19.019.310.782,95
19.048.947.782,95	0,00	0,00	(29.637.000,00)	19.019.310.782,95

c. **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
12.356.427.610,99	(192.093.750,00)	149.953.000,00	(5.727.366.196,93)	6.586.920.664,06
12.356.427.610,99	(192.093.750,00)	149.953.000,00	(5.727.366.196,93)	6.586.920.664,06

d. **Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
23.148.118.865,56	0,00	0,00	(443.020.000,00)	22.705.098.865,56
23.148.118.865,56	0,00	0,00	(443.020.000,00)	22.705.098.865,56

e. **Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00

Tabel 5.6.2.31 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.955.500,00	203.209.700,00	7.745.800,00	3,81
Dinas Kesehatan	4.370.270.202,90	2.100.985.615,74	2.269.284.587,16	108,01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.117.080.101,00	13.535.818.363,00	10.581.261.738,00	78,17
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	196.323.440,00	187.751.613,00	8.571.827,00	4,57
Satuan Polisi Pamong Praja	275.274.000,00	302.431.400,00	(27.157.400,00)	(8,98)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312.985.055,00	417.135.063,00	(104.150.008,00)	(24,97)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109.622.160,00	125.086.129,00	(15.463.969,00)	(12,36)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	159.930.761,00	141.830.316,00	18.100.445,00	12,76

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Tenaga Kerja	220.269.767,00	160.390.300,00	59.879.467,00	37,33
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.113.000,00	176.262.900,00	(69.149.900,00)	(39,23)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	734.386.198,00	1.445.801.420,00	(711.415.222,00)	(49,21)
Dinas Lingkungan Hidup	3.968.848.384,00	3.811.343.107,00	157.505.277,00	4,13
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	169.878.000,00	241.062.350,00	(71.184.350,00)	(29,53)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166.841.799,00	138.900.044,00	27.941.755,00	20,12
Dinas Perhubungan	6.107.723.008,67	3.991.037.490,96	2.116.685.517,71	53,04
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	177.434.600,00	286.279.678,00	(108.845.078,00)	(38,02)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177.966.476,00	170.599.681,00	7.366.795,00	4,32
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	130.647.500,00	385.205.850,00	(254.558.350,00)	(66,08)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	280.731.600,00	322.287.600,00	(41.556.000,00)	(12,89)
Dinas Perikanan	273.855.830,00	203.188.099,00	70.667.731,00	34,78
Dinas Perdagangan	152.115.500,00	204.046.380,00	(51.930.880,00)	(25,45)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	192.928.500,00	168.241.500,00	24.687.000,00	14,67
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.687.215.653,00	1.670.604.320,00	16.611.333,00	0,99
Sekretariat DPRD	847.816.237,00	556.173.497,00	291.642.740,00	52,44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	473.696.960,00	321.064.058,00	152.632.902,00	47,54
Badan Pendapatan Daerah	503.607.898,00	413.535.357,00	90.072.541,00	21,78
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.784.300,00	557.847.350,00	(57.063.050,00)	(10,23)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275.182.750,00	248.641.800,00	26.540.950,00	10,67
Inspektorat	604.957.000,00	195.241.550,00	409.715.450,00	209,85
Kecamatan Dumai Barat	139.565.962,00	94.781.800,00	44.784.162,00	47,25
Kecamatan Dumai Timur	195.456.335,00	158.654.880,00	36.801.455,00	23,20
Kecamatan Dumai Selatan	374.425.411,00	413.047.925,00	(38.622.514,00)	(9,35)
Kecamatan Dumai Kota	352.876.525,00	2.349.821.310,00	(1.996.944.785,00)	(84,98)
Kecamatan Bukit Kapur	69.169.000,00	413.823.850,00	(344.654.850,00)	(83,29)
Kecamatan Medang Kampai	164.152.350,00	567.824.200,00	(403.671.850,00)	(71,09)
Kecamatan Sungai Sembilan	48.684.722,00	145.946.475,00	(97.261.753,00)	(66,64)
Jumlah	48.850.772.485,57	36.825.902.971,70	12.024.869.513,87	32,65

1. Beban Pemeliharaan Tanah

Tabel 5.6.2.32 Beban Pemeliharaan Tanah per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.885.000,00	0,00	99.885.000,00	100
Dinas Lingkungan Hidup	399.535.373,00	0,00	399.535.373,00	100
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0,00	50.286.500,00	(50.286.500,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.021.800,00	0,00	29.021.800,00	100
Jumlah	528.442.173,00	50.286.500,00	478.155.673,00	950,86

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.33 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.955.500,00	203.209.700,00	7.745.800,00	3,81
Dinas Kesehatan	1.316.746.750,00	962.908.230,00	353.838.520,00	36,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.268.329.101,00	1.451.535.363,00	(183.206.262,00)	(12,62)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	196.323.440,00	187.751.613,00	8.571.827,00	4,57
Satuan Polisi Pamong Praja	275.274.000,00	289.886.400,00	(14.612.400,00)	(5,04)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312.985.055,00	417.135.063,00	(104.150.008,00)	(24,97)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109.622.160,00	125.086.129,00	(15.463.969,00)	(12,36)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	159.930.761,00	137.775.000,00	22.155.761,00	16,08
Dinas Tenaga Kerja	220.269.767,00	160.390.300,00	59.879.467,00	37,33

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107.113.000,00	143.326.900,00	(36.213.900,00)	(25,27)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.111.198,00	291.875.000,00	8.236.198,00	2,82
Dinas Lingkungan Hidup	3.548.713.011,00	3.654.538.107,00	(105.825.096,00)	(2,90)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	169.878.000,00	241.062.350,00	(71.184.350,00)	(29,53)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166.841.799,00	138.900.044,00	27.941.755,00	20,12
Dinas Perhubungan	4.800.889.661,95	3.179.209.159,00	1.621.680.502,95	51,01
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	167.434.600,00	206.779.678,00	(39.345.078,00)	(19,03)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177.966.476,00	170.599.681,00	7.366.795,00	4,32
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	130.647.500,00	190.750.350,00	(60.102.850,00)	(31,51)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230.975.850,00	222.362.600,00	8.613.250,00	3,87
Dinas Perikanan	79.628.950,00	71.811.550,00	7.817.400,00	10,89
Dinas Perdagangan	139.925.500,00	166.858.600,00	(26.933.100,00)	(16,14)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	148.449.500,00	161.841.500,00	(13.392.000,00)	(8,27)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.687.215.653,00	1.163.051.720,00	524.163.933,00	45,07
Sekretariat DPRD	412.491.137,00	390.512.497,00	21.978.640,00	5,63
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	249.131.960,00	321.064.058,00	(71.932.098,00)	(22,40)
Badan Pendapatan Daerah	492.607.898,00	413.535.357,00	79.072.541,00	19,12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	360.262.500,00	557.847.350,00	(197.584.850,00)	(35,42)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275.182.750,00	248.641.800,00	26.540.950,00	10,67
Inspektorat	251.244.000,00	195.241.550,00	56.002.450,00	28,68
Kecamatan Dumai Barat	139.565.962,00	94.781.800,00	44.784.162,00	47,25
Kecamatan Dumai Timur	195.456.335,00	158.654.880,00	36.801.455,00	23,20
Kecamatan Dumai Selatan	232.099.411,00	243.277.925,00	(11.178.514,00)	(4,59)
Kecamatan Dumai Kota	253.035.525,00	236.199.310,00	16.836.215,00	7,13
Kecamatan Bukit Kapur	69.169.000,00	99.153.850,00	(29.984.850,00)	(30,24)
Kecamatan Medang Kampai	114.152.350,00	231.624.200,00	(117.471.850,00)	(50,72)
Kecamatan Sungai Sembilan	48.684.722,00	55.946.475,00	(7.261.753,00)	(12,98)
Jumlah	19.019.310.782,95	17.185.126.089,00	1.834.184.693,95	10,67

3. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

Tabel 5.6.2.34 Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	100,00
Dinas Kesehatan	2.874.023.452,90	942.741.385,74	1.931.282.067,16	204,86
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517.854.000,00	1.102.043.000,00	(584.189.000,00)	(53,01)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	12.545.000,00	(12.545.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	4.055.316,00	(4.055.316,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	32.936.000,00	(32.936.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	334.390.000,00	1.153.926.420,00	(819.536.420,00)	(71,02)
Dinas Lingkungan Hidup	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	1.112.131.481,16	413.926.331,96	698.205.149,20	168,68
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00	79.500.000,00	(69.500.000,00)	(87,42)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	144.169.000,00	(144.169.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.755.750,00	99.925.000,00	(50.169.250,00)	(50,21)
Dinas Perikanan	194.226.880,00	131.376.549,00	62.850.331,00	47,84
Dinas Perdagangan	12.190.000,00	37.187.780,00	(24.997.780,00)	(67,22)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	44.479.000,00	6.400.000,00	38.079.000,00	594,98
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	507.552.600,00	(507.552.600,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	435.325.100,00	165.661.000,00	269.664.100,00	162,78
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	224.565.000,00	0,00	224.565.000,00	100,00

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	100,00
Inspektorat	353.713.000,00	0,00	353.713.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	142.326.000,00	0,00	142.326.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	99.841.000,00	0,00	99.841.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	314.670.000,00	(314.670.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	50.000.000,00	148.200.000,00	(98.200.000,00)	(66,26)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	6.586.920.664,06	5.386.815.382,70	1.200.105.281,36	22,28

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.35 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	179.500.000,00	195.336.000,00	(15.836.000,00)	(8,11)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.330.897.000,00	10.982.240.000,00	11.348.657.000,00	103,34
Dinas Perhubungan	194.701.865,56	397.902.000,00	(203.200.134,44)	(51,07)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	169.770.000,00	(169.770.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	2.083.642.000,00	(2.083.642.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	188.000.000,00	(188.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	22.705.098.865,56	14.016.890.000,00	8.688.208.865,56	61,98

5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.36 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	156.805.000,00	(156.805.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	29.980.000,00	(29.980.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Jumlah	11.000.000,00	186.785.000,00	(175.785.000,00)	(94,11)

d. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
52.881.607.692,00	45.106.900.776,00	7.774.706.916,00	17,24

Beban Perjalanan Dinas diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi senilai Rp52.881.607.692,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp45.106.900.776,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.774.706.916,00 atau sebesar 17,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.37 Tabel Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.881.607.692,00	45.106.900.776,00	7.774.706.916,00	17,24
Jumlah	52.881.607.692,00	45.106.900.776,00	7.774.706.916,00	17,24

Tabel 5.6.2.38 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.497.936.416,00	1.437.340.205,00	60.596.211,00	4,22
Dinas Kesehatan	6.087.392.448,00	6.761.387.719,00	(673.995.271,00)	(9,97)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.402.169.530,00	1.800.708.626,00	(398.539.096,00)	(22,13)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	920.830.671,00	385.279.335,00	535.551.336,00	139,00
Satuan Polisi Pamong Praja	434.356.003,00	411.540.794,00	22.815.209,00	5,54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	823.181.388,00	553.785.645,00	269.395.743,00	48,65
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	384.223.722,00	551.225.800,00	(167.002.078,00)	(30,30)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	637.696.744,00	501.394.967,00	136.301.777,00	27,18
Dinas Tenaga Kerja	331.863.544,00	228.307.125,00	103.556.419,00	45,36

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	593.326.231,00	505.368.785,00	87.957.446,00	17,40
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.806.171.959,00	2.590.769.463,00	(784.597.504,00)	(30,28)
Dinas Lingkungan Hidup	804.028.349,00	666.656.919,00	137.371.430,00	20,61
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	270.686.504,00	414.917.360,00	(144.230.856,00)	(34,76)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.034.672.258,00	1.054.855.934,00	(20.183.676,00)	(1,91)
Dinas Perhubungan	1.568.512.288,00	1.427.920.198,00	140.592.090,00	9,85
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	775.229.349,00	889.103.131,00	(113.873.782,00)	(12,81)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	594.175.819,00	267.676.280,00	326.499.539,00	121,98
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	435.947.341,00	420.102.488,00	15.844.853,00	3,77
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	285.141.242,00	438.219.060,00	(153.077.818,00)	(34,93)
Dinas Perikanan	469.604.994,00	368.278.720,00	101.326.274,00	27,51
Dinas Perdagangan	294.189.414,00	421.823.101,00	(127.633.687,00)	(30,26)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	238.691.495,00	309.075.610,00	(70.384.115,00)	(22,77)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	6.137.159.981,00	5.166.005.977,00	971.154.004,00	18,80
Sekretariat DPRD	12.882.813.201,00	7.809.911.425,00	5.072.901.776,00	64,95
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.603.306.625,00	1.295.820.908,00	307.485.717,00	23,73
Badan Pendapatan Daerah	2.301.970.176,00	1.254.022.886,00	1.047.947.290,00	83,57
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.370.935.000,00	3.004.366.337,00	1.366.568.663,00	45,49
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.371.850,00	979.839.350,00	(21.467.500,00)	(2,19)
Inspektorat	2.003.049.000,00	2.105.963.560,00	(102.914.560,00)	(4,89)
Kecamatan Dumai Barat	97.450.384,00	119.304.948,00	(21.854.564,00)	(18,32)
Kecamatan Dumai Timur	97.096.400,00	118.211.000,00	(21.114.600,00)	(17,86)
Kecamatan Dumai Selatan	155.586.800,00	240.824.700,00	(85.237.900,00)	(35,39)
Kecamatan Dumai Kota	141.390.798,00	196.940.680,00	(55.549.882,00)	(28,21)
Kecamatan Bukit Kapur	167.739.210,00	222.635.037,00	(54.895.827,00)	(24,66)
Kecamatan Medang Kampai	135.464.314,00	119.511.227,00	15.953.087,00	13,35
Kecamatan Sungai Sembilan	139.246.244,00	67.805.476,00	71.440.768,00	105,36
Jumlah	52.881.607.692,00	45.106.900.776,00	7.774.706.916,00	17,24

Tabel 5.6.2.39 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.461.250.602,00	33.992.198.176,00	7.469.052.426,00	21,97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.925.999.090,00	10.719.097.600,00	206.901.490,00	1,93
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	453.618.000,00	246.450.000,00	207.168.000,00	84,06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.740.000,00	149.155.000,00	(108.415.000,00)	(72,69)
Jumlah	52.881.607.692,00	45.106.900.776,00	7.774.706.916,00	17,24

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
13.139.900.300,00	6.088.260.000,00	7.051.640.300,00	115,82

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan Beban periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi senilai Rp13.139.900.300,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp6.088.260.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.051.640.300,00 atau sebesar 115,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.40 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.977.300.300,00	6.088.260.000,00	6.889.040.300,00	113,15
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162.600.000,00	0,00	162.600.000,00	100,00
Jumlah	13.139.900.300,00	6.088.260.000,00	7.051.640.300,00	115,82

Tabel 5.6.2.41 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68.500.000,00	106.400.000,00	(37.900.000,00)	(35,62)
Dinas Kesehatan	76.150.000,00	10.500.000,00	65.650.000,00	625,24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.564.000.000,00	0,00	4.564.000.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.960.000.000,00	4.150.000.000,00	2.810.000.000,00	67,71
Satuan Polisi Pamong Praja	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	138.600.000,00	344.100.000,00	(205.500.000,00)	(59,72)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.750.000,00	10.480.000,00	(4.730.000,00)	(45,13)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	7.530.000,00	(7.530.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	855.000.000,00	(855.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	112.110.300,00	0,00	112.110.300,00	100,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.940.000,00	4.000.000,00	4.940.000,00	123,50
Sekretariat Daerah Kota Dumai	975.500.000,00	576.500.000,00	399.000.000,00	69,21
Kecamatan Dumai Barat	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	17.000.000,00	(17.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	23.250.000,00	1.500.000,00	21.750.000,00	1.450,00
Jumlah	12.977.300.300,00	6.088.260.000,00	6.889.040.300,00	113,15

Tabel 5.6.2.42 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	162.600.000,00	0,00	162.600.000,00	100,00
Jumlah	162.600.000,00	0,00	162.600.000,00	100,00

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Tabel 5.6.2.43 Beban Barang dan Jasa BOS

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31.947.871.800,00	29.942.171.389,00	2.005.700.411,00	6,70
Jumlah	31.947.871.800,00	29.942.171.389,00	2.005.700.411,00	6,70

Beban Barang dan Jasa BOS senilai Rp31.947.871.800,00 ini merupakan Beban Barang dan Jasa BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp22.480.447.836,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Senilai Rp9.467.423.964,00.

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.6.2.44 Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	60.568.783.511,48	88.126.828.207,13	(27.558.044.695,65)	(31,27)
Jumlah	60.568.783.511,48	88.126.828.207,13	(27.558.044.695,65)	(31,27)

Tabel 5.6.2.45 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Blud Puskesmas Dumai Kota	1.140.379.200,00	828.445.189,00	311.934.011,00	37,65
Blud Puskesmas Dumai Barat	598.082.667,00	580.418.448,00	17.664.219,00	3,04
Blud Puskesmas Bukit Kapur	723.602.396,00	644.854.627,00	78.747.769,00	12,21
Blud Puskesmas Sungai Sembilan	1.461.738.475,00	1.283.338.546,00	178.399.929,00	13,90
Blud Puskesmas Medang Kampai	533.358.167,00	506.820.774,00	26.537.393,00	5,24
Blud Puskesmas Bumi Ayu	645.332.795,00	551.375.607,00	93.957.188,00	17,04
Blud Puskesmas Bukit Timah	349.427.829,00	320.576.950,00	28.850.879,00	9,00
Blud Puskesmas Jayamukti	1.374.894.745,00	1.294.250.001,00	80.644.744,00	6,23
Blud Puskesmas Purnama	639.989.834,00	572.278.477,00	67.711.357,00	11,83
Blud Puskesmas Bukit Kayu Kapur	981.033.243,00	809.582.682,00	171.450.561,00	21,18
Upt Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	109.475.737,00	30.966.950,00	78.508.787,00	253,52
Blud RSUD	52.011.468.423,48	80.703.919.956,13	(28.692.451.532,65)	(35,55)
Jumlah	60.568.783.511,48	88.126.828.207,13	(27.558.044.695,65)	(31,27)

3. Beban Bunga

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00

Beban Bunga diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Bunga per 31 Desember 2022 senilai Rp1.060.377.070,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.46 Beban Bunga Tahun 2022

Beban Bunga	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00
Jumlah	1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00

Beban Bunga ini merupakan Beban Yang Timbul dari konsumsi aset Senilai Rp.1.060.377.070,00

a. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Tabel 5.6.2.47 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00
Jumlah	1.060.377.070,00	0,00	1.060.377.070,00	100,00

4. Beban Hibah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
42.565.151.769,26	15.192.998.932,38	27.372.152.836,88	180,16

Beban Hibah diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2022 senilai Rp42.565.151.769,26, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp15.192.998.932,38 maka mengalami kenaikan senilai Rp27.372.152.836,88 atau sebesar 180,16% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi beban Hibah ini merupakan Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai kemudian dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya peraturan terbaru tentang Tapal Batas Wilayah. Beban Hibah ini merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset.

Tabel 5.6.2.48 Rincian Beban Hibah Tahun 2022

Beban Hibah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	20.805.043.143,96	1.642.170.682,38	19.162.872.461,58	1.166,92
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.146.225.835,15	765.000.000,00	4.381.225.835,15	572,71
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.294.319.990,15	10.466.265.450,00	3.828.054.540,15	36,58
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00
Jumlah	42.565.151.769,26	15.192.998.932,38	27.372.152.836,88	180,16

Tabel 5.6.2.49 Beban Hibah LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.215.679.734,09	3.291.450.000,00	4.924.229.734,09	149,61
Dinas Kesehatan	200.000.000,00	600.000.000,00	(400.000.000,00)	(66,67)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.471.608.924,14	775.770.682,38	6.695.838.241,76	863,12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158.825.350,00	0,00	158.825.350,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.869.562.800,00	2.639.562.800,00	230.000.000,00	8,71
Dinas Sosial	0,00	155.000.000,00	(155.000.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.517.125.951,00	1.216.098.150,00	1.301.027.801,00	106,98
Dinas Perhubungan	8.881.963.186,01	466.400.000,00	8.415.563.186,01	1.804,37
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.227.097.182,00	2.000.000.000,00	(772.902.818,00)	(38,65)
Dinas Perikanan	547.560.000,00	418.717.300,00	128.842.700,00	30,77
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8.444.273.850,15	3.630.000.000,00	4.814.273.850,15	132,62
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.031.454.791,87	0,00	2.031.454.791,87	100,00
Jumlah	42.565.151.769,26	15.192.998.932,38	27.372.152.836,88	180,16

Daftar Beban Hibah dapat dilihat pada Lampiran 36.

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.6.2.50 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.679.351.973,08	775.770.682,38	5.903.581.290,70	761,00
Dinas Perhubungan	8.881.963.186,01	466.400.000,00	8.415.563.186,01	1.804,37
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.042.265.993,00	0,00	4.042.265.993,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.201.461.991,87	0,00	1.201.461.991,87	100,00
Jumlah	20.805.043.143,96	1.642.170.682,38	19.162.872.461,58	1.166,92

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 5.6.2.51 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.195.143.534,09	0,00	4.195.143.534,09	100,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	792.256.951,06	0,00	792.256.951,06	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158.825.350,00	0,00	158.825.350,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0,00	765.000.000	(765.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	5.146.225.835,15	765.000.000,00	4.381.225.835,15	572,71

3. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.6.2.52 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.020.536.200,00	3.291.450.000,00	729.086.200,00	22,15
Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	550.000.000,00	320.000.000,00	230.000.000,00	71,88
Dinas Sosial	0,00	155.000.000,00	(155.000.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.517.125.951,00	1.216.098.150,00	1.301.027.801,00	106,98
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	1.227.097.182,00	2.000.000.000,00	(772.902.818,00)	(38,65)
Dinas Perikanan	547.560.000,00	418.717.300,00	128.842.700,00	30,77
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.402.007.857,15	2.865.000.000,00	1.537.007.857,15	53,65
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	829.992.800,00	0,00	829.992.800,00	100,00
Jumlah	14.294.319.990,15	10.466.265.450,00	3.828.054.540,15	36,58

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tabel 5.6.2.53 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00
Jumlah	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00

5. Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
12.911.808.100,00	0,00	12.911.808.100,00	100,00

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 senilai Rp12.911.808.100,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.911.808.100,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Beban Bantuan Sosial ini merupakan merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset senilai Rp12.911.807.100

Tabel 5.6.2.54 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2022

Beban Bansos	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	12.438.808.100,00	0,00	12.438.808.100,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00	100,00
Jumlah	12.911.808.100,00	0,00	12.911.808.100,00	100,00

a. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

Tabel 5.6.2.55 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9.744.000.000,00	0,00	9.744.000.000,00	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	459.600.000,00	0,00	459.600.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	237.000.000,00	0,00	237.000.000,00	100,00
Dinas Perikanan	664.208.100,00	0,00	664.208.100,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.334.000.000,00	0,00	1.334.000.000,00	100,00
Jumlah	12.438.808.100,00	0,00	12.438.808.100,00	100,00

b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.6.2.56 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00	100,00
Jumlah	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00	100,00

6 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
12.458.576.669,68	20.948.535.335,61	(8.489.958.665,93)	(40,53)

Beban Penyisihan Piutang diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyisihan Piutang berasal dari piutang sebelum Tahun 2022 dan pada Tahun 2021 yang disisihkan sesuai dengan kualifikasi umur piutang sesuai Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 senilai Rp12.458.576.669,68 dan Tahun 2021 senilai Rp20.948.535.335,61 jika dibandingkan maka mengalami penurunan senilai Rp8.489.958.665,93 atau sebesar 40,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.57 Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	8.510.355.764,23	6.792.259.475,61	1.718.096.288,62	25,29
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	242.170.324,55	112.078.364,50	130.091.960,05	116,07
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.706.050.580,90	14.044.197.495,50	(10.338.146.914,60)	(73,61)
Jumlah	12.458.576.669,68	20.948.535.335,61	(8.489.958.665,93)	(40,53)

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 5.6.2.58 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	8.510.355.764,23	6.792.259.475,61	1.718.096.288,62	25,29
Jumlah	8.510.355.764,23	6.792.259.475,61	1.718.096.288,62	25,29

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel 5.6.2.59 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	242.170.324,55	112.078.364,50	130.091.960,05	116,07
Jumlah	242.170.324,55	112.078.364,50	130.091.960,05	116,07

c. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 5.6.2.60 Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	3.706.050.580,90	14.044.197.495,50	(10.338.146.914,60)	(73,61)
Jumlah	3.706.050.580,90	14.044.197.495,50	(10.338.146.914,60)	(73,61)

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
182.181.533.049,42	181.734.858.783,00	446.674.266,42	0,25

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum Tahun 2022 dan Belanja Modal pada Tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada posisi per 31 Desember 2022 senilai Rp182.181.533.049,42 dan Tahun 2021 senilai Rp181.734.858.783,00 jika dibandingkan maka mengalami kenaikan senilai Rp446.674.266,42 atau sebesar 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.61 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Penyusutan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.268.000.151,22	73.048.688.992,66	2.219.311.158,56	3,04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.701.131.584,01	18.996.054.086,73	705.077.497,28	3,71
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	86.567.345.964,48	88.923.896.456,47	(2.356.550.491,99)	(2,65)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	149.636.587,21	287.079.762,14	(137.443.174,93)	(47,88)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	495.418.762,50	479.139.485,00	16.279.277,50	3,40
Jumlah	182.181.533.049,42	181.734.858.783,00	446.674.266,42	0,25

Tabel 5.6.2.62 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.441.833.839,74	23.179.679.538,32	262.154.301,42	1,13
Dinas Kesehatan	40.525.983.434,05	40.161.694.442,03	364.288.992,02	0,91
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.235.361.582,56	85.069.399.572,00	(2.834.037.989,44)	(3,33)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.624.495.903,31	2.597.720.603,87	26.775.299,44	1,03
Satuan Polisi Pamong Praja	177.518.995,87	220.821.861,03	(43.302.865,16)	(19,61)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.821.341.629,65	2.496.646.528,22	2.324.695.101,43	93,11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.967.901,43	88.818.849,83	(51.850.948,40)	(58,38)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	267.839.857,22	206.742.848,15	61.097.009,07	29,55
Dinas Tenaga Kerja	218.587.451,20	239.581.702,51	(20.994.251,31)	(8,76)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117.993.360,65	146.784.725,64	(28.791.364,99)	(19,61)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.037.114.957,16	944.170.852,19	92.944.104,97	9,84
Dinas Lingkungan Hidup	1.787.161.870,27	1.912.461.407,30	(125.299.537,03)	(6,55)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	273.018.224,12	214.164.049,12	58.854.175,00	27,48
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	435.509.923,94	412.629.945,51	22.879.978,43	5,54
Dinas Perhubungan	6.209.209.384,98	6.814.551.384,30	(605.341.999,32)	(8,88)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	841.703.526,17	910.447.795,80	(68.744.269,63)	(7,55)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	585.762.724,29	436.422.769,36	149.339.954,93	34,22
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	927.002.728,54	873.607.904,83	53.394.823,71	6,11
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	601.220.070,32	509.222.571,10	91.997.499,22	18,07
Dinas Perikanan	297.374.867,33	285.201.898,48	12.172.968,85	4,27
Dinas Perdagangan	702.164.132,07	741.834.815,99	(39.670.683,92)	(5,35)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	168.385.702,50	236.003.943,03	(67.618.240,53)	(28,65)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.423.386.788,34	4.865.304.670,04	(441.917.881,70)	(9,08)
Sekretariat DPRD	783.601.346,91	786.749.783,34	(3.148.436,43)	(0,40)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	457.417.087,96	536.332.871,04	(78.915.783,08)	(14,71)
Badan Pendapatan Daerah	940.105.133,04	1.004.688.528,38	(64.583.395,34)	(6,43)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.744.296.923,57	1.808.034.303,44	(63.737.379,87)	(3,53)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	231.581.869,46	231.318.119,26	263.750,20	0,11
Inspektorat	466.994.743,02	503.480.416,84	(36.485.673,82)	(7,25)
Kecamatan Dumai Barat	717.285.129,74	483.179.032,59	234.106.097,15	48,45
Kecamatan Dumai Timur	690.846.322,96	369.532.208,53	321.314.114,43	86,95
Kecamatan Dumai Selatan	822.311.091,04	604.171.431,40	218.139.659,64	36,11
Kecamatan Dumai Kota	405.679.597,01	268.621.283,78	137.058.313,23	51,02
Kecamatan Bukit Kapur	822.759.102,36	559.947.533,43	262.811.568,93	46,94

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Medang Kampai	619.072.769,14	489.991.118,07	129.081.651,07	26,34
Kecamatan Sungai Sembilan	722.643.077,50	524.897.474,25	197.745.603,25	37,67
Jumlah	182.181.533.049,42	181.734.858.783,00	446.674.266,42	0,25

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.63 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.983.774.879,13	14.350.035.560,02	633.739.319,11	4,42
Dinas Kesehatan	35.405.570.584,86	35.656.792.973,35	(251.222.388,49)	(0,70)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.499.590.092,88	2.396.071.270,28	103.518.822,60	4,32
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	194.354.430,72	222.155.671,43	(27.801.240,71)	(12,51)
Satuan Polisi Pamong Praja	154.270.923,60	200.156.232,15	(45.885.308,55)	(22,92)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.756.438.314,24	2.433.742.582,81	2.322.695.731,43	95,44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.967.901,43	88.818.849,83	(51.850.948,40)	(58,38)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	171.303.578,40	188.588.472,15	(17.284.893,75)	(9,17)
Dinas Tenaga Kerja	102.496.266,04	121.792.650,00	(19.296.383,96)	(15,84)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.084.261,91	127.332.586,90	(33.248.324,99)	(26,11)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.485.776,77	517.338.842,04	3.146.934,73	0,61
Dinas Lingkungan Hidup	1.642.232.283,17	1.459.880.070,20	182.352.212,97	12,49
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	256.348.385,00	197.494.210,00	58.854.175,00	29,80
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	388.079.460,00	365.920.590,71	22.158.869,29	6,06
Dinas Perhubungan	3.127.559.336,99	3.575.188.469,46	(447.629.132,47)	(12,52)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	781.553.725,83	883.298.171,84	(101.744.446,01)	(11,52)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	481.816.774,29	355.997.235,96	125.819.538,33	35,34
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	156.510.501,78	175.972.892,50	(19.462.390,72)	(11,06)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	465.226.150,57	373.228.651,35	91.997.499,22	24,65
Dinas Perikanan	102.799.236,71	97.547.351,93	5.251.884,78	5,38
Dinas Perdagangan	264.084.278,57	314.241.388,07	(50.157.109,50)	(15,96)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	93.135.200,71	139.344.528,84	(46.209.328,13)	(33,16)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	3.173.805.102,80	3.638.741.309,95	(464.936.207,15)	(12,78)
Sekretariat DPRD	399.204.918,58	402.353.355,01	(3.148.436,43)	(0,78)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	331.270.077,61	409.568.745,71	(78.298.668,10)	(19,12)
Badan Pendapatan Daerah	796.734.967,33	863.273.691,82	(66.538.724,49)	(7,71)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.202.808.457,43	1.299.028.110,56	(96.219.653,13)	(7,41)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162.358.476,10	162.094.725,90	263.750,20	0,16
Inspektorat	362.451.435,71	403.588.071,43	(41.136.635,72)	(10,19)
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Barat	293.683.753,57	197.277.556,42	96.406.197,15	48,87
Kecamatan Dumai Timur	343.731.871,81	227.930.563,03	115.801.308,78	50,81
Kecamatan Dumai Selatan	393.284.493,18	292.044.171,22	101.240.321,96	34,67
Kecamatan Dumai Kota	328.246.978,73	193.888.665,50	134.358.313,23	69,30
Kecamatan Bukit Kapur	244.711.123,58	200.201.594,65	44.509.528,93	22,23
Kecamatan Medang Kampai	302.457.408,00	281.834.611,14	20.622.796,86	7,32
Kecamatan Sungai Sembilan	254.568.743,19	235.924.568,50	18.644.174,69	7,90
Jumlah	75.268.000.151,22	73.048.688.992,66	2.219.311.158,56	3,04

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.6.2.64 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.354.803.835,61	8.580.413.368,30	(225.609.532,69)	(2,63)
Dinas Kesehatan	4.995.949.326,93	4.408.489.167,24	587.460.159,69	13,33

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	624.775.910,32	515.531.849,31	109.244.061,01	21,19
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	184.769.061,30	182.669.493,28	2.099.568,02	1,15
Satuan Polisi Pamong Praja	23.104.072,27	20.521.628,88	2.582.443,39	12,58
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.232.575,41	53.232.575,41	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	96.223.778,82	17.841.876,00	78.381.902,82	439,31
Dinas Tenaga Kerja	79.772.685,16	81.470.552,51	(1.697.867,35)	(2,08)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.909.098,74	19.452.138,74	4.456.960,00	22,91
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	236.799.514,18	225.702.878,18	11.096.636,00	4,92
Dinas Lingkungan Hidup	135.708.507,10	138.507.507,10	(2.799.000,00)	(2,02)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.669.839,12	16.669.839,12	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.330.463,94	46.609.354,80	721.109,14	1,55
Dinas Perhubungan	534.808.502,30	531.407.027,92	3.401.474,38	0,64
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20.578.550,34	20.683.998,96	(105.448,62)	(0,51)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.111.700,00	61.390.783,40	(51.279.083,40)	(83,53)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	578.063.549,67	452.792.416,84	125.271.132,83	27,67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.617.407,25	90.617.407,25	0,00	0,00
Dinas Perikanan	114.906.164,34	111.644.530,27	3.261.634,07	2,92
Dinas Perdagangan	432.393.427,28	416.641.779,20	15.751.648,08	3,78
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	75.250.501,79	96.659.414,19	(21.408.912,40)	(22,15)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1.236.667.460,54	1.213.649.135,09	23.018.325,45	1,90
Sekretariat DPRD	382.145.428,33	382.145.428,33	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	125.813.677,02	126.430.792,00	(617.114,98)	(0,49)
Badan Pendapatan Daerah	131.215.530,71	123.203.951,56	8.011.579,15	6,50
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	238.287.316,14	211.430.542,88	26.856.773,26	12,70
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.223.393,36	69.223.393,36	0,00	0,00
Inspektorat	97.885.173,98	93.234.212,08	4.650.961,90	4,99
Kecamatan Dumai Barat	104.021.388,97	101.622.588,97	2.398.800,00	2,36
Kecamatan Dumai Timur	116.161.451,15	116.524.645,50	(363.194,35)	(0,31)
Kecamatan Dumai Selatan	147.353.935,86	148.622.598,18	(1.268.662,32)	(0,85)
Kecamatan Dumai Kota	72.032.618,28	72.032.618,28	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	107.203.813,78	105.890.773,78	1.313.040,00	1,24
Kecamatan Medang Kampai	60.041.211,14	60.093.106,93	(51.895,79)	(0,09)
Kecamatan Sungai Sembilan	83.300.712,88	83.000.712,89	299.999,99	0,36
Jumlah	19.701.131.584,01	18.996.054.086,73	705.077.497,28	3,71

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.65 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	71.204.112,26	61.602.726,11	9.601.386,15	15,59
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.101.828.379,36	82.142.704.992,41	(3.040.876.613,05)	(3,70)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.245.372.411,29	2.192.895.439,16	52.476.972,13	2,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.295.740,00	5.296.370,00	1.999.370,00	37,75
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	18.828.500,00	18.828.500,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	275.662.999,55	196.962.465,30	78.700.534,25	39,96
Dinas Lingkungan Hidup	9.221.080,00	314.073.830,00	(304.852.750,00)	(97,06)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.300.523.951,57	2.374.651.364,64	(74.127.413,07)	(3,12)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	372.250,00	(372.250,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	192.428.677,09	243.742.982,99	(51.314.305,90)	(21,05)
Dinas Perikanan	62.264.506,28	58.605.056,28	3.659.450,00	6,24

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	5.686.426,22	10.951.648,72	(5.265.222,50)	(48,08)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	12.914.225,00	12.914.225,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.098.385,00	6.098.385,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	303.201.150,00	297.575.650,00	5.625.500,00	1,89
Inspektorat	6.658.133,33	6.658.133,33	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	319.042.427,20	183.741.327,20	135.301.100,00	73,64
Kecamatan Dumai Timur	230.953.000,00	25.077.000,00	205.876.000,00	820,98
Kecamatan Dumai Selatan	281.672.662,00	163.504.662,00	118.168.000,00	72,27
Kecamatan Dumai Kota	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	470.844.165,00	253.855.165,00	216.989.000,00	85,48
Kecamatan Medang Kampai	256.574.150,00	148.063.400,00	108.510.750,00	73,29
Kecamatan Sungai Sembilan	382.925.050,00	202.275.050,00	180.650.000,00	89,31
Jumlah	86.567.345.964,48	88.923.896.456,47	(2.356.550.491,99)	(2,65)

d. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tabel 5.6.2.66 Beban Penyusutan Aset Lainnya

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	179.410,00	6.507.075,33	(6.327.665,33)	(97,24)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.167.200,00	15.091.460,00	(5.924.260,00)	(39,26)
Satuan Polisi Pamong Praja	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.166.666,66	4.166.666,67	(0,01)	(0,00)
Dinas Perhubungan	38.765.469,12	237.279.897,28	(198.514.428,16)	(83,66)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.171.750,00	0,00	75.171.750,00	100,00
Dinas Perikanan	17.404.960,00	17.404.960,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	537.560,00	537.560,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	1.848.571,43	3.697.142,86	(1.848.571,43)	(50,00)
Jumlah	149.636.587,21	287.079.762,14	(137.443.174,93)	(47,88)

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.67 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.255.125,00	249.230.610,00	(145.975.485,00)	(58,57)
Dinas Kesehatan	53.080.000,00	28.302.500,00	24.777.500,00	87,55
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	17.490.000,00	17.490.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	207.552.125,00	96.024.625,00	111.527.500,00	116,14
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	39.571.250,00	6.465.625,00	33.105.625,00	512,03
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.662.500,00	18.662.500,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	1.099.612,50	(1.099.612,50)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.376.512,50	45.376.512,50	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.056.250,00	12.112.500,00	(6.056.250,00)	(50,00)
Jumlah	495.418.762,50	479.139.485,00	16.279.277,50	3,40

b. Beban Tak Terduga

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
260.289.017,00	6.103.210.871,00	(5.842.921.854,00)	(95,74)

Tabel 5.6.2.68 Beban Tak Terduga

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	260.289.017,00	6.103.210.871,00	(5.842.921.854,00)	(95,74)
Jumlah	260.289.017,00	6.103.210.871,00	(5.842.921.854,00)	(95,74)

Beban Tak Terduga diakui pada saat saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Konsumsi Aset). Realisasi Beban Tak Terduga pada Tahun 2022 adalah senilai Rp260.289.017,00 sedangkan realisasi pada Tahun 2021 senilai Rp6.103.210.871,00 jika dibandingkan mengalami penurunan senilai Rp5.842.921.854,00 atau sebesar 95,74%.

Tabel 5.6.2.68.a Rincian Beban Tak Terduga

Uraian	Tanggal	Jumlah
Pembayaran Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan	19 April 2022	35.680.898,00
Setoran Pengembalian Sisa Dana Bantuan	7 Juni 2022	197.137.500,00
Pengembalian Kelebihan Bayar PBB	19 Oktober 2022	1.261.714,00
Pengembalian Kelebihan Bayar (double) BPHTB	19 Oktober 2022	10.541.450,00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar SPPT	19 Oktober 2022	1.588.607,00
Pengembalian Kelebihan Bayar SPPT-PBB Tahun	19 Oktober 2022	840.128,00
Pengembalian Kelebihan Bayar BPHTB	19 Oktober 2022	4.270.500,00
Pengembalian Kelebihan Bayar SPPT-PBB Tahun	19 Oktober 2022	230.320,00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar BPHTB	19 Oktober 2022	4.323.500,00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar SPPT-	19 Oktober 2022	697.172,00
Pengembalian Kesalahan double Pembayaran	20 Oktober 2022	2.717.550,00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar SPPT-	6 Desember 2022	999.678,00
Total		260.289.017,00

3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
5.567.122.940,02	23.728.174.266,24	(18.161.051.326,22)	(76,54)

Surplus dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2022 senilai Rp5.567.122.940,02, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Surplus senilai Rp23.728.174.266,24 maka mengalami penurunan senilai Rp18.161.051.326,22 atau sebesar 76,54%

4 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
(10.479.419.877,05)	(18.358.694.247,11)	7.879.274.370,06	(42,92)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 senilai Rp10.479.419.877,05 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp18.358.694.247,11 maka mengalami penurunan senilai Rp7.879.274.370,06 atau sebesar 42,92%.

Tabel 5.6.2.69 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	5.251.255.346,23	1.463.468.896,94	3.787.786.449,29	258,82
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	15.730.675.223,28	19.822.163.144,05	(4.091.487.920,77)	(20,64)
Jumlah	(10.479.419.877,05)	(18.358.694.247,11)	7.879.274.370,06	(42,92)

a. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	880.302.000,00	1.463.468.896,94	(583.166.896,94)	(39,85)
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang	4.370.953.346,23	0,00	4.370.953.346,23	100,00
Jumlah	5.251.255.346,23	1.463.468.896,94	3.787.786.449,29	258,82

(1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	867.828.187,72	1.463.468.896,94	(595.640.709,22)	(40,70)
Surplus Penjualan Aset Lainnya	12.473.812,28	0,00	12.473.812,28	100,00
Jumlah	880.302.000,00	1.463.468.896,94	(583.166.896,94)	(39,85)

Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	61.635.599,64	0,00	61.635.599,64	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.417.284,34	0,00	173.417.284,34	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.325.862,97	0,00	70.325.862,97	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139.931.000,00	0,00	139.931.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.194.581,21	0,00	15.194.581,21	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	150.373.536,51	0,00	150.373.536,51	100,00
Sekretariat DPRD	97.253.000,00	0,00	97.253.000,00	100,00

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	44.860.000,00	0,00	44.860.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62.662.323,05	1.463.468.896,94	(1.400.806.573,89)	(95,72)
Kecamatan Dumai Barat	771.000,00	0,00	771.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	45.257.000,00	0,00	45.257.000,00	100,00
Jumlah	867.828.187,72	1.463.468.896,94	(595.640.709,22)	(40,70)

Tabel 5.6.2.69.a Penjelasan Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin LO

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Total
Dinas Kesehatan	630.519.300,00	630.519.300,00	61.635.599,64	61.635.599,64
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.225.194.500,00	1.225.194.500,00	173.417.284,34	173.417.284,34
Satuan Polisi Pamong Praja	21.946.546,00	21.946.546,00	4.505.000,00	4.505.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.668.000.000,00	1.668.000.000,00	70.325.862,97	70.325.862,97
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.500.000,00	614.500.000,00	139.931.000,00	139.931.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	372.586.000,00	372.586.000,00	15.194.581,21	15.194.581,21
Sekretariat Daerah Kota Dumai	610.085.500,00	610.085.500,00	150.373.536,51	150.373.536,51
Sekretariat DPRD	176.000.000,00	176.000.000,00	97.253.000,00	97.253.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	122.492.000,00	122.492.000,00	44.860.000,00	44.860.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	570.420.000,00	570.420.000,00	62.662.323,05	62.662.323,05
Kecamatan Dumai Barat	26.400.000,00	26.400.000,00	771.000,00	771.000,00
Kecamatan Dumai Kota	52.800.000,00	52.800.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	135.000.000,00	135.000.000,00	45.257.000,00	45.257.000,00
JUMLAH	6.225.943.846,00	6.225.943.846,00	867.828.187,72	867.828.187,72

Surplus Penjualan Aset Lainnya per SKPD

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	12.473.812,28	0,00	12.473.812,28	100,00
Jumlah	12.473.812,28	0,00	12.473.812,28	100,00

Tabel 5.6.2.69.b Penjelasan Surplus Penjualan Aset Lainnya

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Total
Dinas Perhubungan	281.870.354,00	281.870.354,00	12.473.812,28	12.473.812,28
JUMLAH	281.870.354,00	281.870.354,00	12.473.812,28	12.473.812,28

(2) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen per SKPD:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.370.953.346,23	0,00	4.370.953.346,23	100,00
Jumlah	4.370.953.346,23	0,00	4.370.953.346,23	100,00

Surplus senilai 4.370.953.346,23 ini merupakan Kenaikan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri dan PDAM Tirta Dumai Bersemai, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

b. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

1) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.678.396.225,98	6.478.794.739,75	(1.800.398.513,77)	(27,79)
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang	11.052.278.997,30	13.343.368.404,30	(2.291.089.407,00)	(17,17)
Jumlah	15.730.675.223,28	19.822.163.144,05	(4.091.487.920,77)	(20,64)

a) Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	2.119.388.281,86	(2.119.388.281,86)	(100,00)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan	4.667.795.156,84	3.749.141.723,18	918.653.433,66	24,50
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.601.069,14	0,00	10.601.069,14	100,00
Defisit Penjualan Aset Lainnya	0,00	610.264.734,71	(610.264.734,71)	(100,00)
Jumlah	4.678.396.225,98	6.478.794.739,75	(1.800.398.513,77)	(27,79)

Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	926.794.300,00	(926.794.300,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	0,00	1.192.593.981,86	(1.192.593.981,86)	(100,00)
Jumlah	0,00	2.119.388.281,86	(2.119.388.281,86)	(100,00)

Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.016.457.354,09	0,00	1.016.457.354,09	100,00
Dinas Kesehatan	0,00	2.494.054.238,71	(2.494.054.238,71)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309.396.389,73	0,00	309.396.389,73	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	134.352.000,00	1.255.087.484,47	(1.120.735.484,47)	(89,30)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.389.336.283,93	0,00	2.389.336.283,93	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	664.391.929,09	0,00	664.391.929,09	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	153.861.200,00	0,00	153.861.200,00	100,00
Jumlah	4.667.795.156,84	3.749.141.723,18	918.653.433,66	24,50

Tabel 5.6.2.70 Penjelasan Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan - LO

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Total
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.399.827.032,80	372.829.678,71	10.540.000,00	1.016.457.354,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	486074400	160.097.210,27	16.580.800,00	309.396.389,73
Dinas Lingkungan Hidup	139.950.000,00	5.598.000,00	0,00	134.352.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.925.595.000,00	461.536.021,93	74.722.694,14	2.389.336.283,93
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.041.195.000,00	259.763.070,91	117.040.000,00	664.391.929,09
Sekretariat Daerah Kota Dumai	228.480.000,00	69.988.800,00	4.630.000,00	153.861.200,00
JUMLAH	6.221.121.432,80	1.329.812.781,82	223.513.494,14	4.667.795.156,84

Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.601.069,14	0,00	10.601.069,14	100,00
Jumlah	10.601.069,14	0,00	10.601.069,14	100,00

Tabel 5.6.2.71 Penjelasan Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Defisit
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.890.000,00	3.908.625,00	380.305,86	10.601.069,14
JUMLAH	14.890.000,00	3.908.625,00	380.305,86	10.601.069,14

Defisit Penjualan Aset Lainnya per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	610.264.734,71	(610.264.734,71)	(100,00)
Jumlah	0,00	610.264.734,71	(610.264.734,71)	(100,00)

b) Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	11.052.278.997,30	13.343.368.404,30	(2.291.089.407,00)	(17,17)
Jumlah	11.052.278.997,30	13.343.368.404,30	(2.291.089.407,00)	(17,17)

Defisit ini merupakan Penurunan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pembangunan Dumai, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0,00	0,00	0,00	0,00

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 senilai Rp,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp,00 maka tidak mengalami perubahan.

6 Surplus/(Defisit) - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
(4.912.296.937,03)	5.369.480.019,14	(10.281.776.956,17)	(191,49)

Jumlah Defisit senilai Rp4.912.296.937,03 Total Pendapatan-LO selama Tahun 2022 senilai Rp1.404.760.236.811,95 sementara total Beban selama Tahun 2022 senilai Rp1.399.193.113.871,93, sedangkan Surplus dari Kegiatan Operasional selama Tahun 2022 senilai Rp5.567.122.940,02 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama Tahun 2022 senilai Rp10.479.419.877,05



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahunan yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5. 7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas Pemerintah Kota Dumai disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendapatan serta belanja pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dana BOS telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Arus Kas ini. Laporan arus kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

5. 7. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
122.251.612.218,83	170.101.395.346,27	(47.849.783.127,44)	(28,13)

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kota Dumai selama satu periode akuntansi. Mutasi antar kas tidak termasuk dalam arus kas aktivitas operasi, sehingga pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun 2022 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2022 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 senilai Rp122.251.612.218,83 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2022, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp170.101.395.346,27 mengalami penurunan senilai Rp47.849.783.127,44 atau sebesar 28,13%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	226.332.093.315,36	185.979.625.987,00	40.352.467.328,36	21,70
Penerimaan Retribusi Daerah	32.206.368.295,17	23.776.863.396,46	8.429.504.898,71	35,45
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.079.761.191,00	1.415.125.255,00	(335.364.064,00)	(23,70)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	203.278.362.717,33	153.082.950.820,26	50.195.411.897,07	32,79
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	57.079.079.012,00	61.856.297.144,00	(4.777.218.132,00)	(7,72)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	110.563.276.614,00	83.612.659.443,00	26.950.617.171,00	32,23
Penerimaan Dana Alokasi Umum	427.742.257.138,00	429.427.931.000,00	(1.685.673.862,00)	(0,39)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	162.975.491.965,00	156.525.480.094,00	6.450.011.871,00	4,12
Penerimaan Dana Penyesuaian	20.360.896.000,00	31.603.245.000,00	(11.242.349.000,00)	(35,57)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.057.454.418,00	108.598.824.744,39	10.458.629.673,61	9,63
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	40.705.721.968,00	(40.705.721.968,00)	(100,00)
Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	8.416.250.000,00	7.988.000.000,00	428.250.000,00	5,36
Jumlah	1.369.091.290.665,86	1.284.572.724.852,11	84.518.565.813,75	6,58

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	649.325.852.373,00	587.860.841.072,00	61.465.011.301,00	10,46
Pembayaran Barang	559.998.434.987,95	481.698.811.775,84	78.299.623.212,11	16,25
Pembayaran Bunga	1.060.377.070,00	-	1.060.377.070,00	100,00
Pembayaran Hibah	23.282.916.899,08	35.855.199.901,00	(12.572.283.001,92)	(35,06)
Pembayaran Bantuan Sosial	12.911.808.100,00	0,00	12.911.808.100,00	100,00
Pembayaran Tak Terduga	260.289.017,00	9.056.476.757,00	(8.796.187.740,00)	(97,13)
Jumlah	1.246.839.678.447,03	1.114.471.329.505,84	132.368.348.941,19	11,88

5. 7. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(259.094.778.911,64)	(197.385.969.978,36)	(61.708.808.933,28)	31,26

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (aset non keuangan) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan Tahun 2022 senilai minus Rp259.094.778.911,64 bila dibanding dengan Tahun 2021 senilai minus Rp197.385.969.978,36 mengalami penurunan senilai Rp61.708.808.933,28 atau sebesar 31,26% dengan rincian:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	880.302.000,00	2.187.764.625,00	(1.307.462.625,00)	(59,76)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	226.855.800,00	244.595.148,03	(17.739.348,03)	(7,25)
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.107.157.800,00	2.432.359.773,03	(1.325.201.973,03)	(54,48)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Perolehan Tanah	3.534.281.800,00	17.000.000,00	3.517.281.800,00	20.689,89
Perolehan Peralatan dan Mesin	91.334.440.997,63	84.262.101.427,00	7.072.339.570,63	8,39
Perolehan Gedung dan Bangunan	87.322.813.477,02	52.910.399.271,31	34.412.414.205,71	65,04
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.340.485.070,99	56.397.085.845,08	16.943.399.225,91	30,04
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.201.199.866,00	5.971.626.308,00	(1.770.426.442,00)	(29,65)
Perolehan Aset lainnya	468.715.500,00	260.116.900,00	208.598.600,00	100,00
Jumlah	260.201.936.711,64	199.818.329.751,39	60.383.606.960,25	30,22

5. 7. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
76.064.040.965,89	0,00	76.064.040.965,89	100,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai Rp76.064.040.965,89,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp76.064.040.965,89 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	94.060.540.965,89	0,00	94.060.540.965,89	100,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Jumlah	94.064.040.965,89	0,00	94.064.040.965,89	0,00

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	18.000.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana DPPID	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.000.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00

5. 7. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
151.420.379,51	158.417.065,84	(6.996.686,33)	(4,42)

Aktivitas keluar masuk aktivitas transitoris adalah aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2022 senilai Rp151.420.379,51. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp158.417.065,84 mengalami penurunan senilai Rp6.996.686,33 atau sebesar 4,42%. Rincian dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73.477.946.218,93	64.985.014.845,00	8.492.931.373,93	13,07
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) lainnya	295.262.912,00	168.578.067,00	126.684.845,00	100,00
Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00	-	-
Penyesuaian Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD RSUD Tahun Sebelumnya	0,00	0,17	(0,17)	(100,00)
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	63.476,00		63.476,00	100,00
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	21.988,00	0,00	21.988,00	100,00
Jumlah	73.773.294.594,93	65.153.592.912,17	8.619.701.682,76	13,23

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73.451.448.910,42	64.983.231.083,00	8.468.217.827,42	13,03
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2021	1.783.762,00	11.944.763,33	(10.161.001,33)	(85,07)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	168.578.067,00	0,00	168.578.067,00	100,00
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD	63.476,00	0,00	63.476,00	100,00
Jumlah	73.621.874.215,42	64.995.175.846,33	8.626.698.369,09	13,27

5. 7. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	(60.627.705.347,41)	(27.126.157.566,25)	(33.501.547.781,16)	123,50

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2022 adalah senilai minus Rp60.627.705.347,41. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp27.126.157.566,25 mengalami penurunan senilai Rp33.501.547.781,16 atau sebesar 123,50%.

5. 7. 6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	168.367.097.170,25	195.493.254.736,50	(27.126.157.566,25)	(13,88)

Saldo Awal Kas Tahun 2022 senilai Rp168.367.097.170,25. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp195.493.254.736,50 mengalami penurunan senilai Rp27.126.157.566,25 atau sebesar 13,88%. Saldo Awal Kas terdiri dari Saldo awal kas di Kas Daerah senilai Rp141.438.187.794,38, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp334.000,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp26.691.058.326,87, Kas Dana BOS sebesar Rp68.938.982,00 dan Kas Lainnya Rp168.578.067,00

5. 7. 7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25	(60.627.705.347,41)	(36,01)

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 senilai Rp107.739.391.822,84 terdiri dari kas di Kas Daerah senilai Rp99.365.595.756,32, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp60.263.252,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp7.902.462.768,01, Kas Dana BOS senilai Rp115.792.949,51 dan Kas Lainnya senilai Rp295.262.912,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp168.367.097.170,25 mengalami penurunan senilai minus Rp60.627.705.347,41

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	99.365.595.756,32	141.438.187.794,38
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.277.437,00	334.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas di BLUD RSUD	6.235.642.285,09	24.407.569.819,09
5	Puskesmas Dumai Kota	144.243.934,68	253.850.408,04
6	Puskesmas Dumai Barat	88.144.705,77	110.288.663,34
7	Puskesmas Bukit Kapur	56.516.541,54	236.041.280,94
8	Puskesmas Sungai Sembilan	76.421.291,72	197.753.644,27
9	Puskesmas Medang Kampai	81.604.334,44	84.861.847,65
10	Puskesmas Bumi Ayu	387.939.930,42	372.706.909,63
11	Puskesmas Bukit Timah	37.842.389,07	62.390.972,75
12	Puskesmas Jayamukti	445.603.321,82	243.204.164,81
13	Puskesmas Purnama	48.082.256,72	112.072.170,16
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	237.976.533,74	489.594.996,19
15	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	62.445.243,00	120.723.450,00
16	Kas Dana BOS	115.792.949,51	68.938.982,00
17.	Kas Lainnya	295.262.912,00	168.578.067,00
	Jumlah	107.739.391.822,84	168.367.097.170,25



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5. 8 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5. 8. 1. Ekuitas Awal

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.974.537.461.488,77	2.957.502.181.459,58	17.035.280.029,19	0,58

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2022 adalah senilai Rp2.974.537.461.488,77 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp2.957.502.181.459,58 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.035.280.029,19 atau sebesar 0,58%.

5. 8. 2. Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(4.912.296.937,03)	5.369.480.019,14	(10.281.776.956,17)	(191,49)

Surplus/(defisit) – LO Tahun 2022 senilai minus Rp4.912.296.937,03 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.369.480.019,14 maka mengalami penurunan senilai Rp10.281.776.956,17 atau sebesar 191,49%. Surplus LO ini merupakan surplus atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional (Basis Akrua), sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2022.

5. 8. 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
18.858.371.966,06	11.665.800.010,05	7.192.571.956,01	61,66

Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengurangi Ekuitas Awal Tahun 2022 senilai Rp18.858.371.966,06 dan Tahun 2021 senilai Rp11.665.800.010,05, jika dibandingkan pada Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp7.192.571.956,01 atau sebesar 61,66%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	-	0,17	(0,17)	(100,00)
Koreksi Piutang	(45.087.899,00)	(830.438.438,45)	785.350.539,45	(94,57)
Koreksi Penyisihan Piutang	13.084.782.824,50	23.562.679,60	13.061.220.144,90	55.431,81
Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	(264.600.000,00)	264.600.000,00	(100,00)
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(229.500.000,00)	264.600.000,00	(494.100.000,00)	(186,73)
Koreksi Aset Tetap	745.887.550,00	16.929.497.316,00	(16.183.609.766,00)	(95,59)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.532.592.975,81	(2.469.708.141,47)	5.002.301.117,28	(202,55)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(2,50)	2,50	(100,00)
Koreksi Aset Lain-lain	-	(2.706.770.000,00)	2.706.770.000,00	(100,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.924.303,75	669.949.025,71	(664.024.721,96)	(99,12)
Koreksi Pendapatan diterima dimuka	108.500.000,00	(45.000.000,00)	153.500.000,00	(341,11)
Koreksi Utang Belanja	2.655.272.211,00	94.707.571,00	2.560.564.640,00	2.703,65
Jumlah	18.858.371.966,06	11.665.800.010,05	7.192.571.956,01	61,66

5. 8. 3. 1. Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	0,17	(0,17)	(100,00)

Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai Rp0,17. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp0,17 atau sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan koreksi atas kas pada BLUD RSUD.

5. 8. 3. 2. Koreksi Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(45.087.899,00)	(830.438.438,45)	785.350.539,45	(94,57)

Koreksi Piutang Tahun 2022 senilai minus Rp45.087.899,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp830.438.438,45. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp785.350.539,45 atau sebesar 94,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.2 Rincian Koreksi Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(1.011.079.997,45)	1.011.079.997,45	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	(20.752.523,00)	0,00	(20.752.523,00)	100,00
Dinas Kesehatan	(24.335.376,00)	180.641.559,00	(204.976.935,00)	(113,47)
Jumlah	(45.087.899,00)	(830.438.438,45)	785.350.539,45	(94,57)

Koreksi Piutang Tahun 2022 senilai minus Rp45.087.899,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.3 Koreksi Rincian Piutang Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah	(20.752.523,00)
Koreksi Saldo awal Piutang PPJ Non PLN Tahun 2021	2.806.145,00
Koreksi Saldo awal Piutang PPJ Non PLN Tahun 2021	(11.143.758,00)
Koreksi Saldo awal Piutang Air Tanah Tahun 2021	(12.470.590,00)
Koreksi saldo awal piutang pendapatan denda pajak walet tahun 2021	55.680,00
Dinas Kesehatan	(24.335.376,00)
Koreksi Piutang BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2021	(24.335.376,00)
Jumlah	(45.087.899,00)

Koreksi Piutang BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2021 Senilai Rp24.335.376,00 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi lebih catat Piutang BPJS	(18.248.800,00)
Koreksi lebih catat Ambulans BPJS	(1.560.000,00)
Koreksi lebih catat Asuransi Pegawai Pelindo	(4.080.744,00)
Koreksi kurang catat pelindo pensiunan	40.000,00
Koreksi lebih catat Asuransi PLN	(152.650,00)
Koreksi lebih catat Pertamina Hospital Dumai	(50.013,00)
Koreksi lebih catat Trauma Cetre	(143.169,00)
Koreksi lebih catat sewa kantin 1	(140.000,00)
Jumlah	(24.335.376,00)

5. 8. 3. 3. Koreksi Penyisihan Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
13.084.782.824,50	23.562.679,60	13.061.220.144,90	55.431,81

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2022 senilai Rp13.084.782.824,50 dan Tahun 2021 senilai Rp23.562.679,60. Jika dibandingkan dengan TA 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.061.220.144,90 atau sebesar 55431,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.4 Penyisihan Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	15.860.729.282,00	57.500,00	15.860.671.782,00	27.583.777,01
Badan Pendapatan Daerah	(2.775.946.457,50)	23.505.179,60	(2.799.451.637,10)	(11.909,94)
Jumlah	13.084.782.824,50	23.562.679,60	13.061.220.144,90	55.431,81

Tabel 5.8.5 Koreksi Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2022

Dinas Kesehatan	15.860.729.282,00
Koreksi Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2022	20.000,00
Koreksi Penyisihan Piutang Karena pelunasan Per 31 Desember 2022:	15.860.709.282,00
1. KEMENKES	15.353.203.390,00
2. JAMKESKO	143.117.390,00
3. OBAT KRONIS	313.298.767,50
4. AMBULANCE BPJS	10.976.940,00
5. PELINDO PEGAWAI	4.440.803,20
6. PELINDO Pensiun	864.685,40
7. PERTAMINA HOSPITAL	2.927.716,90
8. PT. Murini Wood Indah Industry	1.588.193,00
9. TRAUMA CENTRE	26.636.070,00
10. SEWA KANTIN KECIL 1	3.640.000,00
11. ADMEDIKA PLN	15.326,00
Badan Pendapatan Daerah	(2.775.946.457,50)
Koreksi Saldo awal Penyisihan Piutang PPJ Non PLN Tahun 2021	(1.114.375,80)
Koreksi Saldo awal Penyisihan Piutang Air Tanah Tahun 2021	(1.247.059,00)
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2021	24.539.082,40
Koreksi Penyisihan Piutang Akibat Penghapusan Piutang PBB	(2.798.124.105,10)
Jumlah	13.084.782.824,50

5. 8. 3. 4. Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(264.600.000,00)	264.600.000,00	(100,00)

Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp264.600.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp264.600.000,00 atau sebesar 100,00%

5. 8. 3. 5. Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(229.500.000,00)	264.600.000,00	(494.100.000,00)	(186,73)

Koreksi penyisihan investasi jangka panjang non permanen Tahun 2022 senilai minus Rp229.500.000,00 dan Tahun 2021 senilai Rp264.600.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp494.100.000,00 atau sebesar 186,73%. Koreksi penyisihan investasi non permanen ini merupakan penyisihan dana bergulir atas Koperasi Putri Tujuh dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah disisihkan. Sebagai tambahan informasi bahwa dana bergulir ini sudah masuk kategori macet sejak tahun 2010, sehingga seharusnya disisihkan sebesar 100%.

5. 8. 3. 6. Koreksi Aset Tetap

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
745.887.550,00	16.929.497.316,00	(16.183.609.766,00)	(95,59)

Koreksi Aset Tetap Tahun 2022 senilai Rp745.887.550,00 dan Tahun 2021 senilai Rp16.929.497.316,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp16.183.609.766,00 atau sebesar 95,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.6 Koreksi Aset Tetap per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Daerah	0,00	(110.990.684,00)	110.990.684,00	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	935.910.550,00	17.040.488.000,00	(16.104.577.450,00)	(94,51)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.977.000,00	0,00	9.977.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(200.000.000,00)	0,00	(200.000.000,00)	100,00
Jumlah	745.887.550,00	16.929.497.316,00	(16.183.609.766,00)	(95,59)

Tabel 5.8.7 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2022

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	935.910.550,00
Koreksi Aset Tanah Yang Masih Bernilai Nol Tahun 2021	410.187.100,00
Koreksi Aset Tanah Hasil Inventarisasi 2022	525.723.450,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.977.000,00
Koreksi Perpindahan Dari Ekstrakomptabel Ke Intrakomptabel	9.977.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(200.000.000,00)
Koreksi Tanah Akibat Kelebihan Catat Berupa Tanah Palawija Jl. Bangun Sari Bukit Timah Luas 19.611M2 Tahun 1999	(200.000.000,00)
Jumlah	745.887.550,00

5. 8. 3. 7. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.532.592.975,81	(2.469.708.141,47)	5.002.301.117,28	(202,55)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 senilai Rp2.532.592.975,81 dan Tahun 2021 senilai minus Rp2.469.708.141,47 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp5.002.301.117,28 atau sebesar 202,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	(196.944.001,71)	185.982.725,61	(382.926.727,32)	(205,89)
Dinas Pendidikan	3.788.074.053,65	0,00	3.788.074.053,65	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(809.290.594,14)	(1.184.714.664,81)	375.424.070,67	(31,69)

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(84.264,39)	0,00	(84.264,39)	100,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(39.961.751,25)	0,00	(39.961.751,25)	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(2.836.833,33)	2.836.833,33	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(817.278.089,20)	817.278.089,20	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(73.657.600,00)	73.657.600,00	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.047.900,00)	0,00	(1.047.900,00)	100,00
Dinas Perhubungan	(46.812.924,50)	(191.882.854,00)	145.069.929,50	(75,60)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	(15.488.088,00)	15.488.088,00	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.505.625,00)	0,08	(1.505.625,08)	(1.882.031.350,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(106.555.485,47)	(3.644.281,95)	(102.911.203,52)	2.823,91
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.935.420,69	240.000,00	73.695.420,69	30.706,43
Dinas Perdagangan		(236.033.310,25)	236.033.310,25	(100,00)
Sekretariat Daerah	19.218.000,49	(55.061.405,36)	74.279.405,85	(134,90)
Sekretariat DPRD	(22.462.000,00)	0,00	(22.462.000,00)	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	617.114,97	0,00	617.114,97	100,00
Badan Pendapatan Daerah	(1.047.816,72)	0,00	(1.047.816,72)	100,00
Kecamatan Dumai Barat	(18.616.650,00)	2.822.614,29	(21.439.264,29)	(759,55)
Kecamatan Dumai Timur	(101.025.500,00)	8.467.842,86	(109.493.342,86)	(1.293,05)
Kecamatan Dumai Selatan	(2.990.000,00)	0,00	(2.990.000,00)	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	(2.954.285,71)	2.954.285,71	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	9.325.114,29	(9.325.114,29)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	3.213.162,31	(3.213.162,31)	(100,00)
Inspektorat	0,00	(87.970.609,75)	87.970.609,75	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(907.100,81)	(8.237.578,55)	7.330.477,74	(88,99)
Jumlah	2.532.592.975,81	(2.469.708.141,47)	5.002.301.117,28	(202,55)

Tabel 5.8.9 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

Dinas Kesehatan	(196.944.001,71)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(153.587.900,87)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(99.447.431,66)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar Tahun 2021	55.346.583,09
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan s.d 2021 yang direklas ke Gedung Tahun 2022	744.747,73
Dinas Pendidikan	3.788.074.053,65
Koreksi Kelebihan Catat Akumulasi Penyusutan Gedung s.d 2021	3.788.074.053,65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(809.290.594,14)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(827.611.972,13)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Komputer (Adanya Perpindahan Nilai Aset dari Ekstracomp ke Intracomp)	(9.977.000,00)
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Adanya Selisih Perhitungan dari Tahun 2021)	28.298.377,99
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(84.264,39)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 (Kurang Catat Akumulasi Penyusutan S.D 2021)	(84.264,39)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(39.961.751,25)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun lalu	(39.961.751,25)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.047.900,00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun lalu	(1.047.900,00)

Dinas Perhubungan	(46.812.924,50)
Koreksi reklasifikasi antar aset tetap	(45.457.500,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan terhadap Bangunan Air/Irigasi (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(1.914.299,50)
Koreksi Akumulasi Penyusutan terhadap Komputer (Koreksi Lebih Catat TA 2021)	558.875,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.505.625,00)
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Personal Komputer	(1.505.625,00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(106.555.485,47)
Koreksi Akumulasi Penyusutan terhadap Gedung dan Bangunan (koreksi lebih catat) Tahun 2021	(106.555.485,47)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.935.420,69
Koreksi terhadap Gedung Beban penyusutan 2021, kesalahan perhitungan Akm.Penyusutan 2021 Gedung (koreksi kurang catat)	(14.090.974,67)
Koreksi terhadap Tugu Kontrol/Pasti Beban penyusutan 2021, kesalahan perhitungan Akm.Penyusutan 2021 Tugu Kontrol/Pasti (koreksi lebih catat)	88.026.395,36
Sekretariat Daerah	19.218.000,49
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021	22.362.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021	(3.143.999,51)
Sekretariat DPRD	(22.462.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(22.462.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	617.114,97
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	617.114,97
Badan Pendapatan Daerah	(1.047.816,72)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor reklasifikasi dari KDP	(1.047.816,72)
Kecamatan Dumai Barat	(18.616.650,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan , JIJ Tahun 2021 (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(18.616.650,00)
Kecamatan Dumai Timur	(101.025.500,00)
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai Tahun 2021	(101.025.500,00)
Kecamatan Dumai Selatan	(2.990.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(2.990.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(907.100,81)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena salah perhitungan	(907.100,81)
Jumlah	2.532.592.975,81

5. 8. 3. 8. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(2,50)	2,50	(100,00)

Koreksi Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp2,50, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp2,50 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.10 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Perpustakaan dan kearsipan	0,00	(2,50)	2,50	(100,00)
Jumlah	0,00	(2,50)	2,50	(100,00)

5. 8. 3. 9. Koreksi Aset Lain-lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(2.706.770.000,00)	2.706.770.000,00	(100,00)

Koreksi Aset lain-lain Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp2.706.770.000,00 jika dibandingkan dengan TA 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.706.770.000,00 atau sebesar 100,00%.

5. 8. 3. 10. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
5.924.303,75	669.949.025,71	(664.024.721,96)	(99,12)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 senilai Rp5.924.303,75 dan Tahun 2021 senilai Rp669.949.025,71 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp664.024.721,96 atau sebesar 99,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.13 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.924.260,00	675.284.740,00	(669.360.480,00)	(99,12)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43,75	0,00	43,75	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(6.000.000,00)	6.000.000,00	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	664.285,71	(664.285,71)	(100,00)
Jumlah	5.924.303,75	669.949.025,71	(664.024.721,96)	(99,12)

Tabel 5.8.14 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43,75
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	43,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.924.260,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan thn 2021 atas Hibah Ke Pemprov Riau berdasarkan BAST NO.06/BAST/BPKAD/2022 DAN NO.61/BA/2022 TGL.11.02.2022 NHPD NO.05/NPHBMD/2022 DAN NO.53/NPHBMD/2022 TGL.11.02.2022)	5.924.260,00
Jumlah	5.924.303,75

5. 8. 3. 11. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
108.500.000,00	(45.000.000,00)	153.500.000,00	(341,11)

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 senilai Rp108.500.000,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp45.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp153.500.000,00 atau sebesar 341,11%.

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka ini merupakan koreksi pencatatan tahun lalu atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT. Satwa Sarana Karunia. Kontribusi tahunan atas Bangun Guna Serah senilai Rp186.000.000,00 per tahun. Tahun 2021 telah disajikan sebagai pendapatan pada Laporan Operasional senilai Rp77.500.000,00 dan disajikan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca senilai Rp108.500.000,00, seharusnya kontribusi tahunan ini tidak menimbulkan kewajiban di masa depan kepada Pemerintah Kota Dumai. Kewajiban Pemerintah Kota Dumai sudah dianggap selesai pada saat serah terima aset sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

5. 8. 3. 12. Koreksi Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.655.272.211,00	94.707.571,00	2.560.564.640,00	2.703,65

Koreksi Utang Belanja Tahun 2022 senilai Rp2.655.272.211,00 dan Tahun 2021 senilai Rp94.707.571,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.560.564.640,00 atau sebesar 2703,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.15 Koreksi Utang Belanja per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	2.655.272.211,00	93.551.771,00	2.561.720.440,00	2.738,29
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	65.000,00	(65.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	1.090.800,00	(1.090.800,00)	(100,00)
Jumlah	2.655.272.211,00	94.707.571,00	2.560.564.640,00	2.703,65

Koreksi Utang Belanja pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.655.272.211,00 merupakan kesalahan pencatatan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.16 Rincian Utang Belanja TA 2022

Koreksi Utang Honorarium BLUD Th 2021	34.000.000,00
Kelebihan Catat Pembayaran Honorarium Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Bulan Januari s/d Maret 2021	17.700.000,00
Kelebihan catat Pembayaran Honorarium Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Bulan April s/d Juni 2021	17.700.000,00
Kelebihan catat Pembayaran Honorarium Pengurus Komite Medik RSUD Kota Dumai Triwulan III Tahun 2021	100.000,00
Kurang catat Pembayaran Honorarium Pengurus Komite Keperawatan Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2021	(8.550.000,00)
Kurang catat Pembayaran Honorarium Pengurus Komite Keperawatan Bulan April s.d Mei 2021	(5.700.000,00)
Kelebihan catat Pembayaran Honorarium Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya RSUD kota Dumai Bulan Januari s.d Mei (5 Bulan) Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan No:074/KPTS-DIREKTUR/2021 Tgl:12 Januari 2021	12.750.000,00
Koreksi Utang Insentif Vaksinator Th 2021	44.850.000,00
Koreksi Utang Jasa Pelayanan BLUD Th 2021	963.221.844,00
Koreksi Utang Jasa BPJS dan Covid 19	248.479.191,00
Koreksi lebih catat insentif tim JKN	669.271.014,00
Koreksi lebih catat Jasa Umum & cost Sharing	34.536.444,00
Koreksi lebih catat Jasa Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota)	10.935.195,00
Koreksi lebih catat Utang Barang dan Jasa BLUD Th 2021	197.295.998,00
Koreksi lebih catat Utang Barang dan Jasa BLUD Th 2021 atas Pembayaran atas Pekerjaan angkutan dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun di RSUD Berdasarkan SPK No:044/B3/RSUDDMI/SPK/X/2020 Tgl: 07 November 2020, BASPT No:445/BAPST-TU/4017 Tgl: 31 Mei 2021, BASTPPB No:445/BASTPPB-TU/4016 Tgl: 31 Mei 2021, BAPP No:445/BAP-TU/4015 Tgl:31 Mei 2021 PT. Andhika Makmur Persada	
Koreksi kurang catat dan lebih catat Utang Obat dan BHP BLUD Th 2021	1.415.904.369,00
Jumlah	2.655.272.211,00

5. 8. 4. Ekuitas Akhir

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.988.483.536.517,80	2.974.537.461.488,77	13.946.075.029,03	0,47

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah senilai Rp2.988.483.536.517,80 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp2.974.537.461.488,77 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.946.075.029,03 atau sebesar 0,47%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI
PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI LAINNYA

6.1 UMUM

a. Geografi

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50.

Keadaan geografis Kota Dumai Tahun 2022:

- Letak : 01°26'50" - 02°15'40" LU
101°0'38" - 101°43'33" BT
- Luas Wilayah : 2.066,72 km²
- Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat dan Selat Malaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec.Batin Solapan Kabupaten Bengkalis; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kec.Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
- Suhu Rata-rata : 20°C - 36°C
- Jumlah Kecamatan : 7
- Jumlah Kelurahan : 36

b. Kepala Daerah

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai periode Tahun 2021-2024 TMT 26 Februari 2021 sampai dengan saat ini adalah H. Paisal, SKM, MARS sebagai Wali Kota dan H. Amris, S.Sy sebagai Wakil Wali Kota Dumai.

Namun H. Amris, S.Sy menjabat sebagai Wakil Wali Kota Dumai mendampingi H. Paisal, SKM, MARS hanya kurang lebih dua bulan, dan setelah itu ia meninggal dunia pada 29 April 2021 di usia 63 tahun.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai dari masa ke masa:

No.	Nama	Masa Jabatan
A. WALI KOTA ADMINISTRATIF		
1.	Wan Dahlan Ibrahim	1979 - 1983
2.	Drs. H. Rusli Idar	1983 - 1985
3.	H. Fadlah Sulaiman, S.H.	1985 - 1990
4.	Drs. H. Azwin Yacob	1990 - 1994
5.	Drs. H. Zainuddin Abdullah	1994 - 1999
B. WALI KOTA KOTAMADYA		
1.	Wali Kota : Drs. H. Zainuddin Abdullah Wakil Wali Kota : -	27 April 1999 - 27 April 2000
2.	Wali Kota : Drs. H. Wan Syamsir Yus Wakil Wali Kota : H. Suarman AR	27 April 2000 - 27 April 2005
3.	Wali Kota : Ir. H. Nasrun Effendi, M.T. Wakil Wali Kota : -	28 April 2005 - 12 Agustus 2005
4.	Wali Kota : Drs. H. Zulkifli AS, M.Si. Wakil Wali Kota : dr. H. Sunaryo	12 Agustus 2005 - 12 Agustus 2010
5.	Wali Kota : H. Khairul Anwar, S.H. Wakil Wali Kota : dr. H. Agus Widayat, M.M.	12 Agustus 2010 - 12 Agustus 2015
6.	Wali Kota : Drs. H. Arlizman Agus, M.M Wakil Wali Kota : -	12 Agustus 2015 - 27 Februari 2016
7.	Wali Kota : Drs. H. Zulkifli AS, M.Si. Wakil Wali Kota : Eko Suharjo, S.E.	27 Februari 2016 - 18 November 2021
8.	Wali Kota : H. Jonli, S.Sos, M.Si Wakil Wali Kota : -	28 Januari 2021 – 26 Februari 2021
9.	Wali Kota : H. Paisal, SKM, MARS Wakil Wali Kota : H. Amris, S.Sy	26 Februari 2021 – Sekarang 26 Februari 2021 – 29 April 2021

c. **Susunan Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. **Sekretariat Daerah;**

Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten dan 11 bagian yaitu:

1) **Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)**

yang membawahi:

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Administrasi Pertanahan
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi

2) **Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan)**

yang membawahi :

- Bagian Administrasi Perekonomian
- Bagian Administrasi Pembangunan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Bagian Administrasi Sumberdaya Alam
- 3) Asisten III (Administrasi Umum)
yang membawahi :
 - a) Bagian Hukum dan HAM
 - b) Bagian Organisasi
 - c) Bagian Keuangan
 - d) Bagian Umum
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan, yaitu:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Dinas, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 5) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 11) Dinas Perdagangan;
 - 12) Dinas Perhubungan;
 - 13) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 14) Dinas Tenaga Kerja;
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- 17) Dinas Perikanan;
- 18) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
- 19) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- 20) Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Dumai Barat;
 - (a) Kelurahan Pangkalan Sesai
 - (b) Kelurahan Purnama
 - (c) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan
 - (d) Kelurahan Bagan Keladi
- 2) Kecamatan Dumai Timur;
 - (a) Kelurahan Tanjung Palas
 - (b) Kelurahan Jaya Mukti
 - (c) Kelurahan Teluk Binjai
 - (d) Kelurahan Buluh Kasap
 - (e) Kelurahan Bukit Batrem
- 3) Kecamatan Bukit Kapur;
 - (a) Kelurahan Bukit Nenas
 - (b) Kelurahan Bagan Besar
 - (c) Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - (d) Kelurahan Gurun Panjang
 - (e) Kelurahan Kampung Baru
 - (f) Kelurahan Bagan Besar Timur
 - (g) Kelurahan Bukit Kapur
- 4) Kecamatan Medang Kampai;
 - (a) Kelurahan Pelintung
 - (b) Kelurahan Guntung
 - (c) Kelurahan Teluk Makmur
 - (d) Kelurahan Mundam
- 5) Kecamatan Sungai Sembilan;
 - (a) Kelurahan Bangsal Aceh



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) Kelurahan Lubuk Gaung
- (c) Kelurahan Tanjung Penyembal
- (d) Kelurahan Basilam Baru
- (e) Kelurahan Batu Teritip
- (f) Kelurahan Sungai Geniot
- 6) Kecamatan Dumai Kota;
 - (a) Kelurahan Rimba Sekampung
 - (b) Kelurahan Sukajadi
 - (c) Kelurahan Bintang
 - (d) Kelurahan Dumai Kota
 - (e) Kelurahan Laksamana
- 7) Kecamatan Dumai Selatan.
 - (a) Kelurahan Mekar Sari
 - (b) Kelurahan Bukit Timah
 - (c) Kelurahan Bumi Ayu
 - (d) Kelurahan Bukit Datuk
 - (e) Kelurahan Ratu Sima

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 Pasal 2, menyatakan RSUD sebagai organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan.

6.2 KEUANGAN DAERAH

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dijabarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022, yang kemudian selanjutnya mengalami 10 kali pergeseran penjabaran APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022;
2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
 4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
 5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 13 April 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
 6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
 7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
 8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
 9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022; dan
 10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 161, Perubahan Anggaran dapat dilakukan bilamana terjadi:
- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
 - 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022. Dan kemudian dijabarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022, yang kemudian selanjutnya mengalami 3 (tiga) kali pergeseran penjabaran Perubahan APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 86 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022;
2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022; dan
3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 104 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas untuk pengakuan realisasi belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2022 secara keseluruhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yakni APBD, sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Dumai, 29 Agustus 2023



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain PAD yang sah	68.027.364.818,00	24.907.958.298,00	67.636.149.091,00	25.299.174.025,00
2	Dinas Lingkungan hidup	Piutang Retribusi Daerah	50.640.000,00	0,00	0,00	50.640.000,00
3	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Daerah	33.555.750,00	65.509.400,00	33.555.750,00	65.509.400,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	119.990.864.839,45	221.149.490.091,06	217.679.172.828,36	123.461.182.102,15
		Piutang Retribusi Daerah	1.822.723.129,09	0,00	0,00	1.822.723.129,09
		Piutang Lain-lain PAD yang sah	3.347.127.430,15	866.328.505,00	1.004.060.682,00	3.209.395.253,15
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Transfer DBH Provinsi	9.656.723.625,00	29.390.520.807,00	9.656.723.625,00	29.390.520.807,00
		Piutang Lain-lain PAD yang sah	291.428.679,64	522.035.661,00	236.382.480,27	577.081.860,37
Jumlah			203.220.428.271,33	276.901.842.762,06	296.246.044.456,63	183.876.226.576,76

Dumai, 29 Agustus 2023



Wali Kota Dumai,

PAISAL

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak Daerah	123.461.182.102,15	77.971.182.890,87	45.489.999.211,28
2	Piutang Retribusi Daerah	1.938.872.529,09	1.872.514.453,09	66.358.076,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang sah	29.085.651.138,52	4.019.669.503,90	25.065.981.634,62
4	Piutang Transfer - DBH Provinsi	29.390.520.807,00	0,00	29.390.520.807,00
Jumlah		183.876.226.576,76	83.863.366.847,86	100.012.859.728,90



Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,

PAISAL

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	4	5	6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.620.480.000,00	8.620.480.000,00	0,00
Jumlah		8.620.480.000,00	8.620.480.000,00	0,00

Dumai, 29 Agustus 2023
Wali Kota Dumai,

PAISAL

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Akhir Tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal yang diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal yang disertakan sampai dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9-12
1	2002	PT. Bank Riau	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.203.000.000,00
2	2006	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	8.217.600.000,00	8.217.600.000,00	0,00	8.217.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.217.600.000,00
3	2002	PT. Pembangunan Dumai	Perda No. 1 Tahun 2014	Penyertaan Modal	31.182.264.000,00	31.182.264.000,00	0,00	31.182.264.000,00	0,00	0,00	0,00	31.182.264.000,00
4	2002	PT. Riau Airline	Perda No. 7 Tahun 2008	Penyertaan Modal	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
5	2014	PDAM Tirta Dumai Bersermai	Perda No. 2 Tahun 2014	Penyertaan Modal	63.623.912.000,00	63.623.912.000,00	0,00	63.623.912.000,00	0,00	0,00	0,00	63.623.912.000,00
Jumlah					113.626.776.000,00	113.626.776.000,00	0,00	113.626.776.000,00	0,00	0,00	0,00	113.626.776.000,00

Dumai, 29 Agustus 2023
 Wali Kota Dumai,

 PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	458.913.848.270,88	32.752.479.146,00	24.772.645.549,29	466.893.681.867,59
2	DINAS KESEHATAN	351.672.650.069,88	71.368.447.447,52	62.751.590.550,84	360.289.506.966,56
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.248.175.460.617,59	143.198.724.053,60	90.806.688.230,13	1.300.567.496.441,06
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	25.368.200.090,16	4.256.305.150,00	2.980.294.337,70	26.644.210.902,46
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.433.484.233,48	244.210.642,00	192.274.995,87	1.485.419.879,61
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.644.493.164,28	6.838.287.300,00	5.337.845.193,94	16.144.935.270,34
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.112.571,43	234.480.800,00	227.467.901,43	57.125.470,00
8	DINAS SOSIAL	4.703.973.261,62	1.958.700.583,07	917.695.765,90	5.744.978.078,79
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.012.961.454,52	333.879.454,00	481.547.451,20	4.865.293.457,32
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU	1.293.739.233,11	0,00	117.993.360,65	1.175.745.872,46

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	29.689.025.365,33	896.090.000,00	1.233.996.190,50	29.351.119.174,83
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.070.636.073,48	5.663.881.697,10	2.424.039.567,37	18.310.478.203,21
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.682.423.809,07	563.500.000,00	273.018.224,12	2.972.905.584,95
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.331.628.490,20	696.815.000,00	435.509.923,94	3.592.933.566,26
15	DINAS PERHUBUNGAN	100.239.788.675,55	20.077.733.203,44	16.634.456.628,52	103.683.065.250,47
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.569.754.428,94	434.753.813,00	802.132.276,17	2.202.375.965,77
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.301.927.489,51	3.071.234.200,00	3.094.609.802,36	3.278.551.887,15
18	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	41.811.908.737,23	8.060.419.958,37	1.896.135.344,33	47.976.193.351,27
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.684.105.789,02	588.599.080,00	720.272.422,84	10.552.432.446,18
20	DINAS PERIKANAN	12.456.828.479,89	437.902.000,00	403.569.907,33	12.491.160.572,56
21	DINAS PERDAGANGAN	23.813.447.481,58	3.800.323.739,68	952.164.132,07	26.661.607.089,19
22	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DA	4.134.185.354,57	0,00	989.080.989,90	3.145.104.364,67
23	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	131.789.270.855,29	9.706.566.622,00	5.828.383.189,60	135.667.454.287,69
24	SEKRETARIAT DPRD	19.412.486.388,33	410.797.300,00	803.812.346,91	19.019.471.341,42
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.852.673.315,54	447.067.194,00	700.599.972,99	6.599.140.536,55
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.776.447.490,82	1.678.869.091,00	984.996.699,76	8.470.319.882,06

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.859.336.441,38	1.869.494.060,00	2.081.325.231,96	7.647.505.269,42
28	PPKD	66.291.070.165,82	1.978.883.746,16	2.742.144.791,85	65.527.809.120,13
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.711.171.281,38	0,00	231.581.869,46	3.479.589.411,92
30	INSPEKTORAT	5.076.876.251,44	1.406.201.850,00	1.168.394.743,02	5.314.683.358,42
31	KECAMATAN DUMAI BARAT	11.471.156.986,06	728.914.745,00	735.364.219,74	11.464.707.511,32
32	KECAMATAN DUMAI TIMUR	11.405.840.957,61	636.607.476,00	828.228.965,82	11.214.219.467,79
33	KECAMATAN DUMAI SELATAN	14.343.496.661,43	732.913.463,00	825.301.091,04	14.251.109.033,39
34	KECAMATAN DUMAI KOTA	6.335.657.763,85	1.234.705.000,00	1.340.180.882,72	6.230.181.881,13
35	KECAMATAN BUKIT KAPUR	10.220.024.171,78	1.258.513.800,00	822.759.102,36	10.655.778.869,42
36	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	6.865.776.314,66	580.505.000,00	619.072.769,14	6.827.208.545,52
37	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	8.576.126.694,72	1.187.740.062,00	720.794.506,07	9.043.072.250,65
Jumlah		2.679.041.994.881,43	329.334.546.676,94	238.877.969.128,84	2.769.498.572.429,53

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,



LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	661.486.214.865,96	6.874.856.129,33	4.491.323.791,87	663.869.747.203,42
2	Peralatan dan Mesin	776.533.030.032,11	90.682.733.085,23	20.115.586.578,93	847.100.176.538,41
3	Gedung dan Bangunan	1.014.947.165.081,88	91.597.095.683,13	25.063.354.657,44	1.081.480.906.107,57
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.390.039.096.680,91	72.905.348.444,70	5.621.107.249,71	2.457.323.337.875,90
5	Aset Tetap Lainnya	56.223.639.963,74	3.829.913.144,00	248.025.833,30	59.805.527.274,44
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	217.661.117.431,33	63.444.600.190,54	21.486.628.814,00	259.619.088.807,87
7	Akumulasi Penyusutan	(2.437.848.269.174,51)	(194.061.078.977,86)	32.209.136.774,29	(2.599.700.211.378,08)
Jumlah		2.679.041.994.881,42	135.273.467.699,07	109.235.163.699,54	2.769.498.572.429,53

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,



LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
 PER 31 DESEMBER 2022

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERKURANG				BERTAMBAH					
			Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Pendidikan	10.336.821.563,33		9.584.000,00				440.429.821,00				10.767.667.384,33
2	Dinas Kesehatan	158.207.761,00										158.207.761,00
3	RSUD	19.209.954.807,00		19.209.954.807,00								-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.130.776.240,00		3.889.386.170,00				56.723.014.698,00	6.718.313.734,54	586.963.550,00		244.269.682.052,54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	290.679.500,00							348.354.450,00			639.033.950,00
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,00										47.500.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00										288.685.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00										49.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	543.274.000,00						99.900.000,00	199.811.100,00			842.985.100,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00										49.830.000,00
11	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	170.394.560,00		49.885.000,00				49.894.000,00				170.403.560,00
12	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00										1.561.475.000,00
13	Sekretariat Daerah	147.970.000,00										147.970.000,00
14	Sekretariat Dewan	626.149.000,00										626.149.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00		49.900.000,00								-
	TOTAL	217.661.117.431,33	-	23.208.709.977,00	-	-	-	57.313.238.519,00	7.266.479.284,54	586.963.550,00	-	259.619.088.807,87

Dumai, 29 Agustus 2023
 Wali Kota Dumai,

 PAISAL

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	143.544.868,75	24.900.043,75	128.155.125,00	40.289.787,50
2	DINAS KESEHATAN	184.196.910,00	2.197.828.800,00	2.251.088.210,00	130.937.500,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	541.109.470,00	126.806.730,00	305.380.200,00	362.536.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00			0,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.248.000,00	21.946.546,00	22.090.546,00	4.104.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.562.500,00		4.375.000,00	2.187.500,00
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS TENAGA KERJA	43.725.000,00		17.490.000,00	26.235.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	60.416.666,67		4.166.666,66	56.250.000,01

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.002.709.106,72	4.889.391.748,29	12.106.668.842,20	1.785.432.012,81
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45.259.375,00	106.560.000,00	39.571.250,00	112.248.125,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.662.500,00	2.561.903.309,00	2.529.602.209,00	50.963.600,00
18	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.697.287,50	0,00	0,00	7.697.287,50
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	68.064.768,75	0,00	45.376.512,50	22.688.256,25
20	DINAS PERIKANAN	490.983.080,00	0,00	17.404.960,00	473.578.120,00
21	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SEKRETARIAT DPRD	77.933.500,00		2.251.000,00	75.682.500,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.056.250,00	0,00	6.056.250,00	0,00
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PPKD	9.946.186.349,07	32.647.807.078,27	0,00	42.593.993.427,34

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN DUMAI BARAT	19.148.380,00	0,00	537.560,00	18.610.820,00
32	KECAMATAN DUMAI TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KECAMATAN DUMAI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
34	KECAMATAN DUMAI KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN BUKIT KAPUR	0,00	0,00	0,00	0,00
36	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
37	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	1.848.571,44		1.848.571,44	0,00
Jumlah		20.668.352.583,88	42.591.144.255,31	17.496.062.902,80	45.763.433.936,39

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,



LAMPIRAN XVI
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
: 5 Tahun 2023
: 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,



PAISAL

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

**PEMERINTAH KOTA DUMAI
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 PER 31 DESEMBER 2022**

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.783.762,00	26.497.308,51	1.783.762,00	26.497.308,51
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	168.578.067,00	167.199.481,00	40.492.648,00	295.284.900,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	1.049.253.734,31	1.256.671.333,35	919.584.934,31	1.386.340.133,35
4	Utang Belanja	110.527.089.088,00	1.147.533.431,00	71.211.119.238,00	40.463.503.281,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.380.372.298,00	0,00	2.533.864.068,00	846.508.230,00
Jumlah		115.127.076.949,31	2.597.901.553,86	73.744.983.306,00	43.018.133.852,86

Dumai, 29 Agustus 2023
 Wali Kota Dumai,

 PAISAL

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2022

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	94.060.540.965,89	18.000.000.000,00	76.060.540.965,89
Jumlah					76.060.540.965,89

Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,



LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

Dumai, 29 Agustus 2023
Wali Kota Dumai,

PAISAL

LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan/ Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18
1	Bidang Pelabuhan																	
	PT. Pelabuhan Dumai Berseri			10.347.343.000,00	414.920.133,00	0,00	10.762.263.133,00	6.043.903.400,00	0,00	6.043.903.400,00	8.217.600.000,00	0,00	8.217.600.000,00	0,00	(3.499.240.267,00)	4.718.359.733,00	99,95	4.716.000.553,13
2	Bidang Jasa Lainnya																	
	PT. Pembangunan Dumai			3.435.902.367,00	18.984.229.398,00	0,00	22.420.131.765,00	2.439.178.443,00	5.237.787.291,00	7.676.965.734,00	31.182.264.000,00	0,00	31.182.264.000,00	(2.310.071.139,00)	(14.129.026.832,00)	14.743.166.029,00	99,97	14.738.743.079,19
3	Bidang Jasa Lainnya																	
	PDAM Tirta Dumai Bersemai			6.029.193.365,00	19.983.929.300,00	0,00	26.013.122.665,00	4.982.343.111,00	0,00	4.982.343.111,00	53.303.392.000,00	10.320.520.000,00	63.623.912.000,00	0,00	(42.593.132.446,00)	21.030.779.554,00	100,00	21.030.779.554,00
	Jumlah		0,00	19.812.438.732,00	39.383.078.829,00	0,00	59.195.517.561,00	13.465.424.954,00	5.237.787.291,00	18.703.212.245,00	92.703.256.000,00	10.320.520.000,00	103.023.776.000,00	(2.310.071.139,00)	(60.221.399.545,00)	40.492.305.316,00	0,00	40.485.523.186,32



Dumai, 29 Agustus 2023
 Wali Kota Dumai,

PAISAL

LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 5 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Agustus 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Pelabuhan								
	PT. Pelabuhan Dumai Berseri			48.795.125.639,00	46.774.263.243,00	2.020.862.396,00	374.632.384,00	862.351.979,00	1.533.142.801,00
2	Bidang Jasa Lainnya								
	PT. Pembangunan Dumai			795.000.000,00	3.789.539.877,00	(2.994.539.877,00)	0,00	0,00	(2.994.539.877,00)
3	Bidang Jasa Lainnya								
	PDAM Tirta Dumai Bersemai			16.476.049.342,00	13.968.688.732,00	2.507.360.610,00	4.967.093,00	1.472.987,00	2.510.854.716,00
	Jumlah	0,00		66.066.174.981,00	64.532.491.852,00	1.533.683.129,00	379.599.477,00	863.824.966,00	1.049.457.640,00



Dumai, 29 Agustus 2023

Wali Kota Dumai,

PAISAL